



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
 - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. bab VI yang memuat penutup.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Juli 2025

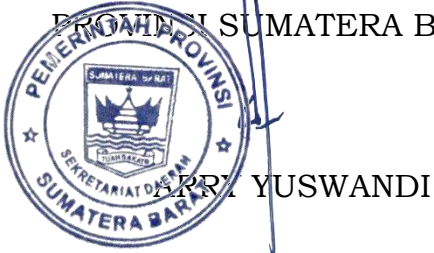
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Governor of West Sumatra, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. To the right of the signature, the name "MAHYELDI" is printed in blue capital letters.

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

The image shows the official circular stamp of the Provincial Secretariat of West Sumatra, featuring a shield emblem with a ship and the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT" and "SEKRETARIAT DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "PRY YUSWANDI" is printed in blue capital letters.

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM	I-7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-10
1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-10
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD	I-12
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II-1
2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II-1
2.2. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TAHUN 2025 HINGGA TRIWULAN I.....	II-18
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025.....	II-468
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-468
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-468
2.3.1.1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	II-469
2.3.1.2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	II-472
2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.....	II-476
2.3.1.4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital.....	II-483
2.3.1.5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan	II-487
2.3.1.6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	II-490

2.3.1.7.	Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	II-497
2.3.2.	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah . II-	503
2.4.	EVALUASI TERHADAP CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	II-542
2.4.1.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Tahun Berjalan 2025 Hingga Triwulan I Di Sumatera Barat.....	II-542
2.4.2.	Permasalahan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Tahun Berjalan 2025 Hingga Triwulan I Di Sumatera Barat.....	598
2.5.	CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	610
2.5.1.	Standar Pelayanan Bidang Pendidikan.....	611
2.5.2.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....	613
2.5.3.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum.....	616
2.5.4.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.....	618
2.5.5.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	619
2.5.6.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.....	621
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	ARAH KEBIJAKAN KERANGKA EKONOMI	III-1
3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-9
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-12
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-15
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025.....	IV-2
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-2
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025	IV-4
4.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	IV-9

4.2.1.	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-10
4.2.2.	Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Serta Belanja Bersifat Mengikat Tahun 2025.....	IV-11
4.2.3.	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025	IV-20
4.2.4.	Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat.....	IV-77
4.2.4.1.	Prioritas Pembangunan 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	IV-77
4.2.4.2.	Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	IV-80
4.2.4.3.	Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	IV-81
4.2.4.4.	Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.....	IV-84
4.2.4.5.	Prioritas Pembangunan 5 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.....	IV-86
4.2.4.6.	Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	IV-88
4.2.4.7.	Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	IV-91
4.2.4.8.	Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	IV-93
4.3.	PENYELARASAN DAN DUKUNGAN RKPD PROVINSI TERHADAP RKP TAHUN 2025 IV-95	
4.3.1.	Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-97
4.3.2.	Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.....	IV-159
4.3.3.	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas,Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	IV-333

4.3.4. Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	IV-371
4.3.5. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-477
4.3.6. Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	IV-490
4.3.7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	IV-526
4.3.8. Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	IV-556
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan I Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 (Persen)	II-3
Tabel 2.3. Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)	II-4
Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran (Persen)	II-5
Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota	II-6
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-7
Tabel 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....	II-9
Tabel 2.8. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025	II-10
Tabel 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025	II-13
Tabel 2.10. Gini Ratio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-14
Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021-2024 (Persen)	II-16
Tabel 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-18
Tabel 2.13. Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	II-19
Tabel 2.14. Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025	II-468
Tabel 2.15. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing pada Triwulan I Tahun 2025	II-469
Tabel 2.16. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Triwulan I Tahun 2024	II-472

Tabel 2.17. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Pada Triwulan I Tahun 2025	II-477
Tabel 2.18. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Pada Triwulan I Tahun 2025	II-484
Tabel 2.19. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata Pada Triwulan I Tahun 2025	II-487
Tabel 2.20. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Pada Triwulan I Tahun 2025	II-490
Tabel 2.21. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pada Triwulan I Tahun 2025	II-498
Tabel 2.22. Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Pada Triwulan I Tahun 2025	II-543
Tabel 2.23. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-611
Tabel 2.24. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-613
Tabel 2.25. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II-616
Tabel 2.26. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II-618
Tabel 2.27. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-619
Tabel 2.28. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Sosial Tahun 2024	II-621
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	III-8
Tabel 3.2. Proyeksi Target Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (juta rupiah)	III-11
Tabel 3.3. Proyeksi Target Perubahan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-14

Tabel 3.4. Proyeksi Target Perubahan Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (dalam Rp. Ribu)	III-16
Tabel 4.1. Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-4
Tabel 4.3. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	IV-8
Tabel 4.4. Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.5. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025	IV-21
Tabel 4.6. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025	IV-23
Tabel 4.7. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025	IV-29
Tabel 4.8. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.9. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025	IV-37
Tabel 4.10. Program Pembangunan mendukung Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025	IV-39
Tabel 4.11. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025	IV-46
Tabel 4.12. Program Pembangunan mendukung Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025	IV-48
Tabel 4.13. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025	IV-52
Tabel 4.14. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.15. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025	IV-60

Tabel 4.16. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025	IV-62
Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025	IV-66
Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025	IV-67
Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025	IV-70
Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025	IV-72
Tabel 4.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2025	IV-96
Tabel 4.20. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-98
Tabel 4.21. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-98
Tabel 4.22. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	IV-159
Tabel 4.23. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	IV-162
Tabel 4.24. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	IV-333
Tabel 4.25. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	IV-335
Tabel 4.26. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	IV-372

Tabel 4.27. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	IV-374
Tabel 4.28. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-477
Tabel 4.29. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 5. proses Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-478
Tabel 4.30. Sasaran Pembangunan Dan Target Pada RKP Dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	IV-490
Tabel 4.31. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	IV-491
Tabel 4.32. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	IV-526
Tabel 4.33. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	IV-527
Tabel 4.34. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	IV-556
Tabel 4.35. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	IV-557
Tabel 2.1. Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan I Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 (Persen)	II-3
Tabel 2.3. Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)	II-4

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran (Persen)	II-5
Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota	II-6
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-7
Tabel 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-9
Tabel 2.8. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025	II-10
Tabel 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025	II-13
Tabel 2.10. Gini Ratio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-14
Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021-2024 (Persen)	II-16
Tabel 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....	II-18
Tabel 2.13. Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	II-19
Tabel 2.14. Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025	II-468
Tabel 2.15. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing pada Triwulan I Tahun 2025	II-469
Tabel 2.16. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Triwulan I Tahun 2024	II-472
Tabel 2.17. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Pada Triwulan I Tahun 2025	II-477
Tabel 2.18. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Pada Triwulan I Tahun 2025	II-484
Tabel 2.19. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataaan Pada Triwulan I Tahun 2025	II-487

Tabel 2.20. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Pada Triwulan I Tahun 2025	II-490
Tabel 2.21. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pada Triwulan I Tahun 2025	II-498
Tabel 2.22. Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Pada Triwulan I Tahun 2025	II-543
Tabel 2.23. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pendidikan Tahun 2024	II-611
Tabel 2.24. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-613
Tabel 2.25. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	II-616
Tabel 2.26. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	II-618
Tabel 2.27. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	II-619
Tabel 2.28. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Sosial Tahun 2024	II-621
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	III-8
Tabel 3.2. Proyeksi Target Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (juta rupiah)	III-11
Tabel 3.3. Proyeksi Target Perubahan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	III-14
Tabel 3.4. Proyeksi Target Perubahan Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (dalam Rp. Ribu)	III-16
Tabel 4.1. Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025	IV-3
Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-4
Tabel 4.3. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	IV-8
Tabel 4.4. Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025	IV-13

Tabel 4.5. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025	IV-21
Tabel 4.6. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025	IV-23
Tabel 4.7. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025	IV-29
Tabel 4.8. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.9. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025	IV-37
Tabel 4.10. Program Pembangunan mendukung Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025	IV-39
Tabel 4.11. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025	IV-46
Tabel 4.12. Program Pembangunan mendukung Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025	IV-48
Tabel 4.13. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025	IV-52
Tabel 4.14. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.15. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025	IV-60
Tabel 4.16. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025	IV-62
Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025	IV-66
Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025	IV-67
Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025	IV-70

Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025	IV-72
Tabel 4.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2025	IV-96
Tabel 4.20. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-98
Tabel 4.21. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	IV-98
Tabel 4.22. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	IV-159
Tabel 4.23. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	IV-162
Tabel 4.24. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	IV-333
Tabel 4.25. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	IV-335
Tabel 4.26. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	IV-372
Tabel 4.27. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	IV-374
Tabel 4.28. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-477
Tabel 4.29. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 5. proses Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	IV-478

Tabel 4.30. Sasaran Pembangunan Dan Target Pada RKP Dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan IV-490

Tabel 4.31. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan IV-491

Tabel 4.32. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba IV-526

Tabel 4.33. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba IV-527

Tabel 4.34. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur IV-556

Tabel 4.35. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur IV-557

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat pad beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) Tahun 2022–2024	II-3
Gambar 2.2. Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2021-2024	II-7
Gambar 2.3. Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2025	II-11
Gambar 2.4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025	II-12
Gambar 2.5. Garis Kemiskinan Sumatera Barat 2021-2024	II-15
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2023-2025	III-2
Gambar 3.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (y-o-y)	III-3
Gambar 3.3. Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (y-o-y)	III-4
Gambar 3.4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025	III-5
Gambar 3.5. Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2025	III-6
Gambar 3.6. Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025	III-7
Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025	III-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

APBD Tahun 2025 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dsengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPD Tahun 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 dengan *timeline* yakni :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dimulai pada Minggu I Bulan April 2025 dengan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
2. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 pada Minggu III Bulan Mei Tahun 2025.
3. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD dilaksanakan pada Minggu I Bulan Juni Tahun 2025.
4. Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2025 oleh Kepala Daerah ke DPRD pada Minggu I Bulan Juli Tahun 2025.

Sedangkan substansi Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun 2025 diminta telah agar mengakomodir penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap:

1. Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Prioritas Nasional yang termuat dalam Astacita yakni Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pengendalian inflasi di daerah, Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan Dukungan swasembada pangan serta pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta perubahan RKPD juga dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2025 dilakukan dengan alasan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah
Berdasarkan capaian tahun 2024 serta memperhatikan capaian perkembangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, maka terdapat beberapa target yang perlu dilakukan penyesuaian, hal ini untuk menjaga agar pelaksanaan dan hasil pembangunan dapat berkualitas.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
Beberapa capaian indikator makro kinerja pembangunan Daerah pada tahun 2024 yang dirilis oleh BPS akan merubah asumsi target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah
Antara lain yakni capaian SILPA Tahun 2024 dan Pendapatan Asli Daerah yang di proyeksikan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBD 2025. Selain perubahan proyeksi Tahun Anggaran 2025, juga terdapat utang jangka pendek atau tunda bayar Belanja pada Tahun Anggaran 2024 yang diakibatkan tidak tersedianya kas pada akhir tahun anggaran 2024 yang diakibatkan tidak terpenuhinya realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terdapat

kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum diproses pembiayaannya antara lain Belanja yang terkait dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2024, Gagal Salur DAK SMK, Belum bayar Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota pada Triwulan III Tahun 2024 serta pekerjaan yang telah selesai 100% namun belum diproses pembayarannya.

Selain itu juga terdapat kebijakan efisiensi APBD Tahun 2025 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan adanya efisiensi Belanja dan Penyesuaian Pendapatan dalam APBD Tahun 2025 yang diakomodir pada Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan

Berdasarkan hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 Triwulan I masih terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya masih rendah dan diprediksikan tidak dapat tercapai secara maksimal hingga akhir tahun yang salah sebagian besar diakibatkan adanya efisiensi anggaran serta diprediksi tidak terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah hingga akhir tahun 2025, serta terdapat beberapa sub kegiatan baru yang harus diakomodir untuk membiayai proses pembayaran bagi kegiatan yang mengalami Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024. Terhadap hal tersebut maka perlu disesuaikan kembali asumsi rencana yang telah disusun agar pada akhir tahun seluruh target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan efektif serta efisien.

Selain itu, guna mengakomodir Visi dan Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2025-2030 maka terdapat belanja yang belum direncanakan pada RKPD Tahun 2025 dan belum dianggarkan pada APBD Tahun 2025, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian anggaran antar sub kegiatan kembali.

5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Berdasarkan data prognosis SILPA Tahun Anggaran 2024 bahwa terdapat selisih SILPA dari yang diproyeksikan pada APBD 2024, sehingga terhadap hal ini perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD 2025.

Pada APBD Tahun 2025, diproyeksikan SILPA Tahun 2024 yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 194.918.000.000 namun berdasarkan prognosis maka SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 280.346.406.000, sehingga terdapat selisih tambahan sebesar Rp. 85.428.406.000 sehingga tentunya SILPA ini akan digunakan kembali terutama untuk menutupi utang jangka pendek serta dampak dari dilakukannya efisiensi APBD akibat beberapa kebijakan nasional.

6. Adanya kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada akhir tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa Kebijakan Nasional yang ditetapkan sehingga belu diakomodir pada Perubahan APBD Tahun 2024 serta setelah penetapan RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025, terdapat beberapa kebijakan nasional, kebijakan pemerintah daerah, keadaan darurat dan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan, yang keluar dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada terjadinya perubahan asumsi rencana pelaksanaan kegiatan dan keuangan daerah, antara lain yakni :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tanggal 16 November 2025 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah yang mengamankan penambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tanggal 29 Desember 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 bahwa terdapat pemutakhiran data dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan

puskesmas dan data dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025 sehingga perlu menetapkan perubahan atas rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 berupa bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian.

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menegaskan bahwa dilakukannya Efisiensi Anggaran Belanja pada masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Efisiensi Belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 3 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pencadangan transfer ke daerah.
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun 2025 yang difokuskan pada pembatasan belanja yang bersifat pendukung, pengurangan belanja perjalanan dinas, pembatasan belanja honorarium, pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam memberikan

hibah kepada Kementerian/Lembaga serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 20025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sehingga arah kebijakan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil prognosis laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada APBD Tahun 2024 seperti pembayaran utang jangka pendek, dan tunda bayar pelaksanaan kegiatan yang telah selesai 100%
5. Pengurangan dan realokasi anggaran sesuai kebijakan nasional
6. Megakomodir Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta mengakomodir Asta Cita
7. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal, termasuk perubahan perubahan asumsi dasar ekonomi, kebijakan nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, serta kondisi fiskal daerah. Perubahan ini disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Penjabaran sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2025.
3. Pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
5. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026. Penyusunan dokumen ini tetap berlandaskan pada prinsip konsistensi, keterpaduan, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Secara substantif, perubahan RKPD ini mengakomodasi perkembangan kondisi makro, capaian kinerja pembangunan daerah tahun berjalan, serta respons terhadap dinamika nasional dan global, termasuk perubahan arah kebijakan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan penyesuaian awal terhadap fokus prioritas RPJMN 2025–2029. Hal ini penting mengingat Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan nasional dan

tahapan awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional yang baru, sehingga dokumen perubahan RKPD juga harus mampu menjembatani perubahan arah kebijakan tersebut di tingkat daerah.

RKPD juga memiliki keterkaitan erat dengan Renstra dan Renja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perubahan RKPD ini menjadi landasan dalam penyusunan dokumen penganggaran seperti Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, RKPD berperan sebagai dokumen penghubung yang menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran daerah berjalan selaras dan berorientasi pada hasil yang terukur.

Di sisi lain, hubungan antara RKPD Provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan perubahan ini. Integrasi dan harmonisasi perencanaan lintas wilayah terus didorong untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kawasan strategis, memperkecil kesenjangan antardaerah, serta meningkatkan daya saing wilayah secara menyeluruh, termasuk melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian target-target program unggulan daerah. Dengan demikian, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tidak hanya menjadi penyesuaian teknokratik atas dinamika tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi perencanaan jangka pendek dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdiri dari:

BAB. I. Pendahuluan;

Memuat/menjelaskan latar belakang, arah kebijakan, dasar hukum, maksud dan tujuan serta dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD serta menjelaskan sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB. II. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;

Memuat evaluasi terhadap capaian hingga triwulan I tahun 2025 meliputi indikator makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2021-2026

serta menyajikan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB. III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Memuat perubahan proyeksi target beberapa indikator makro Pembangunan hingga akhir tahun 2025 serta menyajikan asumsi perubahan proyeksi keunnagan daerah hingga akhir tahun 2025.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi serta priortas pembangunan daerah tahun 2025.

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2025, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer.

BAB VI. Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan pada pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 14 Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah dimulai pada Minggu I April 2025 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat pada Minggu II Mei 2025.

Sehingga atas dasar hal tersebut maka evaluasi dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 dan bila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025, sekaligus untuk mengakomodir Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2030 serta Prioritas Nasional yang termuat dalam Astacita di RPJMN Tahun 2025-2029.

2.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator Kinerja Makro merupakan indikator gabungan dari berbagai indikator kinerja pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita, Indeks Gini, Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat. Indikator ini merupakan penterjemahan secara kualitatif terhadap terhadap capaian pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Adapun capaian indikator makro pembangunan Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

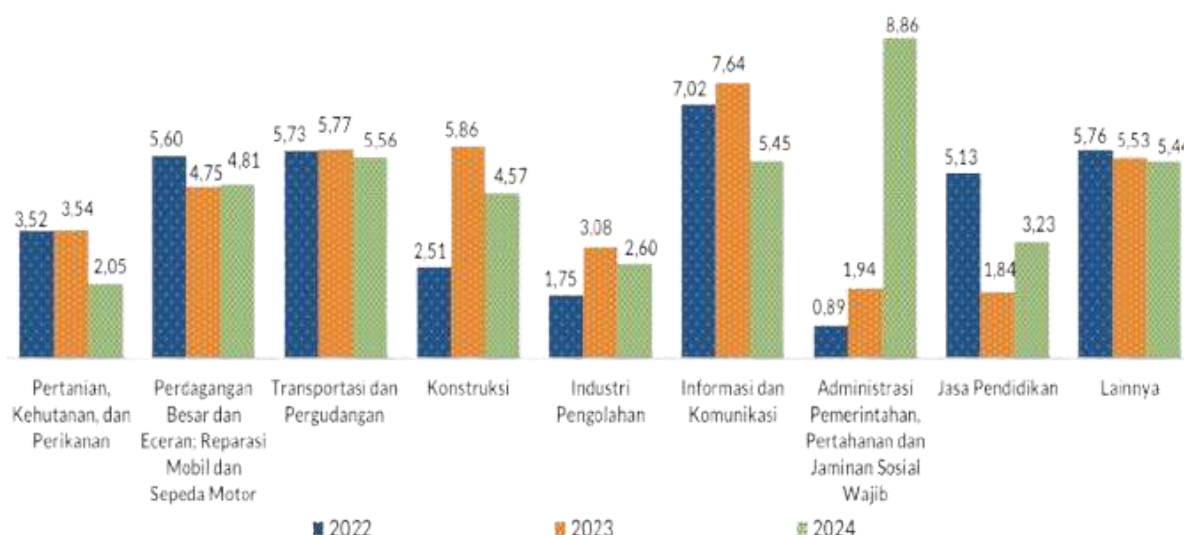
Tabel 2.1. Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET 2025		REALISASI 2025 TRIWULAN I
		RPJMD	RKPD	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	5,05	4,36 (2024)
2	PDRB ADHK per Kapita (Rp. Juta)	35,44	36,10	34,16 (2024)
3	PDRB ADHB per kapita (Rp. Juta)	56,13	62,29	56,29 (2024)
4	Indeks Gini (Ratio)	0,289	0,289	0,283 (2024)
5	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,307	0,307	0,307 (2024)
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,90	5,65	5,97 (2024)
7	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	347,27	330,84	
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,13	5,55	5,75 (2024)
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,07	77,41	76,43 (2024)
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,35	74,79	70,33 (2024)
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,09	14,13	14,30 (2024)
	c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	9,47	9,44 (2024)
	d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	11.592	11.719	11.718 (2024)

Sumber: Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Pergub No 13 Tahun 2024 tentang RKPD 2025 dan Publikasi BPS Sumatera Barat

Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh BPS bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi masih menggunakan capaian akhir Tahun 2024. Pada Triwulan IV Tahun 2024 bahwa Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,36 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,86 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 7,27 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,06 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,05 persen, kemudian Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,81 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 5,56 persen.

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat pad beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen) Tahun 2022–2024



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang realtif stabil dan berdayatahan meskipun terdapat fluktuasi antar lapangan usaha, dengan pertumbuhan 4,36% (yoy) pada tahun 2024. Laju pertumbuhan lapangan usaha secara umum melambat dan kembali ke pola pertumbuhan yang lebih moderat setelah lonjakan pasca pandemi.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	3,52	3,54	2,05
Pertambangan dan Penggalian	-1,77	1,94	4,65	3,97
Industri Pengolahan	3,72	1,75	3,09	2,60
Pengadaan Listrik & Gas	3,15	3,21	4,16	4,40
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,53	4,37	2,29	3,66
Konstruksi	2,18	2,51	5,86	4,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	5,60	4,75	4,81
Transportasi dan Pergudangan	2,54	5,73	5,77	5,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	15,79	7,71	5,37
Informasi dan Komunikasi	6,42	7,02	7,64	5,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	4,54	2,78	6,06
Real Estate	2,41	5,78	6,32	5,87
Jasa Perusahaan	1,13	7,33	6,88	4,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	0,89	1,94	8,86
Jasa Pendidikan	1,83	5,13	1,84	3,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	4,54	7,29	5,60
Jasa Lainnya	7,10	11,88	8,06	7,27
PDRB SUMATERA BARAT	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Struktur ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan konsistensi pada kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB, meskipun terdapat dinamika pada lapangan usaha yang lebih kecil yang mencerminkan dinamika perekonomian. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dominan dengan kontribusi sekitar 21%. Kontribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran secara konsisten meningkat sepanjang periode dengan kontribusi 16,60% pada tahun 2024. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar, masing-masing 11,11% dan 10,08%. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertambangan mengalami penurunan sepanjang periode. Salah satu faktor penyebab penurunan kontribusi sektor industri pengolahan di Sumatera Barat adalah rendahnya daya saing dan investasi.

Tabel 2.3. Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 (%)

LAPANGAN USAHA	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	21,69	21,20	21,04	21,37
Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,09	4,08	3,88
Industri Pengolahan	8,79	8,54	8,41	8,37
Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,10	0,09	0,09
Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	10,18	10,06	10,15	10,08
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	16,50	16,55	16,60
Transportasi dan Pergudangan	10,29	10,88	11,30	11,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,35	1,37	1,37
Informasi dan Komunikasi	6,61	6,68	6,72	6,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	3,23	3,08	3,08
Real Estate	2,04	2,02	2,08	2,09
Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,44	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,89	6,52	6,33	6,47
Jasa Pendidikan	4,65	4,62	4,48	4,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,69	1,65	1,70	1,72
Jasa Lainnya	1,95	2,05	2,11	2,16
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari sisi pengeluaran berdasarkan distribusi PDRB, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meskipun mengalami penurunan kontribusi menjadi 51,98% pada tahun 2024. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan kontribusi secara konsisten sejalan dengan terbatasnya belanja pemerintah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan penurunan kontribusi sepanjang periode 2021-2024.

Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,66% (yoy). PMTB menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 mencapai 7,71% (yoy) dan menurun sebesar 3.56% (yoy) di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 beberapa proyek infrastruktur besar di Sumatera Barat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan PMTB, terutama pembangunan infrastruktur transportasi yakni, berlanjutnya proyek jalan tol Padang-Sicincin dan pembangunan Bandara Rokot Mentawai. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah realtif terbatas bahkan setelah kontraksi pada tahun 2022 (-3,15% yoy) pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya sebesar 0,44% dan 1,44% (yoy). Di sisi lain, ekspor luar negeri Sumatera Barat menunjukkan kontraksi sepanjang 2022 hingga 2024 yang disebabkan salah satunya oleh penurunan produksi dan harga acuan karet.

Tabel 2.4. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	LAJU PERTUMBUHAN ADHK 2010				DISTRIBUSI ADHB			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.97	4.12	3.22	3.66	53.80	53.32	52.09	51.98
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.79	-0.53	6.79	5.61	1.10	1.03	1.04	1.06
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.45	-3.15	0.44	1.44	11.63	10.20	9.39	9.23
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1.17	3.79	7.71	3.56	30.07	29.37	29.58	29.38
Perubahan Inventori	-	-	-	-	0.14	0.30	-0.27	-0.09
Ekspor	58.45	-7.99	-19.18	-17.56	17.64	15.17	11.80	10.66
Impor	60.20	-2.68	-10.62	26.47	2.54	3.31	2.18	2.49
Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-11.86	-6.07	-1.44	0.28
PDRB Sumatera Barat	3.29	4.36	4.62	4.36	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan pemulihan hingga tahun 2023. Namun, memasuki tahun 2024, sebagian besar daerah mengalami perlambatan ekonomi, yang tercermin dari penurunan laju pertumbuhan di hampir semua kabupaten/kota. Di sisi lain, Kota Padang tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang akseleratif sepanjang periode 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang berhasil mengatasi tantangan ekonomi melalui dukungan lapangan usaha non-tradisional, seperti lapangan usaha perdagangan besar, lapangan usaha transportasi, lapangan usaha industri pengolahan, dan jasa-jasa.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota

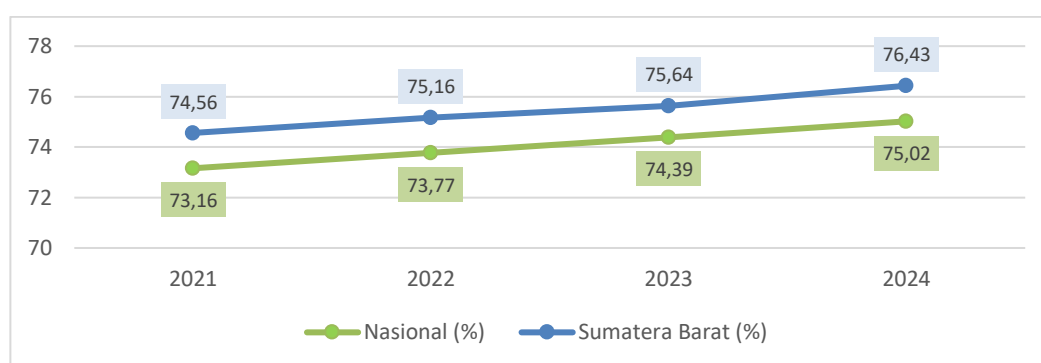
KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	2,87	4,94	4,04	3,97
Kab. Pesisir Selatan	3,35	4,01	4,19	3,84
Kab. Solok	3,28	4,28	4,36	3,91
Kab. Sijunjung	3,14	3,93	4,26	3,89
Kab. Tanah Datar	3,27	4,16	4,44	3,85
Kab. Padang Pariaman	2,15	6,83	5,46	4,57
Kab. Agam	3,70	4,21	4,52	4,12
Kab. Lima Puluh Kota	3,33	4,02	4,55	4,03
Kab. Pasaman	3,35	4,08	4,41	3,95
Kab. Solok Selatan	3,32	4,01	4,57	4,09
Kab. Dharmasraya	3,40	4,27	4,35	3,86
Kab. Pasaman Barat	3,71	4,13	4,33	4,08
Kota Padang	3,65	4,31	4,54	4,65
Kota Solok	3,55	4,60	4,81	4,55
Kota Sawahlunto	2,48	3,96	4,46	4,02
Kota Padang Panjang	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	3,61	4,67	4,79	4,52
Kota Payakumbuh	3,58	4,51	4,70	4,53
Kota Pariaman	3,51	4,53	4,79	4,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan I tahun 2025 tidak tersedia di BPS, hal ini dikarenakan pengukuran capaian IPM hanya menggunakan periode tahunan, sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. BPS melakukan pengukuran metode baru dalam pengukuran IPM sejak Tahun 2023 serta sekaligus merevisi capaian IPM tahun 2020.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2024 terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan Indikator IPM Provinsi Sumatera Barat pun juga menunjukan hasil menggembirakan jika disandingkan dengan capaian Nasional, dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun diatas rata-rata nasional. Perbandingan IPM Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.2. Perbandingan IPM Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengalami kenaikan yang konsisten dari 69,59 tahun pada 2021 menjadi 70,33 tahun pada 2024. Hal tersebut mencerminkan perbaikan dalam sektor kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang meningkat dari 9,07 tahun menjadi 9,44 tahun selama periode yang sama mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk di Sumatera Barat. Selain itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga meningkat yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, IPM Sumatera Barat naik dari 74,56 pada tahun 2021 menjadi 76,43 pada tahun 2024, menunjukkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

NO	KOMPONEN IPM	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69,59	69,90	70,19	70,33
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,10	14,11	14,30
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,44
4.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	10.790	11.130	11.380	11.718
IPM PROV. SUMATERA BARAT			74,56	75,16	75,64	76,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Secara spasial, perkembangan IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Kota Padang merupakan daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat meskipun secara perubahan tergolong rendah. Perubahan IPM Kota Padang dari tahun 2021 ke 2024 sebesar 1,09 poin. Sementara itu, perubahan IPM tertinggi sepanjang 2021-2024 tercatat di Kabupaten Pasaman dengan perubahan sebesar 2,12 poin. Daerah dengan IPM terendah di Sumatera Barat masih tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara umum, IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat tergolong dalam

kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dan tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman yang masih dalam kategori sedang ($60 \leq IPM \leq 70$).

Sebagian besar daerah kabupaten Sumatera Barat tergolong dalam kategori IPM tinggi, dengan Kabupaten Tanah Datar memiliki IPM tertinggi pada tahun 2024 sebesar 74,90. Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatatkan IPM yang lebih rendah mengalami peningkatan yang konsisten dari 61,35 pada tahun 2021 menjadi 63,99 pada tahun 2024. Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan perkembangan IPM yang meningkat secara gradual. Kondisi ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan kualitas kesehatan dan pendidikan. Namun demikian, kesenjangan antara kabupaten di mana Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, perlu pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang lebih mendalam untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Sebagian besar kota di Sumatera Barat tergolong dalam kategori IPM sangat tinggi. Kota Padang mencatatkan IPM tertinggi sebesar 83,99 pada tahun 2024. Kota lainnya seperti Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang juga mengalami kenaikan IPM yang stabil. Kenaikan ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan di Sumatera Barat lebih cepat dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung perbaikan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, kesenjangan antar kota besar seperti Kota Padang dengan kota yang lebih kecil masih cukup besar. Kota Sawahlunto mencatatkan IPM 75,13 pada tahun 2024, relatif tertinggal dibandingkan dengan Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesenjangan antara kota besar dan kota kecil tetap ada. Meski demikian, tren peningkatan IPM ini mencerminkan bahwa kota-kota di Sumatera Barat semakin mengarah pada pembangunan yang inklusif, dengan peningkatan pada sektor pendidikan, ekonomi, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Tabel 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota Se-Sumatera Barat Tahun 2021-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	61,35	62,19	63,13	63,99
2	Kabupaten Pesisir Selatan	70,03	70,84	71,44	72,02
3	Kabupaten Solok	69,24	70,02	70,63	71,02
4	Kabupaten Sijunjung	67,86	68,69	69,65	70,23
5	Kabupaten Tanah Datar	72,46	73,29	73,98	74,90
6	Kabupaten Padang Pariaman	70,76	71,63	72,61	73,10
7	Kabupaten Agam	72,57	73,29	73,98	74,66
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,68	70,28	70,70	71,14
9	Kabupaten Pasaman	66,77	67,41	68,13	68,89

NO	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024
10	Kabupaten Solok Selatan	69,23	69,71	70,58	71,50
11	Kabupaten Dharmasraya	71,76	72,30	73,04	74,06
12	Kabupaten Pasaman Barat	68,76	69,57	70,19	70,93
13	Kota Padang	82,90	83,29	83,58	83,99
14	Kota Solok	78,41	79,23	79,58	80,00
15	Kota Sawahlunto	72,88	73,73	74,42	75,13
16	Kota Padang Panjang	77,97	78,78	79,26	80,17
17	Kota Bukittinggi	80,70	81,42	81,78	82,51
18	Kota Payakumbuh	79,08	79,53	79,97	80,61
19	Kota Pariaman	77,07	77,65	78,13	78,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Februari 2025 sebanyak 4,45 juta orang, naik sebanyak 69,95 ribu orang dibanding Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 3,16 juta orang (70,95 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 2,98 juta orang penduduk yang bekerja dan 179,72 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 71,62 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 70,74 ribu orang dan pengangguran naik sebanyak 0,89 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2025 sebesar 70,95 persen, naik 0,51 persen poin dibanding Februari 2024

Tabel 2.8. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	FEB 2023	FEB 2024	FEB 2025	PERUBAHAN FEB 2023- FEB 2024		PERUBAHAN FEB 2024- FEB 2025	
	RIBU ORANG	RIBU ORANG	RIBU ORANG	RIBU ORANG	PERSEN	RIBU ORANG	PERSEN
Penduduk Usia Kerja	4.287,70	4.381,23	4.451,18	93,53	2,18	69,95	1,60
Angkatan Kerja	2.999,51	3.086,29	3.157,91	86,78	2,89	71,62	2,32
- Bekerja	2.822,53	2.907,45	2.978,19	84,91	3,01	70,73	2,43
- Pengangguran	176,97	178,84	179,73	1,87	1,06	0,89	0,50
Bukan Angkatan Kerja	1.288,19	1.294,94	1.293,27	6,75	0,52	-1,67	-0,13
	Persen	Persen	Persen	Persen Poin		Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,90	5,79	5,69	-0,11		-0,10	
- Perkotaan	8,00	7,55	7,34	-0,45		-0,21	

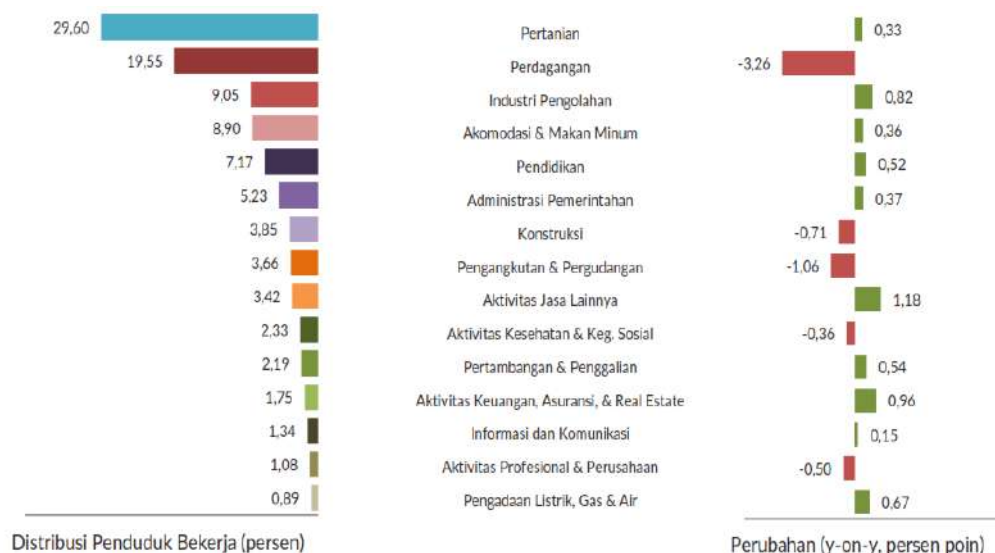
STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	FEB 2023	FEB 2024	FEB 2025	PERUBAHAN FEB 2023- FEB 2024		PERUBAHAN FEB 2024- FEB 2025	
	RIBU ORANG	RIBU ORANG	RIBU ORANG	RIBU ORANG	PERSEN	RIBU ORANG	PERSEN
- Perdesaan	4,01	3,98	3,85	-0,03		-0,13	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,96	70,44	70,95	0,48		0,51	
- Laki-Laki	81,34	83,11	82,06	1,77		-1,05	
- Perempuan	58,52	57,71	59,78	-0,81		2,07	

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2023-Feb 2024		Perubahan Feb 2024-Feb 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	4.287,70	4.381,23	4.451,18	93,53	2,18	69,95	1,60
Angkatan Kerja	2.999,51	3.086,29	3.157,91	86,78	2,89	71,62	2,32
- Bekerja	2.822,54	2.907,45	2.978,19	84,91	3,01	70,73	2,43
- Pengangguran	176,97	178,84	179,73	1,87	1,06	0,89	0,50
Bukan Angkatan Kerja	1.288,19	1.294,94	1.293,27	6,75	0,52	-1,67	-0,13
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,90	5,79	5,69	-0,11		-0,10	
- Perkotaan	8,00	7,55	7,34	-0,45		-0,21	
- Perdesaan	4,01	3,98	3,85	-0,03		-0,13	
Tingkat Partisipasi Angka- tan Kerja (TPAK)	69,96	70,44	70,95	0,48		0,51	
- Laki-Laki	81,34	83,11	82,06	1,77		-1,05	
- Perempuan	58,52	57,71	59,78	-0,81		2,07	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Pertanian yaitu sebesar 29,60 persen; Perdagangan sebesar 19,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,05 persen. Dibandingkan Februari 2024, terjadi pergantian sektor ketiga terbesar yang sebelumnya adalah Akomodasi dan Makan Minum pada Februari 2024, menjadi Sektor Industri Pengolahan pada 2025. Penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2024 adalah Aktivitas Jasa Lainnya (1,18 persen poin); Aktivitas Keuangan, Asuransi dan Real Estate (0,96 persen poin); dan Industri Pengolahan (0,82 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan (3,26 persen poin); Pengangkutan dan Pergudangan (1,06 persen poin); dan Konstruksi (0,71 persen poin).

Gambar 2.3. Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2025



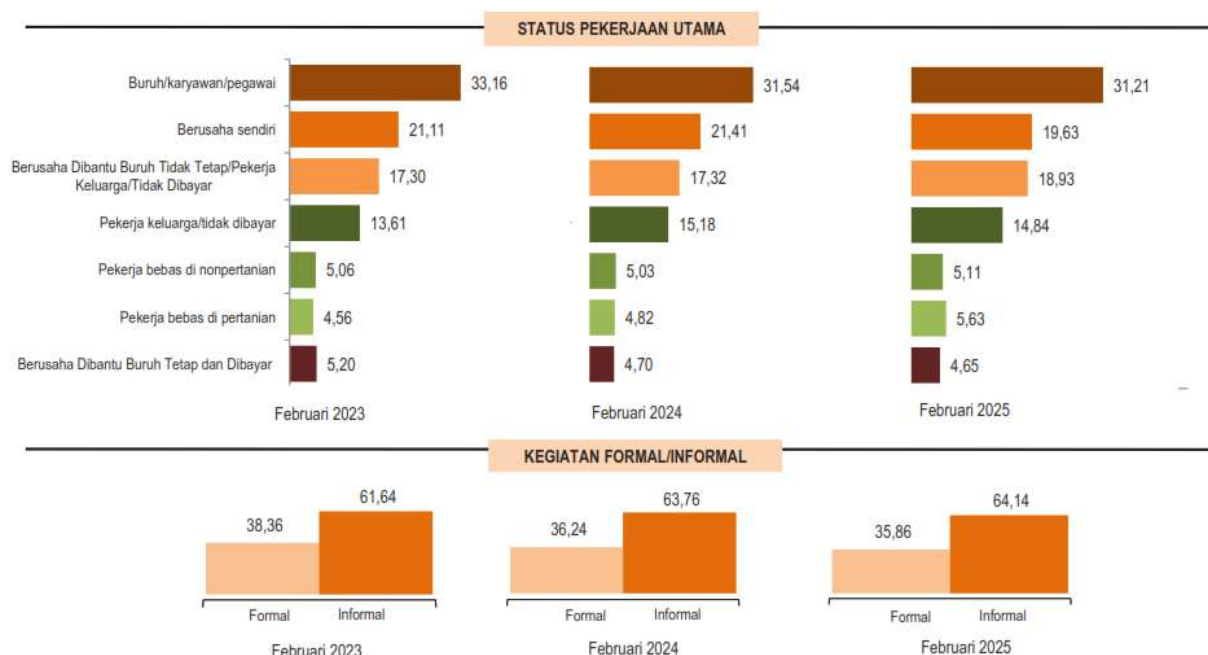
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,21 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 4,65 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebesar 1,61 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah berusaha sendiri yang turun sebesar 1,78 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar)

Pada Februari 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,91 juta orang (64,14 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,07 juta orang (35,86 persen) (Gambar 2). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin

Gambar 2.4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 5,69 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,10 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 5,65 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,74 persen. Jika dibandingkan Februari 2024, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin dan 0,22 persen poin.

Tabel 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023–Februari 2025

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN	FEB 2023	FEB 2024	FEB 2025	PERUBAHAN FEB 2023-FEB 2024	PERUBAHAN FEB 2024-FEB 2025
	PERSEN	PERSEN	PERSEN	PERSEN	PERSEN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,90	5,79	5,69	-0,11	-0,10
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	5,80	5,68	5,65	-0,12	-0,03
- Perempuan	6,04	5,96	5,74	-0,08	-0,22

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN	FEB 2023	FEB 2024	FEB 2025	PERUBAHAN FEB 2023-FEB 2024	PERUBAHAN FEB 2024-FEB 2025
	PERSEN	PERSEN	PERSEN	PERSEN	PERSEN
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,00	7,55	7,34	-0,45	-0,21
- Perdesaan	4,01	3,98	3,85	-0,03	-0,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Karakteristik Pengangguran	Februari 2023	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2023-Feb 2024	Perubahan Feb 2024-Feb 2025
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,90	5,79	5,69	-0,11	-0,10
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	5,80	5,68	5,65	-0,12	-0,03
- Perempuan	6,04	5,96	5,74	-0,08	-0,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,00	7,55	7,34	-0,45	-0,21
- Perdesaan	4,01	3,98	3,85	-0,03	-0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gini ratio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1 diindikasikan ketimpangan di antara masyarakat semakin tinggi. *Gini ratio* Sumatera Barat selama 2021-2023 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin baik. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan meskipun tidak signifikan.

Ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Kota Padang merupakan daerah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Sumatera Barat dengan nilai *gini ratio* sebesar 0,324 pada tahun 2024. Di sisi lain, Kabupaten Pasaman merupakan daerah dengan ketimpangan pendapatan yang terendah.

Tabel 2.10. Gini Ratio Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024

KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	0,321	0,233	0,259	0,267
Kab. Pesisir Selatan	0,253	0,246	0,259	0,224
Kab. Solok	0,246	0,243	0,235	0,241
Kab. Sijunjung	0,270	0,243	0,263	0,239
Kab. Tanah Datar	0,250	0,251	0,260	0,258
Kab. Padang Pariaman	0,269	0,245	0,257	0,253
Kab. Agam	0,272	0,298	0,255	0,249
Kab. Lima Puluh Kota	0,244	0,208	0,194	0,220
Kab. Pasaman	0,248	0,230	0,243	0,217

KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab. Solok Selatan	0,277	0,253	0,271	0,313
Kab. Dharmasraya	0,268	0,287	0,291	0,233
Kab. Pasaman Barat	0,261	0,277	0,238	0,240
Kota Padang	0,343	0,354	0,312	0,324
Kota Solok	0,277	0,288	0,256	0,251
Kota Sawahlunto	0,295	0,314	0,308	0,299
Kota Padang Panjang	0,306	0,296	0,273	0,266
Kota Bukittinggi	0,286	0,317	0,255	0,272
Kota Payakumbuh	0,316	0,311	0,316	0,313
Kota Pariaman	0,301	0,272	0,289	0,281
SUMATERA BARAT	0,306	0,300	0,280	0,283

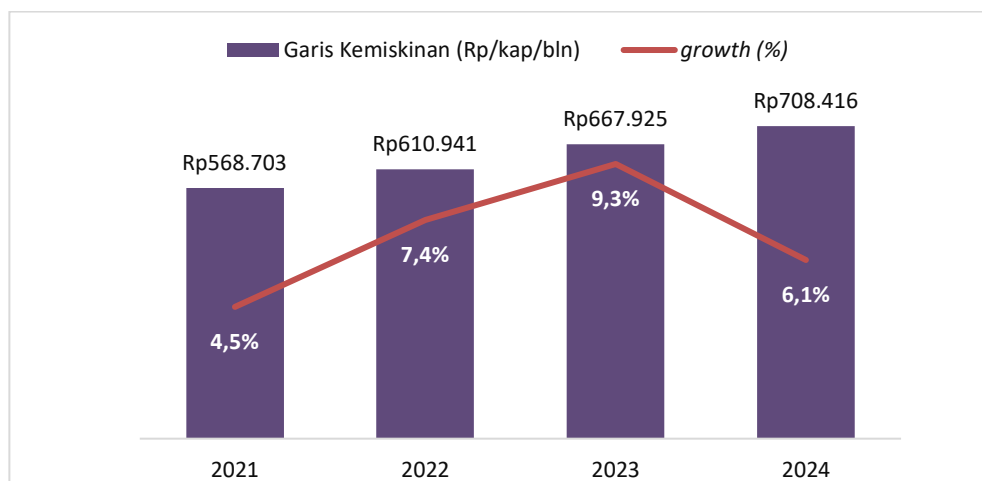
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2024 dan September 2024, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Provinsi Sumatera Barat tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk naik sebesar 2,42 persen. Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen menengah (sebesar 3,04 persen), pada kelompok 40 persen terbawah tercatat kenaikan sebesar 0,98 persen dan pada kelompok 20 persen teratas naik sebesar 2,75 persen. Hal ini sedikit banyak menjelaskan fenomena angka Gini Ratio di Provinsi Sumatera Barat yang naik pada September 2024 menjadi sebesar 0,287.
2. Di daerah perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,20 persen, artinya rata-rata pengeluaran penduduk di daerah perkotaan mengalami kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya dari periode Maret 2024 ke September 2024. Secara berturut-turut, penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen, penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan sebesar 5,74 persen, dan penduduk kelompok 20 persen teratas tercatat terjadi kenaikan sebesar 2,10 persen.
3. Di perdesaan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,51 persen untuk periode Maret 2024 ke September 2024. Penduduk kelompok 40 persen terbawah mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen, kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen, sedangkan 20 persen teratas mengalami penurunan sebesar 0,01 persen.

Selain itu, Garis kemiskinan di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang signifikan antara tahun 2021 hingga 2024, yaitu sebesar 24,67%. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp568.705 per kapita per bulan, yang meningkat menjadi Rp708.416 pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan laju inflasi yang meningkatkan biaya hidup masyarakat setiap tahunnya.

Gambar 2.5. Garis Kemiskinan Sumatera Barat 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024 secara umum mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,63% pada 2021 menjadi 5,92% pada 2022 meskipun sedikit meningkat menjadi 5,97% pada 2024. Daerah perkotaan cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibanding daerah rural. Kota Sawahlunto memiliki tingkat kemiskinan terendah secara konsisten, yakni hanya 2,33% pada 2024. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus menempati posisi tertinggi dalam persentase penduduk miskin. meskipun mengalami sedikit penurunan dari 14,84% pada 2021 menjadi 13,89% pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan spasial dalam distribusi kemiskinan, di mana daerah terpencil dan terluar seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tertinggal secara kesejahteraan dibandingkan daerah perkotaan.

Meski secara agregat provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang menurun, terdapat variasi di tingkat kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Kabupaten Dharmasraya juga merupakan daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi (turun 1,35 persen poin). Namun, daerah lainnya seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan justru menunjukkan kenaikan kembali pada 2024 setelah sempat menurun. Kabupaten Agam juga mencatatkan penurunan yang paling

lambat dengan penurunan dari 2021 ke 2024 hanya sebesar 0,02 persen poin. Pola ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mencakup provinsi secara keseluruhan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal masing-masing wilayah.

Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat 2021-2024 (Persen)

KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024
Kab. Kep.Mentawai	14,84	13,97	13,72	13,89
Kab. Pesisir Selatan	7,92	7,11	7,34	7,49
Kab. Solok	8,01	7,12	7,13	7,31
Kab. Sijunjung	6,80	6,00	5,88	5,78
Kab. Tanah Datar	4,54	4,26	4,16	4,28
Kab. Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34	6,27
Kab. Agam	6,85	6,22	6,6	6,83
Kab. Lima Puluh Kota	7,29	6,59	6,8	6,92
Kab. Pasaman	7,48	6,85	6,8	6,74
Kab. Solok Selatan	7,52	6,51	6,45	6,56
Kab. Dharmasraya	6,67	5,56	5,56	5,32
Kab. Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92	7,00
Kota Padang	4,94	4,26	4,17	4,06
Kota Solok	3,12	3,02	3,05	3,07
Kota Sawahlunto	2,38	2,28	2,27	2,33
Kota Padang Panjang	5,92	5,14	5,24	5,31
Kota Bukittinggi	5,14	4,46	4,11	4,08
Kota Payakumbuh	6,16	5,66	5,44	5,19
Kota Pariaman	4,38	4,13	4,2	4,26
Sumatera Barat	6,63	5,92	5,95	5,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis

kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, meskipun sempat sedikit meningkat pada tahun 2023. P1 turun dari 1,04 pada 2021 menjadi 0,74 pada 2024 yang mengindikasikan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas intervensi sosial dan ekonomi yang dilakukan yang cukup baik dalam mendekatkan penduduk miskin ke ambang kesejahteraan minimum.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,24 pada tahun 2021 menjadi 0,15 pada tahun 2024 dengan pola fluktuasi yang hampir sama dengan P1. Penurunan P2 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi penduduk miskin semakin merata dengan perbedaan tingkat kemiskinan antarindividu yang semakin mengecil. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu memperbaiki tingkat kemiskinkinan tetapi juga meredakan kondisi ekstrem diantara penduduk miskin. Konsistensi penurunan ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat tepat sasaran dan inklusif.

Tabel 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,04	0,80	0,82	0,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,16	0,18	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2024–September 2024 antara lain adalah:

1. Inflasi umum September 2024 terhadap Maret 2024 tercatat sebesar -1,32 persen.
2. Ekonomi Provinsi Sumatera Barat triwulan III-2024 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,58 persen.
3. Konsumsi rumah tangga Triwulan III-2024 dibandingkan Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 1,56.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 5,75 persen atau turun sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2024 (5,79 persen).
5. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2024 sebesar 125,47 atau naik 4,86 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 119,66.

2.2. EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TAHUN 2025 HINGGA TRIWULAN I

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dilaksanakan oleh 51 Perangkat Daerah (termasuk Biro-Biro di Sekretariat Daerah). Tingkat capaian terhadap Evaluasi hasil RKPD hingga Triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut.

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PENDIDIKAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV				(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12					(15) = 14/5 * 100%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		DINAS PENDIDIKAN				0		0		3.351.502.070.636	338.730.123.430	0	0	0	0	338.730.123.430	10,11	338.730.123.430	inf					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	nan	nan			
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	nan	nan			
1	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 PARIAMAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	DISDIK		
2	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 PARIAMAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	DISDIK		
3	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 PAYAKUMBUH]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	DISDIK		
4	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 3 PAYAKUMBUH]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	DISDIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan			
Predikat Kinerja																				-	-			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0		0		3.351.502.070.636	338.730.123.430	0	0	0	0	338.730.123.430	10,11	338.730.123.430	inf					
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0	0		0		3.351.502.070.636	338.730.123.430	0	0	0	0	338.730.123.430	10,11	338.730.123.430	inf					
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	0	0	0	0	0	2.594.837.425.115	0	326.463.807.545	0	0	0	0	326.463.807.545	nan	12,58	0	326.463.807.545	nan	inf	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	866.425.655.074	0	42.171.735	0	0	0	0	42.171.735	nan	0,00	0	42.171.735	nan	inf	
1	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	175.740.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
2	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen		0		0	1	118.418.600	0	42.171.735	0	0	0	0	42.171.735	0,00	35,61	0	42.171.735	nan	inf	DISDIK
			RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1		0					0		0,00		0		nan		DISDIK	
3	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen		0		0	1	69.318.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
			RKA-SKPD	Dokumen				1		0					0		0,00		0		nan		DISDIK	
4	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen		0		0	1	257.618.550	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
			DPA-SKPD	Dokumen				1		0					0		0,00		0		nan		DISDIK	
5	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen		0		0	1	57.441.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
			DPA-SKPD	Dokumen				1		0					0		0,00		0		nan		DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	1	154.895.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
7	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	865.292.222.324	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
8	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
9	1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
10	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
11	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
12	1.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
13	1.01.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.653.564.618.000	0	324.940.764.267	0	0	0	0	324.940.764.267	nan	19,65	0	324.940.764.267	nan	inf			
14	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	12	1.650.000.000.000	3	324.860.478.348	0	0	0	3	324.860.478.348	25,00	19,69	3	324.860.478.348	inf	inf	DISDIK		
15	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	1.749.781.000	0	80.285.919	0	0	0	0	80.285.919	0,00	4,59	0	80.285.919	nan	inf	DISDIK		
16	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	152.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
17	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0		0	1	203.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
18	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0		0	1	253.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
19	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	1	1.205.787.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.029.408.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	177.625.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
21	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	59.885.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
22	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	404.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
23	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	280.624.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
24	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	106.574.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan			
Predikat Kinerja																				-	-			
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.050.183.050	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan		
25	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	12.150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
26	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
27	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
28	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
29	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	50	198.868.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
30	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
31	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	32.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
32	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	32.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
33	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK ,	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	30.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK])																						
34	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
35	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0		0	1	131.950.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
36	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	50	203.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
37	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Orang		0		0	30	131.950.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
			Perundang-Undangan	Orang					30		0					0	0,00		0		nan		DISDIK	
38	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	30	181.014.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan			
Predikat Kinerja																				-	-			
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	21.728.706.941	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
39	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	41.625.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
40	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.200.350	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
41	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.112.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
42	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.771.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
43	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	13.335.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
44	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.995.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp			
45	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	4.156.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
46	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	33.243.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
47	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.162.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
48	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	304.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
49	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	101.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
50	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.510.588.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
51	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	1.701.380.685	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
52	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.905.287.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
53	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	67.454.794	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
54	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	1.292.220.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
55	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.314.550.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
56	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	101.891.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
57	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.487.646.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp			
58	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	1.291.504.148	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
59	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	126.163.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
60	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	23.269.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
61	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	111.191.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
62	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	19.326.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
63	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	14.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
64	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	36.544.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
65	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK, KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	26.869.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
66	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	11.369.444	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
67	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	6.930.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
68	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	7.247.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
69	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	9.785.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
70	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	76.018.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
71	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
72	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
73	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	296.455.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
74	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	193.321.082	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
75	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	1.014.887.620	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
76	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	202.979.978	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
77	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	341.385.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
78	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	775.520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
79	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	208.961.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
80	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	175.998.066	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
81	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	270.393.524	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
82	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	393.214.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	
83	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
84	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.484.376.100	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
85	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0		0	1	5.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
86	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	137.046.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
87	1.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0		0	1	203.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
88	1.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		0		0	1	1.015.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
89	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	101.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
90	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	35.093.540	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
91	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	2.980.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
92	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	248.672.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
93	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	73.497.660	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
94	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	122.477.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
95	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	27.698.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
96	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
97	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	179.676.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
98	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	52.658.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
99	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
100	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
101	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
102	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
103	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	10.419.445.413	0	1.480.871.543	0	0	0	0	0	1.480.871.543	nan	14,21	0	1.480.871.543	nan	inf		
104	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
105	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
106	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	3.709.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
107	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
108	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
109	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
110	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
111	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
112	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
113	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	35.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
114	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	752.088.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
115	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	112.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
116	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	23.773.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
117	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	39.361.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
118	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	28.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
119	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	30.528.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
120	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	18.030.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
121	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	17.660.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
122	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	22.206.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
123	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
124	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
125	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]																								
126	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
127	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
128	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
129	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	68.277.436	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
130	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	161.878.376	0	44.912.895	0	0	0	0	44.912.895	0,00	27,74	0	44.912.895	nan	inf	DISDIK		
131	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	157.039.328	0	26.947.737	0	0	0	0	26.947.737	0,00	17,16	0	26.947.737	nan	inf	DISDIK		
132	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	648.649.456	0	170.669.001	0	0	0	0	170.669.001	0,00	26,31	0	170.669.001	nan	inf	DISDIK		
133	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.032.242.871	0	160.380.167	0	0	0	0	160.380.167	0,00	15,54	0	160.380.167	nan	inf	DISDIK		
134	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.582.418.760	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
135	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	2.502.824.347	0	503.024.424	0	0	0	0	503.024.424	0,00	20,10	0	503.024.424	nan	inf	DISDIK		
136	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.908.916.912	0	368.285.739	0	0	0	0	368.285.739	0,00	19,29	0	368.285.739	nan	inf	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
137	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	401.145.126	0	89.825.790		0		0	0	0	89.825.790	0,00	22,39	0	89.825.790	nan	inf	DISDIK				
138	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	337.314.052	0	80.843.211		0		0	0	0	80.843.211	0,00	23,97	0	80.843.211	nan	inf	DISDIK				
139	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	269.852.449	0	35.982.579		0		0	0	0	35.982.579	0,00	13,33	0	35.982.579	nan	inf	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan								
Predikat Kinerja																					-	-								
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.777.674.500	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan						
140	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
141	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	344.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
142	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
143	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
144	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
145	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
146	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
147	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
148	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	16.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
149	1.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
150	1.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
151	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	1	101.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
152	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	87.853.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
153	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	10.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
154	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	15.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
155	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	11.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
156	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	5.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
157	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
158	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	8.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
159	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	13.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong															
											I	II	III	IV																									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		[CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]																																					
160	1.01.01.1.09.0006	[CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	7.100.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
161	1.01.01.1.09.0006	[CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	8.520.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
162	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
163	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
164	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	630.980.800	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
165	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
166	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
167	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
168	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	0	0	0	0	36.357.357.537	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan															
169	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	36.357.357.537	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK														
170	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 5 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														
171	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 3 PARIAMAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														
172	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 4 PARIAMAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														
173	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 BUKITTINGGI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														
174	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 BUKITTINGGI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														
175	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 SUMATERA BARAT]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
176	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
177	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
178	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 4 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
179	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 6 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
180	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 8 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
181	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 9 PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
182	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 10 PADANG]	-	-		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
183	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMK PP NEGERI PADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
184	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 PAYAKUMBUH]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
185	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 SAWAHLUNTO]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
186	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 AMPEK ANGKEK]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
187	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 LUBUK BASUNG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
188	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 KOTO BARU]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
189	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 SUNGAI RUMBAI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
190	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 GUGUK]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
191	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 KECAMATAN LUAK]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
192	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 SULIKI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
193	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN PP PADANG MENGATAS]	0	0		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
194	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 ENAM LINGKUNG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
195	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		
196	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	Unit Kerja		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		[SMKN 1 GUNUNG TALANG]	Pelayanan																				
197	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 LEMBAH GUMANTI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
198	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 LINTAU BUO]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
199	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 BATUSANGKAR]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
200	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI]	-	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
201	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 LUBUK SIKAPING]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
202	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 KINALI]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
203	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 TALAMAU]	-	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
204	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 PASAMAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
205	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 SIJUNJUNG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
206	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 3 SIJUNJUNG]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
207	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 PAINAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
208	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [SMKN 1 RANAH PESISIR]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan				
Predikat Kinerja																		-	-				
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SLB	Persen		0		0	56,57	754.051.453.521	0	12.241.012.844	0	0	0	0	12.241.012.844	0,00	1,62	0	12.241.012.844	nan	inf
			APM Pendidikan Menengah	Persen					73,65		0					0		0,00		0		nan	
			APK Pendidikan Menengah	Persen					97,7		0					0		0,00		0		nan	
			-	-					0		0					0		nan		0		nan	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (Persen), APM Pendidikan Menengah Atas (Persen)	Persen	0	0	0	0	56	367.754.177.921	0	6.971.053.211	0	0	0	0	6.971.053.211	0,00	1,90	0	6.971.053.211	nan	inf
			-	-	0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan		
1	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		0		0	4	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
2	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
3	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
4	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
5	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
6	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
7	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	37	7.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
8	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
9	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
10	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
11	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
12	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
13	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
14	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
15	1.01.02.1.01.0037	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
16	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
17	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	1	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
18	1.01.02.1.01.0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
19	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	40	42.650.499.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
20	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
21	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik		0		0	2000	5.760.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
22	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		0		0	32000	1.602.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
23	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
24	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
25	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
26	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		0		0	236	238.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
27	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang		0		0	53	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
28	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
29	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi	Orang		0		0	50	49.998.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Pendidikan Menengah Atas	peningkatan profesi																							
30	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
31	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	20	49.998.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
32	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
33	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	1	49.998.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
34	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
35	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK			
36	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0		0	1	812.704.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
37	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		0		0	1	49.998.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
38	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
39	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
40	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
41	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku		0		0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
42	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
43	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	5	1.220.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
44	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
45	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
46	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
47	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		0		0	5	2.260.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
48	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II									III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat																					
49	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		
50	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	50	49.998.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		
51	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		
52	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		
53	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	236	5.719.734.221	0	1.088.033.211	0	0	0	1.088.033.211	0,00	19,02	0	1.088.033.211	nan	inf	DISDIK	
54	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	3.736.070.000	0	681.120.000	0	0	0	681.120.000	0,00	18,23	0	681.120.000	nan	inf	DISDIK	
55	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	5.638.720.000	0	1.052.430.000	0	0	0	1.052.430.000	0,00	18,66	0	1.052.430.000	nan	inf	DISDIK	
56	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	11	5.698.490.000	0	589.640.000	0	0	0	589.640.000	0,00	10,35	0	589.640.000	nan	inf	DISDIK	
57	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	25	4.039.400.000	0	972.030.000	0	0	0	972.030.000	0,00	24,06	0	972.030.000	nan	inf	DISDIK	
58	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	25	9.797.970.000	0	1.713.570.000	0	0	0	1.713.570.000	0,00	17,49	0	1.713.570.000	nan	inf	DISDIK	
59	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	2.215.200.000	0	403.050.000	0	0	0	403.050.000	0,00	18,19	0	403.050.000	nan	inf	DISDIK	
60	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	15	3.282.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		
61	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	32	5.420.900.000	0	471.180.000	0	0	0	471.180.000	0,00	8,69	0	471.180.000	nan	inf	DISDIK	
62	1.01.02.1.01.0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K		Rp						K
63	1.01.02.1.01.0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (Persen), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (Persen)	Persen	0	0	0	0	37	304.072.788.900	0	4.714.989.633	0	0	0	0	4.714.989.633	0,00	1,55	0	4.714.989.633	nan	inf			
			-	-	0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan						
64	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		0		0	2	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
65	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
66	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
67	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
68	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
69	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
70	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
71	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
72	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	15	5.780.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
73	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
74	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
75	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
76	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
77	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
78	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
79	1.01.02.1.02.0029	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
80	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
81	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	100	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
82	1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
83	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	10	95.249.125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
84	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
85	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik		0		0	10	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
86	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	Peserta Didik		0		0	100	2.196.872.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
			dan Non Akademik																													
87	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
88	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
89	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
90	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		0		0	111	147.032.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
91	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang		0		0	50	452.821.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
92	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
93	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
94	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK								
95	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK								
96	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
97	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISDIK								
98	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
99	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0		0	1	1.064.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
100	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
101	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								
102	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
103	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
104	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
105	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
106	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
107	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	10	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
108	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
109	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		0		0	10	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
110	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
111	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
112	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
113	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
114	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
115	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
116	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
117	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	3	2.028.610.000	0	225.300.000	0	0	0	225.300.000	0,00	11,11	0	225.300.000	nan	inf	DISDIK		
118	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	111	7.250.000.000	0	1.239.249.633	0	0	0	1.239.249.633	0,00	17,09	0	1.239.249.633	nan	inf	DISDIK		
119	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	2.193.720.000	0	414.120.000	0	0	0	414.120.000	0,00	18,88	0	414.120.000	nan	inf	DISDIK		
120	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	1.975.350.000	0	278.010.000	0	0	0	278.010.000	0,00	14,07	0	278.010.000	nan	inf	DISDIK		
121	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	3	352.430.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
122	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	18	1.775.430.000	0	294.900.000	0	0	0	294.900.000	0,00	16,61	0	294.900.000	nan	inf	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong													
											I	II	III	IV																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)]																																			
123	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	15	3.997.040.000	0	868.200.000		0	0	0	0	868.200.000	0,00	21,72	0	868.200.000	nan	inf	DISDIK												
124	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	9	4.452.500.000	0	816.060.000		0	0	0	0	816.060.000	0,00	18,33	0	816.060.000	nan	inf	DISDIK												
125	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik [CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)]	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		0		0	1	3.222.570.000	0	579.150.000		0	0	0	0	579.150.000	0,00	17,97	0	579.150.000	nan	inf	DISDIK												
126	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	50	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
127	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
128	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
129	1.01.02.1.02.0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
130	1.01.02.1.02.0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
131	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang		0		0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																					
Predikat Kinerja																																					
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	0	0	0	0	0	82.224.486.700	0	554.970.000	0	0	0	0	0	554.970.000	nan	0,67	0	554.970.000	nan	inf													
			APM SLB (Persen)	Persen	0		0		56		0	0	0	0	0	0		0,00		0		nan															
132	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		0		0	4	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
133	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
134	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
135	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
136	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
137	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
138	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	8	3.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													
139	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
140	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
141	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
142	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
143	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
144	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
145	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
146	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
147	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
148	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
149	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
150	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
151	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
152	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
153	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
154	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
155	1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
156	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
157	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	1	6.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
158	1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
159	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		0		0	1	6.173.978.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
160	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
161	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
162	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		0		0	0	1.246.551.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
163	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang		0		0	0	50.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
164	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		0		0	0	50.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
165	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		0		0	0	50.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
166	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		0		0	0	40.249.720.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
167	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang		0		0	0	150.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
168	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		0		0	1	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
169	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
170	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		0		0	20	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK					
171	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
172	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
173	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISDIK				
174	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan [UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN]	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	20	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
175	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		0		0	0	644.626.700	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
176	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		0		0	0	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
177	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang		0		0	0	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
178	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
179	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II									III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)]																								
195	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
196	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
197	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
198	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
199	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
200	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
201	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
202	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
203	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
204	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
205	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
206	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku		0		0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
207	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang		0		0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-		0		0	0	341.148.800	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	0	0	0	0	0	290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
2	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku		0		0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
3	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		0		0	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
4	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Buku		0		0	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
5	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen		0		0	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-	-	0	0	0	0	0	51.148.800	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
7	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
8	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku		0		0	1	11.148.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
9	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
10	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Buku		0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
11	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	Dokumen		0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
12	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-		0		0	0	1.206.125.200	0	25.303.041	0	0	0	0	25.303.041	nan	2,10	0	25.303.041	nan	inf			
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	1.206.125.200	0	25.303.041	0	0	0	0	25.303.041	nan	2,10	0	25.303.041	nan	inf			
1	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen		0		0	1	554.391.950	0	25.303.041	0	0	0	0	25.303.041	0,00	4,56	0	25.303.041	nan	inf	DISDIK		
2	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan		0		0	1	651.733.250	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-		0		0	0	532.918.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0	0	0	0	0	224.091.400	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0		0	1	123.530.640	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
2	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0		0	1	100.560.760	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0	0	0	0	0	308.826.600	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
3	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0		0	1	102.942.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
4	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0		0	1	102.942.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
5	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		0		0	1	102.942.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	0		0	0	0	533.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	533.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus		0		0	1	67.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
2	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	Bahasa		0		0	1	67.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
3	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Publikasi		0		0	1	67.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
4	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang		0		0	1	74.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
5	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku		0		0	1	67.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
6	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Peserta Didik		0		0	1	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
7	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	107.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISDIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KESEHATAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
		DINAS KESEHATAN				0		0		245.303.944.424	15.448.589.702	0	0	0		15.448.589.702		6,30		15.448.589.702		inf																							
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		133.791.600	9.863.380	0	0	0		9.863.380		7,37		9.863.380		inf																							
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		133.791.600	9.863.380	0	0	0		9.863.380		7,37		9.863.380		inf																							
X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	133.791.600	9.863.380	0	0	0	0	9.863.380	nan	7,37	0	9.863.380	nan	inf																							
X.XX.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	34.542.000	0	9.863.380	0	0	0	0	9.863.380	nan	28,55	0	9.863.380	nan	inf																						
1	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.026.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DINKES																					
2	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	16	29.516.000	2	9.863.380	0	0	0	2	9.863.380	12,50	33,42	2	9.863.380	inf	inf	DINKES																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	99.249.600	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																						
3	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	11	99.249.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		245.170.152.824	15.438.726.322	0	0	0	0		15.438.726.322		6,30		15.438.726.322		inf																						
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				0		0		245.170.152.824	15.438.726.322	0	0	0		15.438.726.322		6,30		15.438.726.322		inf																							
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	98.994.541.182	15.438.726.322	0	0	0	0		15.438.726.322	nan	15,60	0	15.438.726.322	nan	inf																						
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	488.151.398	0	13.188.000	0	0	0	0	13.188.000	nan	2,70	0	13.188.000	nan	inf																						
1	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	428.180.398	1	13.188.000	0	0	0	1	13.188.000	33,33	3,08	1	13.188.000	inf	inf	DINKES																					
2	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	4	59.971.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DINKES																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	68.350.827.515	0	12.655.729.994	0	0	0	0	12.655.729.994	nan	18,52	0	12.655.729.994	nan	inf																						
3	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	509	67.647.442.426	3	12.655.729.994	0	0	0	3	12.655.729.994	0,59	18,71	3	12.655.729.994	inf	inf	DINKES																					
4	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	16	649.304.489	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
5	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	14	54.080.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					14		0					0		0,00		0		nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	390.594.600	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
6	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	5	214.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
7	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
8	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	5	76.589.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	550.977.700	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
9	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	451	357.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
10	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	10	193.977.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
11	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Orang		0		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES				
			Perundang-Undangan	Orang				50		0					0		0,00		0		nan		DINKES					
12	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.598.562.667	0	42.882.957	0	0	0	0	0	42.882.957	nan	2,68	0	42.882.957	nan	inf				
13	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
14	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	99.994.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
15	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	7	150.837.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
16	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	4	115.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
17	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	173.789.985	0	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000	0,00	1,35	0	2.350.000	nan	inf	DINKES				
18	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	2	177.055.442	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
19	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	23.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
20	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0		0	12	699.433.640	3	22.477.657	0	0	0	3	22.477.657	25,00	3,21	3	22.477.657	25,00	inf	DINKES				
21	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	44.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
22	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	50.000.000	3	4.570.300		0	0	0	3	4.570.300	25,00	9,14	3	4.570.300	inf	inf	DINKES				
23	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	58.500.000	3	13.485.000		0	0	0	3	13.485.000	300,00	23,05	3	13.485.000	inf	inf	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.287.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
24	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	3	288.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
25	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	999.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	4.683.383.491	0	245.645.911	0	0	0	0	0	0	245.645.911	nan	5,25	0	245.645.911	nan	inf				
26	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	2	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
27	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	3	849.999.759	3	162.540.478		0	0	0	3	162.540.478	100,00	19,12	3	162.540.478	inf	inf	DINKES				
28	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	405.032.064	3	63.755.213		0	0	0	3	63.755.213	300,00	15,74	3	63.755.213	inf	inf	DINKES				
29	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	3	55.985.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
30	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	752.089.544	3	8.727.475		0	0	0	3	8.727.475	300,00	1,16	3	8.727.475	inf	inf	DINKES				
31	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	624.470.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
32	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	1.995.796.584	2	10.622.745		0	0	0	2	10.622.745	16,67	0,53	2	10.622.745	inf	inf	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.832.803.501	0	12.879.330	0	0	0	0	0	0	12.879.330	nan	0,70	0	12.879.330	nan	inf				
33	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
34	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	14	303.000.000	1	12.879.330		0	0	0	1	12.879.330	7,14	4,25	1	12.879.330	inf	inf	DINKES				
35	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I	II	III	IV																														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
		[UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]																																										
36	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	34.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
37	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	173	197.575.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
38	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
39	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	487.838.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
40	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
41	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
42	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	51	139.770.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
43	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	15.120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																					
44	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINKES																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	0	0	0	0	19.811.301.310	0	2.468.400.130	0	0	0	0	0	2.468.400.130	nan	12,46	0	2.468.400.130	-	-																				
45	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	6.278.877.586	3	738.017.568	0	0	0	3	738.017.568	300,00	11,75	3	738.017.568	inf	inf	DINKES																				
46	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES																				
47	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	4.807.423.724	3	1.150.462.789	0	0	0	3	1.150.462.789	300,00	23,93	3	1.150.462.789	inf	inf	DINKES																				
48	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	7.425.000.000	3	579.919.773	0	0	0	3	579.919.773	300,00	7,81	3	579.919.773	inf	inf	DINKES																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-		0		0	0	144.294.236.137		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																					
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	10.032.936.786	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Kab/kota Layanan		0		0	3	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
2	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
3	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		0		0	3	101.432.248	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
4	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		0		0	52	551.493.180	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
5	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		0		0	20	1.677.077.395	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
6	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit		0		0	5	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
7	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit		0		0	14	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
8	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		0		0	28	212.894.122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
9	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen		0		0	19	129.506.448	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
10	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		0		0	1	125.323.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
11	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		0		0	5	5.571.488.452	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
12	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		0		0	1	374.044.394	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
13	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		0		0	3	837.176.847	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	133.327.011.042	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
14	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang			0		0	66616	693.328.420	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
15	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	% Orang			0		0	100	1.118.150.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
16	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen			0		0	4	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
17	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen			0		0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
18	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen			0		0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
19	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen			0		0	9	1.112.617.455	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
20	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			0		0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
21	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen			0		0	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
22	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen			0		0	3	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
23	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen			0		0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
24	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen			0		0	2	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
25	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			0		0	5	432.958.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
26	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen			0		0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
27	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen			0		0	3	173.539.627	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			
28	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang			0		0	16	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
29	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		0		0	2	119.765.122.167	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
30	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		0		0	1	597.635.560	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
31	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		0		0	1	233.467.799	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
32	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		0		0	52	3.486.716.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
33	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan [UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat]	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		0		0	20	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
34	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen		0		0	1	121.933.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
35	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen		0		0	1	937.829.987	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
36	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit [UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		0		0	1	1.457.711.027	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
37	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket		0		0	100	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
38	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen		0		0	1	60.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
39	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	KAB/KOTA Keluarga		0		0	19	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINKES																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	0	0	0	0	0	105.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan																				
40	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		0		0	1	105.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINKES																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	829.288.309	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan																				
41	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit		0		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINKES																			
42	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit		0		0	5	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINKES																			
43	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	Unit		0		0	36	544.314.679	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINKES																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan																
44	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan [UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat]	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit		0		0	4	184.973.630	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan		
Predikat Kinerja																-	-		
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-		0		0	0	512.774.700		0	0	0	0	0	0		
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	0	0	0		0	84.444.000	0	0	0	0	0	0	0		
1	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		0		0	580	84.444.000	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan		
Predikat Kinerja																-	-		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0		0	428.330.700	0	0	0	0	0	0	0		
2	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		0		0	580	317.403.300	0	0	0	0	0	0	0		
3	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan [UPTD BKOM & Pelkes]	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		0		0	30	76.500.000	0	0	0	0	0	0	0		
4	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		0		0	1	34.427.400	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan		
Predikat Kinerja																-	-		
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-		0		0	0	300.329.000		0	0	0	0	0	0		
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	0	0	0		0	237.336.687	0	0	0	0	0	0	0		
1	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana		0		0	56	237.336.687	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan		
Predikat Kinerja																-	-		
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	0	0	0		0	62.992.313	0	0	0	0	0	0	0		
2	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana		0		0	10	62.992.313	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan		
Predikat Kinerja																-	-		
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		0		0	0	1.068.271.805		0	0	0	0	0	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		0		0	11	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
2	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		0		0	3	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	318.271.805	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
3	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen		0		0	5	318.271.805	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGG
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

II-57

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	14	7.500.000.000	52	14.152.116.022	2	6.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	52	14.152.116.022	371,43	188,69	RSAM	Terlaksana dengan baik	tidak ada faktor penghambat	Adanya bantuan dana dari kementerian kesehatan : Shiren
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					371,43	188,69				
Predikat Kinerja																					ST	ST				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN				306.614.000.000		66.415.483.131		70.849.554.000		13.768.283.234	0	0	0		13.768.283.234		19,43		80.183.766.365		26,15					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				306.614.000.000		66.415.483.131		70.849.554.000		13.768.283.234	0	0	0		13.768.283.234		19,43		80.183.766.365		26,15					
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				306.614.000.000		66.415.483.131		70.849.554.000		13.768.283.234	0	0	0		13.768.283.234		19,43		80.183.766.365		26,15					
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		292.915.000.000	100	64.915.364.252	100	67.000.000.000		13.768.283.234	0	0	0	0	13.768.283.234	0,00	20,55	100	78.683.647.486	inf	26,86					
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	Persen			43,48		50		9,57					9,57		19,14		53,05		inf						
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	95	137.308.000.000	96,45	35.147.501.063	95	38.000.000.000	20,46	9.218.584.716	0	0	0	0	20,46	9.218.584.716	21,54	24,26	116,91	44.366.085.779	123,06	32,31				
1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	285	137.308.000.000	33,5	35.147.501.063	335	38.000.000.000	335	9.218.584.716	0	0	0	335	9.218.584.716	100,00	24,26	368,5	44.366.085.779	129,30	32,31	RSJ SAANIN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					129,30	32,31						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	Persen	52	155.607.000.000	43,48	29.767.863.189	50	29.000.000.000	9,57	4.549.698.518	0	0	0	0	9,57	4.549.698.518	19,14	15,69	53,05	34.317.561.707	102,02	22,05				
2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	52	155.607.000.000	12	29.767.863.189	1	29.000.000.000	1	4.549.698.518	0	0	0	1	4.549.698.518	100,00	15,69	13	34.317.561.707	25,00	22,05	RSJ SAANIN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					12,50	11,03						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		12.913.000.000	94,91	1.500.118.879	89	3.688.402.000	94,91	0	0	0	0	94,91	0	106,64	0,00	189,82	1.500.118.879	inf	11,62					
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	12.913.000.000	100	1.500.118.879	93	3.688.402.000	25	0	0	0	0	0	25	0	26,88	0,00	125	1.500.118.879	125,00	11,62				
1	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	3	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	RSJ SAANIN			
2	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	3	2.962.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	RSJ SAANIN			
3	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit	247	8.251.000.000	29	1.500.118.879	25	1.188.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	29	1.500.118.879	11,74	18,18	RSJ SAANIN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV			K	Rp	K	Rp	K					Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)			
		Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Layanan Kesehatan yang Disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	4	1.700.000.000	0		0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	RSJ SAANIN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen		786.000.000	60		0	50	161.152.000	4.55	0	0	0	0	4.55	0	9,10	0,00	64.55	0	inf	0,00			
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen	52	786.000.000	60		0	48	161.152.000	4.55	0	0	0	0	4.55	0	9,48	0,00	64.55	0	124,13	0,00			
1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	285	786.000.000	335		0	123	161.152.000	15	0	0	0	0	15	0	12,20	0,00	350	0	122,81	0,00	RSJ SAANIN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					122,81	0,00					
Predikat Kinerja																					ST	SR					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
																										I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR				924.792.982.000		567.986.083.180		183.997.634.000		40.515.363.662		0	0	0		40.515.363.662		22,02		608.501.446.842		65,80				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				924.792.982.000		567.986.083.180		183.997.634.000		40.515.363.662		0	0	0		40.515.363.662		22,02		608.501.446.842		65,80				
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				924.792.982.000		567.986.083.180		183.997.634.000		40.515.363.662		0	0	0		40.515.363.662		22,02		608.501.446.842		65,80				
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		827.226.000.000	100	542.637.188.475	100	166.000.000.000	25	40.515.363.662		0	0	0	25	40.515.363.662	25,00	24,41	125	583.152.552.137	inf	70,49		Bagian SDM melakukan koordinasi dengan unit terkait		
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	Persen			58,08		63		60,64						60,64		96,25		118,72		inf		capaian TKK dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan belanja rumah sakit			
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	259.026.000.000	100	183.884.006.817	100	66.000.000.000	25	15.011.600.750	0	0	0	0	25	15.011.600.750	25,00	22,74	125	198.895.607.567	125,00	76,79		Bagian SDM melakukan koordinasi dengan unit terkait	masih adanya pegawai yang tidak komitmen (tepat waktu) dalam penginputan kinerja dan absensi online	tersedianya anggaran
1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	541	259.026.000.000	535	183.884.006.817	535	66.000.000.000	541	15.011.600.750		0	0	0	541	15.011.600.750	101,12	22,74	1076	198.895.607.567	198,89	76,79	RSUD M. Natsir	Bagian SDM melakukan koordinasi dengan unit terkait	masih adanya pegawai yang tidak komitmen (tepat waktu) dalam penginputan kinerja dan absensi online	tersedianya anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							198,89	76,79				
Predikat Kinerja																							ST	T				
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	Persen	65	568.200.000.000	58,08	358.753.181.658	63	100.000.000.000	60,64	25.503.762.912	0	0	0	0	60,64	25.503.762.912	96,25	25,50	118,72	384.256.944.570	182,65	67,63		capaian TKK dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan belanja rumah sakit		
2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	568.200.000.000	1	358.753.181.658	1	100.000.000.000	1	25.503.762.912		0	0	0	1	25.503.762.912	100,00	25,50	2	384.256.944.570	200,00	67,63	RSUD M. Natsir	capaian TKK dipengaruhi oleh besarnya	Masih tingginya klaim pending BPJS	Peningkatan pendapatan melalui

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																								pendapatan dan belanja rumah sakit		pengembangan layanan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	33,81						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		96.779.400.000	93.54	25.348.894.705	95	17.836.482.000	97.46		0	0	0	0	97.46	0	102,59	0,00	191	25.348.894.705	inf	26,19		Survei IKM dilakukan oleh pihak ketiga (Unand) pada TW IV		
			Akreditasi Rumah Sakit	Persen			84		85		84						84		98,82		168		inf		Rumah Sakit berkomitmen terhadap pemenuhan strandar akreditasi dengan predikat paripurna			
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	96	96.779.400.000	93.54	25.348.894.705	95	17.836.482.000	97.46		0	0	0	0	97.46	0	102,59	0,00	191	25.348.894.705	198,96	26,19		Survei IKM dilakukan oleh pihak ketiga (Unand) pada TW IV	Peningkatan sarana prasarana belum terpenuhi secara menyeluruh	tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi serta komitmen SDM dalam menjalankan SOP yang ada
1	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	1	560.000.000	2	385.255.000	3	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	2	385.255.000	200,00	68,80	RSUD M. Natsir	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan menggunakan dana BLUD	tidak tersedianya anggaran APBD	tidak tersedianya anggaran APBD
2	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1031	79.416.000.000		23.711.217.119	4	16.284.782.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	23.711.217.119	0,00	29,86	RSUD M. Natsir	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan menggunakan dana BLUD	tidak tersedianya anggaran APBD	Pemenuhan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan menggunakan dana BLUD
3	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3	10.103.400.000	1	1.252.422.586	2	51.700.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.252.422.586	33,33	12,40	RSUD M. Natsir	pekerjaan dalam proses	Masih dalam proses perencanaan	Tersedianya anggaran
4	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	12	6.700.000.000	12	0	12	1.500.000.000	3		0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	0	125,00	0,00	RSUD M. Natsir	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman menggunakan dana yang bersumber dari BLUD	tidak tersedianya anggaran APBD	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman menggunakan dana yang bersumber dari BLUD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					89,58	27,76						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
Predikat Kinerja																						T	SR					
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen		787.582.000	62.38		0	50	161.152.000	3.02	0	0	0	0	3.02	0	6,04	0,00	65.4	0	inf	0,00		Peningkatan kualita SDM merupakan salad satu doktor peningkatan layanan rumah sakit		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	Persen	52	787.582.000	62.38		0	50	161.152.000	3.02	0	0	0	0	3.02	0	6,04	0,00	65.4	0	125,77	0,00		Peningkatan kualita SDM merupakan salad satu doktor peningkatan layanan rumah sakit	Tidak tersedianya anggaran APBD untuk peningkatan kompetensi SDMK	Pemenuhan Peningkatan Kompetensi SDM menggunakan dana BLUD dan Sponshorship
1	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	450	787.582.000	479		0	400	161.152.000	22	0	0	0	0	22	0	5,50	0,00	501	0	111,33	0,00	RSUD M. Natsir	Peningkatan kualita SDM merupakan salad satu doktor peningkatan layanan rumah sakit	Tidak tersedianya anggaran APBD untuk peningkatan kompetensi SDMK	Pemenuhan Kompetensi SDM menggunakan dana BLUD dan Sponshorship
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						111,33	0,00					
Predikat Kinerja																						ST	SR					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
								I		II	III									IV									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH				105.286.304.412		126.237.287.574		145.604.793.000		24.489.122.872		0	0	0		24.489.122.872		16,82		150.726.410.446		143,16					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				105.286.304.412		126.237.287.574		145.604.793.000		24.489.122.872		0	0	0		24.489.122.872		16,82		150.726.410.446		143,16					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				105.286.304.412		126.237.287.574		145.604.793.000		24.489.122.872		0	0	0		24.489.122.872		16,82		150.726.410.446		143,16					
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	persen		103.786.304.412	62.11	124.194.501.444	50	140.000.000.000	7.7	24.489.122.872		0	0	0	7.7	24.489.122.872	15,40	17,49	69.81	148.683.624.316	inf	143,26		Pendapatan BLUD TW I dibagi dengan total seluruh belanja RS			
			Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	persen			103.52		100		12.8						12.8		12,80		116.32		inf		Pendapatan BLUD TW I dibagi dengan total seluruh belanja RS				
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen			100		100		25						25		25,00		125		inf		Terlaksananya Kegiatan Operasional Setiap Triwulan				
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	34.786.304.412	95.84	42.882.606.852	100	50.000.000.000	29.3	13.572.092.991	0	0	0	0	29.3	13.572.092.991	29,30	27,14	125.14	56.454.699.843	125,14	162,29		Realiasi gaji dan tunjangan ASN dibagi target anggaran			
1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	396	34.786.304.412	95.84	42.882.606.852	396	50.000.000.000	29.3	13.572.092.991		0	0	0	29.3	13.572.092.991	7,40	27,14	125.14	56.454.699.843	31,60	162,29	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							31,60	162,29					
Predikat Kinerja																							SR	ST					
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	persen	52	69.000.000.000	62.11	81.311.894.592	50	90.000.000.000	7.7	10.917.029.881	0	0	0	0	7.7	10.917.029.881	15,40	12,13	69.81	92.228.924.473	134,25	133,67					
2	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	69.000.000.000	1	81.311.894.592	1	90.000.000.000	1	10.917.029.881		0	0	0	1	10.917.029.881	100,00	12,13	2	92.228.924.473	200,00	133,67	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	66,83					
Predikat Kinerja																							ST	S					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen		1.500.000.000	92.21	2.042.786.130	95	5.604.793.000	92.21		0	0	0	0	92.21		0	97,06	0,00	184.42	2.042.786.130	inf	136,19	Masih menggunakan realisasi IKM pada tahun 2024			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persen	100	1.500.000.000	100	2.042.786.130	95	5.604.793.000	25	0	0	0	0	0	25	0	26,32	0,00	125	2.042.786.130	125,00	136,19		sudah dilakukan proses pengadaan melalui E-Katalog	terdapatnya beberapa alat kesehatan yang turun tayang pada sistem E-Katalog	mengkaji untuk perubahan metode pengadaan
1	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.500.000.000	6	1.548.240.200	1	5.604.793.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6	1.548.240.200	600,00	103,22	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	sudah dilakukan proses pengadaan melalui E-Katalog	terdapatnya beberapa alat kesehatan yang turun tayang pada sistem E-Katalog	mengkaji untuk perubahan metode pengadaan	
2	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0	0	1	494.545.930	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	494.545.930	inf	inf	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	Tidak tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan RS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				25.534.170.394		255.696.684.298		999.634.563.785		39.033.222.404	0	0	0	39.033.222.404		3,90		294.729.906.702		1.154,26						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.534.170.394		255.696.684.298		999.634.563.785		39.033.222.404	0	0	0	39.033.222.404		3,90		294.729.906.702		1.154,26						
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				25.534.170.394		255.696.684.298		999.634.563.785		39.033.222.404	0	0	0	39.033.222.404		3,90		294.729.906.702		1.154,26						
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0	0	56.066.486.923	100	60.634.129.440	0	12.115.349.072	0	0	0	12.115.349.072	0,00	19,98	0	68.181.835.995	nan	inf						
			-	-			0		0		0					0		nan		0		nan						
1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat	Dokumen	0	0	0	403.170.345	15	519.350.618	0	3.185.000	0	0	0	0	3.185.000	0,00	0,61	0	406.355.345	nan	inf					
1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	169.987.334	3	232.340.618	0	340.000	0	0	0	0	340.000	0,00	0,15	0	170.327.334	nan	inf	DINAS BMCKTR				
2	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	57.033.390	2	82.010.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	57.033.390	nan	inf	DINAS BMCKTR					
3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	176.149.621	3	205.000.000	0	2.845.000	0	0	0	0	2.845.000	0,00	1,39	0	178.994.621	nan	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf				
Predikat Kinerja																							-	-				
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	37.484.852.410	0	32.878.017.716	0	8.788.287.479	0	0	0	0	8.788.287.479	nan	26,73	0	46.273.139.889	nan	inf					
4	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	0	35.677.298.000	331	32.740.000.000	0	8.788.287.479	0	0	0	0	8.788.287.479	0,00	26,84	0	44.465.585.479	nan	inf	DINAS BMCKTR				
5	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	1.744.344.900	12	88.017.716	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.744.344.900	nan	inf	DINAS BMCKTR					
6	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	Laporan	0	0	0	63.209.510	13	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	63.209.510	nan	inf	DINAS BMCKTR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
		Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	211.398.930	0	463.925.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	211.398.930	nan	inf					
7	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
8	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	211.398.930	1	263.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	211.398.930	nan	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	310.721.499	0	422.280.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	310.721.499	nan	inf					
9	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	229.789.500	1	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	229.789.500	nan	inf	DINAS BMCKTR				
10	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	80.931.999	20	182.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	80.931.999	nan	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	2.721.896.664	0	3.093.312.000	0	612.518.370	0	0	0	0	0	612.518.370	nan	19,80	0	3.334.415.034	nan	inf				
11	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	54.930.600	1	65.000.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	54.930.600	inf	inf	DINAS BMCKTR				
12	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
13	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	16.038.000	1	1.701.300	0	0	0	1	1.701.300	100,00	10,61	1	1.701.300	inf	inf	DINAS BMCKTR				
14	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	189.846.601	1	185.000.000	1	16.780.000	0	0	0	1	16.780.000	100,00	9,07	1	206.626.601	inf	inf	DINAS BMCKTR				
15	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
16	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	25.114.600	1	15.000.000	0.25	1.884.300	0	0	0	0.25	1.884.300	25,00	12,56	1.25	26.998.900	inf	inf	DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)		(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp	K						Rp	K
17	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	13.238.200	1	15.000.000	0.5	2.155.000		0	0	0	0.5	2.155.000	50,00	14,37	1.5	15.393.200	inf	inf	DINAS BMCKTR			
18	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	14.824.020	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	14.824.020	inf	inf	DINAS BMCKTR				
19	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	12.958.350	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	12.958.350	inf	inf	DINAS BMCKTR				
20	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	0.25	1.855.100	0	0	0	0.25	1.855.100	25,00	12,37	1.25	16.855.100	inf	inf	DINAS BMCKTR				
21	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
22	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	129.823.363	1	108.000.000	1	5.596.500	0	0	0	1	5.596.500	100,00	5,18	1	135.419.863	inf	inf	DINAS BMCKTR				
23	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	42.507.922	12	30.500.000	3	4.700.000	0	0	0	3	4.700.000	25,00	15,41	3	47.207.922	inf	inf	DINAS BMCKTR				
24	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	3	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
25	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	121.370.928	12	130.247.000	3	8.925.350	0	0	0	3	8.925.350	25,00	6,85	15	130.296.278	inf	inf	DINAS BMCKTR				
26	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	87.790.000	12	84.540.000	3	33.157.850	0	0	0	3	33.157.850	25,00	39,22	15	120.947.850	inf	inf	DINAS BMCKTR				
27	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	69.620.000	12	189.908.000	3	24.895.250	0	0	0	3	24.895.250	25,00	13,11	15	94.515.250	inf	inf	DINAS BMCKTR				
28	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	110.281.750	12	96.070.000	3	33.952.950	0	0	0	3	33.952.950	25,00	35,34	15	144.234.700	inf	inf	DINAS BMCKTR				
29	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	1.585.680.480	12	946.151.000	3	367.012.420	0	0	0	3	367.012.420	25,00	38,79	3	1.952.692.900	inf	inf	DINAS BMCKTR				
30	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	103.385.275	12	95.858.000	3	18.483.200	0	0	0	3	18.483.200	25,00	19,28	15	121.868.475	inf	inf	DINAS BMCKTR				
31	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	100.000.000	1	22.923.450	0	0	0	1	22.923.450	8,33	22,92	1	22.923.450	inf	inf	DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K							Rp
		[UPTD Workshop dan Peralatan]	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
32	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	116.000.000	3	32.495.700	0	0	0	3	32.495.700	25,00	28,01	3	32.495.700	inf	inf	DINAS BMCKTR			
33	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	12	39.662.575	1	35.000.000	12	0	0	0	0	12	0	1.200,00	0,00	24	39.662.575	inf	inf	DINAS BMCKTR			
34	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	12	105.862.000	1	140.000.000	12	36.000.000	0	0	0	12	36.000.000	1.200,00	25,71	24	141.862.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	2.759.482.017	0	6.059.968.844	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	2.759.482.017	nan	inf				
35	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	3	102.330.000	6	213.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	102.330.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
36	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	2	68.220.000	2	71.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	68.220.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
37	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	34.110.000	1	35.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	34.110.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
38	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	1	34.600.000	4	142.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	34.600.000	inf	inf	DINAS BMCKTR	Efisiensi		
39	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	2	65.283.000	2	71.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	65.283.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
40	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	4	142.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
41	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	2.034.046.044	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
42	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
43	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
44	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
45	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	77.601.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																				
46	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	58.328.000	1	42.792.200	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	58.328.000	inf	inf	DINAS BMCKTR																						
47	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	51.350.000	1	61.262.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	51.350.000	inf	inf	DINAS BMCKTR	Efisiensi																				
48	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	53.138.600	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR																					
49	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	30.775.000	1	65.663.700	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	30.775.000	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
50	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	1	30.500.000	1	99.826.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	30.500.000	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
51	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	37.397.800	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR																					
52	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1.809.200.456	21	422.280.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.809.200.456	nan	inf	DINAS BMCKTR																					
53	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	2	35.659.500	10	195.889.100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	35.659.500	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
54	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	33.877.000	10	146.292.300	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	33.877.000	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
55	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	4	102.900.000	6	1.071.641.700	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	102.900.000	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
56	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	51.200.000	6	83.005.900	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	51.200.000	inf	inf	DINAS BMCKTR	Efisiensi																				
57	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	1	213.425.271	5	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	213.425.271	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
58	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	2	37.723.790	4	57.731.800	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	37.723.790	inf	inf	DINAS BMCKTR																					
59	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	400.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR																					
60	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR																					
61	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	210.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	0	0	0	6.715.037.307	0	8.396.604.128	0	2.161.136.295	0	0	0	0	0	0	2.161.136.295	nan	25,74	0	8.876.173.602	nan	inf																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemerintahan Daerah																									
62	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	1	10.813.650	1	12.000.000	1	200.000	0	0	0	1	200.000	100,00	1,67	2	11.013.650	inf	inf	DINAS BMCKTR			
63	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	0	12	29.400.000	3	2.402.082	0	0	0	3	2.402.082	25,00	8,17	15	2.402.082	inf	inf	DINAS BMCKTR			
64	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	5.217.660	12	27.870.000	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	5.217.660	inf	inf	DINAS BMCKTR			
65	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	0	12	96.000.000	1	13.015.716	0	0	0	1	13.015.716	8,33	13,56	13	13.015.716	inf	inf	DINAS BMCKTR			
66	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	12.958.350	12	25.000.000	4	4.702.588	0	0	0	4	4.702.588	33,33	18,81	16	17.660.938	inf	inf	DINAS BMCKTR			
67	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	17.957.999	12	28.020.000	3	3.416.868	0	0	0	3	3.416.868	25,00	12,19	15	21.374.867	inf	inf	DINAS BMCKTR			
68	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	0	12	30.000.000	3	8.022.638	0	0	0	3	8.022.638	25,00	26,74	15	8.022.638	inf	inf	DINAS BMCKTR			
69	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	14.585.544	12	19.200.000	3	3.525.410	0	0	0	3	3.525.410	25,00	18,36	15	18.110.954	inf	inf	DINAS BMCKTR			
70	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	1.933.619.078	1	1.880.000.000	3	535.242.559	0	0	0	3	535.242.559	300,00	28,47	15	2.468.861.637	inf	inf	DINAS BMCKTR			
71	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	13.963.030	12	268.547.636	3	67.474.776	0	0	0	3	67.474.776	25,00	25,13	15	81.437.806	inf	inf	DINAS BMCKTR			
72	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	3.864.878.172	1	3.987.327.350	1	1.056.720.580	0	0	0	1	1.056.720.580	100,00	26,50	1	4.921.598.752	inf	inf	DINAS BMCKTR			
73	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	450.000.000	1	126.990.905	0	0	0	1	126.990.905	8,33	28,22	1	126.990.905	inf	inf	DINAS BMCKTR			
74	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	276.923.283	3	67.474.776	0	0	0	3	67.474.776	25,00	24,37	3	67.474.776	inf	inf	DINAS BMCKTR			
75	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	253.531.409	12	376.920.404	3	61.482.309	0	0	0	3	61.482.309	25,00	16,31	15	315.013.718	inf	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K												
76	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	184.975.702	12	226.824.150	3	67.474.776	0	0	0	3	67.474.776	25,00	29,75	15	252.450.478	inf	inf	DINAS BMCKTR			
77	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	213.392.953	12	359.019.259	3	71.860.656	0	0	0	3	71.860.656	25,00	20,02	15	285.253.609	inf	inf	DINAS BMCKTR			
78	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	189.143.760	12	303.552.046	4	71.129.656	0	0	0	4	71.129.656	33,33	23,43	16	260.273.416	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	5.459.927.751	0	8.800.671.134	0	550.221.928	0	0	0	0	550.221.928	nan	6,25	0	6.010.149.679	nan	inf				
79	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	3	67.945.125	4	115.530.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	67.945.125	inf	inf	DINAS BMCKTR				
80	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	20	995.852.453	20	900.000.000	20	59.800.870	0	0	0	20	59.800.870	100,00	6,64	40	1.055.653.323	inf	inf	DINAS BMCKTR			
81	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	7	78.458.780	7	128.130.000	2.3	22.786.700	0	0	0	2.3	22.786.700	32,86	17,78	9.3	101.245.480	inf	inf	DINAS BMCKTR			
82	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	15	480.000.000	1	3.775.600	0	0	0	1	3.775.600	6,67	0,79	1	3.775.600	inf	inf	DINAS BMCKTR			
83	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	3	105.130.000	11	256.390.000	2.75	42.635.230	0	0	0	2.75	42.635.230	25,00	16,63	5.75	147.765.230	inf	inf	DINAS BMCKTR			
84	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	5	108.161.291	12	147.030.000	1	4.622.800	0	0	0	1	4.622.800	8,33	3,14	6	112.784.091	inf	inf	DINAS BMCKTR			
85	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	0	0	0	0	5	119.730.000	3	7.604.850	0	0	0	3	7.604.850	60,00	6,35	3	7.604.850	inf	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K						Rp	K
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
86	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	12	181.632.434	12	286.157.000	4	26.154.660	0	0	0	4	26.154.660	33,33	9,14	16	207.787.094	inf	inf	DINAS BMCKTR			
87	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	10	219.135.000	2.5	1.900.000	0	0	0	2.5	1.900.000	25,00	0,87	2.5	1.900.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
88	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	30	1.068.442.044	46	800.000.000	1	90.195.588	0	0	0	1	90.195.588	2,17	11,27	31	1.158.637.632	inf	inf	DINAS BMCKTR			
89	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	6	131.101.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
90	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	5	151.334.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR	Efisiensi			
91	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	8	361.836.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
92	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	20	599.662.458	20	700.000.000	0	29.900.000	0	0	0	0	29.900.000	0,00	4,27	20	629.562.458	inf	inf	DINAS BMCKTR			
93	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	10	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
94	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	10	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR	Efisiensi			
95	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	10	6.985.000	10	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	6.985.000	inf	inf	DINAS BMCKTR				
96	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	39.125.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	39.125.000	inf	inf	DINAS BMCKTR	Efisiensi			
97	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	yang Dipelihara/Direhabilitasi																								
98	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	151.715.200	1	222.787.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	151.715.200	inf	inf	DINAS BMCKTR			
99	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Workshop dan Peralatan]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
100	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	30.000.000	1	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	30.000.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
101	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	2	2.026.817.966	2	3.102.210.934	2	260.845.630	0	0	0	2	260.845.630	100,00	8,41	4	2.287.663.596	inf	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-		0		0	0	4.500.286.000	0	6.760.000	0	0	0	0	6.760.000	nan	0,15	0	6.760.000	nan	inf				
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	4.500.286.000	0	6.760.000	0	0	0	0	6.760.000	nan	0,15	0	6.760.000	nan	inf				
1	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga		0		0	1	200.000.000	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0,00	0,65	0	1.300.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
2	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota		0		0	19	3.150.286.000	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0,00	0,08	0	2.600.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
3	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen		0		0	3	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
4	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota		0		0	19	450.000.000	0	2.860.000	0	0	0	0	2.860.000	0,00	0,64	0	2.860.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-		0		0	0	682.182.000	0	6.244.000	0	0	0	0	6.244.000	nan	0,92	0	6.244.000	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I		II	III									IV				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	0	0	0	0	0	682.182.000	0	6.244.000	0	0	0	0	6.244.000	nan	0,92	0	6.244.000	nan	inf				
1	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten/ Kota		0		0	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
2	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
3	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/Kota		0		0	19	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
4	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen		0		0	1	82.182.000	0	6.244.000	0	0	0	0	6.244.000	0,00	7,60	0	6.244.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	0		0	0	0	760.236.000	0	14.291.000	0	0	0	0	14.291.000	nan	1,88	0	14.291.000	nan	inf				
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-	0	0	0	0	0	760.236.000	0	14.291.000	0	0	0	0	14.291.000	nan	1,88	0	14.291.000	nan	inf				
1	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota		0		0	19	110.236.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
2	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
3	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/ kota		0		0	4	450.000.000	0	14.291.000	0	0	0	0	14.291.000	0,00	3,18	0	14.291.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	0		0	0	0	568.409.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	568.409.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan		0		0	3	568.409.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)		(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				Rp		K	Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-		0		325.874.241	0	356.681.630.001	0	281.982.629	0	0	0	0	281.982.629	nan	0,08	0	607.856.870	nan	inf			
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	325.874.241	0	356.681.630.001	0	281.982.629	0	0	0	0	281.982.629	nan	0,08	0	607.856.870	nan	inf			
1	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang		0		0	28	200.000.000	0	14.958.025	0	0	0	0	14.958.025	0,00	7,48	0	14.958.025	nan	inf	DINAS BMCKTR		
2	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang		0	50	176.846.800	300	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	inf	50	177.566.800	inf	inf	DINAS BMCKTR	Nihil	Nihil
3	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara		0		0	74	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR		
4	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung		0		0	1	11.035.243.117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR		
5	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota		0		0	19	0	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	inf	0	720.000	nan	inf	DINAS BMCKTR	Nihil	Nihil
6	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen		0		0	4	345.052.848.295	0	258.114.704	0	0	0	0	258.114.704	0,00	0,07	0	258.114.704	nan	inf	DINAS BMCKTR		
7	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen		0	100	149.027.441	50	218.538.589	7	7.469.900	0	0	0	7	7.469.900	14,00	3,42	107	156.497.341	inf	inf	DINAS BMCKTR	Nihil	Nihil
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	0	0	0	1.694.729.000	0	1.694.729.000	0	17.207.960	0	0	0	0	17.207.960	nan	1,02	0	17.207.960	nan	inf			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I		II	III													IV		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	0	1.694.729.000	0	17.207.960	0	0	0	0	0	17.207.960	nan	1,02	0	17.207.960	nan	inf				
1	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan		0		0	1	593.468.361	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR					
2	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		0		0	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR					
3	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen		0		0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR					
4	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen		0		0	13	200.000.000	0	16.487.960	0	0	0	0	0	16.487.960	0,00	8,24	0	16.487.960	nan	inf	DINAS BMCKTR				
5	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota [UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung]	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota		0		0	19	676.260.639	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0,00	0,11	0	720.000	nan	inf	DINAS BMCKTR		Nihil		Nihil
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	25.534.170.394	0	199.304.323.134	0	571.978.305.944	0	26.543.082.633	0	0	0	0	0	26.543.082.633	nan	4,64	0	225.847.405.767	nan	884,49						
			Persentase Kemantapan Jalan	Persen			70.55		81		0					0		0,00		70.55		inf							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	-	-	0	25.534.170.394	0	199.304.323.134	0	571.978.305.944	0	26.543.082.633	0	0	0	0	0	26.543.082.633	nan	4,64	0	225.847.405.767	nan	884,49					
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Unit	0		0		30		0		0	0	0	0		0,00		0		nan							
			Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Laporan	13		99.62		13		7.77		0	0	0	7.77		59,77		107.39		826,08							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Terlaksananya Peningkatan Kemantapanan Jalan Provinsi	meter	555		0		555		0		0	0	0	0		0,00		0		0,00					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Meningkatkan Kemantapanan Jalan Provinsi	Km	0		0		117.6		0		0	0	0	0		0,00		0		nan					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Meningkatkan Kemantapanan Jalan Provinsi	Km	260.1		260.1		115.6		10.4		0	0	0	10.4		9,00		270.5		104,00					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	Km	139.95		263.75		121.05		13.8		0	0	0	13.8		11,40		277.55		198,32					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	Km	0		0		104.4		0		0	0	0	0		0,00		0		nan					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Km	133.7		220.7		133.7		12.69		0	0	0	12.69		9,49		233.39		174,56					
			Meningkatnya Kemantapanan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	Km	0		220.11		118.98		28.18		0	0	0	28.18		23,68		248.29		inf					
1	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi [UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	100	1.120.845.000	100	1.196.755.248	100	2.003.968.000	7.77	87.121.852	0	0	0	7.77	87.121.852	7,77	4,35	107.77	1.283.877.100	107,77	114,55	DINAS BMCKTR			
2	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	0	0	0	0	1690	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
3	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	8	317.035.350	125	197.208.544	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	317.035.350	inf	inf	DINAS BMCKTR			
4	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	0	0	55	320.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR			
5	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	79	92.994.000	79	955.149.499	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	79	92.994.000	inf	inf	DINAS BMCKTR			
6	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	73	196.570.730	73	268.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	73	196.570.730	inf	inf	DINAS BMCKTR			
7	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	73	160.015.396	83	280.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	73	160.015.396	inf	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					
		[UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]																									
8	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	40	49.903.000	51	418.706.345	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	49.903.000	inf	inf	DINAS BMCKTR	Rencana Pelaksanaan Agustus 2025			
9	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	0	0	260.1	227.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
10	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	12	137.604.773	198.83	140.017.640	3	44.983.184	0	0	0	3	44.983.184	1,51	32,13	15	182.587.957	inf	inf	DINAS BMCKTR			
11	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	220.11	68.305.420	220,11	140.017.640	52.46	33.737.388	0	0	0	52.46	33.737.388	23,85	24,10	272.57	102.042.808	inf	inf	DINAS BMCKTR			
12	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	13	702.112.080	1690	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	702.112.080	inf	inf	DINAS BMCKTR				
13	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	263.75	66.678.331	263,75	210.026.460	65.9	35.132.748	0	0	0	65.9	35.132.748	25,06	16,73	329.65	101.811.079	inf	inf	DINAS BMCKTR			
14	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	0	0	212.06	137.158.600	217.96	140.017.640	62.38	44.983.184	0	0	0	62.38	44.983.184	28,62	32,13	274.44	182.141.784	inf	inf	DINAS BMCKTR			
15	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0	0	16.91	59.119.100.581	135,5	104.750.000.000	0	5.290.272.352	0	0	0	0	5.290.272.352	0,00	5,05	16.91	64.409.372.933	inf	inf	DINAS BMCKTR			
16	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	0	0	15.94	54.095.293.347	108	73.600.000.000	0	3.303.146.506	0	0	0	0	3.303.146.506	0,00	4,49	15.94	57.398.439.853	inf	inf	DINAS BMCKTR			
17	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	0	0	1	1.503.686.592	5	84.000.000.000	0	5.828.415.423	0	0	0	0	5.828.415.423	0,00	6,94	1	7.332.102.015	inf	inf	DINAS BMCKTR			
18	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0	0	220.11	4.279.621.979	220,11	6.472.506.946	28.18	102.993.016	0	0	0	28.18	102.993.016	12,81	1,59	248.29	4.382.614.995	inf	inf	DINAS BMCKTR			
19	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0	0	212.06	5.514.542.518	217.96	7.731.712.459	29.69	637.759.351	0	0	0	29.69	637.759.351	13,62	8,25	241.75	6.152.301.869	inf	inf	DINAS BMCKTR			
20	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	137.95	12.735.254.610	263.75	5.955.942.881	263,75	6.996.525.646	65.9	968.384.582	0	0	0	65.9	968.384.582	25,06	13,84	329.65	6.924.327.463	238,96	54,37	DINAS BMCKTR			
21	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	133.7	11.678.070.784	220.7	5.400.032.859	270.70	5.828.317.525	12.69	234.592.125	0	0	0	12.69	234.592.125	4,69	4,03	233.39	5.634.624.984	174,56	48,25	DINAS BMCKTR			
22	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0	0	0	0	260.1	8.994.184.393	10.4	113.851.275	0	0	0	10.4	113.851.275	4,00	1,27	10.4	113.851.275	inf	inf	DINAS BMCKTR			
23	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0	0	198.83	4.742.097.926	198.83	6.540.568.701	51.51	2.426.717.824	0	0	0	51.51	2.426.717.824	25,91	37,10	250.34	7.168.815.750	inf	inf	DINAS BMCKTR			
24	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan [UPTD Workshop dan Peralatan]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0	0	1	919.302.053	1	1.000.000.000	0.1	57.785.600	0	0	0	0.1	57.785.600	10,00	5,78	1.1	977.087.653	inf	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
25	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM	0	0	0.13	1.353.117.500	1	25.000.000.000	0		0			0	0,00	0,00	0.13	1.353.117.500	inf	inf	DINAS BMCKTR				
26	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	0	0	0	0	2	85.200.000.000	0		0			0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINAS BMCKTR				
27	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	0	0	0.6	2.275.800.000	0		0			0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINAS BMCKTR				
28	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	0	0	0.952	2.280.000.000	0		0			0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINAS BMCKTR				
29	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	2	673.111.671	2	3.000.000.000	0		0			0	0,00	0,00	2	673.111.671	inf	inf	DINAS BMCKTR				
30	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	2	398.576.000	2	2.900.000.000	0		0			0	0,00	0,00	2	398.576.000	inf	inf	DINAS BMCKTR				
31	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	0.03	137.752.000	2	3.858.223.300	0		0			0	0,00	0,00	0.03	137.752.000	inf	inf	DINAS BMCKTR				
32	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan [UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V]	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	0	1.49	22.389.750	1,49	2.228.179.206	0		0			0	0,00	0,00	1.49	22.389.750	inf	inf	DINAS BMCKTR				
33	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	0	0	3.8	16.966.212.011	1	15.000.000.000	0	1.797.271.480	0			1.797.271.480	0,00	11,98	3.8	18.763.483.491	inf	inf	DINAS BMCKTR				
34	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	0	0	6	2.789.862.417	11	17.340.570.000	0		0			0	0,00	0,00	6	2.789.862.417	inf	inf	DINAS BMCKTR				
35	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0	0	8.8	31.734.295.617	10	91.679.420.000	0	5.535.934.743	0			5.535.934.743	0,00	6,04	8.8	37.270.230.360	inf	inf	DINAS BMCKTR				
36	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	KM	0	0	1	574.252.504	1690	1.500.000.000	0		0			0	0,00	0,00	1	574.252.504	inf	inf	DINAS BMCKTR				
37	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	2	3.500.000.000	0		0			0	0,00	0,00	0		nan	nan	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-		0	88.5		0	0	2.134.656.400	88.5	48.305.110				48.305.110	inf	2,26	177	48.305.110	inf	inf				
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-	1	0	1		0	0	585.415.012	0	14.280.000	0	0	0	14.280.000	nan	2,44	1	14.280.000	100,00	inf				
1	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen		0			0	1	235.415.012	0	10.350.000		0	0	10.350.000	0,00	4,40	0	10.350.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
2	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		0			0	3	200.000.000	0	1.530.000		0	0	1.530.000	0,00	0,77	0	1.530.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang		0		0	225	150.000.000	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00	1,60	0	2.400.000	nan	inf	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-	0	0	0	0	0	955.636.451	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
4	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan		0		0	1	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
5	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang		0		0	14	305.636.451	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	592.046.650	0	25.685.000	0	0	0	0	0	25.685.000	nan	4,34	0	25.685.000	nan	inf				
6	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan		0		0	1	347.659.400	0	13.335.000	0	0	0	0	0	13.335.000	0,00	3,84	0	13.335.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
7	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen		0		0	1	244.387.250	0	12.350.000	0	0	0	0	0	12.350.000	0,00	5,05	0	12.350.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	1.558.287	0	8.340.110	0	0	0	0	0	8.340.110	nan	535,21	0	8.340.110	nan	inf				
8	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus		0		0	1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
9	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		0		0	1	300.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	400,00	0	1.200.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
10	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		0		0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS BMCKTR				
11	1.03.12.1.04.0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan		0		0	1	200.000	0	3.015.110	0	0	0	0	0	3.015.110	0,00	1.507,56	0	3.015.110	nan	inf	DINAS BMCKTR			
12	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara		0		0	1	300.000	0	2.925.000	0	0	0	0	0	2.925.000	0,00	975,00	0	2.925.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			
13	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen		0		0	1	258.287	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	464,60	0	1.200.000	nan	inf	DINAS BMCKTR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI				0		0		179.329.283.000		10.312.029.198	0	0	0		10.312.029.198		5,75		10.312.029.198	inf				
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan				
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		179.329.283.000		10.312.029.198	0	0	0		10.312.029.198		5,75		10.312.029.198	inf				
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0		0		179.329.283.000		10.312.029.198	0	0	0		10.312.029.198		5,75		10.312.029.198	inf				
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	33.763.743.989	19.28	5.879.731.382	0	0	0	19.28	5.879.731.382	inf	17,41	19.28	5.879.731.382	inf	inf			
1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	820.000.000	2.13	4.430.000	0	0	0	0	2.13	4.430.000	inf	0,54	2.13	4.430.000	inf	inf		
1	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	390.000.000	5.28	3.750.000	0	0	0	5.28	3.750.000	264,00	0,96	5.28	3.750.000	inf	inf	DINAS PSDA		
2	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA			
3	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	230.000.000	0.66	680.000	0	0	0	0.66	680.000	66,00	0,30	0.66	680.000	inf	inf	DINAS PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	16.988.657.374	25.28	4.554.899.615	0	0	0	0	25.28	4.554.899.615	inf	26,81	25.28	4.554.899.615	inf	inf		
4	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	124	16.282.457.374	25.92	4.433.619.615	0	0	0	0	25.92	4.433.619.615	20,90	27,23	25.92	4.433.619.615	inf	inf	DINAS PSDA	
5	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	706.200.000	17.31	121.280.000	0	0	0	0	17.31	121.280.000	1.731,00	17,17	17.31	121.280.000	inf	inf	DINAS PSDA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	264.400.000	12.76	29.914.990	0	0	0	0	12.76	29.914.990	inf	11,31	12.76	29.914.990	inf	inf		
6	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	174.400.000	17.15	29.914.990	0	0	0	0	17.15	29.914.990	1.715,00	17,15	17.15	29.914.990	inf	inf	DINAS PSDA	
7	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DINAS PSDA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	197.500.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	nan	nan		
8	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	97.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DINAS PSDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K				
9	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	135	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.955.350.426	3.42	402.343.375	0	0	0	0	3.42	402.343.375	inf	20,58	3.42	402.343.375	inf	inf				
10	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	18.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
11	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	6.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
12	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	8.241.700	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
13	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	216.845.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
14	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	120.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
15	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
16	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
17	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	43.000.000	3.13	1.994.500	0	0	0	3.13	1.994.500	313,00	4,64	3.13	1.994.500	inf	inf	DINAS PSDA				
18	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	250.000.000	2.34	10.675.160	0	0	0	2.34	10.675.160	234,00	4,27	2.34	10.675.160	inf	inf	DINAS PSDA				
19	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	13.615.500	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
20	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	55.000.000	2.19	7.595.945	0	0	0	2.19	7.595.945	219,00	13,81	2.19	7.595.945	inf	inf	DINAS PSDA				
21	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.850.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
22	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	6.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
23	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	10	70.000.000	3.5	2.448.000	0	0	0	3.5	2.448.000	35,00	3,50	3.5	2.448.000	inf	inf	DINAS PSDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
										I	II	III	IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																		
24	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																					
25	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																					
26	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	123.295.600	8.4	120.564.750	0	0	0	0	8.4	120.564.750	840,00	97,79	8.4	120.564.750	inf	inf	DINAS PSDA																					
27	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	50	624.502.626	3.96	159.295.770	0	0	0	0	3.96	159.295.770	7,92	25,51	3.96	159.295.770	inf	inf	DINAS PSDA																					
28	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	15	110.000.000	14.29	99.769.250	0	0	0	0	14.29	99.769.250	95,27	90,70	14.29	99.769.250	inf	inf	DINAS PSDA																					
29	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	5	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																					
30	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	5.947.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan																					
31	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
32	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
33	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
34	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
35	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	5.862.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
36	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	4.435.173.189	18,62	870.501.652	0	0	0	0	0	18,62	870.501.652	inf	19,63	18,62	870.501.652	inf	inf																					
37	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I				II	III	IV	(12) = 8+9+10+11			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12							(15) = 14/5 * 100%		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
38	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA					
39	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	70.000.000	21.47	15.026.785	0	0	0	21.47	15.026.785	2.147,00	21,47	21.47	15.026.785	inf	inf	DINAS PSDA						
40	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	600.000.000	15.08	105.409.312	0	0	0	15.08	105.409.312	1.508,00	17,57	15.08	105.409.312	inf	inf	DINAS PSDA						
41	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	97.181.700	21.63	21.856.064	0	0	0	21.63	21.856.064	2.163,00	22,49	21.63	21.856.064	inf	inf	DINAS PSDA						
42	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	110.000.000	13.52	14.867.441	0	0	0	13.52	14.867.441	1.352,00	13,52	13.52	14.867.441	inf	inf	DINAS PSDA						
43	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	2	237.161.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA					
44	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	8.675.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA					
45	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.800.000.000	19.72	408.958.821	0	0	0	19.72	408.958.821	1.972,00	22,72	19.72	408.958.821	inf	inf	DINAS PSDA						
46	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	755.154.289	14.98	105.437.136	0	0	0	14.98	105.437.136	1.498,00	13,96	14.98	105.437.136	inf	inf	DINAS PSDA						
47	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	755.000.000	26.61	198.946.093	0	0	0	26.61	198.946.093	2.661,00	26,35	26.61	198.946.093	inf	inf	DINAS PSDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.155.663.000	1.01	17.641.750	0	0	0	0	1.01	17.641.750	inf	0,56	1.01	17.641.750	inf	inf						
48	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	10	100.000.000	3.07	3.067.000	0	0	0	3.07	3.067.000	30,70	3,07	3.07	3.067.000	inf	inf	DINAS PSDA						
49	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	11	91.061.000	4.16	3.785.000	0	0	0	4.16	3.785.000	37,82	4,16	4.16	3.785.000	inf	inf	DINAS PSDA						
50	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	32	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
51	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		0		0	2	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
52	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		0		0	3	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
53	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	9	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
54	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	25	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
55	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	1.525.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
56	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	5	82.212.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
57	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
58	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	2.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
59	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
60	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	4	210.000.000	5.14	10.789.750	0	0	0	0	5.14	10.789.750	128,50	5,14	5.14	10.789.750	inf	inf	DINAS PSDA			
61	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	30	15.390.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-		0		0	0	141.019.173.011	30.74	4.432.297.816	0	0	0	0	30.74	4.432.297.816	inf	3,14	30.74	4.432.297.816	inf	inf				
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	57.656.373.775	10.43	398.443.650	0	0	0	0	10.43	398.443.650	inf	0,69	10.43	398.443.650	inf	inf				
1	1.03.02.1.01.0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM		0		0	0.067	1.200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
2	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman	KM		0		0	0.02	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I		II	III													IV	
										K	Rp	K	Rp													K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		Pengaman Pantai Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara																								
3	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	0.15	87.696.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
4	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen		0		0	1	180.430.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
5	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0		0	3	396.820.300	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
6	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0		0	3	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
7	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga		0		0	4	857.460.000	0.23		1.020.000	0	0	0	0.23	1.020.000	5,75	0,12	0.23	1.020.000	inf	inf	DINAS PSDA		
8	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM		0		0	0.638	5.679.000.000	0.21		10.590.000	0	0	0	0.21	10.590.000	32,92	0,19	0.21	10.590.000	inf	inf	DINAS PSDA		
9	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM		0		0	0.340	2.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
10	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	1	1.900.000.000	0.96		30.600.000	0	0	0	0.96	30.600.000	96,00	1,61	0.96	30.600.000	inf	inf	DINAS PSDA		
11	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	8	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
12	1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit		0		0	0.438	7.983.575.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
13	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen		0		0	5	1.609.427.475	20.83		110.788.500	0	0	0	20.83	110.788.500	416,60	6,88	20.83	110.788.500	inf	inf	DINAS PSDA		
14	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen		0		0	5	2.500.000.000	13.44		94.849.000	0	0	0	13.44	94.849.000	268,80	3,79	13.44	94.849.000	inf	inf	DINAS PSDA		
15	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0		0	10	800.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
16	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		0		0	3	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		
17	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0		0	0.42	370.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
18	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0		0	0.20	3.883.565.000	6.02	99.186.000	0		0	0	6.02	99.186.000	3.010,00	2,55	6.02	99.186.000	inf	inf	DINAS PSDA			
19	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM		0		0	3	400.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
20	1.03.02.1.01.0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM		0		0	0,420	4.976.060.000	0		0		0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
21	1.03.02.1.01.0114	Peningkatan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan	Unit		0		0	0	1.200.000.000	0.18	1.776.500	0		0	0	0.18	1.776.500	inf	0,15	0.18	1.776.500	inf	inf	DINAS PSDA			
22	1.03.02.1.01.0116		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik		0		0	0	500.000.000	0		0		0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
23	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		0		0	1.78	14.802.340.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
24	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		0		0	0.710	3.220.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
25	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen		0		0	4	655.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
26	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen		0		0	5	1.305.000.000	6.61	49.633.650	0		0	0	6.61	49.633.650	132,20	3,80	6.61	49.633.650	inf	inf	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	83.362.799.236	35.68	4.033.854.166	0		0	0	0	35.68	4.033.854.166	inf	4,84	35.68	4.033.854.166	inf	inf			
27	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung		0		0	1	2.500.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
28	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		0		0	26.095	39.862.977.050	0.1	22.005.035	0		0	0	0.1	22.005.035	0,38	0,06	0.1	22.005.035	inf	inf	DINAS PSDA			
29	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung		0		0	7	13.250.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
30	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	119	6.475.665.375	15.95	859.302.278	0		0	0	15.95	859.302.278	13,40	13,27	15.95	859.302.278	inf	inf	DINAS PSDA			
31	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		0		0	160	7.477.838.400	15.88	1.391.641.473	0		0	0	15.88	1.391.641.473	9,93	18,61	15.88	1.391.641.473	inf	inf	DINAS PSDA			
32	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung		0		0	40	2.600.000.000	21.9	535.413.495	0		0	0	21.9	535.413.495	54,75	20,59	21.9	535.413.495	inf	inf	DINAS PSDA			
33	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung		0		0	40	1.790.187.300	17.89	291.125.979	0		0	0	17.89	291.125.979	44,73	16,26	17.89	291.125.979	inf	inf	DINAS PSDA			
34	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga		0		0	4	1.635.000.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			yang Diperkuat Kapasitasnya																									
35	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen		0		0	10	2.592.692.950	0.36	19.801.139	0	0	0	0	0.36	19.801.139	3,60	0,76	0.36	19.801.139	inf	inf	DINAS PSDA			
36	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN]	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		0		0	4	2.298.438.161	21.35	387.952.109	0	0	0	0	21.35	387.952.109	533,75	16,88	21.35	387.952.109	inf	inf	DINAS PSDA			
37	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		0		0	2	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
38	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi [UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA]	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		0		0	5	2.500.000.000	22.2	526.612.658	0	0	0	0	22.2	526.612.658	444,00	21,06	22.2	526.612.658	inf	inf	DINAS PSDA			
39	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya	DI		0		0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-		0		0	0	4.546.366.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	0	0	0	0	0	3.091.279.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang		0		0	48	437.930.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
2	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	168.697.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
3	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang		0		0	250	984.650.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
4	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		0		0	10	675.168.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
5	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	24.702.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
6	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang		0		0	250	464.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
7	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang		0		0	50	80.644.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
8	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga		0		0	15	254.487.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PSDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan	-	-	0	0	0	0	0	482.316.500	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Daerah Provinsi																												
9	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi		0		0	1	51.014.500	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
10	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung		0		0	5	75.564.500	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
11	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	188.625.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
12	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	50	167.112.500	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-	0	0	0	0	0	972.770.500	0		0	0	0	0	0	0		0	nan	0,00	0		0	nan	nan			
13	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan		0		0	25	206.865.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
14	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi		0		0	5	69.835.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
15	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha		0		0	25	196.070.500	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
16	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen		0		0	1	500.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINAS PSDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan						
Predikat Kinerja																							-	-						

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)					(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)																								
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				0		0		26.835.615.969	2.326.793.194		0	0	0		2.326.793.194		8,67		2.326.793.194		inf				
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		26.017.785.969	2.326.793.194		0	0	0		2.326.793.194		8,94		2.326.793.194		inf				
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0		0		26.017.785.969	2.326.793.194		0	0	0		2.326.793.194		8,94		2.326.793.194		inf				
1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	10.296.785.969	2.276.793.194		0	0	0	0	2.276.793.194	nan	22,11	0	2.276.793.194	nan	inf				
1.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	151.031.900	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	nan	0,73	0	1.100.000	nan	inf				
1	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	5	46.550.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
2	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	4	8.607.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
3	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	95.874.900	0	1.100.000		0	0	0	0	1.100.000	0,00	1,15	0	1.100.000	nan	inf	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	0	7.677.623.000	0	1.891.215.328	0	0	0	0	0	1.891.215.328	nan	24,63	0	1.891.215.328	nan	inf		
4	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	58	7.100.000.000	0	1.749.025.328		0	0	0	0	1.749.025.328	0,00	24,63	0	1.749.025.328	nan	inf	DISPERKIMTAN		
5	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	577.623.000	0	142.190.000		0	0	0	0	142.190.000	0,00	24,62	0	142.190.000	nan	inf	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	0	131.459.000	0	36.394.400	0	0	0	0	0	36.394.400	nan	27,68	0	36.394.400	nan	inf		
6	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	36.400.000	0	36.394.400		0	0	0	0	36.394.400	0,00	99,98	0	36.394.400	nan	inf	DISPERKIMTAN		
7	1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	18	95.059.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	0	96.871.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan		
8	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	41.250.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
9	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	70	55.621.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	773.417.523	0	232.369.052	0	0	0	0	232.369.052	nan	30,04	0	232.369.052	nan	inf				
10	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	9.789.600	0	1.464.000	0	0	0	0	1.464.000	0,00	14,95	0	1.464.000	nan	inf	DISPERKIMTAN			
11	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	43	115.024.600	0	32.383.390	0	0	0	0	32.383.390	0,00	28,15	0	32.383.390	nan	inf	DISPERKIMTAN			
12	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	70.811.000	0	21.038.825	0	0	0	0	21.038.825	0,00	29,71	0	21.038.825	nan	inf	DISPERKIMTAN			
13	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	5	13.585.000	0	1.905.000	0	0	0	0	1.905.000	0,00	14,02	0	1.905.000	nan	inf	DISPERKIMTAN			
14	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	559.207.323	0	175.577.837	0	0	0	0	175.577.837	0,00	31,40	0	175.577.837	nan	inf	DISPERKIMTAN			
15	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	517.254.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
16	1.04.01.1.07.0002		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	479.479.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
17	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	28	36.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
18	1.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	479.778.704	0	94.024.414	0	0	0	0	94.024.414	nan	19,60	0	94.024.414	nan	inf				
19	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	12	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
20	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	4	476.778.704	0	94.024.414	0	0	0	0	94.024.414	0,00	19,72	0	94.024.414	nan	inf	DISPERKIMTAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	469.350.842	0	21.690.000	0	0	0	0	21.690.000	nan	4,62	0	21.690.000	nan	inf				
21	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	9	268.020.000	0	10.290.000	0	0	0	0	10.290.000	0,00	3,84	0	10.290.000	nan	inf	DISPERKIMTAN			
22	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	60	39.150.000	0	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0,00	29,12	0	11.400.000	nan	inf	DISPERKIMTAN			
23	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	162.180.842	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	0	0	0	0	0	1.821.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)		(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen		0		0	1	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
2	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen		0		0	1	700.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	236.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
3	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang		0		0	50	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN			
4	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang		0		0	50	36.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
5	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang		0		0	50	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan			
6	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah		0		0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
7	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
8	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	285.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
9	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan		0		0	1	285.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-		0		0	0	12.200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-	0	0	0	0	0	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen		0		0	1	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
2	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan		0		0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
3	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang		0		0	50	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV											K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)		(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K/Rp	K/Rp	K/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-	0	0	0	0	0	11.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
4	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		0		0	100	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
5	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar		0		0	10	6.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	0		0	0		1.700.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	nan	2,94	0	50.000.000	nan	inf				
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-	0	0	0	0	0	1.700.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	nan	2,94	0	50.000.000	nan	inf				
1	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen		0		0	57	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
2	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi		0		0	200	1.200.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00	4,17	0	50.000.000	nan	inf	DISPERKIMTAN			
3	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0		0			817.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	nan						
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			0		0			817.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	nan						
	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-	0		0	0		397.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	397.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen		0		0	1	397.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	0		0	0		101.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	101.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen		0		0	1	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
2	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K									Rp	K
Predikat Kinerja																			-	-					
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	0		0	0	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan		0		0	1	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan					
Predikat Kinerja																			-	-					
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-	0		0	0	157.830.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	157.830.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara		0		0	1	157.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan					
Predikat Kinerja																			-	-					
	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	0		0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0		0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
1	2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		0		0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERKIMTAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan					
Predikat Kinerja																			-	-					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)												
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			244.224.889.000	17.272.386.905	13.558.025.000	3.614.087.829	0	0	0	3.614.087.829		26,66	20.886.474.734	8,55															
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan																
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan																
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			244.224.889.000	17.272.386.905	13.558.025.000	3.614.087.829	0	0	0	3.614.087.829		26,66	20.886.474.734	8,55															
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			244.224.889.000	17.272.386.905	13.558.025.000	3.614.087.829	0	0	0	3.614.087.829		26,66	20.886.474.734	8,55															
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	177.669.993.000	12.197.224.298	100	10.486.225.000	3.144.770.803	0	0	0	0	3.144.770.803	0,00	29,99	0	15.341.995.101	nan	8,64											
1.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	2.625.000.000	0	223.703.117	0	3.000.000	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	223.703.117	nan	8,52										
1	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	1.250.000.000	4	73.668.817	1	1.000.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	5	73.668.817	25,00	5,89	SATPOL PP							
2	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	1.250.000.000	4	60.263.800	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	60.263.800	20,00	4,82	SATPOL PP							
3	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	125.000.000	4	89.770.500	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	89.770.500	20,00	71,82	SATPOL PP							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																21,67	27,51														
Predikat Kinerja																SR	SR														
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	110.694.993.000	0	9.633.288.575	0	10.455.225.000	0	2.495.572.094	0	0	0	0	0	2.495.572.094	nan	23,87	0	12.128.860.669	nan	10,96							
4	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	380	36.898.331.000	76	9.457.991.275	73	10.453.225.000	24	2.455.521.094	0	0	0	0	24	2.455.521.094	32,88	23,49	100	11.913.512.369	26,32	32,29	SATPOL PP						
5	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	36.898.331.000	12	155.555.900	1	1.000.000	0	36.600.000	0	0	0	0	0	36.600.000	0,00	3.660,00	12	192.155.900	20,00	0,52	SATPOL PP						
6	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	56	36.898.331.000	14	19.741.400	2	1.000.000	0	3.451.000	0	0	0	0	0	3.451.000	0,00	345,10	14	23.192.400	25,00	0,06	SATPOL PP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																11,89	5,48														
Predikat Kinerja																SR	SR														
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	1.050.000.000	0	64.461.405	0	3.000.000	0	3.915.000	0	0	0	0	0	3.915.000	nan	130,50	0	68.376.405	nan	6,51							
7	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	350.000.000	1	46.650.005	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	46.650.005	20,00	13,33	SATPOL PP						
8	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	350.000.000	1	7.890.500	1	1.000.000	0	3.915.000	0	0	0	0	0	3.915.000	0,00	391,50	1	11.805.500	20,00	3,37	SATPOL PP						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
9	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	350.000.000	1	9.920.900	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	9.920.900	20,00	2,83	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						6,67	2,17					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	3.000.000.000	0	225.990.325	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	225.990.325	nan	7,53					
10	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1.500.000.000	137	189.644.000	144	1.000.000	36	0	0	0	0	36	0	25,00	0,00	173	189.644.000	17.300,00	12,64	SATPOL PP				
11	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	1.500.000.000	10	36.346.325	10	1.000.000	2	0	0	0	0	2	0	20,00	0,00	12	36.346.325	inf	2,42	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	1,37					
Predikat Kinerja																						-	SR					
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	28.800.000.000	0	918.044.015	100	9.000.000	0	444.067.970	0	0	0	0	0	444.067.970	0,00	4.934,09	0	1.362.111.985	nan	4,73				
12	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.200.000.000	1	3.170.000	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	3.170.000	20,00	0,10	SATPOL PP				
13	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.200.000.000	0	0	5	1.000.000	1	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	1	0	20,00	0,00	SATPOL PP				
14	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	3.200.000.000	0	0	10	1.000.000	2	0	0	0	0	2	0	20,00	0,00	2	0	40,00	0,00	SATPOL PP				
15	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.200.000.000	4	37.451.500	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	37.451.500	80,00	1,17	SATPOL PP				
16	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	3.200.000.000	1.04	8.024.000	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.04	8.024.000	20,80	0,25	SATPOL PP				
17	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	3.200.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	SATPOL PP				
18	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	3.200.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	SATPOL PP				
19	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	3.200.000.000	12	869.398.515	1	1.000.000	0	444.067.970	0	0	0	0	0	444.067.970	0,00	44.406,80	12	1.313.466.485	20,00	41,05	SATPOL PP			
20	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	3.200.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						10,04	2,13					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	7.500.000.000	0	112.650.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	112.650.000	nan	1,50					
21	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10	1.250.000.000	0	0	5	1.000.000	1	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	1	0	10,00	0,00	SATPOL PP				
22	1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	1.250.000.000	0	0	5	1.000.000	1	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	1	0	inf	0,00	SATPOL PP				
23	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	50	1.250.000.000	0	0	25	1.000.000	5	0	0	0	0	5	0	20,00	0,00	5	0	10,00	0,00	SATPOL PP				
24	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	1.250.000.000	1	33.950.000	30	1.000.000	7	0	0	0	0	7	0	23,33	0,00	8	33.950.000	160,00	2,72	SATPOL PP				
25	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	1.250.000.000	5	78.700.000	100	1.000.000	25	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	30	78.700.000	120,00	6,30	SATPOL PP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
26	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1.250.000.000	0		0	1	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	0,35							
Predikat Kinerja																					-	SR							
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	17.000.000.000	0	784.964.611	100	4.000.000	0	168.441.689	0	0	0	0	0	168.441.689	0,00	4.211,04	0	953.406.300	nan	5,61					
27	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	4.250.000.000	1	4.000.000	1	1.000.000	0	600.000		0	0	0	0	600.000	0,00	60,00	1	4.600.000	20,00	0,11	SATPOL PP				
28	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	4.250.000.000	12	102.821.335	1	1.000.000	0	29.616.783		0	0	0	0	29.616.783	0,00	2.961,68	12	132.438.118	20,00	3,12	SATPOL PP				
29	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	4.250.000.000	0		0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	SATPOL PP					
30	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.250.000.000	12	678.143.276	1	1.000.000	0	138.224.906		0	0	0	0	138.224.906	0,00	13.822,49	12	816.368.182	20,00	19,21	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					2,00	0,75							
Predikat Kinerja																					SR	SR							
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	7.000.000.000	0	234.122.250	0	4.000.000	0	32.774.050	0	0	0	0	0	32.774.050	nan	819,35	0	266.896.300	nan	3,81					
31	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75	1.750.000.000	15	204.872.250	15	1.000.000	3	31.554.050		0	0	0	3	31.554.050	20,00	3.155,41	18	236.426.300	24,00	13,51	SATPOL PP				
32	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	1.750.000.000	0		0	30	1.000.000	7		0	0	0	0	7	23,33	0,00	7	0	inf	0,00	SATPOL PP				
33	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	1.750.000.000	25	16.850.000	40	1.000.000	10	1.220.000		0	0	0	10	1.220.000	25,00	122,00	35	18.070.000	28,00	1,03	SATPOL PP				
34	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.750.000.000	1	12.400.000	1	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	12.400.000	20,00	0,71	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	0,45							
Predikat Kinerja																					-	SR							
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	Persen		66.554.896.000		5.075.162.607	83	2.508.430.000		469.317.026		0	0	0	0	469.317.026	0,00	18,71	0	5.544.479.633	nan	8,33					
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	63.054.896.000	0	4.838.299.107	1	2.256.430.000	0	469.317.026	0	0	0	0	0	469.317.026	0,00	20,80	0	5.307.616.133	nan	8,42					
1	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		0		0	1	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
2	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0		0	0	1	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
3	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150	10.500.816.000	30	72.685.720	60	50.000.000	15	0		0	0	0	0	15	0	25,00	0,00	45	72.685.720	30,00	0,69	SATPOL PP			
4	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat	Dokumen		0		0	1	1.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																								
5	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	Unit	0	0	10	17.200.000	60	1.000.000	15	0	0	0	0	15	0	25,00	0,00	25	17.200.000	inf	inf	SATPOL PP			
6	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	5	10.500.816.000	1	1.665.474.376	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.665.474.376	20,00	15,86	SATPOL PP			
7	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	5	10.550.816.000	1	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	20,00	0,00	SATPOL PP			
8	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	5	10.500.816.000	1	73.301.841	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	73.301.841	20,00	0,70	SATPOL PP			
9	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	laporan	50	10.500.816.000	10	2.826.923.460	1	2.099.430.000	0	469.317.026	0	0	0	0	469.317.026	0,00	22,35	10	3.296.240.486	20,00	31,39	SATPOL PP			
10	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	0	0	0	0	40	1.000.000	10	0	0	0	0	10	0	25,00	0,00	10	0	inf	nan	SATPOL PP			
11	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	20	10.500.816.000	4	182.713.710	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	182.713.710	20,00	1,74	SATPOL PP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	2.500.000.000	0	134.527.075	1	127.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	134.527.075	nan	5,38				
12	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	20	1.250.000.000	5	48.811.475	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	48.811.475	25,00	3,90	SATPOL PP			
13	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	5	1.250.000.000	1	85.715.600	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	85.715.600	20,00	6,86	SATPOL PP			
14	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	0	0	0	0	4	1.000.000	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	1	0	inf	nan	SATPOL PP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II		III	IV		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)			
15	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	0	0	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	0	1.000.000.000	0	102.336.425	50	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	102.336.425	nan	10,23					
16	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	5	500.000.000	1	64.450.100	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	64.450.100	20,00	12,89	SATPOL PP				
17	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	5	500.000.000	1	37.886.325	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	37.886.325	20,00	7,58	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					2,35	1,20					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen		0		0	63,16	563.370.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	1	423.923.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
1	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	0	0	0	0	40	330.440.000	10	0	0	0	0	10	0	25,00	0,00	10	0	inf	nan	SATPOL PP			
2	1.05.04.1.01.0019	Permutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	0	0	1	93.483.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	1	139.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
3	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	1	139.447.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	SATPOL PP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K					Rp
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				77.502.000.000		0		18.849.908.754	2.695.674.536		0	0	0		2.695.674.536		14,30		2.695.674.536		3,48					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.756.000.000		0		6.023.207.041	1.302.782.481		0	0	0		1.302.782.481		21,63		1.302.782.481		4,69					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				27.756.000.000		0		6.023.207.041	1.302.782.481		0	0	0		1.302.782.481		21,63		1.302.782.481		4,69					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		27.756.000.000		0	0	6.023.207.041	1.302.782.481	0		0	0	0	1.302.782.481	nan	21,63	0	1.302.782.481	nan	4,69					
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	27.756.000.000	0	0	0	6.023.207.041	1.302.782.481	0	0	0	0	0	1.302.782.481	nan	21,63	0	1.302.782.481	0,00	4,69					
1	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	225	27.756.000.000		0	50	6.023.207.041	1.302.782.481	0		0	0	0	1.302.782.481	0,00	21,63	0	1.302.782.481	0,00	4,69	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00	4,69					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.746.000.000		0		12.826.701.713	1.392.892.055		0	0	0		1.392.892.055		10,86		1.392.892.055		2,80					
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				49.746.000.000		0		12.826.701.713	1.392.892.055		0	0	0		1.392.892.055		10,86		1.392.892.055		2,80					
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	13.369.000.000		0	100	2.805.172.713	942.969.310		0	0	0	0	942.969.310	0,00	33,62	0	942.969.310	nan	7,05						
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	247.000.000	0	0	100	114.000.000	25	3.850.000	0	0	0	0	25	3.850.000	25,00	3,38	25	3.850.000	25,00	1,56				
1	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	79.000.000		0	1	89.000.000	0	3.850.000		0	0	0	0	3.850.000	0,00	4,33	0	3.850.000	0,00	4,87	BPBD			
2	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	54.000.000		0	4	8.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
3	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	114.000.000		0	4	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD			
4	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0		0	1	7.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	270.000.000	0	0	0	202.259.000	0	40.800.000	0	0	0	0	0	40.800.000	nan	20,17	0	40.800.000	0,00	15,11				
5	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	500	43.000.000		0	12	162.880.000	3	40.800.000		0	0	0	3	40.800.000	25,00	25,05	3	40.800.000	0,60	94,88	BPBD			
6	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	65	227.000.000		0	13	39.379.000	3		0	0	0	0	3		23,08	0,00	3	0	4,62	0,00	BPBD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp				
			Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,87	15,81									
Predikat Kinerja																		SR	SR									
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	201.000.000	0	0	0	43.570.000	0	21.352.411	0	0	0	0	21.352.411	nan	49,01	0	21.352.411	0,00	10,62					
7	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0		0	1	22.400.000	0	21.352.411	0	0	0	0	21.352.411	0,00	95,32	0	21.352.411	nan	inf	BPBD				
8	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	17.000.000		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
9	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	184.000.000		0	1	16.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	inf									
Predikat Kinerja																		-	-									
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	536.000.000	0	0	0	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00					
10	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	450	354.000.000		0	90	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
11	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	182.000.000		0	3	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,00									
Predikat Kinerja																		SR	SR									
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	1.926.000.000	0	0	0	367.374.854	0	243.483.442	0	0	0	0	243.483.442	nan	66,28	0	243.483.442	0,00	12,64					
12	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	596	76.000.000		0	1	8.000.000	0	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000	0,00	39,00	0	3.120.000	0,00	4,11	BPBD				
13	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1749	314.000.000		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
14	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0		0	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD				
15	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5443	140.000.000		0	1	20.374.854	0	56.532.700	0	0	0	0	56.532.700	0,00	277,46	0	56.532.700	0,00	40,38	BPBD				
16	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	257399	81.000.000		0	1	17.000.000	0	16.015.000	0	0	0	0	16.015.000	0,00	94,21	0	16.015.000	0,00	19,77	BPBD				
17	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	73.000.000		0	3	6.000.000	0	510.000	0	0	0	0	510.000	0,00	8,50	0	510.000	0,00	0,70	BPBD				
18	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.242.000.000		0	1	295.000.000	0	167.305.742	0	0	0	0	167.305.742	0,00	56,71	0	167.305.742	0,00	13,47	BPBD				
19	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan									
Predikat Kinerja																		-	-									
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1000	261.000.000	0	0	0	172.000.000	0	321.050.000	0	0	0	0	321.050.000	nan	186,66	0	321.050.000	0,00	123,01					
20	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	35	77.000.000		0	2	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
21	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27	145.000.000		0	3	75.000.000	0	321.050.000	0	0	0	0	321.050.000	0,00	428,07	0	321.050.000	0,00	221,41	BPBD				
22	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BPBD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
23	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	39.000.000		0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan						
Predikat Kinerja																				-	-						
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	5.965.000.000	0	0	0	1.360.330.962	0	312.433.457	0	0	0	0	312.433.457	nan	22,97	0	312.433.457	0,00	5,24				
24	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2500	26.000.000		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				
25	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	500	498.000.000		0	1	175.000.000	0	52.839.653	0	0	0	0	52.839.653	0,00	30,19	0	52.839.653	0,00	10,61	BPBD			
26	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD			
27	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.441.000.000		0	1	1.165.330.962	0	259.593.804	0	0	0	0	259.593.804	0,00	22,28	0	259.593.804	0,00	4,77	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan						
Predikat Kinerja																				-	-						
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	3.963.000.000	0	0	0	458.137.897	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00				
28	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	355	3.322.000.000		0	10	243.137.897	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD			
29	1.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	5	171.000.000		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPBD			
30	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	495	61.000.000		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPBD			
31	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	94.000.000		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD			
32	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	315.000.000		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0,00						
Predikat Kinerja																				SR	SR						
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	36.377.000.000		0	0	0	10.021.529.000	0	449.922.745	0	0	0	0	449.922.745	nan	4,49	0	449.922.745	nan	1,24				
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	-	60	3.503.000.000	0	0	0	1.300.000.000	0	34.940.000	0	0	0	0	34.940.000	nan	2,69	0	34.940.000	0,00	1,00				
1	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	6	1.989.000.000		0	1	400.000.000	0	34.940.000	0	0	0	0	34.940.000	0,00	8,74	0	34.940.000	0,00	1,76	BPBD			
2	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturn di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	0	1.514.000.000		0	425	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	0,88						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
Predikat Kinerja																					-	SR								
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	60	25.740.000.000	0		0	0	6.165.000.000	0	352.322.745	0	0	0	0	352.322.745	nan	5,71	0	352.322.745	0,00	1,37						
3	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau	Kawasan	0	10.487.000.000			0	3	240.000.000	0	925.100	0	0	0	0	925.100	0,00	0,39	0	925.100	nan	0,01	BPBD					
			kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0					3		0					0		0,00		0		nan		BPBD					
4	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	0	918.000.000			0	300	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	BPBD					
5	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	4	1.349.000.000			0	1	1.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD					
6	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	7	1.941.000.000			0	1		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BPBD					
7	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	0	1.009.000.000			0	60	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	BPBD					
8	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	0	2.263.000.000			0	750	1.995.000.000	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000	0,00	0,03	0	510.000	nan	0,02	BPBD				
9	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	5	6.764.000.000			0	1	1.100.000.000	0	343.357.245	0	0	0	0	0	343.357.245	0,00	31,21	0	343.357.245	0,00	5,08	BPBD				
10	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	0	1.009.000.000			0	120	750.000.000	0	7.530.400	0	0	0	0	0	7.530.400	0,00	1,00	0	7.530.400	nan	0,75	BPBD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	0,59								
Predikat Kinerja																					-	SR								
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	60	3.965.000.000	0		0	0	1.251.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00					
11	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	0	0			0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD				
12	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	5	262.000.000			0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong														
											I	II	III	IV																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp											
13	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	0		0	60	180.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
14	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan	5	262.000.000		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD													
15	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	1.624.000.000		0	1125	450.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	BPBD													
16	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	5	1.817.000.000		0	1	356.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD													
17	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan																
Predikat Kinerja																																					
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	5	3.169.000.000	0	0	0	1.305.529.000	0	62.660.000	0	0	0	0	0	62.660.000	nan	4,80	0	62.660.000	0,00	1,98													
18	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0		0	100	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
19	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	5	1.996.000.000		0	1	150.000.000	0	62.660.000	0	0	0	0	0	62.660.000	0,00	41,77	0	62.660.000	0,00	3,14	BPBD												
20	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
21	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	0	0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
22	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	0		0	80	240.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
23	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BPBD													
24	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	0	0		0	60	180.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
25	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	0	0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BPBD													
26	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	kabupaten/kota	19	1.173.000.000		0	19	170.529.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD													

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																
									(1)	(2)	(3)	(4)									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS SOSIAL
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I		II	III										IV				
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		DINAS SOSIAL				0		100.841.887.028		179.559.943.127		8.612.542.644	0	0	0		8.612.542.644		4,80		109.454.429.672		inf				
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan				
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		100.841.887.028		179.559.943.127		8.612.542.644	0	0	0		8.612.542.644		4,80		109.454.429.672		inf				
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				0		100.841.887.028		179.559.943.127		8.612.542.644	0	0	0		8.612.542.644		4,80		109.454.429.672		inf				
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		32.421.187.828	0	58.923.072.461		6.795.508.849	0	0	0	0	6.795.508.849	nan	11,53	0	39.216.696.677	nan	inf				
1.06.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	66.431.075	0	536.371.300	0	13.304.959	0	0	0	0	13.304.959	nan	2,48	0	79.736.034	nan	inf				
1	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		15.750.575	2	104.486.200	0	3.149.959	0	0	0	0	3.149.959	0,00	3,01	0	18.900.534	nan	inf	DINSOS			
2	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		6.213.000	6	42.135.700	1	300.000	0	0	0	1	300.000	16,67	0,71	1	6.513.000	inf	inf	DINSOS			
3	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		23.052.050	4	111.646.400	0	2.135.000	0	0	0	0	2.135.000	0,00	1,91	0	25.187.050	nan	inf	DINSOS			
4	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
5	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		0		21.415.450	1	78.103.000	0	7.720.000	0	0	0	0	7.720.000	0,00	9,88	0	29.135.450	nan	inf	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan						
Predikat Kinerja																				-	-						
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	22.084.341.289	0	22.799.135.151	0	4.620.216.795	0	0	0	0	4.620.216.795	nan	20,26	0	26.704.558.084	nan	inf				
6	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		20.966.268.289	170	21.636.545.151	30	4.466.636.795	0	0	0	30	4.466.636.795	17,65	20,64	30	25.432.905.084	inf	inf	DINSOS			
7	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		351.600.000	12	350.000.000	2	51.100.000	0	0	0	2	51.100.000	16,67	14,60	2	402.700.000	inf	inf	DINSOS			
8	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		351.600.000	15	80.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	351.600.000	nan	inf	DINSOS			
9	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen		0		60.720.000	12	60.720.000	4	15.180.000	0	0	0	4	15.180.000	33,33	25,00	4	75.900.000	inf	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I		II	III	IV	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K					Rp
									K	Rp	K	Rp	K																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Kuangan SKPD [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																												
10	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		52.560.000	3	60.720.000	1	13.140.000	0	0	0	1	13.140.000	33,33	21,64	1	65.700.000	inf	inf	DINSOS							
11	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		60.720.000	3	69.000.000	1	15.180.000	0	0	0	1	15.180.000	33,33	22,00	1	75.900.000	inf	inf	DINSOS							
12	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		60.720.000	3	69.000.000	1	15.180.000	0	0	0	1	15.180.000	33,33	22,00	1	75.900.000	inf	inf	DINSOS							
13	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		60.720.000	36	69.000.000	16	15.180.000	0	0	0	16	15.180.000	44,44	22,00	16	75.900.000	inf	inf	DINSOS							
14	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		60.720.000	36	69.000.000	16	15.180.000	0	0	0	16	15.180.000	44,44	22,00	16	75.900.000	inf	inf	DINSOS							
15	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		52.500.000	12	60.720.000	5	13.140.000	0	0	0	5	13.140.000	41,67	21,64	5	65.640.000	inf	inf	DINSOS							
16	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0		0	6	35.457.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DINSOS							
17	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		6.213.000	14	238.093.000	2	300.000	0	0	0	2	300.000	14,29	0,13	2	6.513.000	inf	inf	DINSOS							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan								
Predikat Kinerja																						-	-								
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	119.296.691	0	323.494.690	0	2.035.000	0	0	0	0	0	2.035.000	nan	0,63	0	121.331.691	nan	inf							
18	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		49.500.000	9	69.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	49.500.000	nan	inf	DINSOS							
19	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		60.396.691	12	151.612.590	2	1.900.000	0	0	0	2	1.900.000	16,67	1,25	2	62.296.691	inf	inf	DINSOS							
20	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Laporan		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																	
								I		II	III	IV	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%																													
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)							
		[Panti Sosial Asuhan Anak Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																																											
21	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINSOS																					
22	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	3		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINSOS																					
23	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	12		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINSOS																					
24	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	12		0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DINSOS																					
25	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		6.000.000	6		17.270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		6.000.000	nan	inf	DINSOS																					
26	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		2.000.000	3		54.327.400	0	135.000	0	0	0	0	135.000	0,00	0,25	0		2.135.000	nan	inf	DINSOS																				
27	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		1.400.000	3		31.044.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		1.400.000	nan	inf	DINSOS																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	35.157.921	0		756.436.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0		35.157.921	nan	inf																					
28	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	2		29.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				
29	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	12		7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				
30	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	19		13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				
31	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	3		108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				
32	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	2		12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				
33	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	12		25.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DINSOS																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
		[Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]																								
34	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	9	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
35	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
36	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	12	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
37	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0		3.277.400	10	105.786.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.277.400	nan	inf	DINSOS			
38	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS			
39	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		31.880.521	170	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	31.880.521	nan	inf	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan							
Predikat Kinerja																		-	-							
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	1.975.970.665	0	3.424.803.733	0	247.874.573	0	0	0	0	0	247.874.573	nan	7,24	0	2.223.845.238	nan	inf		
40	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		2.490.700	3	29.260.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.490.700	nan	inf	DINSOS			
41	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		7.372.000	1	29.488.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	7.372.000	nan	inf	DINSOS			
42	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		169.850	12	22.128.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	169.850	nan	inf	DINSOS			
43	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		2.236.250	140	12.881.000	70	1.073.750	0	0	0	70	1.073.750	50,00	8,34	70	3.310.000	inf	inf	DINSOS		
44	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		1.650.000	12	14.225.000	100	1.650.000	0	0	0	100	1.650.000	833,33	11,60	100	3.300.000	inf	inf	DINSOS		
45	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		3.093.500	670	12.374.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.093.500	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp		
		(PSBR) "Harapan" Padang Panjang]																								
46	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		895.000	12	14.639.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	895.000	nan	inf	DINSOS			
47	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		1.854.250	23	14.615.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.854.250	nan	inf	DINSOS			
48	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		6.015.975	1	30.063.898	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.015.975	nan	inf	DINSOS			
49	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	85.854.441	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
50	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	38.829.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
51	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	37	28.187.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
52	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	2.090.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
53	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
54	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	4.605.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
55	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	2.688.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
56	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	10	17.414.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
57	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	10	121.959.256	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
58	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		840.000	1	171.737.465	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	840.000	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
59	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		8.625.000	3	41.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.625.000	nan	inf	DINSOS				
60	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		1.060.200	9	49.060.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.060.200	nan	inf	DINSOS				
61	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	383	48.040.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
62	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	45	101.715.180	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
63	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	12	43.475.880	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
64	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	12	22.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
65	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		2.242.000	21	13.998.000	2	90.000	0	0	0	2	90.000	9,52	0,64	2	2.332.000	inf	inf	DINSOS			
66	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		6.037.500	8	132.266.335	2	0	0	0	0	2	25,00	0,00	2	6.037.500	inf	inf	DINSOS				
67	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		14.630.000	1541	47.980.800	257	2.677.400	0	0	0	257	2.677.400	16,68	5,58	257	17.307.400	inf	inf	DINSOS			
68	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		11.561.875	3116	97.929.950	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.561.875	nan	inf	DINSOS				
69	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		119.301.375	6	200.000.000	0	2.432.200	0	0	0	0	2.432.200	0,00	1,22	0	121.733.575	nan	inf	DINSOS			
70	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		8.758.103	90	144.278.226	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.758.103	nan	inf	DINSOS				
71	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		18.837.350	0	75.678.700	0	4.130.000	0	0	0	0	4.130.000	nan	5,46	0	22.967.350	nan	inf	DINSOS			
72	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		16.110.939	12	227.732.430	3	3.667.000	0	0	0	3	3.667.000	25,00	1,61	3	19.777.939	inf	inf	DINSOS			
73	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tresna Werda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		23.419.000	1	56.582.400	0	1.708.000	0	0	0	0	1.708.000	0,00	3,02	0	25.127.000	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
		(PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]																									
74	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		3.463.156	10	38.980.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.463.156	nan	inf	DINSOS			
75	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		11.561.875	12	51.713.010	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.561.875	nan	inf	DINSOS			
76	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		1.466.000	1	5.864.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.466.000	nan	inf	DINSOS			
77	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		15.350.000	12	17.680.000	6	750.000	0	0	0	6	750.000	50,00	4,24	6	16.100.000	inf	inf	DINSOS			
78	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		1.060.000	10215	6.260.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.060.000	nan	inf	DINSOS			
79	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		4.167.500	12	6.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.167.500	nan	inf	DINSOS			
80	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		2.532.500	6	11.204.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.532.500	nan	inf	DINSOS			
81	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		4.167.500	17487	20.570.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.167.500	nan	inf	DINSOS			
82	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		1.161.250	8	8.978.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.161.250	nan	inf	DINSOS			
83	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		3.050.000	5	22.952.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.050.000	nan	inf	DINSOS			
84	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		43.987.873	1	25.101.000	0	502.500	0	0	0	0	502.500	0,00	2,00	0	44.490.373	nan	inf	DINSOS			
85	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		1.530.000	4	12.768.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.530.000	nan	inf	DINSOS			
86	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0			0	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I		II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
87	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		1.530.000	2	2.040.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.530.000	nan	inf	DINSOS			
88	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	1.440.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
89	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		17.369.015	25	86.176.956	8	675.000	0	0	0	8	675.000	32,00	0,78	8	18.044.015	inf	inf	DINSOS			
90	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		37.716.044	1	81.094.000	0	6.080.000	0	0	0	0	6.080.000	0,00	7,50	0	43.796.044	nan	inf	DINSOS			
91	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		8.206.650	1	65.000.000	0	2.920.000	0	0	0	0	2.920.000	0,00	4,49	0	11.126.650	nan	inf	DINSOS			
92	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan Laporan		0		22.488.198	12	118.684.000	4	7.070.000	0	0	0	4	7.070.000	33,33	5,96	4	29.558.198	inf	inf	DINSOS			
93	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		6.815.562	12	53.521.586	10	5.393.000	0	0	0	10	5.393.000	83,33	10,08	10	12.208.562	inf	inf	DINSOS			
94	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		1.455.514.479	10	487.289.620	2	204.935.723	0	0	0	2	204.935.723	20,00	42,06	2	1.660.450.202	inf	inf	DINSOS			
95	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		18.750.000	128	57.990.000	20	2.120.000	0	0	0	20	2.120.000	15,63	3,66	20	20.870.000	inf	inf	DINSOS			
96	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		26.402.983	10	215.986.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	26.402.983	nan	inf	DINSOS			
97	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		30.479.213	120	53.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	30.479.213	nan	inf	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	0	0	0	602.001.380	0	16.755.523.284	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	602.001.380	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Pemerintah Daerah																								
98	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		447.750.000	2	1.285.408.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	447.750.000	nan	inf	DINSOS			
99	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	2	642.704.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
100	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS			
101	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS			
102	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0		0	12	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
103	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0		0	1	108.350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
104	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	12	7.807.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
105	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	52	39.734.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
106	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	2	62.516.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
107	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	12	204.025.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
108	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	120.628.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
109	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	10	85.338.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
110	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	38	13.112.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
111	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	10	77.078.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
112	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	2	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
113	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	17	35.636.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
114	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	13	92.681.680	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I		II	III	IV	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%												
									(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11	K	Rp	K				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		(PSBR) "Harapan" Padang Panjang]																												
115	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	11	88.960.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
116	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	46.214.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
117	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	12	32.219.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
118	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	12	43.552.240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
119	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	25	51.444.480	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
120	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	12	46.505.720	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
121	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	21.698.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
122	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	6	844.422.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
123	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
124	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	154.251.380	4	11.076.732.164	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	154.251.380	nan	inf	DINSOS							
125	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							
126	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	6.770.836.886	0	7.525.066.732	0	1.827.488.072	0	0	0	0	0	1.827.488.072	nan	24,29	0	8.598.324.958	nan	inf						
127	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp			
		[Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]																									
128	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		600.000	1	2.400.000	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0,00	7,50	0	780.000	nan	inf	DINSOS			
129	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		1.875.000	2	7.000.000	1	1.500.000	0	0	0	1	1.500.000	50,00	21,43	1	3.375.000	inf	inf	DINSOS			
130	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		1.950.000	2	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.950.000	nan	inf	DINSOS			
131	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
132	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	12	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS			
133	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		83.820.000	2	84.600.000	0	39.611.586	0	0	0	0	39.611.586	0,00	46,82	0	123.431.586	nan	inf	DINSOS			
134	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		186.620.625	2	240.000.000	0	56.331.423	0	0	0	0	56.331.423	0,00	23,47	0	242.952.048	nan	inf	DINSOS			
135	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		80.478.000	4	66.174.000	0	12.410.820	0	0	0	0	12.410.820	0,00	18,75	0	92.888.820	nan	inf	DINSOS			
136	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		67.150.000	12	67.150.000	2	11.621.050	0	0	0	2	11.621.050	16,67	17,31	2	78.771.050	inf	inf	DINSOS			
137	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		157.657.200	48	157.657.200	30	34.920.474	0	0	0	30	34.920.474	62,50	22,15	30	192.577.674	inf	inf	DINSOS			
138	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		85.620.000	12	109.620.000	3	16.435.733	0	0	0	3	16.435.733	25,00	14,99	3	102.055.733	inf	inf	DINSOS			
139	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		108.705.000	32547	109.305.000	5424	19.781.562	0	0	0	5424	19.781.562	16,67	18,10	5424	128.486.562	inf	inf	DINSOS			
140	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		175.224.000	12	175.224.000	2	29.297.395	0	0	0	2	29.297.395	16,67	16,72	2	204.521.395	inf	inf	DINSOS			
141	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		76.020.000	37079	63.600.000	12359	14.375.007	0	0	0	12359	14.375.007	33,33	22,60	12359	90.395.007	inf	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I		II	III	IV	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%												
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		K	Rp	K	Rp				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
142	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		1.800.000	12	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.800.000	nan	inf	DINSOS						
143	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		9.300.000	4	22.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.300.000	nan	inf	DINSOS						
144	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		528.401.380	5	708.487.585	1	152.155.800	0	0	0	1	152.155.800	20,00	21,48	1	680.557.180	inf	inf	DINSOS					
145	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		1.264.913.869	2	1.365.838.147	0	350.137.564	0	0	0	0	350.137.564	0,00	25,64	0	1.615.051.433	nan	inf	DINSOS					
146	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		520.309.049	8	602.248.685	2	146.136.351	0	0	0	2	146.136.351	25,00	24,27	2	666.445.400	inf	inf	DINSOS					
147	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		553.176.280	13	627.624.469	3	152.603.292	0	0	0	3	152.603.292	23,08	24,31	3	705.779.572	inf	inf	DINSOS					
148	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		520.806.293	9	538.593.878	2	141.386.351	0	0	0	2	141.386.351	22,22	26,25	2	662.192.644	inf	inf	DINSOS					
149	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aliuh" Sicincin]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		711.654.670	12	786.378.178	3	196.554.115	0	0	0	3	196.554.115	25,00	24,99	3	908.208.785	inf	inf	DINSOS					
150	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		516.305.158	12	546.038.052	4	141.636.279	0	0	0	4	141.636.279	33,33	25,94	4	657.941.437	inf	inf	DINSOS					
151	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		553.176.280	12	632.174.469	4	152.603.292	0	0	0	4	152.603.292	33,33	24,14	4	705.779.572	inf	inf	DINSOS					
152	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		565.274.082	271	583.753.069	90	157.809.978	0	0	0	90	157.809.978	33,21	27,03	90	723.084.060	inf	inf	DINSOS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	767.151.921	0	6.802.241.571	0	84.589.450	0	0	0	0	84.589.450	nan	1,24	0	851.741.371	nan	inf						
153	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		11.650.000	4	0	0	1.929.700	0	0	0	0	1.929.700	0,00	inf	0	13.579.700	nan	inf	DINSOS					
154	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit		0		9.100.000	3	19.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.100.000	nan	inf	DINSOS						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		[Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
155	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		30.850.000	3	51.100.000	0	8.311.250	0	0	0	0	8.311.250	0,00	16,26	0	39.161.250	nan	inf	DINSOS			
156	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		6.475.000	1	36.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.475.000	nan	inf	DINSOS				
157	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		23.100.000	3	36.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	23.100.000	nan	inf	DINSOS				
158	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	-	-		0		11.650.000	0	65.350.000	0	1.929.700	0	0	0	0	1.929.700	nan	2,95	0	13.579.700	nan	inf	DINSOS			
159	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		26.916.691	12	61.848.776	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0,00	3,07	0	28.816.691	nan	inf	DINSOS			
160	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		111.785.000	12	86.600.000	3	31.160.240	0	0	0	3	31.160.240	25,00	35,98	3	142.945.240	inf	inf	DINSOS			
161	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		111.785.000	20	209.320.000	5	31.160.240	0	0	0	5	31.160.240	25,00	14,89	5	142.945.240	inf	inf	DINSOS			
162	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		24.600.000	30	26.900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	24.600.000	nan	inf	DINSOS				
163	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS				
164	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		20.775.000	4	16.570.000	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00	5,43	0	21.675.000	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I		II	III	IV															
									(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											(9)	(10)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
165	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		59.080.000	75	55.250.000	15	4.298.320	0	0	0	0	15	4.298.320	20,00	7,78	15	63.378.320	inf	inf	DINSOS			
166	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		6.800.000	12	29.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.800.000	nan	inf	DINSOS				
167	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		7.600.000	8	28.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	7.600.000	nan	inf	DINSOS				
168	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		9.750.000	18	11.780.000	5	3.000.000	0	0	0	0	5	3.000.000	27,78	25,47	5	12.750.000	inf	inf	DINSOS			
169	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		22.300.000	30	5.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	22.300.000	nan	inf	DINSOS				
170	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		8.800.000	58	23.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.800.000	nan	inf	DINSOS				
171	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		21.150.000	11	7.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	21.150.000	nan	inf	DINSOS				
172	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		4.875.000	10	16.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.875.000	nan	inf	DINSOS				
173	1.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		32.020.000	6	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.020.000	nan	inf	DINSOS				
174	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	2	218.576.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
175	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	40.025.115	2	330.094.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	40.025.115	nan	inf	DINSOS				
176	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	3	1.006.398.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
177	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	24.500.000	2	284.529.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	24.500.000	nan	inf	DINSOS				
178	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	3	490.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I		II	III											IV			
									K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
		(PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
179	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicingin]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	37.500.000	5	757.208.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	37.500.000	nan	inf	DINSOS				
180	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	32.020.000	1	994.271.050	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.020.000	nan	inf	DINSOS				
181	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	1.050.699.780	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
182	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	565.649.196	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
183	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS				
184	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	2	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
185	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	32.020.000	2	155.679.090	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.020.000	nan	inf	DINSOS				
186	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
187	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	40.025.115	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	40.025.115	nan	inf	DINSOS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan									
Predikat Kinerja																-	-									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-		0	1.590.593.150	0	2.058.247.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	1.590.593.150	nan	inf				
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	6.339.500	0	91.554.100	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	6.339.500	nan	inf				
1	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	Dokumen		0	6.339.500	78	91.554.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.339.500	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	inf									
Predikat Kinerja																	-	-									
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-	0	0	0	1.584.253.650	0	1.966.692.900	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	1.584.253.650	nan	inf				
2	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang		0		327.847.850	50	37.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	327.847.850	nan	inf	DINSOS			
3	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		0		327.847.850	70	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	327.847.850	nan	inf	DINSOS			
4	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga		0		327.847.850	1280	683.882.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	327.847.850	nan	inf	DINSOS			
5	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga		0		600.710.100	987	1.196.610.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	600.710.100	nan	inf	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	inf									
Predikat Kinerja																	-	-									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen		0		66.154.668.164	100	117.020.700.493		1.757.546.295	0	0	0	0	1.757.546.295	0,00	1,50	0	67.912.214.459	nan	inf				
			-	-				0							0		nan		0		nan						
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti	Persen	0	0	0	10.938.325.838	100	14.158.986.955	0	570.722.548	0	0	0	0	570.722.548	0,00	4,03	0	11.509.048.386	nan	inf				
			-	-	0		0		0		0		0	0	0		nan		0		nan						
1	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		2.605.467.550	326	2.693.586.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.605.467.550	nan	inf	DINSOS			
2	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		674.750.000	50	681.337.500	20	110.059.425	0	0	0	20	110.059.425	40,00	16,15	20	784.809.425	inf	inf	DINSOS			
3	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.344.325.000	100	1.347.310.750	20	221.204.900	0	0	0	20	221.204.900	20,00	16,42	20	1.565.529.900	inf	inf	DINSOS			
4	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		674.750.000	50	217.914.350	21	110.059.425	0	0	0	21	110.059.425	42,00	50,51	21	784.809.425	inf	inf	DINSOS			
5	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.067.500.000	100	406.902.550	10	109.630.198	0	0	0	10	109.630.198	10,00	26,94	10	1.177.130.198	inf	inf	DINSOS			
6	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	Orang		0		150.000.000	288	1.333.692.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	150.000.000	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi																							
7	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0	74.770.000	100	19.543.560	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	74.770.000	nan	inf	DINSOS				
8	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0	140.000.000	293	3.269.658.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	140.000.000	nan	inf	DINSOS				
9	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0	24.440.300	50	110.700.200	10	4.718.600	0	0	0	10	4.718.600	20,00	4,26	10	29.158.900	inf	inf	DINSOS			
10	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0	11.550.000	50	16.750.000	15	4.500.000	0	0	0	15	4.500.000	30,00	26,87	15	16.050.000	inf	inf	DINSOS			
11	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0	11.550.000	300	0	150	6.550.000	0	0	0	150	6.550.000	50,00	inf	150	18.100.000	inf	inf	DINSOS			
12	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	6.525.450	100	14.855.980	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.525.450	nan	inf	DINSOS				
13	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	1.355.390.000	100	1.255.390.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.355.390.000	nan	inf	DINSOS				
14	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0	29.701.000	50	29.701.000	20	4.000.000	0	0	0	20	4.000.000	40,00	13,47	20	33.701.000	inf	inf	DINSOS			
15	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang		0	50.752.000	100	50.752.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.752.000	nan	inf	DINSOS				
16	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0	334.559.894	100	613.031.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	334.559.894	nan	inf	DINSOS				
17	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0	982.786.000	257	1.213.711.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	982.786.000	nan	inf	DINSOS				
18	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0	548.831.694	50	494.442.865	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	548.831.694	nan	inf	DINSOS				
19	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0	62.828.800	50	43.100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	62.828.800	nan	inf	DINSOS				
20	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0	0	100	26.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
21	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang		0	83.000.000	100	83.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	83.000.000	nan	inf	DINSOS				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi																									
22	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		552.000.000	100	13.560.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	552.000.000	nan	inf	DINSOS				
23	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		62.828.000	50	46.428.800	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	62.828.000	nan	inf	DINSOS				
24	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen		0		90.020.150	3	177.418.400	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	90.020.150	nan	inf	DINSOS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti	Persen	0	0	0	39.851.412.467	100	92.753.356.989	0	665.535.848	0	0	0	0	0	665.535.848	0,00	0,72	0	40.516.948.315	nan	inf				
			-	-	0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan						
25	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0		302.400.000	1716	305.040.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	302.400.000	nan	inf	DINSOS				
26	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.899.959.600	155	1.919.569.000	20	168.063.450	0	0	0	0	20	168.063.450	12,90	8,76	20	2.068.023.050	inf	inf	DINSOS			
27	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		24.180.737.100	3173	24.505.072.900	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	24.180.737.100	nan	inf	DINSOS				
28	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.343.083.000	100	1.283.459.800	10	108.499.200	0	0	0	0	10	108.499.200	10,00	8,45	10	1.451.582.200	inf	inf	DINSOS			
29	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.104.700.000	100	1.064.000.000	10	100.630.198	0	0	0	0	10	100.630.198	10,00	9,46	10	1.205.330.198	inf	inf	DINSOS			
30	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		150.000.000	2599	9.496.643.700	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	150.000.000	nan	inf	DINSOS				
31	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		134.115.650	155	323.634.250	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	134.115.650	nan	inf	DINSOS				
32	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		239.210.000	100	288.170.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	239.210.000	nan	inf	DINSOS				
33	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		619.154.900	100	755.594.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	619.154.900	nan	inf	DINSOS				
34	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni	Orang		0		200.000.000	155	381.437.800	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	200.000.000	nan	inf	DINSOS				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
		[Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Kewenangan Provinsi																							
35	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	74.770.000	100	74.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	74.770.000	nan	inf	DINSOS			
36	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	42.320.000	100	163.800.000	30	13.440.000	0	0	0	0	30	13.440.000	30,00	8,21	30	55.760.000	inf	inf	DINSOS			
37	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	140.000.000	2469	36.318.064.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	140.000.000	nan	inf	DINSOS			
38	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	0	89.860.550	100	55.254.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	89.860.550	nan	inf	DINSOS			
39	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	0	9.958.350	100	9.101.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.958.350	nan	inf	DINSOS			
40	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	0	113.500.000	155	10.015.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	113.500.000	nan	inf	DINSOS			
41	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	0	554.573.200	160	1.126.124.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	554.573.200	nan	inf	DINSOS			
42	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	0	50.752.000	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	50.752.000	nan	inf	DINSOS			
43	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	0	854.247.397	100	875.210.397	20	44.070.000	0	0	0	0	20	44.070.000	20,00	5,04	20	898.317.397	inf	inf	DINSOS			
44	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	0	982.786.000	1945	2.812.226.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	982.786.000	nan	inf	DINSOS			
45	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	0	143.625.000	75	172.461.600	20	33.750.000	0	0	0	0	20	33.750.000	26,67	19,57	20	177.375.000	inf	inf	DINSOS			
46	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	0	230.769.300	100	360.836.600	20	59.235.000	0	0	0	0	20	59.235.000	20,00	16,42	20	290.004.300	inf	inf	DINSOS			
47	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	0	301.500.000	75	756.639.375	15	76.392.000	0	0	0	0	15	76.392.000	20,00	10,10	15	377.892.000	inf	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
									I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
48	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		5.195.104.420	3200	7.801.102.000	0		0		0		0		0,00	0,00	0	5.195.104.420	nan	inf	DINSOS				
49	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		371.150.000	100	498.655.100	20	48.856.000			0		0		20,00	9,80	20	420.006.000	inf	inf	DINSOS				
50	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	16.160.000	0		0		0		0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
51	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	75	46.500.000	0		0		0		0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
52	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	89.205.600	0		0		0		0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
53	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		5.520.000	100	11.040.000	0		0		0		0		0,00	0,00	0	5.520.000	nan	inf	DINSOS				
54	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	100	347.195.000	0		0		0		0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS				
55	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		2.400.000	12	28.800.000	100	2.400.000			0		0	100	2.400.000	833,33	8,33	100	4.800.000	inf	inf	DINSOS			
56	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		14.000.000	100	14.000.000	25	4.200.000			0		0	25	4.200.000	25,00	30,00	25	18.200.000	inf	inf	DINSOS			
57	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti [Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang]	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang		0		16.800.000	100	24.000.000	30	6.000.000			0		0	30	6.000.000	30,00	25,00	30	22.800.000	inf	inf	DINSOS			
58	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen		0		484.416.000	5	819.573.000	0		0		0		0	0	0,00	0,00	0	484.416.000	nan	inf	DINSOS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan								
Predikat Kinerja																				-	-								
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar dalam panti	Persen	0		0	9.405.694.360	100	5.180.728.689	0	311.744.599	0	0	0	0	0	311.744.599	0,00	6,02	0	9.717.438.959	nan	inf					
			-	-	0		0	0		0		0	0	0		0		nan		0		nan							
59	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan [Panti Sosial Tresna Werda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang		0		1.470.686.000	110	1.475.186.200	10	118.499.200			0		0	10	118.499.200	9,09	8,03	10	1.589.185.200	inf	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																
					(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)									(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%			
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)						
		(PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi																									
60	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		954.182.450	70	894.250.000	15	75.949.749	0	0	0	0	15	75.949.749	21,43	8,49	15	1.030.132.199	inf	inf	DINSOS			
61	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		2.605.467.550	40	401.301.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.605.467.550	nan	inf	DINSOS					
62	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		241.951.920	110	396.893.520	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	241.951.920	nan	inf	DINSOS					
63	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		150.000.000	40	101.407.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	150.000.000	nan	inf	DINSOS					
64	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		153.963.370	70	174.155.020	10	6.802.250	0	0	0	0	10	6.802.250	14,29	3,91	10	160.765.620	inf	inf	DINSOS			
65	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.408.000	70	62.613.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.408.000	nan	inf	DINSOS					
66	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		140.000.000	40	509.740.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	140.000.000	nan	inf	DINSOS					
67	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		80.139.200	110	184.056.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	80.139.200	nan	inf	DINSOS					
68	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0		11.550.000	40	0	18	5.550.000	0	0	0	0	18	5.550.000	45,00	inf	18	17.100.000	inf	inf	DINSOS			
69	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	70	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS					
70	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		64.582.150	70	63.181.960	10	6.604.400	0	0	0	0	10	6.604.400	14,29	10,45	10	71.186.550	inf	inf	DINSOS			
71	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		110.413.000	110	110.413.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	110.413.000	nan	inf	DINSOS					
72	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		1.355.390.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	1.355.390.000	nan	inf	DINSOS					
73	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Orang		0		134.900.000	70	187.300.000	10	25.200.000	0	0	0	0	10	25.200.000	14,29	13,45	10	160.100.000	inf	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I		II	III	IV	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%										
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Sosial Kewenangan Provinsi																										
74	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		982.786.000	40	50.436.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	982.786.000	nan	inf	DINSOS						
75	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		355.712.500	110	409.685.000	20	50.975.000	0	0	0	20	50.975.000	18,18	12,44	20	406.687.500	inf	inf	DINSOS					
76	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		74.146.220	70	61.677.852	20	20.664.000	0	0	0	20	20.664.000	28,57	33,50	20	94.810.220	inf	inf	DINSOS					
77	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	-	-		0		0	0	25.821.137	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS						
78	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		0	70	30.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINSOS						
79	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang		0		4.000.000	15	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.000.000	nan	inf	DINSOS						
80	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar]	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang		0		15.000.000	70	24.000.000	20	1.500.000	0	0	0	20	1.500.000	28,57	6,25	20	16.500.000	inf	inf	DINSOS					
81	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan [Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin]	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang		0		15.000.000	32	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	15.000.000	nan	inf	DINSOS						
82	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen		0		484.416.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	484.416.000	nan	inf	DINSOS						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	Persen	0	0	0	4.154.894.050	100	3.130.407.900	0	34.365.750	0	0	0	0	34.365.750	0,00	1,10	0	4.189.259.800	nan	inf						
83	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		2.605.467.550	20	380.407.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.605.467.550	nan	inf	DINSOS						
84	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		150.000.000	44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	150.000.000	nan	inf	DINSOS						
85	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		140.000.000	44	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	140.000.000	nan	inf	DINSOS						
86	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Orang		0		50.752.000	44	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.752.000	nan	inf	DINSOS						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Sosial Kewenangan Provinsi																								
87	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		982.786.000	44	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	982.786.000	nan	inf	DINSOS				
88	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		225.888.500	20		0	5	34.365.750	0	0	0	5	34.365.750	25,00	inf	5	260.254.250	inf	inf	DINSOS		
89	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen		0		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	0	0	0	1.804.341.449	0	1.797.219.960	0	175.177.550	0	0	0	0	0	175.177.550	nan	9,75	0	1.979.518.999	nan	inf			
90	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang		0		693.686.500	60	766.500.000	10	53.382.800	0	0	0	0	10	53.382.800	16,67	6,96	10	747.069.300	inf	inf	DINSOS		
91	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang		0		317.497.989	60	245.187.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	317.497.989	nan	inf	DINSOS			
92	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang		0		220.059.000	60	188.652.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	220.059.000	nan	inf	DINSOS			
93	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang		0		30.491.460	60	32.491.460	20	10.559.000	0	0	0	20	10.559.000	33,33	32,50	20	41.050.460	inf	inf	DINSOS			
94	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang		0		175.768.000	60	143.264.000	10	47.940.000	0	0	0	10	47.940.000	16,67	33,46	10	223.708.000	inf	inf	DINSOS			
95	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang		0		140.950.000	60	195.400.000	10	28.930.000	0	0	0	10	28.930.000	16,67	14,81	10	169.880.000	inf	inf	DINSOS			
96	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang		0		225.888.500	60	225.725.000	10	34.365.750	0	0	0	10	34.365.750	16,67	15,22	10	260.254.250	inf	inf	DINSOS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	Persen		0		413.121.215	100	881.500.000		50.700.000	0	0	0	0	50.700.000	0,00	5,75	0	463.821.215	nan	inf				
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak	Kajian Teknis	0	0	0	28.185.250	25	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	28.185.250	nan	inf				
1	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang		0		28.185.250	15	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	28.185.250	nan	inf	DINSOS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
										I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
																					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf																						
Predikat Kinerja																					-	-																						
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	384.935.965	0	816.500.000	0	50.700.000	0	0	0	0	0	50.700.000	nan	6,21	0	435.635.965	nan	inf																				
2	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga		0		108.400.000	600	413.886.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	108.400.000	nan	inf	DINSOS																				
3	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga		0		276.535.965	450	402.614.000	100	50.700.000	0	0	0	100	50.700.000	22,22	12,59	100	327.235.965	inf	inf	DINSOS																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf																						
Predikat Kinerja																					-	-																						
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-		0		194.773.916	0	544.924.000		3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000	nan	0,62	0	198.173.916	nan	inf																				
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-	0	0	0	194.773.916	0	544.924.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000	nan	0,62	0	198.173.916	nan	inf																				
1	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang		0		93.586.550	75	200.727.550	5	1.100.000	0	0	0	5	1.100.000	6,67	0,55	5	94.686.550	inf	inf	DINSOS																				
2	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang		0		70.628.616	75	121.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	70.628.616	nan	inf	DINSOS																				
3	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit		0		7.350.000	3	74.010.450	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	7.350.000	nan	inf	DINSOS																				
4	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang		0		17.500.000	130	94.357.000	10	2.300.000	0	0	0	10	2.300.000	7,69	2,44	10	19.800.000	inf	inf	DINSOS																				
5	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang		0		5.708.750	90	54.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.708.750	nan	inf	DINSOS																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf																						
Predikat Kinerja																					-	-																						
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-		0		67.542.755	0	131.499.173		5.387.500	0	0	0	0	0	5.387.500	nan	4,10	0	72.930.255	nan	inf																				
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-	0	0	0	67.542.755	0	131.499.173	0	5.387.500	0	0	0	0	0	5.387.500	nan	4,10	0	72.930.255	nan	inf																				
1	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam		0		67.542.755	1	131.499.173	0	5.387.500	0	0	0	0	0	5.387.500	0,00	4,10	0	72.930.255	nan	inf	DINSOS																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf																						
Predikat Kinerja																					-	-																						

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV												
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12					(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				0		0		34.506.837.498	6.446.295.597	0	0	0		6.446.295.597		18,68		6.446.295.597		inf				
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		33.853.837.498	6.446.295.597	0	0	0	0	6.446.295.597		19,04		6.446.295.597		inf				
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				0		0		33.853.837.498	6.446.295.597	0	0	0	0	6.446.295.597		19,04		6.446.295.597		inf				
2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	31.305.289.020	6.365.104.597	0	0	0	0	6.365.104.597	nan	20,33	0	6.365.104.597	nan	inf				
2.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	183.185.905	0	19.744.000	0	0	0	0	19.744.000	nan	10,78	0	19.744.000	nan	inf			
1	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	83.185.905	1	16.862.000	0	0	0	1	16.862.000	50,00	20,27	1	16.862.000	inf	inf	DINAKERTRANS		
2	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	2	45.000.000	2	2.882.000	0	0	0	2	2.882.000	100,00	6,40	2	2.882.000	inf	inf	DINAKERTRANS		
3	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	55.000.000	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	1	0	inf	nan	DINAKERTRANS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	26.865.160.000	0	5.574.918.637	0	0	0	0	5.574.918.637	nan	20,75	0	5.574.918.637	nan	inf			
4	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	156	26.500.000.000	156	5.487.984.637	0	0	0	156	5.487.984.637	100,00	20,71	156	5.487.984.637	inf	inf	DINAKERTRANS		
5	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	320.160.000	1	79.740.000	0	0	0	1	79.740.000	100,00	24,91	1	79.740.000	inf	inf	DINAKERTRANS		
6	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		0		0	18	45.000.000	4	7.194.000	0	0	0	4	7.194.000	22,22	15,99	4	7.194.000	inf	inf	DINAKERTRANS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	100.000.000	0	5.375.833	0	0	0	0	5.375.833	nan	5,38	0	5.375.833	nan	inf			
7	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	30.000.000	1	5.375.833	0	0	0	1	5.375.833	100,00	17,92	1	5.375.833	inf	inf	DINAKERTRANS		
8	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		
9	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan				
10	2.07.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan				
11	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
12	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	825.943.115	0	197.417.575	0	0	0	0	0	197.417.575	nan	23,90	0	197.417.575	nan	inf			
13	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
14	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
15	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
16	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	6	35.000.000	1	1.498.000	0	0	0	1	1.498.000	16,67	4,28	1	1.498.000	inf	inf	DINAKERTRANS			
17	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.000	1	1.500.000	0	0	0	1	1.500.000	100,00	10,00	1	1.500.000	inf	inf	DINAKERTRANS			
18	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
19	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	9.989.615	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
20	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.000	1	3.965.000	0	0	0	1	3.965.000	100,00	26,43	1	3.965.000	inf	inf	DINAKERTRANS			
21	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	9.997.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
22	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV											(19)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)		(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp				K	Rp	
23	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
24	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
25	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	15	29.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
26	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
27	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	9.995.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
28	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
29	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	25.000.000	1	7.685.500	0	0	0	1	7.685.500	100,00	30,74	1	7.685.500	inf	inf	DINAKERTRANS			
30	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
31	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
32	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	19	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
33	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
34	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
35	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	7	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
36	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
37	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
38	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
39	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
40	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
41	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	3	9.960.000	1	270.000	0	0	0	1	270.000	33,33	2,71	1	270.000	inf	inf	DINAKERTRANS			
42	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	450.000.000	1	182.499.075	0	0	0	1	182.499.075	100,00	40,56	1	182.499.075	inf	inf	DINAKERTRANS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II									III	IV	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
43	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	nan	nan				
44	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	10	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.426.000.000	0	509.269.662	0	0	0	0	509.269.662	nan	20,99	0	509.269.662	nan	inf		
45	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	3.000.000	1	750.000	0	0	0	1	750.000	100,00	25,00	1	750.000	inf	inf	DINAKERTRANS	
46	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	520.000.000	1	107.256.047	0	0	0	1	107.256.047	100,00	20,63	1	107.256.047	inf	inf	DINAKERTRANS	
47	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.903.000.000	1	401.263.615	0	0	0	1	401.263.615	100,00	21,09	1	401.263.615	inf	inf	DINAKERTRANS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf				
Predikat Kinerja																				-	-				
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	705.000.000	0	58.378.890	0	0	0	0	58.378.890	nan	8,28	0	58.378.890	nan	inf		
48	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1	110.000.000	1	5.998.890	0	0	0	1	5.998.890	100,00	5,45	1	5.998.890	inf	inf	DINAKERTRANS	
49	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	14	300.000.000	1	47.380.000	0	0	0	1	47.380.000	7,14	15,79	1	47.380.000	inf	inf	DINAKERTRANS	
50	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	5	15.000.000	2	5.000.000	0	0	0	2	5.000.000	40,00	33,33	2	5.000.000	inf	inf	DINAKERTRANS	
51	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	5	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
52	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	7	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
53	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	5	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-		0		0	0	50.000.000		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	nan	nan				
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	nan	nan				
1	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang		0		0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-		0		0	0	725.000.000		1.440.000	0	0	0	0	1.440.000	nan	0,20	0	1.440.000	nan	inf		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12					(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	0	0	0	0	0	580.000.000	0	720.000	0	0	0	0	720.000	nan	0,12	0	720.000	nan	inf				
1	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		0		0	32	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
2	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		0		0	48	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
3	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		0		0	35	180.000.000	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	0,40	0	720.000	nan	inf	DINAKERTRANS			
4	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
5	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja [UPTD BLK Padang Panjang]	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
6	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja [UPTD BLK Payakumbuh]	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	0	0	0	0	0	50.000.000	0	720.000	0	0	0	0	720.000	nan	1,44	0	720.000	nan	inf				
7	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK		0		0	10	50.000.000	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	1,44	0	720.000	nan	inf	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
8	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan		0		0	35	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
9	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-		0		0	0	415.000.000		2.895.000		0	0	0	2.895.000	nan	0,70	0	2.895.000	nan	inf				
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	195.000.000	0	2.640.000	0	0	0	0	2.640.000	nan	1,35	0	2.640.000	nan	inf				
1	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		0		0	25	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
2	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang		0		0	5800	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
3	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
4	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang		0		0	220	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
5	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		0		0	40	80.000.000	20	1.680.000	0	0	0	20	1.680.000	50,00	2,10	20	1.680.000	inf	inf	DINAKERTRANS				
6	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang		0		0	20	20.000.000	0	960.000	0	0	0	0	960.000	0,00	4,80	0	960.000	nan	inf	DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan					
7	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga		0		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	0	0	0	0	0	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
8	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
9	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Teregistrasi Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang		0		0	15000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
10	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		0		0	300	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	75.000.000	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000	nan	0,34	0	255.000	nan	inf				
11	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang		0		0	20	75.000.000	10	255.000	0	0	0	10	255.000	50,00	0,34	10	255.000	inf	inf	DINAKERTRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-		0		0	0	305.000.000		1.830.000		0	0	0	0	1.830.000	nan	0,60	0	1.830.000	nan	inf				
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	135.000.000	0	1.830.000	0	0	0	0	0	1.830.000	nan	1,36	0	1.830.000	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		0		0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
2	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan		0		0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
3	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan		0		0	1	85.000.000	0	1.830.000	0	0	0	0	1.830.000	0,00	2,15	0	1.830.000	nan	inf	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
4	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		0		0	50	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
5	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseselesaikan	Perkara		0		0	20	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
6	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga		0		0	19	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
7	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan		0		0	50	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-	0	0	0	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
8	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan		0		0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
9	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-		0		0	0	1.053.548.478		75.026.000		0	0	0	0	75.026.000	nan	7,12	0	75.026.000	nan	inf			
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	0	0	0	0	0	1.053.548.478	0	75.026.000	0	0	0	0	0	75.026.000	nan	7,12	0	75.026.000	nan	inf			
1	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Perusahaan		0		0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp				
			(Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)																								
2	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan		0		0	476	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
3	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan		0		0	159	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
4	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan		0		0	238	80.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
5	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus		0		0	55	89.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
6	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus		0		0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
7	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus		0		0	27	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
8	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus		0		0	18	31.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
9	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	8	26.643.478	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
10	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	12	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
11	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
12	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan [UPTD KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	99	316.000.000	15	38.601.000	0	0	0	15	38.601.000	15,15	12,22	15	38.601.000	inf	inf	DINAKERTRANS			
13	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan [UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan		0		0	24	35.000.000	0	36.425.000	0	0	0	0	36.425.000	0,00	104,07	0	36.425.000	nan	inf	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0		0		653.000.000		0	0	0	0		0		0,00		0	nan					
3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				0		0		653.000.000		0	0	0	0		0		0,00		0	nan					
3.32.02		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-		0		0	0	35.000.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
3.32.02.1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-																							
1	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan	Dokumen		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Dikerjasamakan dengan Daerah Lain																								
2	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
3	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-		0		0	0	405.000.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	405.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga		0		0	100	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
2	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga		0		0	100	68.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
3	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang		0		0	90	242.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
4	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi		0		0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-		0		0	0	213.000.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	0	0	0	0	0	213.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga		0		0	60	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
2	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman		0		0	3	153.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											
Predikat Kinerja																											

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				50.934.861.960		18.156.152.205		15.878.670.450		2.072.244.888		0	0	0	2.072.244.888		13,05		20.228.397.093		39,71				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		123.819.800		67.499.800		0	0	0	0	0	0	0,00		123.819.800		inf					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		123.819.800		67.499.800		0	0	0	0	0	0	0,00		123.819.800		inf					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		0	100	123.819.800	100	67.499.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	123.819.800	inf	inf				
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	81.400.000	0	41.250.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	81.400.000	nan	inf				
1	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	110	81.400.000	56	41.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	110	81.400.000	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	42.419.800	0	26.249.800	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	42.419.800	nan	inf				
2	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	13	42.419.800	10	26.249.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	42.419.800	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.934.861.960		18.032.332.405		15.811.170.650		2.072.244.888		0	0	0	2.072.244.888		13,11		20.104.577.293		39,47				
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				50.484.710.960		16.442.745.498		15.038.288.650		2.072.244.888		0	0	0	2.072.244.888		13,78		18.514.990.386		36,67				
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		46.692.193.960	100	10.980.889.048	85	10.370.055.105	25	2.056.281.888	0	0	0	0	25	2.056.281.888	29,41	19,83	125	13.037.170.936	inf	27,92			
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen	100	1.542.244.000	100	365.757.330	85	400.036.600	25	4.848.000	0	0	0	0	0	25	4.848.000	29,41	1,21	125	370.605.330	125,00	24,03		
1	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.342.244.000	4	134.207.250	5	203.008.300	1	4.124.000	0	0	0	0	1	4.124.000	20,00	2,03	5	138.331.250	inf	10,31	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
2	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		100.000.000	3	128.891.080	4	91.298.000	3	724.000	0	0	0	0	3	724.000	75,00	0,79	6	129.615.080	inf	129,62	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan denoan scedule

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12									(15) = 14/5 * 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		100.000.000	4	102.659.000	6	105.730.300	2	0	0	0	0	2	0	33,33	0,00	6	102.659.000	inf	102,66	DPPPA		Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	80,86				
Predikat Kinerja																						-	T				
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib adinistrasi keuangan	persen	100	30.344.996.808	100	7.331.390.187	100	6.603.382.400	25	1.876.857.875	0	0	0	0	25	1.876.857.875	25,00	28,42	125	9.208.248.062	125,00	30,35			
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Laporan	0	0	0	2	25	0	0	0	25		1.250,00	25		inf									
4	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		30.009.996.808	52	6.984.251.187	52	6.219.401.000	52	1.808.877.875	0	0	0	0	52	1.808.877.875	100,00	29,08	104	8.793.129.062	inf	29,30	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
5	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0	12	308.728.600	12	344.598.000	3	67.980.000	0	0	0	3	67.980.000	25,00	19,73	15	376.708.600	inf	inf	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule	
6	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		335.000.000	18	38.410.400	2	39.383.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	38.410.400	inf	11,47	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	persen	100	0	100	65.237.880	100	94.894.750	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	125	65.237.880	125,00	inf			
7	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	7	61.931.180	1	54.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	61.931.180	inf	inf	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule	
8	2.08.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	1	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA			
9	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	3	3.306.700	2	36.844.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	3.306.700	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	0	100	100.744.600	0	183.458.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	100.744.600	125,00	inf			
10	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	75	100.744.600	75	183.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75	100.744.600	inf	inf	DPPPA	Tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		K	Rp									K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	2.912.200.000	100	1.083.387.777	0	886.464.545	25	58.493.950	0	0	0	0	25	58.493.950	inf	6,60	125	1.141.881.727	125,00	39,21			
			Terlaksananya penyediaan bahan logistik dan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD	Sub Kegiatan	100		100		2		25		0	0	0	25		1.250,00		125		125,00					
11	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		205.000.000	3	16.769.600	2	48.580.402	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	16.769.600	inf	8,18	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
12	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA			
13	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	9	116.310.100	1	110.533.550	2	3.717.000	0	0	0	0	2	3.717.000	200,00	3,36	11	120.027.100	inf	inf	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule
14	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	6	13.223.400	6	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6	13.223.400	inf	inf	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
15	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		210.000.000	12	36.100.000	1	36.100.000	1	1.983.000	0	0	0	1	1.983.000	100,00	5,49	13	38.083.000	inf	18,13	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
16	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	70.200.000	12	15.720.000	1	16.140.000	0	1.275.000	0	0	0	0	1.275.000	0,00	7,90	12	16.995.000	inf	24,21	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
17	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	160.000.000	0	0	1	4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	DPPPA			
18	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	25.576.356	6	3.000.000	0	3.620.000	0	0	0	0	3.620.000	0,00	120,67	12	29.196.356	inf	inf	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
19	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	2.237.000.000	12	859.688.321	1	627.979.593	0	47.898.950	0	0	0	0	47.898.950	0,00	7,63	12	907.587.271	inf	40,57	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
20	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	30.000.000	0	0	1	4.971.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan schedule	
21	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		K	Rp			K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100	1.063.000.000	100	400.716.000	0	262.368.960	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	400.716.000	125,00	37,70			
22	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	9.641.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA		
23	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	700.000.000	5	120.392.000	1	3.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	120.392.000	inf	17,20	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
24	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	363.000.000	31	280.324.000	1	249.311.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	31	280.324.000	inf	77,22	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	7.143.126.000	100	1.293.043.279	0	1.478.214.850	25	82.814.163	0	0	0	0	25	82.814.163	inf	5,60	125	1.375.857.442	125,00	19,26			
25	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	35.500.000	1	499.500	1	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	499.500	inf	1,41	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
26	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	2.640.000.000	12	284.547.739	1	342.901.500	0	59.102.053	0	0	0	0	0	59.102.053	0,00	17,24	12	343.649.792	inf	13,02	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
27	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	4.467.626.000	12	1.007.996.040	1	1.134.063.350	0	23.712.110	0	0	0	0	0	23.712.110	0,00	2,09	12	1.031.708.150	inf	23,09	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	1,39				
Predikat Kinerja																						-	SR				
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	3.686.627.152	100	340.611.995	0	461.235.000	25	33.267.900	0	0	0	0	25	33.267.900	inf	7,21	125	373.879.895	125,00	10,14			
28	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	1.431.627.000	9	110.120.745	1	123.600.000	4	31.817.900	0	0	0	0	4	31.817.900	400,00	25,74	13	141.938.645	inf	9,91	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule
29	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	2	4.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA		
30	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	780.000.152	115	89.744.500	1	120.100.000	2	1.450.000	0	0	0	0	2	1.450.000	200,00	1,21	117	91.194.500	inf	11,69	DPPPA	tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
31	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1.475.000.000	2	140.746.750	1	198.385.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	140.746.750	inf	9,54	DPPPA		tidak ada hambatan	Adanya dukungan SDM dalam pelaksanaan kegiatan dandisesuaikan dengan scedule	
32	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA				
33	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	persen		495.000.000	25	842.462.939	15,09	1.289.972.450	25	0	0	0	0	25	0	166,67	0,00	50	842.462.939	inf	170,19				
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan PUG dan PPRG Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender	Kab/Kota	0	0	0	270.495.546	19	196.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	270.495.546	nan	inf				
1	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	0	0	2	48.154.000	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	48.154.000	inf	inf	DPPPA		Tidak ada hambatan	1. Bagi Pemerintah Daerah yang bagus dalam melaksanakan Randa PUG memiliki peluang yang besar dalam perolehan APE
2	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	0	0	2	222.341.546	2	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	222.341.546	inf	inf	DPPPA		Tidak ada hambatan	1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 2. Permendagri No 67 tahun 2018 3. Perda No 07 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat	Kab/Kota	0	350.000.000	0	534.775.623	19	286.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	534.775.623	nan	152,79				
3	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang		175.000.000	40	44.605.200	40	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	44.605.200	inf	25,49	DPPPA		1.Adanya paradigma masyarakat Sumatera Barat yang menganggap bahwa posisi perempuan dibelakang laki-laki	Adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan Undang –undang No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																									maupun pengurusannya.				
4	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga		175.000.000	3	490.170.423	3	256.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	490.170.423	inf	280,10	DPPPA		Masih adanya sub ordinasi terhadap pemilihan perempuan	Adanya partisipasi perempuan dalam memilih perempuan di legislative dan Undang –undang No 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusannya.		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	76,40						
Predikat Kinerja																						-	T						
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap organisasi perempuan	Kab/Kota	0	145.000.000	0	37.191.770	19	807.972.450	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	37.191.770	nan	25,65					
			Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya	persen	0		0		100		0		0	0	0	0		0,00		0		nan							
5	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lembaga		20.000.000	3	18.595.885	2	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	18.595.885	inf	92,98	DPPPA		1. Banyak organisasi dan lembaga yang mau ikut standarisasi dan juga dukungan anggaran untuk standarisasi belum tersedia	1. Adanya dukungan dari Kementerian PPA untuk dilakukan proses standarisasi 2. Dorongan oleh pemerintah daerah untuk dukungan dan pendampingan standarisasi		
6	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Orang		125.000.000	100	18.595.885	100	782.972.450	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	18.595.885	inf	14,88	DPPPA		Belum optimalnya SDM bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Adanya dukungan anggaran bagi lembaga masyarakat /organisasi masyarakat (BKOW dan DW) berbentuk hibah atau kegiatan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	17,98						
Predikat Kinerja																						-	SR						
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen		290.000.000		375.739.408	96	1.510.674.995	25	4.280.000		0	0	0	25	4.280.000	26,04	0,28	25	380.019.408	inf	131,04					
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan terhadap perempuan	Kab/Kota	0	290.000.000	0	39.391.290	19	95.000.000	25		0	0	0	0	0	25	0	131,58	0,00	25	39.391.290	inf	13,58				
1	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen		290.000.000	1	39.391.290	1	70.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	39.391.290	inf	13,58	DPPPA				
2	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan	Perangkat Daerah		0		0	19	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DPPPA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	Orang	0	0	0	137.712.118	40	340.258.150	0	4.280.000	0	0	0	0	0	4.280.000	0,00	1,26	0	141.992.118	nan	inf					
3	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang		0		47.951.360	40	140.258.150	7	0	0	0	0	7	0	17,50	0,00	7	47.951.360	inf	inf	DPPPA	1. Kurangnya tenaga SDM Kurang memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas kendaraan untuk mobilisasi penjangkauan kasus	Sudah terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan para pihak, LSM, dan OPD terkait lainnya			
4	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan		0		89.760.758	20	200.000.000	4	4.280.000	0	0	0	0	4	4.280.000	20,00	2,14	4	94.040.758	inf	inf	DPPPA	. Kab/Kota yang menerima dana DAK Non Fisik PPA membiayai penanganan kasus dengan anggaran Kab/ Kota masingmasing 2. Layanan visum et repertum pada sebagian Rumah sakit Bhayangkara sudah digratiskan sehingga sampai saat ini belum ada permintaan layanan visum	1. Disetujuinya telaahan staf DP3AP2KB Prov. Sumbar oleh Gubernur terkait penyediaan rumah perlindungan yang memanfaatkan pemakaian 2 (dua) kamar di Bapelkes Dinkes Prov. Sumbar 2. Kab/Kota yang tidak menerima DAK Non Fisik cukup aktif dalam melaksanakan rujukan kasus ke UPTD PPA Prov. Sumbar 3. Instansi dan lembaga terkait seperti Kepolisian cukup berperan aktif dalam melaksanakan koordinasi kasus dengan UPTD PPA Prov. Sumbar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan	Kab/Kota	0	0	0	198.636.000	19	1.075.416.845	25	0	0	0	0	0	0	25	0	131,58	0,00	25	198.636.000	inf	inf				
5	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		0		0	50	37.549.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPPPA				
6	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	2	198.636.000	1	1.037.866.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	198.636.000	inf	inf	DPPPA	Belum terstandarisasinya lembaga layanan	Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan standarisasi lembaga layanan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja															-	-										
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	indeks		275.193.000	77.77	556.543.050	71,5	120.763.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	77.77	556.543.050	inf	202,24				
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga	indeks	37.5	275.193.000	37.55	556.543.050	37	120.763.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	37.55	556.543.050	100,13	202,24				
			Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kab/Kota	0		0		19		0	0	0	0	0		0,00		0	nan						
1	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	5	155.000.000	2	511.820.065	2	70.763.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	511.820.065	40,00	330,21	DPPPA	Belum optimalnya Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan dan arahan terkait dengan percepatan pengaruh pengarusutamaan gender di lingkungan keluarga (sosialisasi PUG bagi lembaga masyarakat)	
2	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	120.193.000	2	44.722.985	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	44.722.985	inf	37,21	DPPPA	Pelaksanaan kegiatan mempedomani jadwal dan lokasi yang ditetapkan sesuai TMMN	Surat Gubernur terkait program bersama pelaksanaan kegiatan TMMN yang sarasannya dalam bentuk non fisik (Peningkatan Ekonomi Perempuan)	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	183,71				
Predikat Kinerja																					-	ST				
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	persen		716.285.000	96.87	105.412.280	93,75	146.509.000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	96.87	105.412.280	inf	14,72				
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data, yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan	persen	100	716.285.000	100	105.412.280	100	146.509.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	105.412.280	100,00	14,72				
1	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	0	327.785.000	2	64.738.500	1	76.509.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	64.738.500	inf	19,75	DPPPA	Masih terbatasnya pengetahuan Kab/kota terkait pengumpulan data	Melakukan koordoinasi dengan steekholders terkait (BPS dan Kominfotik	
2	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	0	388.500.000	2	40.673.780	4	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	40.673.780	inf	10,47	DPPPA	Keterbatasan SDM dan waktu sehingga dilakukan Rescheduling kegiatan	Telah adanya aplikasi SIGA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	15,11				
Predikat Kinerja																					-	SR				
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupate n/Kota		1.118.291.000	7	1.087.081.893	6	766.584.100		0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	1.087.081.893	inf	97,21				
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang ditingkatkan pelembagaannya	persen	100	437.791.000	100	934.425.143	100	331.760.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	934.425.143	100,00	213,44				
1	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	437.791.000	1	343.377.200	1	210.765.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	343.377.200	inf	78,43	DPPPA	Adanya perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	perangkat daerah	0	0	19	591.047.943	19	120.995.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	591.047.943	inf	inf	DPPPA		Adanya pergeseran jadwal dengan Narasumber	Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	persen	100	680.500.000	100	152.656.750	100	434.824.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	152.656.750	100,00	22,43				
3	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	0	498.000.000	4000	74.887.750	3000	238.747.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4000	74.887.750	inf	15,04	DPPPA	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	Adnya Kemitraan Dengan Disdik Dalam Upaya Monex SRAAdanya	
4	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	0	80.000.000	1	70.769.000	2	181.026.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	70.769.000	inf	88,46	DPPPA	Tidak ada permasalahan	Adanya Motivasi Peserta Sosialisasi	
5	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	0	102.500.000	1	7.000.000	1	15.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	7.000.000	inf	6,83	DPPPA	Adanya perubahan kebutuhan anggaran	Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	22,07					
Predikat Kinerja																					-	SR					
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	persen		897.748.000	100	2.494.616.880	96	833.730.000	25	11.683.000	0	0	0	0	25	11.683.000	26,04	1,40	125	2.506.299.880	inf	279,18			
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab/Kota	0	702.748.000	0	1.372.326.111	19	225.505.000	25	0	0	0	0	0	25	0	131,58	0,00	25	1.372.326.111	inf	195,28			
1	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	702.748.000	5	1.290.483.811	1	135.505.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	1.290.483.811	inf	183,63	DPPPA			
2	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	Orang	0	0	60	81.842.300	130	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	81.842.300	inf	inf	DPPPA			
		/program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi		Orang	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	0	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	300.145.494	50	440.000.000	25	11.683.000	0	0	0	0	0	25	11.683.000	50,00	2,66	25	311.828.494	inf	inf		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
3	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	0	0		116.874.400	50	150.000.000	8	0	0	0	0	8	0	16,00	0,00	8	116.874.400	inf	inf	DPPPA			
4	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi [UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK]	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Layanan	0	0		183.271.094	30	290.000.000	10	11.683.000	0	0	0	10	11.683.000	33,33	4,03	10	194.954.094	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab/Kota	0	195.000.000	0	822.145.275	19	168.225.000	25	0	0	0	0	0	25	0	131,58	0,00	25	822.145.275	inf	421,61			
			Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak	persen	100		100		100		25	0	0	0	0	25		25,00		125		125,00					
5	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	0	80.000.000	1	143.909.100	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	143.909.100	inf	179,89	DPPPA			
6	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	115.000.000	3	533.837.275	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	533.837.275	inf	464,21	DPPPA			
7	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	1	144.398.900	50	123.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	144.398.900	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.934.861.960		18.032.332.405		15.811.170.650		2.072.244.888	0	0	0	0		2.072.244.888		13,11		20.104.577.293		39,47			
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				450.151.000		1.589.586.907		772.882.000		0	0	0	0		0		0,00		1.589.586.907		353,12				
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	persen		203.288.000	100	199.071.648	90	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	199.071.648	inf	97,93				
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk	persen	100	203.288.000	100	199.071.648	100	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	199.071.648	100,00	97,93				
1	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Dokumen	0	98.288.000	1	142.782.767	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	142.782.767	inf	145,27	DPPPA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I	II	III	IV	K	Rp			K	Rp						K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																							
2	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	0	105.000.000	1	56.288.881	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	56.288.881	inf	53,61	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	99,44				
Predikat Kinerja																					-	ST				
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB	persen		0	56.3	172.800.780	56,32	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	56.3	172.800.780	inf	inf				
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	Laporan	0	0	0	172.800.780	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	172.800.780	nan	inf				
1	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	0	0	1	38.637.800	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	38.637.800	inf	inf	DPPPA			
2	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	0	0	1	134.162.980	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	134.162.980	inf	inf	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks		246.863.000	61.2	1.217.714.479	65,54	412.882.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	61.2	1.217.714.479	inf	493,28				
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persen	100	246.863.000	100	872.676.679	100	296.202.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	872.676.679	100,00	353,51				
1	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		145.000.000	1	810.435.528	1	236.202.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	810.435.528	inf	558,92	DPPPA			
2	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen		101.863.000	1	62.241.151	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	62.241.151	inf	61,10	DPPPA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	310,01				
Predikat Kinerja																					-	ST				
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan keluarga	persen	100	0	100	345.037.800	100	116.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	345.037.800	100,00	inf			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga																								
3	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten /Kota	0		0	1	72.305.900	1	61.200.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	72.305.900	inf	inf	DPPPA		
4	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	0		0	6	272.731.900	1	55.480.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	6	272.731.900	inf	inf	DPPPA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PANGAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PANGAN				0		0		63.547.456.000	3.637.992.572	0	0	0		3.637.992.572		5,72		3.637.992.572		inf					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan				
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		63.547.456.000	3.637.992.572	0	0	0	0		3.637.992.572		5,72		3.637.992.572		inf				
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				0		0		63.547.456.000	3.637.992.572	0	0	0	0		3.637.992.572		5,72		3.637.992.572		inf				
2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	25.371.939.500	3.477.654.572	0	0	0	0	0	3.477.654.572	nan	13,71	0	3.477.654.572	nan	inf				
2.09.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	406.000.000	0	6.060.000	0	0	0	0	6.060.000	nan	1,49	0	6.060.000	nan	inf				
1	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	4	88.000.000	1	6.060.000	0	0	0	0	1	6.060.000	25,00	6,89	1	6.060.000	inf	inf	DINAS PANGAN		
2	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	7	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
3	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	273.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	15.602.945.911	3.114.409.991	0	0	0	0	0	3.114.409.991	nan	19,96	0	3.114.409.991	nan	inf				
4	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	95	15.117.940.311	95	3.061.969.991	0	0	0	0	95	3.061.969.991	100,00	20,25	95	3.061.969.991	inf	inf	DINAS PANGAN		
5	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	410.005.600	1	52.440.000	0	0	0	1	52.440.000	100,00	12,79	1	52.440.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
6	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	138.400.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
7	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	5	138.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	88.922.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
8	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	95	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
9	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	4	19.922.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja																												
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	936.118.638	0	142.091.625	0	0	0	0	0	142.091.625	nan	15,18	0	142.091.625	nan	inf				
10	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
11	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	41.991.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
12	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
13	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	24.999.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
14	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
15	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
16	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
17	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
18	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	54.867.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
19	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
20	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
21	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
22	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	32.340.000	1	1.900.000	0	0	0	0	1	1.900.000	100,00	5,88	1	1.900.000	inf	inf	DINAS PANGAN			
23	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
24	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
25	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	14.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
26	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	59.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
27	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
28	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
29	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	500.000.000	3	140.191.625	0	0	0	0	3	140.191.625	25,00	28,04	3	140.191.625	inf	inf	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.303.459.400	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000	nan	0,08	0	1.080.000	nan	inf					
30	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	3	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
31	2.09.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		0		0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
32	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	99.965.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
33	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
34	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
35	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	49.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
36	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
37	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	19.320.000	1	1.080.000	0	0	0	0	1	1.080.000	100,00	5,59	1	1.080.000	inf	inf	DINAS PANGAN				
38	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.500.435.733	0	211.007.656	0	0	0	0	0	211.007.656	nan	8,44	0	211.007.656	nan	inf					
39	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
40	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
41	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
42	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	255.000.000	1	46.524.544	0	0	0	0	1	46.524.544	100,00	18,24	1	46.524.544	inf	inf	DINAS PANGAN				
43	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	185.000.000	1	26.934.614	0	0	0	0	1	26.934.614	100,00	14,56	1	26.934.614	inf	inf	DINAS PANGAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
										I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
44	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	400.000.000	1	67.373.722		0	0	0	1	67.373.722	100,00	16,84	1	67.373.722	inf	inf	DINAS PANGAN				
45	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	4	1.615.435.733	1	70.174.776		0	0	0	1	70.174.776	25,00	4,34	1	70.174.776	inf	inf	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0		0	0	2.395.657.818	0	3.005.300	0	0	0	0	0	3.005.300	nan	0,13	0	3.005.300	nan	inf				
46	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	10	100.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
47	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	22	160.040.068	4	3.005.300		0	0	0	4	3.005.300	18,18	1,88	4	3.005.300	inf	inf	DINAS PANGAN				
48	2.09.01.1.09.0006	[UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	17	50.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
49	2.09.01.1.09.0006	[UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	17	50.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
50	2.09.01.1.09.0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	35	100.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
51	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
52	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	312.277.350	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
53	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	1.423.340.400	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	0	0		0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
54	2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	2.000.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-		0		0	0	30.037.648.000		151.338.000		0	0	0	0	151.338.000	nan	0,50	0	151.338.000	nan	inf					
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	0	0	0		0	0	26.442.648.000	0	147.138.000	0	0	0	0	0	147.138.000	nan	0,56	0	147.138.000	nan	inf				
1	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		0		0	1	4.350.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			
2	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		0		0	1	250.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
3	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan		0		0	1	3.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
4	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan		0		0	1	953.648.000	0	147.138.000		0	0	0	0	147.138.000	0,00	15,43	0	147.138.000	nan	inf	DINAS PANGAN			
5	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan		0		0	1	639.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
6	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
7	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit		0		0	100	16.850.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
8	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan		0		0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
9	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	0	0	0		0	2.575.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
10	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton		0		0	50	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
11	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton		0		0	200	2.300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
12	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan		0		0	1	125.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	-	0	0	0		0	1.020.000.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	nan	0,41	0	4.200.000	nan	inf				
13	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		0		0	1	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
14	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		0		0	1	650.000.000	0	4.200.000		0	0	0	4.200.000	0,00	0,65	0	4.200.000	nan	inf	DINAS PANGAN				
15	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan		0		0	1	70.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-		0		0	0	5.900.000.000		0		0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-	-	0		0	0	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
1	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	5.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
2	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		0			1	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
3	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan		0			2	2.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
4	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen		0			1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-		0			0	2.237.868.500		9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	nan	0,40	0	9.000.000	nan	inf					
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	2.237.868.500	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	nan	0,40	0	9.000.000	nan	inf					
1	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat		0			130	562.868.500	30	9.000.000	0	0	0	30	9.000.000	23,08	1,60	30	9.000.000	inf	inf	DINAS PANGAN				
2	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		0			1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
3	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen		0			1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
4	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen		0			1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
5	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan [UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		0			1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
6	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan [UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		0			1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
7	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		0			1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS PANGAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				0		0		23.646.071.000	3.744.326.550	0	0	0		3.744.326.550		15,83		3.744.326.550		inf						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan						
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		23.646.071.000	3.744.326.550	0	0	0		3.744.326.550		15,83		3.744.326.550		inf						
2.11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				0		0		23.646.071.000	3.744.326.550	0	0	0		3.744.326.550		15,83		3.744.326.550		inf						
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	16.554.585.898	2.883.674.635	0	0	0	0	2.883.674.635	nan	17,42	0	2.883.674.635	nan	inf						
2.11.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	62.000.000	0	15.056.000	0	0	0	0	15.056.000	nan	24,28	0	15.056.000	nan	inf					
1	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	27.000.000	0	14.832.000	0	0	0	0	14.832.000	0,00	54,93	0	14.832.000	nan	inf	DLH				
2	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	3	5.000.000	3	224.000	0	0	0	3	224.000	100,00	4,48	3	224.000	inf	inf	DLH				
3	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	11.476.570.566	0	2.660.930.988	0	0	0	0	0	2.660.930.988	nan	23,19	0	2.660.930.988	nan	inf				
4	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	110	11.067.610.566	78	2.627.970.988	0	0	0	78	2.627.970.988	70,91	23,74	78	2.627.970.988	inf	inf	DLH				
5	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0	nan	nan	DLH				
6	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	100	408.960.000	400	32.960.000	0	0	0	400	32.960.000	400,00	8,06	400	32.960.000	inf	inf	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	184.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	nan	nan				
7	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	18	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
8	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	-	-		0		0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	193.250.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	nan	nan				
9	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	103	68.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
10	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	7	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
11	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	5	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)			(17)	(18)	(19)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
Predikat Kinerja																				-	-																						
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.144.973.258	0	99.087.620	0	0	0	0	0	99.087.620	nan	8,65	0	99.087.620	nan	inf																			
12	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
13	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
14	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	8	14.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
15	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	70.000.000	2	1.720.000	0	0	0	0	2	1.720.000	16,67	2,46	2	1.720.000	inf	inf	DLH																		
16	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	56.383.056	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
17	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	0	0				0	0	50.000.800	1	2.266.000	0	0	0	0	1	2.266.000	inf	4,53	1	2.266.000	inf	inf	DLH																		
18	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	30.000.000	0	437.000	0	0	0	0	0	437.000	0,00	1,46	0	437.000	nan	inf	DLH																		
19	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
20	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	2	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
21	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	4	10.000.000	12	1.215.000	0	0	0	0	12	1.215.000	300,00	12,15	12	1.215.000	inf	inf	DLH																		
22	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0				0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
23	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	7	25.000.000	2	46.724.810	0	0	0	0	2	46.724.810	28,57	186,90	2	46.724.810	inf	inf	DLH																		
24	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Laboratorium Lingkungan]	-	-		0		0	0	83.268.303	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DLH																		
25	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	18	601.963.000	2	46.724.810	0	0	0	0	2	46.724.810	11,11	7,76	2	46.724.810	inf	inf	DLH																		
26	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	10	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
27	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	6	157.655.099	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan									
Predikat Kinerja																				-	-																						
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	158.764.200	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																			
28	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	32.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																		
29	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	8	54.675.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																		
30	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	13	71.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH																		
31	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																		nan	nan								
Predikat Kinerja																				-	-																						
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.366.682.333	0	108.600.027	0	0	0	0	0	0	108.600.027	nan	4,59	0	108.600.027	nan	inf																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					I	II			III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
32	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	20	12.000.000	1	0	0	0	0	1	0	5,00	0,00	1	0	inf	nan	DLH			
33	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	152.502	200.000.000	9	36.846.460	0	0	0	9	36.846.460	5,90	18,42	9	36.846.460	inf	inf	DLH			
34	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Persampahan]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	112.800.000	3	18.840.752	0	0	0	3	18.840.752	25,00	16,70	3	18.840.752	inf	inf	DLH			
35	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	2	64.440.000	0	15.527.064	0	0	0	0	15.527.064	0,00	24,10	0	15.527.064	nan	inf	DLH			
36	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	155.000.000	0	33.485.751	0	0	0	0	33.485.751	0,00	21,60	0	33.485.751	nan	inf	DLH			
37	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	38	1.822.442.333	9	3.900.000	0	0	0	9	3.900.000	23,68	0,21	9	3.900.000	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	967.345.541	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
38	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	17	250.000.000	3	0	0	0	0	3	0	17,65	0,00	3	0	inf	nan	DLH			
39	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	6	4.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
40	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	20	50.000.000	29	0	0	0	0	29	0	145,00	0,00	29	0	inf	nan	DLH			
41	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	30	263.117.541	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
42	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	199.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
43	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH			
44	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
45	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		0		0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-	-		0		0	0	102.318.000		5.420.000	0	0	0	0	5.420.000	nan	5,30	0	5.420.000	nan	inf				
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen		0		0	19	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)		(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%									(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	52.318.000	0	5.420.000	0	0	0	0	0	5.420.000	nan	10,36	0	5.420.000	nan	inf				
2	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen		0		0	19	52.318.000	12	5.420.000	0	0	0	0	12	5.420.000	63,16	10,36	12	5.420.000	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-		0		0	0	3.173.200.000		770.056.985	0	0	0	0	0	770.056.985	nan	24,27	0	770.056.985	nan	inf				
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-	0	0	0	0	0	3.173.200.000	0	770.056.985	0	0	0	0	0	770.056.985	nan	24,27	0	770.056.985	nan	inf				
1	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit		0		0	2	2.862.200.000	1	769.464.985	0	0	0	0	1	769.464.985	50,00	26,88	1	769.464.985	inf	inf	DLH			
2	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen		0		0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
3	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit		0		0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
4	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen		0		0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH			
5	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen		0		0	19	35.000.000	2	592.000	0	0	0	0	2	592.000	10,53	1,69	2	592.000	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-		0		0	0	1.713.993.902		44.423.454	0	0	0	0	0	44.423.454	nan	2,59	0	44.423.454	nan	inf				
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-	0	0	0	0	0	1.478.993.902	0	44.423.454	0	0	0	0	0	44.423.454	nan	3,00	0	44.423.454	nan	inf				
1	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		0		0	19	430.000.000	2	0	0	0	0	0	2	0	10,53	0,00	2	0	inf	nan	DLH			
2	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan		0		0	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
3	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan		0		0	1	60.000.000	0	1.840.000	0	0	0	0	0	1.840.000	0,00	3,07	0	1.840.000	nan	inf	DLH			
4	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen		0		0	1	96.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
5	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen		0		0	150	802.093.902	17	42.583.454	0	0	0	0	17	42.583.454	11,33	5,31	17	42.583.454	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	0	0	0	0	0	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
6	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
7	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas	Kegiatan		0		0	2	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			kabupaten/kota yang dilaksanakan																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-		0		0	0	119.327.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	119.327.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0		0		0	0	119.327.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-		0		0	0	1.172.760.200		40.751.476	0	0	0	0	0	40.751.476	nan	3,47	0	40.751.476	nan	inf		
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	1.172.760.200	0	40.751.476	0	0	0	0	0	40.751.476	nan	3,47	0	40.751.476	nan	inf		
1	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		0		0	20	80.000.000	1	0	0	0	0	1	0	5,00	0,00	1	0	inf	nan	DLH		
2	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen		0		0	1	1.092.760.200	0	40.751.476	0	0	0	0	40.751.476	0,00	3,73	0	40.751.476	nan	inf	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-		0		0	0	158.225.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	158.225.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen		0		0	4	50.000.000	7	0	0	0	0	7	0	175,00	0,00	7	0	inf	nan	DLH		
2	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		0		0	100	33.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
3	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha		0		0	3	75.164.000	1	0	0	0	0	1	0	33,33	0,00	1	0	inf	nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					I	II			III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-		0		0	0	52.170.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	0	0	0	0	0	52.170.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen		0		0	1	52.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-		0		0	0	358.252.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	358.252.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		0		0	24	155.000.000	1	0	0	0	0	1	0	4,17	0,00	1	0	inf	nan	DLH			
2	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang		0		0	10	155.977.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
3	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga		0		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DLH			
4	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga		0		0	6	47.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-		0		0	0	106.927.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	106.927.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		0		0	22	106.927.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-		0		0	0	134.312.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	134.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung	Perkara		0		0	3	35.489.000	5	0	0	0	0	5	0	166,67	0,00	5	0	inf	nan	DLH			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi																								
2	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan		0		0	100	98.823.000	2	0	0	0	0	2	0	2,00	0,00	2	0	inf	nan	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				0		0		14.924.356.000		5.340.650.000		0		0		0		5.340.650.000		35,78		5.340.650.000		inf				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0		0		0		0		nan		0		nan				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		14.924.356.000		5.340.650.000		0		0		0		5.340.650.000		35,78		5.340.650.000		inf				
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				0		0		14.924.356.000		5.340.650.000		0		0		0		5.340.650.000		35,78		5.340.650.000		inf				
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	9.582.614.000		3.884.950.000		0		0		0	0	3.884.950.000	nan	40,54	0	3.884.950.000	nan	inf				
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		0		0	0	108.955.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	nan	27,53	0	30.000.000	nan	inf					
1	2.13.01.1.01.0001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	24	80.000.000	12	12.000.000		0		0		0	12	12.000.000	50,00	15,00	12	12.000.000	inf	inf	DPMD			
2	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	0	28.955.000	4	18.000.000		0		0		0	4	18.000.000	inf	62,17	4	18.000.000	inf	inf	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf						
Predikat Kinerja																							-	-						
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	7.192.778.845	0	2.860.000.000	0	0	0	0	0	0	2.860.000.000	nan	39,76	0	2.860.000.000	nan	inf					
3	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	50	6.982.778.845	250	2.785.000.000		0		0		0	250	2.785.000.000	500,00	39,88	250	2.785.000.000	inf	inf	DPMD			
4	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	0	170.000.000	50	45.000.000		0		0		0	50	45.000.000	inf	26,47	50	45.000.000	inf	inf	DPMD			
5	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	18	40.000.000	12	30.000.000		0		0		0	12	30.000.000	66,67	75,00	12	30.000.000	inf	inf	DPMD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
																							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf																								
Predikat Kinerja																							-	-																								
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	78.300.000	0	38.500.000	0	0	0	0	0	38.500.000	nan	49,17	0	38.500.000	nan	inf																								
6	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	0	78.300.000	6	38.500.000		0		0	6	38.500.000	inf	49,17	6	38.500.000	inf	inf	DPMD																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf																								
Predikat Kinerja																							-	-																								
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	64.000.000	0		0	0	0	0	0		nan	0,00	0	0	nan	nan																								
7	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	50	39.000.000	0		0		0	0	0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPMD																							
8	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	50	25.000.000	0		0		0	0	0		0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPMD																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																								
Predikat Kinerja																							-	-																								
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	656.716.000	0	332.800.000	0	0	0	0	0	332.800.000	nan	50,68	0	332.800.000	nan	inf																								
9	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	10.200.000	2	2.500.000		0		0	2	2.500.000	inf	24,51	2	2.500.000	inf	inf	DPMD																							
10	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	29.436.000	0		0		0	0	0		nan	0,00	0	0	nan	nan	DPMD																							
11	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	50.000.000	5	25.000.000		0		0	5	25.000.000	inf	50,00	5	25.000.000	inf	inf	DPMD																							
12	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	45.000.000	5	20.000.000		0		0	5	20.000.000	inf	44,44	5	20.000.000	inf	inf	DPMD																							
13	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	22.080.000	5	6.800.000		0		0	5	6.800.000	inf	30,80	5	6.800.000	inf	inf	DPMD																							
14	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	500.000.000	5	278.500.000		0		0	5	278.500.000	inf	55,70	5	278.500.000	inf	inf	DPMD																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																								
Predikat Kinerja																							-	-																								
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	25.000.000	0		0	0	0	0	0		nan	0,00	0	0	nan	nan																								
15	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	0	15.000.000	0		0		0	0	0		nan	0,00	0	0	nan	nan	DPMD																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
16	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPMD				
17	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DPMD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.251.014.155	0	563.150.000	0	0	0	0	0	563.150.000	nan	45,02	0	563.150.000	nan	inf			
18	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0	2.500.000	5	500.000	0	0	0	5	500.000	inf	20,00	5	500.000	inf	inf	DPMD			
19	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	0	229.343.000	5	77.650.000	0	0	0	5	77.650.000	inf	33,86	5	77.650.000	inf	inf	DPMD			
20	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	1.019.171.155	6	485.000.000	0	0	0	6	485.000.000	50,00	47,59	6	485.000.000	inf	inf	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	205.850.000	0	60.500.000	0	0	0	0	0	60.500.000	nan	29,39	0	60.500.000	nan	inf			
21	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1	26.000.000	1	10.000.000	0	0	0	1	10.000.000	100,00	38,46	1	10.000.000	inf	inf	DPMD			
22	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	159.850.000	4	48.000.000	0	0	0	4	48.000.000	100,00	30,03	4	48.000.000	inf	inf	DPMD			
23	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	10.000.000	2	2.500.000	0	0	0	2	2.500.000	inf	25,00	2	2.500.000	inf	inf	DPMD			
24	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DPMD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan				
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan				
1	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Dokumen		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DPMD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan								
Predikat Kinerja																						-	-								
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-		0		0	0	1.304.887.000		380.000.000		0	0	0	0	380.000.000	nan	29,12	0	380.000.000	nan	inf							
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	1.304.887.000	0	380.000.000	0	0	0	0	0	380.000.000	nan	29,12	0	380.000.000	nan	inf							
1	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		0		0	2	154.887.000	1	75.000.000		0	0	0	1	75.000.000	50,00	48,42	1	75.000.000	inf	inf	DPMD						
2	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen		0		0	7	1.000.000.000	2	280.000.000		0	0	0	2	280.000.000	28,57	28,00	2	280.000.000	inf	inf	DPMD						
3	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		0		0	5	150.000.000	1	25.000.000		0	0	0	1	25.000.000	20,00	16,67	1	25.000.000	inf	inf	DPMD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf								
Predikat Kinerja																						-	-								
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-		0		0	0	953.910.000		320.700.000		0	0	0	0	320.700.000	nan	33,62	0	320.700.000	nan	inf							
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	0	0	0	0	0	953.910.000	0	320.700.000	0	0	0	0	0	320.700.000	nan	33,62	0	320.700.000	nan	inf							
1	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen		0		0	1	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPMD						
2	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		0		0	14	30.000.000	2	2.700.000		0	0	0	2	2.700.000	14,29	9,00	2	2.700.000	inf	inf	DPMD						
3	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		0		0	4	30.000.000	2	3.000.000		0	0	0	2	3.000.000	50,00	10,00	2	3.000.000	inf	inf	DPMD						
4	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		0		0	6	600.000.000	2	185.000.000		0	0	0	2	185.000.000	33,33	30,83	2	185.000.000	inf	inf	DPMD						
5	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang		0		0	55	50.000.000	30	35.000.000		0	0	0	30	35.000.000	54,55	70,00	30	35.000.000	inf	inf	DPMD						
6	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang		0		0	55	50.000.000	30	35.000.000		0	0	0	30	35.000.000	54,55	70,00	30	35.000.000	inf	inf	DPMD						
7	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan	Dokumen		0		0	5	163.910.000	2	60.000.000		0	0	0	2	60.000.000	40,00	36,61	2	60.000.000	inf	inf	DPMD						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp									K
			Lembaga Kerja Sama antar Desa																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan								
Predikat Kinerja																					-	-								
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	0		0	0	3.082.945.000		755.000.000	0	0	0	0	755.000.000	nan	24,49	0	755.000.000	nan	inf								
2.13.05.1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	3.082.945.000	0	755.000.000	0	0	0	0	755.000.000	nan	24,49	0	755.000.000	nan	inf								
1	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		0		0	7	52.945.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	28,57	37,78	2	20.000.000	inf	inf	DPMD					
2	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		0		0	19	420.000.000	8	157.000.000		0	0	0	8	157.000.000	42,11	37,38	8	157.000.000	inf	inf	DPMD					
3	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		0		0	125	500.000.000	20	45.000.000		0	0	0	20	45.000.000	16,00	9,00	20	45.000.000	inf	inf	DPMD					
4	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		0		0	14	300.000.000	5	78.500.000		0	0	0	5	78.500.000	35,71	26,17	5	78.500.000	inf	inf	DPMD					
5	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		0		0	4	400.000.000	2	100.000.000		0	0	0	2	100.000.000	50,00	25,00	2	100.000.000	inf	inf	DPMD					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp	K	Rp																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp																
6	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		0		0	1	50.000.000	1	49.500.000	0	0	0	1	49.500.000	100,00	99,00	1	49.500.000	inf	inf	DPMD																				
7	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan		0		0	19	1.350.000.000	6	300.000.000	0	0	0	6	300.000.000	31,58	22,22	6	300.000.000	inf	inf	DPMD																				
8	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		0		0	19	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DPMD																				
9	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		0		0	27	5.000.000	20	5.000.000	0	0	0	20	5.000.000	74,07	100,00	20	5.000.000	inf	inf	DPMD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp			K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			50.708.587.793		22.210.914.838		11.527.023.152		1.552.757.521	0	0	0		1.552.757.521		13,47		23.763.672.359		46,86						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan						
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.708.587.793		22.210.914.838		11.527.023.152		1.552.757.521	0	0	0		1.552.757.521		13,47		23.763.672.359		46,86						
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			50.708.587.793		22.210.914.838		11.527.023.152		1.552.757.521	0	0	0		1.552.757.521		13,47		23.763.672.359		46,86						
2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	42.344.595.793	100	18.747.220.622	0	9.705.067.152	25	1.525.889.521	0	0	0	25	1.525.889.521	inf	15,72	125	20.273.110.143	inf	47,88			-			
2.12.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	1.940.625.000	100	942.835.818	0	493.859.500	25	4.228.000	0	0	0	25	4.228.000	inf	0,86	125	947.063.818	125,00	48,80			-	-	
1	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	1.047.425.000	15	399.581.911	3	223.396.500	2	2.148.000	0	0	0	2	2.148.000	66,67	0,96	17	401.729.911	113,33	38,35	DINAS DUKCAPIL	Senantiasa berupaya meningkatkan kualitas personil ditengah keterbatasan kuantitas	Kurangnya kuantitas personil untuk menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun pada waktu yang hampir bersamaan	Koordinasi yang cukup baik di internal dinas, sehingga dokumen perencanaan dan penganggaran tetap bisa diselesaikan dengan baik	
2	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	438.200.000	13	392.986.367	4	134.509.000	3	0	0	0	3	0	75,00	0,00	16	392.986.367	80,00	89,68	DINAS DUKCAPIL	Senantiasa berupaya meningkatkan kualitas personil ditengah keterbatasan kuantitas	Kurangnya kuantitas personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan dinas pada waktu yang hampir bersamaan	Koordinasi yang cukup baik di internal dinas, sehingga penyusunan laporan dinas tetap bisa diselesaikan dengan baik		
3	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	455.000.000	11	150.267.540	2	135.954.000	0	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000	0,00	1,53	11	152.347.540	110,00	33,48	DINAS DUKCAPIL	-	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						101,11	53,84					
Predikat Kinerja																						ST	R					
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	26.195.197.522	100	12.197.078.853	0	5.335.277.252	25	1.157.150.416	0	0	0	0	25	1.157.150.416	inf	21,69	125	13.354.229.269	125,00	50,98			-	
4	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	279	25.850.197.522	99	11.847.911.203	58	4.881.984.152	31	1.123.120.416	0	0	0	31	1.123.120.416	53,45	23,01	130	12.971.031.619	46,59	50,18	DINAS DUKCAPIL	-	-	-	
5	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	1755	254.841.500	1700	390.000.000	227	31.770.000	0	0	0	227	31.770.000	13,35	8,15	1982	286.611.500	inf	inf	DINAS DUKCAPIL	Secara berkesinambungan mengingatkan ke seluruh unit kerja untuk mematuhi aturan peng-SPJ-an agar meminimalisir kesalahan pelaporan keuangan	Masih adanya kekurangan kelengkapan dokumen pendukung SPJ	Koordinasi antar unit kerja lingkup dinas cukup baik, sehingga kekurangan dokumen SPJ setelah verifikasi awal dapat dipenuhi	
6	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	65	345.000.000	37	94.326.150	13	63.293.100	0	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000	0,00	3,57	37	96.586.150	56,92	28,00	DINAS DUKCAPIL	-	-	-	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	300.000.000	100	203.877.602	0	118.744.000	25	6.340.240	0	0	0	0	25	6.340.240	inf	5,34	125	210.217.842	125,00	70,07	-	-	-	
7	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	35	230.000.000	15	107.429.820	7	101.945.000	1	5.037.240	0	0	0	1	5.037.240	14,29	4,94	16	112.467.060	45,71	48,90	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah sesuai aturan dan kebijakan pengadaan barang jasa	
8	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	70.000.000	6	96.447.782	1	16.799.000	1	1.303.000	0	0	0	1	1.303.000	100,00	7,76	7	97.750.782	140,00	139,64	DINAS DUKCAPIL	berkoordinasi dengan OPD Pengampu yaitu BPKAD	-	pembaharuan sistem penatausahaan aset menyebabkan ketidak cocokan nilai aset dengan yang seharusnya sehingga mempengaruhi penyusunan laporan aset dan laporan keuangan dinas	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						23,21	23,57					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	373.500.000	100	173.664.152	0	345.762.000	25		0	0	0	0	25		inf	0,00	125	173.664.152	125,00	46,50	-	-	-	
9	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	297	373.500.000	75	103.116.000	59	84.000.000	0		0	0	0	0	0		0,00	0,00	75	103.116.000	25,25	27,61	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
10	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	98	70.548.152	60	261.762.000	0		0	0	0	0	0		0,00	0,00	98	70.548.152	inf	inf	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	3.935.000.000	100	1.401.963.944	0	1.178.519.175	25	179.544.360	0	0	0	0	25	179.544.360	inf	15,23	125	1.581.508.304	125,00	40,19	-	-	-	
11	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	58	150.000.000	23	54.856.400	12	45.000.000	0		0	0	0	0	0		0,00	0,00	23	54.856.400	39,66	36,57	DINAS DUKCAPIL	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II	-	-
12	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	620.000.000	19	39.338.750	15	153.000.000	0		0	0	0	0	0		0,00	0,00	19	39.338.750	25,33	6,34	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
13	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	75.000.000	0		8	37.000.000	0		0	0	0	0	0		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
14	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1000	425.000.000	13	330.815.815	200	202.077.100	10	4.124.000	0	0	0	10	4.124.000	5,00	2,04	23	334.939.815	2,30	78,81	DINAS DUKCAPIL	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II	-	-	-
15	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	55	75.000.000	9	81.246.000	12	76.031.200	3	9.800.200	0	0	0	3	9.800.200	25,00	12,89	12	91.046.200	21,82	121,39	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
16	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	250.000.000	12	44.110.000	12	50.000.000	3	3.840.000	0	0	0	3	3.840.000	25,00	7,68	15	47.950.000	25,00	19,18	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	
17	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.920.000.000	44	851.596.979	12	485.410.875	3	141.780.160	0	0	0	3	141.780.160	25,00	29,21	47	993.377.139	78,33	51,74	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
18	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	7	420.000.000	0		2	130.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	50,00	15,38	1	20.000.000	14,29	4,76	DINAS DUKCAPIL	-	-	SDM Tenga IT yang kompeten	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					11,48	17,71							
Predikat Kinerja																					SR	SR							
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	1.321.433.916	100	665.774.030	0	281.433.916	25		0	0	0	0	25		0	inf	0,00	125	665.774.030	125,00	50,38	-	-	-	
19	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	68	480.000.000	1	30.000.000	10	95.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	1	30.000.000	1,47	6,25	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
20	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	841.433.916	6	635.774.030	2	186.433.916	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	6	635.774.030	40,00	75,56	DINAS DUKCAPIL	pada tahap perubahan anggaran akan dialihkan pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas pimpinan	anggaran pada pengadaan peralatan mesin diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan dinas jabatan yang akan dilaksanakan pada Triwula IV	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					2,07	4,09							
Predikat Kinerja																					SR	SR							
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	5.870.233.042	100	2.528.421.365	0	1.236.231.240	25	169.532.790	0	0	0	0	25	169.532.790	inf	13,71	125	2.697.954.155	125,00	45,96	-	-	-		
21	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2.320.765.125	3	659.113.488	12	486.202.500	3	59.123.091		0	0	0	3	59.123.091	25,00	12,16	6	718.236.579	120,00	30,95	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
22	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	3.549.467.917	31	1.869.307.877	12	750.028.740	3	110.409.699		0	0	0	3	110.409.699	25,00	14,72	34	1.979.717.576	45,33	55,78	DINAS DUKCAPIL	-	-	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					7,52	3,94							
Predikat Kinerja																					SR	SR							
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	2.408.606.313	100	633.604.858	0	715.240.069	25	9.093.715	0	0	0	0	25	9.093.715	inf	1,27	125	642.698.573	125,00	26,68	-	-	-		
23	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	1.213.350.000	22	231.206.266	7	304.320.000	1	6.593.715		0	0	0	1	6.593.715	14,29	2,17	23	237.799.981	54,76	19,60	DINAS DUKCAPIL	berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait	Rekendala pada sistem pemotongan pajak dan mekanisme pemotongan pajak yang baru	-	
24	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	45.256.313	69	79.500.000	12	93.390.000	3	2.500.000		0	0	0	3	2.500.000	25,00	2,68	72	82.000.000	150,00	181,19	DINAS DUKCAPIL	berkoordinasi dengan OPD dan Instansi terkait	Rekendala pada sistem pemotongan pajak dan mekanisme pemotongan pajak yang baru	-	
25	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.150.000.000	2	322.898.592	1	230.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	2	322.898.592	40,00	28,08	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
26	2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	15	87.530.069	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen		2.497.533.000	62,47	1.326.181.610	70	528.515.000	62,66	16.893.000		0	0	0	62,66	16.893.000	89,51	3,20	125,13	1.343.074.610	inf	53,78	-				
			Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Persen			99,55		98,5		98,74						98,74		100,76	198,29		inf		-					
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	persen	100	500.000.000	100	135.093.920	100	125.000.000	25	624.000	0	0	0	0	25	624.000	25,00	0,50	125	135.717.920	125,00	27,14	-	-	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
			Kab/Kota di Sumatera Barat																									
1	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapan	Dokumen	4	125.000.000	0		0	1	25.000.000	0	624.000	0	0	0	0	624.000	0,00	2,50	0	624.000	0,00	0,50	DINAS DUKCAPIL	Telah melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait efisiensi anggaran	Adanya efisiensi anggaran pada APBD pengeseran yang mengakibatkan pengurangan jumlah anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan aliran kas per belanja bergeser dari yang direncanakan sebelumnya	Perlu nya pembaharuan pedoman berupa kebijakan teknis pendaftaran penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan di Prov. Sumatera Barat yang sesuai dengan aturan yang berlaku
2	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	5	125.000.000	2	46.128.020	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	46.128.020	40,00	36,90	DINAS DUKCAPIL	Akan dilakukan rakor dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Adminduk pada Semester 2 Tahun 2025	belum optimalnya sosialisasi kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota dan masyarakat tentang pendaftaran penduduk nonpermanen	Peningkatan kualitas data kependudukan	
3	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	6	125.000.000	2	34.421.700	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	34.421.700	33,33	27,54	DINAS DUKCAPIL	Melakukan efisiensi anggaran Tahun 2025	Adanya efisiensi anggaran pada APBD pengeseran yang mengakibatkan pengurangan jumlah anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan aliran kas per belanja bergeser dari yang direncanakan sebelumnya	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	
4	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen	5	125.000.000	3	54.544.200	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	54.544.200	60,00	43,64	DINAS DUKCAPIL	Akan dilakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Adanya efisiensi anggaran pada APBD pengeseran yang mengakibatkan pengurangan jumlah anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan aliran kas per belanja bergeser dari yang direncanakan sebelumnya	Dibutuhkan data Peristiwa kependudukan oleh mitra OPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															33,33	27,14												
Predikat Kinerja															SR	SR												
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	persen	100	997.533.000	100	854.315.690	100	203.515.000	25	5.429.000	0	0	0	0	25	5.429.000	25,00	2,67	125	859.744.690	125,00	86,19	-	-	-	
5	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	20	309.533.000	13	692.698.490	1	63.515.000	0	4.805.000	0	0	0	0	4.805.000	0,00	7,57	13	697.503.490	65,00	225,34	DINAS DUKCAPIL	Berkolaborasi dengan Bidang lain/kegiatan lain yang melakukan kunjungan ke kab/kota dengan membawa blangko KTP-el	Kurangnya anggaran dalam pendistribusian blangko KTP-el ke kab/kota karena efisiensi anggaran	Meningkatnya perekaman dan kepemilikan KTP-el di Sumatera Barat	
6	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	250.000.000	81	63.961.600	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	81	63.961.600	1.620,00	25,58	DINAS DUKCAPIL	-	-	-		
7	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	5	125.000.000	30	19.305.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30	19.305.000	600,00	15,44	DINAS DUKCAPIL	-	-	-		
8	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Laporan	10	250.000.000	4	75.434.600	1	50.000.000	0	624.000	0	0	0	0	624.000	0,00	1,25	4	76.058.600	40,00	30,42	DINAS DUKCAPIL	Telah melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan terkait efisiensi anggaran	Adanya efisiensi anggaran pada APBD pengeseran yang mengakibatkan pengurangan jumlah	Peningkatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III		IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terkait Pendaftaran Penduduk																						anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan aliran kas per belanja bergeser dari yang direncanakan sebelumnya		
9	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	8	63.000.000	1	2.916.000	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.916.000	12,50	4,63	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					259,72	33,49					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	persen	100	1.000.000.000	100	336.772.000	100	200.000.000	25	10.840.000	0	0	0	0	25	10.840.000	25,00	5,42	125	347.612.000	125,00	34,76	-	-	-
10	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	95	500.000.000	39	255.840.000	1	100.000.000	0	10.840.000	0	0	0	0	10.840.000	0,00	10,84	39	266.680.000	41,05	53,34	DINAS DUKCAPIL	Telah melakukan koordinasi dan percepatan realisasi dengan bagian keuangan. Dan pencairan realisasi keuangan telah bisa dilakukan pada bulan Februari 2025	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk oleh Dinas Dukcapil Provinsi ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dilakukan secara berkala	
11	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	380	500.000.000	96	80.932.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	96	80.932.000	25,26	16,19	DINAS DUKCAPIL	Akan melakukan Bimbingan Teknis dengan pengurangan jumlah personil aparatur yang mengikuti Bimtek	Adanya efisiensi anggaran pada APBD pengeseran yang mengakibatkan pengurangan jumlah anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan aliran kas per belanja bergeser dari yang direncanakan sebelumnya	Bimbingan Teknis sangat dibutuhkan untuk peningkatan Kapabilitas Aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					6,03	6,32					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen		2.432.961.000	100	800.945.907	100	528.515.000	100	4.047.000	0	0	0	100	4.047.000	100,00	0,77	200	804.992.907	inf	33,09	-	-	-	
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen		98,62		97		98,53					98,53		101,58	197,15		inf			-	-	-		
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat	persen	100	513.272.000	100	156.621.900	100	125.000.000	25	1.300.000	0	0	0	0	25	1.300.000	25,00	1,04	125	157.921.900	125,00	30,77	-	-	-
1	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen	4	125.000.000	3	37.265.100	1	25.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	1,66	3	37.681.100	75,00	30,14	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilakukan rapat persiapan awal dan menyiapkan administrasi pendukung kegiatan serta data terkait penyelenggaraan pencatatan sipil	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II di bulan juni 2025	
2	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola	Dokumen	9	125.000.000	2	22.872.300	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	22.872.300	22,22	18,30	DINAS DUKCAPIL	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
			Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi																								
3	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Dokumen	77	125.000.000	3	43.689.700	1	25.000.000	0	468.000	0	0	0	0	468.000	0,00	1,87	3	44.157.700	3,90	35,33	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilakukan rapat persiapan awal dan menyiapkan administrasi pendukung kegiatan serta data kerjasama terkait penyelenggaraan pencatatan sipil	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan agustus 2025	
4	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	5	138.272.000	2	52.794.800	1	50.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	0,83	2	53.210.800	40,00	38,48	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilakukan rapat persiapan awal dan menyiapkan administrasi pendukung kegiatan serta data kepemilikan akta pada penyelenggaraan pencatatan sipil	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan juli 2025	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															35,28	30,56											
Predikat Kinerja															SR	SR											
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat	persen	100	919.689.000	100	338.782.298	100	203.515.000	25	1.915.000	0	0	0	0	25	1.915.000	25,00	0,94	125	340.697.298	125,00	37,04	-	-	-
5	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	14	376.689.000	9	124.347.504	1	88.515.000	0	468.000	0	0	0	0	468.000	0,00	0,53	9	124.815.504	64,29	33,13	DINAS DUKCAPIL	-	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan juli 2025	Sudah dilakukan rapat persiapan awal serta menyiapkan administrasi pendukung kegiatan
6	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	9	250.000.000	78	51.263.100	1	50.000.000	0	468.000	0	0	0	0	468.000	0,00	0,94	78	51.731.100	866,67	20,69	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilakukan rapat persiapan awal serta menyiapkan administrasi pendukung kegiatan	-	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan september 2025
7	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	4	100.000.000	58	49.857.100	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	58	49.857.100	1.450,00	49,86	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
8	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	10	125.000.000	4	98.845.194	1	25.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	1,66	4	99.261.194	40,00	79,41	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilakukan dilakukan rapat persiapan awal serta menyiapkan administrasi pendukung kegiatan	-	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II di bulan mei 2025
9	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	8	68.000.000	6	14.469.400	1	15.000.000	0	563.000	0	0	0	0	563.000	0,00	3,75	6	15.032.400	75,00	22,11	DINAS DUKCAPIL	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan mengadakan rapat persiapan awal internal bidang, dan sudah memberikan fasilitasi pelayanan kepada stakeholder/masyarakat Kab./Kota yang datang ke Provinsi	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah stakeholder/Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, dan Disdukcapil Kab./Kota yang melakukan koordinasi serta konsultasi terkait penyelenggaraan pencatatan sipil	Pelaksanaan kegiatan dimulai dari rentang bulan Februari s.d Agustus 2025
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															277,33	22,80											
Predikat Kinerja															ST	SR											
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat	persen	100	1.000.000.000	100	305.541.709	100	200.000.000	25	832.000	0	0	0	0	25	832.000	25,00	0,42	125	306.373.709	125,00	30,64	-	-	-
10	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	95	500.000.000	39	196.166.129	1	100.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	0,42	39	196.582.129	41,05	39,32	DINAS DUKCAPIL	Sudah dilaksankan rapat persiapan awal dan menyiapkan administrasi pendukung kegiatan serta menyiapkan data terkait pembinaan dan pengawasan layanan	-	Kegiatan pembinaan ke Kab./Kota dimulai pada Triwulan II di bulan April 2025 dan untuk pelaksanaan rapat evaluasi dengan Kab./Kota dilaksanakan pada bulan Juli 2025

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
11	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	190	500.000.000	121	109.375.580	1	100.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	0,42	121	109.791.580	63,68	21,96	DINAS DUKCAPIL	pencatatan sipil pada Disdukcapil 19 Kab./Kota Sudah dilakukan rapat persiapan awal serta menyiapkan administrasi pendukung kegiatan	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III di bulan Agustus 2025	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,52	5,57					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	inovasi		2.378.023.000	12	1.088.937.679	15	548.974.000	4	2.392.000	0	0	0	4	2.392.000	26,67	0,44	16	1.091.329.679	inf	45,89	-			
			Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	Persen			0,3		1,1		1,4					1,4	140,00		1,7		inf		-				
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persen	100	1.378.023.000	100	908.899.409	100	348.974.000	25	1.456.000	0	0	0	0	25	1.456.000	25,00	0,42	125	910.355.409	125,00	66,06	-	-	-
1	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	10	378.023.000	9	550.369.920	1	163.202.000	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0,00	0,32	9	550.889.920	90,00	145,73	DINAS DUKCAPIL	Mendorong Dinas Dukcapil Kab/Kota agar selalu menggunakan aplikasi pelayanan dukcapil secara online untuk pengurusan dan pengiriman dokumen kependudukan kepada masyarakat	Telah adanya aplikasi pelayanan dukcapil secara online untuk pengurusan dan pengiriman dokumen kependudukan kepada masyarakat	
2	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	15	125.000.000	101	41.036.670	1	40.772.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	1,02	101	41.452.670	673,33	33,16	DINAS DUKCAPIL	Dilaksanakan sesuai aliran kas d DPA	Kurangnya pemahaman OPD tentang pemanfaatan data kependudukan dan adanya efisiensi anggaran	Aliran kas pelaksanaan sosialisasi tidak ada di TW 1
3	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	40	125.000.000	15	12.701.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15	12.701.000	37,50	10,16	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
4	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	250.000.000	5	208.769.849	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	208.769.849	33,33	83,51	DINAS DUKCAPIL	-	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada semester II	-
5	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	95	375.000.000	29	96.021.970	1	75.000.000	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0,00	0,69	29	96.541.970	30,53	25,74	DINAS DUKCAPIL	Mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan dan pentingnya data balikan sebagai hasil dari pemanfaatan data kependudukan yang berguna untuk memperkaya data dukcapil dan membuat Surat Gubernur tentang Permintaan Data Balikan	Kurangnya pemahaman OPD tentang pemanfaatan data kependudukan	Mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan dan pentingnya data balikan sebagai hasil dari pemanfaatan data kependudukan yang berguna untuk memperkaya data dukcapil
6	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	30	125.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINAS DUKCAPIL	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					144,12	49,72					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan	Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan	persen	100	1.000.000.000	100	180.038.270	100	200.000.000	25	936.000	0	0	0	0	25	936.000	25,00	0,47	125	180.974.270	125,00	18,10	-	-	-

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi																									
7	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	95	500.000.000	35	135.817.270	1	100.000.000	0	416.000	0	0	0	0	416.000	0,00	0,42	35	136.233.270	36,84	27,25	DINAS DUKCAPIL	Rapat pembersihan data	Masih banyaknya data anomali dan data ganda yg belum ditindaklanjuti oleh kab kota	Membuat SK tm Pembersihan data ganda dan anomali, aplikasi sidandi S2	
8	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	600	500.000.000	60	44.221.000	120	100.000.000	0	520.000	0	0	0	0	520.000	0,00	0,52	60	44.741.000	10,00	8,95	DINAS DUKCAPIL	Dilaksanakan sesuai aliran kas d DPA	Adanya efisiensi anggaran	Aliran kas pelaksanaan bimtek tidak ada di TW 1	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				5,86	4,52							
Predikat Kinerja																				SR	SR							
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	jenis		1.055.475.000	2	247.629.020	2	215.952.000	1	3.536.000	0	0	0	1	3.536.000	50,00	1,64	3	251.165.020	inf	23,80					
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	persen	100	1.055.475.000	100	247.629.020	100	215.952.000	25	3.536.000	0	0	0	0	25	3.536.000	25,00	1,64	125	251.165.020	125,00	23,80	-	-	-	
1	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	10	450.000.000	6	116.292.180	2	90.000.000	1	3.068.000	0	0	0	1	3.068.000	50,00	3,41	7	119.360.180	70,00	26,52	DINAS DUKCAPIL	Menghubungi bagian/bidang terkait di Ditjen Dukcapil terkait rilis DKB dan melakukan koordinasi secara intens karena telah banyaknya permintaan data ke Dinas Dukcapil Provinsi dari OPD terkait data kependudukan tahun 2024	Pengolahan DKB Semester II Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan buku data agregat kependudukan juga terlambat dilaksanakan karena DKB Semester II Tahun 2024 baru keluar akhir Januari 2025 secara bertahap	Buku Data Kependudukan per semester dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan juga dibuat dalam bentuk e-book dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat khususnya Bidang PIAK dan PD sudah membuat inovasi Sibuk Data yang berisikan seluruh Buku Data Kependudukan dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alamat web http://app.disdukcapil.sumbaprov.go.id:82/bukudata/	
2	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	5	605.475.000	3	131.336.840	1	125.952.000	0	468.000	0	0	0	0	468.000	0,00	0,37	3	131.804.840	60,00	21,77	DINAS DUKCAPIL	Melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas kesehatan, sampai usulan Nama Tim Penyusunan Profil disampaikan	Lambatnya penyampaian nama Tim Penyusunan Profil dari OPD/Instansi Teknis Terkait khususnya dari Dinas Kesehatan Prov. Sumbang karena adanya pergantian nama tim penyusunan profil	Buku Data Kependudukan per semester dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan juga dibuat dalam bentuk e-book dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat khususnya Bidang PIAK dan PD sudah membuat inovasi Sibuk Data yang berisikan seluruh Buku Data Kependudukan dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alamat web http://app.disdukcapil.sumbaprov.go.id:82/bukudata/	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				65,00	24,15							
Predikat Kinerja																				R	SR							

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PERHUBUNGAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS PERHUBUNGAN				107.785.680.670		56.987.102.852		20.826.800.000		3.499.522.405	0	0	0	0		3.499.522.405		16,80		60.486.625.257		56,12				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				107.785.680.670		56.987.102.852		20.826.800.000		3.499.522.405	0	0	0	0		3.499.522.405		16,80		60.486.625.257		56,12				
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				107.785.680.670		56.987.102.852		20.826.800.000		3.499.522.405	0	0	0	0		3.499.522.405		16,80		60.486.625.257		56,12				
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		84.610.522.670	400	44.138.822.906	100	15.556.723.800	25	3.408.634.720	0	0	0	0	25	3.408.634.720	25,00	21,91	425	47.547.457.626	inf	56,20				
2.15.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	510	1.762.919.050	340	923.843.698	85	252.002.183	25	7.699.000	0	0	0	0	0	25	7.699.000	29,41	3,06	365	931.542.698	71,57	52,84			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
1	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31	600.000.000	20	367.298.361	6	58.138.300	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0,00	1,24	20	368.018.361	64,52	61,34	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
2	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	550.000.000	4	258.379.934	4	59.656.000	0	5.279.000	0	0	0	0	0	5.279.000	0,00	8,85	4	263.658.934	66,67	47,94	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
3	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	497.919.050	3	298.165.403	1	61.487.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	298.165.403	60,00	59,88	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor		
4	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2000	80.000.000	0	0	1200	43.693.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor		
5	2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	3	35.000.000	0	0	1	29.027.000	1	1.700.000	0	0	0	0	1	1.700.000	100,00	5,86	1	1.700.000	33,33	4,86	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							44,90	34,80				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
											I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%																										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
																					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K/Rp	K/Rp	K/Rp	K/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja																					SR		SR																					
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	600	53.425.503.620	400	36.330.738.173	100	10.694.061.733	25	2.367.269.479	0	0	0	0	25	2.367.269.479	25,00	22,14	425	38.698.007.652	70,83	72,43				Komitmen bagian keuangan dalam menyiapkan administrasi keuangan																
6	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	540	51.945.503.620	351	35.354.715.096	90	10.411.002.333	0	2.315.576.479		0	0	0	0	2.315.576.479	0,00	22,24	351	37.670.291.575	65,00	72,52	DISHUB			Gaji/TPP merupakan pembiayaan rutin setiap bulan untuk asn																
7	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	1.100.000.000	4	750.736.833	1	221.489.000	0	47.340.000		0	0	0	0	47.340.000	0,00	21,37	4	798.076.833	66,67	72,55	DISHUB			Pembayaran honorarium untuk pejabat pengelolaan keuangan secara rutin tiap bulan nya																
8	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	84	380.000.000	56	225.286.244	14	61.570.400	3	4.353.000		0	0	0	3	4.353.000	21,43	7,07	59	229.639.244	70,24	60,43	DISHUB			Komitmen bagian keuangan dalam menyiapkan laporan keuangan																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					25,24		25,69																					
Predikat Kinerja																					SR		SR																					
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	600	510.000.000	400	265.764.718	100	109.042.500	25		0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	425	265.764.718	70,83	52,11				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan															
9	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	200.000.000	4	123.552.286	1	70.002.500	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	123.552.286	66,67	61,78	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan																
10	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	310.000.000	4	142.212.432	2	39.040.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	142.212.432	66,67	45,87	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,33		10,77																					
Predikat Kinerja																					SR		SR																					
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	400	380.000.000	200	139.479.000	100	159.845.000	25	9.444.000	0	0	0	0	0	25	9.444.000	25,00	5,91	225	148.923.000	56,25	39,19				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan															
11	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	130.000.000	2	57.180.000	1	64.903.000	0	2.618.000		0	0	0	0	2.618.000	0,00	4,03	2	59.798.000	50,00	46,00	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan																
12	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	250.000.000	2	82.299.000	1	94.942.000	0	6.826.000		0	0	0	0	6.826.000	0,00	7,19	2	89.125.000	50,00	35,65	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IIJ																								target yang telah ditentukan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,33	6,80					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	600	1.000.000.000	400	343.845.386	100	432.076.000	15	600.000	0	0	0	0	15	600.000	15,00	0,14	415	344.445.386	69,17	34,44		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
13	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	400.000.000	1	186.316.000	2	113.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	186.316.000	16,67	46,58	DISHUB	Anggaran Subkegiatan 0 (nol) dikarenakan efisiensi anggaran di pergeseran		dalam melaksanakan kegiatan sesuai target
14	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	600.000.000	35	157.529.386	28	318.826.000	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0,00	0,19	35	158.129.386	48,61	26,35	DISHUB		dalam melaksanakan kegiatan sesuai target
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					4,66	5,21					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	600	6.202.100.000	600	3.683.877.993	100	826.689.085	25	388.540.544	0	0	0	0	25	388.540.544	25,00	47,00	625	4.072.418.537	104,17	65,66		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
15	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	240.000.000	4	175.800.000	1	40.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	175.800.000	66,67	73,25	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
16	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IIJ]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	150.000.000	4	67.980.000	1	12.895.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	67.980.000	66,67	45,32	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		
17	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	80.000.000	4	43.091.000	1	22.437.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	43.091.000	66,67	53,86	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		
18	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	171.900.000	4	70.189.260	1	31.932.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	70.189.260	66,67	40,83	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
19	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	200.000.000	4	40.900.000	1	50.689.485	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	40.900.000	66,67	20,45	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
20	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	180.000.000	4	80.109.200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	80.109.200	66,67	44,51	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K						Rp
		Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]																				dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor				
21	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	400.000.000	4	305.800.000	1	221.698.400	0	6.275.000	0	0	0	0	6.275.000	0,00	2,83	4	312.075.000	66,67	78,02	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
22	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	130.200.000	4	59.010.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	59.010.000	66,67	45,32	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor	
23	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	430.000.000	4	390.800.000	1	25.610.000	0	16.303.500	0	0	0	0	16.303.500	0,00	63,66	4	407.103.500	66,67	94,68	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
24	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	120.000.000	4	80.710.000	1	16.030.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0,00	18,71	4	83.710.000	66,67	69,76	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
25	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	1.800.000.000	1	686.437.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	686.437.000	50,00	38,14	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025	
26	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	2.300.000.000	4	1.683.051.533	1	404.631.000	0	362.962.044	0	0	0	0	362.962.044	0,00	89,70	4	2.046.013.577	66,67	88,96	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					30,13	26,66				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	600	2.120.000.000	400	180.700.000	100	275.359.080	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	180.700.000	66,67	8,52			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
27	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	600.000.000	1	180.700.000	1	80.348.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	180.700.000	20,00	30,12	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
28	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	180.000.000	0	0	1	2.565.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025	
29	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	0	0	1	6.246.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]																						pada DPA APBD 2025			
30	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	750.000.000	16	0	8	113.249.280	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	0	45,71	0,00	DISHUB	Anggaran Subkegiatan 0 (nol) dikarenakan efisiensi anggaran di pergeseran		
31	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	150.000.000	0	0	4	33.843.560	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		
32	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	240.000.000	0	0	5	39.106.440	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						2,05	0,94				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	600	17.120.000.000	400	1.093.925.861	100	2.310.437.219	25	592.466.274	0	0	0	0	0	25	592.466.274	25,00	25,64	425	1.686.392.135	70,83	9,85		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
		-	-	0		0		0		0		0	0	0	0			nan		0		nan			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
33	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	120.000.000	4	54.655.328	1	18.145.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	11,02	4	56.655.328	66,67	47,21	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
34	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	1.750.000.000	4	1.039.270.533	1	298.699.500	0	62.569.227	0	0	0	0	0	62.569.227	0,00	20,95	4	1.101.839.760	66,67	62,96	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
35	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	100.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025	
36	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	-	-	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025	
37	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	15.000.000.000	0	0	1	1.993.592.719	0	527.897.047	0	0	0	0	0	527.897.047	0,00	26,48	0	527.897.047	0,00	3,52	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																									kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		3,60	3,07								
Predikat Kinerja																		SR	SR								
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	600	2.090.000.000	400	1.176.648.077	80	497.211.000	0	42.615.423	0	0	0	0	0	42.615.423	0,00	8,57	400	1.219.263.500	66,67	58,34		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
38	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	800.000.000	49	576.045.477	24	134.991.000	9	38.215.423	0	0	0	0	9	38.215.423	37,50	28,31	58	614.260.900	64,44	76,78	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
39	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	79	290.000.000	39	147.900.000	15	38.130.000	7	4.400.000	0	0	0	0	7	4.400.000	46,67	11,54	46	152.300.000	58,23	52,52	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
40	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	1.000.000.000	3	452.702.600	2	324.090.000	1	0	0	0	0	1	0	50,00	0,00	4	452.702.600	50,00	45,27	DISHUB	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
41	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan								
Predikat Kinerja																		-	-								
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen		19.641.458.000	8,9	11.070.801.946	2,45	3.798.898.200	0	87.512.685	0	0	0	0	0	87.512.685	0,00	2,30	8,9	11.158.314.631	inf	56,81			
			Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	Persen			174,6		43,65		0					0		0,00		174,6		inf					
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan Provinsi	Dokumen	2	910.000.000	1		0	2	930.520.500	0	1.340.000	0	0	0	0	1.340.000	0,00	0,14	1	1.340.000	50,00	0,15		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
1	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	550.000.000	0		0	1	867.132.500	0	1.340.000	0	0	0	0	1.340.000	0,00	0,15	0	1.340.000	0,00	0,24	DISHUB	Efisiensi Anggaran	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
2	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	1	360.000.000	0		0	1	63.388.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUB	Efisiensi anggaran	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,12								
Predikat Kinerja																		SR	SR								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persen	145	6.200.000.000	89.3	3.261.216.646	27	987.000.000	0	465.000	0	0	0	0	465.000	0,00	0,05	89.3	3.261.681.646	61,59	52,61			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
3	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor	
4	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	590	5.000.000.000	233	2.547.490.829	82	787.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	233	2.547.490.829	39,49	50,95	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
5	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	325	1.200.000.000	177	713.725.817	330	200.000.000	0	465.000	0	0	0	0	465.000	0,00	0,23	177	714.190.817	54,46	59,52	DISHUB		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun	Persen	6	2.392.099.000	2	1.176.108.500	1	328.898.200	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,36	2	1.177.308.500	33,33	49,22			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
6	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2	132.099.000	2	132.099.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	2	132.099.000	100,00	100,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025	Target renstra sudah tercapai
7	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Unit	12	360.000.000	8	227.000.800	2	56.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	227.000.800	66,67	63,06	DISHUB	Anggaran Perjadin di pindahkan ke rakor	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
8	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Unit	18	420.000.000	12	290.188.700	3	67.596.300	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	1,07	12	290.908.700	66,67	69,26	DISHUB	Anggaran Perjadin di pindahkan ke rakor	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
9	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Orang	17	100.000.000	7	40.020.000	10	83.604.000	0	480.000	0	0	0	0	480.000	0,00	0,57	7	40.500.000	41,18	40,50	DISHUB	Anggaran Perjadin di pindahkan ke rakor	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
10	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya	Orang	29	150.000.000	4	30.000.000	10	66.979.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	30.000.000	13,79	20,00	DISHUB	Anggaran Perjadin di	Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV			(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12							(15) = 14/5 * 100%		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
		[Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.																				pindahkan ke rakor		kegiatan sesuai target yang telah ditentukan			
11	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	200.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025				
12	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	1	150.000.000	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025				
13	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I]	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5	380.000.000	2	197.800.000	2	21.356.840	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	197.800.000	40,00	52,05	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025				
14	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) [Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II]	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	9	500.000.000	4	259.000.000	2	33.072.060	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	259.000.000	44,44	51,80	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					26,62	28,33						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi	Dokumen	6	8.500.000.000	4	5.700.147.000	2	922.826.000	0	73.679.600	0	0	0	0	0	73.679.600	0,00	7,98	4	5.773.826.600	66,67	67,93		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan		
15	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	6	6.000.000.000	4	3.890.187.000	1	880.807.500	0	71.209.600	0	0	0	0	0	71.209.600	0,00	8,08	4	3.961.396.600	66,67	66,02	DISHUB	Anggaran Perjadin di pindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
16	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6	2.500.000.000	4	1.809.960.000	1	42.018.500	0	2.470.000	0	0	0	0	0	2.470.000	0,00	5,88	4	1.812.430.000	66,67	72,50	DISHUB	Anggaran Perjadin di pindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,33	8,66						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan	Rekomendasi	24	200.000.000	11	140.280.000	75	80.000.000	0	1.111.000	0	0	0	0	0	1.111.000	0,00	1,39	11	141.391.000	45,83	70,70				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
17	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	6	200.000.000	4	140.280.000	1	80.000.000	0	1.111.000					1.111.000	0,00	1,39	4	141.391.000	66,67	70,70	DISHUB	Anggaran Perjadi di pindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						3,92	4,16					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan	Dokumen	6	916.090.000	4	462.679.000	3	283.786.000	0	9.207.085	0	0	0	0	9.207.085	0,00	3,24	4	471.886.085	66,67	51,51					
18	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	6	580.000.000	4	331.000.000	1	116.336.000	0	9.207.085		0	0	0	9.207.085	0,00	7,91	4	340.207.085	66,67	58,66	DISHUB	Anggaran Perjadi di pindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
19	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	4	198.000.000	2	70.890.000	1	120.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	70.890.000	50,00	35,80	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025			
20	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	138.090.000	1	60.789.000	1	47.450.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	60.789.000	25,00	44,02	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						7,08	6,92					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	6	453.000.000	4	298.160.000	1	190.867.500	0	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00	0,13	4	298.415.000	66,67	65,88				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
21	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	6	453.000.000	4	298.160.000	1	190.867.500	0	255.000		0	0	0	255.000	0,00	0,13	4	298.415.000	66,67	65,88	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						3,17	3,14					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	6	70.269.000	4	32.210.800	1	75.000.000	0	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00	0,34	4	32.465.800	66,67	46,20				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
22	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	3630	70.269.000	1320	32.210.800	600	75.000.000	96	255.000		0	0	0	255.000	16,00	0,34	1416	32.465.800	39,01	46,20	DISHUB			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						1,77	2,10					
Predikat Kinerja																						SR	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi		3.013.700.000	4	1.456.858.000	55	1.255.236.000	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0,00	0,19	4	1.459.258.000	inf	48,42				
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase tertibnya perizinan angkutan laut	Persen	600	459.800.000	400	190.870.000	100	150.000.000	0	1.920.000	0	0	0	0	1.920.000	0,00	1,28	400	192.790.000	66,67	41,93				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
1	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	6	459.800.000	4	190.870.000	1	150.000.000	0	1.920.000	0	0	0	0	1.920.000	0,00	1,28	4	192.790.000	66,67	41,93	DISHUB	perjalanan dinas dipindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						66,67	41,93				
Predikat Kinerja																						S	SR				
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana	Persen	600	473.900.000	400	210.800.000	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	210.800.000	66,67	44,48				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
2	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	473.900.000	4	210.800.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	210.800.000	66,67	44,48	DISHUB	perjalanan dinas dipindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						33,33	22,24				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	6	1.921.800.000	4	923.098.000	2	955.236.000	0	480.000	0	0	0	0	480.000	0,00	0,05	4	923.578.000	66,67	48,06				Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan
3	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	2	1.600.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	800.000.000	50,00	50,00	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor		
4	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	6	321.800.000	3	123.098.000	1	155.236.000	0	480.000	0	0	0	0	480.000	0,00	0,31	3	123.578.000	50,00	38,40	DISHUB	perjalanan dinas		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam penyusunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp				
																				dipindahkan ke rakor		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai target yang telah ditentukan					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		25,00	22,10								
Predikat Kinerja																		SR	SR								
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	24	158.200.000	16	132.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	16	132.090.000	66,67	83,50	Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor			
5	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	158.200.000	4	132.090.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	4	132.090.000	80,00	83,50	DISHUB	sub Kegiatan dan Anggaran tidak terdapat pada DPA APBD 2025 dikarenakan dialihkan ke sub kegiatan Rakor		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		16,00	16,70								
Predikat Kinerja																		SR	SR								
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen		520.000.000	4	320.620.000	1	215.942.000	0	975.000	0	0	0	0	975.000	0,00	0,45	4	321.595.000	inf	61,85				
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Provinsi	Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Provinsi	Usulan	6	520.000.000	4	320.620.000	1	215.942.000	0	975.000	0	0	0	0	975.000	0,00	0,45	4	321.595.000	66,67	61,85			Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	
1	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	6	221.900.000	4	121.900.000	1	85.106.800	0	720.000	0	0	0	0	720.000	0,00	0,85	4	122.620.000	66,67	55,26	DISHUB	perjalanan dinas dipindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
2	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapiian pada Jaringan Jalur Perkeretaapiian Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	298.100.000	4	198.720.000	1	130.835.200	0	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00	0,19	4	198.975.000	66,67	66,75	DISHUB	perjalanan dinas dipindahkan ke rakor		Komitmen bidang/sekre/UPTD dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		66,67	61,00								
Predikat Kinerja																		S	R								

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
												I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				345.926.244.068		245.858.845.491		41.862.084.000		4.994.036.603		0	0	0		4.994.036.603		11,93		250.852.882.094		72,52			
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan			
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				345.926.244.068		245.858.845.491		41.862.084.000		4.994.036.603		0	0	0		4.994.036.603		11,93		250.852.882.094		72,52			
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				316.090.539.638		239.573.633.253		40.204.084.000		4.981.340.603		0	0	0		4.981.340.603		12,39		244.554.973.856		77,37			
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	indeks		83.771.227.333	283.42	72.569.208.992	BB	19.531.838.079	0	3.294.979.285		0	0	0	0	3.294.979.285	nan	16,87	283.42	75.864.188.277	inf	90,56			
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen			400		100		0						0		0,00		400		inf				
			Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	persen			260.65		88		0						0		0,00		260.65		inf				
2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	persen	600	1.857.525.150	400	499.870.060	100	464.579.200	25		0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	425	499.870.060	70,83	26,91		
1	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.376.525.150	8	368.637.610	8	301.251.200	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	368.637.610	66,67	26,78	DISKOMINFOTIK	
2	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	306.000.000	8	33.516.800	7	30.444.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	33.516.800	66,67	10,95	DISKOMINFOTIK	
3	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	175.000.000	4	97.715.650	12	107.884.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	97.715.650	66,67	55,84	DISKOMINFOTIK	
4	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0		0		0	4	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK
5	2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK	
6	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK	
7	2.16.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK	
8	2.16.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam	Berita Acara	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																							
9	2.16.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen	600	47.605.904.203	400	48.103.505.780	100	10.974.933.100	25	2.304.472.784	0	0	0	0	25	2.304.472.784	25,00	21,00	425	50.407.978.564	70,83	105,89		
10	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	510	43.993.904.203	340	46.081.093.266	70	10.447.584.000	17,5	2.266.532.784	0	0	0	0	17,5	2.266.532.784	25,00	21,69	357,5	48.347.626.050	70,10	109,90	DISKOMINFOTIK	
11	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	3.192.000.300	48	1.892.138.014	12	467.349.100	3	37.940.000	0	0	0	3	37.940.000	25,00	8,12	51	1.930.078.014	70,83	60,47	DISKOMINFOTIK		
12	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	102	419.999.700	68	130.274.500	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	68	130.274.500	66,67	31,02	DISKOMINFOTIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					17,30	16,78				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	persen	600	2.198.650.000	400	794.601.267	100	197.630.000	25	45.880.000	0	0	0	0	25	45.880.000	25,00	23,22	425	840.481.267	70,83	38,23		
13	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	835.000.000	8	644.455.752	1	167.630.000	1	45.880.000	0	0	0	1	45.880.000	100,00	27,37	9	690.335.752	75,00	82,67	DISKOMINFOTIK		
14	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	1.363.650.000	4	150.145.515	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	150.145.515	66,67	11,01	DISKOMINFOTIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,12	6,69				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	600	1.318.930.000	400	838.299.845	100	431.000.000	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	425	838.299.845	70,83	63,56		
15	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	450	258.930.000	300	362.180.000	150	112.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	300	362.180.000	66,67	139,88	DISKOMINFOTIK		
16	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	4	23.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK		
17	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1.060.000.000	1	476.119.845	10	295.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	476.119.845	100,00	44,92	DISKOMINFOTIK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	600	8.442.754.700	391,24	10.971.633.188	100	3.772.593.949	25	546.072.182	0	0	0	0	25	546.072.182	25,00	14,47	416,24	11.517.705.370	69,37	136,42		
18	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	354.854.000	48	99.896.550	12	25.000.000	3	350.000	0	0	0	3	350.000	25,00	1,40	51	100.246.550	70,83	28,25	DISKOMINFOTIK		
19	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	72	1.963.578.800	48	1.266.666.810	12	178.760.680	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	1.266.666.810	66,67	64,51	DISKOMINFOTIK		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Disediakan																								
20	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	1.116.323.800	48	265.392.100	12	45.000.000	3	5.500.000	0	0	0	3	5.500.000	25,00	12,22	51	270.892.100	70,83	24,27	DISKOMINFOTIK			
21	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	408.000.000	48	169.125.550	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	169.125.550	66,67	41,45	DISKOMINFOTIK				
22	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	350.000.000	48	124.080.000	1	22.860.000	1	2.420.000	0	0	0	1	2.420.000	100,00	10,59	49	126.500.000	68,06	36,14	DISKOMINFOTIK			
23	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	4.249.998.100	48	9.046.472.178	12	2.051.723.269	3	195.041.182	0	0	0	3	195.041.182	25,00	9,51	51	9.241.513.360	70,83	217,45	DISKOMINFOTIK			
24	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	0	1	0	12	1.419.250.000	3	342.761.000	0	0	0	3	342.761.000	25,00	24,15	4	342.761.000	200,00	inf	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					25,58	inf					
Predikat Kinerja																					SR	-					
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen	600	7.077.698.150	316,67	1.306.446.815	100	1.095.507.700	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	341,67	1.306.446.815	56,95	18,46			
25	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	3.456.400.000	0	133.322.700	1	642.704.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	133.322.700	0,00	3,86	DISKOMINFOTIK				
26	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	42	1.416.049.050	19	1.092.248.590	1	253.803.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	1.092.248.590	45,24	77,13	DISKOMINFOTIK				
27	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	10	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK				
28	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	42	2.205.249.100	19	80.875.525	1	183.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	80.875.525	45,24	3,67	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	600	8.041.029.830	400	7.457.625.502	100	2.084.604.130	25	367.989.719	0	0	0	0	25	367.989.719	25,00	17,65	425	7.825.615.221	70,83	97,32			
29	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4800	67.410.615	3200	36.959.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3200	36.959.000	66,67	54,83	DISKOMINFOTIK				
30	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216	2.999.999.500	144	2.991.802.331	12	993.000.000	3	148.767.331	0	0	0	3	148.767.331	25,00	14,98	147	3.140.569.662	68,06	104,69	DISKOMINFOTIK			
31	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	4.973.619.715	12	4.428.864.171	12	1.086.604.130	3	219.222.388	0	0	0	3	219.222.388	25,00	20,18	15	4.648.086.559	83,33	93,45	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					7,03	8,16					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	persen	600	7.228.735.300	400	2.597.226.535	100	510.990.000	25	30.564.600	0	0	0	0	25	30.564.600	25,00	5,98	425	2.627.791.135	70,83	36,35			
32	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54	1.649.340.000	36	939.968.908	14	205.240.000	3	13.462.000	0	0	0	3	13.462.000	21,43	6,56	39	953.430.908	72,22	57,81	DISKOMINFOTIK			
33	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	567.780.000	16	276.887.123	10	105.750.000	2	17.102.600	0	0	0	2	17.102.600	20,00	16,17	18	293.989.723	75,00	51,78	DISKOMINFOTIK			
34	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6	5.011.615.300	4	1.380.370.504	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	1.380.370.504	66,67	27,54	DISKOMINFOTIK				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																								
35	2.16.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	1	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	nan	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					6,11	nan					
Predikat Kinerja																					SR	-					
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	persen		104.531.429.110	98.09	90.441.651.763	40	9.377.118.000	0	1.686.361.318	0	0	0	0	1.686.361.318	0,00	17,98	98.09	92.128.013.081	inf	88,13				
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan program strategis pemerintah	persen	150	104.531.429.110	98.09	90.441.651.763	40	9.377.118.000	0	1.686.361.318	0	0	0	0	1.686.361.318	0,00	17,98	98.09	92.128.013.081	65,39	88,13				
1	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	6	8.083.111.744	4	321.803.450	1	250.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	2,00	4	326.803.450	66,67	4,04	DISKOMINFOTIK			
2	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	6	4.337.627.000	4	6.125.014.199	750	490.500.000	187	44.700.000	0	0	0	187	44.700.000	24,93	9,11	191	6.169.714.199	3.183,33	142,24	DISKOMINFOTIK			
3	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	1800	5.486.445.750	1200	758.609.070	200	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1200	758.609.070	66,67	13,83	DISKOMINFOTIK				
4	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	0	0	0	0	10	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK				
5	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	0	0	0	0	40	450.000.000	0	8.780.900	0	0	0	0	8.780.900	0,00	1,95	0	8.780.900	nan	inf	DISKOMINFOTIK			
6	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	1	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK				
7	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	6	24.747.106.396	4	15.371.934.007	1	1.636.618.000	1	203.475.418	0	0	0	1	203.475.418	100,00	12,43	5	15.575.409.425	83,33	62,94	DISKOMINFOTIK			
8	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	6	3.154.345.750	4	592.710.810	50	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	592.710.810	66,67	18,79	DISKOMINFOTIK				
9	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pemohonan	6	4.242.149.050	4	1.287.035.751	50	300.000.000	10	0	0	0	0	10	0	20,00	0,00	14	1.287.035.751	233,33	30,34	DISKOMINFOTIK			
10	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	3.173.465.000	8	423.790.763	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	423.790.763	66,67	13,35	DISKOMINFOTIK				
11	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	6	51.307.178.420	4	65.560.753.713	66	5.300.000.000	11	1.424.405.000	0	0	0	11	1.424.405.000	16,67	26,88	15	66.985.158.713	250,00	130,56	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (skala 1-5)	indeks		127.787.883.195	13.9	76.562.772.498	3,5	11.295.127.921	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.9	76.562.772.498	inf	59,91					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo	OPD	306	744.437.000	204	232.381.450	47	81.181.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	204	232.381.450	66,67	31,22				
1	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	6	744.437.000	4	232.381.450	1	81.181.000	1		0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	5	232.381.450	83,33	31,22	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						83,33	31,22					
Predikat Kinerja																						T	SR					
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	20.1	127.043.446.195	13.9	76.330.391.048	3	11.213.946.921	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.9	76.330.391.048	69,15	60,08				
2	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1	11.535.052.160	1	5.168.677.038	0		0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	5.168.677.038	100,00	44,81	DISKOMINFOTIK			
3	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	12	3.466.500.000	8	218.825.876	10	29.005.100	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	218.825.876	66,67	6,31	DISKOMINFOTIK			
4	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	6	837.500.000	4	272.946.550	1	14.400.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	272.946.550	66,67	32,59	DISKOMINFOTIK			
5	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	0		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			
6	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	0		0		0	8	173.893.800	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			
7	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	unit	0		0	270.469.967	19	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	270.469.967	nan	inf	DISKOMINFOTIK			
8	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupate n/kota	0		0		0	19	295.078.752	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			
9	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			
10	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			
11	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat	Dokumen	0		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		nan	nan	DISKOMINFOTIK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah																										
12	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	0	0	0	0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK				
13	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	0	0	0	0	2	75.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISKOMINFOTIK			
14	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen	24	13.188.816.300	16	7.325.947.464	1	90.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	7.325.947.464	66,67	55,55	DISKOMINFOTIK				
15	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah		0	0	0	47	8.236.940.000	47		0	0	0	0	47	0	100,00	0,00	47	0	inf	nan	DISKOMINFOTIK				
16	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	0	0	0	0	4	45.350.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISKOMINFOTIK				
17	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1.245.000.000	1	31.530.453	0	0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	1	31.530.453	100,00	2,53	DISKOMINFOTIK				
18	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	12	19.754.277.735	8	4.737.555.771	1	804.279.269	1		0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	9	4.737.555.771	75,00	23,98	DISKOMINFOTIK				
19	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah	18	77.016.300.000	12	58.304.437.929	47	1.250.000.000	47		0	0	0	0	47	0	100,00	0,00	59	58.304.437.929	327,78	75,70	DISKOMINFOTIK				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													
Predikat Kinerja																						-	-						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				345.926.244.068		245.858.845.491		41.862.084.000		4.994.036.603	0	0	0		4.994.036.603		11,93		250.852.882.094		72,52						
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				17.118.460.960		3.113.799.047		875.000.000		12.696.000	0	0	0		12.696.000		1,45		3.126.495.047		18,26						
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen		17.118.460.960	235,27	3.113.799.047	90	875.000.000		12.696.000	0	0	0	0	12.696.000	0,00	1,45	235,27	3.126.495.047	inf	18,26						
2.20.02.1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	persen	450	17.118.460.960	229,32	3.113.799.047	90	875.000.000	0	12.696.000	0	0	0	0	12.696.000	0,00	1,45	229,32	3.126.495.047	50,96	18,26						
			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	450		235,27		90		0		0	0	0	0	0,00		235,27		52,28								
1	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	1200	5.786.061.410	800	1.465.694.199	150	325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	800	1.465.694.199	66,67	25,33	DISKOMINFOTIK					
2	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	0	0	0	0	100	200.000.000	25	12.696.000		0	0	0	25	12.696.000	25,00	6,35	25	12.696.000	inf	inf	DISKOMINFOTIK				
3	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi	Persentase	18	8.159.899.550	12	946.166.436	90	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	946.166.436	66,67	11,60	DISKOMINFOTIK					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
			Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
4	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	6	1.310.000.000	4	245.117.291	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	245.117.291	66,67	18,71	DISKOMINFOTIK			
5	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	6	1.862.500.000	4	456.821.121	47	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	456.821.121	66,67	24,53	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				345.926.244.068		245.858.845.491		41.862.084.000		4.994.036.603	0	0	0		4.994.036.603		11,93		250.852.882.094		72,52				
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				12.717.243.470		3.171.413.191		783.000.000		0	0	0	0		0		0,00		3.171.413.191		24,94				
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	persen		12.717.243.470	212,3	3.171.413.191	55	783.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	212,3	3.171.413.191	inf	24,94				
2.21.02.1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	301	10.604.864.400	212,3	2.801.348.469	55	683.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	212,3	2.801.348.469	70,53	26,42				
1	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapan	Dokumen	12	2.674.115.350	8	483.406.897	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	483.406.897	66,67	18,08	DISKOMINFOTIK			
2	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	6	2.860.968.400	4	623.241.223	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	623.241.223	66,67	21,78	DISKOMINFOTIK			
3	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	6	2.868.696.300	4	1.132.291.498	3	183.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	1.132.291.498	66,67	39,47	DISKOMINFOTIK			
4	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	210	2.201.084.350	140	562.408.851	47	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	140	562.408.851	66,67	25,55	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						66,67	26,22				
Predikat Kinerja																						S	SR				
2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD	480	2.112.379.070	320	370.064.722	47	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	320	370.064.722	66,67	17,52				
5	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	480	2.112.379.070	320	370.064.722	47	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	320	370.064.722	66,67	17,52	DISKOMINFOTIK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						13,33	3,50				
Predikat Kinerja																						SR	SR				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
								(1)	(2)	(3)	(4)									(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			191.997.269.890	112.911.400.602	48.501.329.000	2.921.895.859	0	0	0	0	2.921.895.859	6,02	115.833.296.461	60,33												
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan												
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan												
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			191.997.269.890	112.911.400.602	48.501.329.000	2.921.895.859	0	0	0	0	2.921.895.859	6,02	115.833.296.461	60,33												
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			191.997.269.890	112.911.400.602	48.501.329.000	2.921.895.859	0	0	0	0	2.921.895.859	6,02	115.833.296.461	60,33												
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	75.998.265.635	100	60.801.351.768	100	22.308.694.049	25	2.791.749.859	0	0	0	25	2.791.749.859	25,00	12,51	125	63.593.101.627	inf	83,68		Progam ini merupakan program penunjang terhadap pencapaian target kinerja OPD				
2.17.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	778.283.890	100	525.398.564	100	261.972.700	25	2.800.000	0	0	0	0	25	2.800.000	25,00	1,07	125	528.198.564	125,00	67,87	Adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah teriakit dengan efisiensi anggaran sementara target tidak dilakukan penyesuaian	Penyusunan Perencanaan (RKA, DPA, RKT) evaluasi kjerja dan laporan OPD (LAKIP, LPPD, LKPJ)		
1	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	382.000.000	24	208.976.252	6	114.522.600	6	2.800.000	0	0	0	0	6	2.800.000	100,00	2,44	30	211.776.252	100,00	55,44	DISKOP	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketepatan dalam penyusunan anggaran sering kali terburu buru diakibatkan aplikasi sering error	Penyiapan data penyusunan program dan kegiatan disiapkan lebih awal sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan lebih awal dari target yang ditetapkan
2	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	353.773.890	12	283.019.112	3	79.166.400	3	0	0	0	0	3	0	100,00	0,00	15	283.019.112	100,00	80,00	DISKOP	Kegiatan ini mendukung penyusunan laporan capaian kinnerja, IKM	Kurangnya data dalam penyusunan laporan dari bidang yang akan dikelola oleh Sekretariat	Penyiapan rekap data dalam penyusunan laporan	
3	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen Laporan	20	42.510.000	16	33.403.200	4	68.283.700	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	17	33.403.200	85,00	78,58	DISKOP	Penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seperti LAKIP, LPPD, LKPJ dan Realisasi Rencana Aksi	Masih minimnya pemahaman ASN terkait dengan evaluasi kjerja	Dilakukan rapat terkait dengan pelaksanaan penyusunan evaluasi kinnerja OPD pada masing masing bidang pada OPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															95,00	71,34												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
											I	II	III	IV																												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)															
																					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	ST	S				
Predikat Kinerja																																										
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	100	43.750.827.095	100	33.571.458.792	100	15.750.165.419	25	2.153.063.687	0	0	0	0	25	2.153.063.687	25,00	13,67	125	35.724.522.479	125,00	81,65		Menunjang kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	keterbatasan SDM dalam mengelola aplikasi	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan														
4	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	325	42.049.458.595	260	32.421.772.792	65	15.409.891.719	65	2.084.933.687		0	0	0	65	2.084.933.687	100,00	13,53	325	34.506.706.479	100,00	82,06	DISKOP	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	belum akurat data kepegawaian	Rekonsiliasi data kepegawaian														
5	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	1.592.138.000	8	1.128.052.000	2	318.427.600	2	68.130.000		0	0	0	2	68.130.000	100,00	21,40	10	1.196.182.000	100,00	75,13	DISKOP	Menunjang penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	keterbatasan personil dalam mengelola keuangan	pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD														
6	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	109.230.500	52	21.634.000	13	21.846.100	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	52	21.634.000	80,00	19,81	DISKOP	menunjang penyusunan laporan keuangan	tidak didukung oleh anggaran pada APBD	memaksimalkan kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					46,67	29,50																				
Predikat Kinerja																																										
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	233.450.500	100	145.500.000	100	49.415.100	25	36.375.000	0	0	0	0	25	36.375.000	25,00	73,61	125	181.875.000	125,00	77,91		Menunjang kegiatan pengamanan barang milik daerah	masih sedikitnya pengamanan barang milik daerah yang teranggarkan	terpeliharanya barang milik daerah dengan baik														
7	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	80	181.875.000	64	145.500.000	16	39.100.000	16	36.375.000		0	0	0	16	36.375.000	100,00	93,03	80	181.875.000	100,00	100,00	DISKOP	Menunjang kegiatan pengamanan barang milik daerah	masih sedikitnya pengamanan barang milik daerah yang teranggarkan	terpeliharanya barang milik daerah dengan baik														
8	2.17.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	26.575.500	0		2	5.315.100	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	menunjang dalam penyusunan laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	tidak ada dukungan anggaran	memaksimalkan kegiatan yang ada dalam penyusunan Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
9	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	25.000.000	0		2	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	menunjang dalam penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tidak adanya dukungan anggaran	memaksimalkan kegiatan yang ada dalam penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					11,11	11,11																				
Predikat Kinerja																																										
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.585.300.000	100	1.088.240.000	100	317.060.000	25		0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	125	1.088.240.000	125,00	68,65		menunjang Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kurangnya dukungan anggaran pada program ini	memaksimalkan pelaksanaan program sehingga dapat tercapai target kinerja OPD														
10	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	450.000.000	120	180.000.000	60	90.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120	180.000.000	40,00	40,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	belum tertampungnya anggaran untuk program ini	mendorong ASN menggunakan atribut dan pakaian dinas pengadaan sebelumnya														
11	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	465	1.135.300.000	372	908.240.000	93	227.060.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	372	908.240.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang meningkatkan kompetensi ASN	pengetahuan ASN yang masih rendah	Mengikutsertakan ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan baik														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III				IV	K	Rp	K						Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(17)	(18)	(19)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																						daring maupun luring dalam peningkatan pengetahuan			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,91	10,91						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	6.773.396.775	100	5.418.717.420	100	1.354.679.355	25	44.575.067	0	0	0	0	25	44.575.067	25,00	3,29	125	5.463.292.487	125,00	80,66		Menunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Minimnya anggaran sehingga ketercapaian atau tertib administrasi masih rendah	Melakukan efisiensi
12	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	155	311.791.000	124	249.432.800	31	62.358.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	124	249.432.800	80,00	80,00	DISKOP	menunjang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	adanya efisiensi anggaran sehingga belum optimalnya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mengotimalkan pemakaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
13	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	93.201.000	4	74.560.800	1	18.640.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	74.560.800	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Memaksimalkan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	
14	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	449.142.000	12	359.313.600	3	89.828.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	359.313.600	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengotimalkan pemakaian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
15	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	1.767.232.000	12	1.413.785.600	3	353.446.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	1.413.785.600	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengoptimalkan penggunaan Peralatan Rumah Tangga yang sudah ada	
16	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	283.755.500	8	227.004.400	2	56.751.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	227.004.400	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengotimalkan Bahan Logistik Kantor [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi] yang sudah ada	
17	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	1.058.293.000	28	846.634.400	7	211.658.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	28	846.634.400	93,33	80,00	DISKOP	Menunjang penyediaan bahan logistik	Minimnya anggaran sehingga ketersediaan bahan logistik belum mencukupi	perlu dilakukan optimalisasi terhadap anggaran yang telah tersedia	
18	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	102.000.500	12	81.600.400	3	20.400.100	1	765.000	0	0	0	1	765.000	33,33	3,75	13	82.365.400	86,67	80,75	DISKOP	Menunjang Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Minimnya anggaran untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	mendorong ASN untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan barang cetak dan penggandaan	
19	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	29.400.000	16	23.520.000	4	5.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	23.520.000	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	menggunakan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan baik melalui Sosmed, WAG, pencarian Google, dll	
20	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	2.653.581.775	400	2.122.865.420	100	530.716.355	5	43.810.067	0	0	0	5	43.810.067	5,00	8,25	405	2.166.675.487	81,00	81,65	DISKOP	Menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi baik daerah maupun pusat	masih minimnya anggaran, sehingga masih ada rapat yang belum bisa diikuti	melakukan efisiensi, melaksanakan rapat melalui zoom meeting	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
21	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	25.000.000	80	20.000.000	20	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	80	20.000.000	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Melakukan penatausahaan Arsip pada SKPD sesuai dengan aturan dan kode kearsipan yang dikeluarkan Badan Arsip Nasional dan Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					39,10	38,21						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	100	6.986.167.000	100	5.588.933.600	100	1.397.233.400	25		0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	125	5.588.933.600	125,00	80,00	Menunjang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Menggunakan dan mengotimalkan pemakaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
22	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	1.677.155.000	4	1.341.724.000	1	335.431.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	1.341.724.000	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengotimalkan penggunaan kendaraan dinas yang sudah ada
23	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	60	2.578.376.000	48	2.062.700.800	12	515.675.200	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	2.062.700.800	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengotimalkan penggunaan mebel yang sudah ada
24	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	180	2.730.636.000	144	2.184.508.800	36	546.127.200	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	144	2.184.508.800	80,00	80,00	DISKOP	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Anggaran tidak tertampung pada APBD	Mengotimalkan pemakaian peralatan dan mesin lainnya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,00	10,00						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	11.027.225.375	100	10.572.211.392	100	2.205.445.075	25	551.706.105	0	0	0	0	25	551.706.105	25,00	25,02	125	11.123.917.497	125,00	100,88	Menunjang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rendahnya anggaran pada APBD	Melakukan efisiensi	
25	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	50	11.661.915	40	9.329.532	10	2.332.383	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	9.329.532	80,00	80,00	DISKOP	menujag terhadap penyediaan jasa surat menyurat	rendahnya pendistribusian surat menyurat	menggunakan aplikasi SRIKANDI
26	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	2.263.408.000	4	1.810.726.400	1	452.681.600	0	148.190.861		0	0	0	0	148.190.861	0,00	32,74	4	1.958.917.261	80,00	86,55	DISKOP	menujang terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	masih rendahnya daya listrik sehingga diperlukan penambahan daya	melakukan efisiensi atau penghematan pemakaian listrik, air
27	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	190	8.752.155.460	152	8.752.155.460	38	1.750.431.092	9	403.515.244		0	0	0	9	403.515.244	23,68	23,05	161	9.155.670.704	84,74	104,61	DISKOP	menujang terhadap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	ketersediaan tenaga kebersihan, tenaga sopir, tenaga keamanan, tenaga pendamping
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,06	10,04						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	100	4.863.615.000	100	3.890.892.000	100	972.723.000	25	3.230.000	0	0	0	0	25	3.230.000	25,00	0,33	125	3.894.122.000	125,00	80,07	Menunjang pemeliharaan BMD	Masih banyak BMD yang belum dilakukan pemeliharaan	Melakukan pemeliharaan BMD sesuai dengan target yang ditetapkan	
28	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	654.450.000	48	523.560.000	12	130.890.000	3	3.230.000		0	0	0	3	3.230.000	25,00	2,47	51	526.790.000	85,00	80,49	DISKOP	menunjang pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kerusakan kendaraan cukup berat sehingga standar yang ditetapkan tidak mencukupi	melakukan optimalisasi dan pengecekan secara berkala terhadap kendaraan dinas
29	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	540	491.750.000	432	393.400.000	108	98.350.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	432	393.400.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	banyaknya peralatan dan mesin lainnya yang	mengoptimalkan anggaran dalam pelaksanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
											I	II	III	IV																														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																	
30	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	3.311.515.000	16	2.649.212.000	4	662.303.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	2.649.212.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor diperlukan rehab	melakukan rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
31	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	107.000.000	4	85.600.000	1	21.400.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	85.600.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran tidak ada pada APBD	mengoptimalkan pemakaian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
32	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	35.950.000	4	28.760.000	1	7.190.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	28.760.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran tidak ada pada APBD	mengoptimalkan pemakaian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
33	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	345	262.950.000	276	210.360.000	69	52.590.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	276	210.360.000	80,00	80,00	DISKOP	menunjang Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	banyaknya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi] yang dilakukan pemeliharaan	melakukan pemeliharaan seoptimal mungkin pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																			14,70	14,56								
Predikat Kinerja																																				SR	SR							
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persen		702.086.500	11,78	144.769.430	3,95	70.469.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,78	144.769.430	inf	20,62		kegiatan ini mendukung fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	koperasi	200	702.086.500	160	144.769.430	6	70.469.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	160	144.769.430	80,00	20,62		kegiatan ini mendukung fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(1) Perubahan Regulasi tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi (2) Syarat modal sendiri koperasi naik dari 15 jt menjadi 500 jt atau lebih (3) Dukungan dana pembinaan yang sangat terbatas,	Adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dari pusat Kemenkop RI berupa Permenkop UKM RI																
1	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	200	702.086.500	160	144.769.430	20	70.469.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	160	144.769.430	80,00	20,62	DISKOP	kegiatan ini mendukung fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	(1) Perubahan Regulasi tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi (2) Syarat modal sendiri koperasi naik dari 15 jt menjadi 500 jt atau lebih (3) Dukungan dana pembinaan yang sangat terbatas,	Adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dari pusat Kemenkop RI berupa Permenkop UKM RI																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				80,00	20,62							
Predikat Kinerja																																					T	SR						
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	Persen		1.755.735.000	100	1.404.588.000	67	351.147.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	1.404.588.000	inf	80,00		Menunjang pelaksanaan program koperasi yang menindaklanjuti																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
											I		II	III																		IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
																								rekomenisasi pengawasan																							
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	1.255.735.000	0	1.004.588.000	0	251.147.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	1.004.588.000	nan	80,00		Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	masih ada koperasi yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilaksanakan	mendorong koperasi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan																			
1	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	70	1.255.735.000	56	1.004.588.000	14	251.147.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	56	1.004.588.000	80,00	80,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rendahnya pengetahuan pengelola/pengurus koperasi dalam melakukan penguatan kelembagaan koperasi	dilakukan movev, koordinasi dan pembinaan serta pendampingan kepada koperasi dalam penguatan kelembagaan koperasi sehingga menjadikan koperasi yang berkualitas																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	500.000.000	0	400.000.000	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	400.000.000	nan	80,00		kegiatan ini mendukung untuk emeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	masih banyak nya koperasi yang belum dilakukan pemeriksanaan dan pengawasan	Mengotimalkan anggaran yang tersedia dalam melakukan pemeriksanaan dan pengawasan koperasi																			
2	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	100	500.000.000	80	400.000.000	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80	400.000.000	80,00	80,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	masih banyak koperasi yang sebelum dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	mengotimalkan anggaran dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	koperasi		1.659.525.000	180	1.327.620.000	45	331.905.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	180	1.327.620.000	inf	80,00		Program ini merupakan untuk penilaian kesehatan KSP/USP koperasi																					
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	unit usaha	225	1.659.525.000	180	1.327.620.000	45	331.905.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	180	1.327.620.000	80,00	80,00		Kegiatan ini bertujuan untuk Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Masih banyak koperasi yang cukup sehat, dalam pengawasan	melakukan pembinaan, pemeriksanaan, pengawasan dan movev untuk mendorong koperasi untuk melaksanakan tata cara berkoperasi yang baik bersarkan UU No 25 Tahun 1992 dan PP No. 7 Tahun 2021																			
1	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko,	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	225	1.659.525.000	180	1.327.620.000	45	331.905.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	180	1.327.620.000	80,00	80,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Penilaian Kesehatan Koperasi	Masih banyak koperasi yang cukup sehat, dalam pengawasan	melakukan pembinaan, pemeriksanaan,																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)		(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K								Rp	K
		Kinerja Keuangan, dan Permodalan																					Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		pengawasan dan monev untuk mendorong koperasi untuk melaksanakan tata cara berkoperasi yang baik bersarkan UU No 25 Tahun 1992 dan PP No. 7 Tahun 2021			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					80,00	80,00						
Predikat Kinerja																					T	T						
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	koperasi		49.818.775.000	360	7.114.780.000	80	1.778.695.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	360	7.114.780.000	inf	14,28		program ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sehingga menjadi koperasi modern			
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan	koperasi	750	49.818.775.000	600	7.114.780.000	150	1.778.695.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	600	7.114.780.000	80,00	14,28		kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1) Masih terbatasnya kemampuan Pengurus dalam menerapkan IT karena faktor usia. Sebagian Pengurus berusia diatas 40 tahun (2) Masih banyak Pengurus yang takut	(1) Ketersediaan SDM Pembina Koperasi baik provinsi maupun Kab/kota (2.) Adanya fasilitasi kegiatan dari kemenkop.	
1	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	125	45.472.560.000	100	3.637.808.000	25	909.452.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	3.637.808.000	80,00	8,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1) Masih terbatasnya kemampuan Pengurus dalam menerapkan IT karena faktor usia. Sebagian Pengurus berusia diatas 40 tahun (2) Masih banyak Pengurus yang takut	(1) Ketersediaan SDM Pembina Koperasi baik provinsi maupun Kab/kota (2.) Adanya fasilitasi kegiatan dari kemenkop.	
2	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	1500	4.346.215.000	1200	3.476.972.000	300	869.243.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	1200	3.476.972.000	80,00	80,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1) Masih terbatasnya kemampuan Pengurus dalam menerapkan IT karena faktor usia. Sebagian Pengurus berusia diatas 40 tahun (2) Masih banyak Pengurus yang takut	(1) Ketersediaan SDM Pembina Koperasi baik provinsi maupun Kab/kota (2.) Adanya fasilitasi kegiatan dari kemenkop. Koperasi dimana telah duitetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2021	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					80,00	44,00						
Predikat Kinerja																					T	SR						
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	buah		52.692.215.055	520	40.156.857.004	130	12.535.358.051	0	130.146.000		0	0	0	0	130.146.000	0,00	1,04	520	40.287.003.004	inf	76,46		program ini bertujuan untuk Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	0	52.692.215.055	0	40.156.857.004	0	12.535.358.051	0	130.146.000	0	0	0	0	0	130.146.000	nan	1,04	0	40.287.003.004	nan	76,46		kegiatan ini bertujuan untuk Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	(1) Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya standarisasi produk (2) Biaya pengurusan standarisasi yang masih tinggi (3) Masih terbatasnyapemahaman UMKM ttg pentingnya	(1) Persyaran utk memasukan produk harus memiliki (2) Adanya kebijakan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang akan diedarkan (3)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
1	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	15750	31.151.721.000	12600	24.921.376.800	3150	6.230.344.200	275	65.466.000	0	0	0	275	65.466.000	8,73	1,05	12875	24.986.842.800	81,75	80,21	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	(1) Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya standarisasi produk (2) Biaya pengurusan standarisasi yang masih tinggi	(1) Persyaran utk memasukan produk harus memiliki (2) Adanya kebijakan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang akan diedarkan
2	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	7140	19.044.350.255	5714	15.235.480.204	1428	3.808.870.051	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5714	15.235.480.204	80,03	80,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	(1) Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya standarisasi produk (2) Biaya pengurusan standarisasi yang masih tinggi (3) Masih terbatasnyapemahaman UMKM ttg pentingnya standarisasi dalam pengembangan produk khususnya halal	(1) Persyaran utk memasukan produk harus memiliki (2) Adanya kebijakan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal dalam produk makanan yang akan diedarkan (3) Adanya program pemerintah dalam sertifikasi halal	
3	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	650.000.000	0	0	500	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	banyaknya UKM yang terimbas dalam Covid -19	Memberikan subsidi bunga melalui program SIMAMAK yang bekerjasama dengan PT Bank Nagari BPD Sumatera Barat	
4	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha	1000	696.143.800	0	0	1000	696.143.800	0	64.680.000	0	0	0	0	64.680.000	0,00	9,29	0	64.680.000	0,00	9,29	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Masih banyak data UMKM yang belum terupdate sesuai dengan PP 7 Tahun 2021	Melakukan Update Data sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021
5	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	1330	1.150.000.000	0	0	1330	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk asilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Masih terbatasnyapemahaman UMKM ttg pentingnya standarisasi dalam pengembangan produk khususnya halal	Adanya program pemerintah dalam sertifikasi halal	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				32,35	33,90						
Predikat Kinerja																				SR	SR						
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	Persen		9.370.667.700	16.8	1.961.434.400	4.2	7.874.591.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16.8	1.961.434.400	inf	20,93		Menunjang program pengembangan UMKM			
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	0	9.370.667.700	0	1.961.434.400	0	7.874.591.900	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	1.961.434.400	nan	20,93		kegiatan ini bertujuan untuk Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	(1) Masih terbatasnya SDM UMKM dalam mendaftarkan NIB (2) Masih terdapatnya blank spot yang menghambat UMKM dalam pendaftaran NIB Adanya kebijakan di kecamatan/nigari yang mengaitkan peurusan NIB dengan pembayaran PBB UMKM	(1) NIB merupakan salah satu syarat dalam pengurusan pembiayaan bagi UMKM sehingga banyak UMKM yang mengurus NIB (2) Pendampingan yang dilakukan oleh konsultan PLUT melalui Mobil Klinik KUMKM dalam menerbitkan NIB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III														IV
											(1)	(2)	(3)	(4)														(5)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	1600	1.961.434.400	1600	1.961.434.400	400	465.358.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1600	1.961.434.400	100,00	100,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	masih rendahnya pemahaman UMKM terkait dengan pemahaman hukum serta dalam penyelesaian sengketa bagi para pelaku UMKM	adanya pojok hukum dan memberikan pendampingan dalam penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM		
2	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha	290	2.700.000.000	0	0	290	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Pengembangan Usaha Kecil	masih rendahnya pemahaman UMKM dalam pengembangan usaha	melakukan pendampingan dan pelatihan bagi umkm dalam pengembangan usaha		
3	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	650	1.829.533.800	0	0	650	1.829.533.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	usaha UMKM yang belum fokus baik terhadap satu produk dan kurangnya minat UMKM dalam pengembangan usaha yang sejenis (coba-coba)	memberikan pelatihan yang khusus terkait dengan produk yang dihasilkan dan memberikan pemahaman kepada UMKM dalam pengembangan usaha sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing		
4	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	Orang	1450	2.879.699.500	0	0	1450	2.879.699.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISKOP	kegiatan ini bertujuan untuk Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021 bahwa di Sumatera Barat masih banyak UKM dalam skala Mikro	Melakukan sosialisasi, peningkatan pemahaman dalam pengembangan usaha sehingga menjadi wirausaha yang tangguh dan handal		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					25,00	25,00						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUKM yang dilatih	orang		0	6600		0	1.650	3.250.469.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6600		0	inf	nan	Menunjang program pendidikan dan pelatihan perkoperasian			
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	8250	0	6600	0	0	3.250.469.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	6600	0	80,00	nan	Menunjang program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	(1) Masih terbatasnya jumlah tenaga widyaiswara untuk melatih Peserta (2) Masih adanya peserta yang hadir tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pendidikan dan pelatihan	(1) Perubahan Pengelola koperasi sehingga banyak koperasi yang membutuhkan pelatihan bagi pengurus yang baru. (2) Pelatihan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi		
1	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		0		0	1382	3.250.469.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISKOP	Menunjang terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi [UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi]	(1) Masih terbatasnya jumlah tenaga widyaiswara untuk melatih Peserta (2) Masih adanya peserta yang hadir tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pendidikan dan pelatihan	(1) Perubahan Pengelola koperasi sehingga banyak koperasi yang membutuhkan pelatihan bagi pengurus yang baru. (2) Pelatihan yang dilaksanakan menyesuaikan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																								dengan kebutuhan koperasi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan							
Predikat Kinerja																-	-							

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				57.506.112.651		30.374.199.764		15.211.505.635		2.622.528.812		0	0	0		2.622.528.812		17,24		32.996.728.576		57,38			
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				39.647.321.315		23.788.392.789		8.062.133.648		1.915.090.736		0	0	0		1.915.090.736		23,75		25.703.483.525		64,83			
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				39.647.321.315		23.788.392.789		8.062.133.648		1.915.090.736		0	0	0		1.915.090.736		23,75		25.703.483.525		64,83			
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		39.647.321.315	100	23.788.392.789	100	8.062.133.648	100	1.915.090.736	0	0	0	100	1.915.090.736	100,00	23,75	200	25.703.483.525	inf	64,83				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen	100	39.647.321.315	100	23.788.392.789	100	8.062.133.648	100	1.915.090.736	0	0	0	0	100	1.915.090.736	100,00	23,75	200	25.703.483.525	200,00	64,83		Kendala pada sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK untuk Merealisasikan Anggaran sesuai dengan Perencanaan yang sudah disusun
1	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	225	39.647.321.315	139	23.788.392.789	48	8.062.133.648	100	1.915.090.736	0	0	0	0	100	1.915.090.736	208,33	23,75	239	25.703.483.525	106,22	64,83	DPM P2TSP	Kendala pada sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK untuk Merealisasikan Anggaran sesuai dengan Perencanaan yang sudah disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					106,22	64,83					
Predikat Kinerja																					ST	R					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.858.791.336		6.585.806.975		7.149.371.987		707.438.076		0	0	0		707.438.076		9,90		7.293.245.051		40,84			
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				17.858.791.336		6.585.806.975		7.149.371.987		707.438.076		0	0	0		707.438.076		9,90		7.293.245.051		40,84			
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		6.888.778.946	86,87	3.180.252.257	100	2.724.498.987	22,98	674.383.551	0	0	0	0	22,98	674.383.551	22,98	24,75	109,85	3.854.635.808	inf	55,96			
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	persen	100	356.015.600	96,09	147.130.900	85	159.470.062	26,32	4.400.000	0	0	0	0	26,32	4.400.000	30,96	2,76	122,41	151.530.900	122,41	42,56		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
1	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	222.392.200	95,63	104.607.500	6	41.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	95,63	104.607.500	956,30	47,04	DPM P2TSP	Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang	Komitmen PimpinN dan semua PPTK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
																								sering memperlambat proses kerja	dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun		
2	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	108.623.400	97.24	42.523.400	7	44.208.912	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	97.24	42.523.400	648,27	39,15	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
3	2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	25.000.000	0	0	1	74.006.150	3816	4.400.000	0	0	0	3816	4.400.000	381.600,00	5,95	3816	4.400.000	190.800,00	17,60	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					64.134,86	34,59					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen	100	739.837.275	84	232.594.200	100	236.574.945	24,07	42.900.000	0	0	0	0	24,07	42.900.000	24,07	18,13	108,07	275.494.200	108,07	37,24		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
4	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	527.490.000	98,22	212.310.000	12	203.017.500	21,18	42.900.000	0	0	0	0	21,18	42.900.000	176,50	21,13	119,4	255.210.000	331,67	48,38	DPM P2TSP	Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
5	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	212.347.275	88,77	20.284.200	13	33.557.445	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	88,77	20.284.200	136,57	9,55	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					93,65	11,59					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	persen	100	150.000.000	99,95	14.392.374	100	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99,95	14.392.374	99,95	9,59		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																										Perencanaan yang sudah Disusun	
6	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	150.000.000	99.95	14.392.374	3	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99.95	14.392.374	1.999,00	9,59	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					333,17	1,60					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	276.028.899	87.4	108.623.197	100	130.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	87.4	108.623.197	87,40	39,35			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
7	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	450	64.350.000	97.39	65.736.000	90	60.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	97.39	65.736.000	21,64	102,15	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
8	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	160	211.678.899	75.53	42.887.197	15	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75.53	42.887.197	47,21	20,26	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,61	15,30					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	2.186.722.164	94.97	1.290.865.484	100	827.168.080	21.98	316.207.198	0	0	0	0	21.98	316.207.198	21,98	38,23	116,95	1.607.072.682	116,95	73,49		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
9	2.18.01.1.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	85	88.400.000	68	70.720.000	17	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	68	70.720.000	80,00	80,00	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
10	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	36.000.000	99.91	10.337.700	3	37.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99.91	10.337.700	3.330,33	28,72	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
11	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	77	115.442.700	88.89	81.113.200	14	73.500.000	70.76	50.765.190	0	0	0	0	70.76	50.765.190	505,43	69,07	159.65	131.878.390	207,34	114,24	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
12	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	45.774.750	88.72	30.317.080	7	19.500.000	7.12	4.360.000	0	0	0	7.12	4.360.000	101,71	22,36	95.84	34.677.080	456,38	75,76	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
13	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	85.400.000	99.59	17.010.000	6	18.120.000	11.48	1.560.000	0	0	0	11.48	1.560.000	191,33	8,61	111.07	18.570.000	370,23	21,74	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
14	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	111	960.784.574	96.25	922.629.200	50	489.850.112	20.68	259.522.008	0	0	0	20.68	259.522.008	41,36	52,98	116.93	1.182.151.208	105,34	123,04	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
15	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	854.920.140	92.83	158.738.304	3	171.007.968	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	92.83	158.738.304	1.856,60	18,57	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					427,08	30,80						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	persen	100	100.000.000	97.92	71.745.800	100	92.425.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	97.92	71.745.800	97.92	71,75			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
																								dengan Perencanaan yang sudah Disusun			
16	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	100	71.745.800	6	91.925.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	71.745.800	1.000,00	71,75	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
17	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	2.210.496.001	95,26	966.348.688	100	892.520.000	18,91	246.396.636	0	0	0	0	18,91	246.396.636	18,91	27,61	114,17	1.212.745.324	114,17	54,86		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
18	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	398.793.976	96,27	140.908.119	2	167.520.000	21,78	36.485.522	0	0	0	21,78	36.485.522	1.089,00	21,78	118,05	177.393.641	2.361,00	44,48	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
19	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1.811.702.025	95,09	825.440.569	3	725.000.000	18,49	209.911.114	0	0	0	18,49	209.911.114	616,33	28,95	113,58	1.035.351.683	2.271,60	57,15	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					243,82	5,35					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	persen	100	869.679.007	98,14	348.551.614	100	376.390.000	18,93	64.479.717	0	0	0	0	18,93	64.479.717	18,93	17,13	117,07	413.031.331	117,07	47,49		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
20	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	503.543.383	98.25	253.232.614	11	184.260.000	34.4	63.379.717	0	0	0	34.4	63.379.717	312,73	34,40	132.65	316.612.331	241,18	62,88	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
21	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	255	31.994.200	90	9.900.000	5	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	90	9.900.000	35,29	30,94	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
22	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	40.000.000	96.29	21.965.000	15	49.130.000	4.07	1.100.000	0	0	0	4.07	1.100.000	27,13	2,24	100.36	23.065.000	182,47	57,66	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
23	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	294.141.424	99.75	63.454.000	1	130.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99.75	63.454.000	1.995,00	21,57	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						106,69	7,52				
Predikat Kinerja																						ST	SR				
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	persen		4.643.930.392	97.21	572.576.071	100	1.079.762.000	0.82	760.000	0	0	0	0.82	760.000	0.82	0,07	98.03	573.336.071	inf	12,35				
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	267.422.500	1	19.124.375	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	19.124.375	100,00	7,15			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
1	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	267.422.500	1	19.124.375	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	19.124.375	100,00	7,15	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						100,00	7,15				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Modal Kewenangan Provinsi	Penanaman Modal Provinsi																						sering memperlambat proses kerja	dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
2	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	299.042.850	1	44.952.300	2	257.490.000	3.92	607.500	0	0	0	3.92	607.500	196,00	0,24	4.92	45.559.800	492,00	15,24	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						333,50	15,48				
Predikat Kinerja																						ST	SR				
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	persen		2.745.917.663	88,13	1.116.361.500	87,27	1.586.358.000	6,22	20.238.125	0	0	0	6,22	20.238.125	7,15	1,28	94,35	1.136.599.625	inf	41,39				
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	rasio	88,13	2.745.917.663	88,13	1.116.361.500	3	1.586.358.000	6,22	20.238.125	0	0	0	6,22	20.238.125	207,33	1,28	94,35	1.136.599.625	107,06	41,39			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
1	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	15	733.068.312	3	190.908.850	15	136.827.112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	190.908.850	20,00	26,04	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
2	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	7500	1.671.171.501	2000	681.664.740	3000	1.107.058.488	5,96	17.118.125	0	0	0	5,96	17.118.125	0,20	1,55	2005,96	698.782.865	26,75	41,81	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
3	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	15	341.677.850	5	243.787.910	20	342.472.400	14,56	3.120.000	0	0	0	14,56	3.120.000	72,80	0,91	19,56	246.907.910	130,40	72,26	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen Pimpinan dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						59,05	46,71				
Predikat Kinerja																						R	SR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Trilyun Rupiah		1.985.153.110	15.76	1.404.638.435	6,7	832.431.000	0	8.298.400	0	0	0	0	8.298.400	0,00	1,00	15.76	1.412.936.835	inf	71,18				
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Trilyun Rupiah	7.5	1.985.153.110	15.76	1.404.638.435	6	832.431.000	0	8.298.400	0	0	0	0	8.298.400	0,00	1,00	15.76	1.412.936.835	210,13	71,18			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
1	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan	Kegiatan usaha	27	485.153.110	30	511.416.535	50	235.360.000	5	3.000.000	0	0	0	5	3.000.000	10,00	1,27	35	514.416.535	129,63	106,03	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
			; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	27		30		50		5					5	10,00		35		129,63		DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
2	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha	17	500.000.000	10	215.192.700	20	258.283.000	11.38	5.298.400	0	0	0	11.38	5.298.400	56,90	2,05	21.38	220.491.100	125,76	44,10	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
3	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1200	1.000.000.000	250	678.029.200	300	338.788.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	250	678.029.200	20,83	67,80	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						101,46	72,64				
Predikat Kinerja																						ST	S				
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi	persen		118.130.923	100	84.995.762	80	73.878.000	80	0	0	0	0	80	0	100,00	0,00	180	84.995.762	inf	71,95				
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data Penanaman Modal yang berbasis teknologi	Dokumen	6	118.130.923	4	84.995.762	1	73.878.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	5	84.995.762	83,33	71,95			Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																										yang sudah Disusun
1	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	6	118.130.923	4	84.995.762	1	73.878.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	84.995.762	66,67	71,95	DPM P2TSP		Keterlambatan sistem sipd.kemendagri.go.id serta jaringan yang sering memperlambat proses kerja	Komitmen PimpinN dan semua PPTK dalam merealisasikan Belanja sesuai dengan Perencanaan yang sudah Disusun
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,67	71,95				
Predikat Kinerja																					S	S				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
									I	II	III	IV	K	Rp				K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
		DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA				0		0		53.963.046.000	4.976.568.616		0	0	0	4.976.568.616		9,22	4.976.568.616		inf																		
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0		nan	0	nan																			
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0		nan	0	nan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		53.963.046.000	4.976.568.616		0	0	0	4.976.568.616		9,22	4.976.568.616		inf																		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA				0		0		53.963.046.000	4.976.568.616		0	0	0	4.976.568.616		9,22	4.976.568.616		inf																		
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0		0	100	18.342.309.403	2.790.291.366		0	0	0	0	2.790.291.366	0,00	15,21	0	2.790.291.366	nan	inf																
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	85	1.163.268.981	0	26.456.800	0	0	0	0	26.456.800	0,00	2,27	0	26.456.800	nan	inf																
1	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	4	139.248.300	1	7.723.900		0	0	0	1	7.723.900	25,00	5,55	1	7.723.900	inf	inf	DISPORA														
2	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	3	162.581.381	3	1.221.000		0	0	0	3	1.221.000	100,00	0,75	3	1.221.000	inf	inf	DISPORA														
3	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	5	253.452.500	1	641.000		0	0	0	1	641.000	20,00	0,25	1	641.000	inf	inf	DISPORA														
4	2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		0		0	19	144.974.100	6	12.070.900		0	0	0	6	12.070.900	31,58	8,33	6	12.070.900	inf	inf	DISPORA														
5	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		0		0	1	212.852.200	1	4.800.000		0	0	0	1	4.800.000	100,00	2,26	1	4.800.000	inf	inf	DISPORA														
6	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		0		0	1	107.393.500	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA														
7	2.19.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara		0		0	1	142.767.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan					
Predikat Kinerja																																		-	-				
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0	0	100	11.017.047.322	0	2.421.695.694	0	0	0	0	0	2.421.695.694	0,00	21,98	0	2.421.695.694	nan	inf															
8	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	93	10.442.047.322	71	2.312.096.794		0	0	0	71	2.312.096.794	76,34	22,14	71	2.312.096.794	inf	inf	DISPORA														
9	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	12	400.000.000	4	85.433.900		0	0	0	4	85.433.900	33,33	21,36	4	85.433.900	inf	inf	DISPORA														
10	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan		0		0	1	55.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																									
11	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	5	120.000.000	1	24.165.000	0	0	0	0	1	24.165.000	20,00	20,14	1	24.165.000	inf	inf	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0	0	0	0	100	230.000.000	0	3.898.000	0	0	0	0	0	3.898.000	0,00	1,69	0	3.898.000	nan	inf				
12	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	3	90.000.000	0	1.290.000	0	0	0	0	0	1.290.000	0,00	1,43	0	1.290.000	nan	inf	DISPORA			
13	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	40.000.000	0	2.608.000	0	0	0	0	0	2.608.000	0,00	6,52	0	2.608.000	nan	inf	DISPORA			
14	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		0	0	0	0	100	20.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
15	2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
16	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
17	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
18	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel Paket		0		0	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
19	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	15	105.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	1.330.667.922	0	87.176.350	0	0	0	0	0	87.176.350	0,00	6,55	0	87.176.350	nan	inf				
20	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
21	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	7	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
22	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	100.173.700	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
23	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	20	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
24	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	5	108.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
25	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	59.756.422	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
26	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	100.000.000	0	6.448.000	0	0	0	0	6.448.000	0,00	6,45	0	6.448.000	nan	inf	DISPORA																					
27	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	4	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
28	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	4	39.975.000	0	1.908.600	0	0	0	0	1.908.600	0,00	4,77	0	1.908.600	nan	inf	DISPORA																					
29	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KBOR]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	12	25.000.000	3	980.000	0	0	0	3	980.000	25,00	3,92	3	980.000	inf	inf	DISPORA																					
30	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	12	22.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
31	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang Laporan		0		0	10	4.870.000	1	1.976.000	0	0	0	1	1.976.000	10,00	40,57	1	1.976.000	inf	inf	DISPORA																					
32	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	50	517.487.000	4	75.863.750	0	0	0	4	75.863.750	8,00	14,66	4	75.863.750	inf	inf	DISPORA																					
33	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dokumen		0		0	1	7.355.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	373.583.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan																					
34	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	124	80.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
35	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	42	50.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
36	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	198.271.920	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
37	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	0	0	100	2.156.808.578	0	168.637.522	0	0	0	0	0	168.637.522	0,00	7,82	0	168.637.522	nan	inf																					
38	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1800	20.000.000	3	4.739.500	0	0	0	3	4.739.500	0,17	23,70	3	4.739.500	inf	inf	DISPORA																					
39	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	500	15.000.000	18	2.500.000	0	0	0	18	2.500.000	3,60	16,67	18	2.500.000	inf	inf	DISPORA																					
40	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	48	300.882.000	12	39.097.429	0	0	0	12	39.097.429	25,00	12,99	12	39.097.429	inf	inf	DISPORA																					
41	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	48	175.000.000	12	13.773.458	0	0	0	12	13.773.458	25,00	7,87	12	13.773.458	inf	inf	DISPORA																					
42	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	1.000.000.000	3	102.045.305	0	0	0	3	102.045.305	25,00	10,20	3	102.045.305	inf	inf	DISPORA																					
43	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KBOR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	645.926.578	3	6.481.830	0	0	0	3	6.481.830	25,00	1,00	3	6.481.830	inf	inf	DISPORA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	0	0	0	0	100	1.870.922.680	0	82.427.000	0	0	0	0	82.427.000	0,00	4,41	0	82.427.000	nan	inf			
44	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	1	52.000.000	0	12.023.250	0	0	0	0	12.023.250	0,00	23,12	0	12.023.250	nan	inf	DISPORA		
45	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	8	200.000.000	2	39.534.250	0	0	0	2	39.534.250	25,00	19,77	2	39.534.250	inf	inf	DISPORA		
46	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KBOR]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
47	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	50	25.000.000	12	4.375.000	0	0	0	12	4.375.000	24,00	17,50	12	4.375.000	inf	inf	DISPORA		
48	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel [UPTD KBOR]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	60	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
49	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	100	90.270.000	24	26.494.500	0	0	0	24	26.494.500	24,00	29,35	24	26.494.500	inf	inf	DISPORA		
50	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
51	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	30	200.146.580	7	0	0	0	0	7	0	23,33	0,00	7	0	inf	nan	DISPORA		
52	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	499.610.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
53	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KBOR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	22	499.896.000	5	0	0	0	0	5	0	22,73	0,00	5	0	inf	nan	DISPORA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	Persen		0		0	18	3.605.338.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			
			Jumlah wirausaha muda baru	orang					348							0		0,00		0		nan				
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persen	0	0	0	0	100	2.605.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang		0		0	298	678.569.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
2	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	-	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISPORA		
3	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang		0		0	5	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		
4	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen		0		0	1	91.639.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
								I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																											
5	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase			0		0	0	335.130.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA			
6	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang		0		0	15	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA			
7	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang		0		0	348	1.200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	0	0	0		0	100	1.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan			
8	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi		0		0	2	1.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	Persen		0		0	1	28.833.343.597	2.186.277.250		0	0	0	0	0	2.186.277.250	0,00	7,58	0		2.186.277.250	nan	inf				
			Jumlah medali emas dalam event nasional	medali					29								0		0,00		0			nan					
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persen	0	0	0		0	100	2.779.639.120	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan			
1	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen		0		0	7	650.002.500	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA			
2	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit		0		0	1		0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0		0	nan	nan	DISPORA		
3	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit		0		0	15	2.129.636.620	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan					
Predikat Kinerja																							-	-					
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persen	0		0	0		0	100	3.826.394.710	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan			
4	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang		0		0	140	1.342.761.589	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPORA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga [UPTD KBOR]	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang		0		0	50	1.500.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
6	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan		0		0	4	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
7	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan		0		0	19	683.633.121	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persen	0	0	0	0	100	6.628.387.767	0	205.989.250	0	0	0	0	0	205.989.250	0,00	3,11	0	205.989.250	nan	inf				
8	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang		0		0	200	137.709.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
9	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga [UPTD KBOR]	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang		0		0	70	950.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
10	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang		0		0	30	198.505.697	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
11	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda		0		0	7	450.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
		)	Pelatda						7		0					0		0,00		0		nan		DISPORA				
12	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen		0		0	4	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
13	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang		0		0	20	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA				
14	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi [UPTD KBOR]	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang		0		0	119	4.792.173.070	77	205.989.250		0	0	0	77	205.989.250	64,71	4,30	77	205.989.250	inf	inf	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen	0	0	0	0	100	15.598.922.000	0	1.980.288.000	0	0	0	0	0	1.980.288.000	0,00	12,70	0	1.980.288.000	nan	inf				
15	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen		0		0	4	3.568.922.000	1	179.800.000		0	0	0	1	179.800.000	25,00	5,04	1	179.800.000	inf	inf	DISPORA			
16	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen		0		0	3	12.030.000.000	1	1.800.488.000		0	0	0	1	1.800.488.000	33,33	14,97	1	1.800.488.000	inf	inf	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan	Persen		0		0	5,44	3.182.055.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	0	0	0	0	100	3.182.055.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat	Organisasi		0		0	1	2.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Kapasitasnya																								
2	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit		0		0	1	414.874.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA			
3	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	200	767.181.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPORA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KEBUDAYAAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
					I	II			III	IV																																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
		DINAS KEBUDAYAAN				0		0		20.170.387.918	3.362.804.334	0	0	0		3.362.804.334		16,67		3.362.804.334		inf																						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan																					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan																					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0		0		20.170.387.918	3.362.804.334	0	0	0	0		3.362.804.334		16,67		3.362.804.334		inf																					
2.22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				0		0		20.170.387.918	3.362.804.334	0	0	0	0		3.362.804.334		16,67		3.362.804.334		inf																					
2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0	0	0	0	8.998.828.620	0	3.148.592.076	0	0	0	0	3.148.592.076	nan	34,99	0	3.148.592.076	nan	inf																					
2.22.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	32.885.000	0	0	0	0	32.885.000	nan	inf	0	32.885.000	nan	inf																					
1	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	4	0	2	32.885.000	0	0	0	0	2	32.885.000	50,00	inf	2	32.885.000	inf	inf	DISBUD																			
2	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD																				
3	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.733.036.000	0	2.238.950.111	0	0	0	0	0	2.238.950.111	nan	81,92	0	2.238.950.111	nan	inf																				
4	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	0	0	70	2.431.036.000	3	2.183.090.111	0	0	0	0	3	2.183.090.111	4,29	89,80	3	2.183.090.111	inf	inf	DISBUD																			
5	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	0	0	12	265.000.000	3	55.860.000	0	0	0	0	3	55.860.000	25,00	21,08	3	55.860.000	inf	inf	DISBUD																			
6	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	14	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	200.000.000	0	54.681.420	0	0	0	0	0	54.681.420	nan	27,34	0	54.681.420	nan	inf																				
7	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	200.000.000	1	54.681.420	0	0	0	0	1	54.681.420	100,00	27,34	1	54.681.420	inf	inf	DISBUD																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.279.711.720	0	194.952.555	0	0	0	0	0	194.952.555	nan	15,23	0	194.952.555	nan	inf																				
8	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	20	65.000.000	1	9.960.500	0	0	0	0	1	9.960.500	5,00	15,32	1	9.960.500	inf	inf	DISBUD																			
9	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	0	0	0	0	4	10.031.330	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Kantor [UPTD Taman Budaya]	Kantor yang Disediakan																							
10	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	4	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD			
11	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	12	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD			
12	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	35	140.000.000	1	47.604.000	0	0	0	1	47.604.000	2,86	34,00	1	47.604.000	inf	inf	DISBUD		
13	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	12	15.067.390	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
14	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
15	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	5	40.000.000	1	12.968.000	0	0	0	1	12.968.000	20,00	32,42	1	12.968.000	inf	inf	DISBUD		
16	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
17	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	6	28.000.000	1	1.200.000	0	0	0	1	1.200.000	16,67	4,29	1	1.200.000	inf	inf	DISBUD		
18	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	4	15.613.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
19	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
20	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	12	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
21	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	36	800.000.000	3	123.220.055	0	0	0	3	123.220.055	8,33	15,40	3	123.220.055	inf	inf	DISBUD		
22	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	550.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		0	0	
23	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
24	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
25	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.235.920.900	0	591.030.990	0	0	0	0	591.030.990	nan	18,26	0	591.030.990	nan	inf		0	0
26	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	1000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD			
27	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	
28	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	1	4.920.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
									I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
29	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	12	500.000.000	3	112.106.706	0	0	0	0	3	112.106.706	25,00	22,42	3	112.106.706	inf	inf	DISBUD			
30	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0	0	12	84.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
31	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	3	2.600.000.000	2	478.924.284	0	0	0	2	478.924.284	66,67	18,42	2	478.924.284	inf	inf	DISBUD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.000.160.000	0	36.092.000	0	0	0	0	36.092.000	nan	3,61	0	36.092.000	nan	inf		0	0	0	
32	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	0	0	12	150.000.000	3	28.742.000	0	0	0	3	28.742.000	25,00	19,16	3	28.742.000	inf	inf	DISBUD				
33	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	32	300.000.000	3	7.350.000	0	0	0	3	7.350.000	9,38	2,45	3	7.350.000	inf	inf	DISBUD				
34	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	20	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
35	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	10	25.160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
36	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	300.000.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	inf	nan	DISBUD				
37	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-		0	0	0	0	4.680.034.898	0	65.868.664	0	0	0	0	65.868.664	nan	1,41	0	65.868.664	nan	inf		0			
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0		0	0	0	330.107.500	0	10.180.000	0	0	0	0	10.180.000	nan	3,08	0	10.180.000	nan	inf		0	0	0	
1	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	0	0	0	0	10	75.000.000	0	10.180.000	0	0	0	0	10.180.000	0,00	13,57	0	10.180.000	nan	inf	DISBUD				
2	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	0	0	0	100	255.107.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	3.449.927.398	0	55.688.664	0	0	0	0	55.688.664	nan	1,61	0	55.688.664	nan	inf		0	0	0	
3	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0	0	0	5	1.999.927.398	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0	
4	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD Taman Budaya]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	0	0	0	0	18	1.450.000.000	0	55.688.664	0	0	0	0	55.688.664	0,00	3,84	0	55.688.664	nan	inf	DISBUD				
5	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka	Sertifikat	0		0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
								I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD Taman Budaya]	yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan					
Predikat Kinerja																-	-					
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	
6	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	0	0	0	0	30	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
7	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	0	0	0	0	1000	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan					
Predikat Kinerja																-	-					
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	0	0	0	0	0	1.650.000.000	0	32.235.000	0	0	0	0	0	32.235.000	nan	1,95	0	0
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	0	0	0	0	1.650.000.000	0	32.235.000	0	0	0	0	0	32.235.000	nan	1,95	0	0
1	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	0	0	0	0	240	200.000.000	0	32.235.000	0	0	0	0	0	32.235.000	0,00	16,12	0	0
2	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	0	0	0	0	5	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
3	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	0	0	0	0	25	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan					
Predikat Kinerja																-	-					
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	0	0	0	0	0	700.000.000	0	56.300.000	0	0	0	0	0	56.300.000	nan	8,04	0	0
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	700.000.000	0	56.300.000	0	0	0	0	0	56.300.000	nan	8,04	0	0
1	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	38	200.000.000	1	56.300.000	0	0	0	0	1	56.300.000	2,63	28,15	1	0
2	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	8	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan					
Predikat Kinerja																-	-					
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	0	0	0	0	0	339.820.000	0	2.670.000	0	0	0	0	0	2.670.000	nan	0,79	0	0
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	163.000.000	0	2.670.000	0	0	0	0	0	2.670.000	nan	1,64	0	0
1	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	0	0	0	0	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	0	0	0	0	10	63.000.000	1	2.670.000	0	0	0	0	1	2.670.000	10,00	4,24	1	0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan					
Predikat Kinerja																-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
											I	II	III	IV																														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	176.820.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		0	0	0																	
3	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0																	
4	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0																	
5	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0																	
6	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	5	176.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISBUD	0	0	0																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	0	0	0	0	0	3.801.704.400	57.138.594	0	0	0	0	0	57.138.594	nan	1,50	0	57.138.594	nan	inf																					
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	3.801.704.400	57.138.594	0	0	0	0	0	57.138.594	nan	1,50	0	57.138.594	nan	inf																					
1	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	0	0	0	0	700	1.200.000.000	175	0	0	0	0	175	0	25,00	0,00	175	0	inf	nan	DISBUD																				
2	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	5	260.000.000	3	0	0	0	0	3	0	60,00	0,00	3	0	inf	nan	DISBUD																				
3	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	0	0	0	0	22	1.468.000.000	0	57.138.594	0	0	0	0	57.138.594	0,00	3,89	0	57.138.594	nan	inf	DISBUD	Kunjungan sudah mencapai 13000 pada tw.1																			
4	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	6	673.704.400	1	0	0	0	0	1	0	16,67	0,00	1	0	inf	nan	DISBUD																				
5	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD Museum Adityawarman]	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	0	0	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISBUD																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					I	II		III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			0	0		16.905.655.000	3.335.215.738	0	0	0	0	3.335.215.738	19,73	3.335.215.738	inf										
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan										
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0		16.905.655.000	3.335.215.738	0	0	0	0	3.335.215.738	19,73	3.335.215.738	inf										
2.23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			0	0		1.712.626.000	49.857.000	0	0	0	0	49.857.000	2,91	49.857.000	inf										
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk.	Persen	0	0	1,72	1.210.470.000	43.008.000	0	0	0	0	43.008.000	0,00	3,55	0	43.008.000	nan	inf							
			Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk.	Persen			1,72						0		0,00	0		nan									
			Provinsi sesuai SNP	Persen			1,72						0		0,00	0		nan									
2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP	Perpustakaan	0	0	0	0	8	1.033.470.000	0	40.263.000	0	0	0	0	0	40.263.000	0,00	3,90	0	40.263.000	nan	inf			
1	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	0	0	0	1	200.000.000	0	11.963.000	0	0	0	0	0	11.963.000	0,00	5,98	0	11.963.000	nan	inf	DAP	Pengembangan perpustakaan dilakukan baik mengembangkan layanan perpustakaan yang sudah ada untuk ditingkatkan kapasitasnya maupun mengembangkan perpustakaan baru. Perpustakaan yang dikembangkan sesuai dengan kewenangan perpustakaan provinsi. Standar nasional perpustakaan meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Pengukurannya dengan menghitung jumlah perpustakaan yang dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan	Kurangnya dana untuk pengadaan buku, perawatan fasilitas, serta pelatihan pustakawan dapat menghambat pengembangan perpustakaan. Anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan perpustakaan untuk mengadopsi teknologi baru	Dukungan kuat dari pemerintah daerah dan nasional dalam bentuk kebijakan, Peningkatan kompetensi pustakawan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
2	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	0	0	250	59.484.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0,81	0	480.000	nan	inf	DAP	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi adalah upaya untuk	• Kekurangan pustakawan yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan koleksi khas. • Kurangnya pelatihan dan	• Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan koleksi khas, termasuk alokasi dana khusus

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	0	0	15	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DAP	Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pengelolaan perpustakaan. Pengukurannya dengan menghitung jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina.	• Kurangnya pustakawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan SNP. • Fasilitas yang Tidak Memadai Perpustakaan dengan ruang baca yang sempit, kurangnya fasilitas teknologi, dan infrastruktur yang tidak mendukung kebutuhan khusus. • Kondisi Fisik Bangunan perpustakaan yang kurang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan	Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung pembinaan perpustakaan sekolah dari pemerintah pusat dan daerah, Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi pustakawan dan staf perpustakaan untuk meningkatkan kompetensi	
4	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	0	0	70	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DAP	Tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatihan yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pustakawan di tingkat daerah. , Kesadaran tentang pentingnya pengembangan profesional sering kali rendah di kalangan pustakawan, Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional bagi pustakawan dan staf perpustakaan	Adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung peningkatan kapasitas pustakawan, Menggunakan platform e-learning untuk menyediakan pelatihan jarak jauh yang dapat diakses oleh pustakawan di mana saja, Pengembangan program sertifikasi untuk pustakawan yang diakui secara nasional dan internasional. Dukungan dari organisasi profesi pustakawan yang menyediakan pelatihan, seminar, dan workshop.	
5	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DAP	Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Dana yang tidak memadai untuk pengadaan koleksi rujukan, teknologi, dan fasilitas yang diperlukan untuk layanan rujukan yang berkualitas, Kurangnya keahlian khusus dalam layanan rujukan dan pengetahuan yang mendalam tentang sumber informasi yang relevan. Fasilitas fisik yang kurang memadai untuk mendukung layanan rujukan, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan teknologi yang	Kebijakan dan regulasi dari pemerintah yang mendukung pengembangan layanan rujukan perpustakaan. ,Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk komputer, akses internet, dan peralatan multimedia. Pengadaan koleksi bahan rujukan yang mutakhir, relevan, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna.	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
												I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																					diperlukan.Kurangnya koleksi bahan rujukan yang relevan, mutakhir, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna						
6	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar		0		0	600	210.200.000	0	2.541.000	0	0	0	0	2.541.000	0,00	1,21	0	2.541.000	nan	inf	DAP	Kegiatan pengembangan dilaksanakan melalui proses penelusuran koleksi, pengadaan dan hibah Pengukurannya dengan menghitung jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan	Koleksi bahan pustaka yang tidak mencakup berbagai subjek dan kurang mutakhir, Kurangnya pustakawan dan staf perpustakaan yang terlatih dalam pengelolaan bahan pustaka.	Kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, Menjalin kemitraan dengan penerbit, lembaga pendidikan, dan institusi lain untuk pengadaan bahan pustaka.
7	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen		0		0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Jam operasional perpustakaan yang tidak fleksibel atau terbatas sehingga sulit diakses oleh masyarakat yang bekerja atau bersekolah, Koleksi buku cetak yang tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak relevan dengan kebutuhan dan minat masyarakat, Keterbatasan akses ke koleksi digital seperti e-book, jurnal elektronik, dan basis data digital	Pengadaan koleksi buku dan sumber digital yang relevan, mutakhir, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat, Penyediaan koleksi dalam berbagai format, termasuk cetak, e-book, audio book, dan video.	
8	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai		0		0	66,30	52.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengukuran tingkat kegemaran membaca menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif, yakni data yang dikumpulkan diperoleh dari sampel populasi dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan, kemudian diinterpretasikan, mengacu pada Pedoman Pengukuran TGM	Kurangnya data sekunder atau basis data yang dapat diandalkan untuk mendukung penelitian, Kesulitan dalam mendapatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti survei atau penelitian, Keterbatasan akses ke teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan survei online atau digital.	Kebijakan yang Mendukung, Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan survei dan penelitian tentang gemar membaca. Pendanaan Pemerintah, Alokasi anggaran dari pemerintah untuk mendukung survei dan penelitian ini.	
9	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks		0		0	16	52.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengukurannya dengan menghitung IPLM dengan mengacu pada Pedoman Pengukuran IPLM	Kurangnya data sekunder yang dapat diandalkan untuk mendukung penelitian, Masyarakat kurang memahami pentingnya survei ini sehingga tidak mau berpartisipasi.Keterbatasan akses ke teknologi yang diperlukan untuk survei online atau digital.	Kebijakan yang Mendukung, adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan survei dan penelitian literasi. Pendanaan dari Pemerintah, Alokasi dana dari pemerintah untuk mendukung pelaksanaan survei dan penelitian. Penggunaan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan survei dan mengumpulkan data, Pengembangan metodologi yang relevan dengan konteks lokal.	
10	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen		0		0	10	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Kerjasama dilakukan untuk penghematan dan efektifitas penggunaan dana yang dimiliki, maupun untuk silang layan dalam pemanfaatan koleksi	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama., Perbedaan tujuan dan prioritas antar organisasi yang menyebabkan kurangnya sinergi.	Koordinasi yang efektif antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi non-profit, dan komunitas lokal.	
11	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan		0		0	5	188.786.000	0	25.279.000	0	0	0	0	25.279.000	0,00	13,39	0	25.279.000	nan	inf	DAP	Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik merupakan kegiatan dalam rangka menjaga dari kerusakan agar perpustakaan elektronik yang dimiliki agar layanan	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi serta pembelian lisensi sumber daya elektronik.Kurangnya staf yang terampil dan berpengalaman	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pengembangan perpustakaan elektronik.Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung digitalisasi dan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		dinamis, konsisten, dan berkualitas baik.	dalam mengelola perpustakaan elektronik.,Biaya lisensi untuk jurnal, e-book, dan basis data elektronik yang tinggi.	pengembangan perpustakaan elektronik.			
12	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Kegiatan melalui pengolahan data dan penyajian Informasi perpustakaan, Pengukurannya dengan menghitung jumlah data dan informasi perpustakaan yang disusun	Keterbatasan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam mengelola data dan informasi perpustakaan	Kebutuhan data dan informasi perpustakaan		
13	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	0	0	15	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pengelolaan perpustakaan. Pengukurannya dengan menghitung jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina	Anggaran yang tidak memadai untuk pengadaan koleksi, teknologi, dan fasilitas perpustakaan.Kurangnya pustakawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam bidang perpustakaan	Adanya kebijakan dan regulasi yang jelas dan mendukung pembinaan perpustakaan khusus dari pemerintah pusat dan daerah, Fasilitas yang Baik: Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perpustakaan yang nyaman, aman, dan memenuhi standar nasional. Akses Teknologi: Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk komputer, akses internet, dan peralatan multimedia		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Orang	0	0	0	0	26530	177.000.000	0	2.745.000	0	0	0	0	0	2.745.000	0,00	1,55	0	2.745.000	nan	inf			
14	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	0	0	18	85.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Sosialisasi budaya baca dan literasi adalah proses di mana masyarakat, baik individu maupun kelompok, dikenalkan dan dibiasakan dengan kegiatan membaca dan menggunakan keterampilan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.	Rendahnya kesadaran tentang pentingnya budaya baca dan literasi di kalangan siswa, guru, dan masyarakat.	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung promosi budaya baca dan literasi. Keterlibatan aktif siswa, guru, dan masyarakat dalam kegiatan literasi.Pembentukan komunitas literasi lokal yang mempromosikan kebiasaan membaca.	
15	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	0	0	10	26.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.	Keterbatasan anggaran untuk Program penghargaan membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana untuk penghargaan maupun untuk kegiatan yang mendukung program gerakan membaca.	Meningkatkan motivasi individu ataupun kelompok dalam rangka melaksanakan gerakan budaya gemar membaca	
16	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	0	0	12	35.000.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	0,00	1,37	0	480.000	nan	inf	DAP	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sebuah layanan dalam rangka memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung pada peningkatan	Minimnya pemahaman tentang cara mengintegrasikan praktik inklusi dalam program literasi.Keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional bagi mereka yang terlibat dalam pendidikan inklusi	Adanya kebijakan yang mendorong inklusi sosial dalam pendidikan dan literasi.Sekolah dan lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan inklusi,Dukungan aktif dari orang tua dan komunitas dalam mempromosikan literasi inklusi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
					I	II			III	IV																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
																		kreativitas masyarakat dan mempersempit kesenjangan akses pengetahuan											
17	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang		0		0	1	30.000.000	0	2.265.000		0		0	0	0	2.265.000	0,00	7,55	0	2.265.000	nan	inf	DAP	Kegiatan duta baca yang dilakukan adalah membudayakan dan mengkampanyekan budaya baca masyarakat dan literasi	Dana yang terbatas untuk mengorganisir dan mengelola program pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi.	Adanya para duta/bunda literasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik dalam mempromosikan literasi di masyarakat
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno	jumlah		0		0	223	502.156.000		6.849.000		0		0	0	0	6.849.000	0,00	1,36	0	6.849.000	nan	inf				
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan	KCKR	0	0	0	0	2	124.900.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar		0		0	350	114.750.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam (SSKCKR) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penerbit, perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, dan lembaga lainnya	Banyak penerbit dan produsen karya rekam yang kurang menyadari atau tidak patuh terhadap kewajiban serah simpan. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pengawasan dari pihak yang berwenang.Proses administratif yang panjang dan birokrasi yang rumit bisa menghambat penerbit dalam menyerahkan karya mereka tepat waktu.	Sosialisasi yang efektif tentang pentingnya SSKCKR dan kewajiban hukum terkait dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penerbit serta produsen karya rekam, Kolaborasi antara perpustakaan, lembaga pendidikan, dan industri penerbitan dapat memperkuat proses penghimpunan dan pengelolaan karya, termasuk melalui pertukaran informasi
2	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit		0		0	2	10.150.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Koleksi serah simpan merupakan seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan perpustakaan provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit, termasuk karya revisi.	Kurang nya sosialisasi dan pemahaman penerbit dan produsen dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam menjaga kelestarian memori kolektif bangsa, Penghargaan diberikan sebagai bentuk motivasi bagi penerbit dan produsen agar terus aktif dan konsisten dalam menyerahkan karya
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	Buku	0	0	0	0	2	121.000.000	0	2.723.000	0	0	0	0	0	0	2.723.000	0,00	2,25	0	2.723.000	nan	inf				
3	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry		0		0	450	60.000.000	0	2.723.000		0		0	0	0	2.723.000	0,00	4,54	0	2.723.000	nan	inf	DAP	Penerbitan Katalog Induk Daerah (KID) merupakan salah satu upaya penting dalam pengelolaan informasi bibliografis yang memungkinkan akses terhadap koleksi perpustakaan di suatu daerah. KID mempermudah pencarian dan pemanfaatan koleksi	Keterbatasan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dapat menghambat proses digitalisasi dan integrasi data katalog perpustakaan., Anggaran yang terbatas dapat membatasi pembelian perangkat lunak manajemen perpustakaan, pelatihan staf, serta biaya operasional penerbitan KID	Dukungan Kebijakan Pemerintah, Adanya pedoman dan standar katalogisasi yang seragam dapat memastikan konsistensi dan keakuratan data bibliografis dalam KID, Kerjasama yang baik antar perpustakaan di daerah, termasuk berbagi informasi dan sumber daya, dapat mempercepat proses

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					I	II	III	IV																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
4	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah		0		0	1	61.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DAP	Penerbitan bibliografi daerah adalah proses penting dalam pengelolaan informasi lokal, yang membantu mendokumentasikan dan mengakses karya-karya yang diterbitkan di suatu daerah.	Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang bibliografi dan pengelolaan informasi dapat menghambat proses penyusunan bibliografi daerah., Kurangnya kesadaran dan partisipasi penerbit lokal dalam mendokumentasikan dan menyerahkan karya-karya mereka untuk dicatat dalam bibliografi daerah,	Dukungan dan Kebijakan Pemerintah:Kerjasama yang baik antara perpustakaan, penerbit, lembaga pendidikan, dan instansi terkait dapat memperkuat proses pengumpulan dan pengelolaan data bibliografi.Pelatihan dan pengembangan kapasitas staf perpustakaan dan lembaga terkait dalam bidang bibliografi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi penerbitan bibliografi daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital	Naskah	0	0	0	0	2	164.800.000	0	4.126.000	0	0	0	0	0	0	4.126.000	0,00	2,50	0	4.126.000	nan	inf			
5	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar		0		0	5	79.800.000	0	3.646.000		0	0	0	0	3.646.000	0,00	4,57	0	3.646.000	nan	inf	DAP	Alih media merupakan salah satu cara dalam melestarikan konten/kandungan isi informasi dari suatu koleksi untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi, pelestarian, dan kemudahan akses, perpustakaan.	Banyak masyarakat belum menyadari nilai historis, budaya, dan ilmiah dari naskah kuno. Naskah kuno sering dianggap barang lama yang tidak berguna atau tidak relevan dengan zaman sekarang.	Upaya pelestarian ini bertujuan untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau kepunahan naskah akibat usia atau kondisi lingkungan
6	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang		0		0	60	85.000.000	0	480.000		0	0	0	0	480.000	0,00	0,56	0	480.000	nan	inf	DAP	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah	Banyak anggota masyarakat yang kurang menyadari pentingnya naskah kuno sebagai warisan budaya dan sejarah, sehingga minat untuk berpartisipasi dalam pelestariannya rendah, .Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam hal perawatan dan pelestarian naskah kuno dapat mengakibatkan kerusakan atau hilangnya informasi penting	Program pendidikan dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian naskah kuno, Dukungan Pemerintah dan Lembaga Terkait,Kerjasama antara komunitas, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya pelestarian dan pendaftaran naskah kuno,Penggunaan teknologi canggih, seperti digitalisasi dan pengelolaan data berbasis komputer, dapat membantu dalam penyimpanan dan pelestarian naskah kuno
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka	Koleksi	0	0	0	0	1	91.456.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
7	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh	Eksemplar		0		0	300	55.456.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Kegiatan meliputi seleksi dan pengadaan Budaya Etnis Nusantara Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Pengadaan koleksi budaya membantu mendokumentasikan dan menjaga keberadaan budaya lokal yang mulai terpinggirkan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
			Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		yang diseleksi dan diadakan.							
8	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar		0		0	300	36.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DAP	Kegiatan pengolahan meliputi verifikasi, entry data (deskripsi Bibliografis, nomor klasifikasi, subjek, abstrak), upload cover, memasang RFID, tagging dan label. Kegiatan Penyiangan (weeding) meliputi identifikasi, memilih, dan mengeluarkan bahan perpustakaan dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap sesuai dengan keperluan masyarakat pemakai	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Memberikan edukasi dan ilmu kepada masyarakat tentang ketersediaan koleksi budaya etnis nusantara			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	nan	nan									
Predikat Kinerja																	-	-									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0		16.905.655.000	3.335.215.738	0	0	0	0	3.335.215.738	19,73	3.335.215.738	inf										
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			0	0		15.193.029.000	3.285.358.738	0	0	0	0	3.285.358.738	21,62	3.285.358.738	inf										
2.24.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0	0	100	14.659.915.000	3.282.013.738	0	0	0	0	3.282.013.738	0,00	22,39	0	3.282.013.738	nan	inf						
2.24.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	85	196.500.000	0	17.120.000	0	0	0	0	17.120.000	0,00	8,71	0	17.120.000	nan	inf				
1	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	0	6	40.000.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00	3,00	0	1.200.000	nan	inf	DAP	Dokumen perencanaan perangkat daerah ini penting untuk menyusun strategi dan rencana kerja dalam rangka mencapai tujuan dan visi pemerintah daerah	Kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan, baik karena keterbatasan teknologi maupun kurangnya koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, dapat menghambat analisis yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan.	Ketersediaan data yang akurat , Komitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana yang disusun dapat mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang lebih terarah ,	
2	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	5	55.500.000	0	2.640.000	0	0	0	0	2.640.000	0,00	4,76	0	2.640.000	nan	inf	DAP	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kualitas data yang rendah, termasuk ketidakakuratan dan ketidaktersediaan data yang diperlukan, dapat menghambat penyusunan laporan kinerja yang akurat dan relevan. , Kurangnya pemahaman atau komitmen dari SKPD terkait pentingnya dan proses penyusunan laporan kinerja yang baik,Ketidajelasan dalam indikator kinerja atau perbedaan dalam penilaian kinerja	Ketersediaan staf yang terlatih dan memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam analisis data dan penyusunan laporan kinerja dapat meningkatkan kualitas laporan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat juga dapat mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, Implementasi sistem informasi manajemen yang efektif dapat mendukung pengumpulan data secara real-time dan akurat dari SKPD, Komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																								dan pelaporan kinerja SKPD dapat mendorong penyusunan laporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, koordinasi yang efektif dalam proses penyusunan laporan		
3	2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	4	57.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi	Kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja yang objektif atau dalam mengukur pencapaian target kinerja,Ketidakjelasan dalam menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang spesifik dan terukur	Dukungan yang kuat dari pimpinan perangkat daerah, yang mendukung menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Komitmen untuk menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan, Adanya sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, dengan indikator kinerja yang jelas dan metode pengukuran yang tepat, dapat memfasilitasi proses evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan	
4	2.24.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	1	43.500.000	1	13.280.000	0	0	0	0	1	13.280.000	100,00	30,53	1	13.280.000	inf	inf	DAP	Pelaksanaan Forum Perangkat bertujuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah	Tidak ada permasalahan	Dukungan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah
																					nan	nan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0	100	11.257.000.000	0	2.496.043.524	0	0	0	0	0	2.496.043.524	0,00	22,17	0	2.496.043.524	nan	inf			
5	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	72	10.997.000.000	0	2.450.515.524	0	0	0	0	0	2.450.515.524	0,00	22,28	0	2.450.515.524	nan	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Adanya regulasi terkait pembayaran gaji dan tunjangan ASN	
6	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	2	175.000.000	0	41.130.000	0	0	0	0	0	41.130.000	0,00	23,50	0	41.130.000	nan	inf	DAP	Perubahan yang sering dalam kebijakan pemerintahan dapat menyulitkan SKPD dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.	Komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap peraturan , serta upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menjadi pendorong penting dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan SKPD.	
7	2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	14	85.000.000	3	4.398.000	0	0	0	0	3	4.398.000	21,43	5,17	3	4.398.000	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara efisien dan akurat, Koordinasi yang baik antar bagian atau unit di dalam SKPD dalam pengumpulan data dan informasi keuangan	
																					nan	inf				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										
Predikat Kinerja																										
	2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0	0	0	100	102.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
8	2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	1	52.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Tidak ada permasalahan	Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah mendorong	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
																				SKPD untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.,								
9	2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	21.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	Komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk dalam pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, akan memperkuat pengawasan dan pengendalian							
10	2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	29.365.000	0		0		0	0	0	0	0	0	Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Sistem Informasi yang Mendukung,Pengawasan dan Pengendalian Internal							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan											
Predikat Kinerja																-	-											
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	121.900.000	0	71.149.999	0	0	0	0	0	0	71.149.999	0,00	58,37	0	71.149.999	nan	inf			
11	2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	72	54.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	Adanya peraturan yang mengatur tentang standar pakaian dinas dan atribut kelengkapannya merupakan landasan penting. Regulasi ini biasanya tertuang dalam peraturan pemerintah atau daerah yang mengatur jenis, jumlah, dan tata cara pengadaan pakaian dinas, sehingga proses pengadaan sesuai dengan standar yang berlaku							
12	2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	72	67.900.000	72	71.149.999		0	0	0	72	71.149.999	100,00	104,79	72	71.149.999	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Kebutuhan pengembangan kompetensi yang jelas yaitu Adanya pemetaan kompetensi yang jelas berdasarkan tugas dan fungsi pegawai sangat mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan peran dan tanggung jawab pegawai akan membuat program Diklat lebih relevan dan bermanfaat, kesadaran pegawai akan pentingnya pelatihan, tersedianya anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan											
Predikat Kinerja																-	-											
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	315.650.000	0	228.126.083	0	0	0	0	0	0	228.126.083	0,00	72,27	0	228.126.083	nan	inf			
13	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	8	27.500.000	2	10.575.000		0	0	0	2	10.575.000	25,00	38,45	2	10.575.000	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Kebutuhan akan sistem listrik yang memadai di kantor, termasuk penerangan dan kelistrikan untuk peralatan elektronik, merupakan faktor utama pendorong penyediaan komponen instalasi listrik.	
14	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	10	12.500.000	0	5.941.500		0	0	0	0	5.941.500	0,00	47,53	0	5.941.500	nan	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Faktor utama yang mendorong penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
																					kebutuhan operasional yang jelas, memastikan bahwa setiap bagian kantor memiliki perlengkapan yang memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.									
15	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	25	32.000.000	0	3.366.000		0		0	0	0	0	3.366.000	0,00	10,52	0	3.366.000	nan	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Faktor utama yang mendorong penyediaan bahan logistik kantor adalah kebutuhan operasional yang jelas, memastikan bahwa setiap bagian kantor memiliki perlengkapan yang memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.	
16	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	6	21.000.000	0		0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DAP	Tidak ada permasalahan	Faktor utama yang mendorong penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah kebutuhan operasional yang jelas, memastikan bahwa setiap bagian kantor memiliki barang cetakan yang memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
17	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	120	20.500.000	1	3.220.000		0		0		0	1	3.220.000	0,83	15,71	1	3.220.000	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang akurat menjadi pendorong utama dalam penyediaan bahan bacaan. Pegawai dan pemangku kepentingan memerlukan akses ke bahan bacaan yang relevan untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik.	
18	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	25	191.850.000	20	205.023.583		0		0		0	20	205.023.583	80,00	106,87	20	205.023.583	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan	Salah satu faktor utama yang mendorong penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi adalah kebutuhan untuk menyinkronkan program, kebijakan, dan kegiatan antara SKPD. Koordinasi yang baik memastikan bahwa program yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta berjalan secara harmonis antar SKPD., Agenda dan Tujuan Rapat yang Jelas, Keterlibatan SDM yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, memfasilitasi, dan menyimpulkan rapat koordinasi menjadi faktor pendorong yang penting. SDM yang berpengalaman dan menguasai materi yang dibahas dalam rapat akan memastikan bahwa diskusi berjalan lancar dan produktif, Ketersediaan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan rapat, termasuk untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan fasilitas rapat,	
19	2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	300	10.300.000	0		0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DAP	Tidak ada permasalahan	Kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi pendorong utama. Dengan adanya penatausahaan arsip yang baik, informasi dapat diakses dengan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)		(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					mudah oleh publik, yang akan mendukung pertanggungjawaban SKPD terhadap masyarakat.											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																
Predikat Kinerja																							-	-																
	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	57.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan																
20	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	57.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Tidak ada permasalahan			Kebutuhan yang teridentifikasi dengan baik dalam operasional sehari-hari menjadi pendorong utama dalam pengadaan peralatan dan mesin. Ketika suatu unit kerja mengetahui dengan jelas jenis peralatan dan mesin yang dibutuhkan, pengadaan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien.											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																
Predikat Kinerja																							-	-																
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	0	0	100	2.422.640.000	0	437.901.432	0	0	0	0	0	0	437.901.432	0,00	18,08	0	437.901.432	nan	inf															
21	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	15.600.000	1	3.984.500	0	0	0	0	1	3.984.500	100,00	25,54	1	3.984.500	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan			Kebutuhan untuk berkomunikasi secara efisien dan jelas antara berbagai pihak dalam organisasi menjadi pendorong utama. Surat menyurat yang baik memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat, mengurangi risiko kesalahpahaman.											
22	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	757.040.000	3	108.421.109	0	0	0	0	3	108.421.109	25,00	14,32	3	108.421.109	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan			Melaksanakan operasional kantor, adanya regulasi yang mendukung, tersedianya anggaran											
23	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	3	1.650.000.000	0	325.495.823	0	0	0	0	0	325.495.823	0,00	19,73	0	325.495.823	nan	inf	DAP	Tidak ada permasalahan			Adanya kebutuhan terhadap jasa penganman kator, kebersihan dan sopir dalam melaksanakan operasional kantor, adanya aturan yang berlaku											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	inf																
Predikat Kinerja																							-	-																
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	0	0	0	0	100	185.400.000	0	31.672.700	0	0	0	0	0	0	31.672.700	0,00	17,08	0	31.672.700	nan	inf															
24	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	10	117.900.000	1	22.287.700	0	0	0	0	1	22.287.700	10,00	18,90	1	22.287.700	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan			Kepatuhan Terhadap Regulasi yang ada, kebutuhan operasional,											
25	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	54	62.500.000	4	9.385.000	0	0	0	0	4	9.385.000	7,41	15,02	4	9.385.000	inf	inf	DAP	Tidak ada permasalahan			Pemeliharaan rutin memastikan bahwa peralatan dan mesin selalu dalam kondisi siap digunakan, mendukung kelancaran operasi sehari-hari. Mesin yang terawat dengan baik dapat beroperasi dengan efisien, mengurangi											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
																								waktu henti dan meningkatkan produktivitas.,Pemeliharaan yang rutin membantu memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan, Mematuhi standar keselamatan yang berlaku mendorong organisasi untuk melaksanakan pemeliharaan secara teratur.				
26	2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	10	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Tidak ada permasalahan	Adanya regulasi dan standar yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja mendorong pemeliharaan sarana dan prasarana agar memenuhi kriteria yang ditetapkan., Pemeliharaan rutin memastikan bahwa fasilitas seperti ruang kerja, toilet, dan area umum dalam kondisi baik untuk mendukung operasional sehari-hari., Sarana dan prasarana yang terawat dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai., Dengan pemeliharaan yang tepat, umur bangunan dapat diperpanjang, sehingga investasi awal menjadi lebih ekonomis.			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan							
Predikat Kinerja																				-	-							
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan bertanggung jawaban	Persen		0		0	73	277.923.000		1.815.000		0		0	0	0	0	1.815.000	0,00	0,65	0	1.815.000	nan	inf		
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur	Pencipta Arsip	0	0	0	0	10	148.523.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan		
1	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	Arsip		0		0	300	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari OPD ke LKD, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna	Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengelolaan arsip dan proses pengumpulan arsip	Kebijakan yang jelas dan regulasi yang mendukung dapat memberikan kerangka kerja yang tegas dan panduan yang diperlukan untuk penyusutan arsip dinamis	
2	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Medikan dan diautentikasi	Arsip		0		0	150	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pelaksanaan alih media arsip dinamis dan autentikasi merupakan proses penting dalam pengelolaan arsip untuk memastikan bahwa arsip tersebut tetap tersedia, terlindungi, dan dapat diakses di masa depan.	Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk proses alih media dan autentikasi, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan.,Kekurangan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi alih media dan proses autentikasi dapat menghambat pelaksanaan yang efektif	Kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan kerangka kerja dan panduan yang jelas untuk pelaksanaan alih media dan autentikasi.,Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras khusus untuk digitalisasi dan autentikasi arsip, dapat mempermudah proses alih media.	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
3	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip	0	0	300 17.500.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	Penciptaan dan pemeliharaan arsip dinamis adalah bagian penting dari manajemen informasi dalam organisasi. Arsip dinamis adalah arsip yang masih aktif digunakan untuk keperluan administrasi, hukum, dan operasional sehari-hari	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya manajemen arsip yang baik di antara staf dapat menyebabkan penciptaan dan pemeliharaan arsip yang kurang efektif. Kekurangan staf yang terlatih dalam manajemen arsip dapat menghambat proses penciptaan dan pemeliharaan arsip dinamis.	Kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah atau manajemen organisasi dapat memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas untuk manajemen arsip.
4	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	Orang	0	0	50 20.000.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	OPD dan Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pemilihan arsiparis teladan untuk meningkatkan motivasi SDM kearsipan dalam berkariir sebagai arsiparis dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan	Banyak arsiparis atau instansi belum memahami secara menyeluruh kriteria dan indikator yang digunakan dalam seleksi arsiparis teladan.	Arsiparis teladan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola arsip, mulai dari pengorganisasian, penyimpanan, hingga pemeliharaan arsip agar tetap terjaga dengan baik dan mudah diakses, dengan ada nya kegiatan ini arsiparis menjadi termotivasi untuk melakukan tugas dengan baik
5	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL,	Instansi	0	0	30 15.000.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	Pengelolaan arsip dinamis secara elektronik maupun konvensional yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip		
			OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi			30	0				0	0,00	0	nan	DAP			
6	2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen	0	0	1 7.000.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	Pengukuran penyusunan database Arsiparis dilakukan dengan menghitung jumlah arsiparis yang ada di Provinsi		
7	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit	0	0	1 5.000.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	Lembaga Kearsipan Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis sesuai standar kualitas dan spesifikasi		
8	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Laporan	0	0	19 6.523.000	0	0	0	0	0	0 0,00 0,00	0	nan	DAP	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan meliputi hasil pembinaan yang telah dilakukan lembaga kearsipan daerah kepada perangkat daerah provinsi. BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi. Pengukuran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dilakukan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		dengan menghitung jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan							
9	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga		0		0	31	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengawasan arsip dinamis yang menjadi kewenangan provinsi memerlukan kerjasama berbagai pihak dan dukungan infrastruktur yang memadai		
10	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Lembaga		0		0	6	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	OPD, BUMD/SDM Kearsipan yang dapat diberikan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi tertib kebijakan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumberdaya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan kearsipan. Pengukuran pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip dilakukan dengan menghitung jumlah OPD, BUMD, SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Kekurangan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan arsip dinamis, Kesadaran yang rendah akan pentingnya pengelolaan arsip dinamis serta kepatuhan yang kurang Arsip dinamis yang disimpan dalam kondisi fisik yang tidak memadai dapat mengakibatkan kerusakan atau hilangnya data penting, menyulitkan pengawasan dan pengelolaan	Kebijakan yang jelas dan regulasi yang mendukung dapat memberikan kerangka kerja yang tegas dan panduan yang diperlukan untuk pengawasan arsip dinamis, Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan arsip dinamis, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan instansi terkait tentang pentingnya pengelolaan arsip dinamis
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan								
Predikat Kinerja																		-	-								
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah	Pencipta Arsip	0	0	0	0	5	92.500.000	0	1.815.000	0	0	0	0	0	1.815.000	0,00	1,96	0	1.815.000	nan	inf			
			Jumlah Akses layanan Arsip Statis	Pengguna Arsip	0		0		15		0		0	0	0	0		0,00		0	nan						
			Jumlah arsip statis yang dipreservasi	Daftar Arsip	0		0		1		0		0	0	0	0		0,00		0	nan						
11	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip		0		0	100	22.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah proses penting untuk memastikan bahwa arsip yang bernilai sejarah dan administratif terjaga dengan baik dan dapat diakses untuk kepentingan publik.	Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengelolaan arsip dan proses pengumpulan serta penyampaian salinan otentik dapat menghambat pelaksanaan yang efektif, Anggaran yang tidak memadai untuk operasional, pelatihan, dan teknologi dapat menjadi hambatan utama dalam pengumpulan dan penyampaian arsip kepada ANRI.	Kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan panduan yang jelas dan mendorong proses pengumpulan dan penyampaian arsip, Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, seperti sistem manajemen arsip digital dan perangkat lunak khusus untuk membuat salinan otentik, dapat mempermudah proses pengumpulan dan penyampaian.
12	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang		0		0	3	22.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengembangan khazanah arsip statis melalui wawancara sejarah lisan merupakan proses penting untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi sejarah dan budaya dari	Kesulitan dalam mendapatkan akses ke informan yang tepat dan ketersediaan waktu mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara dapat menjadi penghambat utama. Kurangnya pemahaman tentang nilai dan pentingnya pelestarian sejarah lisan di	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan landasan hukum dan administratif yang diperlukan untuk pengembangan khazanah arsip statis. Pemanfaatan teknologi informasi untuk

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
																						sudut pandang langsung saksi sejarah	kalangan masyarakat umum dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam wawancara.	merekam, mengelola, dan menyimpan wawancara sejarah lisan secara digital dapat mempermudah akses dan pelestarian informasi tersebut												
13	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Arsip		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penyusunan penerbitan naskah sumber arsip meliputi penentuan tema, riset sejarah dan identifikasi khazanah arsip statis , penyusunan outline/sistematika penyusunan, penelusuran arsip, pengolahan hasil penelusuran arsip, penyusunan draft, editing naskah, penyusunan layout, pencetakan draft final, peluncuran naskah sumber arsip	Dana yang terbatas untuk biaya penerjemahan, penulisan, penyuntingan, dan produksi buku atau publikasi lainnya dapat membatasi skala dan kualitas penerbitan naskah sumber arsip.	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penerbitan naskah sumber arsip.										
14	2.24.02.1.02.0006	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip		0		0	3002	27.500.000	0	1.815.000	0	0	0	0	0	0,00	6,60	0	1.815.000	nan	inf	DAP	Akuisisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, - Penyimpanan - Reproduksi/Digitalisasi - Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksesibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik	Kurangnya pemahaman tentang nilai dan pentingnya arsip statis di kalangan pemberi atau pemilik potensial dapat mengurangi motivasi mereka untuk menjual atau menyumbangkan arsip.	Adanya kebijakan yang mendukung dari pemerintah atau lembaga terkait, seperti insentif pajak atau subsidi, dapat mendorong proses akuisisi arsip statis. Peningkatan kesadaran masyarakat atau pemberi arsip tentang pentingnya pelestarian dan aksesibilitas arsip statis dapat mendorong mereka untuk berkontribusi dalam proses akuisisi.									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan															
Predikat Kinerja																				-	-															
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Simpul Jaringan	0	0	0	0	5	36.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan													
15	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna		0		0	500	23.900.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Kekurangan staf yang terlatih dalam pengelolaan sistem informasi kearsipan atau pengoperasian JIKN dapat menjadi penghambat dalam penyediaan layanan yang efektif.	Adanya dukungan kuat dari kebijakan nasional untuk integrasi dan pengembangan sistem informasi kearsipan, termasuk melalui JIKN, dapat memperkuat implementasi di tingkat daerah dan provinsi.											
16	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan		0		0	1	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Kekurangan staf yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam manajemen kearsipan	Adanya kebijakan yang mendukung dari pemerintah dalam mengembangkan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan di tingkat daerah provinsi dapat											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					I	II			III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																				memperkuat upaya pemberdayaan.							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan										
Predikat Kinerja																-	-										
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	Persen		0		0	76,66	181.313.000	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000	0,00	0,84	0	1.530.000	nan	inf					
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Pencipta Arsip	0	0	0	0	12	67.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		0		0	500	67.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.	Sulit untuk memvalidasi apakah arsip memang sudah melewati masa retensi atau tidak, terutama jika data tersebut tersebar di banyak tempat atau dalam format yang berbeda, Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, atau teknologi untuk mengidentifikasi, menilai, dan memusnahkan arsip secara tepat waktu dapat menjadi hambatan signifikan,	Adanya kebijakan atau peraturan yang jelas dan mendukung mengenai pemusnahan arsip dapat menjadi faktor pendorong. Jika organisasi memiliki pedoman yang baik, ini dapat mempermudah proses penilaian dan pelaksanaan pemusnahan arsip. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih dapat memfasilitasi identifikasi dan manajemen arsip yang akan dimusnahkan secara lebih efisien
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan										
Predikat Kinerja																-	-										
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan	Kali	0	0	0	0	9	57.913.000	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000	0,00	2,64	0	1.530.000	nan	inf			
2	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		0		0	800	34.000.000	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000	0,00	4,50	0	1.530.000	nan	inf	DAP	Tindakan evakuasi arsip dilaksanakan dengan cara memindahkan fisik arsip dari lokasi bencana ke lokasi tempat penyimpanan arsip sementara. Pengukuran Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang diperbaiki setelah kegiatan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	
3	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		0		0	600	23.913.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan										
Predikat Kinerja																-	-										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan	OPD	0	0	0	0	3	26.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan						
4	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar		0		0	4	26.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah.				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis	Daftar Arsip	0	0	0	0	6	29.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					
5	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		0		0	1	14.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip merupakan penilaian kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan. Dimana arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.			
6	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		0		0	1	15.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DAP	Pengukuran Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip dilakukan dengan menghitung Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip sebagai bukti autentik	Keterbatasan dalam teknologi atau infrastruktur yang digunakan untuk alih media arsip dapat menyulitkan proses penilaian dan penetapan hasil dengan akurat dan efisien, Kurangnya pelatihan atau keterampilan yang memadai dari personel yang terlibat dalam proses alih media arsip dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian dan penetapan hasil.	Adanya kepatuhan terhadap standar, pedoman, dan regulasi yang berlaku dalam proses alih media arsip,Ketika organisasi mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, ini dapat memperkuat keabsahan arsip yang dialihkan, Penggunaan teknologi dan metode modern dalam proses alih media, seperti pemindaian digital dan teknik validasi digital, dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi penilaian serta penetapan hasil alih media arsip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan												
Predikat Kinerja																-	-												
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi	regulasi		0		0	1	73.878.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan						
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin	SOP	0	0	0	0	1	73.878.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
		Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	penggunaan arsip yang bersifat tertutup		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP		0		0	1	30.878.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		nan	nan	DAP	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup dilakukan untuk memberikan panduan kepada lembaga kearsipan dalam menyediakan akses arsip yang dinyatakan tertutup. Pengukuran Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan dilakukan dengan menghitung Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan			
2	2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip		0		0	1	43.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DAP	Daftar Arsip Statis Tertutup adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang dinyatakan tertutup. Pengukuran Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan.		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan									
Predikat Kinerja																		-	-									

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
								I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				56.230.000.000		0		103.380.937.754	6.344.510.106		0	0	0	6.344.510.106	6,14	6.344.510.106		11,28					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				56.230.000.000		0		103.380.937.754	6.344.510.106		0	0	0	6.344.510.106	6,14	6.344.510.106		11,28					
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				56.230.000.000		0		103.380.937.754	6.344.510.106		0	0	0	6.344.510.106	6,14	6.344.510.106		11,28					
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen		56.230.000.000	1.84	0	3,78	11.997.093.600	0	3.096.000	0	0	0	0	3.096.000	0,00	0,03	1.84	3.096.000	inf	0,01		
			-	-			0		0		0					0	nan		0		nan				
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Usaha Budiadaya Air Laut dan Payau	Orang	420	0	0	0	90	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan		
1	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	0	0	0	2	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan			
Predikat Kinerja																					-	-			
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persen	0	45.430.000.000	0	0	100	5.795.992.800	0	3.096.000	0	0	0	0	3.096.000	0,00	0,05	0	3.096.000	nan	0,01		
			-	-	0		0		0		0		0	0	0	0	nan		0		nan				
2	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD BPBALP]	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	13.650.000.000		0	2	2.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DKP	
3	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP	
4	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD BPBALP]	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	10.000.000.000		0	5	1.145.992.800	0	3.096.000	0	0	0	0	3.096.000	0,00	0,27	0	3.096.000	0,00	0,03	DKP	
5	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	19	19.900.000.000		0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00	DKP	
6	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD BPBALP]	Jumlah Pembudidaya	Orang	10	1.190.000.000		0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	0,00	DKP	
7	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	19	690.000.000		0	3	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan			
Predikat Kinerja																					-	-			
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-	0	10.800.000.000	0	0	0	6.076.100.800	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
8	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0	0	11	5.476.100.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
9	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	10.800.000.000	0	0	4	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	0	0	0	0	100	43.100.394.138	0	5.847.168.207	0	0	0	0	5.847.168.207	0,00	13,57	0	5.847.168.207	nan	inf				
			-	-					0		0					0	nan		0		nan						
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	5	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
2	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	6	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
3	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP				
4	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		0		0	0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	100	23.050.000.000	0	4.920.090.572	0	0	0	0	4.920.090.572	0,00	21,35	0	4.920.090.572	nan	inf				
5	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	151	22.000.000.000	0	4.817.730.572	0	0	0	0	4.817.730.572	0,00	21,90	0	4.817.730.572	nan	inf	DKP			
6	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	2	900.000.000	0	102.360.000	0	0	0	0	102.360.000	0,00	11,37	0	102.360.000	nan	inf	DKP			
7	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	555.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
8	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
9	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
10	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	630.946.238	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
11	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	198	277.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
12	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	198	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
13	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	198	53.446.238	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	100	3.462.361.704	0	460.032.699	0	0	0	0	460.032.699	0,00	13,29	0	460.032.699	nan	inf			
			-	-	0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan					
14	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
15	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PPMHP]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	3.000.000	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0,00	25,00	0	750.000	nan	inf	DKP		
16	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
17	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	22.838.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
18	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	12.727.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
19	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
20	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
21	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
22	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
23	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
24	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
25	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
26	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD KPSPDKPI]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
								I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
27	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
28	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PPMHP]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
29	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
30	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD KPSDKP]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
31	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
32	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
33	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
34	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	200.000.000	0	8.899.400	0	0	0	0	8.899.400	0,00	4,45	0	8.899.400	nan	inf	DKP			
35	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PPMHP]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	2.198.700	0	0	0	0	2.198.700	nan	inf	0	2.198.700	nan	inf	DKP			
36	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
37	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	nan	inf	0	500.000	nan	inf	DKP			
38	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	245.103.104	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00	4,08	0	10.000.000	nan	inf	DKP			
39	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
40	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPSDKP]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
41	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	50.000.000	0	961.800	0	0	0	0	961.800	0,00	1,92	0	961.800	nan	inf	DKP			
42	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PPMHP]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
43	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
44	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	nan	inf	0	1.800.000	nan	inf	DKP			
45	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
46	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
47	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BPBALP]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
48	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PPMHP]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
49	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
										I	II	III	IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp																		
		[UPTD PPW III]	Undangan yang Disediakan																																											
50	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	8	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP																					
51	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PPW II]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																					
52	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PPW I]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																					
53	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																					
54	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PPW I]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	16.390.000		0	0	0	0	16.390.000	nan	inf	0		16.390.000	nan	inf	DKP																				
55	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BPBALP]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	24.380.000		0	0	0	0	24.380.000	nan	inf	0		24.380.000	nan	inf	DKP																				
56	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PPW II]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	27.681.300		0	0	0	0	27.681.300	nan	inf	0		27.681.300	nan	inf	DKP																				
57	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PPMHP]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	2.949.750		0	0	0	0	2.949.750	nan	inf	0		2.949.750	nan	inf	DKP																				
58	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	2.283.693.200	0	308.267.849		0	0	0	0	308.267.849	0,00	13,50	0		308.267.849	nan	inf	DKP																				
59	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PPW III]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	17.033.900		0	0	0	0	17.033.900	nan	inf	0		17.033.900	nan	inf	DKP																				
60	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0		0	38.220.000		0	0	0	0	38.220.000	nan	inf	0		38.220.000	nan	inf	DKP																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	0		0	0	0	100	3.992.033.416	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan																				
		-	-	-	0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan																								
61	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	400.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP																				
62	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW II]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	2	92.826.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP																				
63	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW I]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	61.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP																				
64	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPMHP]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	0		0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																				
65	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW III]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	3	450.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP																				
66	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BPBALP]	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																				
67	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit		0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD KPSPDKP]	Disediakan																									
68	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD PPW II]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	5	102.157.756	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
69	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
70	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BPBALP]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	149.756.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
71	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD PPW I]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	438.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
72	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD PPW III]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	7	398.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
73	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD PPMHP]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
74	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	2	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
75	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	89.013.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
76	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	400.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
77	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPMHP]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	106.647.460	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
78	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BPBALP]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	6	87.613.200	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
79	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW I]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	6	112.992.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
80	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW II]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	16	391.028.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
81	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW III]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	212.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
82	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BPBALP]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
83	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW III]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
84	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW II]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
85	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPMHP]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
86	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DKP			
87	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW I]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			
88	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Bangunan Lainnya [UPTD KPSDKP]																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	0	0	100	6.252.300.000	0	462.222.436	0	0	0	0	462.222.436	0,00	7,39	0	462.222.436	nan	inf						
			-	-	0		0		0		0		0	0	0		nan		0		nan								
89	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD PPMHP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
90	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD PPW I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
91	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD KPSDKP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
92	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	7.500.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00	16,00	0	1.200.000	nan	inf	DKP					
93	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD PPW III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
94	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD PPW II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
95	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BPBALP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
96	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPSDKP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	295.000.000	3	37.446.536	0	0	0	3	37.446.536	25,00	12,69	3	37.446.536	inf	inf	DKP					
97	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	515.000.000	3	88.443.040	0	0	0	3	88.443.040	25,00	17,17	3	88.443.040	inf	inf	DKP					
98	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PPMHP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	100.000.000	3	16.691.346	0	0	0	3	16.691.346	25,00	16,69	3	16.691.346	inf	inf	DKP					
99	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BPBALP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	360.000.000	3	69.147.676	0	0	0	3	69.147.676	25,00	19,21	3	69.147.676	inf	inf	DKP					
100	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PPW I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	448.000.000	0	55.117.574	0	0	0	0	55.117.574	0,00	12,30	0	55.117.574	nan	inf	DKP					
101	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PPW II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	756.000.000	3	167.365.019	0	0	0	3	167.365.019	25,00	22,14	3	167.365.019	inf	inf	DKP					
102	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PPW III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	300.000.000	3	23.346.245	0	0	0	3	23.346.245	25,00	7,78	3	23.346.245	inf	inf	DKP					
103	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PPW I]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
104	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PPMHP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
105	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PPW III]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
106	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PPW II]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
107	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPSDKP]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					
108	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		0		0	0		0		0	0	0	0	nan	nan	0		0	nan	nan	DKP					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%					(16)	(17)	(18)	(19)
		[UPTD BPBALP]	Disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
109	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	63	3.470.800.000	0	3.465.000		0	0	0	3.465.000	0,00	0,10	0	3.465.000	nan	inf	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	0	0	0	0	100	4.657.752.780	0	4.822.500	0	0	0	0	4.822.500	0,00	0,10	0	4.822.500	nan	inf					
			-	-	0		0		0		0		0	0	0		nan		0		nan							
110	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	329.200.000	0	187.800		0	0	0	187.800	0,00	0,06	0	187.800	nan	inf	DKP				
111	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BPBALP]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	84.800.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
112	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW II]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	35.700.000	0	785.000		0	0	0	785.000	0,00	2,20	0	785.000	nan	inf	DKP				
113	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPSDKP]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	25.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
114	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPMHP]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	15.000.000	0	2.145.000		0	0	0	2.145.000	0,00	14,30	0	2.145.000	nan	inf	DKP				
115	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW III]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	2.300.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
116	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PPW I]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	0	57.000.000	0	979.700		0	0	0	979.700	nan	1,72	0	979.700	nan	inf	DKP				
117	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD KPSDKP]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	3	9.150.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
118	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	75.000.000	0	725.000		0	0	0	725.000	0,00	0,97	0	725.000	nan	inf	DKP				
119	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPMHP]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
120	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BPBALP]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP				
121	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW I]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP				
122	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW II]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	3	72.430.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
123	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW III]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
124	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PPW II]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	116.922.780	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
125	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PPMHP]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
126	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
127	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PPW I]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
128	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BPBALP]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
129	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PPW III]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
130	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	8	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
131	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPMHP]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	25.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
132	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW III]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
133	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW I]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
134	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
135	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PPW II]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
136	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD BPBALP]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang		0		0	25.000	3.650.000.000	0	103.769.650		0	0	0	103.769.650	0,00	2,84	0	103.769.650	nan	inf			
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2					350		0					0	0,00		0		nan					
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan					7		0					0	0,00		0		nan					
			Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Persen			66.04		64,71		0					0	0,00		66.04		inf					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			-	-			0		0		0				0											
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Kab/Kota	7	0	7	0	7	2.450.000.000	0	103.769.650	0	0	0	0	103.769.650	0,00	4,24	7	103.769.650	100,00	inf			
			-	-	0		0		0		0		0	0	0	0	nan		0		nan					
1	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan	Ha	18.19	0		0	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0,00	nan	DKP		
			Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha					0		0					0	nan		0		nan		DKP			
2	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD KPSPDKP]	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan	Ha		0		0	332510.53	1.500.000.000	0	103.769.650		0	0	0	103.769.650	0,00	6,92	0	103.769.650	nan	inf	DKP		
			Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha					332510.53		0					0	0,00		0		nan		DKP			
3	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha		0		0	0.5	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP		
4	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang		0		0	0	600.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kab/Kota	0	0	0	0	7	1.200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan		
5	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	5000	1.050.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP		
6	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		0		0	3	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen		0		0	100	28.062.725.176	0	302.469.199		0	0	0	0	302.469.199	0,00	1,08	0	302.469.199	nan	inf		
			Jumlah produksi perikanan tangkap	ton					230.081		0					0		0,00		0		nan				
			Jumlah sarana penangkapan ikan	unit					1.768		0					0		0,00		0		nan				
			Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit					3		0					0		0,00		0		nan				
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen					1,11		0					0		0,00		0		nan				
			-	-					0		0					0		nan		0		nan				
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut	Persen	0	0	0	0	100	15.082.029.200	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan		
1	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen		0		0	1	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP	
2	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		0		0	1160	14.932.029.200	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
									I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat	unit	0	0	0	0	200	1.925.741.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
3	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit		0		0	200	1.925.741.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persen	0	0	0	0	100	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
			-	-	0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
4	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase		0		0	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
5	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil [UPTD PPW I]	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase		0		0	100	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	10.354.954.276	0	302.469.199	0	0	0	0	0	302.469.199	nan	2,92	0	302.469.199	nan	inf			
6	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW II]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		0		0	3	1.892.447.929	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
7	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW I]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		0		0	3	2.825.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
8	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW III]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		0		0	3	1.650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
9	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW I]	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		0		0	1	1.500.000.000	0	55.255.050	0	0	0	0	0	55.255.050	0,00	3,68	0	55.255.050	nan	inf	DKP		
10	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW II]	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		0		0	3	1.487.506.347	0	232.309.849	0	0	0	0	0	232.309.849	0,00	15,62	0	232.309.849	nan	inf	DKP		
11	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW III]	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		0		0	1	1.000.000.000	0	14.904.300	0	0	0	0	0	14.904.300	0,00	1,49	0	14.904.300	nan	inf	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
12	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen		0		0	4	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen		0		0	90	10.523.622.300	0	86.539.350	0	0	0	0	86.539.350	0,00	0,82	0	86.539.350	nan	inf				
			-	-					0		0					0		nan		0		nan					
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kab/Kota	0	0	0	0	7	10.048.622.300	0	86.539.350	0	0	0	0	86.539.350	0,00	0,86	0	86.539.350	nan	inf				
			-	-	0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
1	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara		0		0	12	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
2	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi		0		0	0	3.000.000.000	0	44.712.900	0	0	0	0	44.712.900	nan	1,49	0	44.712.900	nan	inf	DKP			
3	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit		0		0	4	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
4	3.25.05.1.01.0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit		0		0	1	5.538.622.300	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
5	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		0		0	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
6	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi [UPTD KPSPDKP]	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		0		0	0	700.000.000	0	41.826.450	0	0	0	0	41.826.450	nan	5,98	0	41.826.450	nan	inf	DKP			
7	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat		0		0	6	360.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa	Kab/Kota	0	0	0	0	19	475.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			
8	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha		0		0	0	475.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DKP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton		0		0	20.832	6.047.102.540	0	1.467.700	0	0	0	0	1.467.700	0,00	0,02	0	1.467.700	nan	inf				
			Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th					42,4		0					0		0,00		0		nan					
			Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Persen					8,05		0					0		0,00		0		nan					
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Kab/Kota	0	0	0	0	19	1.050.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%			(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																										
1	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen		0		0	1	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	Kab/Kota	0	0	0	0	19	3.147.102.540	0	1.467.700	0	0	0	0	0	1.467.700	0,00	0,05	0	1.467.700	nan	inf				
2	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan		0		0	3	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
3	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD PPMHP]	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan		0		0	5	700.000.000	0	1.467.700	0	0	0	0	1.467.700	0,00	0,21	0	1.467.700	nan	inf	DKP				
4	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan		0		0	3	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
5	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar [UPTD PPMHP]	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan		0		0	2	1.047.102.540	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan pengolahan ikan	Kab/Kota	0	0	0	0	19	1.850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
6	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Unit Usaha		0		0	0	1.850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DKP				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	(Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PARIWISATA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DINAS PARIWISATA				187.542.870.000		109.141.283.091		38.386.130.000		3.203.807.984	0	0	0	3.203.807.984		8,35		112.345.091.075		59,90					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				187.542.870.000		109.141.283.091		38.386.130.000		3.203.807.984	0	0	0	3.203.807.984		8,35		112.345.091.075		59,90					
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				187.542.870.000		109.141.283.091		38.386.130.000		3.203.807.984	0	0	0	3.203.807.984		8,35		112.345.091.075		59,90					
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen		60.132.710.000	300	35.084.520.091	100	15.263.816.000	0	2.253.984.784	0	0	0	2.253.984.784	0,00	14,77	300	37.338.504.875	inf	62,09					
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evalausi Kinerja Dinas	Tahun	5	847.650.000	3	508.590.000	1	198.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	508.590.000	60,00	60,00				
1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	148.650.000	15	89.190.000	5	29.730.000	2	0	0	0	0	2	0	40,00	0,00	17	89.190.000	68,00	60,00	DISPAR			
2	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	250.000.000	9	150.000.000	3	79.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	150.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	199.000.000	3	119.400.000	1	39.800.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	4	119.400.000	80,00	60,00	DISPAR			
4	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	5	250.000.000	3	150.000.000	1	50.000.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	4	150.000.000	80,00	60,00	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					72,00	60,00					
Predikat Kinerja																					S	R					
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas	Bulan	60	42.735.771.515	36	24.609.240.000	12	8.203.275.303	3	1.895.096.560	0	0	0	0	3	1.895.096.560	25,00	23,10	39	26.504.336.560	65,00	62,02			
5	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	58	41.270.371.515	58	23.730.000.000	57	7.910.195.303	57	1.838.066.560	0	0	0	57	1.838.066.560	100,00	23,24	115	25.568.066.560	198,28	61,95	DISPAR			
6	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1.375.000.000	3	825.000.000	1	275.000.000	0	57.030.000	0	0	0	0	57.030.000	0,00	20,74	3	882.030.000	60,00	64,15	DISPAR			
7	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	90.400.000	3	54.240.000	1	18.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	54.240.000	60,00	60,00	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					45,47	26,59					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	225.000.000	3	135.000.000	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	135.000.000	60,00	60,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
8	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	100.000.000	3	60.000.000	1	80.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	60.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
9	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	75.000.000	3	45.000.000	1	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	45.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
10	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	50.000.000	3	30.000.000	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	30.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					18,00	18,00					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	5	500.000.000	3	300.000.000	1	240.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	300.000.000	60,00	60,00			
11	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	250.000.000	3	150.000.000	58	90.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	150.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
12	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	300	250.000.000	180	150.000.000	58	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	180	150.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,00	10,00					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	5	8.674.288.485	3	4.904.573.091	1	3.581.910.697	0	125.228.953	0	0	0	0	0	125.228.953	0,00	3,50	3	5.029.802.044	60,00	57,99			
13	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	475.000.000	9	285.000.000	3	95.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	285.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
14	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	250.000.000	6	150.000.000	2	80.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	6	150.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
15	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	2.500.000.000	9	1.200.000.000	3	500.000.000	0	10.479.000	0	0	0	0	10.479.000	0,00	2,10	9	1.210.479.000	60,00	48,42	DISPAR			
16	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	199.288.485	6	119.573.091	2	50.000.000	0	1.273.200	0	0	0	0	1.273.200	0,00	2,55	6	120.846.291	60,00	60,64	DISPAR			
17	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	100.000.000	36	60.000.000	12	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	36	60.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
18	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5.000.000.000	3	3.000.000.000	1	2.636.910.697	0	113.476.753	0	0	0	0	113.476.753	0,00	4,30	3	3.113.476.753	60,00	62,27	DISPAR			
19	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	25.000.000	3	15.000.000	1	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	15.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
20	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	125.000.000	3	75.000.000	1	195.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	75.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,00	23,57					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah	Tahun	5	1.150.000.000	3	950.000.000	1	970.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	950.000.000	60,00	82,61			
21	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75	500.000.000	45	300.000.000	15	320.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	45	300.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
22	3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	5	650.000.000	3	650.000.000	1	650.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	650.000.000	60,00	100,00	DISPAR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
			Disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					5,45	7,27						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pmerintah Daerah	Tahun	5	4.375.000.000	3	2.625.000.000	1	1.375.000.000	0	201.947.300	0	0	0	0	201.947.300	0,00	14,69	3	2.826.947.300	60,00	64,62					
23	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1.875.000.000	3	1.125.000.000	1	375.000.000	0	63.890.126		0	0	0	63.890.126	0,00	17,04	3	1.188.890.126	60,00	63,41	DISPAR				
24	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	2.500.000.000	3	1.500.000.000	1	1.000.000.000	0	138.057.174		0	0	0	138.057.174	0,00	13,81	3	1.638.057.174	60,00	65,52	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					5,00	5,37						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah	Tahun	5	1.625.000.000	3	1.052.117.000	1	575.000.000	0	31.711.971	0	0	0	0	31.711.971	0,00	5,52	3	1.083.828.971	60,00	66,70					
25	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	1.000.000.000	21	677.117.000	7	300.000.000	2	26.732.511		0	0	0	26.732.511	28,57	8,91	23	703.849.511	65,71	70,38	DISPAR				
26	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	375.000.000	90	225.000.000	30	175.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	90	225.000.000	60,00	60,00	DISPAR				
27	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	250.000.000	3	150.000.000	1	100.000.000	0	4.979.460		0	0	0	4.979.460	0,00	4,98	3	154.979.460	60,00	61,99	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					6,88	7,13						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang	Kali		57.215.966.000	19	33.241.410.000	19	6.860.000.000	0	2.085.000		0	0	0	2.085.000	0,00	0,03	19	33.243.495.000	inf	58,10					
			Jumlah DTW Unggulan Provinsi Berdaya Saing Nasional Yang Diintervensi Pengembangannya	DTW			19		15		0					0		0,00		19		inf						
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	DTW	1	5.215.966.000	1	3.500.000.000	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	3.500.000.000	100,00	67,10					
1	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	1	2.715.966.000	1	2.000.000.000	6	250.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.000.000.000	100,00	73,64	DISPAR				
2	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	5	2.500.000.000	3	1.500.000.000	1	150.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					80,00	66,82						
Predikat Kinerja																					T	S						
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	DTW	1	39.000.000.000	1	22.040.313.000	1	4.960.000.000	0	2.085.000	0	0	0	0	2.085.000	0,00	0,04	1	22.042.398.000	100,00	56,52					
3	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	35	15.000.000.000	21	9.000.000.000	7	2.600.000.000	0	1.830.000		0	0	0	1.830.000	0,00	0,07	21	9.001.830.000	60,00	60,01	DISPAR				
4	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	1	14.000.000.000	1	7.500.000.000	3	1.660.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	1	7.500.000.000	100,00	53,57	DISPAR				
5	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan	Dokumen	1	5.000.000.000	1	3.000.000.000	1	500.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	1	3.000.000.000	100,00	60,00	DISPAR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Kepariwisataan Daerah Provinsi																								
6	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	10	5.000.000.000	6	2.540.313.000	2	200.000.000	0	255.000	0	0	0	0	255.000	0,00	0,13	6	2.540.568.000	60,00	50,81	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					53,33	37,40					
Predikat Kinerja																					R	SR					
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	19	13.000.000.000	19	7.701.097.000	19	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	7.701.097.000	100,00	59,24				
7	3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha	75	3.750.000.000	45	2.250.000.000	15	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	45	2.250.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
8	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	100	4.000.000.000	60	2.250.000.000	20	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	2.250.000.000	60,00	56,25	DISPAR			
9	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	300	3.750.000.000	180	2.250.000.000	60	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	180	2.250.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
10	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	5	1.500.000.000	3	951.097.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	951.097.000	60,00	63,41	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					24,00	23,97					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisman	Persen		24.163.183.000	5.5	14.038.007.000	7	8.130.000.000	0	549.720.000	0	0	0	0	549.720.000	0,00	6,76	5.5	14.587.727.000	inf	60,37				
			Rata-rata Lama Tinggal Wisman	Hari		3.25		3.27		0					0		0,00		3.25		inf						
			Rata-rata Lama Tinggal Wisnus	Hari		1.76		1.82		0					0		0,00		1.76		inf						
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisnus	Persen		9		7.5		0					0		0,00		9		inf						
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daula Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kegiatan	15	24.163.183.000	9	14.038.007.000	3	8.130.000.000	0	549.720.000	0	0	0	0	549.720.000	0,00	6,76	9	14.587.727.000	60,00	60,37				
1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	9.163.183.000	3	5.038.007.000	1	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	5.038.007.000	60,00	54,98	DISPAR			
2	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	5	5.000.000.000	3	3.000.000.000	1	1.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	3.000.000.000	60,00	60,00	DISPAR			
3	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	15	10.000.000.000	9	6.000.000.000	3	3.980.000.000	0	549.720.000	0	0	0	0	549.720.000	0,00	13,81	9	6.549.720.000	60,00	65,50	DISPAR			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					60,00	60,16					
Predikat Kinerja																					R	R					
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Yang Terdaftar HKI	Produk		13.525.827.000	150	7.858.056.000	200	3.636.950.000	0	190.918.200	0	0	0	0	190.918.200	0,00	5,25	150	8.048.974.200	inf	59,51				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K/Rp	K/Rp	K/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat	Produk	250	6.025.827.000	150	3.358.056.000	200	2.764.985.000	0	190.918.200	0	0	0	0	190.918.200	0,00	6,90	150	3.548.974.200	60,00	58,90					
1	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	5	3.525.827.000	3	1.858.056.000	1	1.544.061.000	0	190.918.200	0	0	0	0	190.918.200	0,00	12,36	3	2.048.974.200	60,00	58,11	DISPAR				
2	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	5	2.500.000.000	3	1.500.000.000	1	1.220.924.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						60,00	59,06					
Predikat Kinerja																						R	R					
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	0	7.500.000.000	0	4.500.000.000	0	871.965.000	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	4.500.000.000	nan	60,00						
3	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	2.500.000.000	3	1.500.000.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
4	3.26.04.1.02.0013	Facilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	500	2.500.000.000	300	1.500.000.000	100	321.965.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	300	1.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
5	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	25	2.500.000.000	15	1.500.000.000	5	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15	1.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						36,00	36,00					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat	Orang		32.505.184.000	496	18.919.290.000	596	4.495.364.000	0	207.100.000	0	0	0	0	207.100.000	0,00	4,61	496	19.126.390.000	inf	58,84					
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen			8		10		0					0		0,00		8		inf						
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	orang	696	19.005.184.000	496	11.569.290.000	100	2.545.364.000	0	118.950.000	0	0	0	0	118.950.000	0,00	4,67	496	11.688.240.000	71,26	61,50					
1	3.26.05.1.01.0004	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	1250	7.500.000.000	750	4.500.000.000	250	2.094.314.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	750	4.500.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
2	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	250	1.505.184.000	150	756.750.000	50	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150	756.750.000	60,00	50,28	DISPAR					
3	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	500	5.000.000.000	300	3.312.540.000	100	100.000.000	100	118.950.000	0	0	0	100	118.950.000	100,00	118,95	400	3.431.490.000	80,00	68,63	DISPAR				
4	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	5	5.000.000.000	3	3.000.000.000	1	51.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	3.000.000.000	60,00	60,00	DISPAR					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						65,00	59,73					
Predikat Kinerja																						R	R					
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penegmbangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kraetif	Kegitan	20	13.500.000.000	12	7.350.000.000	4	1.950.000.000	0	88.150.000	0	0	0	0	88.150.000	0,00	4,52	12	7.438.150.000	60,00	55,10					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
5	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	2500	5.000.000.000	1500	3.000.000.000	500	900.000.000	50	88.150.000	0	0	0	50	88.150.000	10,00	9,79	1550	3.088.150.000	62,00	61,76	DISPAR			
6	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	0	0	250	1.000.000.000	150	600.000.000	50	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150	600.000.000	60,00	60,00	DISPAR				
7	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	1250	7.500.000.000	750	3.750.000.000	250	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	750	3.750.000.000	60,00	50,00	DISPAR				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					26,00	24,54					
Predikat Kinerja																					SR	SR					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp						
		DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				184.212.062.567		184.212.062.550		184.212.062.550		25.143.870.724		0	0	0	25.143.870.724		13,65		209.355.933.274		113,65									
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				184.212.062.567		184.212.062.550		184.212.062.550		25.143.870.724		0	0	0	25.143.870.724		13,65		209.355.933.274		113,65									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				184.212.062.567		184.212.062.550		184.212.062.550		25.143.870.724		0	0	0	25.143.870.724		13,65		209.355.933.274		113,65									
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-		45.889.519.000	0	45.889.519.000	0	45.889.519.000	0	4.080.000.000		0	0	0	0	4.080.000.000	nan	8,89	0	49.969.519.000	nan	108,89								
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-	-	0	45.889.519.000	0	45.889.519.000	0	45.889.519.000	0	4.080.000.000	0	0	0	0	0	4.080.000.000	nan	8,89	0	49.969.519.000	nan	108,89								
1	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	12	29.389.519.000	12	29.389.519.000	12	29.389.519.000	2	2.500.000.000		0	0	0	2	2.500.000.000	16,67	8,51	14	31.889.519.000	116,67	108,51	DISPERTA							
2	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	12	1.900.000.000	12	1.900.000.000	12	1.900.000.000	2	300.000.000		0	0	0	2	300.000.000	16,67	15,79	14	2.200.000.000	116,67	115,79	DISPERTA							
3	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	2	200.000.000		0	0	0	2	200.000.000	16,67	6,67	14	3.200.000.000	116,67	106,67	DISPERTA							
4	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	2	450.000.000		0	0	0	2	450.000.000	16,67	9,00	14	5.450.000.000	116,67	109,00	DISPERTA							
5	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	0	50.000.000		0	0	0	0	50.000.000	0,00	10,00	2	550.000.000	100,00	110,00	DISPERTA							
6	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	0	50.000.000		0	0	0	0	50.000.000	0,00	10,00	2	550.000.000	100,00	110,00	DISPERTA							
7	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	20.000.000		0	0	0	0	20.000.000	0,00	6,67	1	320.000.000	100,00	106,67	DISPERTA							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																									
8	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	1	70.000.000	0	0	0	1	70.000.000	33,33	10,00	4	770.000.000	133,33	110,00	DISPERTA			
9	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	50.000.000	0	0	0	1	50.000.000	100,00	10,00	2	550.000.000	200,00	110,00	DISPERTA			
10	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	16,67	10,00	14	220.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
11	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	2	50.000.000	0	0	0	2	50.000.000	16,67	8,33	14	650.000.000	116,67	108,33	DISPERTA			
12	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	6,67	1	320.000.000	100,00	106,67	DISPERTA			
13	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10,00	1	330.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			
14	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10,00	1	330.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			
15	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10,00	1	330.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			
16	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10,00	1	330.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			
17	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD BALAI PENGAWASAN	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	10,00	1	330.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]																									
18	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	1	50.000.000	0	0	0	1	50.000.000	50,00	10,00	3	550.000.000	150,00	110,00	DISPERTA			
19	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	2	100.000.000	0	0	0	2	100.000.000	16,67	10,00	14	1.100.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					115,79	109,56					
Predikat Kinerja																					ST	ST					
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		66.196.173.567	0	66.196.173.550	0	66.196.173.550	0	15.343.870.724	0	0	0	0	15.343.870.724	nan	23,18	0	81.540.044.274	nan	123,18				
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	800.000.003	0	800.000.000	0	800.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	nan	18,75	0	950.000.000	nan	118,75				
1	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0,00	16,67	3	350.000.000	100,00	116,67	DISPERTA			
2	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0,00	20,00	3	600.000.000	100,00	120,00	DISPERTA			
3	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		1	0	0	12	0	12	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	12	0	100,00	0,00	DISPERTA		
4	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	100,00	nan	1	0	100,00	0,00	DISPERTA		
5	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	12		1	0	0	12	0	12	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	12	0	100,00	0,00	DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	47,33					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	49.674.282.905	0	49.674.282.898	0	49.674.282.898	0	12.356.070.724	0	0	0	0	12.356.070.724	nan	24,87	0	62.030.353.622	nan	124,87				
6	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	334	48.624.282.898	334	48.624.282.898	334	48.624.282.898	50	12.156.070.724	0	0	0	0	12.156.070.724	14,97	25,00	384	60.780.353.622	114,97	125,00	DISPERTA			
7	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	3	50.000.000	0	0	0	3	50.000.000	25,00	16,67	15	350.000.000	125,00	116,67	DISPERTA			
8	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			
9	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI BENIH INDUK]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]																										
10	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA				
11	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA				
12	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA				
13	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA				
14	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
15	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
16	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
17	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
18	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
19	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			
20	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12		1	12	0	12	0	3	0	0	0	0	3	0	25,00	nan	15	0	125,00	0,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp		
		[UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																										
21	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	3	30.000.000	0	0	0	3	30.000.000	25,00	20,00	15	180.000.000	125,00	120,00	DISPERTA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					94,76	51,51							
Predikat Kinerja																					ST	R							
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	710.000.000	0	710.000.000	0	710.000.000	0	141.500.000	0	0	0	0	0	141.500.000	nan	19,93	0	851.500.000	nan	119,93					
22	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	138.400.000	1	138.400.000	1	138.400.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00	18,06	1	163.400.000	100,00	118,06	DISPERTA				
23	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	24,04	1	12.900.000	100,00	124,04	DISPERTA				
24	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	24,04	1	12.900.000	100,00	124,04	DISPERTA				
25	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	14.400.000	1	14.400.000	1	14.400.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00	20,83	1	17.400.000	100,00	120,83	DISPERTA				
26	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15.600.000	1	15.600.000	1	15.600.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00	22,44	1	19.100.000	100,00	122,44	DISPERTA				
27	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	24,04	1	12.900.000	100,00	124,04	DISPERTA				
28	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	24,04	1	12.900.000	100,00	124,04	DISPERTA				
29	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	20,00	1	60.000.000	100,00	120,00	DISPERTA				
30	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00	20,00	1	60.000.000	100,00	120,00	DISPERTA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
											I	II	III	IV																																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																									
31	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
32	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000		0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
33	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000		0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
34	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000		0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
35	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000		0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
36	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	nan	20,00	0	240.000.000	nan	120,00																							
37	3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
38	3.27.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	633.000.000	0	633.000.000	0	633.000.000	0	137.000.000	0	0	0	0	0	137.000.000	nan	21,64	0	770.000.000	nan	121,64																							
39	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	94	211.500.000	94	211.500.000	94	211.500.000	21	45.000.000		0	0	0	21	45.000.000	22,34	21,28	115	256.500.000	122,34	121,28	DISPERTA																						
40	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	67.500.000	25	67.500.000	25	67.500.000	5	15.000.000		0	0	0	5	15.000.000	20,00	22,22	30	82.500.000	120,00	122,22	DISPERTA																						
41	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	39	90.000.000	39	90.000.000	39	90.000.000	9	20.000.000		0	0	0	9	20.000.000	23,08	22,22	48	110.000.000	123,08	122,22	DISPERTA																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																									
42	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20	33.750.000	20	33.750.000	20	33.750.000	5	7.000.000	0	0	0	5	7.000.000	25,00	20,74	25	40.750.000	125,00	120,74	DISPERTA			
43	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	87	72.750.000	87	72.750.000	87	72.750.000	20	15.000.000	0	0	0	20	15.000.000	22,99	20,62	107	87.750.000	122,99	120,62	DISPERTA			
44	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32	72.000.000	32	72.000.000	32	72.000.000	8	15.000.000	0	0	0	8	15.000.000	25,00	20,83	40	87.000.000	125,00	120,83	DISPERTA			
45	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	37	85.500.000	37	85.500.000	37	85.500.000	8	20.000.000	0	0	0	8	20.000.000	21,62	23,39	45	105.500.000	121,62	123,39	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					19,11	18,92					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	4.006.713.035	0	4.006.713.028	0	4.006.713.028	0	926.000.000	0	0	0	0	926.000.000	nan	23,11	0	4.932.713.028	nan	123,11				
46	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.500.000	0	0	0	2	2.500.000	20,00	25,00	12	12.500.000	120,00	125,00	DISPERTA			
47	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	200,00	15	30.000.000	125,00	300,00	DISPERTA			
48	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.500.000	0	0	0	2	2.500.000	20,00	25,00	12	12.500.000	120,00	125,00	DISPERTA			
49	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	3	25.000.000	0	0	0	3	25.000.000	25,00	250,00	15	35.000.000	125,00	350,00	DISPERTA			
50	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.500.000	0	0	0	2	2.500.000	20,00	25,00	12	12.500.000	120,00	125,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
51	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	2	5.000.000		0	0	0	2	5.000.000	20,00	25,00	12	25.000.000	120,00	125,00	DISPERTA			
52	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.500.000		0	0	0	2	2.500.000	20,00	25,00	12	12.500.000	120,00	125,00	DISPERTA			
53	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
54	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	20.000.000		0	0	0	1	20.000.000	20,00	20,00	6	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
55	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
56	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			
57	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
58	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
59	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	2	40.000.000		0	0	0	2	40.000.000	20,00	20,00	12	240.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
60	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000		0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
61	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	2	40.000.000		0	0	0	2	40.000.000	20,00	20,00	12	240.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
62	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	25.000.000		0	0	0	3	25.000.000	25,00	25,00	15	125.000.000	125,00	125,00	DISPERTA			
63	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000		0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																									
64	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	20,00	20,00	6	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
65	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
66	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
67	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	2	10.000.000	0	0	0	2	10.000.000	20,00	20,00	12	60.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
68	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	100.000.600	12	100.000.600	12	100.000.600	3	24.000.000	0	0	0	3	24.000.000	25,00	24,00	15	124.000.600	125,00	124,00	DISPERTA			
69	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000	0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			
70	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	10.000.000	0	0	0	3	10.000.000	25,00	20,00	15	60.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			
71	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	2	10.000.000	0	0	0	2	10.000.000	20,00	20,00	12	60.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
72	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	2	10.000.000	0	0	0	2	10.000.000	20,00	20,00	12	60.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
73	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	2	10.000.000	0	0	0	2	10.000.000	20,00	20,00	12	60.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
74	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	1	5.000.000	0	0	0	1	5.000.000	20,00	20,00	6	30.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
75	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	1	5.000.000	0	0	0	1	5.000.000	10,00	20,00	11	30.000.000	110,00	120,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
76	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	2	5.000.000	0	0	0	2	5.000.000	20,00	20,00	12	30.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
77	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	15.000.000	0	0	0	3	15.000.000	25,00	30,00	15	65.000.000	125,00	130,00	DISPERTA			
78	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	2	5.000.000	0	0	0	2	5.000.000	20,00	20,00	12	30.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
79	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	3	5.000.000	0	0	0	3	5.000.000	25,00	20,00	15	30.000.000	125,00	120,00	DISPERTA			
80	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	1	5.000.000	0	0	0	1	5.000.000	20,00	20,00	6	30.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
81	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	3	12.000.000	0	0	0	3	12.000.000	25,00	24,00	15	62.000.000	125,00	124,00	DISPERTA			
82	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.676.712.428	12	1.676.712.428	12	1.676.712.428	3	400.000.000	0	0	0	3	400.000.000	25,00	23,86	15	2.076.712.428	125,00	123,86	DISPERTA			
83	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		1	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA			
84	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		1	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA			
85	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		1	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA			
86	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		1	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA			
87	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI PELATIHAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		1	12	0	12	0	12	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DAN PENYULUHAN PERTANIAN]																										
88	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	12	0	12	0	12	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA				
89	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	1	12	0	12	0	12	0	0	0	0	12	0	100,00	nan	24	0	200,00	0,00	DISPERTA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							66,18	55,08				
Predikat Kinerja																							S	R				
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	nan	21,88	0	1.950.000.000	nan	121,88				
90	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	25.000.000	0	0	0	1	25.000.000	50,00	25,00	3	125.000.000	150,00	125,00	DISPERTA				
91	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				
92	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	25.000.000	0	0	0	1	25.000.000	20,00	25,00	6	125.000.000	120,00	125,00	DISPERTA				
93	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	3	20.000.000	0	0	0	3	20.000.000	25,00	20,00	15	120.000.000	125,00	120,00	DISPERTA				
94	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	20,00	20,00	6	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				
95	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	20,00	20,00	6	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				
96	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	1	50.000.000	0	0	0	1	50.000.000	20,00	25,00	6	250.000.000	120,00	125,00	DISPERTA				
97	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				
98	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	2	50.000.000	0	0	0	2	50.000.000	20,00	25,00	12	250.000.000	120,00	125,00	DISPERTA				
99	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				
100	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	20,00	20,00	6	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]																									
101	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	1	20.000.000	50,00	20,00	3	120.000.000	150,00	120,00	DISPERTA			
102	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
103	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	20,00	20,00	12	120.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					16,94	16,50					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	7.566.527.874	0	7.566.527.874	0	7.566.527.874	0	1.086.300.000	0	0	0	0	1.086.300.000	nan	14,36	0	8.652.827.874	nan	114,36				
104	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	3	2.000.000	0	0	0	3	2.000.000	25,00	18,18	15	13.000.000	125,00	118,18	DISPERTA			
105	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	3	1.500.000	0	0	0	3	1.500.000	25,00	25,00	15	7.500.000	125,00	125,00	DISPERTA			
106	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	1	1.500.000	0	0	0	1	1.500.000	20,00	25,00	6	7.500.000	120,00	125,00	DISPERTA			
107	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	3	1.500.000	0	0	0	3	1.500.000	25,00	25,00	15	7.500.000	125,00	125,00	DISPERTA			
108	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	2	1.000.000	0	0	0	2	1.000.000	16,67	16,67	14	7.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
109	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	2	1.000.000	0	0	0	2	1.000.000	16,67	16,67	14	7.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
110	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	2	1.000.000	0	0	0	2	1.000.000	16,67	16,67	14	7.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
111	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	112.000.000	12	112.000.000	12	112.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	16,67	17,86	14	132.000.000	116,67	117,86	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
112	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	2	40.000.000	0	0	0	2	40.000.000	16,67	20,00	14	240.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
113	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	25,00	14	150.000.000	116,67	125,00	DISPERTA			
114	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	15,00	14	230.000.000	116,67	115,00	DISPERTA			
115	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	15,00	14	230.000.000	116,67	115,00	DISPERTA			
116	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	15,79	14	220.000.000	116,67	115,79	DISPERTA			
117	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	494.964.728	12	494.964.728	12	494.964.728	2	70.000.000	0	0	0	2	70.000.000	16,67	14,14	14	564.964.728	116,67	114,14	DISPERTA			
118	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	2	2.000.000	16,67	20,00	14	12.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
119	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	2	3.000.000	0	0	0	2	3.000.000	16,67	15,00	14	23.000.000	116,67	115,00	DISPERTA			
120	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	2	2.000.000	16,67	20,00	14	12.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
121	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	2	2.000.000	16,67	20,00	14	12.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
122	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	2	2.000.000	20,00	20,00	12	12.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
123	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2	1.800.000	0	0	0	2	1.800.000	16,67	18,00	14	11.800.000	116,67	118,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
124	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	2	2.000.000	0	0	0	2	2.000.000	16,67	20,00	14	12.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
125	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	556.628.409	12	556.628.409	12	556.628.409	2	90.000.000	0	0	0	2	90.000.000	16,67	16,17	14	646.628.409	116,67	116,17	DISPERTA			
126	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	804.372.881	12	804.372.881	12	804.372.881	2	150.000.000	0	0	0	2	150.000.000	16,67	18,65	14	954.372.881	116,67	118,65	DISPERTA			
127	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	655.862.753	12	655.862.753	12	655.862.753	2	105.000.000	0	0	0	2	105.000.000	16,67	16,01	14	760.862.753	116,67	116,01	DISPERTA			
128	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	900.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000	2	150.000.000	0	0	0	2	150.000.000	16,67	16,67	14	1.050.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
129	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.759.932.157	12	1.759.932.157	12	1.759.932.157	2	150.000.000	0	0	0	2	150.000.000	16,67	8,52	14	1.909.932.157	116,67	108,52	DISPERTA			
130	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	649.251.434	12	649.251.434	12	649.251.434	3	89.000.000	0	0	0	3	89.000.000	25,00	13,71	15	738.251.434	125,00	113,71	DISPERTA			
131	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	596.515.512	12	596.515.512	12	596.515.512	2	78.000.000	0	0	0	2	78.000.000	16,67	13,08	14	674.515.512	116,67	113,08	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					25,24	25,20					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	1.005.649.750	0	1.005.649.750	0	1.005.649.750	0	157.000.000	0	0	0	0	157.000.000	nan	15,61	0	1.162.649.750	nan	115,61				
132	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	41.399.750	3	41.399.750	3	41.399.750	1	5.000.000	0	0	0	1	5.000.000	33,33	12,08	4	46.399.750	133,33	112,08	DISPERTA			
133	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	82.250.000	3	82.250.000	3	82.250.000	1	15.000.000	0	0	0	1	15.000.000	33,33	18,24	4	97.250.000	133,33	118,24	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
134	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	1	50.000.000		0	0	0	1	50.000.000	12,50	14,29	9	400.000.000	112,50	114,29	DISPERTA			
135	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	33,33	14,29	4	40.000.000	133,33	114,29	DISPERTA			
136	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	52.000.000	3	52.000.000	3	52.000.000	1	9.000.000		0	0	0	1	9.000.000	33,33	17,31	4	61.000.000	133,33	117,31	DISPERTA			
137	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	33,33	14,29	4	40.000.000	133,33	114,29	DISPERTA			
138	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	33,33	14,29	4	40.000.000	133,33	114,29	DISPERTA			
139	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	2	3.000.000		0	0	0	2	3.000.000	16,67	12,00	14	28.000.000	116,67	112,00	DISPERTA			
140	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	15.000.000		0	0	0	2	15.000.000	20,00	15,00	12	115.000.000	120,00	115,00	DISPERTA			
141	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	33,33	20,00	4	30.000.000	133,33	120,00	DISPERTA			
142	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	20,00	20,00	6	30.000.000	120,00	120,00	DISPERTA			
143	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	1	5.000.000		0	0	0	1	5.000.000	33,33	20,00	4	30.000.000	133,33	120,00	DISPERTA			
144	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI MEKANISASI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	2	5.000.000		0	0	0	2	5.000.000	16,67	20,00	14	30.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]																									
145	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	1	25.000.000	0	0	0	1	25.000.000	33,33	16,67	4	175.000.000	133,33	116,67	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						12,32	11,23				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-		45.158.898.000	0	45.158.898.000	0	45.158.898.000	0	2.880.000.000	0	0	0	0	2.880.000.000	nan	6,38	0	48.038.898.000	nan	106,38				
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	-	0	10.300.000.000	0	10.300.000.000	0	10.300.000.000	0	1.280.000.000	0	0	0	0	1.280.000.000	nan	12,43	0	11.580.000.000	nan	112,43				
1	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	3.300.000.000	12	3.300.000.000	12	3.300.000.000	2	500.000.000	0	0	0	2	500.000.000	16,67	15,15	14	3.800.000.000	116,67	115,15	DISPERTA			
2	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	10,00	14	330.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
3	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	12	3.200.000.000	12	3.200.000.000	12	3.200.000.000	2	300.000.000	0	0	0	2	300.000.000	16,67	9,38	14	3.500.000.000	116,67	109,38	DISPERTA			
4	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	2	200.000.000	0	0	0	2	200.000.000	16,67	10,00	14	2.200.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
5	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	2	250.000.000	0	0	0	2	250.000.000	16,67	16,67	14	1.750.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						116,67	112,24				
Predikat Kinerja																						ST	ST				
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	-	0	34.858.898.000	0	34.858.898.000	0	34.858.898.000	0	1.600.000.000	0	0	0	0	1.600.000.000	nan	4,59	0	36.458.898.000	nan	104,59				
6	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	2	250.000.000	0	0	0	2	250.000.000	16,67	12,50	14	2.250.000.000	116,67	112,50	DISPERTA			
7	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	2	200.000.000	0	0	0	2	200.000.000	16,67	10,00	14	2.200.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
8	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	12	24.458.898.000	12	24.458.898.000	12	24.458.898.000	2	400.000.000	0	0	0	2	400.000.000	16,67	1,64	14	24.858.898.000	116,67	101,64	DISPERTA			
9	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan [UPTD BALAI BENIH INDUK	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar	laporan	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	2	300.000.000	0	0	0	2	300.000.000	16,67	7,50	14	4.300.000.000	116,67	107,50	DISPERTA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga																								
10	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	2	250.000.000	0	0	0	2	250.000.000	16,67	17,86	14	1.650.000.000	116,67	117,86	DISPERTA			
11	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	2	200.000.000	0	0	0	2	200.000.000	16,67	20,00	14	1.200.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						63,64	60,86				
Predikat Kinerja																						R	R				
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-		284.148.000	0	284.148.000	0	284.148.000	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	nan	12,32	0	319.148.000	nan	112,32				
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	284.148.000	0	284.148.000	0	284.148.000	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	nan	12,32	0	319.148.000	nan	112,32				
1	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	84.148.000	2	84.148.000	2	84.148.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0,00	5,94	2	89.148.000	100,00	105,94	DISPERTA			
2	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0,00	10,00	2	110.000.000	100,00	110,00	DISPERTA			
3	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	2	20.000.000	0	0	0	2	20.000.000	16,67	20,00	14	120.000.000	116,67	120,00	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						105,56	111,98				
Predikat Kinerja																						ST	ST				
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-		23.716.821.000	0	23.716.821.000	0	23.716.821.000	0	2.480.000.000	0	0	0	0	2.480.000.000	nan	10,46	0	26.196.821.000	nan	110,46				
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-	0	6.150.000.000	0	6.150.000.000	0	6.150.000.000	0	725.000.000	0	0	0	0	725.000.000	nan	11,79	0	6.875.000.000	nan	111,79				
1	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0,00	16,00	2	2.900.000.000	100,00	116,00	DISPERTA			
2	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	4	25.000.000	0	0	0	4	25.000.000	20,00	16,67	24	175.000.000	120,00	116,67	DISPERTA			
3	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	10	3.500.000.000	10	3.500.000.000	10	3.500.000.000	2	300.000.000	0	0	0	2	300.000.000	20,00	8,57	12	3.800.000.000	120,00	108,57	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						113,33	113,75				
Predikat Kinerja																						ST	ST				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV				(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12					(15) = 14/5 * 100%		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	-	0	13.566.821.000	0	13.566.821.000	0	13.566.821.000	0	1.355.000.000	0	0	0	0	1.355.000.000	nan	9,99	0	14.921.821.000	nan	109,99			
4	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	50.000.000	0	0	0	2	50.000.000	16,67	12,50	14	450.000.000	116,67	112,50	DISPERTA		
5	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	50.000.000	0	0	0	2	50.000.000	16,67	12,50	14	450.000.000	116,67	112,50	DISPERTA		
6	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	50.000.000	0	0	0	2	50.000.000	16,67	12,50	14	450.000.000	116,67	112,50	DISPERTA		
7	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	40.000.000	0	0	0	2	40.000.000	16,67	10,00	14	440.000.000	116,67	110,00	DISPERTA		
8	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	7,50	14	430.000.000	116,67	107,50	DISPERTA		
9	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	2	35.000.000	0	0	0	2	35.000.000	16,67	8,75	14	435.000.000	116,67	108,75	DISPERTA		
10	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	2	200.000.000	0	0	0	2	200.000.000	20,00	20,00	12	1.200.000.000	120,00	120,00	DISPERTA		
11	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani [UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN]	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	12	8.316.821.000	12	8.316.821.000	12	8.316.821.000	2	500.000.000	0	0	0	2	500.000.000	16,67	6,01	14	8.816.821.000	116,67	106,01	DISPERTA		
12	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	12	1.850.000.000	12	1.850.000.000	12	1.850.000.000	2	400.000.000	0	0	0	2	400.000.000	16,67	21,62	14	2.250.000.000	116,67	121,62	DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					87,78	84,28				
Predikat Kinerja																					T	T				
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	nan	10,00	0	4.400.000.000	nan	110,00			
13	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	2	200.000.000	0	0	0	2	200.000.000	16,67	10,00	14	2.200.000.000	116,67	110,00	DISPERTA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
14	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	2	200.000.000		0	0	0	2	200.000.000	16,67	10,00	14	2.200.000.000	116,67	110,00	DISPERTA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,67	15,71				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-		2.966.503.000	0	2.966.503.000	0	2.966.503.000	0	325.000.000		0	0	0	0	325.000.000	nan	10,96	0	3.291.503.000	nan	110,96			
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-	-	0	2.966.503.000	0	2.966.503.000	0	2.966.503.000	0	325.000.000	0	0	0	0	0	325.000.000	nan	10,96	0	3.291.503.000	nan	110,96			
1	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	2	30.000.000		0	0	0	2	30.000.000	20,00	12,00	12	280.000.000	120,00	112,00	DISPERTA		
2	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	10	50.000.000		0	0	0	10	50.000.000	10,00	5,88	110	900.000.000	110,00	105,88	DISPERTA		
3	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	2	50.000.000		0	0	0	2	50.000.000	20,00	12,50	12	450.000.000	120,00	112,50	DISPERTA		
4	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	2	30.000.000		0	0	0	2	30.000.000	20,00	15,00	12	230.000.000	120,00	115,00	DISPERTA		
5	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	1	20.000.000		0	0	0	1	20.000.000	20,00	13,33	6	170.000.000	120,00	113,33	DISPERTA		
6	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	2	30.000.000		0	0	0	2	30.000.000	20,00	10,00	12	330.000.000	120,00	110,00	DISPERTA		
7	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan [UPTD BALAI MEKANISASI	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	12	366.503.000	12	366.503.000	12	366.503.000	2	60.000.000		0	0	0	2	60.000.000	16,67	16,37	14	426.503.000	116,67	116,37	DISPERTA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN]																									
8	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan [UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA]	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	2	30.000.000	0	0	0	2	30.000.000	16,67	10,00	14	330.000.000	116,67	110,00	DISPERTA			
9	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan [UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN]	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	2	25.000.000	0	0	0	2	25.000.000	16,67	16,67	14	175.000.000	116,67	116,67	DISPERTA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					117,78	112,42					
Predikat Kinerja																					ST	ST					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				190.960.521.000		0		137.562.388.731	6.795.115.043	0	0	0		6.795.115.043		4,94		6.795.115.043		3,56						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan						
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				190.960.521.000		0		137.562.388.731	6.795.115.043	0	0	0		6.795.115.043		4,94		6.795.115.043		3,56						
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				190.960.521.000		0		137.562.388.731	6.795.115.043	0	0	0		6.795.115.043		4,94		6.795.115.043		3,56						
3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		3.279.000.000	0	0	100	33.250.949.523	0	5.840.228.307	0	0	0	0	5.840.228.307	0,00	17,56	0	5.840.228.307	nan	178,11		Kegiatan sudah dirasionalisasikan			
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	85	3.279.000.000	85	0	85	550.000.000	0	5.750.000	0	0	0	0	5.750.000	0,00	1,05	85	5.750.000	100,00	0,18		Kegiatan sudah dirasionalisasikan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
1	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	54	1.879.000.000	0	0	6	232.325.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
2	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	500.000.000	0	0	5	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
3	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	850.000.000	0	0	4	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
4	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	3	50.000.000	0	0	1	67.674.700	1	5.750.000	0	0	0	1	5.750.000	100,00	8,50	1	5.750.000	33,33	11,50	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,33	2,88						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan	Persen	100	0	0	0	100	20.637.527.731	25	4.569.810.117	0	0	0	0	25	4.569.810.117	25,00	22,14	25	4.569.810.117	25,00	inf		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
5	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	900	0	0	0	150	19.717.527.731	138	4.475.970.117	0	0	0	138	4.475.970.117	92,00	22,70	138	4.475.970.117	15,33	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
6	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	30	0	0	0	30	800.000.000	6	93.840.000	0	0	0	6	93.840.000	20,00	11,73	6	93.840.000	20,00	inf	DISNAK	penyusunan administrasi dan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal	Koordinasi dengan tim teknis terkait	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
										I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		operasional kegiatan	perencanaan yang belum maksimal					
7	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	72		0		0	12	120.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						5,05	nan							
Predikat Kinerja																						SR	-							
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi barang milik daerah	Persen	100		0	0	0	100	300.000.000	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	25	0	25,00	nan		Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
8	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi		Koordinasi dengan tim teknis terkait	
9	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
10	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16		0		0	3	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00	nan							
Predikat Kinerja																						SR	-							
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Persen	100		0	0	0	100	500.000.000	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	25	0	25,00	nan		Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
11	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	800		0		0	300	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
12	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110		0		0	190	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,00	nan							
Predikat Kinerja																						SR	-							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100		0	0	0	100	3.392.542.292	25	418.746.805	0	0	0	0	0	25	418.746.805	25,00	12,34	25	418.746.805	25,00	inf		Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
13	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60		0		0	10	41.414.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
14	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30		0		0	30	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
15	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3		0		0	1	102.211.372	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
16	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	149.998.523	0	46.185.755	0	0	0	0	46.185.755	0,00	30,79	0	46.185.755	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
17	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	80.000.000	0	10.530.000	0	0	0	0	10.530.000	0,00	13,16	0	10.530.000	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
18	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSOTS)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	250	0	0	0	1	200.000.000	0	12.384.000	0	0	0	0	12.384.000	0,00	6,19	0	12.384.000	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
19	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	0	0	25	230.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,43	0	1.000.000	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
20	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
21	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
22	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	0	0	0	1	100.000.000	0	3.966.750	0	0	0	0	3.966.750	0,00	3,97	0	3.966.750	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
23	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
24	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSOTS)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
25	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	50.000.000	0	30.038.136	0	0	0	0	30.038.136	0,00	60,08	0	30.038.136	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
26	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
27	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	0	0	0	12	50.000.000	3	4.540.000	0	0	0	3	4.540.000	25,00	9,08	3	4.540.000	4,17	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
28	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	0	0	0	1	902.918.920	0	164.223.594	0	0	0	0	164.223.594	0,00	18,19	0	164.223.594	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
29	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0	0	0	1	138.927.000	0	22.563.500	0	0	0	0	22.563.500	0,00	16,24	0	22.563.500	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait
30	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0	0	0	1	250.000.000	0	33.934.450	0	0	0	0	33.934.450	0,00	13,57	0	33.934.450	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		[UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSSTS)]	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					efesiensi anggaran					
31	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0		0	1	265.488.000	0	32.963.000	0	0	0	0	32.963.000	0,00	12,42	0	32.963.000	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
32	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0		0	1	242.883.000	0	24.870.000	0	0	0	0	24.870.000	0,00	10,24	0	24.870.000	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
33	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0		0	1	98.701.477	0	31.547.620	0	0	0	0	31.547.620	0,00	31,96	0	31.547.620	0,00	inf	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,13	nan								
Predikat Kinerja																				SR	-								
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	100	0	0	0	100	1.130.879.500	25	0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	25	0	25,00	nan	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait		
34	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	30	0		0	25	357.349.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan tidak ada di DPA pergeseran/ rasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
35	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	0		0	25	473.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
36	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	0		0	20	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Kegiatan sudah dirasionalisasi	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	nan								
Predikat Kinerja																				SR	-								
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	0	0	0	100	4.830.000.000	25	759.296.535	0	0	0	0	0	25	759.296.535	25,00	15,72	25	759.296.535	25,00	inf		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
37	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	0		0	12	1.330.000.000	3	184.197.348	0	0	0	0	3	184.197.348	25,00	13,85	3	184.197.348	4,17	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
38	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	0		0	1	3.500.000.000	0	575.099.187	0	0	0	0	0	575.099.187	0,00	16,43	0	575.099.187	0,00	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,11	inf								
Predikat Kinerja																				SR	-								
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	100	0	0	0	100	1.910.000.000	25	86.624.850	0	0	0	0	0	25	86.624.850	25,00	4,54	25	86.624.850	25,00	inf		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
39	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	180	0	0	0	30	600.000.000	2	15.640.000	0	0	0	2	15.640.000	6,67	2,61	2	15.640.000	1,11	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
40	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	0	0	0	100	300.000.000	5	17.305.000	0	0	0	5	17.305.000	5,00	5,77	5	17.305.000	2,50	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
41	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	0	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
42	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTS DTS)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	0	0	10	150.000.000	2	10.100.000	0	0	0	2	10.100.000	20,00	6,73	2	10.100.000	6,67	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
43	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	0	0	10	100.000.000	3	19.989.850	0	0	0	3	19.989.850	30,00	19,99	3	19.989.850	10,00	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
44	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	0	0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
45	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	0	0	0	28	160.000.000	5	23.590.000	0	0	0	5	23.590.000	17,86	14,74	5	23.590.000	25,00	inf	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
46	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	0	0	0	10	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
47	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	500	0	0	0	240	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Ketaatan dalam penyesuaian dengan jadwal perencanaan yang belum maksimal	Koordinasi dengan tim teknis terkait
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,96	nan					
Predikat Kinerja																					SR	-					
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging	Persen		65.979.398.000	0	0	1,62	78.077.170.800	0,2	586.717.050	0	0	0	0	0,2	586.717.050	20,00	0,75	0,2	586.717.050	inf	0,89			
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi	Persen	100	250.000.000	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I	II	III	IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																											
1	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	4	250.000.000		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang dikelola	Persen	20	500.000.000	0	0	100	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
2	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	6	500.000.000		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persen	0	22.868.727.000	0	0	100	4.559.353.400	0		1.180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,03	0		1.180.000	nan	0,01		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																			
3	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	6	2.215.000.000		0	1	400.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
4	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	6	11.050.000.000		0	1	2.070.721.400	0		1.180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,06	0		1.180.000	0,00	0,01	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
5	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	6	8.650.000.000		0	1	1.888.632.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
6	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	200	953.727.000		0	50	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan tim teknis terkait																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																																	
Predikat Kinerja																																																	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan	Kali	100	41.700.671.000	0	0	21	8.366.554.400	10		585.537.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		585.537.050	47,62	7,00	10		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																		
7	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	6	2.500.000.000		0	1	1.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan	Adanya pergeseran dan	Koordinasi dengan																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
										I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
																								operasional kegiatan	efesiensi anggaran	pelaksana teknis terkait				
8	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	6	6.870.000.000		0	1	1.020.775.400	0	121.684.400		0	0	0	0	121.684.400	0,00	11,92	0	121.684.400	0,00	1,77	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait		
9	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	6	6.870.000.000		0	1	1.391.442.000	0	137.468.700		0	0	0	0	137.468.700	0,00	9,88	0	137.468.700	0,00	2,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait		
10	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak [UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSSTS)]	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	6	18.770.671.000		0	1	3.570.000.000	0	312.908.950		0	0	0	0	312.908.950	0,00	8,76	0	312.908.950	0,00	1,67	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait		
11	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	6	4.620.000.000		0	1	1.000.000.000	0	4.595.000		0	0	0	0	4.595.000	0,00	0,46	0	4.595.000	0,00	0,10	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait		
12	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	6	2.070.000.000		0	1	384.337.000	0	8.880.000		0	0	0	0	8.880.000	0,00	2,31	0	8.880.000	0,00	0,43	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,50											
Predikat Kinerja																		SR	SR											
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi	Persen	20	660.000.000	0	0	100	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA		
13	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	6	660.000.000		0	1	50.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,00											
Predikat Kinerja																		SR	SR											
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia	Komoditi	8		0	0	0	5	64.951.263.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	nan		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
14	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	12870		0		0	500000	64.951.263.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	nan	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	nan											
Predikat Kinerja																		SR	-											
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan	Persen		26.860.442.000		0	20	4.063.836.780	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan			
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik	Persen	100	25.340.442.000	0	0	100	3.713.836.780	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
										I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	5	1.250.000.000		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
2	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Ternak Unggas]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	7.500.000.000		0	1	765.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
3	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Ternak Ruminansia]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	2.200.000.000		0	1	493.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
4	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	1.400.000.000		0	1	504.864.780	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
5	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSSTS)]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	10.190.442.000		0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
6	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	6	2.200.000.000		0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
7	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	5	600.000.000		0	5	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola	Wilayah	24	1.520.000.000	0	0	24	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
8	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	6	920.000.000		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
9	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	6	600.000.000		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen		80.363.786.000		0	5,19	19.570.431.628	0	364.951.686	0	0	0	0	0	364.951.686	0,00	1,86	0	364.951.686	nan	0,45		Dalam proses penyusunan																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV				K	Rp					K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Strategis																			administrasi dan operasional kegiatan					
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan	Kali	500	44.852.228.000	0	0	170	12.425.000.000	0	78.506.994	0	0	0	0	78.506.994	0,00	0,63	0	78.506.994	0,00	0,18		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
1	3.27.04.1.01.0003	Penanggungan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	6	6.900.000		0	1	3.300.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
2	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	3	4.000.000.000		0	1	800.000.000	0	62.312.694		0	0	0	62.312.694	0,00	7,79	0	62.312.694	0,00	1,56	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
3	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemem Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen	0	0		0	1	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISNAK	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA
4	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	6	3.750.000.000		0	1	7.000.000.000	0	14.904.300		0	0	0	14.904.300	0,00	0,21	0	14.904.300	0,00	0,40	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
5	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	3	37.095.328.000		0	300	825.000.000	0	1.290.000		0	0	0	1.290.000	0,00	0,16	0	1.290.000	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan								
Predikat Kinerja																		-	-								
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Kali	0	8.560.000.000	0	0	675	2.750.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
6	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Laporan	6	8.560.000.000		0	12	800.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
7	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	0	0		0	1	1.950.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISNAK	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan								
Predikat Kinerja																		-	-								
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan	Dokumen	6	20.251.558.000	0	0	1	3.296.833.628	0	286.444.692	0	0	0	0	0	286.444.692	0,00	8,69	0	286.444.692	0,00	1,41	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
										I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
8	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	6	6.150.000.000		0	1	1.450.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
9	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	6	5.750.000.000			0	1	1.000.000.000	0	266.029.692		0	0	0	0	266.029.692	0,00	26,60	0	266.029.692	0,00	4,63	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
10	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	6	8.351.558.000			0	1	846.833.628	0	20.415.000		0	0	0	0	20.415.000	0,00	2,41	0	20.415.000	0,00	0,24	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0,49								
Predikat Kinerja																				SR	SR								
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan	Sertifikat	50	2.600.000.000	0	0	10	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
11	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	6	2.600.000.000			0	1	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK	Tidak adDalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatana di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0,00								
Predikat Kinerja																				SR	SR								
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	Unit	50	4.100.000.000	0	0	10	598.598.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
12	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	50	1.500.000.000			0	1	255.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
13	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	50	2.600.000.000			0	10	343.598.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK	Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efesiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0,00								
Predikat Kinerja																				SR	SR								
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	Persen		2.549.640.000			0	3	400.000.000	0	1.218.000		0	0	0	0	1.218.000	0,00	0,30	0	1.218.000	nan	0,05		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan		
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Izin Usaha	2	1.349.640.000	0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00		Tidak ada di DPA pergeseran	Tidak ada di DPA pergeseran	Tidak ada di DPA pergeseran
1	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	6	1.349.640.000			0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK	Tidak ada di DPA pergeseran	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
									I	II	III	IV																						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)			(7)			(8)			(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11			(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Usaha Pertanian																															pergeseran	pergeseran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00								
Predikat Kinerja																									SR	SR								
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	6	1.200.000.000	0	0	1	300.000.000	0	1.218.000	0	0	0	0	0	0	1.218.000	0,00	0,41	0	1.218.000	0,00	0,10			Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait				
2	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner [UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat]	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan	6	600.000.000			1	150.000.000	0	1.218.000		0	0	0	0	1.218.000	0,00	0,81	0	1.218.000	0,00	0,20	DISNAK		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait					
3	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner [UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan (PMPP)]	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan	6	600.000.000			1	150.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	DISNAK		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,07								
Predikat Kinerja																									SR	SR								
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen		11.928.255.000			20	2.200.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,09	0	2.000.000	nan	0,02			Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan							
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	100	950.000.000	0	0	20	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA				
1	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	950.000.000			60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK		Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,00								
Predikat Kinerja																									SR	SR								
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan	Kali	6	7.679.000.000	0	0	50	1.450.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,14	0	2.000.000	0,00	0,03			Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait					
2	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	6	7.679.000.000			4	1.450.000.000	0	2.000.000		0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,14	0	2.000.000	0,00	0,03	DISNAK		Dalam proses penyusunan administrasi dan operasional kegiatan	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pelaksana teknis terkait					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									0,00	0,01								
Predikat Kinerja																									SR	SR								
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100	3.299.255.000	0	0	100	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			Tidak ada di DPA Pergeseran	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran					
3	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	6	622.255.000			3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK		Tidak ada di DPA Pergeseran	Adanya pergeseran dan efisiensi anggaran					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	5	2.677.000.000		0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISNAK	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA	Tidak ada di DPA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00				
Predikat Kinerja																					SR	SR				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS KEHUTANAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
									I		II	III									IV						
									K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
		DINAS KEHUTANAN			0	0	138.198.964.754		12.293.946.009		0	0	0	12.293.946.009		8,90	12.293.946.009		inf								
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	20.000.000		83.693.350		0	0	0	83.693.350		418,47	83.693.350		inf								
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			0	0	20.000.000		83.693.350		0	0	0	83.693.350		418,47	83.693.350		inf								
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	0	0	0	20.000.000	83.693.350	0	0	0	0	83.693.350	nan	418,47	0	83.693.350	nan	inf							
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	20.000.000	0	83.693.350	0	0	0	0	83.693.350	nan	418,47	0	83.693.350	nan	inf					
1	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
2	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	49.342.100	0	0	0	0	49.342.100	0,00	inf	0	49.342.100	nan	inf	DISHUT				
3	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	0	0	34.351.250	0	0	0	0	34.351.250	nan	inf	0	34.351.250	nan	inf	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan								
Predikat Kinerja																		-	-								
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			0	0	138.178.964.754		12.210.252.659		0	0	0	12.210.252.659		8,84	12.210.252.659		inf								
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			0	0	138.178.964.754		12.210.252.659		0	0	0	12.210.252.659		8,84	12.210.252.659		inf								
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	0	0	0	64.540.762.754	12.077.767.041	0	0	0	0	12.077.767.041	nan	18,71	0	12.077.767.041	nan	inf							
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	700.000.000	0	2.202.000	0	0	0	0	2.202.000	nan	0,31	0	2.202.000	nan	inf					
1	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	200.000.000	1	2.202.000	0	0	0	1	2.202.000	100,00	1,10	1	2.202.000	inf	inf	DISHUT			
2	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
3	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
4	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
5	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
6	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
7	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
8	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
9	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
10	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
11	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	49.334.329.200	0	11.049.538.147	0	0	0	0	0	11.049.538.147	nan	22,40	0	11.049.538.147	nan	inf				
12	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	352	48.000.000.000	340	10.957.104.271	0	0	0	0	340	10.957.104.271	96,59	22,83	340	10.957.104.271	inf	inf	DISHUT			
13	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	984.329.200	3	92.433.876	0	0	0	0	3	92.433.876	25,00	9,39	3	92.433.876	inf	inf	DISHUT			
14	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
15	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
16	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
17	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
18	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
19	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
20	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
21	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan		0		0	12	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		[UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																									
22	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
23	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	750.000.000	0	12.920.000	0	0	0	0	0	12.920.000	nan	1,72	0	12.920.000	nan	inf				
24	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	300.000.000	1	12.920.000		0	0	0	1	12.920.000	100,00	4,31	1	12.920.000	inf	inf	DISHUT			
25	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	170.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
26	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
27	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
28	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
29	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
30	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
31	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
32	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
33	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
34	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
35	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	150.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0		0		0	0	1.400.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0		0	nan	nan				
36	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	400	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
37	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	100	800.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0		0		0	0	2.277.063.088	0	234.374.332	0	0	0	0	0	0	234.374.332	nan	10,29	0	234.374.332	nan	inf			
38	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	2.500.000		0	0	0	0	2.500.000	0,00	25,00	0	2.500.000	nan	inf	DISHUT				
39	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
40	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
41	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	90.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
42	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	997.000		0	0	0	0	997.000	0,00	9,97	0	997.000	nan	inf	DISHUT				
43	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	20	1.991.400		0	0	0	20	1.991.400	2.000,00	19,91	20	1.991.400	inf	inf	DISHUT				
44	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
45	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
46	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	1.632.800		0	0	0	0	1.632.800	0,00	16,33	0	1.632.800	nan	inf	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
47	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
48	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
49	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
50	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
51	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT				
52	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	480.000.000	1	2.600.000	0	0	0	1	2.600.000	100,00	0,54	1	2.600.000	inf	inf	DISHUT			
53	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	8.850.800	0	0	0	0	8.850.800	0,00	44,25	0	8.850.800	nan	inf	DISHUT			
54	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	5.551.000	0	0	0	0	5.551.000	0,00	27,76	0	5.551.000	nan	inf	DISHUT			
55	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00	12,50	0	2.500.000	nan	inf	DISHUT			
56	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	2.499.300	0	0	0	0	2.499.300	0,00	12,50	0	2.499.300	nan	inf	DISHUT			
57	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
58	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	1.680.000	0	0	0	0	1.680.000	0,00	8,40	0	1.680.000	nan	inf	DISHUT			
59	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	35	3.540.200	0	0	0	35	3.540.200	3.500,00	17,70	35	3.540.200	inf	inf	DISHUT			
60	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000	0,00	5,91	0	1.182.000	nan	inf	DISHUT			
61	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
62	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
63	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0		0	1	10.000.000	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0,00	7,00	0	700.000	nan	inf	DISHUT			
64	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0		0	1	140.000.000	1	3.616.500	0	0	0	1	3.616.500	100,00	2,58	1	3.616.500	inf	inf	DISHUT			
65	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTANI]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K						Rp	K	Rp
66	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
67	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
68	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	1.949.900		0	0	0	0	1.949.900	0,00	19,50	0	1.949.900	nan	inf	DISHUT			
69	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
70	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	180.000		0	0	0	0	180.000	0,00	1,80	0	180.000	nan	inf	DISHUT			
71	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
72	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	37	1.885.800		0	0	0	37	1.885.800	3.700,00	18,86	37	1.885.800	inf	inf	DISHUT			
73	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0	1.063.000		0	0	0	0	1.063.000	0,00	10,63	0	1.063.000	nan	inf	DISHUT			
74	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
75	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	580.000		0	0	0	0	580.000	0,00	16,67	0	580.000	nan	inf	DISHUT			
76	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
77	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	900.000		0	0	0	0	900.000	0,00	25,86	0	900.000	nan	inf	DISHUT			
78	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	38.880.000	1	9.600.000		0	0	0	1	9.600.000	100,00	24,69	1	9.600.000	inf	inf	DISHUT			
79	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	870.000		0	0	0	0	870.000	0,00	25,00	0	870.000	nan	inf	DISHUT			
80	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	580.000		0	0	0	0	580.000	0,00	16,67	0	580.000	nan	inf	DISHUT			
81	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	855.000		0	0	0	0	855.000	0,00	24,57	0	855.000	nan	inf	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					I	II			III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
82	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0,00	17,24	0	600.000	nan	inf	DISHUT		
83	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
84	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	21	720.000	0	0	0	21	720.000	2.100,00	20,69	21	720.000	inf	inf	DISHUT		
85	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	580.000	0	0	0	0	580.000	0,00	16,67	0	580.000	nan	inf	DISHUT		
86	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	3.480.000	0	840.000	0	0	0	0	840.000	0,00	24,14	0	840.000	nan	inf	DISHUT		
87	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	4	0	31	27.494.825	0	0	0	31	27.494.825	775,00	inf	31	27.494.825	inf	inf	DISHUT		
88	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Laporan		0		0	1	0	0	31.912.000	0	0	0	0	31.912.000	0,00	inf	0	31.912.000	nan	inf	DISHUT		
89	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	0	25.525.350	0	0	0	0	25.525.350	0,00	inf	0	25.525.350	nan	inf	DISHUT		
90	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	0	7.731.750	0	0	0	0	7.731.750	0,00	inf	0	7.731.750	nan	inf	DISHUT		
91	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	0	22.321.200	0	0	0	0	22.321.200	0,00	inf	0	22.321.200	nan	inf	DISHUT		
92	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	0	15.606.300	0	0	0	0	15.606.300	0,00	inf	0	15.606.300	nan	inf	DISHUT		
93	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	769.903.088	0	32.169.807	0	0	0	0	32.169.807	0,00	4,18	0	32.169.807	nan	inf	DISHUT		
94	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	0	0	10.568.400	0	0	0	0	10.568.400	0,00	inf	0	10.568.400	nan	inf	DISHUT		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	nan										
Predikat Kinerja															-	-										
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.476.454.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
95	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0		0	1	482.074.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
96	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	20	644.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
97	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	5	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
98	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	12	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.885.416.466	0	623.010.562	0	0	0	0	623.010.562	nan	16,03	0	623.010.562	nan	inf				
99	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	20.000.000	1	9.958.350	0	0	0	1	9.958.350	100,00	49,79	1	9.958.350	inf	inf	DISHUT			
100	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	37.920.000	0	7.215.786	0	0	0	0	7.215.786	0,00	19,03	0	7.215.786	nan	inf	DISHUT			
101	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	34.200.000	0	6.973.029	0	0	0	0	6.973.029	0,00	20,39	0	6.973.029	nan	inf	DISHUT			
102	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	330.409.068	3	62.865.161	0	0	0	3	62.865.161	25,00	19,03	3	62.865.161	inf	inf	DISHUT			
103	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	31.728.536	0	3.155.586	0	0	0	0	3.155.586	0,00	9,95	0	3.155.586	nan	inf	DISHUT			
104	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	32.640.000	0	7.418.443	0	0	0	0	7.418.443	0,00	22,73	0	7.418.443	nan	inf	DISHUT			
105	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	31.164.000	21	8.813.028	0	0	0	21	8.813.028	2.100,00	28,28	21	8.813.028	inf	inf	DISHUT			
106	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	42.180.000	0	5.821.837	0	0	0	0	5.821.837	0,00	13,80	0	5.821.837	nan	inf	DISHUT			
107	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	37.528.000	0	7.068.004	0	0	0	0	7.068.004	0,00	18,83	0	7.068.004	nan	inf	DISHUT			
108	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	114.930.000	0	21.619.062	0	0	0	0	21.619.062	0,00	18,81	0	21.619.062	nan	inf	DISHUT			
109	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	26.406.796	0	4.714.350	0	0	0	0	4.714.350	0,00	17,85	0	4.714.350	nan	inf	DISHUT			
110	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	63.279.600	0	9.412.195	0	0	0	0	9.412.195	0,00	14,87	0	9.412.195	nan	inf	DISHUT			
111	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	76.434.000	0	13.197.004	0	0	0	0	13.197.004	0,00	17,27	0	13.197.004	nan	inf	DISHUT			
112	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	144.582.906	0	19.445.490	0	0	0	0	19.445.490	0,00	13,45	0	19.445.490	nan	inf	DISHUT			
113	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan		0		0	1	1.267.480.717	0	198.110.807	0	0	0	0	198.110.807	0,00	15,63	0	198.110.807	nan	inf	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K	Rp
					(5)	Rp	(6)	Rp	(7)	K	Rp	(8)	Rp	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)					(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Disediakan																									
114	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	38.589.928	0	24.316.938	0	0	0	0	24.316.938	0,00	63,01	0	24.316.938	nan	inf	DISHUT				
115	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	149.000.628	0	19.445.490	0	0	0	0	19.445.490	0,00	13,05	0	19.445.490	nan	inf	DISHUT				
116	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	153.582.906	0	20.445.490	0	0	0	0	20.445.490	0,00	13,31	0	20.445.490	nan	inf	DISHUT				
117	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	160.835.128	0	39.440.387	0	0	0	0	39.440.387	0,00	24,52	0	39.440.387	nan	inf	DISHUT				
118	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	295.409.400	0	42.153.793	0	0	0	0	42.153.793	0,00	14,27	0	42.153.793	nan	inf	DISHUT				
119	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	146.832.906	0	30.504.360	0	0	0	0	30.504.360	0,00	20,77	0	30.504.360	nan	inf	DISHUT				
120	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	151.335.128	0	8.982.579	0	0	0	0	8.982.579	0,00	5,94	0	8.982.579	nan	inf	DISHUT				
121	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	177.941.388	0	9.722.745	0	0	0	0	9.722.745	0,00	5,46	0	9.722.745	nan	inf	DISHUT				
122	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	140.742.525	12	18.265.158	0	0	0	12	18.265.158	1.200,00	12,98	12	18.265.158	inf	inf	DISHUT				
123	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	180.262.906	0	23.945.490	0	0	0	0	23.945.490	0,00	13,28	0	23.945.490	nan	inf	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.717.500.000	0	155.722.000	0	0	0	0	0	155.722.000	nan	4,19	0	155.722.000	nan	inf				
124	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	43	800.000.000	9	88.232.000	0	0	0	9	88.232.000	20,93	11,03	9	88.232.000	inf	inf	DISHUT				
125	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	11.285.000	0	0	0	0	11.285.000	0,00	32,24	0	11.285.000	nan	inf	DISHUT				
126	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0,00	18,57	0	6.500.000	nan	inf	DISHUT				
127	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit		0		0	1	35.000.000	0	5.925.000	0	0	0	0	5.925.000	0,00	16,93	0	5.925.000	nan	inf	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
128	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	3.225.000	0	0	0	0	3.225.000	0,00	9,21	0	3.225.000	nan	inf	DISHUT			
129	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	9.300.000	0	0	0	0	9.300.000	0,00	26,57	0	9.300.000	nan	inf	DISHUT			
130	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	2.530.000	0	0	0	0	2.530.000	0,00	7,23	0	2.530.000	nan	inf	DISHUT			
131	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0,00	5,00	0	1.750.000	nan	inf	DISHUT			
132	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
133	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	9	3.950.000	0	0	0	9	3.950.000	900,00	11,29	9	3.950.000	inf	inf	DISHUT			
134	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	15.490.000	0	0	0	0	15.490.000	0,00	44,26	0	15.490.000	nan	inf	DISHUT			
135	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XII)]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
136	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	80	0	20	5.780.000	0	0	0	20	5.780.000	25,00	inf	20	5.780.000	inf	inf	DISHUT			
137	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
138	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
139	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	62.500.000	0	1.755.000	0	0	0	0	1.755.000	0,00	2,81	0	1.755.000	nan	inf	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
										I	II	III	IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																		
		[UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]																																											
140	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	700.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																					
141	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
142	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
143	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
144	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
145	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
146	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
147	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
148	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	65.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
149	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	5	520.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
150	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	5	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																			nan	nan									
Predikat Kinerja																																													
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-		0		0	0	23.878.712.000		104.886.768		0	0	0	0	104.886.768	nan	0,44	0	104.886.768	nan	inf																					
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-		0		0	0	6.666.171.700	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																					
1	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit		0		0	10	6.666.171.700	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				nan	nan								
Predikat Kinerja																																													
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-		0		0	0	800.000.000	0	14.359.108	0	0	0	0	0	14.359.108	nan	1,79	0	14.359.108	nan	inf																					
2	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan	Dokumen		0		0	10	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	I	II				III	IV					K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pengelolaan Hutan yang Tersusun																								
3	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	5.532.208	0	0	0	0	5.532.208	0,00	11,06	0	5.532.208	nan	inf	DISHUT			
4	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	1.913.000	0	0	0	0	1.913.000	0,00	3,83	0	1.913.000	nan	inf	DISHUT			
5	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
6	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
7	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	1.199.800	0	0	0	0	1.199.800	0,00	2,40	0	1.199.800	nan	inf	DISHUT			
8	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
9	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00	1,80	0	900.000	nan	inf	DISHUT			
10	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	1	50.000.000	4	953.500	0	0	0	4	953.500	400,00	1,91	4	953.500	inf	inf	DISHUT			
11	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
12	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		0		0	2	100.000.000	0	3.860.600	0	0	0	0	3.860.600	0,00	3,86	0	3.860.600	nan	inf	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	0	0	0	0	0	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
13	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
14	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
15	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
16	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan	Dokumen		0		0	4	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala																								
17	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
18	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
19	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
20	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	5	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
21	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
22	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
23	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
24	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
25	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		0	4	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
26	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
27	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
28	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		0	4	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
									I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
29	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen		0		0	1	80.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
30	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	5	80.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
31	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
32	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
33	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
34	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
35	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
36	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen		0		0	1	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	0	0	0	0	0	8.882.540.300	0	41.605.960	0	0	0	0	0	41.605.960	nan	0,47	0	41.605.960	nan	inf						
37	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen		0		0	1	95.000.000	1	7.680.000	0	0	0	0	1	7.680.000	100,00	8,08	1	7.680.000	inf	inf	DISHUT					
38	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	125	732.790.000	0	10.019.200	0	0	0	0	0	10.019.200	0,00	1,37	0	10.019.200	nan	inf	DISHUT					
39	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	75	798.414.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	1.920.000	0,00	0,24	0	1.920.000	nan	inf	DISHUT					
40	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VII)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	135	732.790.000	0	2.050.800	0	0	0	0	0	2.050.800	0,00	0,28	0	2.050.800	nan	inf	DISHUT					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
41	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	600	658.881.500	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	DISHUT					
42	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	600	750.640.500	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00	0,12	0	900.000	nan	inf	DISHUT			
43	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	0	771.008.800	0	5.610.000	0	0	0	0	5.610.000	nan	0,73	0	5.610.000	nan	inf	DISHUT			
44	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	75	780.563.500	0	5.663.600	0	0	0	0	5.663.600	0,00	0,73	0	5.663.600	nan	inf	DISHUT			
45	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	0	750.640.500	0	7.762.360	0	0	0	0	7.762.360	nan	1,03	0	7.762.360	nan	inf	DISHUT			
46	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	50	911.811.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
47	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
48	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
49	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	10	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
50	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	5	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
51	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
52	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
53	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
54	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	4	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
55	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
56	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jenis Ha		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
57	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha		0		0	5	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
58	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan		0		0	1	300.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	0	0	0	0	0	4.850.000.000	0	6.610.400	0	0	0	0	0	6.610.400	nan	0,14	0	6.610.400	nan	inf				
59	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
60	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
61	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	0	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
62	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
63	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
64	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	130.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
65	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
66	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
67	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	20.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
68	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
69	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen		0		0	0	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[UPTD KPMP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Pelaksanaan Perlindungan Hutan																						
70	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				1		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
71	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	1	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				1		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
72	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				10		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
73	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	10	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				10		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
74	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				1		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
75	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				10		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
76	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				1		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				
77	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPML HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan	0	0	100	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan				100		0					0	0,00		0		nan		DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
78	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan		0		0	10	80.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan						10		0					0		0,00		0		nan		DISHUT				
79	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan		0		0	0	80.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan						0		0					0		nan		0		nan		DISHUT				
80	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Laporan Patroli	Laporan		0		0	0	80.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
		/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan						0		0					0		nan		0		nan		DISHUT				
81	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
82	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	1	127.520.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
83	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	1000	160.580.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
84	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	0	160.580.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
85	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	1000	945.600.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
86	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	76767	160.580.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
87	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	50	160.580.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
88	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	83.191	257.720.000	0		1.720.000	0	0	0	0	0	0,00	0,67	0	1.720.000	nan	inf	DISHUT			
89	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	1000	193.640.000	0		4.890.400	0	0	0	0	0	0,00	2,53	0	4.890.400	nan	inf	DISHUT			
90	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	0	171.600.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				
91	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha		0		0	3000	171.600.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	-	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
92	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen		0		0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	-	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
93	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan		0		0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	0	0	0	0	0	1.700.000.000	0	42.311.300	0	0	0	0	0	42.311.300	nan	2,49	0	42.311.300	nan	inf			
94	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat		0		0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
95	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat		0		0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
96	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat		0		0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
97	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan		0		0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
98	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang		0		0	1000000	1.400.000.000	0	42.311.300	0	0	0	0	0	42.311.300	0,00	3,02	0	42.311.300	nan	inf	DISHUT		
99	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan [UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN]	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha		0		0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-	-		0		0	0	23.464.449.000		0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-	-	0	0	0	0	0	23.464.449.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang		0		0	90	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
										I	II	III	IV							K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																									
2	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha		0		0	5	23.294.449.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-		0		0	0	23.794.540.000		27.598.850		0	0	0	0	27.598.850	nan	0,12	0	27.598.850	nan	inf			
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	0	0	0	0	0	23.794.540.000	0	27.598.850	0	0	0	0	0	27.598.850	nan	0,12	0	27.598.850	nan	inf			
1	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
2	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	3	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
3	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	1	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
4	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	3	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
5	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
6	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	100	1.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
7	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
8	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	5	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
9	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	10	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
10	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	0	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
11	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		0		0	100	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		
12	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang		0		0	3	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
									I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		[UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]																												
13	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	5	1.130.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
14	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	5	600.000.000	1	9.055.900	0		0	0	1	9.055.900	20,00	1,51	1	9.055.900	inf	inf	DISHUT					
15	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	2	1.130.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
16	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	10	1.130.000.000	0	3.618.750	0		0	0	0	3.618.750	0,00	0,32	0	3.618.750	nan	inf	DISHUT					
17	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	5000	1.730.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
18	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	2	1.130.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
19	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	10	1.130.000.000	0	1.160.600	0		0	0	0	1.160.600	0,00	0,10	0	1.160.600	nan	inf	DISHUT					
20	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	20	1.130.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT			
21	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	3	1.130.000.000	0	4.854.900	0		0	0	0	4.854.900	0,00	0,43	0	4.854.900	nan	inf	DISHUT					
22	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	2	1.130.000.000	0	4.667.500	0		0	0	0	4.667.500	0,00	0,41	0	4.667.500	nan	inf	DISHUT					
23	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit		0		0	0	1.130.000.000	0	4.241.200	0		0	0	0	4.241.200	nan	0,38	0	4.241.200	nan	inf	DISHUT					
24	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	6	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
25	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	100	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
26	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	100	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				
27	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	10	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
28	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	10	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
29	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	10	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
30	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	100	1.000.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
31	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	30	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
32	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	5	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
33	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang		0		0	10	200.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
34	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5000		0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	DISHUT			
35	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
36	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
37	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5.000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
38	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
39	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	50000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
40	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	5000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
41	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	882	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
42	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	3000	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
43	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial [UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)]	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	800	600.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
44	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar		0		0	15000	894.540.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I	II	III	IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-		0		0	0	2.500.501.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																							
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	2.500.501.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																						
1	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang		0		0	100	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																						
2	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga		0		0	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																						
3	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen		0		0	2	1.500.501.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISHUT																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong															
									I	II	III	IV																									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				0		0		14.873.420.380	2.521.606.759	0	0	0		2.521.606.759		16,95		2.521.606.759		inf															
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		150.000.000	1.360.000	0	0	0		1.360.000		0,91		1.360.000		inf															
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		150.000.000	1.360.000	0	0	0		1.360.000		0,91		1.360.000		inf															
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	150.000.000	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	nan	0,91	0	1.360.000	nan	inf															
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	150.000.000	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	nan	0,91	0	1.360.000	nan	inf															
1	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1000	100.000.000	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000	0,00	1,36	0	1.360.000	nan	inf	DINAS ESDM														
2	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																nan	nan				
Predikat Kinerja																																	-	-			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				0		0		14.723.420.380	2.520.246.759	0	0	0	0	2.520.246.759		17,12		2.520.246.759		inf															
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				0		0		14.723.420.380	2.520.246.759	0	0	0	0	2.520.246.759		17,12		2.520.246.759		inf															
	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	13.352.107.380	2.520.246.759	0	0	0	0	2.520.246.759	nan	18,88	0	2.520.246.759	nan	inf															
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	368.412.917	7.450.000	0	0	0	0	7.450.000	nan	2,02	0	7.450.000	nan	inf															
1	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	113.608.600	7.450.000	0	0	0	0	7.450.000	0,00	6,56	0	7.450.000	nan	inf	DINAS ESDM														
2	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	3	157.387.112	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM														
3	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	97.417.205	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan			
Predikat Kinerja																																	-	-			
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	8.238.246.268	2.172.230.645	0	0	0	0	0	2.172.230.645	nan	26,37	0	2.172.230.645	nan	inf														
4	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	62	8.005.171.268	2.126.600.645	0	0	0	0	62	2.126.600.645	100,00	26,57	62	2.126.600.645	inf	inf	DINAS ESDM													
5	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	1	200.000.000	45.630.000	0	0	0	0	0	45.630.000	0,00	22,82	0	45.630.000	nan	inf	DINAS ESDM													
6	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	33.075.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																		nan	nan		
Predikat Kinerja																																		-	-		
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	335.000.000	68.400.403	0	0	0	0	0	68.400.403	nan	20,42	0	68.400.403	nan	inf														
7	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	85.000.000	68.400.403	0	0	0	0	0	68.400.403	0,00	80,47	0	68.400.403	nan	inf	DINAS ESDM													
8	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11									(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)						
9	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan								
Predikat Kinerja																			-	-								
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	378.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan						
10	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0		0	132	82.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
11	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
12	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	62	246.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan								
Predikat Kinerja																			-	-								
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.290.896.511	0	176.421.026	0	0	0	0	0	176.421.026	nan	13,67	0	176.421.026	nan	inf				
13	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	500	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
14	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
15	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	800	100.000.000	0	2.492.250	0	0	0	0	0	2.492.250	0,00	2,49	0	2.492.250	nan	inf	DINAS ESDM			
16	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	910.896.511	0	173.928.776	0	0	0	0	0	173.928.776	0,00	19,09	0	173.928.776	nan	inf	DINAS ESDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan								
Predikat Kinerja																			-	-								
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	270.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
17	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	2	103.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
18	3.29.01.1.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	16	167.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	nan								
Predikat Kinerja																			-	-								
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.774.998.684	0	86.070.685	0	0	0	0	0	86.070.685	nan	4,85	0	86.070.685	nan	inf				
19	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	25.000.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00	10,00	0	2.500.000	nan	inf	DINAS ESDM			
20	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	450.000.000	0	78.520.685	0	0	0	0	0	78.520.685	0,00	17,45	0	78.520.685	nan	inf	DINAS ESDM			
21	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.299.998.684	0	5.050.000	0	0	0	0	0	5.050.000	0,00	0,39	0	5.050.000	nan	inf	DINAS ESDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			nan	inf								
Predikat Kinerja																			-	-								
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	694.970.000	0	9.674.000	0	0	0	0	0	9.674.000	nan	1,39	0	9.674.000	nan	inf				
22	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	12	200.000.000	3	9.674.000	0	0	0	0	3	9.674.000	25,00	4,84	3	9.674.000	inf	inf	DINAS ESDM			
23	3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	24	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
24	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	57	49.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
25	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				
26	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit		0		0	55	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
									I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																						
27	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-		0		0	0	284.148.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
1	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	84.148.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
2	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan		0		0	1	84.148.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-		0		0	0	27.407.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
1	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		
2	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen		0		0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	
3	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada	Laporan		0		0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																							
4	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan		0		0	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	0	0	0	0	0	5.407.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
5	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan		0		0	1	5.407.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-		0		0	0	386.441.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	0	0	0	0	0	386.441.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan		0		0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
2	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
3	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit		0		0	1	36.441.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-		0		0	0	673.317.000		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan		0		0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan					
Predikat Kinerja																				-	-					
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	-	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
2	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam	Laporan		0		0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DINAS ESDM		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
											I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan										
Predikat Kinerja																				-	-										
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	0	0	0	0	0	223.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan										
3	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga		0		0	20	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM									
4	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen		0		0	1	153.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	DINAS ESDM									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan										
Predikat Kinerja																				-	-										

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			781.111.238.378		110.492.913.912		32.098.727.740		3.952.256.221	0	0	0	0		3.952.256.221		12,31		114.445.170.133		14,65					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			36.382.000		36.379.000		31.848.900		0	0	0	0			0		0,00		36.379.000		99,99					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN			36.382.000		36.379.000		31.848.900		0	0	0	0			0		0,00		36.379.000		99,99					
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	36.382.000		36.379.000	100	31.848.900		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	36.379.000	nan	99,99					
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	36.382.000	0	36.379.000	12	31.848.900	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	36.379.000	nan	99,99				
1	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	36.382.000	0	36.379.000	3	31.848.900	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	36.379.000	nan	99,99	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	99,99				
Predikat Kinerja																							-	ST				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			781.074.856.378		110.456.534.912		32.066.878.840		3.952.256.221	0	0	0	0		3.952.256.221		12,33		114.408.791.133		14,65					
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			735.801.314.662		81.830.641.861		24.798.443.096		3.915.348.814	0	0	0	0		3.915.348.814		15,79		85.745.990.675		11,65					
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	703.587.468.176		61.436.300.122	100	19.671.934.303	25	3.908.924.814	0	0	0	0	25	3.908.924.814	25,00	19,87	125	65.345.224.936	inf	9,29					
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	0	1.075.106.398	85	489.309.731	85	190.756.000	21.25	850.000	0	0	0	0	21.25	850.000	25,00	0,45	106.25	490.159.731	inf	45,59				
1	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	590.155.538	11	271.930.250	11	28.220.000	6	0	0	0	0	6	0	54,55	0,00	17	271.930.250	inf	46,08	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI			
2	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	150.867.000	3	84.766.400	3	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	84.766.400	inf	56,19	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI			
3	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	334.083.860	4	132.613.081	4	51.230.000	1	850.000	0	0	0	0	1	850.000	25,00	1,66	5	133.463.081	inf	39,95	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
																								sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
4	3.30.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	0	0	1	87.306.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum	bulan	12	677.084.533.030	24	44.336.259.538	12	13.594.690.876	3	3.290.249.795	0	0	0	0	3	3.290.249.795	25,00	24,20	27	47.626.509.333	225,00	7,03		
5	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	274	675.757.605.130	646	43.771.511.221	93	13.185.063.976	90	3.198.599.795	0	0	0	0	90	3.198.599.795	96,77	24,26	736	46.970.111.016	268,61	6,95	DISPERINDAG	
6	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	1.142.325.750	15	398.297.200	12	398.688.500	3	91.650.000	0	0	0	3	91.650.000	25,00	22,99	18	489.947.200	inf	42,89	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
7	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	184.602.150	52	166.451.117	14	10.938.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	52	166.451.117	inf	90,17	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	20,00				
Predikat Kinerja																					-	SR				
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12	516.591.000	24	156.549.063	12	45.617.000	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	27	156.549.063	225,00	30,30		
8	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	233.880.000	1	3.258.145	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	3.258.145	100,00	1,39	DISPERINDAG		
9	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	270.711.000	2	150.300.918	1	39.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	150.300.918	200,00	55,52	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025	
10	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	12.000.000	1	2.990.000	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.990.000	inf	24,92	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	8,18				
Predikat Kinerja																					-	SR				
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas	Persen	0	1.320.564.500	60	455.735.091	60	350.011.116	15	0	0	0	0	0	15	0	25,00	0,00	75	455.735.091	inf	34,51		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV				K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		Daerah	sumber daya aparatur		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
11	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	354.214.500	1	213.795.900	1	69.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	213.795.900	8,33	60,36	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
12	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	138	966.350.000	174	241.939.191	165	280.261.116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	174	241.939.191	126,09	25,04	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					11,20	7,12					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12	4.759.874.602	24	4.524.382.979	12	1.675.833.903	3	198.117.445	0	0	0	0	0	3	198.117.445	25,00	11,82	27	4.722.500.424	225,00	99,21		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
13	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	109.041.679	1	67.678.700	1	20.149.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	67.678.700	50,00	62,07	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
14	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	7.359.200	1	4.350.500	12	8.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	4.350.500	50,00	59,12	DISPERINDAG			
15	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	235.459.100	1	273.254.550	4	165.429.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	273.254.550	50,00	116,05	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
16	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	65.990.100	1	32.208.956	28	14.518.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	32.208.956	50,00	48,81	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
17	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	719.190.620	1	584.549.720	49	159.310.000	0	6.580.000	0	0	0	0	0	6.580.000	0,00	4,13	1	591.129.720	50,00	82,19	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
																								karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI			
18	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	345.363.640	1	215.313.900	6	42.450.000	0	5.298.400	0	0	0	0	5.298.400	0,00	12,48	1	220.612.300	50,00	63,88	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
19	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.985.000	1	12.383.618	1	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	12.383.618	50,00	77,47	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
20	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	8.520.000	15	4.920.000	12	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15	4.920.000	750,00	57,75	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
21	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	109.060.000	45	89.380.000	45	7.350.000	15	1.350.000	0	0	0	15	1.350.000	33,33	18,37	60	90.730.000	3.000,00	83,19	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
22	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	254	3.138.385.263	197	3.238.511.935	70	1.241.213.903	19	184.889.045	0	0	0	19	184.889.045	27,14	14,90	216	3.423.400.980	85,04	109,08	DISPERINDAG			
23	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	5.520.000	1	1.831.100	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.831.100	50,00	33,17	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					184,13	34,47					
Predikat Kinerja																					ST	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12	653.231.586	24	515.276.796	12	374.377.400	3		0	0	0	0	3		0	25,00	0,00	27	515.276.796	225,00	78,88			
24	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	325.957.000	0	65.331.600	4	64.813.600	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	65.331.600	0,00	20,04	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
25	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	172	327.274.586	28	449.945.196	21	261.462.200	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	28	449.945.196	16,28	137,48	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
26	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	4	48.101.600	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12	12.839.827.644	24	7.829.882.319	12	2.269.080.818	3	405.167.574	0	0	0	0	0	3	405.167.574	25,00	17,86	27	8.235.049.893	225,00	64,14			
27	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	72.245.000	1	39.883.482	1	3.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	1	39.883.482	33,33	55,21	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
28	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	8.550.000	1	4.830.000	1	1.700.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	1	4.830.000	33,33	56,49	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI
29	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	3	1.761.402.801	1	1.046.570.855	1	274.280.000	0	67.042.045	0	0	0	0	0	67.042.045	0,00	24,44	1	1.113.612.900	33,33	63,22	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan																							tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
30	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	728.136.300	1	435.684.183	1	137.100.000	0	25.083.208	0	0	0	0	25.083.208	0,00	18,30	1	460.767.391	33,33	63,28	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
31	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	10.269.493.543	1	6.302.913.799	1	1.853.000.818	0	313.042.321	0	0	0	0	313.042.321	0,00	16,89	1	6.615.956.120	33,33	64,42	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						5,38	9,76				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	12	5.337.739.416	24	3.128.904.605	12	1.171.567.190	3	14.540.000	0	0	0	0	3	14.540.000	25,00	1,24	27	3.143.444.605	225,00	58,89			
32	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	1.841.587.514	71	1.009.183.347	12	287.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	71	1.009.183.347	338,10	54,80	DISPERINDAG			
33	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	387.455.000	230	169.479.047	112	86.840.000	14	14.540.000	0	0	0	14	14.540.000	12,50	16,74	244	184.019.047	1.161,90	47,49	DISPERINDAG			
34	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	5	30.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG			
35	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	2.922.967.666	0	1.826.265.678	1	356.601.518	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.826.265.678	0,00	62,48	DISPERINDAG			
36	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	60.608.420	1	28.347.500	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	28.347.500	8,33	46,77	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
37	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	125.120.816	0	95.629.033	1	330.295.672	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	95.629.033	0,00	76,43	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
										I	II	III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha		686.183.100		98.533.800	5.720	186.585.000	1254		0	0	0	0	1254		0	21.923,08	0,00	1254		98.533.800	inf	14,36					
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik	dokumen	0	376.914.000	0		0	1	130.963.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	0,00				
1	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	376.914.000	0		0	1	130.963.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	0,00	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	0,00							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	-	0	309.269.100	0	98.533.800	0	55.622.000	0		0	0	0	0	0	0		0	nan	0,00	0		98.533.800	nan	31,86				
2	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	0	309.269.100	0	98.533.800	1	55.622.000	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		98.533.800	nan	31,86	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	15,93							
Predikat Kinerja																							-	SR							
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	Persen		1.925.304.350	5.8	739.041.138	6.5	397.807.000	5.8		0	0	0	0	5.8		0	89,23	0,00	11.6		739.041.138	inf	38,39					
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota	kab/kota	0	1.925.304.350	0	739.041.138	19	397.807.000	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		739.041.138	nan	38,39				
1	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit		0	0		0	70	100.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
2	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	0	149.223.600	0	22.575.600	1	250.000.000	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		22.575.600	nan	15,13	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
3	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	0	1.776.080.750	0	716.465.538	50	47.807.000	0		0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		716.465.538	nan	40,34	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan							
Predikat Kinerja																							-	-							
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan	Persen		2.809.492.850	5.72	1.204.980.085	6	533.998.500	4.28		0	0	0	0	4.28		0	71,33	0,00	10		1.204.980.085	inf	42,89					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	pokok dan barang penting																								
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor	laporan	0	0	0	0	1	40.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	0	0	0	0	1	40.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota	kab/kota	0	2.389.528.087	19	1.073.074.922	19	402.931.500	19	0	0	0	0	0	19	0	100,00	0,00	38	1.073.074.922	inf	44,91			
2	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	0	732.577.500	0	278.055.201	1	129.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	278.055.201	nan	37,96	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
3	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	1.656.950.587	1	795.019.721	11	273.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	795.019.721	inf	47,98	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	28,65					
Predikat Kinerja																					-	SR					
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota	kab/kota	0	419.964.763	19	131.905.163	19	90.487.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	131.905.163	inf	31,41				
4	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90 Persen	Laporan	0	419.964.763	1	131.905.163	1	90.487.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	131.905.163	inf	31,41	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	7,85					
Predikat Kinerja																					-	SR					
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$		1.483.193.655	2004.05	1.143.640.257	1.507,97	155.375.000		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2004.05	1.143.640.257	inf	77,11				
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui	kali	0	1.483.193.655	2	1.143.640.257	4	155.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	1.143.640.257	inf	77,11				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	temu usaha, sosialisasi, promosi																							
1	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	0	1.483.193.655	32	1.143.640.257	4	155.375.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	32	1.143.640.257	inf	77,11	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	77,11				
Predikat Kinerja																					-	T				
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	Persen		17.668.143.412	94.83	10.786.896.065	90	3.209.824.293	68.42	5.704.000	0	0	0	68.42	5.704.000	76,02	0,18	163.25	10.792.600.065	inf	61,09			
			Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	Persen			94.44		26		20.6					20.6		79.23		115.04		inf				
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan	orang	0	13.650.917.300	120	8.722.440.429	350	2.490.053.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120	8.722.440.429	inf	63,90				
1	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK		13.650.917.300	1194	8.722.440.429	8	1.946.703.000	8	0	0	0	0	8	0	100,00	0,00	1202	8.722.440.429	inf	63,90	DISPERINDAG		
2	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan	LPKSM	0	0	0	0	10	48.219.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2024		
			Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	0	0	0	0	10	0	0				0	0	0,00	0	0	nan		DISPERINDAG				
3	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	0	0	0	0	80	495.131.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2024		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi	kab/kota	0	2.606.494.650	8	1.359.212.929	19	471.653.793	0	5.704.000	0	0	0	0	5.704.000	0,00	1,21	8	1.364.916.929	inf	52,37			
4	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	0	1.065.939.980	1560	663.850.004	750	117.731.200	322	4.352.000	0	0	0	322	4.352.000	42,93	3,70	1882	668.202.004	inf	62,69	DISPERINDAG		
5	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan	0	1.540.554.670	594	668.942.425	300	265.079.630	107	676.000	0	0	0	107	676.000	35,67	0,26	701	669.618.425	inf	43,47	DISPERINDAG		
6	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk [UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)]	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk	0	0	7	26.420.500	7	88.842.963	0	676.000	0	0	0	0	676.000	0,00	0,76	7	27.096.500	inf	inf	DISPERINDAG		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
									I	II	III	IV																																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																				
																									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Predikat Kinerja																																															
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	kab/kota	0	1.410.731.462	14	705.242.707	19	248.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14	705.242.707	inf	49,99																								
7	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	0	1.410.731.462	2	705.242.707	2	248.117.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	705.242.707	inf	49,99	DISPERINDAG																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							inf	7,14							
Predikat Kinerja																																															
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	Persen		7.641.529.119	9.35	6.421.250.394	5	642.919.000	245.82	720.000	0	0	0	0	245.82	720.000	4.916,40	0,11	255.17	6.421.970.394	inf	84,04																							
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	kali	0	5.992.687.519	5	5.388.584.609	8	266.899.000	1	720.000	0	0	0	0	1	720.000	12,50	0,27	6	5.389.304.609	inf	89,93																							
1	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	0	5.992.687.519	48	5.388.584.609	12	266.899.000	8	720.000	0	0	0	8	720.000	66,67	0,27	56	5.389.304.609	inf	89,93	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																								inf	89,93						
Predikat Kinerja																																									-	T					
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	0	1.648.841.600	900	1.032.665.785	0	376.020.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	900	1.032.665.785	inf	62,63																								
2	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	0	1.648.841.600	900	1.032.665.785	500	376.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	900	1.032.665.785	inf	62,63	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																								inf	31,31						
Predikat Kinerja																																									-	SR					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				781.074.856.378		110.456.534.912		32.066.878.840		3.952.256.221	0	0	0		3.952.256.221		12,33		114.408.791.133		14,65																								
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				45.273.541.716		28.625.893.051		7.268.435.744		36.907.407	0	0	0		36.907.407		0,51		28.662.800.458		63,31																								
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		2.142.436.284	100	974.649.608	100	542.480.844	25	27.070.773	0	0	0	25	27.070.773	25,00	4,99	125	1.001.720.381	inf	46,76																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	260.899.700	12	122.781.200	12	59.087.500	3	405.000	0	0	0	0	3	405.000	25,00	0,69	15	123.186.200	inf	47,22			
1	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD LOGAM]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	48.123.800	1	28.187.000	13	9.795.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	28.187.000	inf	58,57	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
2	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	31.215.900	1	6.099.300	4	1.957.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	6.099.300	inf	19,54	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
3	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	2	17.661.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025		
4	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	46.566.500	1	14.282.700	4	7.813.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	14.282.700	inf	30,67	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
5	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD LOGAM]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	50.000.000	1	30.000.000	38	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	30.000.000	inf	60,00	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
6	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD LOGAM]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	40.564.500	1	23.656.200	5	7.366.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	23.656.200	inf	58,32	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
7	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	29.519.000	1	12.576.000	1	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	12.576.000	inf	42,60	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
8	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD LOGAM]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	7.740.000	12	4.500.000	12	1.620.000	3	405.000	0	0	0	0	3	405.000	25,00	25,00	15	4.905.000	inf	63,37	DISPERINDAG		karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
9	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	7.170.000	12	3.480.000	12	2.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	3.480.000	inf	48,54	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	0	12	0	12	72.641.744	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	0	inf	nan				
10	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	12	72.641.744	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	DISPERINDAG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	1.168.294.000	12	656.804.661	12	151.500.000	3	26.665.773	0	0	0	0	3	26.665.773	25,00	17,60	15	683.470.434	inf	58,50				
11	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD LOGAM]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	523.489.000	1	259.224.043	1	94.200.000	0	15.182.386	0	0	0	0	0	15.182.386	0,00	16,12	1	274.406.429	inf	52,42	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
12	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	644.805.000	1	397.580.618	1	57.300.000	0	11.483.387	0	0	0	0	0	11.483.387	0,00	20,04	1	409.064.005	inf	63,44	DISPERINDAG		Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	9,65						
Predikat Kinerja																					-	SR						
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	bulan	0	713.242.584	12	195.063.747	12	259.251.600	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	195.063.747	inf	27,35				
13	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	94.895.000	16	21.265.000	27	29.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	21.265.000	inf	22,41	DISPERINDAG				
14	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	39.990.000	3	13.330.000	21	13.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	13.330.000	inf	33,33	DISPERINDAG				
15	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD LOGAM]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	578.357.584	0	160.468.747	1	138.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	160.468.747	0,00	27,75	DISPERINDAG	Sub Kegiatan tidak ada pada DPA 2025			
16	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	1	77.781.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DISPERINDAG				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan	Sentra		41.913.835.182	127	26.980.629.792	25	6.486.716.900	0	9.836.634	0	0	0	0	0	9.836.634	0,00	0,15	127	26.990.466.426	inf	64,40				
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standarisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri	IKM dan orang	0	41.913.835.182	0	26.980.629.792	2715	6.486.716.900	0	9.836.634	0	0	0	0	0	9.836.634	0,00	0,15	0	26.990.466.426	nan	64,40				
1	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	0	32.605.372.332	28	22.970.074.598	13	4.670.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	28	22.970.074.598	inf	70,45	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI			
2	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD LOGAM]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	0	4.579.949.250	2	2.145.120.740	3	827.514.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	2.145.120.740	inf	46,84	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI			
3	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	0	4.728.513.600	3	1.865.434.454	6	988.587.000	0	9.836.634	0	0	0	0	0	9.836.634	0,00	1,00	3	1.875.271.088	inf	39,66	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
								I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K				
																									2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	52,31				
Predikat Kinerja																					-	R				
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	Persen		807.007.800	123.53	427.105.137	78	166.614.000	133	0	0	0	0	133	0	170,51	0,00	256.53	427.105.137	inf	52,92			
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan bimtek IUI dan pengawasan	orang	0	807.007.800	40	427.105.137	100	166.614.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	427.105.137	inf	52,92			
1	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen		807.007.800	1	427.105.137	1	166.614.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	427.105.137	inf	52,92	DISPERINDAG		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	52,92				
Predikat Kinerja																					-	R				
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha		410.262.450	103703	243.508.514	47.673	72.624.000	56803	0	0	0	0	56803	0	119.151,30	0,00	160506	243.508.514	inf	59,35			
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat	buku	0	410.262.450	1	243.508.514	30	72.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	243.508.514	inf	59,35			
1	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	0	410.262.450	1	243.508.514	1	72.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	243.508.514	inf	59,35	DISPERINDAG	Indikator sub kegiatan berbeda untuk tahun tahun sebelumnya karena tahun 2024 dan 2025 sesuai dengan indikator pada SIPD RI	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	59,35				
Predikat Kinerja																					-	R				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI				36.195.248.317		68.765.562.222		37.971.411.385		5.039.567.506		0	0	0		5.039.567.506		13,27		73.805.129.728		203,91					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				36.195.248.317		68.765.562.222		37.971.411.385		5.039.567.506		0	0	0		5.039.567.506		13,27		73.805.129.728		203,91					
6.01		INSPEKTORAT DAERAH				36.195.248.317		68.765.562.222		37.971.411.385		5.039.567.506		0	0	0		5.039.567.506		13,27		73.805.129.728		203,91					
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		23.829.681.319	50	64.590.179.192	0	27.119.107.326	26	4.351.090.486		0	0	0	26	4.351.090.486	inf	16,04	76	68.941.269.678	inf	289,31					
6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	141.531.038	100	227.104.926	0	85.315.100	36	20.242.500	0	0	0	0	36	20.242.500	inf	23,73	136	247.347.426	136,00	174,77					
1	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	74.942.810	32	134.565.926	5	58.590.600	1	18.600.000		0	0	0	1	18.600.000	20,00	31,75	33	153.165.926	132,00	204,38	INSPEKTORAT				
2	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	115	7.288.150	1	14.964.300	0	914.000		0	0	0	0	914.000	0,00	6,11	115	8.202.150	inf	inf	INSPEKTORAT				
3	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	20	66.588.228	24	85.250.850	4	11.760.200	0	728.500		0	0	0	0	728.500	0,00	6,19	24	85.979.350	120,00	129,12	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf						
Predikat Kinerja																						-	-						
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	12.388.132.396	50	52.662.554.593	0	20.276.656.516	38	3.874.464.302	0	0	0	0	0	38	3.874.464.302	inf	19,11	88	56.537.018.895	88,00	456,38				
4	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG Orang/ Bulan	742	12.111.272.283	308	51.955.123.822	110	20.000.000.000	42	3.821.994.302		0	0	0	42	3.821.994.302	38,18	19,11	350	55.777.118.124	47,17	460,54	INSPEKTORAT				
5	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Dokumen	59	239.211.630	178	653.819.500	67	240.800.818	13	52.470.000		0	0	0	13	52.470.000	19,40	21,79	191	706.289.500	323,73	295,26	INSPEKTORAT				
6	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan	65	37.648.483	126	53.611.271	13	35.855.698	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	126	53.611.271	193,85	142,40	INSPEKTORAT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						94,12	149,70						
Predikat Kinerja																						ST	ST						
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	61.060.470	50	209.848.146	0	66.181.159	20		0	0	0	0	0	0	0	inf	0,00	70	209.848.146	70,00	343,67				
7	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Unit Dokumen	40	50.565.060	117	185.245.021	8	52.400.000	1		0	0	0	0	1		0	12,50	0,00	118	185.245.021	295,00	366,35	INSPEKTORAT			
8	6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pendoendalian Baranq	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan. Pencoawasan.	Laporan	0	0	2	1.979.500	1	7.324.359	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	2	1.979.500	inf	inf	INSPEKTORAT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III												IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Milik Daerah pada SKPD	dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																								
9	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan	10	10.495.410	108	22.623.625	2	6.456.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	108	22.623.625	1.080,00	215,56	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	422.899.977	50	3.462.925.824	0	1.610.983.300	20	263.344.630	0	0	0	0	20	263.344.630	inf	16,35	70	3.726.270.454	70,00	881,12			
10	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel Paket	186	204.241.950	388	353.715.000	200	123.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	388	353.715.000	208,60	173,18	INSPEKTORAT			
11	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang Orang	400	218.658.027	700	3.109.210.824	110	1.487.113.300	22	263.344.630	0	0	0	22	263.344.630	20,00	17,71	722	3.372.555.454	180,50	1.542,39	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						35,37	155,96				
Predikat Kinerja																						SR	ST				
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	500	1.016.606.822	50	4.352.560.090	0	1.341.750.073	16	90.305.933	0	0	0	0	16	90.305.933	inf	6,73	66	4.442.866.023	13,20	437,03			
12	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah Paket	161	6.867.610	229	25.415.850	12	6.540.581	1	260.000	0	0	0	1	260.000	8,33	3,98	230	25.675.850	142,86	373,87	INSPEKTORAT			
13	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	105	68.939.480	10	34.343.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	105	68.939.480	inf	inf	INSPEKTORAT			
14	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	5	112.768.125	10	91.387.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	112.768.125	inf	inf	INSPEKTORAT			
15	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	unit Paket	1698	175.576.744	3880	543.370.002	12	207.517.200	2	13.752.100	0	0	0	2	13.752.100	16,67	6,63	3882	557.122.102	228,62	317,31	INSPEKTORAT			
16	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kotak Paket	500	63.929.551	53343	214.334.291	100	60.885.287	20	2.521.400	0	0	0	20	2.521.400	20,00	4,14	53363	216.855.691	10.672,60	339,21	INSPEKTORAT			
17	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	eksemplar Dokumen	1320	39.674.124	756	106.522.326	264	37.784.880	13	3.645.000	0	0	0	13	3.645.000	4,92	9,65	769	110.167.326	58,26	277,68	INSPEKTORAT			
18	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Laporan	73	730.558.793	174	3.281.210.016	12	903.290.825	2	70.127.433	0	0	0	2	70.127.433	16,67	7,76	176	3.351.337.449	241,10	458,74	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	500	8.464.896.000	50	512.153.000	0	1.260.681.240	5	0	0	0	0	0	5	0	inf	0,00	55	512.153.000	11,00	6,05			
19	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit Unit	0	0	0	0	1	661.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT			
20	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit Paket	0	127.776.000	122	193.993.000	184	375.406.400	9	0	0	0	0	9	0	4,89	0,00	131	193.993.000	inf	151,82	INSPEKTORAT			
21	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit	41	326.095.000	5	264.300.000	14	180.379.840	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	264.300.000	12,20	81,05	INSPEKTORAT			
22	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit Unit	1	8.000.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	INSPEKTORAT			
23	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit Unit	1	11.025.000	7	53.860.000	6	43.395.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	53.860.000	700,00	488,53	INSPEKTORAT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	1.191.611.081	50	1.159.682.521	0	1.400.085.168	8	68.431.241	0	0	0	0	8	68.431.241	inf	4,89	58	1.228.113.762	11,60	103,06				
24	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat Laporan	12	27.696.282	500	4.169.000	12	5.600.000	2	268.000	0	0	0	0	2	268.000	16,67	4,79	502	4.437.000	4.183,33	16,02	INSPEKTORAT			
25	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	rekening Laporan	12	346.645.881	12	234.717.305	8	341.652.000	1	34.562.151	0	0	0	0	1	34.562.151	12,50	10,12	13	269.279.456	108,33	77,68	INSPEKTORAT			
26	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang Laporan	12	817.268.918	79	920.796.216	15	1.052.833.168	0	33.601.090	0	0	0	0	0	33.601.090	0,00	3,19	79	954.397.306	658,33	116,78	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					190,38	8,10						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	142.943.535	50	2.003.350.092	0	1.077.454.770	6	34.301.880	0	0	0	0	6	34.301.880	inf	3,18	56	2.037.651.972	11,20	1.425,49				
27	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit Unit	0	0	9	153.357.860	8	223.618.600	1	26.928.880	0	0	0	0	1	26.928.880	12,50	12,04	10	180.286.740	inf	inf	INSPEKTORAT			
28	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit	35	81.682.020	33	21.319.500	45	31.670.000	9	2.350.000	0	0	0	0	9	2.350.000	20,00	7,42	42	23.669.500	120,00	28,98	INSPEKTORAT			
29	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit Unit	0	0	1	1.808.964.732	1	801.656.170	0	1.060.000	0	0	0	0	0	1.060.000	0,00	0,13	1	1.810.024.732	inf	inf	INSPEKTORAT			
30	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan Unit	60	61.261.515	27	19.708.000	12	20.510.000	0	3.963.000	0	0	0	0	0	3.963.000	0,00	19,32	27	23.671.000	45,00	38,64	INSPEKTORAT			
31	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan Unit	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-		6.781.116.999	50	3.412.683.382	0	7.243.556.578	34	654.072.120	0	0	0	0	34	654.072.120	inf	9,03	84	4.066.755.502	inf	59,97				
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	100	6.429.906.703	50	3.112.086.632	0	6.807.579.824	35	590.365.420	0	0	0	0	35	590.365.420	inf	8,67	85	3.702.452.052	85,00	57,58				
1	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan Laporan	379	3.941.428.933	165	1.906.234.034	379	3.879.504.820	104	261.903.700	0	0	0	0	104	261.903.700	27,44	6,75	269	2.168.137.734	70,98	55,01	INSPEKTORAT			
2	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan Laporan	177	783.303.787	201	649.482.300	177	815.377.781	44	139.451.110	0	0	0	0	44	139.451.110	24,86	17,10	245	788.933.410	138,42	100,72	INSPEKTORAT			
3	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan Laporan	102	132.186.912	52	27.616.000	102	36.450.000	96	24.150.000	0	0	0	0	96	24.150.000	94,12	66,26	148	51.766.000	145,10	39,16	INSPEKTORAT			
4	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan Laporan	52	200.874.684	52	85.971.250	52	184.126.500	49	96.652.000	0	0	0	0	49	96.652.000	94,23	52,49	101	182.623.250	194,23	90,91	INSPEKTORAT			
5	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan Laporan	4	483.758.550	4	199.934.824	4	974.050.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	199.934.824	100,00	41,33	INSPEKTORAT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
6	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Laporan Kesepakatan	1	129.168.081	7	119.093.719	1	195.036.400	0	47.346.810	0	0	0	0	47.346.810	0,00	24,28	7	166.440.529	700,00	128,86	INSPEKTORAT			
7	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	laporan Dokumen	5	759.185.756	3	123.754.505	5	723.034.053	2	20.861.800	0	0	0	2	20.861.800	40,00	2,89	5	144.616.305	100,00	19,05	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					206,96	67,86					
Predikat Kinerja																					ST	S					
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	100	351.210.296	50	300.596.750	0	435.976.754	32	63.706.700	0	0	0	0	63.706.700	inf	14,61	82	364.303.450	82,00	103,73				
8	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persen Laporan	100	114.611.336	60	1.500.000	100	109.153.654	20	0	0	0	0	20	0	20,00	0,00	80	1.500.000	80,00	1,31	INSPEKTORAT			
9	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen Laporan	100	236.598.960	100	299.096.750	100	326.823.100	32	63.706.700	0	0	0	32	63.706.700	32,00	19,49	132	362.803.450	132,00	153,34	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,56	17,18					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-		5.584.449.999	50	762.699.648	0	3.608.747.481	29	34.404.900	0	0	0	29	34.404.900	inf	0,95	79	797.104.548	inf	14,27				
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	100	954.426.325	50	133.198.590	0	827.318.500	20	783.500	0	0	0	0	20	783.500	inf	0,09	70	133.982.090	70,00	14,04			
1	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen Rekomendasi	1	724.109.767	1	10.427.150	1	439.552.600	0	348.500	0	0	0	0	348.500	0,00	0,08	1	10.775.650	100,00	1,49	INSPEKTORAT			
2	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dokumen Rekomendasi	1	230.316.558	1	122.771.440	1	387.765.900	0	435.000	0	0	0	0	435.000	0,00	0,11	1	123.206.440	100,00	53,49	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	27,49					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-	100	4.630.023.674	50	629.501.058	0	2.781.428.981	30	33.621.400	0	0	0	0	30	33.621.400	inf	1,21	80	663.122.458	80,00	14,32			
3	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Perangkat Daerah	5	1.085.227.521	1	248.956.408	1	1.033.550.020	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	248.956.408	20,00	22,94	INSPEKTORAT			
4	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan Perangkat Daerah	1	1.165.797.946	1	65.575.700	1	184.508.679	0	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000	0,00	4,42	1	73.735.700	100,00	6,32	INSPEKTORAT			
5	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Kegiatan	4	1.253.322.986	4	236.992.350	4	577.113.500	1	25.461.400	0	0	0	1	25.461.400	25,00	4,41	5	262.453.750	125,00	20,94	INSPEKTORAT			
6	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Perangkat Daerah	2	1.125.675.221	2	77.976.600	2	986.256.782	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	77.976.600	100,00	6,93	INSPEKTORAT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					57,50	9,52					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
								I	II	III	IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp
					Predikat Kinerja															R	SR	

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0		0		23.883.955.118	3.567.890.643	0	0	0		3.567.890.643		14,94		3.567.890.643		inf					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		23.883.955.118	3.567.890.643	0	0	0		3.567.890.643		14,94		3.567.890.643		inf					
	5.01	PERENCANAAN				0		0		23.883.955.118	3.567.890.643	0	0	0		3.567.890.643		14,94		3.567.890.643		inf					
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0		0	100	17.725.733.803	0	3.461.851.643	0	0	0	0	3.461.851.643	0,00	19,53	0	3.461.851.643	nan	inf				
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	100	106.436.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
1	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	6	56.606.000	1	0	0	0	0	1	0	16,67	0,00	1	0	inf	nan	BAPPEDA			
2	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	4	14.147.000	4	0	0	0	0	4	0	100,00	0,00	4	0	inf	nan	BAPPEDA			
3	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	35.683.500	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	1	0	inf	nan	BAPPEDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0	0	100	11.916.378.635	0	2.865.043.438	0	0	0	0	0	2.865.043.438	0,00	24,04	0	2.865.043.438	nan	inf			
4	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	100	11.640.495.535	75	2.812.723.438	0	0	0	0	75	2.812.723.438	75,00	24,16	75	2.812.723.438	inf	inf	BAPPEDA		
5	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0		0	12	236.511.800	2	52.320.000	0	0	0	2	52.320.000	16,67	22,12	2	52.320.000	inf	inf	BAPPEDA			
6	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	13	39.371.300	3	0	0	0	0	3	0	23,08	0,00	3	0	inf	nan	BAPPEDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0	0	0	0	100	140.474.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				
7	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	119.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA			
8	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	2	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA			
9	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	4	9.774.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	447.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong											
					(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%																							
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)																	
10	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	168	135.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
11	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	84	312.218.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
12	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Orang		0		0	6	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
			Perundang-Undangan	Orang					6	0						0	0,00		0		nan		BAPPEDA																						
13	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	6	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan																				
Predikat Kinerja																								-	-																				
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0		0	0	100	2.877.356.600	0	202.764.154	0	0	0	0	0	202.764.154	0,00	7,05	0	202.764.154	nan	inf																					
14	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	24	33.892.500	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
15	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	8	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
16	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	17	157.400.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
17	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	75	114.440.100	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
18	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	10	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																					
19	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	4	2.376.624.000	1	115.764.154	0	0	0	0	1	115.764.154	25,00	4,87	1	115.764.154	inf	inf	BAPPEDA																				
20	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	195.000.000	0	87.000.000	0	0	0	0	0	87.000.000	0,00	44,62	0	87.000.000	nan	inf	BAPPEDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan																				
Predikat Kinerja																								-	-																				
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	0		0	0	100	32.076.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan																					
21	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	4	32.076.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																				
22	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	6	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan																				
Predikat Kinerja																								-	-																				
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0		0	0	100	1.715.153.168	0	354.853.418	0	0	0	0	0	354.853.418	0,00	20,69	0	354.853.418	nan	inf																					
23	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	4	348.090.000	1	67.469.706	0	0	0	0	1	67.469.706	25,00	19,38	1	67.469.706	inf	inf	BAPPEDA																				
24	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	1.367.063.168	0	287.383.712	0	0	0	0	0	287.383.712	0,00	21,02	0	287.383.712	nan	inf	BAPPEDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	inf																				
Predikat Kinerja																								-	-																				
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Persen	0		0	0	100	490.640.000	0	39.190.633	0	0	0	0	0	39.190.633	0,00	7,99	0	39.190.633	nan	inf																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp																			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																				
25	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	11	362.490.000	3	34.065.633		0	0	0	3	34.065.633	27,27	9,40	3	34.065.633	inf	inf	BAPPEDA																						
26	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	70	61.900.000	2	5.125.000		0	0	0	2	5.125.000	2,86	8,28	2	5.125.000	inf	inf	BAPPEDA																						
27	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	6.400.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																						
28	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	48	59.850.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Persen		0		0	92	400.000.000	0	71.269.000		0	0	0	0	71.269.000	0,00	17,82	0	71.269.000	nan	inf																							
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	Dokumen	0	0	0	0	3	400.000.000	0	55.629.000	0	0	0	0	0	55.629.000	0,00	13,91	0	55.629.000	nan	inf																							
1	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
2	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
3	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
4	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
5	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen		0		0	3	400.000.000	0	55.629.000	0	0	0	0	0	55.629.000	0,00	13,91	0	55.629.000	nan	inf	BAPPEDA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	4	0	0	15.640.000	0	0	0	0	0	15.640.000	0,00	inf	0	15.640.000	nan	inf																							
6	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen		0		0	1	0	0	15.640.000	0	0	0	0	0	15.640.000	0,00	inf	0	15.640.000	nan	inf	BAPPEDA																						
7	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang		0		0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
8	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang		0		0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
9	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																															
Predikat Kinerja																																															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan					
10	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
11	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
12	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen		0		0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	Persen		0		0	70	5.758.221.315	0	34.770.000		0	0	0	0	34.770.000	0,00	0,60	0	34.770.000	nan	inf				
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	0	0	0	0	3	1.131.261.350	0	20.938.000	0	0	0	0	0	20.938.000	0,00	1,85	0	20.938.000	nan	inf				
			Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	0		0		3		0		0	0	0	0		0,00		0		nan						
1	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	3	328.888.800	0	12.888.000	0	0	0	0	0	12.888.000	0,00	3,92	0	12.888.000	nan	inf	BAPPEDA			
2	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		0		0	3	43.941.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
3	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		0		0	1	106.860.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
4	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		0		0	3	60.130.800	0	8.050.000	0	0	0	0	0	8.050.000	0,00	13,39	0	8.050.000	nan	inf	BAPPEDA			
5	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	3	165.803.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
6	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	3	74.132.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
7	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	1	129.810.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
8	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0		0	3	221.692.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan						
Predikat Kinerja																					-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	0	0	0	0	0	1.582.574.410	0	4.380.000	0	0	0	0	0	4.380.000	nan	0,28	0	4.380.000	nan	inf					
9	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	3	500.722.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
10	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	3	45.586.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
11	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	1	143.705.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
12	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		0		0	3	136.560.600	0	4.380.000	0	0	0	0	0	4.380.000	0,00	3,21	0	4.380.000	nan	inf	BAPPEDA				
13	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	3	455.202.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
14	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan		0		0	3	43.067.509	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
15	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan		0		0	1	182.080.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
16	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		0		0	3	75.649.301	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	0	0	0	0	0	3.044.385.555	0	9.452.000	0	0	0	0	0	9.452.000	nan	0,31	0	9.452.000	nan	inf					
17	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0		0	3	728.323.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
18	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		0		0	3	364.161.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
19	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		0		0	1	318.641.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				
20	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		0		0	3	82.764.000	0	1.785.000	0	0	0	0	0	1.785.000	0,00	2,16	0	1.785.000	nan	inf	BAPPEDA				
21	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	Dokumen		0		0	3	728.323.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II				III	IV					K	Rp	K	Rp											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				Rp	K					Rp													
		Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																																			
22	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		0		0	1	227.601.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPPEDA															
23	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		0		0	3	594.571.155	0	7.667.000	0	0	0	0	7.667.000	0,00	1,29	0	7.667.000	nan	inf	BAPPEDA														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				5.897.040.185.824		4.203.799.598.119		1.355.098.062.333		4.035.973.477		0	0	0	4.035.973.477		0,30		4.207.835.571.596		71,36					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0	0		nan		0		nan					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.897.040.185.824		4.203.799.598.119		1.355.098.062.333		4.035.973.477		0	0	0	4.035.973.477		0,30		4.207.835.571.596		71,36					
5.02		KEUANGAN				5.897.040.185.824		4.203.799.598.119		1.355.098.062.333		4.035.973.477		0	0	0	4.035.973.477		0,30		4.207.835.571.596		71,36					
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		64.404.347.436		47.942.811.329	0	17.909.396.104		3.953.503.477		0	0	0	3.953.503.477	nan	22,08	0	51.896.314.806	nan	80,58					
5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	1.099.437.210	0	469.733.401	0	66.494.300	0	8.575.000	0	0	0	0	8.575.000	nan	12,90	0	478.308.401	nan	43,50					
1	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	773.914.360	20	359.607.751	5	37.326.500	3	0	0	0	0	3	0	60,00	0,00	23	359.607.751	92,00	46,47	BAKEUDA				
2	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	203.389.350	1	65.003.650	1	10.157.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	2	65.003.650	40,00	31,96	BAKEUDA				
3	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	82.133.500	16	45.122.000	4	6.626.000	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	17	45.122.000	85,00	54,94	BAKEUDA				
4	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	40.000.000	0	0	1	12.384.800	1	8.575.000	0	0	0	0	1	8.575.000	100,00	69,24	1	8.575.000	50,00	21,44	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					66,75	38,70						
Predikat Kinerja																					S	SR						
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	45.337.254.998	0	37.830.984.581	0	15.651.203.329	0	3.536.376.151	0	0	0	0	0	3.536.376.151	nan	22,59	0	41.367.360.732	nan	91,24				
5	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	48	44.108.142.748	36	37.188.674.081	80	15.232.993.429	80	3.484.676.151	0	0	0	0	80	3.484.676.151	100,00	22,88	116	40.673.350.232	241,67	92,21	BAKEUDA			
6	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	139.230.000	36	406.417.400	12	375.890.700	3	51.700.000	0	0	0	0	3	51.700.000	25,00	13,75	39	458.117.400	81,25	329,04	BAKEUDA			
7	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	100	1.089.882.250	20	235.893.100	20	42.319.200	4	0	0	0	0	4	0	20,00	0,00	24	235.893.100	24,00	21,64	BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					49,56	63,27						
Predikat Kinerja																					SR	R						
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	760.757.732	0	182.325.753	0	22.633.100	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	182.325.753	nan	23,97					
8	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	80	348.075.032		125.905.237	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	125.905.237	0,00	36,17	BAKEUDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
					I	II			III	IV	(8)	(9)			(10)	(11)						(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
9	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	396.285.000	1	35.963.800	12	3.396.200	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	4	35.963.800	6,67	9,08	BAKEUDA				
10	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	16.397.700	13	20.456.716	12	11.236.900	4	0	0	0	0	4	0	33,33	0,00	17	20.456.716	283,33	124,75	BAKEUDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					29,00	17,00						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	603.330.000	0	415.906.800	0	496.933.400	0	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000	nan	0,54	0	418.606.800	nan	69,38				
11	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		603.330.000		231.544.000	80	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	231.544.000	nan	38,38	BAKEUDA				
12	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	84	184.362.800	5	346.933.400	3	2.700.000	0	0	0	0	3	2.700.000	60,00	0,78	87	187.062.800	inf	inf	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	11.533.149.790	0	5.956.072.341	0	876.271.544	0	263.344.234	0	0	0	0	0	263.344.234	nan	30,05	0	6.219.416.575	nan	53,93				
13	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	378.175.570	48	52.338.050	12	11.315.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	52.338.050	80,00	13,84	BAKEUDA				
14	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	2.138.489.320	48	629.539.250	12	7.015.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	629.539.250	80,00	29,44	BAKEUDA				
15	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	1.705.796.900	48	368.223.150	12	43.910.100	3	5.050.000	0	0	0	0	3	5.050.000	25,00	11,50	51	373.273.150	85,00	21,88	BAKEUDA			
16	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	2.489.017.500	48	279.323.250	12	20.140.000	3	98.026.470	0	0	0	0	3	98.026.470	25,00	486,73	51	377.349.720	85,00	15,16	BAKEUDA			
17	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	199.300.000	48	43.425.000	12	8.380.000	3	2.700.000	0	0	0	0	3	2.700.000	25,00	32,22	51	46.125.000	85,00	23,14	BAKEUDA			
18	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	139.230.000	36	137.266.000	12	45.500.000	3	10.350.000	0	0	0	0	3	10.350.000	25,00	22,75	39	147.616.000	81,25	106,02	BAKEUDA			
19	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	3.879.810.500	48	4.208.797.921	12	546.999.800	3	103.965.346	0	0	0	0	3	103.965.346	25,00	19,01	51	4.312.763.267	85,00	111,16	BAKEUDA			
20	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48	603.330.000	24	237.159.720	12	193.011.044	3	43.252.418	0	0	0	0	3	43.252.418	25,00	22,41	27	280.412.138	56,25	46,48	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					31,88	18,36						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	2.533.462.589	0	1.143.185.996	0	118.795.300	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	1.143.185.996	nan	45,12				
21	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1400	2.333.462.589		208.314.496	5	57.589.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	208.314.496	0,00	8,93	BAKEUDA			
22	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200.000.000	30	934.871.500	8	61.206.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30	934.871.500	300,00	467,44	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,64	21,65						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	1.375.215.834	0	1.422.722.428	0	472.465.131	0	127.551.392	0	0	0	0	0	127.551.392	nan	27,00	0	1.550.273.820	nan	112,73				
23	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	243.092.150	9	44.262.650	12	15.000.000	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	12	44.262.650	20,00	18,21	BAKEUDA			
24	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	1.132.123.684	48	1.378.459.778	12	457.465.131	3	127.551.392	0	0	0	0	3	127.551.392	25,00	27,88	51	1.506.011.170	85,00	133,03	BAKEUDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
			yang Disediakan		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																4,38	6,30											
Predikat Kinerja																SR	SR											
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	1.161.739.283	0	521.880.029	0	204.600.000	0	14.956.700	0	0	0	0	0	14.956.700	nan	7,31	0	536.836.729	nan	46,21				
25	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	1.022.509.283	44	454.012.029	11	181.000.000	6	10.486.700	0	0	0	0	6	10.486.700	54,55	5,79	50	464.498.729	90,91	45,43	BAKEUDA			
26	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	139.230.000	20	67.868.000	10	23.600.000	6	4.470.000	0	0	0	0	6	4.470.000	60,00	18,94	26	72.338.000	54,17	51,96	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																5,58	3,75											
Predikat Kinerja																SR	SR											
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-		5.821.464.997.647		4.151.691.057.152	0	1.334.746.873.229		59.443.000	0	0	0	0	0	59.443.000	nan	0,00	0	4.151.750.500.152	nan	71,32				
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	0	24.582.857.985	0	10.294.728.302	0	4.375.277.917	0	18.260.000	0	0	0	0	0	18.260.000	nan	0,42	0	10.312.988.302	nan	41,95				
1	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	1.957.603.704	38	892.494.754	3	448.078.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	38	892.494.754	380,00	45,59	BAKEUDA	-	-	-
2	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	1.930.086.292	38	978.400.165	3	448.514.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	38	978.400.165	380,00	50,69	BAKEUDA	-	-	-
3	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	0	1.420.788.246	0	201.765.500	51	114.673.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	201.765.500	nan	14,20	BAKEUDA	-	-	-
4	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	255	1.168.126.817	51	0	51	112.645.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	51	0	20,00	0,00	BAKEUDA	-	-	-
5	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	255	2.405.258.246	51	533.865.150	51	136.636.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	51	533.865.150	20,00	22,20	BAKEUDA	-	-	-
6	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	255	1.242.014.689	51	290.520.600	51	69.453.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	51	290.520.600	20,00	23,39	BAKEUDA	-	-	-
7	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	20	9.065.750.634	5	5.028.531.385	7	1.730.963.800	3	3.250.000	0	0	0	0	3	3.250.000	42,86	0,19	8	5.031.781.385	40,00	55,50	BAKEUDA	-	-	-
8	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	25	2.702.693.852	5	1.177.947.889	7	572.297.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	1.177.947.889	20,00	43,58	BAKEUDA	-	-	-
9	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	25	1.786.656.665	5	1.136.533.254	4	620.164.117	1	0	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	6	1.136.533.254	24,00	63,61	BAKEUDA	-	-	-
10	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	200	903.878.840	100	54.669.605	51	121.850.000	0	15.010.000	0	0	0	0	0	15.010.000	0,00	12,32	100	69.679.605	50,00	7,71	BAKEUDA	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	32,65											
Predikat Kinerja																-	SR											
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	6.500.789.233	0	1.627.742.737	0	1.769.497.792	0	2.135.000	0	0	0	0	0	2.135.000	nan	0,12	0	1.629.877.737	nan	25,07				
11	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	63	408.817.554	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA	-	-	-
12	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	95	750.493.237	19	351.616.534	19	235.797.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	351.616.534	20,00	46,85	BAKEUDA	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
13	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	95	751.351.787	19	358.884.700	19	293.212.822	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	358.884.700	20,00	47,77	BAKEUDA	-	-	-	
14	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	95	917.213.954	19	260.657.121	19	312.160.578	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	19	260.657.121	20,00	28,42	BAKEUDA	-	-	-	
15	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	95	475.852.596	19	293.205.149	19	324.051.924	0	2.135.000	0	0	0	0	2.135.000	0,00	0,66	19	295.340.149	20,00	62,07	BAKEUDA	-	-	-
16	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	14	740.300.501	11	145.292.350	3	318.156.768	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11	145.292.350	78,57	19,63	BAKEUDA	-	-	-	
17	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga	76	268.764.951	0	0	19	146.656.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA	-	-	-	
18	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	80	524.197.830	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA	-	-	-	
19	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	87	426.116.500	49	6.634.210	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	49	6.634.210	56,32	1,56	BAKEUDA	-	-	-	
20	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	85	396.928.925	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA	-	-	-	
21	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	76	408.352.308	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	0,00	0,00	BAKEUDA	-	--	-	
22	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi	Dokumen	20	432.399.090	16	211.452.673	4	139.461.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	211.452.673	80,00	48,90	BAKEUDA	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,40	11,60							
Predikat Kinerja																					SR	SR							
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	0	6.619.723.375	0	2.100.638.928	0	1.694.176.463	0	8.871.000	0	0	0	0	0	8.871.000	nan	0,52	0	2.109.509.928	nan	31,87					
23	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	14	1.098.539.194	11	334.460.621	12	282.770.418	3	8.446.000	0	0	0	0	3	8.446.000	25,00	2,99	14	342.906.621	100,00	31,21	BAKEUDA	-	-	-	
24	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	0	0	0	86	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAKEUDA	-	-	-		
25	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	51	1.327.895.242	39	694.957.867	12	285.020.582	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	42	694.957.867	82,35	52,34	BAKEUDA	-	-	-		
26	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	0	1.359.019.972	6	418.309.048	12	311.095.500	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	9	418.309.048	inf	30,78	BAKEUDA	-	-	-		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Laporan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	BAKEUDA							
			Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	BAKEUDA							
27	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	70	1.366.374.279	56	391.291.254	12	320.414.473	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	59	391.291.254	84,29	28,64	BAKEUDA	-	-	-		
28	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	9	1.467.894.688	16	261.620.138	3	394.875.490	2	425.000	0	0	0	2	425.000	66,67	0,11	18	262.045.138	200,00	17,85	BAKEUDA	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	0	4.988.912.477	0	1.524.949.192	0	1.566.607.524	0	30.177.000	0	0	0	0	0	30.177.000	nan	1,93	0	1.555.126.192	nan	31,17					
29	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Dokumen	16	508.614.152	4	128.429.700	12	160.452.915	3	496.000	0	0	0	3	496.000	25,00	0,31	7	128.925.700	43,75	25,35	BAKEUDA	-	-	-		
			Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	BAKEUDA							
30	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	8	1.209.030.623	6	297.894.657	43	381.413.863	43	15.435.000	0	0	0	43	15.435.000	100,00	4,05	49	313.329.657	612,50	25,92	BAKEUDA	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
31	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	35	2.454.219.567	28	1.047.001.085	1	624.811.337	0	14.246.000	0	0	0	0	14.246.000	0,00	2,28	28	1.061.247.085	80,00	43,24	BAKEUDA	-	-	-
32	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	20	191.026.345	15	19.526.000	5	60.263.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15	19.526.000	75,00	10,22	BAKEUDA	-	-	-
33	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	526.649.690	3	7.728.750	1	139.666.209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	7.728.750	60,00	1,47	BAKEUDA	-	-	-
34	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	8	99.372.100	4	24.369.000	156	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	24.369.000	50,00	24,52	BAKEUDA	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	3,84					
Predikat Kinerja																					-	SR					
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	0	5.778.772.714.577	0	4.136.142.997.993	0	1.325.341.313.533	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	4.136.142.997.993	nan	71,57				
35	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	238.473.083.574	12	198.345.685.650	19	560.900.674.068	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	198.345.685.650	240,00	83,17	BAKEUDA	-	-	-
36	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	1.768.493.354.000	3	70.472.393.487	1	28.581.517.665	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	70.472.393.487	60,00	3,98	BAKEUDA	-	-	-
37	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	5	3.771.806.277.003	5	3.867.324.918.856	19	735.859.121.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	3.867.324.918.856	100,00	102,53	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,00	5,13					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-		11.170.840.741		4.165.729.638	0	2.441.793.000		23.027.000	0	0	0	0	23.027.000	nan	0,94	0	4.188.756.638	nan	37,50				
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	0	11.170.840.741	0	4.165.729.638	0	2.441.793.000	0	23.027.000	0	0	0	0	23.027.000	nan	0,94	0	4.188.756.638	nan	37,50				
1	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	5	687.123.500	1	472.369.019	4	145.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	472.369.019	20,00	68,75	BAKEUDA			
2	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	8	1.003.652.000	2	258.810.138	2	260.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	258.810.138	25,00	25,79	BAKEUDA			
3	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	182.975.649	1	31.909.431	1	38.644.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	31.909.431	20,00	17,44	BAKEUDA			
4	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	1.623.127.200	4	354.759.222	1	340.977.000	0	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0,00	1,82	4	360.959.222	80,00	22,24	BAKEUDA			
5	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	5	994.334.278	22	292.832.378	1	227.318.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22	292.832.378	440,00	29,45	BAKEUDA			
6	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	5	969.130.677	42	424.211.460	1	204.586.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	42	424.211.460	840,00	43,77	BAKEUDA			
7	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	834.584.500	3	242.186.330	1	170.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	242.186.330	60,00	29,02	BAKEUDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
8	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	497.279.000	4	60.976.500	1	122.751.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	60.976.500	80,00	12,26	BAKEUDA			
9	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	3.143.711.737	50	1.389.748.936	35	659.222.000	0	4.947.000	0	0	0	0	4.947.000	0,00	0,75	50	1.394.695.936	833,33	44,36	BAKEUDA		
10	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	494.959.900	6	249.544.355	3	113.650.000	1	11.880.000	0	0	0	1	11.880.000	33,33	10,45	7	261.424.355	70,00	52,82	BAKEUDA		
11	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	5	251.076.609	4	176.715.600	1	55.839.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	176.715.600	80,00	70,38	BAKEUDA			
12	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	5	488.885.691	1	211.666.269	1	102.299.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	211.666.269	20,00	43,30	BAKEUDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		214,03	38,30							
Predikat Kinerja																		ST	SR							

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					K	Rp			K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				0		0		79.599.572.758		10.746.108.292		0	0	0		10.746.108.292		13,50		10.746.108.292		inf				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		91.183.000		12.670.000		0	0	0		12.670.000		13,90		12.670.000		inf				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		91.183.000		12.670.000		0	0	0		12.670.000		13,90		12.670.000		inf				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	91.183.000		12.670.000		0	0	0	0	12.670.000	nan	13,90	0	12.670.000	nan	inf				
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	70.980.000	0	10.720.000	0	0	0	0	0	10.720.000	nan	15,10	0	10.720.000	nan	inf				
1	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	70.980.000	0	10.720.000	0	0	0	0	0	10.720.000	0,00	15,10	0	10.720.000	nan	inf	BAPENDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	7.983.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	nan	1,88	0	150.000	nan	inf				
2	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	6.159.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0,00	2,44	0	150.000	nan	inf	BAPENDA			
3	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	1.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	12.220.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	nan	14,73	0	1.800.000	nan	inf				
4	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	26	12.220.000	0.06	1.800.000	0	0	0	0	0.06	1.800.000	0,23	14,73	0.06	1.800.000	inf	inf	BAPENDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		79.508.389.758		10.733.438.292		0	0	0		10.733.438.292		13,50		10.733.438.292		inf				
	5.02	KEUANGAN				0		0		79.508.389.758		10.733.438.292		0	0	0		10.733.438.292		13,50		10.733.438.292		inf				
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	73.343.022.520	25	10.614.244.792		0	0	0	25	10.614.244.792	inf	14,47	25	10.614.244.792	inf	inf				
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	502.635.280	25	13.625.000	0	0	0	0	25	13.625.000	inf	2,71	25	13.625.000	inf	inf				
1	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	2.266.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]																								
2	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	2.721.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
3	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	2.106.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
4	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
5	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	4	191.732.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
6	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	3.118.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
7	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	1.860.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
8	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
9	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
10	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	2.868.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
11	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	4.176.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
12	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	0	2.821.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
13	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	1.876.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
14	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	1.479.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
15	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	3.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
16	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	2.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
17	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	3	2.199.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
18	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	3.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
19	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	1.962.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
20	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen	Dokumen		0		0	1	3.089.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1		0					0		0,00		0		nan		BAPENDA				
21	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen	Dokumen		0		0	2	2.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					2		0					0		0,00		0		nan		BAPENDA				
22	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen		0		0	1	3.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
			RKA-SKPD	Dokumen					1		0					0		0,00		0		nan		BAPENDA				
23	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	2	55.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
24	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
25	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	18	114.739.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
26	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					I	II			III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]																										
27	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	2.821.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
28	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
29	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
30	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	6.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
31	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	1.711.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
32	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	4.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
33	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
34	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	4	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
35	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	0	6.590.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
36	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
37	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	2	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
38	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		0		0	1	38.251.000	1	13.625.000	0	0	0	1	13.625.000	100,00	35,62	1	13.625.000	inf	inf	BAPENDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
										I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp			
Predikat Kinerja																								-	-				
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	49.641.971.321	25	6.404.122.665	0	0	0	0	25	6.404.122.665	inf	12,90	25	6.404.122.665	inf	inf					
39	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	205	47.523.640.609	205	6.126.515.742	0	0	0	205	6.126.515.742	100,00	12,89	205	6.126.515.742	inf	inf	BAPENDA					
40	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan Dokumen		0		0	12	45.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
41	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	628.112.712	3	69.926.923	0	0	0	3	69.926.923	25,00	11,13	3	69.926.923	inf	inf	BAPENDA					
42	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	74.520.000	0	18.630.000	0	0	0	0	18.630.000	0,00	25,00	0	18.630.000	nan	inf	BAPENDA					
43	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	106.180.000	0	10.720.000	0	0	0	0	10.720.000	0,00	10,10	0	10.720.000	nan	inf	BAPENDA					
44	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	86.880.000	3	10.380.000	0	0	0	3	10.380.000	25,00	11,95	3	10.380.000	inf	inf	BAPENDA					
45	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	70.920.000	3	10.380.000	0	0	0	3	10.380.000	25,00	14,64	3	10.380.000	inf	inf	BAPENDA					
46	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	68.100.000	0	10.720.000	0	0	0	0	10.720.000	0,00	15,74	0	10.720.000	nan	inf	BAPENDA					
47	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	24	72.930.000	6	15.570.000	0	0	0	6	15.570.000	25,00	21,35	6	15.570.000	inf	inf	BAPENDA					
48	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan Dokumen		0		0	12	87.140.000	3	10.720.000	0	0	0	3	10.720.000	25,00	12,30	3	10.720.000	inf	inf	BAPENDA					
49	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	82.302.000	3	10.720.000	0	0	0	3	10.720.000	25,00	13,03	3	10.720.000	inf	inf	BAPENDA					
50	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	96.742.000	0	10.720.000	0	0	0	0	10.720.000	0,00	11,08	0	10.720.000	nan	inf	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp	
		PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]																									
51	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	72.462.000	3	15.570.000	0	0	0	3	15.570.000	25,00	21,49	3	15.570.000	inf	inf	BAPENDA			
52	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang Dokumen		0		0	4	82.090.000	1	10.550.000	0	0	0	1	10.550.000	25,00	12,85	1	10.550.000	inf	inf	BAPENDA			
53	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	24	94.168.000	6	10.720.000	0	0	0	6	10.720.000	25,00	11,38	6	10.720.000	inf	inf	BAPENDA			
54	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	80.140.000	0	10.720.000	0	0	0	0	10.720.000	0,00	13,38	0	10.720.000	nan	inf	BAPENDA			
55	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	66.322.000	3	10.380.000	0	0	0	3	10.380.000	25,00	15,65	3	10.380.000	inf	inf	BAPENDA			
56	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	77.220.000	3	16.080.000	0	0	0	3	16.080.000	25,00	20,82	3	16.080.000	inf	inf	BAPENDA			
57	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	76.480.000	3	9.020.000	0	0	0	3	9.020.000	25,00	11,79	3	9.020.000	inf	inf	BAPENDA			
58	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	73.860.000	3	16.080.000	0	0	0	3	16.080.000	25,00	21,77	3	16.080.000	inf	inf	BAPENDA			
59	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	18	6.522.000	4		0	0	0	4	0	22,22	0,00	4	0	inf	nan	BAPENDA			
60	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	70.000.000	3		0	0	0	3	0	25,00	0,00	3	0	inf	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III		IV	K		Rp	K					Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
61	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	12	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	nan	nan	BAPENDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	591.440.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
62	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	2	396.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
63	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	4	195.440.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	369.762.000	0		0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
64	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	16	12.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
65	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	75	112.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
66	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	16	15.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
67	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	8	12.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
68	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	2	13.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
69	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	orang Paket		0		0	8	0	0		0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA			
70	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	7.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
71	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	2	10.500.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
72	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	9	6.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp				
73	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	7	5.250.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
74	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	5.250.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
75	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	6.750.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
76	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	8	6.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
77	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	11	10.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
78	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	11	13.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
79	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	6	4.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
80	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	9.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
81	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	7	10.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
82	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	6	109.512.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan								
Predikat Kinerja																							-	-								
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	5.139.192.049	25	1.767.568.319	0	0	0	0	0	25	1.767.568.319	inf	34,39	25	1.767.568.319	inf	inf							
83	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah Paket		0		0	50	1.699.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						
84	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.682.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
85	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	2.797.000	3	688.000	0	0	0	3	688.000	25,00	24,60	3	688.000	inf	inf	BAPENDA			
86	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	2.665.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
87	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	34.910.000	3	5.203.000	0	0	0	3	5.203.000	25,00	14,90	3	5.203.000	inf	inf	BAPENDA			
88	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	10	2.421.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
89	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
90	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	2.403.000	2	915.000	0	0	0	2	915.000	40,00	38,08	2	915.000	inf	inf	BAPENDA			
91	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan Paket		0		0	12	8.744.100	3	2.918.600	0	0	0	3	2.918.600	25,00	33,38	3	2.918.600	inf	inf	BAPENDA			
92	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	2.848.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
93	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	4.620.000	0	1.109.000	0	0	0	0	1.109.000	0,00	24,00	0	1.109.000	nan	inf	BAPENDA			
94	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.946.100	1	725.500	0	0	0	1	725.500	100,00	24,63	1	725.500	inf	inf	BAPENDA			
95	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	2.977.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]																								
96	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	10	2.421.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
97	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persen Paket		0		0	100	2.442.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
98	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.730.000	0	1.337.000	0	0	0	0	0	1.337.000	0,00	48,97	0	1.337.000	nan	inf	BAPENDA	
99	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	4.355.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
100	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	50	1.886.000	0	404.800	0	0	0	0	0	404.800	0,00	21,46	0	404.800	nan	inf	BAPENDA	
101	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.990.400	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
102	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA	
103	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	25	228.605.600	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
104	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	937.300	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
105	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	1	2.878.500	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
106	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA	
107	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	34	51.543.400	3	4.157.900		0	0	0	3	4.157.900	8,82	8,07	3	4.157.900	inf	inf	BAPENDA	
108	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	48.722.800	3	5.220.200		0	0	0	3	5.220.200	25,00	10,71	3	5.220.200	inf	inf	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]																									
109	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	41.664.600	3	322.000	0	0	0	3	322.000	25,00	0,77	3	322.000	inf	inf	BAPENDA			
110	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan Paket		0		0	12	23.731.500	3	4.870.000	0	0	0	3	4.870.000	25,00	20,52	3	4.870.000	inf	inf	BAPENDA			
111	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	41.373.500	0	4.910.500	0	0	0	0	4.910.500	0,00	11,87	0	4.910.500	nan	inf	BAPENDA			
112	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	59.271.300	3	4.862.400	0	0	0	3	4.862.400	25,00	8,20	3	4.862.400	inf	inf	BAPENDA			
113	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	3	50.456.500	1	5.482.600	0	0	0	1	5.482.600	33,33	10,87	1	5.482.600	inf	inf	BAPENDA			
114	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	23.273.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BAPENDA			
115	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan Paket		0		0	12	43.565.800	3	8.832.500	0	0	0	3	8.832.500	25,00	20,27	3	8.832.500	inf	inf	BAPENDA			
116	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	42.609.700	0	5.695.000	0	0	0	0	5.695.000	0,00	13,37	0	5.695.000	nan	inf	BAPENDA			
117	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	43.730.500	0	9.286.800	0	0	0	0	9.286.800	0,00	21,24	0	9.286.800	nan	inf	BAPENDA			
118	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	57.627.200	3	5.421.000	0	0	0	3	5.421.000	25,00	9,41	3	5.421.000	inf	inf	BAPENDA			
119	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	40.206.900	0	5.474.300	0	0	0	0	5.474.300	0,00	13,62	0	5.474.300	nan	inf	BAPENDA			
120	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	12	345.719.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BAPENDA			
121	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	bulan Paket		0		0	12	68.463.000	3	3.704.000	0	0	0	3	3.704.000	25,00	5,41	3	3.704.000	inf	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
122	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	34	28.897.700	3	6.305.000		0	0	0	3	6.305.000	8,82	21,82	3	6.305.000	inf	inf	BAPENDA			
123	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	200.065.500	0	27.148.200		0	0	0	0	27.148.200	0,00	13,57	0	27.148.200	nan	inf	BAPENDA			
124	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	23.125.100	1	4.547.600		0	0	0	1	4.547.600	20,00	19,67	1	4.547.600	inf	inf	BAPENDA			
125	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	50.695.300	0	8.806.900		0	0	0	0	8.806.900	0,00	17,37	0	8.806.900	nan	inf	BAPENDA			
126	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	7	27.932.500	1	495.000		0	0	0	1	495.000	14,29	1,77	1	495.000	inf	inf	BAPENDA			
127	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	7	15.075.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
128	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	6	11.880.000	2	2.475.000		0	0	0	2	2.475.000	33,33	20,83	2	2.475.000	inf	inf	BAPENDA			
129	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	13.897.000	0	3.151.000		0	0	0	0	3.151.000	0,00	22,67	0	3.151.000	nan	inf	BAPENDA			
130	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	13.500.000	0	9.568.000		0	0	0	0	9.568.000	0,00	70,87	0	9.568.000	nan	inf	BAPENDA			
131	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	11.471.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
132	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.100	0	4.278.000		0	0	0	0	4.278.000	0,00	28,52	0	4.278.000	nan	inf	BAPENDA			
133	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	100.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
134	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persen Paket		0		0	100	24.790.000	3	1.538.000		0	0	0	3	1.538.000	3,00	6,20	3	1.538.000	inf	inf	BAPENDA			
135	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	15.000.100	0	3.610.500		0	0	0	0	3.610.500	0,00	24,07	0	3.610.500	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp												K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Disediakan																								
136	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	12	15.000.000	3	580.000	0	0	0	3	580.000	25,00	3,87	3	580.000	inf	inf	BAPENDA			
137	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	42500	15.000.000	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0,00	6,00	0	900.000	nan	inf	BAPENDA			
138	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan Paket		0		0	12	8.335.000	3	1.350.000	0	0	0	3	1.350.000	25,00	16,20	3	1.350.000	inf	inf	BAPENDA			
139	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	5	4.143.300	1	825.000	0	0	0	1	825.000	20,00	19,91	1	825.000	inf	inf	BAPENDA			
140	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	11.701.100	0	3.998.500	0	0	0	0	3.998.500	0,00	34,17	0	3.998.500	nan	inf	BAPENDA			
141	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	54.358.600	0	1.730.800	0	0	0	0	1.730.800	0,00	3,18	0	1.730.800	nan	inf	BAPENDA			
142	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	21.600.196	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
143	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	14.038.200	0	1.752.000	0	0	0	0	1.752.000	0,00	12,48	0	1.752.000	nan	inf	BAPENDA			
144	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	2.640.000	0	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00	16,67	0	440.000	nan	inf	BAPENDA			
145	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	12	1.824.000	3	270.000	0	0	0	3	270.000	25,00	14,80	3	270.000	inf	inf	BAPENDA			
146	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bulan Dokumen		0		0	12	1.440.000	3	240.000	0	0	0	3	240.000	25,00	16,67	3	240.000	inf	inf	BAPENDA			
147	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	12	27.360.000	3	3.360.000	0	0	0	3	3.360.000	25,00	12,28	3	3.360.000	inf	inf	BAPENDA			
148	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	24	2.880.000	6	720.000	0	0	0	6	720.000	25,00	25,00	6	720.000	inf	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]																												
149	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		12	3.312.000	3		0	0	0	0	3		0	25,00	0,00	3		0	inf	nan	BAPENDA			
150	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		24	2.640.000	6		440.000	0	0	0	6		440.000	25,00	16,67	6		440.000	inf	inf	BAPENDA			
151	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		24	3.648.000	6		600.000	0	0	0	6		600.000	25,00	16,45	6		600.000	inf	inf	BAPENDA			
152	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		1	3.060.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA			
153	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		2	3.648.000	0		300.000	0	0	0	0		300.000	0,00	8,22	0		300.000	nan	inf	BAPENDA			
154	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		12	2.640.000	3		440.000	0	0	0	3		440.000	25,00	16,67	3		440.000	inf	inf	BAPENDA			
155	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		24	3.660.000	6		405.000	0	0	0	6		405.000	25,00	11,07	6		405.000	inf	inf	BAPENDA			
156	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		1	3.592.000	0		450.000	0	0	0	0		450.000	0,00	12,53	0		450.000	nan	inf	BAPENDA			
157	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bulan Dokumen	0		0		12	3.240.000	3		810.000	0	0	0	3		810.000	25,00	25,00	3		810.000	inf	inf	BAPENDA			
158	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		24	3.060.000	6		765.000	0	0	0	6		765.000	25,00	25,00	6		765.000	inf	inf	BAPENDA			
159	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		1	3.240.000	0		810.000	0	0	0	0		810.000	0,00	25,00	0		810.000	nan	inf	BAPENDA			
160	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0		12	1.800.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA			
161	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0		0		1	25.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					I	II			III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K
162	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	64.847.200	0	84.396.050	0	0	0	0	84.396.050	0,00	130,15	0	84.396.050	nan	inf	BAPENDA			
163	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	866.685.846	0	187.715.305	0	0	0	0	187.715.305	0,00	21,66	0	187.715.305	nan	inf	BAPENDA			
164	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	17.229.326	0	71.208.570	0	0	0	0	71.208.570	0,00	413,30	0	71.208.570	nan	inf	BAPENDA			
165	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	49.006.264	0	44.715.000	0	0	0	0	44.715.000	0,00	91,24	0	44.715.000	nan	inf	BAPENDA			
166	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	24	50.339.825	6	42.896.000	0	0	0	6	42.896.000	25,00	85,21	6	42.896.000	inf	inf	BAPENDA			
167	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	40.428.622	3	49.610.550	0	0	0	3	49.610.550	25,00	122,71	3	49.610.550	inf	inf	BAPENDA			
168	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan Laporan		0		0	12	99.706.000	3	32.738.487	0	0	0	3	32.738.487	25,00	32,84	3	32.738.487	inf	inf	BAPENDA			
169	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	48.480.000	3	69.280.917	0	0	0	3	69.280.917	25,00	142,91	3	69.280.917	inf	inf	BAPENDA			
170	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	30	48.040.333	10	44.621.521	0	0	0	10	44.621.521	33,33	92,88	10	44.621.521	inf	inf	BAPENDA			
171	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan Laporan		0		0	12	65.712.862	3	77.265.100	0	0	0	3	77.265.100	25,00	117,58	3	77.265.100	inf	inf	BAPENDA			
172	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	85.125.000	3	107.106.700	0	0	0	3	107.106.700	25,00	125,82	3	107.106.700	inf	inf	BAPENDA			
173	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	30	33.188.000	6	57.600.755	0	0	0	6	57.600.755	20,00	173,56	6	57.600.755	inf	inf	BAPENDA			
174	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	27.781.000	0	54.694.518	0	0	0	0	54.694.518	0,00	196,88	0	54.694.518	nan	inf	BAPENDA			
175	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengqaraan Rapat	Laporan		0		0	30	33.253.338	10	38.560.346	0	0	0	10	38.560.346	33,33	115,96	10	38.560.346	inf	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
176	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	36	50.885.000	12	51.549.300	0	0	0	12	51.549.300	33,33	101,31	12	51.549.300	inf	inf	BAPENDA			
177	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	36	44.564.990	9	50.324.450	0	0	0	9	50.324.450	25,00	112,92	9	50.324.450	inf	inf	BAPENDA			
178	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	24	69.157.333	6	44.674.840	0	0	0	6	44.674.840	25,00	64,60	6	44.674.840	inf	inf	BAPENDA			
179	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	12	61.773.400	3	68.925.000	0	0	0	3	68.925.000	25,00	111,58	3	68.925.000	inf	inf	BAPENDA			
180	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	30	43.491.264	7	54.190.310	0	0	0	7	54.190.310	23,33	124,60	7	54.190.310	inf	inf	BAPENDA			
181	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	36	23.100.000	9	4.999.500	0	0	0	9	4.999.500	25,00	21,64	9	4.999.500	inf	inf	BAPENDA			
182	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	58.080.000	3	14.166.000	0	0	0	3	14.166.000	25,00	24,39	3	14.166.000	inf	inf	BAPENDA			
183	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	22.500.000	0	5.499.000	0	0	0	0	5.499.000	0,00	24,44	0	5.499.000	nan	inf	BAPENDA			
184	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	23.100.000	0	5.449.500	0	0	0	0	5.449.500	0,00	23,59	0	5.449.500	nan	inf	BAPENDA			
185	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	22.080.000	3	5.166.000	0	0	0	3	5.166.000	25,00	23,40	3	5.166.000	inf	inf	BAPENDA			
186	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	22.080.000	0	5.511.000	0	0	0	0	5.511.000	0,00	24,96	0	5.511.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
187	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan Dokumen		0		0	12	22.080.000	3	5.166.000	0	0	0	3	5.166.000	25,00	23,40	3	5.166.000	inf	inf	BAPENDA			
188	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	21.060.000	3	5.008.000	0	0	0	3	5.008.000	25,00	23,78	3	5.008.000	inf	inf	BAPENDA			
189	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	40.080.000	0	9.999.000	0	0	0	0	9.999.000	0,00	24,95	0	9.999.000	nan	inf	BAPENDA			
190	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persen Dokumen		0		0	100	21.060.000	0	5.249.250	0	0	0	0	5.249.250	0,00	24,93	0	5.249.250	nan	inf	BAPENDA			
191	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	21.060.000	3	5.249.250	0	0	0	3	5.249.250	25,00	24,93	3	5.249.250	inf	inf	BAPENDA			
192	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	22.080.000	3	3.666.000	0	0	0	3	3.666.000	25,00	16,60	3	3.666.000	inf	inf	BAPENDA			
193	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	59.100.000	0	14.332.500	0	0	0	0	14.332.500	0,00	24,25	0	14.332.500	nan	inf	BAPENDA			
194	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	21.060.000	3	5.249.250	0	0	0	3	5.249.250	25,00	24,93	3	5.249.250	inf	inf	BAPENDA			
195	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	0	0		0		0	0	39.060.000	0	9.749.250	0	0	0	0	9.749.250	nan	24,96	0	9.749.250	nan	inf	BAPENDA			
196	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	-	-		0		0	0	4.080.000	0	666.000	0	0	0	0	666.000	nan	16,32	0	666.000	nan	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%						(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
197	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	36	21.060.000	9	4.999.500	0	0	0	9	4.999.500	25,00	23,74	9	4.999.500	inf	inf	BAPENDA						
198	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	1	757.356.250	0	246.220.000	0	0	0	0	246.220.000	0,00	32,51	0	246.220.000	nan	inf	BAPENDA						
199	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0		0	12	19.785.000	3	4.500.000	0	0	0	3	4.500.000	25,00	22,74	3	4.500.000	inf	inf	BAPENDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.086.976.800	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan							
200	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	12	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
201	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
202	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA						
203	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	81	1.085.320.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
204	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	2	201.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
205	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	1	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
206	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan							
Predikat Kinerja																						-	-							
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	10.929.271.655	25	2.219.728.108	0	0	0	0	25	2.219.728.108	inf	20,31	25	2.219.728.108	inf	inf						
207	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1430	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA						
208	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	850.200.000	3	198.913.984	0	0	0	3	198.913.984	25,00	23,40	3	198.913.984	inf	inf	BAPENDA						
209	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan Laporan		0		0	12	714.469.500	3	150.809.826	0	0	0	3	150.809.826	25,00	21,11	3	150.809.826	inf	inf	BAPENDA						
210	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	173.394.000	3	42.630.483	0	0	0	3	42.630.483	25,00	24,59	3	42.630.483	inf	inf	BAPENDA						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
		PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
211	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	183.528.000	0	35.012.303	0	0	0	0	35.012.303	0,00	19,08	0	35.012.303	nan	inf	BAPENDA			
212	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	102.380.400	3	29.572.891	0	0	0	3	29.572.891	25,00	28,89	3	29.572.891	inf	inf	BAPENDA			
213	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	200.268.000	0	46.355.841	0	0	0	0	46.355.841	0,00	23,15	0	46.355.841	nan	inf	BAPENDA			
214	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan Laporan		0		0	12	301.788.000	3	63.165.732	0	0	0	3	63.165.732	25,00	20,93	3	63.165.732	inf	inf	BAPENDA			
215	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	159.052.000	0	35.374.556	0	0	0	0	35.374.556	0,00	22,24	0	35.374.556	nan	inf	BAPENDA			
216	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	143.544.000	3	33.199.227	0	0	0	3	33.199.227	25,00	23,13	3	33.199.227	inf	inf	BAPENDA			
217	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan Laporan		0		0	12	146.376.000	3	34.024.883	0	0	0	3	34.024.883	25,00	23,24	3	34.024.883	inf	inf	BAPENDA			
218	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	133.704.000	0	29.105.892	0	0	0	0	29.105.892	0,00	21,77	0	29.105.892	nan	inf	BAPENDA			
219	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	211.068.000	0	45.686.782	0	0	0	0	45.686.782	0,00	21,65	0	45.686.782	nan	inf	BAPENDA			
220	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	3	129.564.000	1	31.491.568	0	0	0	1	31.491.568	33,33	24,31	1	31.491.568	inf	inf	BAPENDA			
221	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	5	144.366.000	2	27.255.160	0	0	0	2	27.255.160	40,00	18,88	2	27.255.160	inf	inf	BAPENDA			
222	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	5	133.012.800	2	26.489.231	0	0	0	2	26.489.231	40,00	19,91	2	26.489.231	inf	inf	BAPENDA			
223	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	122.985.000	3	26.530.346	0	0	0	3	26.530.346	25,00	21,57	3	26.530.346	inf	inf	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]																								
224	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	154.368.000	0	42.049.794		0	0	0	0	42.049.794	0,00	27,24	0	42.049.794	nan	inf	BAPENDA	
225	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	127.476.000	3	19.715.301		0	0	0	3	19.715.301	25,00	15,47	3	19.715.301	inf	inf	BAPENDA	
226	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	12	210.876.000	3	40.608.558		0	0	0	3	40.608.558	25,00	19,26	3	40.608.558	inf	inf	BAPENDA	
227	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	321.552.554	3	66.092.633		0	0	0	3	66.092.633	25,00	20,55	3	66.092.633	inf	inf	BAPENDA	
228	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	6	157.039.328	1	37.904.084		0	0	0	1	37.904.084	16,67	24,14	1	37.904.084	inf	inf	BAPENDA	
229	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	367.242.822	0	67.056.322		0	0	0	0	67.056.322	0,00	18,26	0	67.056.322	nan	inf	BAPENDA	
230	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan		0		0	1	725.901.085	0	134.978.505		0	0	0	0	134.978.505	0,00	18,59	0	134.978.505	nan	inf	BAPENDA	
231	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	4	183.386.806	1	43.427.786		0	0	0	1	43.427.786	25,00	23,68	1	43.427.786	inf	inf	BAPENDA	
232	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	231.307.864	0	47.380.125		0	0	0	0	47.380.125	0,00	20,48	0	47.380.125	nan	inf	BAPENDA	
233	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	281.423.283	0	80.254.763		0	0	0	0	80.254.763	0,00	28,52	0	80.254.763	nan	inf	BAPENDA	
234	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	281.423.283	3	66.332.161		0	0	0	3	66.332.161	25,00	23,57	3	66.332.161	inf	inf	BAPENDA	
235	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	226.559.151	3	61.788.170		0	0	0	3	61.788.170	25,00	27,27	3	61.788.170	inf	inf	BAPENDA	
236	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	281.423.283	0	66.332.161		0	0	0	0	66.332.161	0,00	23,57	0	66.332.161	nan	inf	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
					K	Rp			I	II	III	IV		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]																							
237	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	7	317.052.554	2	63.607.434	0	0	0	2	63.607.434	28,57	20,06	2	63.607.434	inf	inf	BAPENDA	
238	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan Laporan		0		0	12	453.283.549	3	91.647.417	0	0	0	3	91.647.417	25,00	20,22	3	91.647.417	inf	inf	BAPENDA	
239	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	0	279.280.209	0	55.688.406	0	0	0	0	55.688.406	nan	19,94	0	55.688.406	nan	inf	BAPENDA	
240	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	276.923.283	0	65.134.491	0	0	0	0	65.134.491	0,00	23,52	0	65.134.491	nan	inf	BAPENDA	
241	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	6	245.762.814	2	84.928.285	0	0	0	2	84.928.285	33,33	34,56	2	84.928.285	inf	inf	BAPENDA	
242	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	200.802.345	3	47.380.115	0	0	0	3	47.380.115	25,00	23,60	3	47.380.115	inf	inf	BAPENDA	
243	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	326.083.752	0	75.808.184	0	0	0	0	75.808.184	0,00	23,25	0	75.808.184	nan	inf	BAPENDA	
244	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan Laporan		0		0	12	321.552.554	3	62.844.524	0	0	0	3	62.844.524	25,00	19,54	3	62.844.524	inf	inf	BAPENDA	
245	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	12	1.083.851.436	3	43.150.184	0	0	0	3	43.150.184	25,00	3,98	3	43.150.184	inf	inf	BAPENDA	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	nan				
Predikat Kinerja																				-	-				
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	3.081.773.415	25	209.200.700	0	0	0	0	25	209.200.700	inf	6,79	25	209.200.700	inf	inf	
246	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dokumen Unit		0		0	1	15.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	
247	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKARI]	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		0		0	4	31.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp													K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	K	Rp							
248	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	46.250.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
249	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	47.850.000	1	6.035.000	0	0	0	1	6.035.000	33,33	12,61	1	6.035.000	inf	inf	BAPENDA			
250	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit Unit		0		0	5	29.650.000	1	3.648.400	0	0	0	1	3.648.400	20,00	12,30	1	3.648.400	inf	inf	BAPENDA			
251	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	34.280.000	1	5.652.000	0	0	0	1	5.652.000	25,00	16,49	1	5.652.000	inf	inf	BAPENDA			
252	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	5	51.150.000	1	4.000.000	0	0	0	1	4.000.000	20,00	7,82	1	4.000.000	inf	inf	BAPENDA			
253	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	45.850.000	1	4.802.200	0	0	0	1	4.802.200	100,00	10,47	1	4.802.200	inf	inf	BAPENDA			
254	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	5	45.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
255	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	5	49.200.000	2	11.601.200	0	0	0	2	11.601.200	40,00	23,58	2	11.601.200	inf	inf	BAPENDA			
256	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	11	247.350.000	2	21.755.000	0	0	0	2	21.755.000	18,18	8,80	2	21.755.000	inf	inf	BAPENDA			
257	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
258	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
259	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	48.700.000	1	2.010.500	0	0	0	1	2.010.500	25,00	4,13	1	2.010.500	inf	inf	BAPENDA				
260	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	47.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
261	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	1	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
262	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	47.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
263	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dokumen Unit		0		0	1	48.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
264	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	3	46.250.000	1	3.525.000	0	0	0	1	3.525.000	33,33	7,62	1	3.525.000	inf	inf	BAPENDA				
265	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	2	41.500.000	0	6.130.000	0	0	0	0	6.130.000	0,00	14,77	0	6.130.000	nan	inf	BAPENDA				
266	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	25	12.870.000	3	1.575.000	0	0	0	3	1.575.000	12,00	12,24	3	1.575.000	inf	inf	BAPENDA				
267	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	80	127.460.000	12	20.665.000	0	0	0	12	20.665.000	15,00	16,21	12	20.665.000	inf	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
										I		II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
268	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dokumen Unit		0		0	1	60.680.000	0	32.400.000		0		0	0	32.400.000	0,00	53,39	0	32.400.000	nan	inf	BAPENDA			
269	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	30	12.870.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
270	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	20	13.360.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
271	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	26	17.460.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
272	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan Unit		0		0	12	17.080.000	0	650.000		0		0	0	0	0,00	3,81	0	650.000	nan	inf	BAPENDA			
273	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	26	16.660.000	3	4.020.000		0		0	3	4.020.000	11,54	24,13	3	4.020.000	inf	inf	BAPENDA			
274	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	40	16.810.000	2	2.356.000		0		0	2	2.356.000	5,00	14,02	2	2.356.000	inf	inf	BAPENDA			
275	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit Unit		0		0	50	13.970.000	2	2.080.000		0		0	2	2.080.000	4,00	14,89	2	2.080.000	inf	inf	BAPENDA			
276	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	23	9.260.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
277	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	21	12.610.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
278	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	31	17.020.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
279	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	9	8.520.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
280	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	13	10.600.000	0	0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp		I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
281	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	26	16.960.000	0	810.000	0	0	0	0	810.000	0,00	4,78	0	810.000	nan	inf	BAPENDA			
282	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	0	16.590.200	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
283	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	40	17.480.000	3	4.200.000	0	0	0	3	4.200.000	7,50	24,03	3	4.200.000	inf	inf	BAPENDA			
284	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
285	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	5.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
286	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
287	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
288	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	4	650.000.000	1	50.950.000	0	0	0	1	50.950.000	25,00	7,84	1	50.950.000	inf	inf	BAPENDA			
289	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	28.266.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
290	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	35.504.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
291	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dokumen Unit		0		0	1	250.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			
292	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
293	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
294	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	28.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
295	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
296	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
297	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
298	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
299	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	0	29.810.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
300	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	35.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
301	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
302	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
303	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit		0		0	1	11.052.500	0	632.650	0	0	0	0	632.650	0,00	5,72	0	632.650	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		[UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																							
304	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	13.445.750	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0,00	11,16	0	1.500.000	nan	inf	BAPENDA		
305	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	10.517.900	0	1.332.000	0	0	0	0	1.332.000	0,00	12,66	0	1.332.000	nan	inf	BAPENDA		
306	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	40.000.000	0	4.933.000	0	0	0	0	4.933.000	0,00	12,33	0	4.933.000	nan	inf	BAPENDA		
307	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
308	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	11.052.500	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0,00	3,17	0	350.000	nan	inf	BAPENDA		
309	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	8.932.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
310	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	15.613.952	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00	10,25	0	1.600.000	nan	inf	BAPENDA		
311	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	11.045.750	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
312	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	10.790.000	0	680.500	0	0	0	0	680.500	0,00	6,31	0	680.500	nan	inf	BAPENDA		
313	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	13.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
314	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	11.045.750	1	646.850	0	0	0	1	646.850	50,00	5,86	1	646.850	inf	inf	BAPENDA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
		PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
315	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	11.036.500	1	1.700.000	0	0	0	1	1.700.000	50,00	15,40	1	1.700.000	inf	inf	BAPENDA				
316	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	11.052.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
317	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	11.045.750	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0,00	14,49	0	1.600.000	nan	inf	BAPENDA				
318	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	1	11.052.500	0	888.000	0	0	0	0	888.000	0,00	8,03	0	888.000	nan	inf	BAPENDA				
319	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dokumen Unit		0		0	1	23.267.963	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
320	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	11.053.400	0	958.800	0	0	0	0	958.800	0,00	8,67	0	958.800	nan	inf	BAPENDA				
321	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	2	16.290.000	0	3.513.600	0	0	0	0	3.513.600	0,00	21,57	0	3.513.600	nan	inf	BAPENDA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-		0		0	0	6.165.367.238	100	119.193.500	0	0	0	100	119.193.500	inf	1,93	100	119.193.500	inf	inf					
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	6.165.367.238	25	119.193.500	0	0	0	0	25	119.193.500	inf	1,93	25	119.193.500	inf	inf				
1	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		0		0	2	160.000.000	0	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0,00	5,25	0	8.400.000	nan	inf	BAPENDA				
2	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	85.000.000	0	7.415.000	0	0	0	0	7.415.000	0,00	8,72	0	7.415.000	nan	inf	BAPENDA				
3	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	8.750.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00	11,43	0	1.000.000	nan	inf	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	III		IV	K		Rp	K					Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K						Rp	K	Rp
4	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	bulan Laporan		0		0	12	16.605.000	3	1.400.000	0	0	0	0	3	1.400.000	25,00	8,43	3	1.400.000	inf	inf	BAPENDA			
5	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	11.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
6	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	4	16.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
7	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
8	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	24.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
9	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	2	10.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
10	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Laporan		0		0	1	16.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
11	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	107.810.000	0	14.225.000	0	0	0	0	0	14.225.000	0,00	13,19	0	14.225.000	nan	inf	BAPENDA			
12	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	2	16.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
13	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	5	10.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
14	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	12.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
15	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	BAPENDA				
16	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp			
17	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	15.605.000	0	1.000.000		0	0	0	1.000.000	0,00	6,41	0	1.000.000	nan	inf	BAPENDA					
18	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	4.455.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
19	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	5	16.595.000	0	960.000		0	0	0	960.000	0,00	5,78	0	960.000	nan	inf	BAPENDA					
20	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	5.400.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
21	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	4.500.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
22	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana		0		0	18	959.557.740	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
23	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	17.500.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
24	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	85.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
25	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Laporan		0		0	1	57.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
26	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	16.556.000	0	6.000.000		0	0	0	0	6.000.000	0,00	36,24	0	6.000.000	nan	inf	BAPENDA				
27	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	16.339.750	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
28	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	19.342.750	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
29	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	bulan Laporan		0		0	12	40.000.000	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					
30	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	Laporan		0		0	90	17.384.550	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
		PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah																								
31	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	12.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
32	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	21.000.000	3	12.000.000	0	0	0	3	12.000.000	25,00	57,14	3	12.000.000	inf	inf	BAPENDA			
33	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	12.420.165	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
34	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	33.885.250	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
35	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	17.699.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
36	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	2	9.484.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
37	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	2	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
38	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
39	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	19.092.750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				
40	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	18.592.200	3	8.000.000	0	0	0	3	8.000.000	25,00	43,03	3	8.000.000	inf	inf	BAPENDA			
41	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0		0	10	21.281.055	2	2.005.000	0	0	0	2	2.005.000	20,00	9,42	2	2.005.000	inf	inf	BAPENDA			
42	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah [UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH]	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	627.729.200	0	18.037.500	0	0	0	0	18.037.500	0,00	2,87	0	18.037.500	nan	inf	BAPENDA			
43	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Laporan		0		0	1	111.945.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K						Rp
			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																							
44	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen		0		0	1	60.000.000	0	510.000	0	0	0	0	510.000	0,00	0,85	0	510.000	nan	inf	BAPENDA		
45	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Wajib Pajak Dokumen SSPD		0		0	500	62.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
46	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	28835	117.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
47	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	12	212.120.215	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
48	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
49	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	500	65.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
50	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	1	248.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
51	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	0	58.447.350	0	555.000	0	0	0	0	555.000	nan	0,95	0	555.000	nan	inf	BAPENDA		
52	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	12	88.923.724	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
53	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen Dokumen SSPD		0		0	1	583.947.645	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
54	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	980	76.290.000	180	8.890.000	0	0	0	180	8.890.000	18,37	11,65	180	8.890.000	inf	inf	BAPENDA		
55	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	950	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
56	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	480	54.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
57	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajai Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	wajib Pajak Dokumen SSPD		0		0	550	76.200.000	65	2.700.000	0	0	0	65	2.700.000	11,82	3,54	65	2.700.000	inf	inf	BAPENDA		
58	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Dokumen SSPD		0		0	12	101.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		
59	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	wajib pajak Dokumen		0		0	550	167.873.521	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]		SSPD																									
60	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		0		0	6000	140.677.500	72	1.641.000		0		0		72	1.641.000	1,20	1,17	72	1.641.000	inf	inf	BAPENDA			
61	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		0		0	450	107.482.500	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
62	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		0		0	1	108.956.034	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
63	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	3	14.701.500	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
64	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	9.396.000	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
65	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	0	18.400.000	0		0		0		0	nan	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
66	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	45.870.000	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
67	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	3	39.300.000	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
68	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	31.910.400	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
69	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	27.848.000	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
70	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	22.513.950	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
71	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	9.700.000	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				
72	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	16.413.172	0		0		0		0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BAPENDA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I	II	III	IV	K		Rp	K		Rp	K					Rp	K	Rp	K	Rp														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																	
73	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	4	18.773.173	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
74	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	18	120.000.000	0	10.255.000	0	0	0	0	10.255.000	0,00	8,55	0	10.255.000	nan	inf	BAPENDA																				
75	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	50.810.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
76	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Laporan		0		0	1	261.687.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
77	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	bulan Laporan		0		0	12	32.994.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
78	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	31.507.494	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
79	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	23.947.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
80	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	1	10.441.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
81	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah [UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		0		0	12	42.201.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BAPENDA																					
82	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0		0	1	90.703.500	0	7.480.000	0	0	0	0	7.480.000	0,00	8,25	0	7.480.000	nan	inf	BAPENDA																				
83	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0		0	1	59.984.000	0	6.720.000	0	0	0	0	6.720.000	0,00	11,20	0	6.720.000	nan	inf	BAPENDA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																												
Predikat Kinerja																																												

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
					I	II	III	IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				0		0		22.505.991.146	3.363.778.046		0	0	0		3.363.778.046		14,95		3.363.778.046		inf																	
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan																	
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		0		nan		0		nan																	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		22.505.991.146	3.363.778.046		0	0	0		3.363.778.046		14,95		3.363.778.046		inf																	
5.03		KEPEGAWAIAN				0		0		22.505.991.146	3.363.778.046		0	0	0		3.363.778.046		14,95		3.363.778.046		inf																	
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen		0		0	100	14.606.454.146	100	3.061.195.046		0	0	0	100	3.061.195.046	100,00	20,96	100	3.061.195.046	inf	inf																
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	0		0	0	25	213.056.600	6	7.685.000	0	0	0	0	6	7.685.000	24,00	3,61	6	7.685.000	inf	inf																
1	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	57.582.900	6	0	0	0	0	6	0	300,00	0,00	6	0	inf	nan	BKD																
2	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	16	97.765.400	4	2.165.000	0	0	0	4	2.165.000	25,00	2,21	4	2.165.000	inf	inf	BKD																
3	5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		0		0	1	57.708.300	1	5.520.000	0	0	0	1	5.520.000	100,00	9,57	1	5.520.000	inf	inf	BKD																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	nan															
Predikat Kinerja																								-	-															
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	0		0	0	0	14	10.967.607.213	4	2.677.595.479	0	0	0	0	0	4	2.677.595.479	28,57	24,41	4	2.677.595.479	inf	inf														
4	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	90	10.751.087.413	80	2.625.275.479	0	0	0	80	2.625.275.479	88,89	24,42	80	2.625.275.479	inf	inf	BKD																
5	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	216.519.800	3	52.320.000	0	0	0	3	52.320.000	25,00	24,16	3	52.320.000	inf	inf	BKD																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								inf	inf															
Predikat Kinerja																								-	-															
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	76.500.000	100	0	0	0	0	0	100	0	inf	0,00	100	0	inf	nan																
6	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0		0		0	0	76.500.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	BKD																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan															
Predikat Kinerja																								-	-															
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang dikelola	Orang	0		0	0	0	74	285.385.100	74	0	0	0	0	0	74	0	100,00	0,00	74	0	inf	nan															
7	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	92	127.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD																
8	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	300	157.885.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)				(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
Predikat Kinerja																														-	-							
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	persen	0	0	0	0	100	1.264.211.907	100	204.780.689	0	0	0	0	0	100	204.780.689	100,00	16,20	100	204.780.689	inf	inf													
9	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	4.470.200	2	1.500.000	0	0	0	0	2	1.500.000	100,00	33,56	2	1.500.000	inf	inf	BKD													
10	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	3	165.000.000	3	45.000.000	0	0	0	0	3	45.000.000	100,00	27,27	3	45.000.000	inf	inf	BKD													
11	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	8	175.000.000	8	45.010.750	0	0	0	0	8	45.010.750	100,00	25,72	8	45.010.750	inf	inf	BKD													
12	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		0		0	6	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BKD													
13	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	8.000.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	inf	nan	BKD														
14	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	100	901.741.707	0	113.269.939	0	0	0	0	0	113.269.939	0,00	12,56	0	113.269.939	nan	inf	BKD													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan															
Predikat Kinerja																														-	-							
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	0	0	0	0	3	242.800.000	3	0	0	0	0	0	0	3	0	100,00	0,00	3	0	inf	nan													
15	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	5	35.000.000	5	0	0	0	0	5	0	100,00	0,00	5	0	inf	nan	BKD														
16	5.03.01.1.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	6	142.800.000	6	0	0	0	0	6	0	100,00	0,00	6	0	inf	nan	BKD														
17	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	65.000.000	5	0	0	0	0	5	0	100,00	0,00	5	0	inf	nan	BKD														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan															
Predikat Kinerja																														-	-							
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	0	0	0	0	1	1.205.670.026	1	159.413.878	0	0	0	0	0	1	159.413.878	100,00	13,22	1	159.413.878	inf	inf													
18	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	8.000.000	1	2.300.000	0	0	0	0	1	2.300.000	100,00	28,75	1	2.300.000	inf	inf	BKD													
19	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	2	250.000.000	1	50.221.678	0	0	0	0	1	50.221.678	50,00	20,09	1	50.221.678	inf	inf	BKD													
20	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	10.840.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	inf	nan	BKD														
21	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	936.830.026	1	106.892.200	0	0	0	0	1	106.892.200	100,00	11,41	1	106.892.200	inf	inf	BKD													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan															
Predikat Kinerja																														-	-							
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah	Unit	0	0	0	0	6	351.223.300	6	11.720.000	0	0	0	0	0	6	11.720.000	100,00	3,34	6	11.720.000	inf	inf													
22	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	6	107.350.000	6	8.060.000	0	0	0	0	6	8.060.000	100,00	7,51	6	8.060.000	inf	inf	BKD													
23	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0	32	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BKD													
24	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	70	73.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BKD													
25	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	153.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BKD													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
26	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	12	65.000.000	12	3.660.000	0	0	0	12	3.660.000	100,00	5,63	12	3.660.000	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen	persen		0		0	45	7.899.537.000		302.583.000	0	0	0	0	302.583.000	0,00	3,83	0	302.583.000	nan	inf				
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS	persen	0	0	0	0	45	4.628.537.000	0	27.540.000	0	0	0	0	27.540.000	0,00	0,60	0	27.540.000	nan	inf				
1	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen		0		0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
2	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen		0		0	1	909.537.000	1	27.540.000	0	0	0	1	27.540.000	100,00	3,03	1	27.540.000	inf	inf	BKD			
3	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen		0		0	700	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
4	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga		0		0	1	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
5	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		0		0	5	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
6	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen		0		0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	persen	0	0	0	0	90	1.335.000.000	90	269.386.000	0	0	0	0	269.386.000	100,00	20,18	90	269.386.000	inf	inf				
7	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen		0		0	4	65.000.000	1	1.728.000	0	0	0	1	1.728.000	25,00	2,66	1	1.728.000	inf	inf	BKD			
8	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan		0		0	3	320.000.000	1	8.172.000	0	0	0	1	8.172.000	33,33	2,55	1	8.172.000	inf	inf	BKD			
9	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen		0		0	1	950.000.000	1	259.486.000	0	0	0	1	259.486.000	100,00	27,31	1	259.486.000	inf	inf	BKD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesenjangan kualifikasi dengan kompetensi	persen	0	0	0	0	70	1.556.000.000	70	3.671.000	0	0	0	0	3.671.000	100,00	0,24	70	3.671.000	inf	inf				
			Persentase kesenjangan kompetensi dengan kinerja	persen	0		0		70		70		0	0	0	70		100,00		70		inf					
10	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		0		0	50	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
11	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen		0		0	1	250.000.000	1	3.671.000	0	0	0	1	3.671.000	100,00	1,47	1	3.671.000	inf	inf	BKD			
12	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen		0		0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
13	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen		0		0	1	730.700.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			
14	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen		0		0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I		II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K
15	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang		0		0	3	144.299.500	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
16	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang		0		0	5	15.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
17	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang		0		0	10	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
18	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan		0		0	1	106.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
19	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang		0		0	50	60.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
20	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen		0		0	1	35.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase menurunnya pelanggaran hukuman disiplin ASN	persen	0	0	0	0	5	380.000.000	5	1.986.000	0	0	0	0	0	5	1.986.000	100,00	0,52	5	1.986.000	inf	inf				
21	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen		0		0	1	35.000.000	1	1.440.000		0	0	0	1	1.440.000	100,00	4,11	1	1.440.000	inf	inf	BKD				
22	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang		0		0	12	115.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD				
23	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang		0		0	800	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD				
24	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan		0		0	1	180.000.000	0	546.000		0	0	0	0	546.000	0,00	0,30	0	546.000	nan	inf	BKD				
25	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen		0		0	1	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BKD				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						134.419.231.855		74.486.107.007		23.701.396.000		3.280.005.481	0	0	0	3.280.005.481		13,84		77.766.112.488		57,85						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0		nan		0		nan						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				134.419.231.855		74.486.107.007		23.701.396.000		3.280.005.481	0	0	0	3.280.005.481		13,84		77.766.112.488		57,85						
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				134.419.231.855		74.486.107.007		23.701.396.000		3.280.005.481	0	0	0	3.280.005.481		13,84		77.766.112.488		57,85						
5.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		89.020.117.417	100	58.263.263.771	0	16.103.514.000	25	3.055.442.691	0	0	0	25	3.055.442.691	inf	18,97	125	61.318.706.462	inf	68,88					
5.04.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	1.319.566.450	100	155.932.000	0	93.000.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	155.932.000	125,00	11,82				
1	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	42	164.021.450	17	105.564.600	4	60.000.000	3	0	0	0	0	0	3	0	75,00	0,00	20	105.564.600	47,62	64,36	BPSDM			
2	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	1.155.545.000	13	50.367.400	3	33.000.000	2	0	0	0	0	0	2	0	66,67	0,00	15	50.367.400	62,50	4,36	BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					55,06	34,36						
Predikat Kinerja																					R	SR						
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	58.158.181.759	100	39.711.477.513	0	11.515.000.000	25	2.588.243.840	0	0	0	0	25	2.588.243.840	inf	22,48	125	42.299.721.353	125,00	72,73				
3	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	492	58.004.325.159	310	38.617.453.913	73	11.240.000.000	66	2.529.743.840	0	0	0	0	66	2.529.743.840	90,41	22,51	376	41.147.197.753	76,42	70,94	BPSDM			
4	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	80	23.000.000	132	1.033.928.350	1	225.000.000	0	58.500.000	0	0	0	0	0	58.500.000	0,00	26,00	132	1.092.428.350	165,00	4.749,69	BPSDM			
5	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	130.856.600	48	60.095.250	14	50.000.000	3	0	0	0	0	0	3	0	21,43	0,00	51	60.095.250	70,83	45,92	BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					62,45	973,31						
Predikat Kinerja																					R	ST						
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	34.000.000	100	26.818.375	0	28.800.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	26.818.375	125,00	78,88				
6	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	34.000.000	2	26.818.375	1	28.800.000	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	3	26.818.375	75,00	78,88	BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					12,50	13,15						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	730.500.000	100	216.304.900	0	185.000.000	25	65.590.000	0	0	0	0	25	65.590.000	inf	35,45	125	281.894.900	125,00	38,59				
7	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	480	480.500.000	119	54.385.000	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	119	54.385.000	24,79	11,32	BPSDM			
8	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	250.000.000	148	161.919.900	73	125.000.000	66	65.590.000	0	0	0	0	66	65.590.000	90,41	52,47	214	227.509.900	1.070,00	91,00	BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					136,85	12,79						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	4.791.371.375	100	3.291.628.068	0	1.003.650.000	25	90.246.413	0	0	0	0	25	90.246.413	inf	8,99	125	3.381.874.481	125,00	70,58				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
9	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	300	382.993.981	18	237.106.826	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	237.106.826	6,00	61,91	BPSDM				
10	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	120.000.000	0	0	1	25.000.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0,00	10,00	0	2.500.000	0,00	2,08	BPSDM				
11	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	120.000.000	2	44.630.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	44.630.000	10,00	37,19	BPSDM				
12	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	897.515.144	12	573.212.700	3	115.000.000	0	769.500	0	0	0	0	0,00	0,67	12	573.982.200	66,67	63,95	BPSDM				
13	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	600	334.907.500	24	175.590.550	1	30.000.000	1	2.301.000	0	0	0	1	100,00	7,67	25	177.891.550	4,17	53,12	BPSDM				
14	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	116.950.000	10	37.950.000	3	8.650.000	3	1.215.000	0	0	0	3	100,00	14,05	13	39.165.000	108,33	33,49	BPSDM				
15	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	252	2.819.004.750	250	2.223.137.992	1	750.000.000	0	83.460.913	0	0	0	0	0,00	11,13	250	2.306.598.905	99,21	81,82	BPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					19,62	22,24					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100	3.453.158.392	100	1.813.124.000	0	467.000.000	25	3.300.000	0	0	0	0	25	3.300.000	inf	0,71	125	1.816.424.000	125,00	52,60			
16	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	600.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPSDM				
17	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	48	1.155.354.400	3	53.285.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	53.285.000	6,25	4,61	BPSDM				
18	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40.000.000	3	1.040.334.000	5	15.000.000	1	3.300.000	0	0	0	1	3.300.000	20,00	22,00	4	1.043.634.000	50,00	2.609,09	BPSDM			
19	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	828.901.996	0	0	5	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPSDM				
20	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40	828.901.996	3	719.505.000	3	337.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	719.505.000	7,50	86,80	BPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					3,19	135,02					
Predikat Kinerja																					SR	ST					
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	16.061.955.850	100	8.549.653.187	0	2.200.000.000	25	196.144.360	0	0	0	0	25	196.144.360	inf	8,92	125	8.745.797.547	125,00	54,45			
21	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4200	122.194.250	4226	51.200.500	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4226	51.200.500	100,62	41,90	BPSDM				
22	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	5.299.700.000	105	2.287.240.707	1	338.000.000	0	78.984.650	0	0	0	0	78.984.650	0,00	23,37	105	2.366.225.357	291,67	44,65	BPSDM			
23	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	10.640.061.600	8	6.211.211.980	1	1.850.000.000	0	117.159.710	0	0	0	0	117.159.710	0,00	6,33	8	6.328.371.690	53,33	59,48	BPSDM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					19,37	6,35					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	4.471.383.591	100	4.498.325.728	0	611.064.000	25	111.918.078	0	0	0	0	25	111.918.078	inf	18,32	125	4.610.243.806	125,00	103,11			
24	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	80.000.000	0	0	1	45.000.000	1	12.543.000	0	0	0	1	12.543.000	100,00	27,87	1	12.543.000	100,00	15,68	BPSDM			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV					K	Rp	K	Rp					K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
25	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	896.740.000	55	579.510.309	4	90.000.000	3	30.354.525	0	0	0	3	30.354.525	75,00	33,73	58	609.864.834	69,05	68,01	BPSDM				
26	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	504	302.690.000	40	18.600.000	5	10.488.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	18.600.000	7,94	6,14	BPSDM					
27	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20.000.000	0	0	10	50.576.000	1	10.007.500	0	0	0	1	10.007.500	10,00	19,79	1	10.007.500	5,00	50,04	BPSDM				
28	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	0	0	1	15.000.000	0	59.013.053	0	0	0	0	59.013.053	0,00	393,42	0	59.013.053	0,00	147,53	BPSDM				
29	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	40.000.000	0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPSDM					
30	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	300	3.091.953.591	282	3.900.215.419	5	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	282	3.900.215.419	94,00	126,14	BPSDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,20	13,78						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-		45.399.114.438	100	16.222.843.236	0	7.597.882.000	25	224.562.790	0	0	0	25	224.562.790	inf	2,96	125	16.447.406.026	inf	36,23					
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	1440	4.215.581.030	795	2.931.581.949	0	1.100.000.000	206	141.166.280	0	0	0	0	206	141.166.280	inf	12,83	1001	3.072.748.229	69,51	72,89				
1	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1440	4.006.631.030	795	2.828.854.019	150	1.050.000.000	206	141.166.280	0	0	0	206	141.166.280	137,33	13,44	1001	2.970.020.299	69,51	74,13	BPSDM				
2	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	5	208.950.000	4	102.727.930	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	102.727.930	80,00	49,16	BPSDM					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					74,76	61,65						
Predikat Kinerja																					S	R						
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	2964	39.593.533.408	1772	13.291.261.287	0	5.450.000.000	0	61.761.000	0	0	0	0	61.761.000	nan	1,13	1772	13.353.022.287	59,78	33,73					
3	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	240	666.400.000	435	268.840.129	80	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	435	268.840.129	181,25	40,34	BPSDM					
4	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	5	3.509.659.150	7	1.128.968.399	3	600.000.000	0	59.374.000	0	0	0	0	59.374.000	0,00	9,90	7	1.188.342.399	140,00	33,86	BPSDM				
5	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	5	545.373.800	1	43.837.320	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	43.837.320	20,00	8,04	BPSDM					
6	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	1260	33.478.249.780	506	11.482.129.035	260	4.500.000.000	0	2.387.000	0	0	0	0	2.387.000	0,00	0,05	506	11.484.516.035	40,16	34,30	BPSDM				
7	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian,	Dokumen	18	1.393.850.678	10	367.486.404	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	367.486.404	55,56	26,36	BPSDM					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				62,42	20,42									
Predikat Kinerja																				R	SR									
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-	630	1.590.000.000	0		0	0	1.047.882.000	30	21.635.510	0	0	0	0	0	30	21.635.510	inf	2,06	30	21.635.510	4,76	1,36				
8	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	630	1.500.000.000	0		0	210	1.022.000.000	30	21.635.510	0	0	0	0	30	21.635.510	14,29	2,12	30	21.635.510	4,76	1,44	BPSDM				
9	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan	3	90.000.000	0		0	1	25.882.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPSDM						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,53	0,16									
Predikat Kinerja																				SR	SR									

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong										
										I	II	III	IV					K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0		0		17.272.793.000	1.654.646.234	0	0	0		1.654.646.234		9,58		1.654.646.234		inf											
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan											
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan											
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		17.272.793.000	1.654.646.234	0	0	0		1.654.646.234		9,58		1.654.646.234		inf											
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0		0		17.272.793.000	1.654.646.234	0	0	0		1.654.646.234		9,58		1.654.646.234		inf											
5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0	0	0	0	8.428.058.000	0	1.654.646.234	0	0	0	0	1.654.646.234	nan	19,63	0	1.654.646.234	nan	inf		-								
5.05.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	340.000.000	0	2.992.590	0	0	0	0	2.992.590	nan	0,88	0	2.992.590	nan	inf		-	-	-						
1	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	10	185.000.000	9	2.992.590	0	0	0	0	9	2.992.590	90,00	1,62	9	2.992.590	inf	inf	BALITBANG	-	-	-					
2	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-					
3	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan								
Predikat Kinerja																								-	-								
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	6.386.388.000	0	1.529.167.314	0	0	0	0	0	1.529.167.314	nan	23,94	0	1.529.167.314	nan	inf		-	-	-					
4	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	0	0	0	35	6.160.588.000	32	1.488.724.700	0	0	0	0	32	1.488.724.700	91,43	24,17	32	1.488.724.700	inf	inf	BALITBANG	-	-	-					
5	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	190.800.000	0	40.442.614	0	0	0	0	0	40.442.614	0,00	21,20	0	40.442.614	nan	inf	BALITBANG	-	-	-					
6	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan								
Predikat Kinerja																								-	-								
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		-	-	-						
7	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-						
8	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-						
9	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								nan	nan								
Predikat Kinerja																								-	-								
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	123.500.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		-	-	-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
													I	II	III	IV																											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)				(7)				(8)				(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
10	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0		0	0	0	40	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
11	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0		0	0	0	35	93.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan																
Predikat Kinerja																										-	-																
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0		0	0	0	0	798.690.000	0	16.572.642	0	0	0	0	0	0	16.572.642	nan	2,07	0	16.572.642	nan	inf		-	-	-													
12	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	2	3.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
13	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	2	27.590.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
14	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	6	46.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
15	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0		0	0	0	4	18.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
16	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0		0	0	0	1	3.600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00	16,67	0	600.000	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
17	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0		0	0	0	1	700.000.000	0	15.972.642	0	0	0	0	0	0	15.972.642	0,00	2,28	0	15.972.642	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan																
Predikat Kinerja																										-	-																
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0		0	0	0	0	13.403.250	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan		-	-	-														
18	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		0	0	0	1	13.403.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan																
Predikat Kinerja																										-	-																
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0		0	0	0	0	544.076.750	0	74.089.688	0	0	0	0	0	0	74.089.688	nan	13,62	0	74.089.688	nan	inf		-	-	-													
19	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0		0	0	0	1	11.000.000	0	1.560.793	0	0	0	0	0	0	1.560.793	0,00	14,19	0	1.560.793	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
20	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0		0	0	0	1	30.000.000	0	5.151.804	0	0	0	0	0	0	5.151.804	0,00	17,17	0	5.151.804	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
21	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0		0	0	0	1	503.076.750	0	67.377.091	0	0	0	0	0	0	67.377.091	0,00	13,39	0	67.377.091	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	inf																
Predikat Kinerja																										-	-																
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0		0	0	0	0	175.000.000	0	31.824.000	0	0	0	0	0	0	31.824.000	nan	18,19	0	31.824.000	nan	inf		-	-	-													
22	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0		0	0	0	4	160.000.000	0	31.824.000	0	0	0	0	0	0	31.824.000	0,00	19,89	0	31.824.000	nan	inf	BALITBANG	-	-	-													
23	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										nan	nan																
Predikat Kinerja																										-	-																
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-		0	0		0	0	8.844.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	0	nan	nan		-															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)		(19)			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	0	0	0	0	0	2.625.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	-	-	-	
1	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	0	0	0	0	1	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
2	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0	0	0	0	1	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
3	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	0	0	0	0	0	814.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	-	-	-	
4	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
5	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0	0	0	0	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
6	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	1	239.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	0	0	0	0	0	2.705.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	-	-	-	
7	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
8	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	0	0	0	0	2	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
9	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	0	0	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
10	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
11	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0	0	0	1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
12	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
13	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
14	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	0	0	0	0	0	2.700.735.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan	-	-	-	
15	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	0	0	6	1.450.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
										I	II	III	IV	K	Rp		K	Rp		K	Rp					K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
16	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	0	0	0	0	6	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG	-	-	-		
17	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	BALITBANG					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan				
Predikat Kinerja																							-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN PENGHUBUNG
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong													
											I	II	III	IV																									
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)					(18)	(19)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
		BADAN PENGHUBUNG				0		0	17.538.117.161	2.252.612.383	0	0	0		2.252.612.383		12,84		2.252.612.383		inf																		
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0	0	0	0	0		0		nan		0		nan																			
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0	0	0	0	0		0		nan		0		nan																			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0	17.538.117.161	2.252.612.383	0	0	0		2.252.612.383		12,84		2.252.612.383		inf																		
5.07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG				0		0	17.538.117.161	2.252.612.383	0	0	0		2.252.612.383		12,84		2.252.612.383		inf																		
5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	13.335.681.161	0	1.989.337.652	0	0	0	0	1.989.337.652	nan	14,92	0	1.989.337.652	nan	inf																
5.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	66.123.000	0	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	nan	3,86	0	2.550.000	nan	inf																
1	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	8	43.701.000	2	2.550.000	0	0	0	2	2.550.000	25,00	5,84	2	2.550.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG															
2	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	18	8.621.000	4	0	0	0	0	4	0	22,22	0,00	4	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
3	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	2	13.801.000	0.25	0	0	0	0	0.25	0	12,50	0,00	0.25	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	8.729.806.000	0	1.674.360.224	0	0	0	0	0	1.674.360.224	nan	19,18	0	1.674.360.224	nan	inf															
4	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		0		0	44	8.500.000.000	11	1.623.020.224	0	0	0	11	1.623.020.224	25,00	19,09	11	1.623.020.224	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG															
5	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	12	217.800.000	3	51.340.000	0	0	0	3	51.340.000	25,00	23,57	3	51.340.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG															
6	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	18	12.006.000	4	0	0	0	0	4	0	22,22	0,00	4	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	117.713.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																
7	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	13	108.200.000	3	0	0	0	0	3	0	23,08	0,00	3	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
8	5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	3	3.286.000	0.5	0	0	0	0	0.5	0	16,67	0,00	0.5	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
9	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	3	6.227.000	0.5	0	0	0	0	0.5	0	16,67	0,00	0.5	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																							
Predikat Kinerja																																							
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	94.662.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	45	33.750.000	15	0	0	0	0	15	0	33,33	0,00	15	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
11	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	78	60.912.000	19	0	0	0	0	19	0	24,36	0,00	19	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	872.591.710	0	312.427.428	0	0	0	0	0	312.427.428	nan	35,80	0	312.427.428	nan	inf			
12	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	1	20.503.300	0.25	0	0	0	0	0.25	0	25,00	0,00	0.25	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
13	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	5	173.474.960	1	17.425.000	0	0	0	1	17.425.000	20,00	10,04	1	17.425.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
14	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	46.664.500	0.25	843.000	0	0	0	0.25	843.000	25,00	1,81	0.25	843.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
15	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1	60.140.000	0.25	6.751.537	0	0	0	0.25	6.751.537	25,00	11,23	0.25	6.751.537	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
16	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	55	571.808.950	13	287.407.891	0	0	0	13	287.407.891	23,64	50,26	13	287.407.891	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	0	0	0	110.005.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
17	5.07.01.1.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	110.005.000	1	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	1	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	2.814.776.139	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
18	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	19.100.000	0.25	0	0	0	0	0.25	0	25,00	0,00	0.25	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
19	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	386.148.000	0.25	0	0	0	0	0.25	0	25,00	0,00	0.25	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
20	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	2.409.528.139	0.25	0	0	0	0	0.25	0	25,00	0,00	0.25	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	530.004.312	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan				
21	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	Unit		0		0	17	287.904.312	4	0	0	0	0	4	0	23,53	0,00	4	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
22	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	62	43.720.000	15	0	0	0	0	15	0	24,19	0,00	15	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
23	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0		0	3	198.380.000	0.5	0	0	0	0	0.5	0	16,67	0,00	0.5	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-	-		0		0	0	4.202.436.000		263.274.731	0	0	0	0	263.274.731	nan	6,26	0	263.274.731	nan	inf				
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	-	0	0	0	0	0	4.202.436.000	0	263.274.731	0	0	0	0	263.274.731	nan	6,26	0	263.274.731	nan	inf				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan			0		0	1	1.043.877.035	0.25	89.000.000	0	0	0	0.25	89.000.000	25,00	8,53	0.25	89.000.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
2	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan			0		0	12	428.565.382	3	3.005.900	0	0	0	3	3.005.900	25,00	0,70	3	3.005.900	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
3	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan			0		0	7	696.098.087	1	13.276.000	0	0	0	1	13.276.000	14,29	1,91	1	13.276.000	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
4	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan			0		0	2	334.489.540	0.5	0	0	0	0	0.5	0	25,00	0,00	0.5	0	inf	nan	BADAN PENGHUBUNG			
5	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan			0		0	12	1.699.405.956	3	157.992.831	0	0	0	3	157.992.831	25,00	9,30	3	157.992.831	inf	inf	BADAN PENGHUBUNG			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan					
Predikat Kinerja																						-	-					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV													
					(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)	(11)					(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				0		0		22.398.979.000	1.414.811.661	0	0	0		1.414.811.661		6,32		1.414.811.661		inf					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0	0	0	0		0	nan		0		nan							
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0	0	0	0		0	nan		0		nan							
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		22.398.979.000	1.414.811.661	0	0	0		1.414.811.661		6,32		1.414.811.661		inf					
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				0		0		22.398.979.000	1.414.811.661	0	0	0		1.414.811.661		6,32		1.414.811.661		inf					
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen		0		0	100	22.398.979.000	1.414.811.661	0	0	0	0	1.414.811.661	0,00	6,32	0	1.414.811.661	nan	inf					
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	85	251.648.380	0	26.926.000	0	0	0	0	26.926.000	0,00	10,70	0	26.926.000	nan	inf				
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	2	213.577.880	0	26.926.000	0	0	0	0	26.926.000	0,00	12,61	0	26.926.000	nan	inf	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen		0		0	6	14.639.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp				
			DPA-SKPD	Dokumen				6		0					0		0,00		0		nan		Biro Adm. Pimp				
3	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	3	13.142.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan		
4	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	2	10.288.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0	0	100	181.120.000	0	3.327.000	0	0	0	0	3.327.000	0,00	1,84	0	3.327.000	nan	inf				
5	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	2	144.334.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan		
6	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	2	36.785.800	0	3.327.000	0	0	0	0	3.327.000	0,00	9,04	0	3.327.000	nan	inf	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
					K	Rp	K	Rp		K	I	II	III		IV	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0		0		0	100	55.463.000	0	14.383.500	0	0	0	0	0	14.383.500	0,00	25,93	0	14.383.500	nan	inf				
7	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			0		0	1	36.400.000	0	14.383.500	0					14.383.500	0,00	39,52	0	14.383.500	nan	inf	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
8	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			0		0	1	19.063.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0		0		0	100	476.201.000	0	3.225.000	0	0	0	0	0	3.225.000	0,00	0,68	0	3.225.000	nan	inf				
9	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			0		0	450	206.030.200	112	3.225.000		0		0	0	112	3.225.000	24,89	1,57	112	3.225.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp		
10	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			0		0	125	270.170.800	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Tahapan pengadaan diklat belum sesuai alokasi anggaran kas yang telahdirencanakan karena menunggu undangan dari instansi terkait	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0		0		0	100	4.107.516.624	0	260.344.013	0	0	0	0	0	260.344.013	0,00	6,34	0	260.344.013	nan	inf				
11	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0		0	3	49.811.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
12	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0		0	3	127.192.600	0	8.060.800	0		0		0	0	8.060.800	0,00	6,34	0	8.060.800	nan	inf	Biro Adm. Pimp	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlahsub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
13	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0		0	3	28.480.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
14	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			0		0	20	322.728.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
15	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			0		0	40	3.579.305.024	12	252.283.213	0		0		0	12	252.283.213	30,00	7,05	12	252.283.213	inf	inf	Biro Adm. Pimp	Pelaksanaan kegiatan masih adayang belum sesuai dengan alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
16	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			0		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	nan	nan	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan						
Predikat Kinerja																						-	-						
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Persen	0		0		0	100	41.797.600	0		0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
17	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp				
18	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0		0	1	4.837.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp				
19	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	5	36.960.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	0	0	100	1.820.256.675	0	353.028.148	0	0	0	0	353.028.148	0,00	19,39	0	353.028.148	nan	inf				
20	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	5	26.219.900	1	1.458.500	0	0	0	1	1.458.500	20,00	5,56	1	1.458.500	inf	inf	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
21	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0		0	1	58.779.000	0	13.541.808	0	0	0	0	13.541.808	0,00	23,04	0	13.541.808	nan	inf	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
22	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	35	1.735.257.775	0	338.027.840	0	0	0	0	338.027.840	0,00	19,48	0	338.027.840	nan	inf	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Persen	0	0	0	0	100	369.722.100	0	40.115.000	0	0	0	0	40.115.000	0,00	10,85	0	40.115.000	nan	inf				
23	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	8	325.510.000	2	40.115.000	0	0	0	2	40.115.000	25,00	12,32	2	40.115.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
24	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	20	31.980.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp		Tahapan pengadaan barang jasa belum sesuai alokasi anggaran kas yang telah direncanakan	Kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
25	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	2	12.232.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Persen	0	0	0	0	100	5.123.436.000	0	185.700.000	0	0	0	0	185.700.000	0,00	3,62	0	185.700.000	nan	inf				
26	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen		0		0	295	398.853.728	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp		Kuangnya SDM yang kompten dalam penyusunan materi pimpinan	Mengikuti bimtek terkait penyusunan materi pimpinan	
27	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		0		0	102	2.992.200.000	22	184.500.000	0	0	0	22	184.500.000	21,57	6,17	22	184.500.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp			Terciptanya koordinasi yang baik dengan para media khususnya dalam publikasi pimpinan
28	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan		0		0	255	1.732.382.272	62	1.200.000	0	0	0	62	1.200.000	24,31	0,07	62	1.200.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp		Keterbatasan SDM dalam pengdokumentasian dalam pelaksanaan kegiatan	Mengusulkan penambahan kebutuhan SDM khusus pengelolaan dokumentasi ke BKD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II	III	IV							K	Rp	K	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik	Persen	0	0	0	0	100	9.971.817.621	0	527.763.000	0	0	0	0	527.763.000	0,00	5,29	0	527.763.000	nan	inf				
29	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan		0		0	24	1.370.000.000	6	73.250.000	0	0	0	0	73.250.000	25,00	5,35	6	73.250.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp	Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan	Mengajukan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang sewajarnya	
30	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan		0		0	4	7.682.693.650	1	454.513.000	0	0	0	1	454.513.000	25,00	5,92	1	454.513.000	inf	inf	Biro Adm. Pimp	Kurangnya SDM yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan	Mengikuti bimtek dalam meningkatkan kompetensi SDM	
31	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan		0		0	24	919.123.971	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	Biro Adm. Pimp	kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksana kegiatan keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan Kurangnya SDM yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan	Adanya perbaikan sarana dan prasarana dilapangan Pengajuan penambahan personil melalui BKD sesuai dengan kebutuhannya Mengikuti bimtek dalam meningkatkan kompetensi SDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				0		0		3.738.619.900	117.427.615	0	0	0		117.427.615		3,14		117.427.615		inf																							
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0	0	0	0		0	nan		0		nan																									
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0	0	0	0		0	nan		0		nan																									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		3.738.619.900	117.427.615	0	0	0		117.427.615		3,14		117.427.615		inf																							
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				0		0		3.738.619.900	117.427.615	0	0	0		117.427.615		3,14		117.427.615		inf																							
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		0		0	0	1.153.532.900	117.427.615	0	0	0	0	117.427.615	nan	10,18	0	117.427.615	nan	inf																							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	62.371.000	2.592.000	0	0	0	0	2.592.000	nan	4,16	0	2.592.000	nan	inf																							
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	1	34.881.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																					
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	1	7.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																					
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	1	20.000.000	1	2.592.000	0	0	0	1	2.592.000	100,00	12,96	1	2.592.000	inf	inf	ROKERJASAMA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				nan	nan								
Predikat Kinerja																																					-	-							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	101.359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																					
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		0		0	1	93.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																				
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	1	7.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				nan	nan								
Predikat Kinerja																																						-	-						
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	22.709.900	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																					
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0		0	1	18.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																				
7	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	1	4.309.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																					nan	nan							
Predikat Kinerja																																						-	-						
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	126.700.000	26.320.000	0	0	0	0	0	27	26.320.000	inf	20,77	27	26.320.000	inf	inf																					
8	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	27	106.700.000	27	26.320.000	0	0	0	27	26.320.000	100,00	24,67	27	26.320.000	inf	inf	ROKERJASAMA																					
9	4.01.01.1.05.0011		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0		0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																					nan	nan							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																												
													I	II	III	IV																																																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)				(7)				(8)				(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)																									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																				
Predikat Kinerja																																	-	-																																		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	0	0	0	0	672.082.062	0	74.601.081	0	0	0	0	0	0	74.601.081	nan	11,10	0	74.601.081	nan	inf																																											
10	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	4	107.532.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
11	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
12	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	6	68.205.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
13	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	1	16.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
14	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	1	479.563.432	1	74.601.081	0	0	0	0	1	74.601.081	100,00	15,56	1	74.601.081	inf	inf	ROKERJASAMA																																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan																																		
Predikat Kinerja																																	-	-																																		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	82.120.938	0	10.239.534	0	0	0	0	0	0	10.239.534	nan	12,47	0	10.239.534	nan	inf																																											
15	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
16	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0		0	1	79.120.938	1	10.239.534	0	0	0	0	1	10.239.534	100,00	12,94	1	10.239.534	inf	inf	ROKERJASAMA																																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan																																		
Predikat Kinerja																																	-	-																																		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	86.190.000	0	3.675.000	0	0	0	0	0	0	3.675.000	nan	4,26	0	3.675.000	nan	inf																																											
17	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	4	71.100.000	1	3.675.000	0	0	0	0	1	3.675.000	25,00	5,17	1	3.675.000	inf	inf	ROKERJASAMA																																											
18	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	21	15.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan																																		
Predikat Kinerja																																	-	-																																		
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-		0		0	0	2.585.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																																											
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	1.708.022.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																																											
1	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan		0		0	1	490.982.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
2	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan		0		0	1	456.283.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
3	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan		0		0	1	760.757.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	nan	nan																																		
Predikat Kinerja																																	-	-																																		
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0	0	0	0	877.064.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan																																											
4	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen		0		0	1	94.661.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										
5	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		0		0	1	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA																																										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
6	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen		0		0	1	402.403.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROKERJASAMA				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO HUKUM
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		BIRO HUKUM				0		0		3.435.370.000	251.160.331	0	0	0	0	251.160.331	7,31		251.160.331		inf					
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		3.435.370.000	251.160.331	0	0	0	0	251.160.331	7,31		251.160.331		inf					
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				0		0		3.435.370.000	251.160.331	0	0	0	0	251.160.331	7,31		251.160.331		inf					
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0		0	100	2.214.431.000	237.394.331	0	0	0	0	237.394.331	0,00	10,72	0	237.394.331	nan	inf				
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	0		0	100	63.000.000	0	975.000	0	0	0	0	975.000	0,00	1,55	0	975.000	nan	inf			
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0		0	9	33.000.000	4	975.000	0	0	0	4	975.000	44,44	2,95	4	975.000	inf	inf	ROHUKUM	pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0		0	9	20.000.000	3	0	0	0	0	3	0	33,33	0,00	3	0	inf	nan	ROHUKUM	pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		0		0	6	10.000.000	1	0	0	0	0	1	0	16,67	0,00	1	0	inf	nan	ROHUKUM	pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	nan			
Predikat Kinerja																						-	-			
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0	0	100	102.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang/ Dokumen		0		0	5	95.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROHUKUM	alokasi anggaran tidak ada	rasionalisasi
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		0		0	18	7.192.000	3	0	0	0	0	3	0	16,67	0,00	3	0	inf	nan	ROHUKUM	pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan			
Predikat Kinerja																						-	-			
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0	0	0	0	100	21.663.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan			
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	unit/ Dokumen		0		0	3	13.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROHUKUM	pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
7	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	6	5.863.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROHUKUM	alokasi anggaran tidak ada	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
											I	II	III	IV				(15) = 14/5 * 100%	(16)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
8	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0		0	8	2.000.000	2		0	0	0	0	2	0	25,00	0,00	2		0	inf	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	189.600.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan				
9	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	30	189.600.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	100	1.685.773.320	0	224.027.997	0	0	0	0	0	224.027.997	0,00	13,29	0	224.027.997	nan	inf					
10	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit/ Paket		0		0	5	24.998.750	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		alokasi anggaran ditiadakan	rasionalisasi
11	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit/ Paket		0		0	5	21.588.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		alokasi anggaran ditiadakan	rasionalisasi
12	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0		0	2	27.193.400	1	1.750.000		0	0	0	1	1.750.000	50,00	6,44	1	1.750.000	inf	inf	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
13	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0		0	10	25.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
14	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis/ Dokumen		0		0	3	24.900.000	2	2.070.000	0	0	0	0	2	2.070.000	66,67	8,31	2	2.070.000	inf	inf	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
15	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0		0	24	1.560.093.170	10	220.207.997	0	0	0	0	10	220.207.997	41,67	14,12	10	220.207.997	inf	inf	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu, dikarenakan sesuai prioritas kegiatan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
16	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1000	2.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	67.742.180	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan				
17	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0		0	10	67.742.180	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		alokasi anggaran ditiadakan	rasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							
Predikat Kinerja																					-	-							
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	0	0	0	0	100	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan				
18	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		0		0	1000	4.000.000	172		0	0	0	0	172	0	17,20	0,00	172		0	inf	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
19	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	rekening		0		0	1	1.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0	nan	nan	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong												
																	I		II	III	IV					K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
																							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja																							-	-																						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen	0	0	0	0	100	79.300.000	0	12.391.334	0	0	0	0	0	12.391.334	0,00	15,63	0	12.391.334	nan	inf																						
20	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0		0	10	69.490.000	5	9.656.334	0		0	0	5	9.656.334	50,00	13,90	5	9.656.334	inf	inf	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu, dikarenakan sesuai prioritas kegiatan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan																		
21	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0		0	20	9.810.000	2	2.735.000	0		0	0	2	2.735.000	10,00	27,88	2	2.735.000	inf	inf	ROHUKUM		pencairan dana yang belum tepat waktu, dikarenakan sesuai prioritas kegiatan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	inf																						
Predikat Kinerja																							-	-																						
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen		0		0	90	1.220.939.000	13.766.000	0	0	0	0	0	13.766.000	0,00	1,13	0	13.766.000	nan	inf																							
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi Persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Persen	0	0	0	0	100	753.588.000	0	13.426.000	0	0	0	0	0	13.426.000	0,00	1,78	0	13.426.000	nan	inf																						
1	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	perda dan pergub/ Dokumen		0		0	65	310.051.000	7	0	0	0	0	7	0	10,77	0,00	7	0	inf	nan	ROHUKUM		tahapan fasilitasi produk hukum membutuhkan waktu dengan KemenkumHAM dan Kemendagri	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait																			
2	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	kepgub/ Dokumen		0		0	800	31.000.000	212	0	0	0	0	212	0	26,50	0,00	212	0	inf	nan	ROHUKUM		tahapan fasilitasi produk hukum setelah dari Biro Hukum, tergantung kecepatan dan ketepatan OPD Pemrakrsa	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait																			
3	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	buku/ Dokumen		0		0	160	108.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROHUKUM		tahapan pengadaan kegiatan/barang dan jasa belum sesuai aliran kas yang direncanakan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait																			
4	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	rancangan PHD/ Dokumen		0		0	80	304.450.000	25	13.426.000	0	0	0	25	13.426.000	31,25	4,41	25	13.426.000	inf	inf	ROHUKUM		tahapan fasilitasi produk hukum membutuhkan waktu dengan KemenkumHAM	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	nan																						
Predikat Kinerja																							-	-																						
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	Persen	0	0	0	0	100	467.351.000	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0,00	0,07	0	340.000	nan	inf																						
			Persentase fasilitasi bantuan hukum	Persen	0		0		100		0		0	0	0	0		0,00		0		nan																								
5	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	perkara/ Kasus		0		0	7	352.194.000	7	340.000	0	0	0	7	340.000	100,00	0,10	7	340.000	inf	inf	ROHUKUM		jadwal sidang yang berubah-ubah dari pihak pengadilan/ terkait	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait																			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12			(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
6	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	bantuan hukum/ Kasus		0		0	8	115.157.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROHUKUM		tahapan verifikasi dan money yang belum sesuai dengan pendanaan yang telah ditetapkan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan				
Predikat Kinerja																					-	-				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
									I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				135.542.471.000		42.364.623.125		25.220.968.000		1.506.097.943	0	0	0	1.506.097.943		5,97		43.870.721.068		32,37						
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan							
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0	nan		0		nan							
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				135.542.471.000		42.364.623.125		25.220.968.000		1.506.097.943	0	0	0	1.506.097.943		5,97		43.870.721.068		32,37						
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				135.542.471.000		42.364.623.125		25.220.968.000		1.506.097.943	0	0	0	1.506.097.943		5,97		43.870.721.068		32,37						
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		4.980.467.372	100	3.224.125.408	100	698.041.000	20	476.787.040	0	0	0	20	476.787.040	20,00	68,30	120	3.700.912.448	inf	74,31					
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	141.173.000	100	41.622.600	100	48.790.400	20		0	0	0	0	20	0	20,00	0,00	120	41.622.600	120,00	29,48		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	13.762.800	4	6.800.000	4	28.623.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	6.800.000	100,00	49,41	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	43.538.700	4	1.495.000	3	8.911.600	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	1.495.000	133,33	3,43	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	83.871.500	4	33.327.600	4	11.255.800	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	33.327.600	100,00	39,74	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					111,11	30,86						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen	100	32.908.300	100	174.641.600	100	163.039.300	20		0	0	0	0	0	20	0	20,00	0,00	120	174.641.600	120,00	530,69		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	4.099.400	3	168.985.600	3	152.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	168.985.600	100,00	4.122,20	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	28.808.900	12	5.656.000	12	10.539.300	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	5.656.000	100,00	19,63	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					40,00	828,37						
Predikat Kinerja																					SR	ST						
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	16.376.000	100	12.954.300	100	18.199.600	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	12.954.300	100,00	79,11		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	7.862.500	1	8.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	7.862.500	100,00	98,28	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	3.007.000	1	3.592.000	1	7.199.600	0		0		0		0	0,00	0,00	1	3.592.000	1,00	119,45	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
8	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	5.369.000	3	1.499.800	3	3.000.000	0		0		0		0	0,00	0,00	3	1.499.800	100,00	27,93	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						25,13	30,71					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	30.167.000	100	1.500.000	100	70.200.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	1.500.000	100,00	4,97		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
9	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	30.167.000	50	1.500.000	50	70.200.000	0		0		0		0	0,00	0,00	50	1.500.000	100,00	4,97	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						11,11	0,55					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	4.478.500.852	100	2.681.803.758	100	211.331.140	0	447.626.040	0	0	0	0	0	447.626.040	0,00	211,81	100	3.129.429.798	100,00	69,88		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
10	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	3	4.800.000	3	7.500.000	0		0		0		0	0,00	0,00	3	4.800.000	300,00	192,00	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
11	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27	329.905.900	27	49.358.900	27	58.168.600	1	9.982.800					1	9.982.800	3,70	17,16	28	59.341.700	103,70	17,99	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
12	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	11.900.000	7	13.611.600	7	39.017.000	0		0		0		0	0,00	0,00	7	13.611.600	100,00	114,38	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
13	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	4.134.194.952	70	2.614.033.258	70	106.645.540	20	437.643.240					20	437.643.240	28,57	410,37	90	3.051.676.498	128,57	73,82	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						48,64	30,63					
Predikat Kinerja																						SR	SR					
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen	100	96.650.220	100	200.450.000	100	29.500.560	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	200.450.000	100,00	207,40		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
14	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	96.650.220	100	200.450.000	3	29.500.560	0		0		0		0	0	0,00	0,00	100	200.450.000	3.333,33	207,40	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						238,10	14,81					
Predikat Kinerja																						ST	SR					
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	21.800.000	100	5.800.000	100	12.100.000	20	1.450.000	0	0	0	0	20	1.450.000	20,00	11,98	120	7.250.000	120,00	33,26		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
15	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300	21.800.000	300	5.800.000	300	12.100.000	1500	1.450.000		0		0	1500	1.450.000	500,00	11,98	1800	7.250.000	600,00	33,26	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						40,00	2,22					
Predikat Kinerja																						SR	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisioni baik	Persen	100	162.892.000	100	105.353.150	100	144.880.000	25	27.711.000	0	0	0	0	25	27.711.000	25,00	19,13	125	133.064.150	125,00	81,69		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
16	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	158.632.000	3	93.968.150	3	132.300.000	1	27.711.000		0		0	1	27.711.000	33,33	20,95	4	121.679.150	133,33	76,71	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
17	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	4.260.000	15	11.385.000	15	12.580.000	0		0		0	0	0	0,00	0,00	15	11.385.000	100,00	267,25	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,73	20,23						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Dokumen		130.562.003.628	6	39.140.497.717	6	24.522.927.000	1	1.029.310.903		0		0	1	1.029.310.903	16,67	4,20	7	40.169.808.620	inf	30,77				
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Dokumen			6		6		1						1		16,67		7		inf					
			Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Lembaga			13		13		1						1		7,69		14		inf					
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitasi pembinaan mental spiritual	Persen	100	128.813.033.728	100	36.895.505.733	100	21.357.927.000	20	1.029.310.903	0	0	0	0	20	1.029.310.903	20,00	4,82	120	37.924.816.636	120,00	29,44		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
1	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	1	2.292.354.400	1	2.024.958.142	1	2.900.000.000	1	412.964.709		0		0	1	412.964.709	100,00	14,24	2	2.437.922.851	200,00	106,35	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
2	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	100	126.520.679.328	100	34.870.547.591	100	18.457.927.000	20	616.346.194		0		0	20	616.346.194	20,00	3,34	120	35.486.893.785	120,00	28,05	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					160,00	67,20						
Predikat Kinerja																					ST	S						
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persen	100	1.373.251.500	100	1.776.908.013	100	2.415.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	1.776.908.013	100,00	129,39		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
3	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	2	1.241.990.000	2	1.614.797.128	2	2.015.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	2	1.614.797.128	100,00	130,02	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
4	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	1	44.961.500	1	112.920.285	1	200.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	1	112.920.285	100,00	251,15	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
5	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	86.300.000	1	49.190.600	1	200.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	1	49.190.600	100,00	57,00	ROBINTAL	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					60,00	87,63						
Predikat Kinerja																					R	T						
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persen	100	375.718.400	100	468.083.971	100	750.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	468.083.971	100,00	124,58		Sarana dan Prasarana		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I		II	III													IV																		
											(1)	(2)	(3)	(4)													(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
																								Kurang Memadai																					
6	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	1	224.655.000	1	308.826.185	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	308.826.185	100,00	137,47	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai																				
7	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	91.113.400	1	89.695.686	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	89.695.686	100,00	98,44	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai																				
8	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	59.950.000	1	69.562.100	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	69.562.100	100,00	116,03	ROBINTAL		Sarana dan Prasarana Kurang Memadai																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO ORGANISASI
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
								I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
		BIRO ORGANISASI				23.898.663.080		2.705.762.817		4.135.816.058		228.282.868	0	0	0	0												
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0		nan											
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0		nan											
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				23.898.663.080		2.705.762.817		4.135.816.058		228.282.868	0	0	0		5,52											
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				23.898.663.080		2.705.762.817		4.135.816.058		228.282.868	0	0	0		5,52											
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		4.241.248.990	100	1.681.692.004	0	2.349.410.858	25	169.214.368		0	0	0	25	169.214.368	inf	7,20	125	1.850.906.372	inf	43,64				
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	64.093.200	100	1.845.000	0	40.093.300	25	3.660.000	0	0	0	0	25	3.660.000	inf	9,13	125	5.505.000	125,00	8,59				
1	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	52	48.593.200	13	1.017.000	1	14.490.000	3	0	0	0	0	3	0	300,00	0,00	16	1.017.000	30,77	2,09	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
2	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	15.500.000	12	828.000	1	9.660.000	3	0	0	0	0	3	0	300,00	0,00	15	828.000	375,00	5,34	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran serta ketepatan waktu dan kualitas data	
3	4.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	0	0	1	15.943.300	1	3.660.000	0	0	0	0	1	3.660.000	100,00	22,96	1	3.660.000	inf	inf	ROORGANISASI			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf							
Predikat Kinerja																				-	-							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	12.000.000	100	92.760.000	0	95.760.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	92.760.000	125,00	773,00				
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12.000.000	12	92.760.000	1	95.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	92.760.000	100,00	773,00	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				25,00	193,25							
Predikat Kinerja																				SR	ST							
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	25.739.400	100	9.003.216	0	28.400.000	25	18.219.000	0	0	0	0	25	18.219.000	inf	64,15	125	27.222.216	125,00	105,76				
5	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	1	7.860.216	1	18.400.000	0	18.219.000	0	0	0	0	0	18.219.000	0,00	99,02	1	26.079.216	inf	inf	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	25.739.400	1	1.143.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.143.000	20,00	4,44	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	109.164.000	100	1.600.000	0	150.349.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	1.600.000	125,00	1,47				
7	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	109.164.000	3	1.600.000	1	150.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.600.000	inf	1,47	ROORGANISASI			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	0,21						
Predikat Kinerja																					-	SR						
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	2.695.495.126	100	1.174.805.026	0	1.501.544.985	25	122.209.604	0	0	0	0	25	122.209.604	inf	8,14	125	1.297.014.630	125,00	48,12				
8	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	5	63.211.000	1	112.289.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	63.211.000	inf	inf	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
9	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	23	165.330.000	1	187.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23	165.330.000	inf	inf	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
10	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	305.441.445	9	49.768.400	1	11.407.500	0	9.826.100	0	0	0	0	0	9.826.100	0,00	86,14	9	59.594.500	45,00	19,51	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
11	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	214.070.086	8	33.270.000	1	34.020.000	1	1.999.000	0	0	0	1	1.999.000	100,00	5,88	9	35.269.000	45,00	16,48	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
12	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	325	2.175.983.595	97	863.225.626	100	1.156.250.000	23	110.384.504	0	0	0	23	110.384.504	23,00	9,55	120	973.610.130	36,92	44,74	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100	716.924.560	100	232.850.000	0	337.494.500	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	125	232.850.000	125,00	32,48				
13	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	159.026.900	18	85.450.000	1	198.565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	85.450.000	72,00	53,73	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
14	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	557.897.660	9	147.400.000	20	138.929.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	147.400.000	34,62	26,42	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					7,62	5,73						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	304.292.704	100	81.552.612	0	84.269.073	25	18.701.764	0	0	0	0	25	18.701.764	inf	22,19	125	100.254.376	125,00	32,95				
15	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	304.292.704	1	81.552.612	1	84.269.073	0	18.701.764	0	0	0	0	0	18.701.764	0,00	22,19	1	100.254.376	inf	32,95	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	2,20						
Predikat Kinerja																					-	SR						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	313.540.000	100	87.276.150	0	111.500.000	25	6.424.000	0	0	0	0	25	6.424.000	inf	5,76	125	93.700.150	125,00	29,88				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
16	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	208.400.000	11	69.657.150	3	71.500.000	0	4.974.000	0	0	0	0	4.974.000	0,00	6,96	11	74.631.150	73,33	35,81	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
17	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	105.140.000	26	17.619.000	10	40.000.000	3	1.450.000	0	0	0	3	1.450.000	30,00	3,63	29	19.069.000	26,36	18,14	ROORGANISASI			Komitmen Pimpinan dan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					5,86	3,17						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-		19.657.414.090	100	1.024.070.813	0	1.786.405.200	25	59.068.500	0	0	0	25	59.068.500	inf	3,31	125	1.083.139.313	inf	5,51					
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	100	7.543.660.884	100	349.371.146	0	573.188.150	25	14.261.000	0	0	0	0	25	14.261.000	inf	2,49	125	363.632.146	125,00	4,82				
1	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2.562.719.884	1	109.059.541	1	145.784.750	0	2.111.000	0	0	0	0	2.111.000	0,00	1,45	1	111.170.541	inf	4,34	ROORGANISASI		lamanya proses harmonisasi fasilitasi ranperkada/ranperda di kanwil hukum	komitmen pimpinan dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2.582.283.450	12	133.252.055	1	245.225.200	9	4.800.000	0	0	0	9	4.800.000	900,00	1,96	21	138.052.055	inf	5,35	ROORGANISASI			banyaknya kab/kota yang melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur serta penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah	
3	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	0	0	0	2.398.657.550	8	107.059.550	0	182.178.200	0	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000	nan	4,03	8	114.409.550	inf	4,77	ROORGANISASI			1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Anjab/ABK dan menerima konsultasi dari setiap OPD. 2. Melaksanakan pembahasan secara Running, dimana pelaksanaan pembahasan terhadap dokumen yang sudah masuk terlebih dahulu tanpa menunggu semua Opd lengkap menyerahkan dokumen nya.	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	4,82						
Predikat Kinerja																					-	SR						
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	-	-	100	12.113.753.206	100	674.699.667	0	1.213.217.050	25	44.807.500	0	0	0	0	25	44.807.500	inf	3,69	125	719.507.167	125,00	5,94				
4	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	0	2.173.873.266	1	148.760.651	1	227.462.200	0	310.000	0	0	0	0	310.000	0,00	0,14	1	149.070.651	inf	6,86	ROORGANISASI		Narasumber Kemenpan seringkali susah mendapatkan waktunya sesuai jadwal yang disetting	SKPD cukup disiplin mengirimkan peserta bimteknya	
5	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	0	2.391.113.347	1	171.068.590	1	207.505.000	0	14.940.000	0	0	0	0	14.940.000	0,00	7,20	1	186.008.590	inf	7,78	ROORGANISASI				
6	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	0	1.363.754.900	1	84.173.612	1	103.480.750	0	29.557.500	0	0	0	0	29.557.500	0,00	28,56	1	113.731.112	inf	8,34	ROORGANISASI				
7	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	0	2.491.115.746	1	79.704.453	1	196.994.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	79.704.453	inf	3,20	ROORGANISASI				
8	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan	Dokumen	0	3.693.895.947	1	190.992.361	1	477.774.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	190.992.361	inf	5,17	ROORGANISASI				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
								I	II	III	IV								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp	KRp				
			Pelayanan Publik																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	3,92			
Predikat Kinerja															-	SR			

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				58.733.201.105		8.376.908.814		5.716.967.984		213.988.547		0	0	0		213.988.547		3,74		8.590.897.361		14,63					
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0		0	0	0		0		nan		0		nan					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				58.733.201.105		8.376.908.814		5.716.967.984		213.988.547		0	0	0		213.988.547		3,74		8.590.897.361		14,63					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				58.733.201.105		8.376.908.814		5.716.967.984		213.988.547		0	0	0		213.988.547		3,74		8.590.897.361		14,63					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		13.957.333.820	100	2.686.613.338	0	1.932.205.000	25	202.748.547		0	0	0	25	202.748.547	inf	10,49	125	2.889.361.885	inf	20,70					
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	100	762.297.700	100	120.385.000	0	141.089.000	2.5	5.584.000	0	0	0	0	2.5	5.584.000	inf	3,96	102.5	125.969.000	102,50	16,52					
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	310.835.000	6	104.153.200	3	86.884.000	1	3.280.000		0	0	0	1	3.280.000	33,33	3,78	7	107.433.200	38,89	34,56	Biro Pemerintahan dan Otda				
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	231.462.700	3	7.836.000	3	34.205.000	1	2.304.000		0	0	0	1	2.304.000	33,33	6,74	4	10.140.000	22,22	4,38	Biro Pemerintahan dan Otda				
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	220.000.000	3	8.395.800	3	20.000.000	2	0		0	0	0	2	0	66,67	0,00	5	8.395.800	27,78	3,82	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								29,63	14,25				
Predikat Kinerja																								SR	SR				
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100	700.000.000	100	92.985.500	0	120.269.000	100		0	0	0	0	0	0	0	inf	0,00	200	92.985.500	200,00	13,28				
4	4.01.01.1.02.0002		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	550.000.000	1	77.740.000	1	90.000.000	0		0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	1	77.740.000	16,67	14,13	Biro Pemerintahan dan Otda			
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	84	150.000.000	2	15.245.500	14	30.269.000	3		0	0	0	0	3		0	21,43	0,00	5	15.245.500	5,95	10,16	Biro Pemerintahan dan Otda			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II	III												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					4,52	4,86				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100	390.000.000	100	22.427.980	0	60.103.800	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	100	22.427.980	100,00	5,75			
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	180.000.000	1	13.908.980	1	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	13.908.980	16,67	7,73	Biro Pemerintahan dan Otda		
7	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	120.000.000	1	1.470.500	1	17.103.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.470.500	16,67	1,23	Biro Pemerintahan dan Otda		
8	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	90.000.000	1	7.048.500	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	7.048.500	16,67	7,83	Biro Pemerintahan dan Otda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					6,25	2,10				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	420.000.000	100	112.310.400	0	131.500.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	100	112.310.400	100,00	26,74			
9	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	180.000.000	0	0	78	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda		
10	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	240.000.000	36	112.310.400	36	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36	112.310.400	90,00	46,80	Biro Pemerintahan dan Otda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,00	4,68				
Predikat Kinerja																					SR	SR				
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100	8.486.548.440	100	1.677.117.984	0	1.006.963.200	0	170.380.276	0	0	0	0	0	170.380.276	nan	16,92	100	1.847.498.260	100,00	21,77		
11	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	1.200.000.000	10	0	60	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	0	16,67	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda		
12	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	800.000.000	1	0	30	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	1,67	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda		
13	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	350.000.000	18	162.132.500	1500	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	162.132.500	75,00	46,32	Biro Pemerintahan dan Otda		
14	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	300.000.000	201	78.412.000	1500	60.003.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	201	78.412.000	3.350,00	26,14	Biro Pemerintahan dan Otda		
15	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	6	60.000.000	36	16.390.000	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	36	16.390.000	600,00	27,32	Biro Pemerintahan dan Otda		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Perundang-Undangan yang Disediakan																									
16	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	75.000.000	0	0	1	21.960.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda					
17	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	5.635.548.440	226	1.420.183.484	160	750.000.000	44	170.380.276	0	0	0	44	170.380.276	27,50	22,72	270	1.590.563.760	90,00	28,22	Biro Pemerintahan dan Otda				
18	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	66.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Biro Pemerintahan dan Otda					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					229,63	7,11						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100	1.200.000.000	100	305.120.500	0	159.400.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	100	305.120.500	100,00	25,43					
19	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	1.200.000.000	21	305.120.500	4	159.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	21	305.120.500	70,00	25,43	Biro Pemerintahan dan Otda					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					3,68	1,34						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	720.000.000	100	160.485.279	0	115.000.000	0	26.784.271	0	0	0	0	0	26.784.271	nan	23,29	100	187.269.550	100,00	26,01				
20	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	60.000.000	201	11.425.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	201	11.425.000	3.350,00	19,04	Biro Pemerintahan dan Otda					
21	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	60.000.000	3	9.311.876	0	15.000.000	0	1.350.389	0	0	0	0	1.350.389	nan	9,00	3	10.662.265	50,00	17,77	Biro Pemerintahan dan Otda				
22	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	600.000.000	3	139.748.403	1	90.000.000	0	25.433.882	0	0	0	0	25.433.882	0,00	28,26	3	165.182.285	50,00	27,53	Biro Pemerintahan dan Otda				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					156,82	2,92						
Predikat Kinerja																					ST	SR						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100	1.278.487.680	100	195.780.695	0	197.880.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	100	195.780.695	100,00	15,31					
23	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	343.196.680	2	58.149.295	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	58.149.295	33,33	16,94	Biro Pemerintahan dan Otda				
24	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	12	467.511.000	5	105.674.400	2	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	105.674.400	41,67	22,60	Biro Pemerintahan dan Otda				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																								
25	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	180.000.000	10	9.000.000	10	30.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	9.000.000	8,33	5,00	Biro Pemerintahan dan Otda			
26	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	287.780.000	50	22.957.000	30	47.880.000	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	50	22.957.000	41,67	7,98	Biro Pemerintahan dan Otda			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					4,81	2,02					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-		44.775.867.285	100	5.690.295.476	0	3.784.762.984	0	11.240.000	0	0	0	0	0	11.240.000	nan	0,30	100	5.701.535.476	inf	12,73			
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-	-	100	16.101.620.708	100	1.470.132.014	0	1.334.762.984	0		0	0	0	0	0	0	nan	0,00	100	1.470.132.014	100,00	9,13			
1	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	6	1.623.658.800	1	157.061.033	1	500.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	157.061.033	16,67	9,67	Biro Pemerintahan dan Otda		
2	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	6	1.765.540.300	4	582.958.040	1	486.427.984	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	582.958.040	66,67	33,02	Biro Pemerintahan dan Otda		
3	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	6	12.712.421.608	4	730.112.941	4	348.335.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	730.112.941	66,67	5,74	Biro Pemerintahan dan Otda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00	16,15					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	100	23.476.345.317	100	1.581.701.726	0	1.200.000.000	0	6.620.000	0	0	0	0	0	6.620.000	nan	0,55	100	1.588.321.726	100,00	6,77			
4	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	3	5.619.034.600	1	350.483.489	6	350.000.000	0		255.000	0	0	0	0	255.000	0,00	0,07	1	350.738.489	33,33	6,24	Biro Pemerintahan dan Otda		
5	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	3	7.481.813.550	1	358.111.797	19	350.000.000	0		1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,34	1	359.311.797	33,33	4,80	Biro Pemerintahan dan Otda		
6	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	3	10.375.497.167	1	873.106.440	1	500.000.000	0		5.165.000	0	0	0	0	5.165.000	0,00	1,03	1	878.271.440	33,33	8,46	Biro Pemerintahan dan Otda		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					16,67	3,25					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	100	5.197.901.260	100	2.638.461.736	0	1.250.000.000	0	4.620.000	0	0	0	0	0	4.620.000	nan	0,37	100	2.643.081.736	100,00	50,85			
7	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	3	414.962.150	1	654.668.304	1	600.000.000	0		2.820.000	0	0	0	0	2.820.000	0,00	0,47	1	657.488.304	33,33	158,45	Biro Pemerintahan dan Otda		
8	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	3	2.982.939.110	1	1.929.941.132	1	250.000.000	0		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0,00	0,72	1	1.931.741.132	33,33	64,76	Biro Pemerintahan dan Otda		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
9	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	3	1.800.000.000	1	53.852.300	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	53.852.300	33,33	2,99	Biro Pemerintahan dan Otda			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					11,11	25,13				
Predikat Kinerja																					SR	SR				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO PEREKONOMIAN
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
		BIRO PEREKONOMIAN				5.151.220.000		1.792.775.396		3.325.098.000	36.199.297	0	0	0		36.199.297		1,09		1.828.974.693		35,51																				
	X	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0	0	0	0	0		0		nan		0		nan																				
	X.XX	PENUNJANG URUSAN				0		0		0	0	0	0	0		0		nan		0		nan																				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				5.151.220.000		1.792.775.396		3.325.098.000	36.199.297	0	0	0		36.199.297		1,09		1.828.974.693		35,51																				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				5.151.220.000		1.792.775.396		3.325.098.000	36.199.297	0	0	0		36.199.297		1,09		1.828.974.693		35,51																				
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		2.400.220.000	100	931.393.946	0	1.506.262.900	15	31.704.297	0	0	0	15	31.704.297	inf	2,10	115	963.098.243	inf	40,13																			
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	8	180.000.000	8	16.494.000	0	34.751.100	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	8	16.494.000	100,00	9,16																			
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen	2	90.000.000	2	13.597.200	2	21.562.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	13.597.200	100,00	15,11	ROPEREK																		
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan	0	0	3	1.730.000	2	3.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.730.000	inf	inf	ROPEREK																		
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	90.000.000	5	1.166.800	5	10.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	1.166.800	100,00	1,30	ROPEREK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																			inf	inf						
Predikat Kinerja																																				-	-					
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	72	510.000.000	25	92.572.950	0	91.581.400	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	25	92.572.950	34,72	18,15																			
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	150.000.000	12	87.600.000	5	89.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	87.600.000	20,00	58,40	ROPEREK																		
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	360.000.000	13	4.972.950	14	2.529.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	4.972.950	108,33	1,38	ROPEREK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				25,67	11,96					
Predikat Kinerja																																					SR	SR				
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12	100.000.000	3	15.046.833	0	15.432.400	0	7.596.840	0	0	0	0	0	7.596.840	nan	49,23	3	22.643.673	25,00	22,64																		
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	2	12.579.833	2	14.400.000	1	7.596.840	0	0	0	1	7.596.840	50,00	52,76	3	20.176.673	inf	inf	ROPEREK																		
7	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	100.000.000	1	2.467.000	1	1.032.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	2.467.000	8,33	2,47	ROPEREK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				inf	inf					
Predikat Kinerja																																					-	-				
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4	420.000.000	12	15.735.600	0	15.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	inf	0,00	15	15.735.600	375,00	3,75																		
8	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	420.000.000	12	15.735.600	29	15.000.000	3	0	0	0	0	3	0	10,34	0,00	15	15.735.600	375,00	3,75	ROPEREK																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																				46,88	0,47					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	1.051.100.000	57	691.238.916	0	1.257.304.720	0	22.859.857	0	0	0	0	0	22.859.857	nan	1,82	57	714.098.773	inf	67,94			
9	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	150.000.000	1	980.000	1	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	980.000	8,33	0,65	ROPEREK			
10	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	2	48.100.000	1	15.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	48.100.000	inf	inf	ROPEREK			
11	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	150.000.000	4	12.824.500	6	20.000.300	1	1.292.000	0	0	0	1	1.292.000	16,67	6,46	5	14.116.500	41,67	9,41	ROPEREK			
12	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1.100.000	10	13.240.000	1	7.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10	13.240.000	83,33	1.203,64	ROPEREK			
13	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	750.000.000	40	616.094.416	60	1.212.652.420	10	21.567.857	0	0	0	10	21.567.857	16,67	1,78	50	637.662.273	50,00	85,02	ROPEREK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	0	9	46.050.000	0	40.083.280	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	9	46.050.000	inf	inf			
14	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	4.391.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	ROPEREK			
15	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	9	46.050.000	4	35.691.680	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	46.050.000	inf	inf	ROPEREK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	3.120.000	1	1.107.850	0	1.500.000	1	97.600	0	0	0	0	1	97.600	inf	6,51	2	1.205.450	inf	38,64			
16	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.120.000	1	1.107.850	2	1.500.000	1	97.600	0	0	0	1	97.600	50,00	6,51	2	1.205.450	16,67	38,64	ROPEREK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					1,04	2,41					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	136.000.000	26	53.147.797	0	50.610.000	1	1.150.000	0	0	0	0	1	1.150.000	inf	2,27	27	54.297.797	inf	39,92			
17	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	120.000.000	4	41.717.797	4	44.090.000	1	1.150.000	0	0	0	1	1.150.000	25,00	2,61	5	42.867.797	125,00	35,72	ROPEREK			
18	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	22	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22	0	inf	nan	ROPEREK			
19	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	16.000.000		11.430.000	17	5.520.000	3	0	0	0	0	3	0	17,65	0,00	3	11.430.000	10,00	71,44	ROPEREK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		2.751.000.000	27	861.381.450	0	1.818.835.100	15	4.495.000	0	0	0	15	4.495.000	inf	0,25	42	865.876.450	inf	31,47				
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-	-	2	950.000.000	13	303.143.878	0	485.264.100	8	2.805.000	0	0	0	0	8	2.805.000	inf	0,58	21	305.948.878	1.050,00	32,21			
1	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1	450.000.000	10	93.662.967	1	309.444.100	3	1.530.000	0	0	0	3	1.530.000	300,00	0,49	13	95.192.967	1.300,00	21,15	ROPEREK			
2	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	1	500.000.000	3	209.480.911	1	175.820.000	5	1.275.000	0	0	0	5	1.275.000	500,00	0,73	8	210.755.911	800,00	42,15	ROPEREK			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					1.050,00	31,65					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya	-	-	3	800.000.000	3	151.486.403	0	388.824.000	3	0	0	0	0	0	3	0	inf	0,00	6	151.486.403	200,00	18,94			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Alam																								
3	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	1	300.000.000	1	82.780.000	1	213.146.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	2	82.780.000	200,00	27,59	ROPEREK		
4	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	250.000.000	1	24.450.700	1	85.688.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	2	24.450.700	200,00	9,78	ROPEREK		
5	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	250.000.000	1	44.255.703	1	89.990.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	2	44.255.703	200,00	17,70	ROPEREK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				120,00	11,02					
Predikat Kinerja																				ST	SR					
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-	-	2	1.001.000.000	11	406.751.169	0	944.747.000	4	1.690.000	0	0	0	0	4	1.690.000	inf	0,18	15	408.441.169	750,00	40,80		
6	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	500.000	1	113.133.548	1	305.410.000	0	340.000	0	0	0	0	340.000	0,00	0,11	1	113.473.548	100,00	22.694,71	ROPEREK		
7	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1	500.000	1	51.399.640	1	142.036.000	1	1.350.000	0	0	0	1	1.350.000	100,00	0,95	2	52.749.640	200,00	10.549,93	ROPEREK		
8	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1	500.000.000	2	26.562.390	1	250.925.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	3	26.562.390	300,00	5,31	ROPEREK		
9	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1	250.000.000	3	99.324.091	1	111.188.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	4	99.324.091	400,00	39,73	ROPEREK		
10	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	1	250.000.000	4	116.331.500	1	135.188.000	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	5	116.331.500	500,00	46,53	ROPEREK		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				150,00	3.333,62					
Predikat Kinerja																				ST	ST					

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				14.149.000.000		2.304.123.040		3.463.986.177		212.824.942	0	0	0	0	212.824.942		6,14		2.516.947.982		17,79				
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0	0	nan		0		nan					
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0	0	nan		0		nan					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				14.149.000.000		2.304.123.040		3.463.986.177		212.824.942	0	0	0	0	212.824.942		6,14		2.516.947.982		17,79				
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				14.149.000.000		2.304.123.040		3.463.986.177		212.824.942	0	0	0	0	212.824.942		6,14		2.516.947.982		17,79				
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		3.089.000.000		1.065.786.350	0	1.341.625.600		202.024.942	0	0	0	0	202.024.942	nan	15,06	0	1.267.811.292	nan	41,04				
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	236.000.000	0	56.634.251	0	63.927.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	56.634.251	nan	24,00				
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	90.000.000	6	34.891.586	6	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6	34.891.586	200,00	38,77	ROPBJ			
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	56.000.000	4	3.966.550	4	5.887.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	3.966.550	33,33	7,08	ROPBJ			
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	90.000.000	4	17.776.115	4	18.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	17.776.115	100,00	19,75	ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					111,11	21,87					
Predikat Kinerja																					ST	SR					
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	0	126.000.000	0	125.729.529	0	133.998.500	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	125.729.529	nan	99,79				
4	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang	5	36.000.000	5	114.066.229	5	120.337.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	114.066.229	100,00	316,85	ROPBJ			
		Verifikasi Keuangan SKPD	bulan Dokumen	12		12		12		0						0		0,00		12	100,00		ROPBJ				
5	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	90.000.000	3	11.663.300	3	13.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	11.663.300	100,00	12,96	ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00	65,96					
Predikat Kinerja																					SR	R					
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0	141.000.000	0	21.425.310	0	31.577.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	21.425.310	nan	15,20				
6	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	91.000.000	3	15.558.560	1	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	15.558.560	100,00	17,10	ROPBJ			
7	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	32.000.000	2	4.000.000	3	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	4.000.000	100,00	12,50	ROPBJ			
8	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.000.000	3	1.866.750	1	11.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.866.750	300,00	10,37	ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					55,56	5,00					
Predikat Kinerja																					R	SR					
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	240.000.000	0	10.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	10.000.000	nan	4,17				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
9	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	bulan Orang	26	240.000.000	8	10.000.000	12	120.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	10.000.000	30,77	4,17	ROPBJ					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				3,08	0,46						
Predikat Kinerja																				SR	SR						
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0	1.028.000.000	0	517.802.903	0	547.872.841	0	143.874.119	0	0	0	0	0	143.874.119	nan	26,26	0	661.677.022	nan	64,37			
10	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit Paket	7	280.000.000	4	47.800.000	9	36.383.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	47.800.000	57,14	17,07	ROPBJ				
11	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit Paket		0	3	20.300.000	3	44.115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	20.300.000	inf	inf	ROPBJ				
12	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		84.000.000	4	31.822.600	4	31.822.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	31.822.600	inf	37,88	ROPBJ				
13	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		84.000.000	3	12.446.400	2	12.446.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	12.446.400	inf	14,82	ROPBJ				
14	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0	1	3.020.000	2	3.020.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	3.020.000	inf	inf	ROPBJ				
15	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan Laporan	12	550.000.000	12	401.809.403	12	419.480.941	3	143.874.119	0	0	0	3	143.874.119	25,00	34,30	15	545.683.522	125,00	99,22	ROPBJ			
16	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan Dokumen	12	30.000.000	12	604.500	12	604.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	604.500	100,00	2,02	ROPBJ				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf						
Predikat Kinerja																				-	-						
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	740.000.000	0	79.410.000	0	136.752.300	0	0	0	0	0	0	0	79.410.000	nan	0,00	0	79.410.000	nan	10,73			
17	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit Paket	5	220.000.000	12	24.660.000	12	24.247.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	24.660.000	240,00	11,21	ROPBJ				
18	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		520.000.000	7	54.750.000	7	112.504.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	54.750.000	inf	10,53	ROPBJ				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	1,21						
Predikat Kinerja																				-	SR						
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	262.000.000	0	128.849.457	0	120.945.407	0	58.150.823	0	0	0	0	0	58.150.823	nan	48,08	0	187.000.280	nan	71,37			
19	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan Laporan	12	18.000.000	12	2.248.000	12	2.264.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	2.248.000	100,00	12,49	ROPBJ				
20	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit Laporan	15	54.000.000	15	9.150.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	15	9.150.000	100,00	16,94	ROPBJ				
21	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang Laporan	12	190.000.000	3	117.451.457	3	118.681.407	1	58.150.823	0	0	0	1	58.150.823	33,33	49,00	4	175.602.280	33,33	92,42	ROPBJ			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				10,61	5,80						
Predikat Kinerja																				SR	SR						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0	316.000.000	0	125.934.900	0	186.552.552	0	0	0	0	0	0	0	125.934.900	nan	0,00	0	125.934.900	nan	39,85			
22	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	260.000.000	4	112.034.900	5	163.502.552	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	112.034.900	66,67	43,09	ROPBJ				
23	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	1.000.000	10,00	5,00	ROPBJ				
24	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	36.000.000	18	12.900.000	18	22.050.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18	12.900.000	105,88	35,83	ROPBJ				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				7,30	3,50						
Predikat Kinerja																				SR	SR						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-		11.060.000.000		1.238.336.690	0	2.122.360.577	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	nan	0,51	0	1.249.136.690	nan	11,29			
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0	4.640.000.000	0	410.776.246	0	660.330.937	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	nan	1,64	0	421.576.246	nan	9,09			
1	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4	740.000.000	4	64.461.390	4	153.412.000	1	10.800.000	0	0	0	0	10.800.000	25,00	7,04	5	75.261.390	125,00	10,17	ROPBJ	
2	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	3.000.000.000	1	245.198.248	1	277.306.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	245.198.248	100,00	8,17	ROPBJ		
3	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	900.000.000	12	101.116.608	12	229.612.337	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	101.116.608	100,00	11,24	ROPBJ		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					108,33	9,86			
Predikat Kinerja																					ST	SR			
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	0	2.120.000.000	0	505.492.869	0	835.000.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	505.492.869	nan	23,84		
4	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1	800.000.000	1	297.987.440	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	297.987.440	100,00	37,25	ROPBJ	
5	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	900.000.000	2	147.742.587	2	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	147.742.587	100,00	16,42	ROPBJ	
6	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	13	420.000.000	13	59.762.842	13	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	59.762.842	100,00	14,23	ROPBJ	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,00	11,32			
Predikat Kinerja																					SR	SR			
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	0	4.300.000.000	0	322.067.575	0	627.029.640	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	322.067.575	nan	7,49		
7	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	480	2.500.000.000	60	92.088.170	135	142.519.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	60	92.088.170	12,50	3,68	ROPBJ	
8	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	900.000.000	2	102.557.341	2	197.251.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	102.557.341	100,00	11,40	ROPBJ	
9	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	900.000.000	2	127.422.064	2	287.259.140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	127.422.064	100,00	14,16	ROPBJ	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,61	3,25			
Predikat Kinerja																					SR	SR			

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BIRO UMUM
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
									I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
		BIRO UMUM			527.350.000.000	221.695.197.299	123.675.366.753	12.158.412.998	0	0	0	12.158.412.998	9,83	233.853.610.297	44,35										
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan										
X.XX		PENUNJANG URUSAN			0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan										
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			527.350.000.000	221.695.197.299	123.675.366.753	12.158.412.998	0	0	0	12.158.412.998	9,83	233.853.610.297	44,35										
4.01		SEKRETARIAT DAERAH			527.350.000.000	221.695.197.299	123.675.366.753	12.158.412.998	0	0	0	12.158.412.998	9,83	233.853.610.297	44,35										
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Nilai	527.350.000.000	91.54	221.695.197.299	84,55	123.675.366.753	89.9	12.158.412.998	107,02	9,83	181.44	233.853.610.297	inf	44,35								
			IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Persen		90.18		100		80.54		80,54		170.72		inf									
			Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian	Persen		89.75		90,20		79.04		79,04		168.79		inf									
4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	500	1.800.000.000	400	1.440.000.000	0	246.963.640	25	4.560.000	0	1,85	425	1.444.560.000	85,00	80,25	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	600.000.000	24	480.000.000	5	100.000.000	1	4.560.000	0	4,56	25	484.560.000	62,50	80,76	ROUMUM	Anggaran dihilangkan pada pergeseran anggaran	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
2	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	600.000.000	51	480.000.000	17	73.481.820	3	0	0	0	3	0	17,65	0,00	54	480.000.000	67,50	80,00	ROUMUM	Anggaran dihilangkan pada pergeseran anggaran	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	95	600.000.000	57	480.000.000	19	73.481.820	3	0	0	0	3	0	15,79	0,00	60	480.000.000	63,16	80,00	ROUMUM	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan danj ulmah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															64,39	80,25									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I		II	III																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp				
Predikat Kinerja																						R	T									
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	500	252.000.000.000	400	1.800.000.000	0	47.926.282.194	25	7.418.914.538	0	0	0	0	25	7.418.914.538	inf	15,48	425	9.218.914.538	85,00	3,66		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
4	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1600	250.000.000.000	1280	200.000.000	400	47.291.284.809	400	7.324.364.538	0	0	0	0	400	7.324.364.538	100,00	15,49	1680	7.524.364.538	105,00	3,01	ROUMUM	Perubahan regulasi seperti kenaikan gaji, dan perpindahan ASN ke Lingkup Setda	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
5	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	800	1.500.000.000	640	1.200.000.000	250	530.271.189	65	94.550.000	0	0	0	0	65	94.550.000	26,00	17,83	705	1.294.550.000	88,13	86,30	ROUMUM	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
6	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	60	500.000.000	48	400.000.000	12	104.726.196	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	51	400.000.000	85,00	80,00	ROUMUM	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						46,35	28,22									
Predikat Kinerja																						SR	SR									
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	500	2.500.000.000	400	2.000.000.000	0	551.976.196	25	254.577.305	0	0	0	0	25	254.577.305	inf	46,12	425	2.254.577.305	85,00	90,18		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
7	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	2.000.000.000	8	1.600.000.000	2	447.250.000	2	254.577.305	0	0	0	0	2	254.577.305	100,00	56,92	10	1.854.577.305	100,00	92,73	ROUMUM	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan					
8	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	40	500.000.000	32	400.000.000	9	104.726.196	2	0	0	0	0	2	0	22,22	0,00	34	400.000.000	85,00	80,00	ROUMUM	keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
											I	II	III	IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																										rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					23,13	21,59									
Predikat Kinerja																					SR	SR									
	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	500	150.000.000	400	120.000.000	0	32.364.561	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	120.000.000	85,00	80,00		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
9	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	60	150.000.000	48	120.000.000	12	32.364.561	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	51	120.000.000	85,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,44	8,89									
Predikat Kinerja																					SR	SR									
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	500	2.250.000.000	400	1.800.000.000	0	745.243.087	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	1.800.000.000	85,00	80,00		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
10	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	2.000.000.000	4	1.600.000.000	582	436.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	1.600.000.000	66,67	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
11	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	250	250.000.000	200	200.000.000	50	308.743.087	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	200.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,33	14,55									
Predikat Kinerja																					SR	SR									
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	500	43.600.000.000	400	36.495.197.299	0	11.628.928.654	25	463.907.728	0	0	0	0	25	463.907.728	inf	3,99	425	36.959.105.027	85,00	84,77		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																										dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	
12	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	250	250.000.000	200	200.000.000	25	85.376.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	200.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
13	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	250	2.500.000.000	200	2.000.000.000	10	255.699.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	2.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
14	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	250	2.500.000.000	200	2.000.000.000	10	440.879.240	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	2.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
15	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	2.000.000.000	24	2.000.000.000	6	576.503.400	2	109.752.250	0	0	0	2	109.752.250	33,33	19,04	26	2.109.752.250	86,67	105,49	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
16	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	1.000.000.000	12	800.000.000	3	179.112.600	1	18.900.000	0	0	0	1	18.900.000	33,33	10,55	13	818.900.000	86,67	81,89	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
17	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	250.000.000	12	200.000.000	3	50.058.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	200.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
18	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	5.000.000.000	48	5.215.197.299	12	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	5.215.197.299	80,00	104,30	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
19	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	30.000.000.000	48	24.000.000.000	500	9.987.473.082	93	335.255.478	0	0	0	93	335.255.478	18,60	3,36	141	24.335.255.478	235,00	81,12	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
20	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	15	100.000.000	12	80.000.000	3	52.826.332	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	80.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					44,42	38,64					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	500	12.000.000.000	400	7.600.000.000	0	9.632.471.625	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	7.600.000.000	85,00	63,33		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
21	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	2.000.000.000	1	1.600.000.000	2	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	1.600.000.000	50,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
22	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	5.000.000.000	2	2.000.000.000	1	2.491.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	2.000.000.000	40,00	40,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
23	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	250	2.500.000.000	200	2.000.000.000	10	1.439.716.625	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	2.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah	kebutuhan pendanaan kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																										sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	sesuai kebutuhan
24	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	250	2.500.000.000	200	2.000.000.000	15	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	2.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
25	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						10,00	nan				
Predikat Kinerja																						SR	-				
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	56.100.000.000	400	44.880.000.000	0	20.408.757.864	25	2.475.228.563	0	0	0	0	25	2.475.228.563	inf	12,13	425	47.355.228.563	85,00	84,41		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
26	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	100.000.000	48	80.000.000	2000	51.996.100	484	0	0	0	0	484	0	24,20	0,00	532	80.000.000	886,67	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
27	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.000.000.000	48	1.600.000.000	12	5.045.709.480	3	759.240.827	0	0	0	3	759.240.827	25,00	15,05	51	2.359.240.827	425,00	117,96	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
28	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.000.000.000	48	3.200.000.000	12	1.190.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48	3.200.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																									berbeda dan cukup banyak			
29	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	50.000.000.000	48	40.000.000.000	12	14.120.952.284	3	1.715.987.736	0	0	0	3	1.715.987.736	25,00	12,15	51	41.715.987.736	85,00	83,43	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					50,92	12,46						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	9.450.000.000	400	7.560.000.000	0	7.833.111.228	25		0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	7.560.000.000	85,00	80,00		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
30	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	1.000.000.000	20	800.000.000	5	230.982.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20	800.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
31	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	300	5.000.000.000	240	4.000.000.000	60	1.503.976.141	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	240	4.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
32	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	150.000.000	80	120.000.000	20	62.950.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	80	120.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
33	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	750	750.000.000	600	600.000.000	100	295.935.878	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	600	600.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
34	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	50	50.000.000	40	40.000.000	10	5.358.426.256	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	40.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam	kebutuhan pendanaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III												IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi																					pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kegiatan sesuai kebutuhan		
35	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	2.500.000.000	20	2.000.000.000	12	380.840.953	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20	2.000.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					13,71	13,71					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	500	22.500.000.000	400	18.000.000.000	0	4.206.097.192	25	1.135.943.835	0	0	0	0	25	1.135.943.835	inf	27,01	425	19.135.943.835	85,00	85,05		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
36	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	10	750.000.000	8	600.000.000	2	252.244.496	2	51.673.134	0	0	0	2	51.673.134	100,00	20,49	10	651.673.134	100,00	86,89	ROUMUM		Perubahan regulasi terhadap gaji dan tunjangan KDH/WKDH	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
37	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	250	1.250.000.000	200	1.000.000.000	60	246.410.000	12	24.000.000	0	0	0	12	24.000.000	20,00	9,74	212	1.024.000.000	84,80	81,92	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
38	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	500.000.000	8	400.000.000	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8	400.000.000	80,00	80,00	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan	
39	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	10	20.000.000.000	8	16.000.000.000	2	3.607.442.696	2	1.060.270.701	0	0	0	2	1.060.270.701	100,00	29,39	10	17.060.270.701	100,00	85,30	ROUMUM		Perubahan regulasi	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9,35	8,57					
Predikat Kinerja																					SR	SR					
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	-	-	500	125.000.000.000	400	100.000.000.000	0	20.463.170.512	25	405.281.029	0	0	0	0	25	405.281.029	inf	1,98	425	100.405.281.029	85,00	80,32		keterbatasan waktu dalam pencairan dana,	kebutuhan pendanaan kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
											I	II	III	IV																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp																		
																									karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	sesuai kebutuhan																			
40	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	125	50.000.000.000	100	40.000.000.000	25	9.605.152.136	0	152.252.455	0	0	0	0	152.252.455	0,00	1,59	100	40.152.252.455	80,00	80,30	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan																		
41	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	125	50.000.000.000	100	40.000.000.000	25	7.569.708.005	1	243.757.951	0	0	0	1	243.757.951	4,00	3,22	101	40.243.757.951	80,80	80,49	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan																		
42	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	125	25.000.000.000	100	20.000.000.000	15	3.288.310.371	1	9.270.623	0	0	0	1	9.270.623	6,67	0,28	101	20.009.270.623	80,80	80,04	ROUMUM		keterbatasan waktu dalam pencairan dana, karena jumlah sub kegiatan dan jumlah rekening belanja yang berbeda dan cukup banyak	kebutuhan pendanaan kegiatan sesuai kebutuhan																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
SEKRETARIAT DPRD
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)			Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
									I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp						K
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		SEKRETARIAT DPRD				575.589.476.269	584.042.100.765	121.761.869.496	30.622.608.040	0	0	0	30.622.608.040	25,15	614.664.708.805	106,79								
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan								
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan								
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				575.589.476.269	584.042.100.765	121.761.869.496	30.622.608.040	0	0	0	30.622.608.040	25,15	614.664.708.805	106,79								
4.02		SEKRETARIAT DPRD				575.589.476.269	584.042.100.765	121.761.869.496	30.622.608.040	0	0	0	30.622.608.040	25,15	614.664.708.805	106,79								
4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-		364.858.376.070	400 325.458.563.446	0 78.493.306.296	25 19.212.490.270	0	0	0	25 19.212.490.270	inf 24,48	425 344.671.053.716	inf 94,47								
4.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	425	2.821.502.000	340 2.161.052.200	0 824.079.000	20 55.517.400	0 0	0 0	0 0	20 55.517.400	inf 6,74	360 2.216.569.600	84,71 78,56								
1	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	1.973.251.000	24 1.352.704.150	8 271.845.000	3 42.242.400	0	0	0	3 42.242.400	37,50 15,54	27 1.394.946.550	90,00 70,69	SEKWAN			Kurangnya SDM Perencanaan	Ketersediaan Anggaran			
2	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	0 12 701.151.650	16 174.030.000	4 6.360.000	0 0	0 0	0 4 6.360.000	25,00 3,65	16 707.511.650	106,67 inf	SEKWAN			Kurangnya Dukungan Bagian-bagian dalam penyusunan LKJIP	Ketersediaan Anggaran					
3	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	848.251.000	16 107.196.400	4 378.204.000	1 6.915.000	0	0	0	1 6.915.000	25,00 1,83	17 114.111.400	85,00 13,45	SEKWAN			Kurangnya Dukungan Bagian-bagian dalam penyusunan LKJIP	Ketersediaan Anggaran			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																93,89	inf							
Predikat Kinerja																ST	-							
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	500	45.244.831.750	400 25.559.457.272	0 13.821.272.500	25 3.032.794.295	0 0	0 0	0 25 3.032.794.295	inf 21,94	425 28.592.251.567	85,00 63,19									
4	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	445	38.798.777.000	356 21.005.422.922	89 12.100.000.000	89 2.683.699.295	0	0	0	89 2.683.699.295	100,00 22,18	445 23.689.122.217	100,00 61,06	SEKWAN			Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran			
5	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50000	3.935.304.750	49712 3.626.980.500	10000 1.192.845.000	2179 283.740.000	0	0	0	2179 283.740.000	21,79 23,79	51891 3.910.720.500	103,78 99,38	SEKWAN			Banyaknya kesalahan dan kekurangan bahan dalam kelengkapan SPJ	Ketersediaan Anggaran			
6	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	2.510.750.000	48 927.053.850	12 528.427.500	3 65.355.000	0	0	0	3 65.355.000	25,00 12,37	51 992.408.850	85,00 39,53	SEKWAN			lamanya pengumpulan data sebagai bahan pembuatan laporan keuangan	Ketersediaan Anggaran			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV										K	Rp	K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	SR					Rp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					48,13	33,33						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	500	2.840.875.500	400	2.768.343.319	0	544.233.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	2.768.343.319	85,00	97,45				
7	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	260	2.067.235.500	200	1.858.531.644	2	414.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	1.858.531.644	76,92	89,90	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran
8	4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	773.640.000	12	792.250.780	12	99.844.000	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	792.250.780	100,00	102,41	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran
9	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	0	12	117.560.895	3	29.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	117.560.895	80,00	inf	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					28,55	inf						
Predikat Kinerja																					SR	-						
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	500	1.910.725.000	400	444.000.000	0	198.050.000	25	0	0	0	0	0	25	0	inf	0,00	425	444.000.000	85,00	23,24				
10	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	445	355.000.000	356	444.000.000	200	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	356	444.000.000	80,00	125,07	SEKWAN	Sub kegiatan tidak dianggarkan karena adanya Edaran Gubernur, untuk pengadaan pakaian dinas dianggarkan hanya 2 thn sekali	Tidak Ada	Tidak Ada
11	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	89	1.555.725.000	0	0	200	87.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	SEKWAN	sub kegiatan hanya boleh dilaksanakan oleh BPSDM	Tidak Ada	Tidak Ada
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					7,27	11,37						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	500	20.161.050.000	400	26.163.450.197	0	4.294.442.780	25	932.269.050	0	0	0	0	25	932.269.050	inf	21,71	425	27.095.719.247	85,00	134,40				
12	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	512.500.000	80	602.766.400	7	94.130.780	1	23.175.000	0	0	0	0	1	23.175.000	14,29	24,62	81	625.941.400	81,00	122,13	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran
13	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	1.125.000.000	16	2.307.204.800	4	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16	2.307.204.800	106,67	205,08	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran
14	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	377.125.000	12	2.803.961.500	3	245.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	2.803.961.500	120,00	743,51	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan	Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	
15	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1560	4.136.376.000	1248	3.987.939.090	11	985.420.000	3	102.638.300	0	0	0	3	102.638.300	27,27	10,42	1251	4.090.577.390	80,19	98,89	SEKWAN		proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
16	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	1.043.790.000	32	1.283.937.899	8	156.852.000	4	75.587.100	0	0	0	4	75.587.100	50,00	48,19	36	1.359.524.999	72,00	130,25	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
17	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	3.762.500.000	37	2.883.228.000	22	250.000.000	5	44.408.000	0	0	0	5	44.408.000	22,73	17,76	42	2.927.636.000	120,00	77,81	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
18	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12000	770.000.000	8000	1.699.602.000	108	185.400.000	30	84.484.000	0	0	0	30	84.484.000	27,78	45,57	8030	1.784.086.000	66,92	231,70	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	
19	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12000	7.663.759.000	9600	9.530.589.108	2400	2.120.200.000	600	451.229.350	0	0	0	600	451.229.350	25,00	21,28	10200	9.981.818.458	85,00	130,25	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Hubungan yang baik Antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia	
20	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6000	770.000.000	3653	418.372.400	625	107.210.000	8.15	0	0	0	0	8.15	0	1,30	0,00	3661.15	418.372.400	61,02	54,33	SEKWAN		Kurangnya memadainya sarana dan prasarana pengelolaan Arsip	1. Adanya Fungsional Arsiparis dalam mengelola sub kegiatan 2. Dukungan ketersediaan Anggaran	
21	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	4	645.849.000	2	35.000.000	1	150.747.300	0	0	0	1	150.747.300	50,00	430,71	5	796.596.300	inf	inf	SEKWAN		idak jelasnya tugas pokok dan fungsi tenaga IT dalam mendukung kegiatan	1. Adanya SDM IT yang memadai dalam mendukung kegiatan berbasis IT 2. Dukungan ketersediaan Anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						inf	inf					
Predikat Kinerja																						-	-					
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	500	33.331.861.000	400	39.486.980.442	0	5.116.057.956	25	1.318.061.730	0	0	0	0	25	1.318.061.730	inf	25,76	425	40.805.042.172	85,00	122,42				
22	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	5	0	0	0	4	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp
		Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																								
23	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	10.000.000.000	2	889.304.100	3	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	889.304.100	40,00	8,89	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	
24	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	100	2.890.025.000	41	1.397.351.740	2	322.412.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	41	1.397.351.740	41,00	48,35	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
25	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	75	2.729.100.000	94	1.915.310.000	79	438.620.000	79	1.300.365.000	0	0	0	79	1.300.365.000	100,00	296,47	173	3.215.675.000	230,67	117,83	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran
26	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	15.000.000.000	2	13.974.932.096	1	1.017.700.956	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	13.974.932.096	66,67	93,17	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
27	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2.712.736.000	3	13.884.235.656	2	1.235.200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	13.884.235.656	150,00	511,82	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
28	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	2	7.425.846.850	1	1.202.125.000	0	17.696.730	0	0	0	0	17.696.730	0,00	1,47	2	7.443.543.580	inf	inf	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	23.468.762.000	400	24.552.265.757	0	6.473.868.367	25	2.407.455.945	0	0	0	0	25	2.407.455.945	inf	37,19	425	26.959.721.702	85,00	114,87			
29	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12000	1.310.100.000	45012	319.640.500	12	195.200.000	3	41.850.000	0	0	0	3	41.850.000	25,00	21,44	45015	361.490.500	375,13	27,59	SEKWAN		Tidak Ada	. SDM yang memadai dalam pengelolaan Surat Menyurat 2. Ketersediaan Dukungan Anggaran
30	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	60	7.524.112.000	27	4.836.118.346	12	2.001.822.400	3	665.942.756	0	0	0	3	665.942.756	25,00	33,27	30	5.502.061.102	50,00	73,13	SEKWAN		Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%			(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan																								
31	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	625.485.000	36	3.397.590.989	24	280.800.000	6	147.703.288	0	0	0	6	147.703.288	25,00	52,60	42	3.545.294.277	70,00	566,81	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran
32	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	14.009.065.000	48	15.998.915.922	6	3.996.045.967	3	1.551.959.901	0	0	0	3	1.551.959.901	50,00	38,84	51	17.550.875.823	85,00	125,28	SEKWAN		1. Kurangnya waktu dalam penyusunan perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						18,13	24,78				
Predikat Kinerja																						SR	SR				
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500	28.978.690.000	400	30.666.365.777	0	3.596.833.513	25	629.346.335	0	0	0	0	25	629.346.335	inf	17,50	425	31.295.712.112	85,00	108,00			
33	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	2.252.600.000	12	870.944.316	4	612.000.000	1	34.541.229	0	0	0	1	34.541.229	25,00	5,64	13	905.485.545	52,00	40,20	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	
34	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	4.077.125.000	47	2.036.878.702	64	998.700.000	10	143.991.946	0	0	0	10	143.991.946	15,63	14,42	57	2.180.870.648	91,94	53,49	SEKWAN	kelalaian driver dalam menjaga kendaraan	Ketersediaan Anggaran	
35	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	441	1.327.260.000	204	1.258.340.000	400	58.450.000	50	33.000.000	0	0	0	50	33.000.000	12,50	56,46	254	1.291.340.000	57,60	97,29	SEKWAN	Kurangnya waktu dalam perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
36	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	500.000.000	161	304.111.800	161	50.600.000	3	3.550.000	0	0	0	3	3.550.000	1,86	7,02	164	307.661.800	82,00	61,53	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	
37	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12.137.736.000	4	18.364.417.491	1	526.132.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	18.364.417.491	80,00	151,30	SEKWAN	Kurangnya waktu dalam perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran		
38	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	8.683.969.000	4	6.615.505.032	1	557.935.000	1	329.950.000	0	0	0	1	329.950.000	100,00	59,14	5	6.945.455.032	100,00	79,98	SEKWAN	Kurangnya waktu dalam perencanaan kegiatan 2. Keterlambatan proses Pengadaan	Ketersediaan Anggaran	
39	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	3	1.216.168.436	2	793.016.513	0	84.313.160	0	0	0	0	84.313.160	0,00	10,63	3	1.300.481.596	inf	inf	SEKWAN	Kurangnya waktu dalam perencanaan kegiatan 2.	Ketersediaan Anggaran	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			Keterlambatan proses Pengadaan						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf							
Predikat Kinerja																				-	-							
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	500	203.048.046.500	400	171.955.422.120	0	43.186.150.000	25	10.672.961.293	0	0	0	0	25	10.672.961.293	inf	24,71	425	182.628.383.413	85,00	89,94				
40	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	325	193.075.796.500	260	164.550.490.120	65/14	42.500.000.000	4	10.671.026.293	0	0	0	0	4	10.671.026.293	6,15	25,11	264	175.221.516.413	81,23	90,75	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran	
41	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	325	8.981.000.000	260	7.185.440.000	65	521.450.000	0	1.935.000	0	0	0	0	1.935.000	0,00	0,37	260	7.187.375.000	80,00	80,03	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran		
42	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	325	991.250.000	83	219.492.000	65	164.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	83	219.492.000	25,54	22,14	SEKWAN	Kurangnya minat anggota DPRD dalam melaksanakan Medical Chek up	Ketersediaan Anggaran			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				4,45	4,59							
Predikat Kinerja																				SR	SR							
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-	500	3.052.032.320	400	1.701.226.362	0	438.319.180	25	164.084.222	0	0	0	0	25	164.084.222	inf	37,43	425	1.865.310.584	85,00	61,12				
43	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	325	200.000.000	0	0	65	15.193.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	SEKWAN	Masih kurangnya antusias Anggota DPRD dalam mengisi Data LHKPN	Ketersediaan Anggaran	
44	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	35	767.994.500	8.2	379.800.000	7	40.792.000	7	17.759.000	0	0	0	7	17.759.000	100,00	43,54	15.2	397.559.000	43,43	51,77	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran		
45	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	200	1.636.270.500	246	573.504.000	24	103.330.000	6	25.850.000	0	0	0	6	25.850.000	25,00	25,02	252	599.354.000	126,00	36,63	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran		
46	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	60	447.767.320	48	747.922.362	12	279.004.180	3	120.475.222	0	0	0	3	120.475.222	25,00	43,18	51	868.397.584	85,00	193,94	SEKWAN	Banyaknya permintaan yang tidak teranggarkan	Ketersediaan Anggaran		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				5,53	6,14							
Predikat Kinerja																				SR	SR							
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-		210.731.100.199	400	258.583.537.319	0	43.268.563.200	25	11.410.117.770	0	0	0	25	11.410.117.770	inf	26,37	425	269.993.655.089	inf	128,12					
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-	-	500	43.789.694.500	400	30.352.469.451	0	8.959.588.000	25	1.092.645.686	0	0	0	0	25	1.092.645.686	inf	12,20	425	31.445.115.137	85,00	71,81				
1	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	4.417.150.030	4	2.613.625.528	1	785.000.000	0	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	0,00	0,99	4	2.621.425.528	80,00	59,35	SEKWAN	Lamanya usulan Rancangan Perda dari OPD	Ketersediaan Dukungan Anggaran		
2	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	85	36.032.764.470	35	15.613.156.768	10	2.656.503.000	6	709.077.857	0	0	0	6	709.077.857	60,00	26,69	41	16.322.234.625	48,24	45,30	SEKWAN	Lamanya usulan Rancangan Perda dari OPD	Ketersediaan Dukungan Anggaran		
3	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	30	1.064.530.000	24	1.106.502.696	6	113.835.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	24	1.106.502.696	80,00	103,94	SEKWAN	Keterlambatan dalam pembahasan rancangan Perda mengakibatkan keterlambatan dalam	Ketersediaan Dukungan Anggaran			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	30	2.275.250.000	24	817.045.200	6	348.000.000	0	39.052.000	0	0	0	0	39.052.000	0,00	11,22	24	856.097.200	80,00	37,63	SEKWAN		Keterlambatan dalam pembahasan rancangan Perda mengakibatkan keterlambatan dalam melaksanakan kajian dan penyusunan Naskah Akademik	Ketersediaan Dukungan Anggaran	
5	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	5	0	0	0	1	56.250.000	1	336.715.829	0	0	0	0	1	336.715.829	100,00	598,61	1	336.715.829	20,00	inf	SEKWAN		Konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan tata tertib dan kode etik masih rendah	Ketersediaan Dukungan Anggaran
6	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	3900	0	1300	10.202.139.259	39000	5.000.000.000	26000	0	0	0	0	26000	0	66,67	0,00	27300	10.202.139.259	700,00	inf	SEKWAN		Masih kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Dukungan Anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					168,04	inf						
Predikat Kinerja																					ST	-						
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	500	15.832.967.500	400	14.225.546.265	0	3.530.297.300	25	24.018.100	0	0	0	0	25	24.018.100	inf	0,68	425	14.249.564.365	85,00	90,00				
7	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	3.627.906.250	4	3.342.599.876	1	761.887.600	0	11.834.100	0	0	0	0	11.834.100	0,00	1,55	4	3.354.433.976	80,00	92,46	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat		
8	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	2.556.865.970	4	750.268.163	1	574.825.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	750.268.163	80,00	29,34	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat			
9	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1.603.864.000	4	2.676.517.048	1	727.474.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	2.676.517.048	80,00	166,88	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat			
10	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	5	5.089.056.780	4	4.407.297.912	1	575.062.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	4.407.297.912	80,00	86,60	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat			
11	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	5	860.561.000	4	13.980.750	1	11.047.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	13.980.750	80,00	1,62	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat			
12	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	2.094.713.500	4	3.034.882.516	1	880.000.100	0	12.184.000	0	0	0	0	12.184.000	0,00	1,38	4	3.047.066.516	80,00	145,46	SEKWAN	Tidak Ada	Ketersediaan Anggaran dan Sarpras Rapat-rapat		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					40,00	43,53						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	500	20.855.333.000	400	29.376.989.354	0	4.253.105.900	25	2.051.566.700	0	0	0	0	25	2.051.566.700	inf	48,24	425	31.428.556.054	85,00	150,70				
13	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	Laporan	15	3.029.567.600	12	5.102.502.000	3	646.688.000	1	419.688.400	0	0	0	1	419.688.400	33,33	64,90	13	5.522.190.400	86,67	182,28	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I		II	III													IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemerintahan dan Hukum	Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																							hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah	
14	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	15	3.573.244.370	12	5.627.814.000	3	786.500.600	1	434.155.500	0	0	0	1	434.155.500	33,33	55,20	13	6.061.969.500	86,67	169,65	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah
15	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	15	3.650.652.000	12	5.451.286.000	3	770.249.300	1	419.001.900	0	0	0	1	419.001.900	33,33	54,40	13	5.870.287.900	86,67	160,80	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah
16	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	15	4.092.018.530	12	5.710.540.000	3	1.004.470.000	1	391.336.300	0	0	0	1	391.336.300	33,33	38,96	13	6.101.876.300	86,67	149,12	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah
17	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	15	3.550.519.500	12	5.047.074.800	3	562.671.100	1	358.759.800	0	0	0	1	358.759.800	33,33	63,76	13	5.405.834.600	86,67	152,25	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah
18	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	10	462.581.000	8	121.759.400	2	90.464.400	0	7.500.400	0	0	0	0	7.500.400	0,00	8,29	8	129.259.800	80,00	27,94	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah
19	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	5	898.750.000	4	423.636.850	1	179.159.300	0	14.971.400	0	0	0	0	14.971.400	0,00	8,36	4	438.608.250	80,00	48,80	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I		II	III													IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																											dengan Pemerintah	
20	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	1.598.000.000	4	1.892.376.304	1	212.903.200	0	6.153.000	0	0	0	0	6.153.000	0,00	2,89	4	1.898.529.304	80,00	118,81	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi, pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu	Ketersediaan Anggaran dan hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dengan Pemerintah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					33,67	50,48						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	500	65.109.136.210	400	68.963.768.056	0	12.560.114.400	25	2.064.208.449	0	0	0	0	25	2.064.208.449	inf	16,43	425	71.027.976.505	85,00	109,09				
21	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	995.000.000	1	997.898.180	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	1	997.898.180	100,00	100,29	SEKWAN	Pelaksanaan Orientasi DPRD hanya dilaksanakan sekali 5 tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	
22	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	20	10.256.750.000	52	14.205.933.629	48	6.138.524.400	12	409.772.679	0	0	0	12	409.772.679	25,00	6,68	64	14.615.706.308	320,00	142,50	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran	
23	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	150	15.039.522.000	120	8.137.172.252	30	725.620.000	30	97.495.700	0	0	0	30	97.495.700	100,00	13,44	150	8.234.667.952	100,00	54,75	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran	
24	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	35	7.944.538.530	28	1.794.308.000	7	265.200.000	7	120.000.000	0	0	0	7	120.000.000	100,00	45,25	35	1.914.308.000	100,00	24,10	SEKWAN		Kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran	
25	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	12	818.270.000	3	25.785.000	0	0	0	3	25.785.000	25,00	3,15	3	25.785.000	inf	inf	SEKWAN		belum pahamnya PPTK terhadap outcome dari sub kegiatan	Ketersediaan Anggaran	
26	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	190.461.210	1	190.461.210	2	612.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	190.461.210	100,00	100,00	SEKWAN		1. Dukungan Tenaga Ahli dalam penyusunan Program Kerja DPRD masih lemah 2. Kurangnya SDM(ASN) yang mumpuni dalam penyusunan program Kerja DPRD	Ketersediaan Anggaran	
27	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	2260	30.682.864.470	1808	43.637.994.785	452	4.000.000.000	115	1.411.155.070	0	0	0	115	1.411.155.070	25,44	35,28	1923	45.049.149.855	85,09	146,82	SEKWAN		Tidak Ada	1. Adanya Tenaga IT yang mendukung kegiatan publikasi 2. Ketersediaan Dukungan Anggaran	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					inf	inf						
Predikat Kinerja																					-	-						
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	500	36.321.342.000	400	38.750.396.860	0	6.468.200.000	25	4.575.321.642	0	0	0	0	25	4.575.321.642	inf	70,74	425	43.325.718.502	85,00	119,28				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)				Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV																					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11				(13) = 12/7 * 100%				(14) = 6+12				(15) = 14/5 * 100%				(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
28	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	2200	5.713.491.200	24	2.900.700	390	87.200.000	0	2.382.400	0	0	0	0	0	2.382.400	0,00	2,73	24	5.283.100	1,09	0,09	SEKWAN		masih kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran							
29	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen	325	2.879.217.745	260	132.438.800	65	124.800.000	0	3.179.000	0	0	0	0	0	3.179.000	0,00	2,55	260	135.617.800	80,00	4,71	SEKWAN		masih kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran							
			Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	325		260		65		0					0		0,00		260		80,00		SEKWAN			Ketersediaan Anggaran								
30	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	975	27.728.633.055	780	38.615.057.360	195	6.256.200.000	65	4.569.760.242	0	0	0	65	4.569.760.242	33,33	73,04	845	43.184.817.602	86,67	155,74	SEKWAN		masih kurangnya SDM administrasi	Ketersediaan Anggaran								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							7,99	5,35											
Predikat Kinerja																							SR	SR											
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	500	1.664.330.000	400	1.429.723.372	0	233.820.000	25	172.844.691	0	0	0	0	25	172.844.691	inf	73,92	425	1.602.568.063	85,00	96,29											
31	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	10	1.146.159.000	8	926.788.000	2	135.420.000	1	85.589.011	0	0	0	1	85.589.011	50,00	63,20	9	1.012.377.011	90,00	88,33	SEKWAN		Konsistensi Anggota dalam melaksanakan kode etik masih rendah	Ketersediaan Anggaran								
32	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	15	518.171.000	12	502.935.372	3	98.400.000	1	87.255.680	0	0	0	1	87.255.680	33,33	88,67	13	590.191.052	86,67	113,90	SEKWAN		Konsistensi Anggota dalam melaksanakan kode etik masih rendah	Ketersediaan Anggaran								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							5,35	6,32											
Predikat Kinerja																							SR	SR											
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	500	27.158.296.989	400	75.484.643.961	0	7.263.437.600	25	1.429.512.502	0	0	0	0	25	1.429.512.502	inf	19,68	425	76.914.156.463	85,00	283,21											
33	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	120	14.577.730.510	96	58.310.922.040	24	4.898.568.000	6	993.510.231	0	0	0	6	993.510.231	25,00	20,28	102	59.304.432.271	85,00	406,82	SEKWAN		Jadwal kegiatan Anggota DPRD yang saling berbenturan	Ketersediaan Anggaran								
34	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5	725.264.470	4	995.525.800	1	6.465.500	0	37.434.400	0	0	0	0	37.434.400	0,00	578,99	4	1.032.960.200	80,00	142,43	SEKWAN		1. Dukungan Tenaga Ahli dalam penyusunan Laporan Kinerja DPRD masih rendah 2. Kurangnya SDM(ASN) yang mumpuni dalam penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Ketersediaan Anggaran								
35	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	50	4.542.626.000	40	3.094.457.782	10	742.854.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	3.094.457.782	80,00	68,12	SEKWAN		Tidak Ada	1. Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Rapat 2. Ketersediaan Dukungan Anggaran									
36	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	180	4.512.600.000	144	7.221.292.668	36	856.200.000	9	357.270.958	0	0	0	9	357.270.958	25,00	41,73	153	7.578.563.626	85,00	167,94	SEKWAN		Jadwal kegiatan Pimpinan yang saling berbenturan	1. Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Rapat 2. Ketersediaan								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
																							Dukungan Anggaran			
37	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	15	2.800.076.009	12	5.862.445.671	3	759.350.100	1	41.296.913	0	0	0	1	41.296.913	33,33	5,44	13	5.903.742.584	86,67	210,84	SEKWAN	Tidak Ada	1. Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Rapat 2. Ketersediaan Dukungan Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					10,96	26,92				
Predikat Kinerja																					SR	SR				

FORMULIR E.55
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Periode Pelaksanaan : Triwulan I 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																							
											I		II	III									IV																						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0		2.000		13.524.540.258		2.536.155.781	0	0	0	0	2.536.155.781		18,75		2.536.157.781		inf																						
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				0		0		0		0	0	0	0	0	0		nan		0		nan																						
X.XX		PENUNJANG URUSAN				0		0		0		0	0	0	0	0	0		nan		0		nan																						
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				0		2.000		13.524.540.258		2.536.155.781	0	0	0	0	2.536.155.781		18,75		2.536.157.781		inf																						
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				0		2.000		13.524.540.258		2.536.155.781	0	0	0	0	2.536.155.781		18,75		2.536.157.781		inf																						
8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		0	400		0	100	8.181.027.258	25	2.207.919.781	0	0	0	0	25	2.207.919.781	25,00	26,99	425	2.207.919.781	inf	inf																				
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	600	0	400		0	100	154.290.900	25		0	0	0	0	0	25	0	25,00	0,00	425	0	70,83	nan		Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM untuk melaksanakan kegiatan sesuai schedule																	
1	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	0	32		0	8	91.000.000	2		0	0	0	0	2	0	25,00	0,00	34	0	70,83	nan	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM untuk penyusunan dokumen perencanaan sesuai schedule																	
2	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	0	32		0	8	16.221.100	2		0	0	0	0	2	0	25,00	0,00	34	0	70,83	nan	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM untuk penyusunan dokumen pelaporan SKPD sesuai schedule																	
3	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	96	0	64		0	16	47.069.800	4		0	0	0	0	4	0	25,00	0,00	68	0	70,83	nan	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM untuk penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD sesuai schedule																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Bulan	72	0	48		0	12	5.893.735.816	3	1.432.192.281	0	0	0	0	0	3	1.432.192.281	25,00	24,30	51	1.432.192.281	70,83	inf		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, SOP serta sarana dan prasarana yang memadai																	
4	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	240	0	160		0	40	5.657.166.116	10	1.380.802.281	0	0	0	0	10	1.380.802.281	25,00	24,41	170	1.380.802.281	70,83	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN																	
5	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	72	0	48		0	12	211.005.000	3	51.390.000	0	0	0	0	3	51.390.000	25,00	24,35	51	51.390.000	70,83	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM, sarana																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							prasarana yang memadai serta kerjasama yang baik antar pegawai dalam penyusunan dokumen penatausahaan	
6	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	108	0	72	0	18	25.564.700	5	0	0	0	0	5	0	27,78	0,00	77	0	71,30	nan	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM dan sarana prasarana memadai dalam penyusunan laporan keuangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						35,49	nan				
Predikat Kinerja																						SR	-				
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	bulan	72	0	48	0	12	49.499.800	3	38.570.874	0	0	0	0	3	38.570.874	25,00	77,92	51	38.570.874	70,83	inf		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan stakeholder	
7	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	36	0	24	0	6	34.000.000	6	38.570.874	0	0	0	0	6	38.570.874	100,00	113,44	30	38.570.874	83,33	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan stakeholder
8	8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	0	48	0	12	9.000.000	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	51	0	70,83	nan	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan stakeholder	
9	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72	0	48	0	12	6.499.800	3	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	51	0	70,83	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak didukung oleh anggaran karena belum dianggap prioritas		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						25,00	nan				
Predikat Kinerja																						SR	-				
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	300	0	120	0	80	151.814.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120	0	40,00	nan		Kegiatan tidak didukung oleh anggaran menindaklanjuti SE Gubernur Sumbar Nomor 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusuna RKA SKPD TA 2025		
10	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0		0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung oleh anggaran menindaklanjuti SE Gubernur Sumbar Nomor 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusuna RKA SKPD TA 2025		
11	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0		0	40	121.814.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung oleh anggaran menindaklanjuti SE Gubernur Sumbar Nomor 900.1.1/801/APKD-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV	K	Rp				K	Rp					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																								BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusuna RKA SKPD TA 2025			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan					
Predikat Kinerja																					-	-					
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	bulan	72	0	48	0	12	1.034.935.408	3	686.146.656	0	0	0	0	3	686.146.656	25,00	66,30	51	686.146.656	70,83	inf		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan stakeholder	
12	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	54	0	36	0	9	9.248.000	3	0	0	0	0	3	0	33,33	0,00	39	0	72,22	nan	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dalam penyediaan alat-alat listrik	
13	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	4	0	1	35.198.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Semester II		
14	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0		0	7	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung oleh anggaran menindaklanjuti SE Gubernur Sumbang Nomor 900.1.1/801/APKD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusuna RKA SKPD TA 2025		
15	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	0	32	0	8	54.268.200	2	28.099.000		0	0	0	2	28.099.000	25,00	51,78	34	28.099.000	70,83	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dalam penyediaan bahan logistik kantor
16	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	0	24	0	6	42.300.000	2	10.495.500		0	0	0	2	10.495.500	33,33	24,81	26	10.495.500	72,22	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan srakeholder dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	0	20	0	5	22.548.000	2	3.488.000		0	0	0	2	3.488.000	40,00	15,47	22	3.488.000	73,33	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan srakeholder dalam penyediaan bahan bacaan
18	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	0	4	0	1	15.600.000	0	960.000		0	0	0	0	960.000	0,00	6,15	4	960.000	66,67	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM dalam memfasilitasi kunjungan tamu
19	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	0	48	0	12	771.143.408	3	628.104.156		0	0	0	3	628.104.156	25,00	81,45	51	628.104.156	70,83	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan , dukungan SDM dan sarana prasarana memadai dalam pelaksanaan kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																								
									I	II	III	IV																																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
20	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0		0	1	10.429.400	1	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	inf	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung anggaran karena dianggap belum prioritas																			
21	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	0	1	0	1	69.200.000	1	15.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000	100,00	21,68	2	15.000.000	66,67	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan SPBE																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan																					
Predikat Kinerja																						-	-																					
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan	72	0	48	0	12	82.519.400	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	51	0	70,83	nan																				
22	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	50	0	30	0	11	18.121.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30	0	60,00	nan	KESBANGPOL	Pengadaan belanja modal dilaksanakan pada Semester II																			
23	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	0	40	0	10	64.397.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Pengadaan belanja modal dilaksanakan pada Semester II																			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						5,51	nan																					
Predikat Kinerja																						SR	-																					
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	0	0	0	0	12	592.541.934	0	22.913.626	0	0	0	0	0	0	22.913.626	0,00	3,87	0	22.913.626	nan	inf			Adanya dukungan SDM, sarana prasarana dan kerjasama yang baik dengan stakeholder																
24	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	0	4	0	1	5.000.000	1	1.498.500	0	0	0	0	1	1.498.500	100,00	29,97	5	1.498.500	83,33	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan sarana prasarana dalam penyediaan jasa surat menyurat																		
25	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	0	4	0	1	70.200.000	1	21.415.126	0	0	0	0	1	21.415.126	100,00	30,51	5	21.415.126	83,33	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan anggaran dalam penyediaan jasa komunikasi sumber dayaa air dan listrik																		
26	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	0	4	0	1	517.341.934	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	5	0	83,33	nan	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan stakeholder dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						9,62	nan																					
Predikat Kinerja																						SR	-																					
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	72	0	48	0	12	221.690.000	3	28.096.344	0	0	0	0	0	3	28.096.344	25,00	12,67	51	28.096.344	70,83	inf			Adanya dukungan SDM, sarana prasarana dan kerjasama yang baik dengan stakeholder																
27	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	0	36	0	9	139.300.000	3	24.101.344	0	0	0	0	3	24.101.344	33,33	17,30	39	24.101.344	61,90	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan stakeholder																		
28	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180	0	120	0	38	37.750.000	8	3.995.000	0	0	0	0	8	3.995.000	21,05	10,58	128	3.995.000	71,11	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
											I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
																										baik dengan stakeholder	
29	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	0	4	0	1	44.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Semester II		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						6,89	nan				
Predikat Kinerja																						SR	-				
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai		0		2.000	2,74	295.514.000	0	262.456.000	0	0	0	0	0	262.456.000	0,00	88,81	0	262.458.000	nan	inf			
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rekomendasi	6	0	4	2.000	1	295.514.000	0	262.456.000	0	0	0	0	0	262.456.000	0,00	88,81	4	262.458.000	66,67	inf			Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan
1	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3000	0		2.000	690	100.514.000	200	258.000.000	0	0	0	0	200	258.000.000	28,99	256,68	200	258.002.000	6,67	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan
2	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	0	400	0	215	65.000.000	10	4.456.000	0	0	0	0	10	4.456.000	4,65	6,86	410	4.456.000	68,33	inf	KESBANGPOL		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam pela
3	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	240	0		0	120	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Semester II		
4	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung anggaran karena belum prioritas		
5	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung anggaran karena belum prioritas		
6	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen		0		0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung anggaran karena belum prioritas		
7	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen		0		0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Sub kegiatan tidak didukung anggaran karena belum prioritas		
8	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	171	0	57	0	57	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	57	0	33,33	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Semester II		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Nilai		0		0	3,3	3.466.762.000	0	6.110.000	0	0	0	0	0	6.110.000	0,00	0,18	0	6.110.000	nan	inf			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp																	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
		DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																																											
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rekomendasi	6	0	4	0	1	3.466.762.000	0	6.110.000	0	0	0	0	0	6.110.000	0,00	0,18	4	6.110.000	66,67	inf			Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan stakeholderr dalam pelaksanaan kegiatan																		
1	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	3000	0	2000	0	450	3.356.762.000	0	6.110.000	0	0	0	0	0	6.110.000	0,00	0,18	2000	6.110.000	66,67	inf	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II		Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan stakeholderr dalam pelaksanaan kegiatan																	
2	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	600	0	400	0	100	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	0	66,67	nan	KESBANGPOL			Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama yang baik dengan stakeholderr dalam pelaksanaan kegiatan																		
3	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		0		0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak didukung anggaran karena belum priorotas																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																													
Predikat Kinerja																																													
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	Persen		0		0	100	85.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan																						
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	rekomenisasi	6	0	4	0	1	85.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	0	66,67	nan																						
1	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	600	0	400	0	140	55.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	400	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Semester II																				
2	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang	Orang	69	0	40	0	14	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40	0	57,97	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak didukung anggaran karena belum																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
									I	II	III	IV			K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12					(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				prioritas				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						62,32	nan				
Predikat Kinerja																						R	-				
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai		0		0	3,13	859.502.000	0	17.640.000				0	0	17.640.000	0,00	2,05	0	17.640.000	nan	inf			
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	rekomendasi	6	0	4	0	1	859.502.000	0	17.640.000	0	0	0	0	0	17.640.000	0,00	2,05	4	17.640.000	66,67	inf			
1	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1200	0	800	0	200	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	800	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II		
2	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1800	0	1200	0	375	668.525.000	20	17.640.000	0	0	0	20	17.640.000	5,33	2,64	1220	17.640.000	67,78	inf	KESBANGPOL		Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan stakeholder	
3	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan		0		0	1	40.977.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	KESBANGPOL	Kegiatan tidak didukung anggaran karena belum prioritas		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	nan				
Predikat Kinerja																						-	-				
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Nilai		0		0	3,04	636.491.000	0	42.030.000				0	0	42.030.000	0,00	6,60	0	42.030.000	nan	inf			
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	rekomendasi	30	0	20	0	5	636.491.000	0	42.030.000	0	0	0	0	0	42.030.000	0,00	6,60	20	42.030.000	66,67	inf			
1	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	360	0	240	0	60	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	240	0	66,67	nan	KESBANGPOL	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
										I	II	III	IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1200	0	800	0	200	128.000.000	0	4.880.000	0	0	0	0	4.880.000	0,00	3,81	800	4.880.000	66,67	inf	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait	
3	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	24	0	16	0	4	154.000.000	1	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	17	0	70,83	nan	KESBANGPOL	Adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan stakeholder	
4	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	120	0	80	0	22	269.491.000	2	37.150.000	0	0	0	2	37.150.000	9,09	13,79	82	37.150.000	68,33	inf	KESBANGPOL	Adanya komitmen pimpinan, dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan tim Forkopimda dalam pelaksanaan kegiatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					68,13	nan				
Predikat Kinerja																					S	-				

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 sehingga evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bertujuan guna menjaga kelangsungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPd 2025 salah satunya berpedoman pada hasil evaluasi terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi pencapaian target pada tahun berjalan (2025) yang dilaksanakan bertujuan salah satunya untuk dapat memastikan bahwa hingga akhir tahun 2025 tingkat ketercapaian target dapat maksimal.

Evaluasi pada tahun berjalan yakni tahun 2025 (hingga triwulan I) mencakup evaluasi terhadap proyeksi ketercapaian target hingga akhir tahun 2025 terhadap sasaran dan target Pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Evaluasi kinerja pada tahun berjalan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang nanti juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan serta strategi dan sasaran pembangunan untuk penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2025. Namun mengingat capaian pada setiap Indikator Kinerja yang digunakan pada masing-masing Prioritas bersifat tahunan maka evaluasi yang dilakukan hanya melakukan prediksi/proyeksi kemungkinan ketercapaian hingga akhir tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 2.14. Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA		
		JUMLAH	DAPAT TERCAPAI	PERLU PERHATIAN KHUSUS
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing	6	5	1
2	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	7	4	3
3	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	9	9	0
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital	9	4	5
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing	3	2	1

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA		
		JUMLAH	DAPAT TERCAPAI	PERLU PERHATIAN KHUSUS
	Kepariwisata			
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	12	4	8
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	8	8	0
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		54	36	18

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

2.3.1.1. Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing

Terdapat 6 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 1 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing pada Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing						
1	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Nilai	74,25	76,43	77,41	Dapat tercapai
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,20	74,37	74,79	Dapat tercapai
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,00	24,9	12,50	Perlu perhatian khusus
4	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	9,36	9,44	9,47	Dapat tercapai
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,08	14,30	14,13	Dapat tercapai
6	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	%	49,80	51,88	49,85	Dapat tercapai

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing, berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan proyeksi pencapaian target terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan bahwa dari 6 (enam) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 1, sebanyak 5 (lima) Indikator kinerja di perkirakan dapat tercapai yakni Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan persentase Angkatan Kerja berpendidikan menengah keatas. Sedangkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang membutuhkan perhatian khusus yakni Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 capaian Prevalensi Stunting di Sumatera Barat masih tinggi dan tidak tercapai target sehingga membutuhkan upaya sangat maksimal agar target tahun 2025 dapat tercapai.

Meskipun sebagian besar target diproyeksikan akan tercapai hingga akhir tahun 2025, namun dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan 1, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pencapaian target penurunan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Sumatera Barat mengalami banyak persoalan yang sangat kompleks. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi yakni masih terdapatnya Rumah tangga dengan pola konsumsi makanan yang tidak bergizi dan tidak seimbang yang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting salah satunya dengan masih kurangnya asupan nutrisi yang memadai pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan edukasi gizi.

Permasalahan lain yakni akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman, menghambat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, dan infrastruktur yang belum memadai menyebabkan banyak balita tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin ditambah dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan ibu hamil masih rendah. Meskipun telah dilakukan berbagai program edukasi, seperti Program Bina Keluarga Balita (BKB).

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni kondisi sosial dan ekonomi keluarga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan makanan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga meningkatkan risiko stunting. Pada beberapa kabupaten/kota, meskipun telah dilakukan intervensi serentak untuk pencegahan stunting, namun angka stunting pada tahun 2024 masih tercatat tinggi dan malah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum mencapai target yang diinginkan serta masih belum optimalnya perencanaan kegiatan yang mendukung intervensi langsung terhadap permasalahan stunting yang dihadapi, sehingga seyogyanya dibutuhkan analisa yang detail dan tajam terhadap akar permasalahan penyebab stunting di suatu daerah.

Pada pencapaian Indikator Kinerja persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas di Provinsi Sumatera Barat mencapai 51,88%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 49,8% di Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari sisi pendidikan tenaga kerja, yang menjadi salah satu modal penting dalam meningkatkan daya saing daerah.

Rincian capaian berdasarkan data dari BPS (Agustus 2024) menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas, sebesar 23,11% berasal dari lulusan SMA dan 11,70% dari lulusan SMK, sementara sisanya merupakan lulusan pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan pergeseran struktur angkatan kerja menuju tingkat pendidikan yang lebih baik, seiring dengan meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menengah dan vokasional.

Beberapa faktor pendorong utama dari capaian ini antara lain adalah peran aktif Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendorong peningkatan akses pendidikan menengah serta penyediaan program pelatihan dan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Antusiasme pelajar dan pencari kerja dalam mengikuti proses pelatihan dan magang juga turut memperkuat pencapaian indikator ini.

Program intervensi yang terbukti efektif mencakup peningkatan capaian pendidikan dan pelatihan berbasis klaster kompetensi kerja, pemagangan dalam negeri yang terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta penyelarasan kurikulum pendidikan vokasional dengan kebutuhan industri lokal.

Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti ketidakcocokan antara minat dan kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan industri, serta perlunya pembaruan sarana pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, program pemagangan luar negeri dan pelatihan kerja berbasis standar kompetensi nasional masih perlu diperkuat untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja.

2.3.1.2. Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 2 yang difokuskan untuk meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal Sumatera Barat, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Triwulan I Tahun 2024

Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Hiruhalir' Tahun 2021						
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah						
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	62,70	61,28	63,10	Perlu perhatian khusus
2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	Indeks	62,80	68,57	62,90	Dapat tercapai
3	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Indeks	15	17,69	17	Dapat tercapai
4	Indeks Pembangunan keluarga	Indeks	63,46	61,20	65,54	Perlu perhatian khusus
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,60	95,25	95,53	Dapat tercapai
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,20	65,34 (2023)	68,11	Dapat tercapai
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,05	62,38 (2023)	66,15	Perlu perhatian khusus

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah pada Tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 98,73%%. Dari 7 (tujuh) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 2, sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja dapat tercapai yakni Indeks Ketahanan Sosial Budaya dengan capaian 68,57, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 17,69, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian 95,25 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian 65,34.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan capaian 61,28, Indeks Pembangunan Keluarga dengan capaian 61,20, dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) dengan capaian 62,38 (menggunakan data capaian tahun 2023).

Beberapa permasalahan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Sumatera Barat antara lain yakni kondisi perekonomian yang cenderung lesu dan stagnan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembangunan kebudayaan. Fokus ekonomi keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, sehingga pelibatan masyarakat maupun anggota keluarga seperti anak-anak dalam kegiatan kebudayaan menjadi sangat terbatas. Hal ini memengaruhi

pelestarian tradisi lokal atau seni tradisional lainnya yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Pendidikan adalah komponen penting dalam pengembangan literasi budaya masyarakat. Namun, akses pendidikan yang tidak merata di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah perdesaan dan pedalaman menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebudayaan lokal. Didukung dengan kondisi masih minimnya pendidikan formal yang mengintegrasikan kurikulum kebudayaan menyebabkan banyak generasi muda kurang memahami pentingnya pelestarian kebudayaan tradisional.

Permasalahan lainnya yakni infrastruktur kebudayaan di Sumatera Barat masih terbatas, sehingga memengaruhi perkembangan kebudayaan lokal. Masih terbatasnya fasilitas seperti pusat kebudayaan, museum, dan gedung kesenian sehingga membuat minimnya atraksi / pagelaran seni yang ditampilkan karena belum adanya ruang dan tempat yang memadai. Dan terkadang sarana tersebut baru terbatas terkonsentrasi di ibu kota provinsi, Padang, sementara daerah lainnya tidak memiliki akses yang setara. Menurut data Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, dari total 19 kabupaten/kota, hanya 5 daerah yang memiliki gedung kebudayaan aktif dengan fasilitas lengkap. Kondisi ini membuat masyarakat di daerah lain sulit untuk terlibat dalam aktivitas seni budaya. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga membatasi penyelenggaraan festival budaya seperti Festival Tabuik di Pariaman atau Festival Danau Singkarak yang seharusnya dapat menjadi sarana pelestarian budaya.

Ketimpangan gender juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan IPK. Perempuan di Sumatera Barat sering kali menghadapi kendala normatif dan struktural dalam berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, partisipasi perempuan dalam kegiatan budaya seperti seni tari dan musik tradisional hanya mencapai 35% dari total pelaku budaya, jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang masih menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, sehingga waktu mereka untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya menjadi sangat terbatas.

Hal yang tak kalah pentingnya yakni dukungan anggaran yang minim dari pemerintah daerah juga menjadi kendala besar dalam pembangunan kebudayaan. Sehingga dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program kebudayaan seperti pelatihan seni, pembangunan infrastruktur, atau penyelenggaraan acara kebudayaan juga semakin minim ditambah dengan minimnya dukungan anggaran dari non pemerintah (dunia usaha dan swasta/filantropi). Hal ini membuat intervensi kebudayaan yang belum optimal juga dapat dilihat dari kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku budaya, dan masyarakat umum.

Terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya capaian pada Indikator ini. Kemiskinan menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, yang berdampak langsung pada kualitas keluarga. Meskipun selama 15 tahun terakhir kemiskinan di Sumatera Barat selalu menurun namun tantangan dalam mengurangi kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan keluarga.

Peningkatan pendidikan dan keterampilan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas keluarga. Namun, di Sumatera Barat, masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedalaman. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas menghambat anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketimpangan gender masih menjadi isu di Sumatera Barat. Perempuan seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini menghambat potensi perempuan dalam berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kualitas keluarga. Disamping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan keluarga sangat penting. Namun, di Sumatera Barat, masih terdapat kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, pendidikan, dan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan keluarga, sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas keluarga di daerah tersebut.

Adapun permasalahan dalam pencapaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) antara lain adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai terutama dalam penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai untuk anak-anak, terutama di daerah terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak menjadi hambatan signifikan, yang ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan anak masih rendah. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat menjadi faktor penghambat utama yang ditandai dengan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal lain yakni adanya keterbatasan anggaran untuk program perlindungan anak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung program perlindungan anak belum dilakukan secara komprehensif.

Permasalahan lainnya yakni kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam perlindungan anak menyebabkan program yang dijalankan tidak efektif sehingga sinergi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Meskipun pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan berbagai program perlindungan anak, implementasinya belum mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan laporan DP3AP2KB, meskipun terdapat program-program seperti kampanye perlindungan anak, pemberian layanan konsultasi psikologi, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan, namun program-program tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak yang menerima layanan ini, dan masih banyak anak yang tidak terjangkau oleh intervensi tersebut.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan anak, serta hak-hak dasar yang harus diterima anak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, orang tua tidak melaporkan kekerasan terhadap anak karena mereka tidak mengetahui hak-hak anak atau merasa bahwa kekerasan tersebut adalah hal yang biasa. Pendidikan mengenai hak-hak anak perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, agar mereka lebih peka terhadap permasalahan ini. Upaya untuk mengedukasi masyarakat bisa dilakukan melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta aparat desa. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan IPA. Misalnya, di daerah pedesaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sering kali sangat terbatas. Akses ke fasilitas layanan psikologis, hukum, dan kesehatan bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan sangat terbatas, dan sering kali membutuhkan biaya yang tinggi untuk menjangkanya. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat, hampir 40% dari total desa di provinsi ini belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, yang sangat memengaruhi pemenuhan hak kesehatan anak.

2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 3 yang difokuskan untuk meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan pendapatan petani, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Pada Triwulan I Tahun 2025

Perikanan dan Peternakan dan Perikanan 2020						
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan						
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	5	5,4	5	Dapat tercapai
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,40	123,72	101,60	Dapat tercapai
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	104,50	125,59	105,03	Dapat tercapai
4	Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Juta	50.048	54.526	54.838	Dapat tercapai
5	Pendapatan nelayan	Rp. Juta	42.443	42.513	44.158	Dapat tercapai
6	Pendapatan Peternak	Rp. Juta	52.779	55,349	55.418	Dapat tercapai
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	18,67	5	Dapat tercapai
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,60	84,31	82,05	Dapat tercapai
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%	5	349	5	Dapat tercapai

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan pada evaluasi hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 diproyeksikan dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025.

Meskipun secara keseluruhan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 telah tercapai namun secara umum dalam pembangunan sektor pertanian dalam artian luas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar.

Ketergantungan pada curah hujan masih menjadi tantangan besar bagi petani di Sumatera Barat. Sebanyak 30% lahan pertanian di Sumatera Barat belum memiliki akses ke sistem irigasi teknis. Akibatnya, produktivitas menurun selama musim kemarau, yang berdampak pada stabilitas pendapatan petani. Percepatan pembangunan sistem irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan ini.

Harga komoditas seperti gabah menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan penurunan hingga 15% pada triwulan IV 2024. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan petani, meskipun produktivitas meningkat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran koperasi dalam mengelola distribusi dan stabilisasi harga. Petani membutuhkan mekanisme yang lebih terorganisir untuk melindungi pendapatan mereka.

Infrastruktur jalan menuju sentra produksi di beberapa wilayah masih kurang memadai dan Sebagian besar masih berupa jalan tanah. Hal ini tentunya menghambat distribusi hasil panen ke pasar, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan daya saing produk lokal.

Sebagian besar petani di Sumatera Barat masih menggunakan metode tradisional dalam bercocok tanam. Hanya sedikit petani yang mengadopsi teknologi modern seperti alat mekanisasi atau sistem pemantauan berbasis drone. Rendahnya pemahaman tentang manfaat teknologi menjadi hambatan utama. Sehingga pemerintah dituntut untuk terus mendorong adopsi teknologi yang lebih luas untuk meningkatkan produktivitas.

Produk lokal Sumatera Barat, seperti bawang merah, sulit bersaing dengan produk impor yang mampu dijual 20% lebih murah dibandingkan produk lokal. Hal ini membuat daya saing petani lokal menurun, terutama di pasar domestik. Kurangnya promosi produk lokal juga menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing.

Banyak hasil panen petani rusak karena kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Di beberapa Kabupaten/Kota, sekitar 20% hasil panen cabai rusak sebelum sampai pasar. Kondisi ini mengurangi pendapatan petani karena harga jual hasil panen yang rusak menjadi lebih rendah. Pembangunan fasilitas pasca-panen perlu menjadi prioritas untuk mengatasi masalah ini.

Kenaikan harga pupuk non subsidi mengalami hingga 15% ditambah dengan kelangkaannya untuk mendapatkannya menjadi hal yang membebani petani kecil. Kenaikan ini berdampak pada turunnya NTP karena biaya produksi yang meningkat lebih cepat dibandingkan harga jual. Pengendalian harga input menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Masih banyak petani masih bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Ketergantungan ini menyebabkan petani harus menjual hasil tani di bawah harga pasar. Kondisi ini menurunkan rasio harga yang diterima petani, sehingga NTP sulit meningkat.

Permasalahan yang tak kalah pentingnya yakni masih tingginya biaya transportasi menyebabkan harga jual di pasar menjadi kurang kompetitif. Hal ini mengurangi margin keuntungan petani dan berdampak negatif pada NTP.

Untuk permasalahan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), sebagian besar petani masih fokus pada komoditas utama seperti padi dan cabai, sehingga kehilangan peluang diversifikasi yang dapat meningkatkan NTUP. Hanya 25% petani di Sumatera Barat yang mencoba diversifikasi usaha.

Banyak petani yang menerima harga jual rendah karena kurangnya kemampuan bernegosiasi dengan pembeli. Hal ini menyebabkan hasil tani dijual di bawah harga pasar. Selain itu juga banyak petani tidak memiliki akses informasi harga pasar terkini, sehingga sering menjual hasil tani di bawah harga pasar. Pada 2024, hanya 37% petani di Sumatera Barat yang memiliki akses ke informasi pasar melalui teknologi. Kekurangan ini menurunkan kemampuan petani untuk bersaing dan meningkatkan NTUP.

Kondisi saat ini terutama di kalangan generasi Z, bahwa banyak generasi muda lebih memilih pekerjaan di sektor non-pertanian, sehingga regenerasi petani menjadi sulit. Sehingga jumlah petani muda di Sumatera Barat turun hingga 15% dibandingkan 2020. Rendahnya minat ini mengancam keberlanjutan usaha tani dan NTUP di masa depan.

Permasalahan dalam pembudayaan ikan yang di hadapi di Sumatera Barat yakni harga pakan ikan naik hingga 20% pada 2024, yang merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan. Kenaikan ini menurunkan margin keuntungan pembudidaya. Jika biaya pakan tidak dapat dikendalikan, keberlanjutan usaha budidaya akan terancam.

Selain itu muncul penyakit seperti aeromonas masih menjadi tantangan bagi pembudidaya. Pada 2024, sebanyak 25% pembudidaya di Sumatera Barat melaporkan kerugian akibat kematian ikan karena wabah penyakit. Penyakit ini menyebar cepat di tambak dengan kualitas air yang buruk.

Hampir setengah pembudidaya kecil di Sumatera Barat melaporkan kehilangan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan pada 2024. Hal ini menurunkan pendapatan pembudidaya secara signifikan. Pembudidaya di Sumatera Barat masih bergantung pada benih ikan impor yang memiliki harga lebih tinggi, yang juga menyebabkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Ketergantungan ini juga membuat pasokan benih rentan terganggu oleh kebijakan impor.

Limbah budidaya seperti sisa pakan dan kotoran ikan sering mencemari lingkungan tambak, menurunkan kualitas air dan hasil produksi. Pada 2024, sebanyak 30% tambak di Sumatera Barat melaporkan dampak negatif akibat limbah yang tidak terkelola dengan baik. Masalah ini mengurangi produktivitas dan pendapatan pembudidaya.

Dalam hal peningkatan pendapatan nelayan, beberapa permasalahan yang ditemui antara lain yakni adanya kenaikan harga bahan bakar pada 2024 mencapai 10% dibandingkan 2023, yang merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional kapal. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan nelayan kecil. Dermaga di

beberapa daerah pesisir Sumatera Barat tidak memiliki fasilitas memadai untuk mendukung nelayan kecil. Pada 2024, sebanyak 50% nelayan kecil melaporkan kesulitan bersandar atau menurunkan hasil tangkapan mereka di dermaga umum. Hal ini mengakibatkan penundaan distribusi dan menurunkan kualitas hasil tangkapan.

Wilayah penangkapan ikan sering kali tumpang tindih dengan aktivitas lain seperti pelayaran atau eksplorasi sumber daya alam. Pada 2024, sebanyak 30% nelayan di Sumatera Barat melaporkan penurunan hasil tangkapan karena kerusakan ekosistem laut di wilayah tangkapan utama. Hal ini menimbulkan konflik dan ketidakpastian pendapatan nelayan.

Sebagian besar nelayan di Sumatera Barat hanya mengandalkan pendapatan dari hasil tangkapan ikan. Pada 2024, sebanyak 70% nelayan melaporkan bahwa mereka tidak memiliki usaha sampingan seperti budidaya laut atau pengolahan hasil tangkapan. Ketergantungan ini membuat pendapatan mereka sangat fluktuatif, terutama saat musim paceklik.

Limbah plastik dan sampah di perairan Sumatera Barat terus meningkat, mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Pada 2024, sebanyak 40% nelayan di kawasan pesisir melaporkan hasil tangkapan yang lebih sedikit akibat pencemaran lingkungan laut. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan nelayan kecil yang bergantung pada kelestarian laut.

Dalam mencapai peningkatan pendapatan peternak, masih di temukan beberapa permasalahan, antara lain yakni adanya wabah penyakit seperti antraks dan flu burung menyebabkan penurunan produktivitas di beberapa daerah. Sebanyak 20% peternak melaporkan kerugian ekonomi akibat kematian ternak, penyakit ini berdampak langsung pada pendapatan peternak kecil. Selain itu musim kemarau yang lebih panjang pada 2024 mengurangi ketersediaan hijauan sebagai pakan utama ternak, sehingga terjadi kenaikan biaya pakan akibat harus membeli tambahan konsentrat.

Masih banyak peternak kecil masih belum memiliki akses ke teknologi seperti mesin pencacah pakan atau sistem manajemen ternak berbasis sensor, sehingga pekerjaan peternak belum efisien dan masih memakan biaya tinggi untuk mengupah tenaga manusia.

Dalam hal meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura, masih di temukannya beberapa permasalahan antara lain yakni masih terdapatnya petani belum memahami standar kualitas yang dibutuhkan untuk menembus pasar ekspor, hal ini ditandai baru sekitar 20% petani hortikultura yang memiliki sertifikasi internasional. Hal ini membuat mereka kehilangan peluang pasar yang lebih menguntungkan.

Banyak pemuda di Sumatera Barat enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap kurang menguntungkan. Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2024, hanya 15% tenaga

kerja di bidang pertanian berasal dari generasi muda. Hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

Dari sisi pendampingan dan pembinaan, maka jumlah penyuluh pertanian di Sumatera Barat belum mencukupi kebutuhan. Rasio penyuluh terhadap petani adalah 1:2.000, jauh dari standar ideal 1:500. Kekurangan ini menghambat transfer pengetahuan dan pendampingan teknis kepada petani.

Sebagian besar petani hanya menjual produk mentah tanpa nilai tambah. Hanya 30% petani yang memiliki keterampilan untuk mengolah hasil panen menjadi produk bernilai lebih tinggi. Hal ini membatasi peluang pendapatan tambahan bagi petani. Sebagian besar petani belum memahami pentingnya praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan lahan. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya petani yang mengikuti pelatihan tentang pertanian berkelanjutan sehingga hal ini berpotensi mengurangi produktivitas jangka panjang.

Dalam hal pencapaian Indeks Ketahanan Pangan bahwa pada tahun 2024, harga komoditas pangan utama seperti cabai dan bawang merah mengalami fluktuasi hingga 30% selama musim panen raya sebagaimana yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini memengaruhi pendapatan petani dan kemampuan konsumen untuk membeli pangan. Sistem penyimpanan yang kurang memadai menjadi penyebab utama melonjaknya pasokan di satu waktu dan kelangkaan di waktu lainnya. Selain itu, minimnya regulasi harga pangan juga memperburuk ketidakstabilan ini. Fluktuasi ini tidak hanya memengaruhi petani tetapi juga rantai distribusi pangan di daerah terpencil. Dengan sistem pengelolaan yang lebih baik, tantangan ini seharusnya dapat diminimalkan.

Beberapa komoditas seperti bawang putih dan kedelai masih sangat bergantung pada impor, dengan kontribusi impor mencapai 80% dari total kebutuhan Sumatera Barat pada 2024. Ketergantungan ini meningkatkan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global. Selain itu, harga komoditas impor sering kali tidak stabil, memengaruhi daya beli konsumen. Kurangnya insentif bagi petani lokal untuk menanam komoditas ini menjadi salah satu penyebab utama. Ketergantungan ini juga mengurangi kemandirian pangan regional.

Pada 2024, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bahwa sebanyak 30% masyarakat di Sumatera Barat tidak memiliki akses terhadap pangan bergizi seperti daging, ikan, dan sayuran. Harga pangan bergizi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama, terutama di daerah terpencil. Kurangnya program subsidi pangan bergizi memperburuk situasi ini. Selain itu, minimnya infrastruktur distribusi pangan juga menjadi kendala dalam memastikan ketersediaan di pasar lokal. Dengan akses yang lebih baik,

kualitas gizi masyarakat dapat ditingkatkan. Tanpa solusi strategis, tantangan ini akan terus menghambat peningkatan ketahanan pangan.

Selama periode 2020-2024, distribusi pangan ke wilayah terpencil di Sumatera Barat masih terhambat akibat buruknya infrastruktur jalan. Waktu pengiriman bahan pangan ke daerah pedalaman mencapai 3-4 minggu, menyebabkan disparitas harga hingga 30% lebih tinggi di wilayah terpencil dibandingkan daerah perkotaan. Situasi ini diperburuk oleh minimnya armada distribusi dan fasilitas logistik yang memadai. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil lebih sering mengalami kelangkaan pangan. Tanpa distribusi yang lebih merata, ketahanan pangan di wilayah terpencil sulit tercapai.

Perubahan pola curah hujan dan meningkatnya suhu rata-rata juga mengurangi produktivitas padi di beberapa wilayah selama periode 2020-2024. Daerah seperti Agam dan Solok mengalami penurunan hasil panen akibat kekeringan pada 2022 dan banjir pada 2023. Program adaptasi iklim yang ada masih terbatas pada sosialisasi dan belum memberikan solusi konkret seperti varietas tahan iklim. Selain itu, minimnya pelatihan tentang manajemen risiko iklim memperburuk dampak ini. Tanpa intervensi yang lebih komprehensif, perubahan iklim akan terus menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan.

Pada pencapaian guna meningkatkan pendapatan Petani Hutan, juga menemui beberapa permasalahan antara lain yakni :

1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal, serta kemandirian kelompok dan konsistensi dalam mengembangkan usaha setelah bantuan diberikan masih belum optimal
2. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
3. Kesulitan untuk offtaker produk yang dihasilkan oleh PS dan KTH
4. Produk Perhutanan Sosial Sumatera Barat belum memiliki standari SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
5. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar Instansi dalam peningkatan kualitas produk.
6. Keterbatasan teknis dalam hal peralatan yang dimiliki, kesadaran, motivasi dan kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan pihak lain untuk promosi masih kurang
7. hambatan teknis pendanaan, keterbatasan kapasitas pembina dalam movev usaha dimaksud dan kurang kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait
8. masih terbatasnya kesadaran masyarakat tentang manfaat madu bagi kesehatan, terbatasnya kegiatan promosi/penyuluhan tentang nilai kesehatan madu, dan

minimalnya kerjasama dengan pihak pengembang hilirisasi madu dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk konsumsi

9. Keterbatasan pendanaan dan dukungan kebijakan, keterbatasan kompetensi pembina dan Jejaring
10. Keterbatasan kompetensi SDM dalam melakukan melakukan lkomunikasi yang efektif dalam menjalin Jejaring kerjasama dengan semua steakholder terkait

2.3.1.4. Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 4 yang difokuskan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebagai salah satu sektor yang cukup dominan dalam struktur PDRB Sumatera Barat serta meningkatkan kualitas UKM termasuk Industri Kecil dan Menengah serta penumbuhan entrepreneur, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Pada Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,35	16,60	17,65	Perlu perhatian khusus
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	9,02	8,37	9,15	Perlu perhatian khusus
3	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	1	4,81	5,63	Perlu perhatian khusus
4	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	Sentra	390	406	401	Dapat tercapai
5	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	%	2,23	13,30	2,28	Dapat tercapai
6	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	%	3,8	10,6	4,5	Dapat tercapai
7	Jumlah enterpreneur baru tercipta	Orang	150.658	114.351	173.711	Perlu perhatian khusus
8	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	%	9,50	34,16	10,50	Dapat tercapai
9	Kontribusi Ekonomi Digital	%	7,10	6,66	7,25	Perlu perhatian khusus

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital pada capaian hingga triwulan I Tahun 2025 dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 4, sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja di proyeksikan mencapai target hingga akhir tahun 2025 yakni Jumlah sentra industri kecil dan menengah, Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi, Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil, Persentase peningkatan Investasi di provinsi, dan Kontribusi Ekonomi Digital.

Sedangkan terdapat 5 (lima) indikator kinerja lainnya memerlukan perhatian khusus yakni Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Laju pertumbuhan sektor perdagangan, Jumlah entrepreneur baru tercipta dan Kontribusi Ekonomi Digital.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 4 cukup beragam mengingat prioritas ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi global dan arah tren ekonomi dunia. Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yakni Pandemi yang terjadi tahun 2020 hingga 2021 masih memiliki dampak terhadap melambatnya aktivitas perdagangan jika dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi covid tahun 2019, selain itu pembangunan infrastruktur daerah yang masih tidak merata. Meskipun beberapa kawasan mengalami perbaikan infrastruktur, distribusi barang masih terganggu terutama di daerah-daerah terpencil seperti Mentawai dan Pasaman Barat yang terkadang mengalami kekurangan pasokan akibat buruknya akses transportasi.

Kondisi saat ini bahwa sektor perdagangan Sumatera Barat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu seperti kopi, hasil laut, dan rendang. Ketergantungan ini menyebabkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga global, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara signifikan dan akses terhadap teknologi digital yang masih terbatas di wilayah pedesaan menjadi penghambat bagi banyak UMKM dalam memperluas pasar.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Sumatera Barat pada tahun 2024 yakni sektor industri di Sumatera Barat masih mengalami tekanan dan penurunan tajam akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga sekarang, yang ditandai dengan penutupan besar-besaran beberapa industri kecil dan menengah yang menyebabkan hingga saat ini terhentinya banyak kegiatan produksi, terutama di sektor manufaktur dan tekstil. Permasalahan lain yang dihadapi yakni adanya keterbatasan terhadap akses pasar internasional yang mengakibatkan sektor industri Sumatera Barat masih menghadapi kendala dalam memperluas pasar internasional sehingga banyak produk unggulan seperti tekstil dan

produk makanan olahan belum dapat menembus pasar global secara maksimal karena terbatasnya akses ke pasar dan masih lemahnya daya saing produk, dan sebagian besar industri di Sumatera Barat masih tergantung pada impor bahan baku, terutama untuk sektor manufaktur. Fluktuasi harga bahan baku global yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar internasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja penciptaan entrepreneur baru antara lain yakni banyak usaha baru yang terkendala dengan kurangnya pengalaman kredit dan kurangnya jaminan, yang menyulitkan mereka dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu banyak entrepreneur baru yang kurang memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis secara profesional, terutama dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Untuk itu perlu kedepannya diperbanyak program pelatihan kewirausahaan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan penggunaan teknologi untuk pengelolaan bisnis. Banyak entrepreneur baru yang masih mengandalkan metode tradisional dalam menjalankan bisnis mereka. Peningkatan penyuluhan ini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka di pasar yang lebih luas. Selain itu Intervensi terkait pembiayaan perlu diperluas, terutama bagi pengusaha baru yang tidak dapat memenuhi syarat untuk KUR atau lembaga pembiayaan lainnya. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak sumber pembiayaan yang tidak memberatkan pengusaha baru dan menawarkan bunga yang lebih rendah untuk mengurangi hambatan dalam memulai usaha.

Permasalahan lainnya yakni pengusaha baru yang berasal dari daerah pedesaan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen bisnis yang baik yang juga salah satunya diakibatkan karena masih minimnya program inkubator bisnis di daerah terpencil. Meskipun ada beberapa inkubator bisnis di kota besar, jumlah inkubator bisnis yang ada di daerah terpencil masih terbatas. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program inkubator bisnis agar dapat membantu entrepreneur baru di daerah yang lebih terpencil, yang sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya dan jaringan yang cukup. Serta pada beberapa daerah di Sumatera Barat, pengusaha baru mengalami kesulitan dalam menemukan pasar yang cukup luas untuk produk mereka, terutama bagi usaha yang berbasis pada produk lokal. Selain itu, distribusi barang yang terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum optimal di daerah pedesaan mengurangi potensi pasar untuk wirausahawan baru.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kontribusi ekonomi digital antara lain yakni karena dominan dihadapi dengan permasalahan keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil dan perdesaan yang masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet, dengan hanya 45% dari total desa yang memiliki akses internet yang memadai. Hal

ini menghambat perkembangan ekonomi digital di daerah-daerah tersebut. Meskipun ada upaya untuk memperluas infrastruktur, proyek ini masih menghadapi tantangan besar terkait biaya dan aksesibilitas. Tingginya biaya infrastruktur digital data menunjukkan bahwa biaya pembangunan jaringan fiber optik di daerah dengan topografi sulit di Sumatera Barat bisa mencapai angka yang sangat tinggi dan hal ini mengakibatkan Sebagian besar dari proyek yang direncanakan mengalami penundaan karena biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, sehingga memperlambat proses digitalisasi di daerah terpencil.

Permasalahan lain yang dihadapi yakni ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang IT dan digital di Sumatera Barat masih terbatas. Hanya sekitar 10% dari lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat yang bekerja di sektor digital. Padahal, ada kebutuhan besar akan tenaga kerja di bidang pengembangan aplikasi, keamanan siber, dan pemasaran digital. Pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di sektor ini masih sangat terbatas.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendukung ekonomi digital, peraturan mengenai perlindungan data pribadi dan transaksi digital di Sumatera Barat masih belum memadai. Misalnya, UU Perlindungan Data Pribadi yang baru diimplementasikan pada 2023 belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha digital, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hal keamanan data dan transaksi online.

Banyak UMKM di Sumatera Barat yang masih bergantung pada platform luar negeri, seperti Tokopedia, Shopee, dan Instagram untuk memasarkan produk mereka. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 70% transaksi e-commerce di Sumatera Barat masih melibatkan platform asing, yang berarti keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan luar negeri.

2.3.1.5. Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 5 yang difokuskan untuk dunia pariwisata di Sumatera Barat yang didukung dengan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata Pada Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPIAN
Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata						
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat	%	15,25	4,23	4,43	Dapat tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
	dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
2	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB	%	1,25	1,37	1,37	Perlu perhatian khusus
3	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB	%	6,10	7,09	7,50	Dapat tercapai

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata hingga triwulan I Tahun 2025 dari 3 (tiga) Indikator kinerja diproyeksikan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang akan tercapai yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang diproyeksikan memerlukan perhatian khusus yakni Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat antara lain yakni berdasarkan data 2020-2024, Sebagian besar destinasi wisata di Sumatera Barat masih minim fasilitas dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan pusat informasi wisata. Kekurangan ini menyebabkan tingkat kunjungan wisata ke destinasi seperti Danau Talang dan Harau Valley lebih rendah dibandingkan potensi sebenarnya. Destinasi wisata yang tidak terkelola dengan baik juga mengurangi daya tarik bagi wisatawan mancanegara.

Banyak destinasi wisata di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai masih sulit dijangkau oleh wisatawan karena minimnya transportasi dan akomodasi. Hal ini menyebabkan potensi besar pariwisata daerah tersebut tidak tergarap secara optimal. Ketimpangan ini mengurangi kontribusi destinasi-destinasi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata.

Sebanyak besar pelaku wisata lokal masih belum memanfaatkan platform digital untuk memasarkan layanan mereka, seperti homestay, tur lokal, dan restoran sehingga tanpa literasi digital, mereka kehilangan peluang besar untuk menjangkau wisatawan potensial.

Hal lainnya yakni promosi pariwisata di Sumatera Barat sering kali terkonsentrasi pada destinasi tertentu seperti Bukittinggi dan Mentawai, sementara banyak destinasi lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan distribusi kunjungan wisatawan yang tidak merata, sehingga kontribusi destinasi lain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi rendah. Potensi wisata di wilayah-wilayah seperti pantai terpencil dan situs sejarah belum tergarap maksimal akibat kurangnya promosi. Akibatnya,

wisatawan cenderung memilih destinasi yang lebih dikenal, meskipun banyak destinasi lain yang menawarkan pengalaman unik.

Pengelolaan sektor pariwisata di Sumatera Barat menghadapi tantangan akibat kurangnya data terintegrasi yang mencakup seluruh destinasi wisata, pelaku usaha, dan profil wisatawan. Banyak destinasi wisata, terutama yang dikelola oleh masyarakat lokal, belum terdata secara resmi, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kurangnya data ini juga menghambat promosi dan pengembangan destinasi yang berpotensi tinggi. Tanpa data yang akurat, kontribusi pariwisata terhadap PDRB sulit untuk diukur dan dimaksimalkan.

Masalah keamanan dan keselamatan di beberapa kawasan wisata Sumatera Barat menjadi perhatian utama wisatawan. Masih banyaknya ditemukan laporan Masyarakat yang berkunjung ke destinasi alam seperti gunung dan pantai melaporkan kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan, petugas penyelamat, dan perlengkapan darurat serta masih adanya aksi premanisme di beberapa objek wisata. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi keramahan berwisata di Sumatera Barat yang kedepan tentunya dapat merusak citra destinasi. Wisatawan mancanegara khususnya lebih sensitif terhadap isu keamanan, sehingga masalah ini berpotensi menurunkan kunjungan wisata.

Sedangkan permasalahan dalam implementasi ekonomi kreatif di Sumatera Barat yakni meskipun produk ekonomi kreatif Sumatera Barat memiliki nilai budaya yang tinggi, namun sebagian besar pelaku usaha masih kesulitan menjangkau pasar internasional dan hanya sedikit sekali pelaku usaha ekonomi kreatif di Sumatera Barat yang mampu mengeksport produknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang regulasi ekspor dan keterbatasan promosi di pasar global.

Selain itu sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat belum memahami pentingnya melindungi produk mereka melalui hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini mengakibatkan risiko plagiarisme dan sulitnya memperluas pasar produk mereka, terutama di tingkat nasional dan internasional. Dan kondisi saat ini hanya beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki pusat kreativitas atau coworking space untuk mendukung pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif, al ini membatasi ruang kolaborasi dan inovasi, terutama di daerah terpencil yang memiliki potensi besar.

2.3.1.6. Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 6 yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, ketahanan

daerah dalam menghadapi bencana, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan bangunan strategis, penguatan jaringan irigasi serta pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Pada Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan						
1	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	0,756	0,70	0,786	Perlu perhatian khusus
2	Rasio Konektivitas	Rasio	0,684	0,682	0,691	Perlu perhatian khusus
3	Kemantapan Jalan	%	79,00	70,55	81,00	Perlu perhatian khusus
4	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	0,72	0,65	Dapat tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,41	74,76	78,81	Perlu perhatian khusus
6	Akses Air Minum	%	86,00	85,59 (BPS, 2023)	88,00	Perlu perhatian khusus
7	Akses Sanitasi Layak	%	86,00	70,97 (BPS, 2023)	88,00	Perlu perhatian khusus
8	Persentase Bangunan Strategis Terbangun	%	66,67	11,11	6,00	Dapat tercapai
9	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	73,48	69,98	75,04	Perlu perhatian khusus
10	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	%	56,78	59,40	63,23	Dapat tercapai
11	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	70,03	68,22	71,79	Perlu perhatian khusus
12	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	88,00	89,53	89,00	Dapat tercapai

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan yang pencapaiannya diukur dari 12 (duabelas) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan. Pada pelaksanaan evaluasi triwulan I Tahun 2025

diproyeksikan sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja dapat tercapai hingga akhir tahun 2025 yakni Indeks Ketahanan Daerah, Persentase Bangunan Strategis Terbangun, Persentase Volume tampungan sumber-sumber air, Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dan Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW.

Sedangkan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang memerlukan perhatian khusus yakni Indeks Kinerja Infrastruktur, Rasio Konektivitas, Kemantapan Jalan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum, Akses Sanitasi Layak, Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, dan Persentase Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan Pembangunan yang dihadapi. Indeks Kinerja Infrastruktur (IKI) adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Sumatera Barat, meskipun telah ada perkembangan dalam pembangunan infrastruktur, terdapat tantangan besar terkait pemerataan dan keberlanjutan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Capaian indikator ini sangat dominan tergantung dari alokasi anggaran yang disediakan di APBD Provinsi Sumatera Barat yang semakin lama semakin terbatas. Namun demikian, beberapa permasalahan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang dihadapi antara lain yakni daerah-daerah terpencil masih sangat tertinggal dalam hal kualitas infrastruktur. Hanya Sebagian kecil desa.nagari terpencil yang telah menikmati pembangunan infrastruktur yang memadai untuk itu kedepan agar program perlu lebih fokus pada daerah-daerah ini agar pemerataan pembangunan tercapai.

Pemeliharaan infrastruktur lama di Sumatera Barat masih belum optimal. Banyak jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya yang sudah tua dan tidak terawat dengan baik, hal ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan alokasi anggaran yang ada. Hampir Sebagian besar infrastruktur yang ada di daerah pedesaan membutuhkan perbaikan besar, tetapi belum ada intervensi yang memadai untuk memperbaikinya.

Penggunaan teknologi digital dalam pembangunan infrastruktur, seperti pemetaan digital dan analisis big data, masih terbatas. Padahal teknologi ini dapat mempercepat proses perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Namun, di Sumatera Barat, penerapan teknologi ini masih sangat terbatas.. Pengelolaan proyek infrastruktur di Sumatera Barat masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dan sektor beberapa dari proyek infrastruktur terhambat karena koordinasi yang buruk antar pihak terkait, yang mengakibatkan penundaan penyelesaian proyek.

Rasio Konektivitas adalah salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu wilayah terhubung secara fisik, digital, dan sosial. Di Sumatera Barat, peningkatan rasio konektivitas menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan ekonomi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Pembangunan yang merata di semua daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, menjadi kunci utama dalam mewujudkan konektivitas yang optimal, namun pencapaian indikator ini masih menemui beberapa kendala dan permasalahan antara lain yakni topografi dan kondisi geografis di Sumatera Barat yang cenderung sulit yang berupa berbukit-bukit serta seringnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan proses pembangunan infrastruktur menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu anggaran yang terbatas sering kali menjadi penghambat dalam pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan jumlah tenaga kerja terampil juga menjadi faktor yang menghambat laju pembangunan, karena sebagian besar dari pekerja konstruksi di Sumatera Barat belum memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan.

Indikator Kemantapan Jalan mencerminkan sejauh mana jalan yang tersedia dalam kondisi layak pakai untuk mendukung aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat. Di Sumatera Barat, kemantapan jalan sangat berpengaruh terhadap distribusi barang, layanan logistik, serta aksesibilitas antar wilayah. Meningkatkan kemantapan jalan menjadi prioritas penting untuk memastikan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa permasalahan antara lain yakni seringnya terjadi kerusakan jalan akibat bencana alam terutama longsor dan banjir di sepanjang tahun 2024. Selain itu minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan. Sementara fokus lebih diberikan pada pembangunan jalan baru lingkungan dibandingkan jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Permasalahan lainnya yakni beban kendaraan berat dengan muatan berlebih seringkali menyebabkan kerusakan cepat pada jalan lintas provinsi dan sebanyak 30% kerusakan jalan disebabkan oleh kendaraan dengan muatan yang melampaui batas.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi risiko bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, serta kemampuan untuk memitigasi dan pulih dari dampaknya. Di Sumatera Barat, IKD memiliki peran strategis mengingat kondisi geografisnya yang rawan terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, peningkatan IKD menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2024, IKD Sumatera Barat tercatat sebesar 0,72,

menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya namun masih berada di bawah target nasional sebesar 0,80, dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala antara lain dukungan alokasi anggaran untuk ketahanan daerah masih jauh dari kebutuhan ideal. Hal ini secara dominan disebabkan karena kapasitas fiskal keuangan daerah pada APBD Provinsi Sumatera Barat memang sangat rendah dan terbatas. Kondisi geografis Sumatera Barat yang sebagian besar sangat rawan bencana dengan 36% wilayahnya berada di zona sesar aktif dan rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Penanganan bencana sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi lainnya serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terutama pada daerah terpencil dimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana masih rendah dan banyak belum mengetahui prosedur evakuasi. Selain itu, perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya mengakomodasi risiko bencana membuat banyak wilayah pemukiman berada di zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan kerugian besar pada setiap kejadian bencana.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan suatu wilayah berdasarkan tiga parameter utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Di Sumatera Barat, IKLH menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target. Penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, alih fungsi lahan, serta perubahan iklim memerlukan strategi yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama di wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Sumatera Barat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, antara lain tingginya alih fungsi lahan dimana alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan pemukiman menyebabkan penurunan tutupan hutan sebesar 1,2% per tahun. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem hutan di wilayah tersebut. Alokasi anggaran untuk lingkungan masih belum mencukupi kebutuhan. Terbatasnya anggaran dari APBD Provinsi yang dialokasikan untuk sektor lingkungan hidup masih jauh dibawah kebutuhan ideal untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus pencemaran sungai dan penangkapan liar masih marak terjadi. Masih terdapatnya beberapa kasus pelanggaran lingkungan yang belum terselesaikan, serta beberapa daerah masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan. Survei menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat di wilayah ini yang memahami pentingnya pengelolaan sampah dan air bersih.

Akses terhadap air minum yang aman dan layak adalah indikator penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan

utama seperti minimnya infrastruktur air bersih di daerah pedesaan dan kendala teknis dalam distribusi air menjadi tantangan yang memerlukan solusi strategis. Kondisi bahwa masih minimnya infrastruktur di daerah terpencil terutama wilayah pedesaan di Sumatera Barat yang masih belum memiliki jaringan distribusi air bersih, terutama di daerah Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan. Permasalahan lainnya yakni pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri menjadi kendala utama, dengan beberapa Daerah Aliran Sungai utama di provinsi ini masuk dalam kategori tercemar ringan hingga berat. Alokasi dana APBD untuk sektor air bersih sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi ditambah dengan ketergantungan pada dana pusat dan mitra internasional membuat beberapa program terhenti jika bantuan tersebut berkurang. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak konsisten.

Beberapa permasalahan lain yakni pemeliharaan instalasi pengolahan air sering diabaikan, sehingga banyak jaringan distribusi yang rusak dan kehilangan air mencapai 30% selama distribusi. Upaya untuk mengurangi pencemaran sungai juga belum maksimal. Saat ini hanya sedikit sungai utama yang memiliki program pemulihan kualitas air, dan teknologi pengolahan air modern, seperti reverse osmosis atau sistem desalinasi, belum diterapkan secara luas. Hanya sebagian kecil wilayah perkotaan yang memanfaatkan teknologi ini.

Adapun permasalahan dalam pencapaian akses sanitasi yang layak di Sumatera Barat masih mengalami kendala besar dalam pembangunan infrastruktur sanitasi yang diakibatkan karena faktor geografis, seperti jarak yang jauh dan sulitnya akses transportasi, menyebabkan biaya pembangunan meningkat hingga 30% lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya lokal membuat proyek sering tertunda. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi penghambat utama. Masih terdapatnya rumah tangga di yang masih membuang limbah ke sungai, meskipun fasilitas telah tersedia hal ini karena kurangnya edukasi dan minimnya pengawasan dari pihak terkait memperburuk kondisi ini, menciptakan dampak kesehatan lingkungan yang signifikan.

Permasalahan lainnya yakni Anggaran untuk sektor sanitasi di Sumatera Barat belum mencukupi untuk mencapai target sanitasi universal. Terbatasnya dari alokasi APBD dan sumber pendanaan lainnya untuk sanitasi mengakibatkan semakin sulitnya target sanitasi yang layak dapat terwujud secara universal. Sistem pengelolaan limbah di Sumatera Barat masih belum optimal, terutama di daerah perkotaan. Masih banyaknya limbah cair masih dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan, menciptakan risiko pencemaran lingkungan yang serius. Program instalasi fasilitas pengolahan limbah baru pun juga belum berjalan dengan baik dengan Pembangunan yang juga tersendat akibat terbatasnya pembiayaan.

Dalam pencapaian indikator terbangunnya bangunan Strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi kendala yang secara umum karena terbatasnya anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat.

Pemenuhan kebutuhan air irigasi yang memadai menjadi aspek penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya di Sumatera Barat yang memiliki banyak lahan pertanian yang bergantung pada irigasi untuk menghasilkan produk pertanian secara optimal. Pemenuhan kebutuhan air irigasi yang tepat dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan produksi pangan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air irigasi di wilayah ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain yakni kurangnya pemeliharaan secara berkala terhadap saluran dan bendungan irigasi. Hal ini menyebabkan penyumbatan dan kerusakan yang menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Di beberapa daerah di Sumatera Barat, telah terdapat dari saluran irigasi sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik. Hal lainnya yakni anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di Sumatera Barat. Meskipun ada alokasi anggaran untuk rehabilitasi irigasi, dana yang disediakan belum cukup untuk menutupi kebutuhan pemeliharaan jangka panjang dari sistem irigasi yang sudah ada.

Perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian curah hujan dan musim kering yang lebih panjang menghambat pemenuhan kebutuhan air irigasi. Daerah-daerah tertentu di Sumatera Barat mengalami musim kemarau yang lebih lama daripada yang diperkirakan, yang menyebabkan penurunan pasokan air untuk irigasi. Sehingga terdapat beberapa daerah mengalami kekeringan dalam jangka panjang, yang berakibat pada berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian di Sumatera Barat. Pengelolaan sumber daya alam yang belum terpadu juga menjadi kendala dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan air irigasi. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti pembukaan lahan yang tidak terkendali, memperburuk kualitas sumber daya air yang digunakan untuk irigasi. Telah terdapat beberapa sumber air yang digunakan untuk irigasi mengalami penurunan kualitas yang signifikan akibat pencemaran limbah pertanian.

Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, yang meliputi perlindungan terhadap erosi tanah, banjir, dan kerusakan ekosistem akibat aliran air, sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Sumatera Barat, banyak kawasan yang terpapar risiko kerusakan akibat banjir dan erosi, terutama di daerah pesisir dan kawasan perbukitan. Oleh karena itu, intervensi untuk melindungi kawasan-kawasan ini menjadi sangat penting untuk keberlanjutan alam dan pengurangan dampak bencana, namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan, antara lain yakni Keterbatasan

pembiayaan untuk program konservasi menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan dan rehabilitasi kawasan dari daya rusak air juga masih terbatas, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan program-program konservasi.

Aktivitas manusia, seperti penambangan liar, perambahan hutan, dan pembukaan lahan untuk pertanian tanpa konservasi, menjadi faktor penghambat utama dalam memperluas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air. Meskipun ada upaya konservasi, kerusakan akibat kegiatan ini terus terjadi dan memperburuk kondisi lingkungan. Di beberapa daerah, aktivitas ilegal masih terjadi secara masif yang merusak fungsi kawasan dari daya rusak air. Selain itu, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang, semakin sering terjadi dan mengurangi efektivitas upaya perlindungan kawasan dari daya rusak air. Kenaikan suhu global dan fenomena El Nino memperburuk kondisi kelembaban tanah yang mengurangi daya tampung air di lahan yang telah direhabilitasi. Beberapa kawasan terlindungi mengalami penurunan daya tampung akibat cuaca ekstrim.

Pembangunan infrastruktur konservasi, seperti sumur resapan dan tanggul, belum merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hal ini menghambat pemenuhan perlindungan terhadap kawasan yang berisiko terhadap daya rusak air. Sebagian besar wilayah yang teridentifikasi rawan bencana belum mendapatkan pembangunan infrastruktur konservasi yang memadai, hal ini juga diperparah dengan pendanaan untuk rehabilitasi ini masih sangat terbatas. Program-program ini masih membutuhkan alokasi dana yang lebih besar agar dapat menjangkau lebih banyak kawasan yang membutuhkan pemulihan.

2.3.1.7. Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 7 yang difokuskan untuk mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel 2.11.

Tabel 2.21. Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pada Triwulan I Tahun 2025

Serta Berkualitas Pada Triwulan I Tahun 2025						
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
Prioritas Pembangunan 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas						

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		2025	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	PROYEKSI KETERCAPAIAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,50	86,48	71,51	Dapat tercapai
2	Nilai SAKIP	Predikat	BB/78,50	BB/78,98	BB/79,00	Dapat tercapai
3	Nilai EPPD	Skor	3,003	3,003	3,004	Dapat tercapai
4	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	Dapat tercapai
5	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	39,56	45,31	4,75	Dapat tercapai
6	Indeks SPBE	Indeks	3,40	3,85	3,50	Dapat tercapai
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,00	80,81	65,00	Dapat tercapai
8	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Indeks	87	88,45	88	Dapat tercapai

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas yang diukur dari 8 (delapan) Indikator kinerja. Hingga capaian triwulan I Tahun 2025 maka sebanyak 8 (delapan) Indikator kinerja atau seluruhnya diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target pada tahun 2025 yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Nilai EPPD, Opini laporan keuangan, Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Indeks SPB, Indeks Profesionalitas ASN serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan.

Meskipun di proyeksikan dalam pencapaiannya, namun terdapat juga permasalahan dalam pencapaian target antara lain pada pencapaian Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan 7 antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. IRB menggambarkan tingkat efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Di Sumatera Barat, upaya reformasi birokrasi telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah terpencil dan mempercepat proses perizinan. Dalam periode 2020 hingga 2024, Sumatera Barat terus berfokus pada transformasi digital, peningkatan kualitas aparatur negara, serta penguatan sistem akuntabilitas yang lebih transparan dan efisien.

Meskipun digitalisasi semakin berkembang, namun masih terdapat wilayah di Sumatera Barat, terutama di daerah terpencil, masih belum terjangkau oleh jaringan internet yang stabil. Hal ini menghambat pemerataan pelayanan publik yang berbasis digital dan

memperlambat implementasi e-Government secara keseluruhan. Birokrasi yang rumit dan lambat menjadi salah satu tantangan besar yang masih dihadapi adalah proses perizinan dan administrasi yang masih dianggap rumit dan memakan waktu lama. Sebagian besar pelaku usaha di Sumatera Barat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin usaha karena proses yang tidak efisien dan birokratis. Kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di bidang teknologi informasi, menjadi kendala besar dalam mempercepat reformasi birokrasi di Sumatera Barat. Masih terbatasnya SMD Birokrasi yang memiliki kompetensi teknologi informasi yang memadai, yang menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlambatan dalam pelaksanaan berbagai implementasi program pemerintahan.

Nilai SAKIP merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di suatu daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfokus pada pengelolaan anggaran dan sumber daya yang transparan serta penyelenggaraan program-program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap SAKIP di Sumatera Barat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dapat diukur efektivitas dan efisiensinya, serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dalam periode 2020 hingga 2024, Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah melalui penerapan sistem ini. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya antara lain yakni meskipun ada upaya peningkatan kualitas aparatur, kurangnya jumlah ASN yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan kinerja dan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pencapaian predikat SAKIP yang lebih tinggi, hal ini ditandai dengan terbatasnya ASN di Sumatera Barat masih kurang terlatih dalam menyusun laporan kinerja yang baik dan sesuai dengan standar. Masih terdapatnya kesulitan dalam menyusun anggaran yang berbasis kinerja dan memfokuskan pada hasil yang konkret. Beberapa instansi pemerintah di provinsi masih dihadapi dengan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang menyebabkan penurunan akuntabilitas kinerja dalam beberapa program pemerintah.

Hal lain yakni meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengawasan eksternal, pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja masih dirasa belum optimal. Beberapa dari instansi pemerintah di Sumatera Barat masih mengalami kendala dalam melakukan evaluasi kinerja internal secara tepat waktu dan efisien. Hal ini mempengaruhi kualitas laporan yang diajukan oleh instansi terkait serta permasalahan lainnya yakni masih belum optimalnya Sinergi dalam Implementasi Kebijakan, yang ditandai dengan beberapa kebijakan yang masih tumpang tindih dan kurang terkoordinasi antara pemerintah pusat

dan daerah. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya, termasuk dalam alokasi anggaran.

Opini laporan keuangan adalah penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian ini menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Opini yang diberikan mencakup empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Di antara keempat opini ini, WTP adalah predikat tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik, sesuai standar, dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat WTP secara konsisten selama 10 tahun berturut-turut hingga 2023. Prestasi ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa Sumatera Barat mampu memenuhi kriteria seperti kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta akurasi laporan keuangan.

Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pencapaian predikat WAT tersebut antara lain komitmen dalam penggunaan anggaran daerah yang sesuai dengan perencanaan, transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan serta tertib pelaporan, permasalahan lainnya yakni keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan yang sering kali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penggunaan sistem digital serta terbatasnya kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan. Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan tidak meratanya kemampuan ASN menyebabkan ketidakseimbangan kompetensi antara perangkat daerah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan cenderung lebih rendah.

Selain itu hambatan berikutnya adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kurangnya sinergi antara dinas-dinas terkait sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data keuangan dan munculnya inkonsistensi dalam laporan. Faktor ini diperparah dengan kurangnya forum komunikasi rutin antara perangkat daerah untuk membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan. mengikuti timeline yang telah ditetapkan.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Indikator ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi sumber daya lokal, mengoptimalkan pengelolaan aset, serta meningkatkan efisiensi administrasi fiskal tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi PAD yang tinggi tidak hanya menunjukkan kemandirian finansial, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Dalam pencapaian peningkatan PAD, maka terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Meski digitalisasi telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala. Hanya sekitar 60% wajib pajak yang membayar tepat waktu, sehingga masih terdapat potensi PAD yang belum didapatkan, selain itu kurangnya Infrastruktur Pendukung di Daerah

Terpencil Banyak daerah terpencil di Sumatera Barat yang belum memiliki akses jalan, listrik, dan internet yang memadai. Hal ini menghambat potensi pengembangan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan PAD.

Disisi lain persaingan Antardaerah Daerah tetangga seperti Riau dan Jambi menawarkan insentif investasi yang lebih kompetitif, sehingga Sumatera Barat mengalami penurunan daya tarik bagi investor asing. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Aset Pemanfaatan teknologi untuk memonitor dan mengelola aset daerah juga masih terbatas. Masih belum maksimalnya aset daerah yang terdaftar dalam sistem digital, sehingga banyak aset berpotensi ekonomi tinggi yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks ini mencerminkan kemajuan dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses administrasi pemerintahan dan aksesibilitas layanan publik. Di Sumatera Barat, peningkatan Indeks SPBE menjadi salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pencapaiannya, antara lain yakni anggaran mendukung teknologi digital masih sangat terbatas, selain itu keterbatasan Integrasi Antar-Sistem juga belum secara maksimal sepenuhnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Penilaian ini mencakup beberapa aspek, seperti kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai dasar

ASN. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik kualitas pelayanan publik yang diberikan, serta semakin besar kontribusi ASN terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam pencapaiannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi yakni kurangnya frekuensi pelatihan kompetensi teknis khusus yang dilakukan selain memang adanya keterbatasan anggaran juga menyebabkan pelatihan juga masih minim dilakukan. Pelatihan yang tersedia saat ini lebih banyak berfokus pada kompetensi umum, seperti manajemen dan pelayanan publik, sementara kompetensi teknis khusus seperti pengelolaan data, analisis kebijakan, dan keterampilan digital masih dirasa kurang. Selain itu juga masih minimnya Evaluasi dan Monitoring Program Pelatihan yang dilakukan yang dititik beratkan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan AS karena masih terdapat pelatihan yang diadakan hanya untuk memenuhi target administratif tanpa memastikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja ASN. Dan hal lainnya yakni kurangnya perhatian terhadap ASN Non-Struktural/Fungsional. ASN yang tidak menduduki jabatan struktural seringkali kurang diperhatikan dalam program pengembangan karier dan kompetensi.

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima, baik dari aspek efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaiannya antara lain yakni masih banyaknya fasilitas pelayanan publik yang masih memerlukan perbaikan terutama sarana untuk memperlancar layanan publik yang nyaman, cepat dan ringkas, selain itu masih terbatasnya jumlah personel di layanan publik sehingga waktu tunggu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan menjadi lebih. Meskipun digitalisasi sudah diterapkan, beberapa instansi belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dengan optimal. Dan hanya beberapa instansi yang mampu mengintegrasikan layanan daring dengan sistem manual secara efektif.

2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1) Terbatasnya ketersediaan data terpilah jumlah penyandang disabilitas untuk mengintervensi bagi Pendidikan Luar Biasa.

- 2) Terbatasnya data dan informasi untuk mengintervensi dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah ditingkatkan dijenjang pendidikan menengah dan khusus, terutama dalam mengintervensi faktor non teknis seperti : budaya, ekonomi.
- 3) Terbatasnya kemampuan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan minimal Bidang Pendidikan khususnya pencapaian akreditasi A berupa peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Minimnya pelatihan guru dan kemampuan literasi siswa yang belum dapat dinilai oleh guru dalam peningkatan nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi.
- 5) Pelaksanaan kurikulum muatan lokal masih terkendala dikarenakan belum diakui oleh Kemendikbud-Ristek dan SDM-nya masih belum tersedia.
- 6) Belum idealnya jumlah kebutuhan guru dengan yang tersedia baik PNS maupun PPPK, dengan masih banyaknya guru honorer di sekolah.
- 7) Belum ada struktur yang khusus pada Dinas Pendidikan yang menangani program pengembangan bahasa dan sastra.
- 8) Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan sekolah penggerak.
- 9) Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya.
- 10) Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.
- 11) Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
- 3) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
- 4) Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
- 5) Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
- 6) Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
- 7) Masih rendahnya kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten/Kota

- 8) Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum
- 2) Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan
- 3) Data harian irigasi masih belum valid
- 4) Belum adanya database irigasi
- 5) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air.
- 7) Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat) serta berkurangnya kapasitas jalan akibat guna lahan maupun pemanfaatan ruang jalan.
- 8) Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan sinergi pembangunan infrastruktur.
- 9) Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan kawasan strategis.
- 10) Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu.
- 11) Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik.
- 12) Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik.
- 13) Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan.
- 14) Relatif belum meratanya aksesibilitas pergerakan orang dan barang ke kawasan terpencil, tertinggal dan terluar.
- 15) Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program air minum dan sanitasi.
- 16) Belum tersusunnya Masterplan Sanitasi lintas kabupen/kota.
- 17) Belum tersedianya database kebutuhan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota.

- 18) Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi.
- 19) Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman.
- 20) Belum adanya SPALD Regional dan SPAM Regional.
- 21) Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi.
- 22) Terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota.
- 23) Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- 1) Belum ada regulasi tentang RTLH
- 2) Sebagian besar pelaksanaan urusan merupakan kewenangan kabupaten/kota
- 3) Lokasi PSU yang sulit diakses
- 4) Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
- 5) Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
- 6) Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
- 7) Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
- 8) Data rumah yang layak huni untuk korban bencana yang menjadi tanggung jawab provinsi tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan/ dianggarkan.
- 9) Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Terbatasnya kewenangan terutama dalam penentuan status bencana
- 2) Terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana

- 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
- 5) Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
- 6) Belum adanya database khusus untuk menyimpan history/ riwayat dari bencana, baik dalam skala yang kecil maupun besar
- 7) Laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana
- 8) Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi
- 9) Validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan
- 10) Sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai
- 11) Penyusunan Rencana Kontijensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual
- 12) Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang
- 13) Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
- 14) Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
- 15) SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
- 16) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
- 17) Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
- 18) Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- 19) Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang menjadi kewenangannya
- 2) Belum adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menamatkan pendidikan/pelatihan di dalam panti

- 3) Kurangnya pemantauan Kabupaten/Kota terhadap lanjut usia terlantar yang telah direkomendasikan kedalam panti
- 4) Belum tersedianya petan rawan bencana dari Kabupaten/kota
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat
- 6) Belum adanya regulasi terkait forum filantropi di Sumatera Barat sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah
- 7) Belum adanya pemenuhan SPM terkait Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial
- 8) Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indek Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
- 9) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SMP Bidang Sosial untuk mencaai target 100% yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
- 10) Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- 1) Masih belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun RTKD
- 2) Mekanisme pelaporan ketenagakerjaan kabupaten /kota belum optimal
- 3) Masih rendahnya pemahaman tentang ketentuan dan peraturan Hubungan Industrial mengakibatkan belum optimalnya pembinaan Hubungan Industrial di perusahaan
- 4) Pada sektor UKM belum sepenuhnya mengerti dengan peraturan perlindungan ketenagakerjaan sehingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih sedikit
- 5) Belum optimalnya program pengawasan ketenagakerjaan disebabkan Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi yang masih terbatas
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
- 7) Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
- 8) Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
- 9) Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
- 10) Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll

- 11) Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1) Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
- 2) Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
- 3) Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
- 4) Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
- 5) Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 6) Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
- 7) Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
- 8) Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
- 9) masih rendahnya capaian indikator kluster dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
- 10) Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 11) Adanya peran ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
- 12) Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
- 13) Partisipasi masyarakat yang masih rendahnya antara lain belum seluruhnya kabupaten/kota yang memiliki PUSPA yakni Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya: lembaga masyarakat, dunia usaha dan media

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- 2) Belum kuatnya regulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota
- 3) Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- 4) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- 5) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi

- 6) Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- 7) Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- 8) Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan masih berskala rumah tangga
- 9) Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembebasan lahan
- 2) Para pihak bertahan pada pendapat dan tuntutan masing-masing sehingga sulit mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi
- 3) Masyarakat tidak bersedia menerima ganti rugi sesuai dengan harga appraisal
- 4) Adanya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketentraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan
- 5) Instansi terkait dan para pihak yang bersengketa bersedia memberikan data-data dan dokumen berkenaan dengan permasalahan pertanahan yang difasilitasi
- 6) Terbatasnya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketentraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan
- 7) Status tanah yang kebanyakan milik kaum dan merupakan tanah ulayat sehingga mengakibatkan sulitnya berinvestasi di Sumatera Barat

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari rumah tangga
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
- 5) Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat
- 6) Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai
- 7) Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
- 8) Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan

- 9) Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
- 10) Belum semua Kabupaten/Kota memiliki perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dan lain-lain
- 11) Belum semua usaha dan/atau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3)
- 12) Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi)
- 13) Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan
- 14) Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
- 15) Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.
- 16) Kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya kualitas air, udara dan air laut
- 17) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah.
- 18) Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai.
- 19) Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan hukum

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
- 2) Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)
- 3) Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
- 4) Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaannya
- 5) Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
- 6) Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
- 7) Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran

- 8) Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
- 9) Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
- 10) Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
- 11) Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
- 12) Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sektor
- 13) Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- 1) Masih rendahnya SDM Masyarakat dan aparatur Pemerintahan Nagari/Desa
- 2) Masih ada Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal
- 3) Banyaknya kader lembaga kemasyarakatan yang mempunyai rangkap jabatan, seperti kader posyandu, kader PKK dan LPM dipegang oleh 1 orang
- 4) Terbatasnya Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis di desa/nagari
- 5) Masih banyak desa yang tidak memiliki akses sinyal dan saluran komunikasi (blankspot).
- 6) Sulitnya memfasilitasi Kerjasama Desa yang berbeda potensi
- 7) Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa/Nagari (BKAS/BKAN) yang belum berjalan secara optimal.
- 8) Kurangnya kompetensi Direktur/Manager Badan Usaha yang dimiliki Nagari/Desa dalam hal entrepreneur
- 9) Kurang sinkronnya antara usaha dan potensi yang dimiliki oleh Desa/Nagari yang diakibatkan oleh tidak adanya kesesuaian antara Pemerintahan Nagari dan BPD di desa/nigari
- 10) Evaluasi terkait dengan perkembangan desa dan nigari belum dilakukan secara maksimal sebagaimana di amanatkan pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- 11) Belum diperbaharuinya SK kepengurusan KAN sehingga banyak status KAN ytidak yang tidak aktif
- 12) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari

- 13) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- 14) Minimnya keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan di nagari/desa
- 15) Masih kurangnya Kabupaten/Kota dan Nagari yang membentuk Pokjanal dan Pokja Posyandu dan kurangnya koordinasi stakeholder terkait dalam melakukan pembinaan
- 16) Masih banyak Posyandu yang belum terintegrasi dengan BKB dan PAUD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
- 17) Belum semua Pokja Posyandu yang menetapkan keberadaan posyandu dengan SK Wali Nagari/Desa/Kelurahan
- 18) Belum adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Nagari yang menjelaskan detail tugas dan fungsi LPM itu sendiri
- 19) Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari
- 20) Belum sinkronnya antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Nagari/Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan Nagari.
- 21) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pemberdayaan LPM di Desa/Nagari
- 22) Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberdayaan dasawisma mandiri
- 23) Desa/Nagari belum mengoptimalkan kerjasama yang dilaksanakan antar desa/nagari
- 24) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan KAN di Desa/Nagari
- 25) Kurangnya kompetensi dari pengurus dan anggota LPM dalam pembangunan dan pemberdayaan Nagari

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- 1) Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam , pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum

samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
- 4) Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.
- 5) rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah di keluarga
- 6) Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk,
- 7) Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, Karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP (Kartu Pengawasan)
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
- 3) Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
- 4) Relatif kurangnya keterpaduan antarmoda (jaringan prasarana, jaringan pelayanan) darat, kereta api, laut dan udara.
- 5) Relatif kurangnya pemenuhan standar pelayanan minimum serta standar keselamatan (termasuk standar dampak lingkungan) dari sarana dan prasarana transportasi.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- 1) Besarnya belanja kebutuhan untuk pemenuhan TIK dikarenakan sarana dan prasarana berbiaya mahal

- 2) Masih belum optimalnya implementasi Perda tentang SPBE dikarekan masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami serta belum mau mematuhi terutama dalam penyediaan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
- 3) Belum seluruhnya Layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 4) Masih adanya wilayah *blankspot* atau yang minim prasarana hotspot sehingga sulit menjangkau informasi kepada masyarakat
- 5) Perbedaan generasi menyebabkan belum semua kelompok masyarakat melek penggunaan teknologi
- 6) Terbatasnya SDM Teknologi Informasi terutama dari sisi jumlah dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi
- 7) Belum semua Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dilakukan pendataan oleh diskominfo selaku instansi yang merupakan supporting teknis bagi UKPP terkait kebutuhan aplikasi umum pada UKPP

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- 1) Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UKM
- 2) Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
- 3) Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
- 5) Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
- 6) Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
- 7) Sebaran UKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
- 8) Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
- 9) SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
- 10) kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
- 11) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing dari produk produk UKM
- 12) terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam memfasilitasi Usaha kecil dalam mendapatkan sertifikat merek dan sertifikat halal

12. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

- 1) Data terkait dengan potensi investasi dan realisasi investasi yang sudah atau sedang berjalan belum tersedia dengan lengkap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Regulasi dan aturan yang mengatur tentang investasi cenderung berubah – ubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pelaksanaan pekerjaannya antara lain dengan adanya peralihan dengan adanya perubahan regulasi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko serta Peraturan Kementerian/Lembaga (NSPK) terkait yang menjadi dasar penerbitan perizinan dengan menggunakan portal OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dari Kementerian Investasi / BKPM RI
- 3) Status kepemilikan lahan di Sumatera Barat yang Sebagian besar di kuasai kamu atau tanah ulayat menjadi penyebab ketidakpastian pelaksanaan investasi
- 4) Kurangnya koordinasi antar instansi di Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan Pusat dalam penyelenggaraan Investasi
- 5) Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam pelaksanaan even even promosi potensi investasi daerah sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran investor
- 6) Materi promosi yang disiapkan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi investor
- 7) Terbatasnya keikutsertaan Sumatera Barat dalam even promosi investasi tingkat Nasional dan Internasional (pameran dan temu bisnis)
- 8) Masih adanya beberapa perizinan dan non perizinan bersifat yang diproses secara manual di PTSP
- 9) Masih terdapatnya jangka waktu pelayanan PTSP yang melewati Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan Gubernur
- 10) Masih terdapat jenis perizinan yang belum dipetakan
- 11) Masih terdapat perizinan yang belum dapat dilaksanakan antara lain perizinan berusaha usaha menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dan KBLI yang belum ada pengampu pada Kementerian/Lembaga terkait.
- 12) Banyaknya pelaku usaha/masyarakat yang belum memahami teknologi atau perizinan secara elektronik atau berbasis web.
- 13) Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan
- 14) Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web

- 15) Masih rendahnya pemahaman OPD teknis dalam penerapan aplikasi perizinan OSS berbasis teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan perizinan terintegrasi.
- 16) Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi
- 17) Sistem Perizinan Online Single Submissin (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.
- 18) Perubahan sistem pelaporan Ke OSS-RBA sehingga banyak perusahaan yang belum memahami ttg pelaporan kegiatan penanaman Modal perusahaan.
- 19) SDM di OPD yang berada di Kab/Kota banyak yang belum memahami tentang sistem Pelaporan OSS-RBA untuk melakukan verifikasi laporan yang masuk dari perusahaan
- 20) Perusahaan yang sudah berjalan namun belum mengantongi izin karena terkendala dalam pengurusan izin teknis dengan berlakunya sistem OSS-RBA (RTRW,RDTR, Izin Lingkungan, PKKPR,SIMBG,dll)
- 21) Belum adanya Data Calon Investor Baru yang serius akan berinvestasi di Sumatera BaratP
- 22) Adanya Pembatasan Pelaporan Investasi (LKPM), dimana Nilai Investasi s.d 1 M tidak dilaporkan
- 23) Tidak adanya investasi baru yang tumbuh selama tahun 2022 dan kegiatan proyek sebelumnya sudah selesai tahun 2021
- 24) Progress Proyek Jalan Tol yang tidak sesuai dengan perencanaan Investasi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu pertimbangan dalam penetapan target investasi
- 25) Masalah RTRW di Kab/Kota yang masih belum mengakomodir potensi investasi

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih kurangnya minat dan ketertarikan Pemuda untuk ikut berpartisipasi dan bergabung dalam Organisasi
- 2) Minimnya Pelatihan-Pelatihan atau peningkatan kapasitas dan pemberian edukasi pemahaman Organisasi kepada Pemuda
- 3) Belum matangnya tatakelola organisasi, serta terbatasnya pendanaan organisasi untuk membiaya operasional dan kegiatan organisasi
- 4) Masih minimnya minat Pemuda untuk menjadi entrepreneur/wirausaha dan lebih berorientasi menjadi Pegawai/Pekerja

- 5) Semakin banyaknya media sosial atau sumber media informasi lainnya sehingga tidak ada pembatasan arus informasi kepada Pemuda baik yang baik maupun yang salah/hoax yang berpotensi menyebabkan pemuda menjadi salah Langkah dalam mengambil Tindakan antara lain investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, porstitusi online.
- 6) Masih banyaknya pemuda yang belum siap kerja dan masuk dalam dunia kerja dikarenakan minimnya pengalaman, minim dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada.
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representative dalam peningkatan prestasi olahraga yang berada di Provinsi Sumatera Barat
- 8) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga minimnya pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan/event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan penyelenggaraan olahraga di daerah
- 9) Minimnya ujicoba atlit ke tingkat internasional, nasional dan daerah
- 10) Tidak adanya kompetisi sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama
- 11) Tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal
- 12) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran
- 13) Tingginya pengaruh HP bagi masyarakat sehingga merubah pola hidup masyarakat menjadi malas gerak
- 14) Mayoritas peserta didik yang telah tamat sekolah tidak aktif di kegiatan kepramukaan karena telah disibukkan dengan kegiatan perkuliahan atau pindah ke luar kota atau menjalani usaha
- 15) Kebijakan sekolah online mengakibatkan kegiatan kepramukaan yang cenderung dilaksanakan diluar ruang menjadi tidak terlaksana sejak tahun 2020.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) SDM Tenaga JFT Statistisi yang sesuai dengan kompetensi pendidikannya belum tersedia
- 2) Fungsi penyelenggaraan data belum seluruhnya ada di masing-masing Perangkat Daerah
- 3) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaanya
- 4) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan bukan pekerjaan yang menarik

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- 1) Regulasi/aturan yang ada belum terlalu kompleks dan maksimal dalam pengaturan pengamanan informasi daerah
- 2) Belum maksimalnya perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam melakukan pengamanan informasi pemerintah daerah dikarenakan minimnya informasi dan pemahaman akan pelaksanaan persandian/pengamanan informasi
- 3) Edukasi dan informasi tentang pengamanan informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh aparatur sipil negara
- 4) Belum maksimalnya pengelolaan area keamanan informasi pada aspek tatakelola, pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan statistic
- 6) Belum memiliki Security Operation Center atau SOC sebagai sebuah layanan terpusat yang menyediakan jasa keamanan siber bagi server Pemerintah Daerah

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Masih terbatasnya jumlah dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Provinsi
- 4) Masih terbatasnya ketersediaan data akan Objek Pemajuan Kebudayaan di Sumatera Barat serta pelaku kebudayaan.
- 5) Masih minimnya peran serta masyarakat dalam pewarisan nilai-nilai budaya
- 6) Kebudayaan yang dihasilkan belum dapat mendukung ekonomi pelaku kebudayaan
- 7) Masih belum optimal dan berkesinambungnya pendokumentasian terhadap objek pemajuan kebudayaan yang akan ditetapkan menjadi warisan budaya.
- 8) Masih banyaknya potensi Objek Pemajuan Kebudayaan yang belum dikelola secara baik.
- 9) Penyelenggaraan urusan kebudayaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah sehingga masih terbatas dukungan anggaran untuk pemajuan kebudayaan tersebut.
- 10) Minimnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan lokal sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi sehingga generasi muda lebih mengapresiasi kebudayaan dari luar.

- 11) Masih terbatasnya ruang publik untuk pelestarian budaya lokal, ruang ekspresi bagi para budayawan dan seniman untuk menampilkan hasil karya.
- 12) Masih minimnya pelaksanaan pembinaan bagi para komunitas

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Kurangnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan karena perkembangan teknologi membuat informasi dapat di akses dengan mudah, tidak harus mengunjungi pustaka.
- 2) Kurangnya ketercukupan koleksi buku-buku bacaan yang tersedia di pustaka.
- 3) Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan yang bersertifikasi sebagai pustakawan.
- 4) Masih banyaknya perpustakaan yang tidak terkelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) OPD sebagai pencipta arsip belum melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip secara optimal , sehingga arsip yang menjadi bukti indikator kinerja kearsipan di OPD belum semuanya dibuatkan daftar, dimana belum optimalnya kinerja petugas pengelola arsip yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 045-120-2021 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Belum tersedianya pembinaan secara langsung berupa pendampingan terhadap petugas pengelola arsip OPD tentang tata cara pengelolaan arsip, seperti penyediaan ruang bagi OPD untuk mempelajari tentang tata kelola arsip dengan membuat 'Klinik Arsip'.
- 3) Masih rendahnya kesadaran OPD melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip dengan memanfaatkan JRA sehingga arsip yang disimpan betul-betul hanya arsip yang berguna

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- 1) Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 2) Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan

- 3) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu karang
- 4) Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- 5) Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- 6) Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- 7) Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- 8) Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- 9) Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- 10) Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- 11) Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- 12) Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- 13) Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- 14) Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- 15) Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- 16) Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- 17) Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- 18) Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- 19) Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi

karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional

- 20) Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- 21) Masih belum optimalnya pengolahan paska panen dan diversifikasi olahan
- 22) Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
- 2) Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif
- 3) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata
- 4) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- 5) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan
- 6) Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
- 7) Terbatasnya kegiatan pembinaan SDM pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan
- 8) Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan DTW unggulan
- 9) Masih terdapat SDM yang belum memenuhi kriteria kompetensi.
- 10) Terbatasnya produk ekraf yang memiliki sertifikat HKI
- 11) Pengembangan DTW membutuhkan anggaran yang besar
- 12) Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
- 13) *Mapping* destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
- 14) Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
- 15) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif

- 16) Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata didaerah
- 17) Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- 2) Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- 3) Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- 4) Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- 5) Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- 6) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- 7) Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- 8) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- 9) Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- 10) Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- 11) Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- 12) Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- 13) Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sambilan masyarakat
- 14) Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- 15) Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- 16) Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun
- 17) Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- 18) Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.

- 19) Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- 20) Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- 21) Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- 22) Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- 23) Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

- 1) masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- 2) rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- 3) masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- 4) masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- 5) alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- 6) Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- 8) Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- 9) Pengelolaan DAS belum terpadu
- 10) Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- 11) Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local
- 12) masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- 13) rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- 14) masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- 15) masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- 16) alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif

- 17) Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- 18) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- 19) Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- 20) Pengelolaan DAS belum terpadu
- 21) Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- 22) Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal
- 23) Pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak
- 24) Terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan
- 25) Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas
- 26) Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai
- 27) Proses tender bibit yang memerlukan waktu yang agak lama dan standar harga bibit yang belum valid
- 28) Proses beberapa pengadaan sarana pendukung produksi dan sarpras pendukung masih dalam tahap pengadaan
- 29) Penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis

4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- 2) Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- 3) Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- 5) Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- 6) Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan

- 7) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- 8) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- 9) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- 10) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Mayoritas produk komoditas di Sumatera Barat masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi belum terlalu canggih sehingga peningkatan nilai tambah belum terlalu mendongkrak nilai ekspor
- 2) Harga ditentukan oleh pasar internasional
- 3) Belum berkembangnya hilirisasi produk di Sumatera Barat
- 4) Ada beberapa kasus di BPSK di tarik kembali oleh pelapor, sehingga tidak dapat diproses, sedangkan kasus tersebut sudah tercatat dalam kasus pengaduan konsumen
- 5) Kurangnya tenaga/SDM yang melakukan pengujian mutu barang sudah banyak pensiun dan belum ada penggantinya
- 6) Terbatasnya SDM PPNS
- 7) Minuman beralkohol sangat riskan untuk dilakukan pengawasan
- 8) Realisasi pupuk yang diluncurkan Pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan dengan RDKK (rencana defenitif kebutuhan kelompok)
- 9) Sering terjadi keterlambatan hasil pengujian terhadap hasil produk dari pihak ketiga
- 10) Peningkatan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif salah satunya minyak goreng dan cabe
- 11) Operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh kabupaten/kota
- 12) Melakukan pembinaan kepada pengelola pasar, lomba pasar dan promosi produk
- 13) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat di pasar kab/kota dalam menerapkan perda No. 6/2020 dengan etap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta menjaga jarak

- 14) Masyarakat petani, pengumpul, dan pedagang yang masih belum sepenuhnya memahami tentang standar mutu komoditi sesuai ketentuan berlaku
- 15) Kurangnya tenaga/SDM penguji mutu barang karena telah memasuki masa pensiun
- 16) Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui
- 17) Belum semua masyarakat tahu tentang peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sehingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 18) Keberpihakan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri masih kurang

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- 1) Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
- 2) Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
- 3) Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
- 4) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 5) Mayoritas produk komoditas di sumbar masih bertumpu pada primary produk (bahan mentah) dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga belum mendorong peningkatan nilai tambah
- 6) Pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit
- 7) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait
- 8) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- 9) Kurangnya kemampuan SDM di kabupaten/kota dalam memperoleh informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah
- 10) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya data industri
- 11) Daya saing produk yang masih rendah
- 12) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- 13) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- 14) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 15) Daya saing produk yang masih rendah
- 16) Penguasaan teknologi yang masih rendah
- 17) Keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM
- 18) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah
- 19) Industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait maupun dalam aplikasi SIInas secara berkala
- 20) Pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal

7. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- 1) Tidak sinkronnya penetapan lokasi transmigrasi penyusunan dokumen kawasan transmigrasi dengan RTRW yang menyebabkan sulitnya dilakukan penetapan pencadangan dan penetapan kawasan transmigrasi
- 2) Belum terpenuhinya daya tampung di beberapa lokasi Transmigrasi
- 3) Rendahnya alokasi anggaran mandatory untuk Transmigrasi
- 4) Minimnya intervensi program dan kegiatan mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
- 5) Terbatasnya kegiatan pembinaan dan monitoring yang dilakukan di daerah transmigrasi
- 6) Masih rendahnya keterlibatan pembangunan yang dilakukan oleh lintas sektor
- 7) Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
- 8) Kelembagaan usaha di daerah transmigrasi yang sudah ada tidak dikelola secara maksimal

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- 1) adanya usulan yang tidak sesuai dengan SOP penetapan batas
- 2) keterbatasan waktu untuk pembahasan penetapan batas
- 3) Penetapan tata batas diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- 4) Penetapan pemekaran diatur oleh Permendagri yang membutuhkan waktu yang lama
- 5) Masih terdapat Perangkat daerah yang belum menggunakan menjadi kan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai priortas dalam pencapaian kinerja dikarenakan masih belum memahami IKK sesuai dengan yang dimaksud oleh Permendagri 18 Tahun 2020.
- 6) Terlambatnya pemakarsa dokumen kerjasama dalam melengkapi persyaratan dokumen usulan kerja sama
- 7) Pengajuan usulan dokumen kerjasama yang relative meningkat volumenya di akhir tahun sehingga tidak tersedianya waktu untuk pembahasan
- 8) Belum adanya pemetaan Kerjasama yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan proses MoU dan PKS
- 9) Pencapaian SPM belum menjadi prioritas dalam pencapaian kinerja pembangunan

- 10) Penentuan data sasaran penerima SPM yang sulit untuk dilakukan terutama data berupa prediksi / proyeksi
- 11) Masih banyak Pemerintah kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan pencapaian SPM dalam pelaksanaan pembangunan

b. Biro Umum

- 1) Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana untuk layanan pada lingkungan kantor Gubernur dan Rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
- 2) Tingginya intensitas aktifitas kegiatan di lingkungan Istana Gubernuran baik yang berasal dari Perangkat daerah ataupun dari masyarakat, yang belum sebanding dengan ketersediaan SDM yang memberikan layanan
- 3) Masih belum optimalnya kualitas SDM Pramu tamu di Istana Gubernuran dalam memberikan layanan tamu tamu pimpinan
- 4) Terbatasnya SDM dalam melakukan proses pencairan keuangan

c. Biro Organisasi

- 1) Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 2) Ketersediaan anggaran yang sangat tidak proporsional dengan beban kerja, antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan anggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait anggaran perjalanan dinas dan anggaran verifikasi/pembahasan rancangan produk hukum terkait penataan kelembagaan provinsi.
- 3) kurangnya keterlibatan pimpinan OPD dalam merumuskan kinerja Perangkat Daerah
- 4) Dokumen Kinerja belum dijadikan acuan dalam implementasi kinerja
- 5) Masih minimnya informasi dari Perangkat Daerah terkait pendukung keberhasilan atau penyebab ketidaktercapaian target Indikator Kinerja Pemerintah Prov Sumbar, sehingga analisa yang disajikan pun masih kurang lengkap
- 6) Keterbatasan Pemahaman ASN terhadap urgensi (pentingnya) manajemen perubahan dalam meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi

- 7) Masih banyaknya UKPP yang belum memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta belum menggunakan secara maksimal digitalisasi guna mempercepat proses layanan
- 8) Masih adanya perangkat daerah yang belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis
- 9) Banyaknya usulan Ranperda Kab/Kota yang belum melengkapi persyaratan yang sesuai dengan SOP, sehingga mengakibatkan usulan belum dapat diproses
- 10) usulan anjab dan abk perangkat daerah yang terus berubah dan tidak berdasarkan kebutuhan real dari perangkat daerah
- 11) Minimnya inovasi yang dilakukan UKPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan public

d. Biro Hukum

- 1) Tahapan fasilitasi dengan Kemendagri yang membutuhkan waktu
- 2) Keterbatasan SDM untuk melakukan fasilitasi produk hukum/legal drafting
- 3) Keterbatasan anggaran, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan bantuan hukum yang diajukan
- 4) Masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum daerah dari SKPD/Pemerintah Kabupaten/Kota pengusul mulai dari prosedur dan substansi/materi rancangan produk hukum daerah

e. Biro Adminstrasi Pimpinan

- 1) Masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan dan sarana dan prasarana dalam pelayanan keprotokolan yang maskimal serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar stakeholder terkait.
- 2) Terbatasnya ketersediaan Anggaran pada DPA dibandingkan dengan jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada tamu
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengdokumentasian kegiatan pimpinan
- 4) Penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Daerah yang masih parsial per Biro sehingga belum terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya

f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum ada kebijakan yang mengatur kewajiban untuk memanfaatkan proses e-pengadaan langsung
- 2) Jumlah SDM masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah beban kerja, yang belum sesuai dengan SE Gubernur Nomor 871/7536/III-BKD/2020 Tanggal 23 November 2020 Tentang Usul Penetapan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyesuaian/Impasing
- 3) Tingkat kematangan UKPBJ belum maksimal

g. Biro Kesra

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah dikarenakan keterbatasan anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, kurang optimalnya dukungan dari SKPD teknis, dan terbatasnya SDM
- 2) Terbatasnya kewenangan untuk penyelenggaraan urusan agama yang merupakan kewenangan pusat
- 3) Terbatasnya fasilitasi keberangkatan dan kepulangan ibadah haji karena merupakan kewenangan Pusat
- 4) Masih bervariasinya kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah
- 5) Belum optimalnya capaian prestasi qori/qorih Sumatera Barat dalam even MTQ, STQ dan MQK
- 6) Masih bervariasi kapasitas serta mekanisme pengelolaan rumah ibadah (belum memenuhi standar layanan)
- 7) Banyaknya target rumah ibadah yang difasilitasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang tersedia

h. Biro Administrasi Pembangunan

- 1) Kabupaten/Kota masih belum memahami penuh terkait penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan pada simbangda
- 2) Terjadinya perubahan struktur OPD terhadap beberapa OPD menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran baik anggaran rutin kantor dan kegiatan, pengurangan anggaran menyebabkan berubahnya target dan realisasi kegiatan, terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa

- 3) Lamanya proses pengembalian data dari OPD yang lambat karena terbatasnya data dimasing-masing OPD sehingga menjadi kendala karena minimnya analisa
- 4) Belum tersedianya regulasi tentang Pengendalian Administrasi Pembangunan
- 5) Lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
- 6) Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana APBN
- 7) Masih terbatasnya kualitas pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan (KPA/PPTK) terutama untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD non ke Pu-an

i. Biro Perekonomian

- 1) Koordinasi pengendalian inflasi daerah belum berjalan secara optimal, karena belum terjalinnya kerjasama daerah dengan baik akibat dari belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- 2) Belum optimalnya kinerja BUMD dan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlihat dari besaran deviden yang diterima sebagai PAD
- 3) Kelangkaan BBM bersubsidi (solar) dan LPG 3 Kg yang selalu terjadi setiap tahun di masyarakat yang disebabkan dualisme aturan, penimbunan dan penyelewengan alokasi pendistribusian oleh oknum tertentu. Termasuk pelaksanaan BBM satu harga di Kepulauan Mentawai yang disinyalir masih banyak penyelewengan
- 4) Belum optimalnya koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi karena adanya kebijakan baru tentang implementasi Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)
- 5) Koordinasi pembinaan lembaga keuangan di Sumatera Barat belum berjalan dengan baik
- 6) Belum seluruh perusahaan yang berkontribusi dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/CSR dan ada beberapa perusahaan yang belum masuk Forum TJSLP bentukan Pemerintah Prov. Sumatera Barat

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan DPRD
- 3) Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya
- 4) Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD baik dalam Organisasi ataupun dengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

- 1) Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator pembentuk pada dimensi proses dalam pencapaian Indeks Kualitas .
- 2) Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian
- 3) Adanya beberapa IKU dan IKD yang belum jelas formula perhitungannya.
- 4) Mandatory spending mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit.
- 5) Banyaknya tugas-tugas mandatory dari Pemerintah Pusat diluar tugas pokok untuk penyusunan dokumen menyebabkan tidak terkordinir dan dilaksanakannya tugas pokok dengan baik
- 6) Konsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD belum bisa dijaga.
- 7) Data indikator kinerja daerah, data program unggulan dan data capaian program sebagian besar merupakan data yang dirilis pertahun sehingga sulit untuk dilakukan prognosis per triwulan
- 8) Pokok Pikiran DPRD belum selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
- 9) Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya
- 10) Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

- 11) Besarnya belanja pegawai menyebabkan anggaran untuk alokasi pembangunan menjadi terbatas
- 12) Terbatasnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- 13) Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah
- 14) Belum seluruh Perangkat Daerah melaksanakan Tahapan Forum SKPD dalam Penyusunan Renja sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- 15) Belum selarasnya pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dari sisi penetapan target-target pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 16) Dokumen RKPD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya digunakan untuk penyusunan KUA PPAS dan RAPBD hal ini dibuktikan dengan tidak konsistennya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan penganggaran
- 17) Terlambatnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada bulan Juni setiap tahunnya menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pembangunan daerah dikarenakan sempitnya waktu untuk melakukan penyesuaian
- 18) Terbatasnya pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan tingginya intensitas pelaksanaan pekerjaan untuk pada tingkat Provinsi
- 19) Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah
- 20) Banyaknya tugas-tugas *mandatory* dari Pemerintah Pusat diluar tugas pokok untuk penyusunan dokumen menyebabkan tidak terkordinir dan dilaksanakannya tugas pokok dengan baik
- 21) Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik

2. Unsur Keuangan

- 1) Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran

- 2) Masih terdapat Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum valid
- 3) Terbatasnya SDM pengelola asset
- 4) Masih terdapat asset yang telah ditempati / digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang belum tercatat dan bersertifikat
- 5) Terdatanya SPM yang tidak cair sampai dengan akhir Tahun Anggaran, karena terlambat disampaikan
- 6) Adanya penyederhanaan struktur organisasi pada BPKAD dengan Tipe B yang tidak sesuai dengan beban kerja
- 7) Terbatasnya gambaran penetapan target terutama pada pajak rokok masih bersifat 'given' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan
- 8) Terbatasnya sumber pendapatan asli daerah untuk dikembangkan sesuai aturan
- 9) Belum optimalnya penerimaan dari retribusi
- 10) Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
- 11) Sarana dan prasarana serta kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah yang terbatas dan belum memadai
- 12) Komponen belanja pegawai yang cukup besar dikarenakan adanya pengalihan kewenangan Pendidikan Menengah dan Luar Biasa ke Provinsi yang cukup besar menyedot anggaran belanja pembangunan
- 13) rendahnya Realisasi Belanja SKPD
- 14) Masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya
- 15) Masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan
- 16) Masih banyak kegiatan masuk di pertengahan tahun anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan
- 17) Informasi Keuangan yang belum terpublikasi secara lengkap
- 18) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi public
- 19) Masih adanya egosektoral dalam memberikan data yang akan di publikasikan ke masyarakat/publik
- 20) Penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah

3. Unsur Kepegawaian

- 1) Masih belum terimplementasikannya secara komprehensif konsep dan system kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan.
- 2) Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
- 3) Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit
- 4) Belum difungsionakannya aplikasi talent pool dalam implementasi system merit
- 5) Belum diterapkannya secara optimal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- 6) Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
- 7) Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
- 8) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- 9) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
- 10) Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
- 11) Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas
- 12) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat/kurangnya kepedualian OPD dan belum memahami bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN dan imbasnya ke reformasi birokrasi
- 2) Pelatihan secara *Blended Learning* menuntut kemandirian dan keaktifan peserta. Sementara ada beberapa peserta yang mengikuti diklat tetapi masih terbebani oleh pekerjaan kantor
- 3) Masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi kediklatan
- 4) Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya
- 5) Masih rendahnya keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD
- 6) Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*Inpassing*) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
- 7) Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu
- 8) Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
- 2) Masih rendahnya penerapan budaya inovasi di lingkungan kerja
- 3) Rendahnya implementasi inovasi di lingkungan pemerintah daerah
- 4) Keterbatasan fungsional peneliti di daerah
- 5) Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
- 6) Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
- 7) Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
- 8) Isu tema kelitbangan yang diangkat sudah tidak actual

- 9) Masih terdapat Beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan
- 10) Beberapa komponen alat peraga rekayasa tidak didukung dengan ketersediaan standar harga sehingga mengakibatkan output tidak menjadi produk rekayasa (hanya desain)

6. Unsur Penghubung

- 1) Meningkatnya aktivitas Pimpinan Daerah yang belum sebanding dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM Badan Penghubung
- 2) Koordinasi dan komunikasi antar OPD dan Pemerintah Pusat belum maksimal
- 3) Masih terbatasnya dukungan dari pelaku seni dan pemerintah daerah pelaksanaan promosi
- 4) Keterbatasan akses masuk ke seluruh anjungan daerah karena adanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah oleh Pemerintah Pusat
- 5) Kegiatan promosi yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena revitalisasi yang dilakukan di TMII oleh Pemerintah Pusat
- 6) Belum maksimalnya layanan kepada para perantau
- 7) Belum maksimalnya potensi rantau untuk digali dan diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat sehingga potensi rantau masih parsial dan belum komprehensi

F. Unsur pengawasan urusan pemerintahan

- 1) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
- 3) Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana terutama gedung kantor yang representative dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

G. Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Belum maksimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara

cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.

- 2) Terbatasnya jumlah intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
- 3) Belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) BPS, POLDA, KOREM Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
- 4) Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Timdu Penanganan Konflik Sosial dan forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal
- 5) Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pemerintahan Daerah yang bersinergi dengan Pemerintah dan Pihak lainnya antara lain Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
- 6) Belum terbentuknya sistem informasi ormas (Slormas) yang memuat data dan informasi aktifitas ormas di daerah
- 7) Belum optimalnya fungsi tim terpadu pengawasan ormas

2.4. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2.4.1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Tahun Berjalan 2025 Hingga Triwulan I Di Sumatera Barat

Adapun hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2025 hingga triwulan I di Sumatera Barat yakni sebagai berikut.

Tabel 2.22. Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Pada Triwulan I Tahun 2025

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.								
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,63	6,28	6,16	6,04		Tercapai
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	85,78	53,8	54,72	34,37	0,38	On the Track
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	85,78	53,8	54,72	85,78	0,69	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	13	25	25	13	0	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen		20	20	15	15	On the Track
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen		20	20	15	15	On the Track
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang		401	401	0		-
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.								
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	11,83	50,46	1,14	Tercapai
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.								
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,65	72,74	73,23	73,26		-
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,59	69,80	69,98	69,90		-
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,65	72,74	73,23	73,26		-

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,59	69,8	69,98	69,90		-
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	98,2	97,8	96,42	On the Track
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Rasio kemandirian jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	77	71,72 (SK Lama) , 71,68 (SK Baru) karena ada penambahan jumlah p	0	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85,23	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69,27	On the Track
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61,11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait rasio konektivitas	On the Track
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82,05	On the Track
	RPJMD - Rasio Kemandirian Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	77	75	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
		Program							Track
	RPJMD - RasioElektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		118	236	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		55	111	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	4	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		15	29	15	0	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	46	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	57	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	59	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		-	1			-
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi		12	15	12	15	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi		12	15	12	15	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi		-	19	0	19	On the Track
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.								
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	100		-

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	85	80	0	On the Track
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	56	75	54,74	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	3	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.								
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,46	0,49	0,5	0,64		-
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa		10	10	10	0	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.								
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	46255	47872	50265	49678		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	-1,41	2,14	2,18	5,04		-
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	3,1	1,6		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	379	289		-
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	17888	115.149		-
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	NA	6,54	6,7	6,68		-
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	10,43	28,57	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	2,02	73,68	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	70	51	61	51	85	Tercapai
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	450	417	765	Tercapai
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	2,65	17,94	20,49	17,98	10,22	On the Track
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	54,72	20	20	20	13,33	On the Track
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	40	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	53830	50000	50000	50000	39320	On the Track
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	42	20	20	25	1	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD								
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang		470	528	515	310	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang		5872	6742	5900	1655	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UKM	Indikator Progul	orang		1500	2000	1600	470	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang		300	300	320	30	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang		4.759	4.997	150	0	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang		500	500	500	296	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang		1.950	2.220	3859	730	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang		412	412	330	180	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang		200	240	300	242	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang		350	400	280	119	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang		675	700	1625	765	Tercapai
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang		200	100	200	100	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang		112	112	112	145	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang		112	112	1192	1762	Tercapai
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha		50.000	50.000		39320	On the Track
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.								
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.									
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.								
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	94	84,02	102,15	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton		1.542.909	1.573.767	1442000		-
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton		978.062	1.012.295	950058		-
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000			-
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000			-
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton		1.542.909	1.573.767		533909	On the Track
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton		978.062	1.012.295		71258	On the Track
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000	500000	90000	On the Track
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000	0	0	On the Track
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	94	84,02	102,15	Tercapai
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.								
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	15,43	25,2		-
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).								
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	80,21	79,45		-
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	845.607	885080	411978 *) Angka sementara	On the Track
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	83	89.80	89,8	Tercapai
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	83,80	82,5	83	89,8	89,8 *) Angka Sementara	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	24	27,91	27,91 *) angka sementara	On the Track
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	40,46	40	40,5	40,77	0	On the Track
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.								
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan								
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan								
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.								
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	100,19	110,37		-
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	103,98	108,85		-
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	5	9,94		-

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	5	11,16		-
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	5	6,5		-
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.								
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.								
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.								
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang		50.000	50.000	50000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang		100.000	100.000	100000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang		300.000	400.000	300000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang		50.000	50.000	50000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang		200.000	400.000	200000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang		37.500	231.250	12500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton		1.000	2.500	1000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton		120	120	120	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram		16.500	16.500	16500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah	Indikator Progul	kg		100.000	100.000	100000	0	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	benih/bibit Bawang Merah yang diadakan								
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang		40.000	40.000	40000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang		20.000	20.000	20000	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang		15.000	20.000	10030	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang		44.500	55.000	44500	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang		30.480	50.000	70090	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang		15.000	15.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg		2.000	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg		2.000	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg		-?	2.000	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg		1.500	1.800	1.500	0	Tercapai
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000			-
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000			-
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor		500.000	650.000	500000	90000	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor		3.000	5.000	0	0	On the Track
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.								
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.									
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.								
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.								
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen		10	10	9,47	15,12	Tercapai
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.									
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.								
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.								
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
		Program							Tercapai
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	76	74,8	23,81	On the Track
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	81	79,6	25,24	Tidak Tercapai
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.								
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	211	231	85	Tercapai
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.								
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.								
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.								
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.								
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.								
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.								
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.								
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis								
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.								
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.								
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.									
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.								
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.								
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	IKD	%	50,60	62,58	63	61,08	-	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	Prevalence Rate/mCPR)								Track
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.								
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	11,8	19,1	18,6	12,2	-	On the Track
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).								
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,6	2,7	2,67	2,46	-	On the Track
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.								
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	80	75,33	23,05	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	11,5	9,7	10,9	Tercapai
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85,23	Tercapai
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	211	231	85	Tercapai
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	18	18	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	574	420	480	427	390	On the Track
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	11	19	19	Tercapai
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	11	19	19	Tercapai
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
								rasio konektivitas dik	
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25	73,7	79,9	77,42	79,4	On the Track
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.								
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).								
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	88,2	86,18	89,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	37	31,16	36,41	On the Track
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun.								
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	8,8	7,2	7,2	On the Track
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.								
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	80	87,19	15,4	Tidak Tercapai
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen		80	90		83,76	On the Track
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen		70	85		67,36	On the Track
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen		80	90		67,36	On the Track
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.								
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.								
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	100	92	94	94,74	92	On the Track
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.								
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
pembelajaran yang relevan dan efektif.									
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,								
	(ii) matematika.								
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.								
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	94,7	106,08	103,9	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	53,88	90,66	51,88	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	34,27	28,55	30,46	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.								
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,28	9,18		-
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	94,7	106,08	103,9	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	53,88	90,66	51,88	On the Track
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	34,27	28,55	30,46	On the Track
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	94,7	103,47	103,9	Tercapai
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.								
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.								
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.								
	RPJMD - Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	17888	115.149		-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	3	1,72	0,78	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang		470	528	515	310	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang		5872	6742	5900	1655	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UKM	Indikator Progul	orang		1500	2000	1600	470	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang		300	300	320	30	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang		4.759	4.997	150	0	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang		500	500	500	296	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang		1.950	2.220	3859	730	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang		412	412	330	180	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang		200	240	300	242	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang		350	400	280	119	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang		675	700	1625	765	Tercapai
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang		200	100	200	100	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang		112	112	112	145	On the Track
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang		112	112	1192	1762	Tercapai
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).								
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
layak dan kewirausahaan.									
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.								
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	73,49	77,19	76,46	Tercapai
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.								
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum								
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	58,51	43,52	43,52	On the Track
		IKD	%	NA	27,4	27,7	60,48	60,48	On the Track
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun.								
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).								
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak								
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		236	236	236	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		94	236	81	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		118	236	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		111	111	111	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		52	111	40	0	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		55	111	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	0	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		29	29	29	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		4	29	4	0	On the Track
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		15	29	15	0	On the Track
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.									
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.								
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.								
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.								
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	4,3	7,44	0	On the Track
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang	Indikator	%	100	84	88	100	100	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program							
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.								
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	22,2	21,8	22	22,5	-	On the Track
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.								
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.									
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.								
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.								
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.								
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	13,2	21,15	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.								
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.								
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.								
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.								
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.									
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.								
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	4,3	7,44	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	18	17	-	On the Track
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	-	On the Track
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.								
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85.23	Tercapai
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82.05	On the Track
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.								
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	89	85,19	86,19	On the Track
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69.27	On the Track
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
									Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.								
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.								
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya								
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya								
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.									
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	65,66	66,51	68,27	66,60	67,07	On the Track
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.								
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	58,50	53,78	55,28	58,60	59.06	Tercapai
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	58,50	53,78	55,28	58,60	59.06	Tercapai
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.								
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	55	37,3	40	On the Track
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	55	37,3	40	On the Track
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.								
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,6	99.98	99,99	Tercapai
	RPJMD - RasioElektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,6	99,98	99,99	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.								
07.01.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.								
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.								
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.								
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.									
7.3.1*	Intensitas energi primer.								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih,teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih									
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.								
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.								
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,29	3,40	4,57	4,36		Tercapai
8.1.1.(a)	PDB per kapita.								
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,36	32	32,97	32,37		-
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	45,35	48,29	50,6	50,59		-
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa								
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UKM terhadap total kredit.								
	Progul - Jumlah UKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		540	540	540	120	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		200	200	-	0	On the Track
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	150	0	24	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.								
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin								
8.3.1.(a)	Persentase akses UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan								
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	3,1	1,6		-
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	3	9,31	0,78	On the Track
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	3	1,72	0,78	On the Track
	Progul - Jumlah UKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga		540	540	540	120	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		200	200	-	0	On the Track
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		100	150	0	24	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.									
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.								
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan								
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).								
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.								
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	6,52	6,6	6,45	6,28		Tercapai
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.								
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).								
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.									
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	9,26	12,36	16,58	19,2	25,13	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	11,83	50,46	1,14	Tercapai
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.								
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.								
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,27	1,24	1,24	1,35		-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.								
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	-100	1,5	1,5	4142005	119,77% (9.244 orang)	Tercapai
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	-100	2,5	4	2,5	119,77% (9.244 orang)	Tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.								
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	-40,23	1,5	1,5	17,37	0,21% (1.268.247 perjalanan)	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	-40,23	3	4,5	3	0,21% (1.268.247 perjalanan)	On the Track
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.								
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,676	0,662	Belum dapat dilakukan perhitungan terkait rasio konektivitas dik	On the Track
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.								
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	75,034	75	77	71,39		-
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	77	71,72 (SK Lama) , 71,68 (SK Baru) karena ada penambahan jumlah p	0	Tidak Tercapai
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	77	75	0	On the Track
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.								
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.								
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.								
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.								
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.								
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	4	Tercapai
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	4	Tercapai
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.								
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan		4	4	4	4	Tercapai
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut		4	4	4	4	Tercapai
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.								
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.								
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.								
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,81	8,75	8,88	8,54		-
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	379	289		-
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	11,36	15,7	16	20,93	20.93	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38174	41373	43263	40653	42406	On the Track
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang		1.636	1.855	1645	192	On the Track
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.								
	Progul - Jumlah Pelaku UKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang		400	400	265	62	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		4	4	5	2	On the Track
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga		5	5	5	2	-
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.								
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.								
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.								
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.								
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.								
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).								
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Rasio Gini.								
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	3,15	0,31	0,309	0,315 (2021)		-
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	370,67	356,45	353,68	343,82		Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.								
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	10,43	28,57	0	On the Track
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.								
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	2,02	73,68	0	On the Track
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.								
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.								
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.								
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.								
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.								
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.								
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	46,29	50,46	1,14	Tercapai
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.									
10.05.01	Financial Soundness Indicator.								
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.								
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.									
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.								
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplemenda- sikan kebijakan mi- gran yang baik.								
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	13	35	35	-	11	On the Track
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.								
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.								
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.								
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.								
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.01.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau								
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	84	85,23		-
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	84	69,27		-
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	84	85,23	85.23	Tercapai
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	84	69,27	69.27	On the Track
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	100	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26	82	84	82,05	82.05	On the Track
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.02.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	20000000	18650012	4358063	On the Track
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum								
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,676	0,662		-
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	20000000	18650012	4358063	On the Track
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk								
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis								
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)								
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10790	10916	11108	11130		-
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	56	75	54,74	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa		10	10	10	0	On the Track
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar								
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB								
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen		-	-		-	Tidak Tercapai
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola								
11.06.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)								
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10								
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara								
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	77,43	77,95	74,98		-
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	77,95	75,59	0	On the Track
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.07.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua								
11.07.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.									
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS								
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.									
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana								
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.									
11.c.1	-								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.									
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan								
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.									
12.03.01	(a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	makanan (Food waste index)								
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan								
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen		-	-		-	Tidak Tercapai
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa		13	18	15	0	On the Track
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.								
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.4.2*	(a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.								
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	100	0	0	On the Track
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	85	82,26	82.26	On the Track
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	57,9	On the Track
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	287.419	298983	74101	On the Track
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	18	11	18	Tercapai
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.05.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	19	14,36	0	On the Track
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	58	67,21	0	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya								
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.								
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi								
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah								
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa								
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.08.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup								
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	87,5	90,02		-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	82	90,9		On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93	93,49	93,49	Tercapai
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	87	91,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	93	92,57	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	93	88,58	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	95,60 / 3,82	95,60/ 3,82	On the Track
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		50	75	58	52	On the Track
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.									
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)								
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	33,3	29	29,28	On the Track
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan								
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development								
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	On the Track

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	bencana provinsi								
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok		10	10	10	0	On the Track
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030								
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	On the Track
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana								
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	43,7	18,75	18,75	Tidak Tercapai
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	72	71	72	Tercapai
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications								
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun								
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)								
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)								
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup								
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi									
14.01.01	(a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung								
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut								
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	65	61.11	12,78	On the Track
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	65	61,1	61,58	On the Track
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan								
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari	IKD	Ton	481143,69	477.362	487.949	487.462.96	0	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov								Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,19	0,99	1,07	6,62	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	219570,30	222693	225081	226589,29	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	5,56	3,33	3,39	6,66	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	261573,39	262256	274280	277361,08	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	64,9	67	72	1046,97	0	On the Track
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	100	6,49	7,26	7,5	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	9118	16652	17861	17500	0	On the Track
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan								
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	52,94	48	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	6	7	Tercapai
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	140,40	250	300	300	0	On the Track
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia									
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut								
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	52,94	48	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	6	7	Tercapai
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	55	37,3	40	On the Track
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)									
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha								
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	84,34	82	84	86,21	87	Tercapai
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan	Indikator	%	84,34	82	84	85	87	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	peraturan perundangan yang berlaku	Program							
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara									
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)								
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar									
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil								
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan								
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi								
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want									
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)								
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELLOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI									
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan								
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya								
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju								
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	40	0	On the Track
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	20	0	On the Track
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi									
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,48	1,29	1,79	0,78	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	2,55	2,85	3,81	2,95	0	On the Track
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.									
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan								
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	60,55	63,98	0	On the Track
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal									
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal								
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL								
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan									
15.09.01	(a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan								
	(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi								
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis								
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	1	0	On the Track
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.01.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.								
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.01.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.								
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.								
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	0	3	3	1	0	Tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
		Program							Track
16.01.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.								
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.								
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,04	3,1	3,11	2,18	1,86	On the Track
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	3,02	2,05	1,85	On the Track
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.								
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.								
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	20	13,83	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	20	8,86	0	On the Track
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	20	13,83	0	On the Track
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	20	8,86	0	On the Track
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.								
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.									
16.02.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.02.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.03.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	65,95	61,98 (2021)		-
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	19,88	16	15	8,18	2,05	Tercapai
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13		2,08	3,70	1,05	Tercapai
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	65,73	59,64	-	On the Track
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	88	100	100	Tercapai
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi								
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	25	On the Track
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.								
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	25	On the Track
16.03.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.								
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.								
16.03.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.								
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)								
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.05.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
16.05.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.								
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.								
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.								
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,5	69,88		-
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B								
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB (77,52)	BB	BB	BB		-
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	6	8	10	8	11	Tercapai
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	6	8	10	8	11	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B								
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,5	69,88		-
16.06.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.								
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.								
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	87,5	90,02		-
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	82	90,9		On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93	93,49	93,49	Tercapai

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	87	91,98	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	93	92,57	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	93	88,58	0	On the Track
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	95,60 / 3,82	95,60/ 3,82	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	46	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	53	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	57	52	On the Track
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit		50	75	59	52	On the Track
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit		50	75	58	52	On the Track
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.07.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,76	10,77	10,77	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	13,2	21,15	21,15	Tercapai
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	13,2	20	21,15	Tercapai
16.07.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi								
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan								
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan								
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	60,01	65,48		-
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	68,5	78,51		On the Track
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	36	40	50	112,5	48,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun								
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	90,50	101,47	90,83	Tercapai
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	95	104,25	98,58	Tercapai
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.									
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.								
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	3,56	-11,24	64,4	On the Track
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.								
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	38,25	46,50		-
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	3,56	-11,24	64,4	On the Track
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	1,83	1,85	1,92	1,4995	On the Track
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	7,2	8,37	-14,34	On the Track
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.									
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).								
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati								
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.									
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas								
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp)	IKD	Rp. Juta	3066,93	1420,99	1449,41	2492.04 (Jan-Okt)	732,25	On the Track
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	3066,93	1420,99	1449,41	2492,04	735.25	On the Track
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.									
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.								

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.								
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).								
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.								
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs								
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	70	63	0	On the Track
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)								
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.								
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.								
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.								
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	70	63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	70	68,63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70	70,59	0	On the Track
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)								
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	IKD	%	60	60	70	67	0	On the

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR SDG'S	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2021)	TARGET SDGS		CAPAIAN SDGS		STATUS
					2024	2025	2024	2025 (TW I)	
	statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)								Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	70	68,63	0	On the Track
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70	70,59	0	On the Track
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan								
	b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.								
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).								
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.								
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.								
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya								
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga								
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)								
17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet								

Sumber : Hasil evaluasi Triwulan II RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026

2.4.2. Permasalahan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Tahun Berjalan 2025 Hingga Triwulan I Di Sumatera Barat

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs sampai dengan triwulan I tahun 2025 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya
 - b. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah
 - c. Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 - a. Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
 - b. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
 - c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
 - d. Aplikasi pelaporan (STBM Smart) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sistem pelaporan terkendala dan pelaporan secara manual tidak berjalan dengan baik
 - e. Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
 - f. Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
 - g. Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
 - h. Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi
 - b. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan

- c. Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat)
 - d. Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait degan sinergi pembangunan infrastruktur
 - e. Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan Kawasan strategis
 - f. Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam penyelesaian pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu
 - g. Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik
 - h. Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik
 - i. Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan
 - j. Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Belum ada regulasi tentang RTLH
 - b. Lokasi PSU yang sulit diakses
 - c. Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
 - d. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
 - e. Belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi untuk pengembang perumahan
 - f. Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
 - g. Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
5. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup Panjang
 - b. Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
 - c. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
 - d. Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana

- e. Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana
 - f. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
 - h. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
 - i. SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
 - j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
 - k. Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
 - l. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 - m. Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- a. Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indeks Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
 - b. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang mennadi kewenangannya
 - c. Cukup besarnya kebutuhan alokasi anggaran untuk memenuhi SPM yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
 - d. Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
 - b. Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
 - c. Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
 - d. Efektifitas tenaga kerja belum optimal
 - e. Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
 - f. Penggunaan teknologi belum maksimal oleh pencari kerja

- g. Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll
 - h. Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata Kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. Sulit untuk menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang sedang bersengketa
 - j. Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi (33 orang) yang masih terbatas jika dibandingkan kondisi ideal yang mengharuskan minimal 1 fungsional pengawas ketenagakerjaan menangani 5 perusahaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
 - b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
 - c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
 - d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
 - e. Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
 - g. Belum teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
 - h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
 - i. Masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
 - j. Masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
 - k. Rendahnya Tingkat Ekonomi masyarakat
 - l. Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
 - n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA
 - o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan
 - p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender

- q. Belum seluh kebijakan Pengarusutamana Gender (PUG) yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan renstra Perangkat Daerah
 - r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
 - b. Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)
 - c. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
 - d. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaan
 - e. Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
 - f. Pembiayaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
 - g. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP
 - h. Masih banyak masyarakat yang belum mencetak KTP karena telah memiliki Surat keterangan Perekaman KTP
 - i. Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
 - j. Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran
 - k. Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
 - l. Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
 - m. Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
 - n. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
 - o. Pengeloaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sector
 - p. Terbatasnya SDM IT untuk memfasilitasi terciptanya inovasi
 - q. Penyajian data kependudukan kurang menarik dan kurang kekinian
 - r. Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan

10. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
 - c. Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.
 - d. Rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarkan
 - e. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk
 - f. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari Rumah Tangga
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
 - e. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat
 - f. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai
 - g. Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
 - h. Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan

- i. Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
 - j. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dll
 - k. Belum semua usaha dan/atau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3);
 - l. Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi);
 - m. Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan;
 - n. Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
 - o. Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
- a. Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
 - c. Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
 - d. Belum optimalnya koordinasi yang baik antara Kepala Terminal dengan Kepala UPTD untuk penambahan dan perbaikan fasilitas Utama dan Penunjang di terminal di tahun 2021.
 - e. Perlunya dilakukan penyesuaian perijinan kembali dengan aturan terbaru menggunakan sistem (OSS) yang terintegrasi
 - f. Belum adanya pembangunan moda transportasi yang terpadu dan saling berhubungan antar wilayah
13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UKM
 - b. Masih terdapatnya beberapa koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
 - c. Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi

- d. Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
 - f. Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
 - g. Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
 - h. Sebaran UKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
 - i. Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
 - j. SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
 - k. Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
 - l. Terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - b. Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
 - c. Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) Kawasan
 - d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu Karang
 - e. Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
 - f. Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
 - g. Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
 - h. Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
 - i. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
 - j. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
 - k. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
 - l. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
 - m. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten

- n. Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
 - o. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
 - p. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km2 perairan laut Sumatera Barat
 - q. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
 - r. Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
 - s. Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
 - t. Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
 - u. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
 - v. Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan
 - w. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan
15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- a. Masih terdapatnya daerah rawan pangan
 - b. Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
 - c. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
 - d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
 - e. Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
 - f. Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui

- g. Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

16. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- d. Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- e. Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- f. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- g. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- h. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- i. Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- j. Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- k. Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- l. Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- m. Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sampingan masyarakat
- n. Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- o. Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- p. Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun
- q. Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- r. Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- s. Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- t. Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.

- u. Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- v. Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- w. Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

17. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- a. masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- b. rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- c. masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- d. masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- e. alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- f. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- g. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization),
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- i. Pengelolaan DAS belum terpadu
- j. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- k. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local

18. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih adanya Lokasi Rumah Tangga yang terisolir yang sulit diakses dan belum teraliri listrik
- b. Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- c. Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- d. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)
- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- f. Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan

- g. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- h. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi pada beberapa daerah (khususnya Kep.Mentawai)
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- j. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- k. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- m. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- n. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

2.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Mengingat perhitungan capaian / realisasi SPM di laksanakan pada akhir tahun, maka hasil capaian pada triwulan I Tahun 2025 masih menggunakan data capaian SPM yang dirilis oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

2.5.1. Standar Pelayanan Bidang Pendidikan

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel diberikut ini.

Tabel 2.23. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
I	PENDIDIKAN MENENGAH					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		(80%)			80%
			Jumlah Total yang Harus	Jumlah Total yang	Yang Belum Terlayan	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Dilayani	Terlayani	i	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	297.600	297.600	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	SMA					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	55.38	55.38	0	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	71.95	71.95	0	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	61.20	61.20	0	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	81.14	81.14	0	100%
	8. Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	75.59	75.59	0	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.48	63.48	0	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	19.9	19.9	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.39	0.39	0	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	41.13	41.13	0	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100%
	SMK					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	35.77	35.77	0	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	66.96	66.96	0	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	56.79	56.79	0	100%
	5. Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	90.12	90.12	0	100%
	6. Kepuasan dunia kerja thd budaya kerja lulusan SMK	%	85.00	85.00	0	100%
	7. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100%
	8. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	9. Indeks iklim keamanan	Nilai	78.93	78.93	0	100%
	10. Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	71.32	71.32	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.39	0.39	0	100%
	12. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.29	60.29	0	100%
	13. Kecukupan formasi guru ASN	%	19.9	19.9	0	100%
	14. Proporsi PTK bersertifikat	%	41.13	41.13	0	100%
	15. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100%
II	PENDIDIKAN KHUSUS					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%) 80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5.880	5.880	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					(20%) 20%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Angka partisipasi kasar	%	55.65	55.65	0	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	65.62	65.62	0	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	66.82	66.82	0	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	83.27	83.27	0	100%
	8. Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	74.20	74.20	0	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64.44	64.44	0	100%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	8.16	8.16	0	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.22	0.22	0	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	34.44	34.44	0	100%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	18.60	18.60	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 yakni :

1. Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Belum maksimalnya komunikasi dengan tim penerapan SPM Kabupaten/Kota.
3. Indikator pemenuhan SPM Pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan karena adanya Sub Kegiatan yang tidak sesuai.
4. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
5. Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
6. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal, hal ini terlihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah di Sumatera Barat yang belum mencapai 100%
7. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan
8. Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.

2.5.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesehatan Tahun 2024

Kesehatan Tahun 2024						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
I	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI					100%
Pra Krisis Kesehatan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	269.259	269.259	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat)	Orang	3.114	3.114	0	100%
	2. Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	1.627	1.627	0	100%
	3. Sarana dan prasarana	Unit	100	100	0	100%
II	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI					100%
Ya terjadi Kejadian Luar Biasa						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	C. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	500.952	500.952	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	D. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan	Unit	771	771	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	penyakit)					
	2. Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Unit	3.457	3.457	0	100%
	3. Wadah pengiriman specimen/ Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	78	78	0	100%
	4. Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	69	69	0	100%
	5. Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko)	Formulir	1.339	1.339	0	100%
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)	Unit	690	690	0	100%
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis)	Unit	88	88	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	163	163	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	117	117	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	163	163	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga	Orang	11	11	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi					
	12. Tenaga Laboratorium	Orang	111	111	0	100%
	13. Tenaga penyuluh/ promosi kesehatan	Orang	184	184	0	100%
	14. Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	147	147	0	100%
	15. Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	203	203	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2024 yakni:

- 1) Kab. Mentawai terdiri dari pulau-pulau, sehingga susah untuk dijangkau. Untuk sampai kelokasi bencana memakan waktu lebih kurang 1 minggu, karena cuaca yang kurang baik seperti : ombak besar dan angin kencang, sehingga bantuan lambat sampai ke daerah lokasi. Kejadian bencana yang terjadi di Kab. Mentawai adalah gempa dan banjir.
- 2) Kejadian bencana yang sering terjadi di Kab/Kota adalah banjir, longsor dan gempa bumi. Provinsi Sumatera Barat di merupakan daerah rawan bencana dan di kelilingi perbukitan, apabila terjadi bencana banjir, longsor dan gempa bumi sering terjadi masalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan, disebabkan jalan yang dilalui ketempat rawan bencana terputus akibat banjir dan jalan tertimbun material longsor.
- 3) Ada 75 korban saat Erupsi Gunung Merapi terjadi, dimana saat erupsi para pendaki masih berada dipuncak gunung sehingga menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang dan 1 orang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit. Banyaknya korban diakibatkan Erupsi Gunung Merapi tersebut dikarenakan susah untuk melakukan evakuasi karena medan yang curam dan tebalnya abu vulkanik di sekitar Gunung Merapi.

2.5.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
I	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA MELALUI PENYELENGGARAAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR					80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	385.158.000	203746768	181.411.232	100%
	2. Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	19	19	0	100%
II	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		(80%)			80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	351.212.000	205.814.502	145.397.498	100%
	2. Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	5	5	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah:

1. Pembebasan lahan untuk rencana Pembangunan SPAM Regional Agam – Bukittinggi belum bisa dilakukan karena adanya penolakan dari 18 warga terdampak. Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan terkait penyelesaian masalah ini baik ditingkat Kabupaten Agam maupun ditingkat Provinsi, namun 18 warga terdampak yang tidak setuju tersebut tidak hadir pada saat rapat tersebut.
2. Belum ada Nota Kesepakatan Pembangunan SPAM Regional Agam – Bukittinggi dan Pembangunan SPAM Regional Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh;
3. Program penyediaan sanitasi guna pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dalam tahap penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan TPA Regional Kabupaten Padang Pariaman.
4. Sesuai dengan tugas provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap capaian SPM air minum dan air limbah kabupaten kota, masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam penginputan data SPM air minum dan air limbah dalam aplikasi eSPM Bangda.
5. Rendahnya anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten/Kota maupun provinsi, tidak bisa dilakukan secara menyeluruh

2.5.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Perencanaan Rukyat Tahun 2024						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
I	PENYEDIAAN & REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI					100%
Tidak Terjadi Bencana						
II	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					100%
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	1	1	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Data korban bencana yang tidak tersedia karena pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan bagi masyarakat korban bencana baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan bencana;
2. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program SPM Bidang Perumahan Rakyat masih rendah;
3. Pendataan dan sosialisasi tidak dihitung sebagai output SPM Bidang Perumahan Rakyat;
4. Belum tersedia lahan untuk relokasi rumah masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi;
5. Belum ada program SPM Bidang Perumahan Rakyat dalam RPJMD 2021-2026;
6. Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota tidak dihitung sebagai pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Provinsi.

2.5.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
I	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		(80%)			80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	44	44	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	261	261	0	100%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang	Dokumen	6	6	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	72	72	0	100%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) Dalam pelaksanaan penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP Prov. Sumbar mengalami kekurangan anggaran operasional
- 2) Masih terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana
- 3) Terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi tentang pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan standar pelayanan minimal antar pihak yang berkepentingan

2.5.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Adapun realisasi capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Bidang Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28. Realisasi Capaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Sosial Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
I	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	80%	
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	450	450	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	450	450	0	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	165	165	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	13	13	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu **	Orang	50	50	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	230	230	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	258	258	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	150	150	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	150	150	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga	Orang	150	150	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	100	100	0	100%
II	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	80%	
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3.678	3.678	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	B. Jumlah Mutu					100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	(Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					
	1. Pengasuhan	Orang	435	435	0	100%
	2. Penyediaan permakanaan	Orang	3.678	3.678	0	100%
	3. Penyediaan sandang	Orang	615	615	0	100%
	4. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	31	31	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	535	535	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	435	435	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	928	928	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	535	535	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.660	1.660	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	535	535	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	300	300	0	100%
	12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	435	435	0	100%
III	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	220	220	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Penyediaan permakanaan	Orang	220	220	0	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	220	220	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	4	4	0	100%
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	106	106	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	200	200	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	70	70	0	100%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	216	216	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	180	180	0	100%
	9. Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	180	180	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	70	70	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	180	180	0	100%
	12. Pemulasaran	Orang	30	30	0	100%
IV	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI					100%
Ya, Ada Gepeng						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	30	30	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	30	30	0	100%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	0	100%
	4. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	10	10	0	100%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100%
	6. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100%
	7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	10	10	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	10	10	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100%
	10. Pemulangan ke daerah asal	Orang	10	10	0	100%
V	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI					100%
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	75	75	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah	Jumlah	Mutu	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi					100%
	1. Penyediaan permakanaan	Orang	75	75	0	100%
	2. Penyediaan sandang	Orang	75	75	0	100%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	30	30	0	100%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	90	90	0	100%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	90	90	0	100%

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Adanya kesulitan dalam mengumpulkan data dari panti milik masyarakat yang sesuai form yang telah ditetapkan dengan jumlah penerima yang cukup banyak terutama bagi panti anak terlantar.
2. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak ada anggarannya pada Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam panti, Rehabilitasi Sosial anak terlantar di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial/Gepeng di dalam panti.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun 2025 hingga triwulan I dan perkiraan hingga akhir tahun 2025 yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran prediksi pencapaian indikator makroekonomi hingga akhir tahun 2025 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makroekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 hingga triwulan I yang akan menjadi basis untuk mengalokasikan anggaran dalam Perubahan RKPD secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2025.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

3.1. ARAH KEBIJAKAN KERANGKA EKONOMI

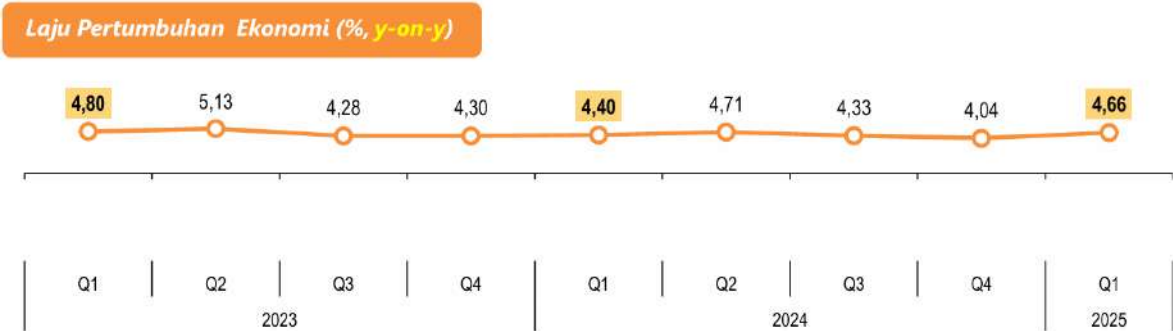
Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan gambaran ekonomi makro pada hingga triwulan I tahun 2025 dan perkiraan hingga akhir tahun 2025 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan Tahun 2025.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk triwulan I tahun 2025 mencapai Rp. 86,25 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 50,98 triliun. Ekonomi

Sumatera Barat triwulan I-2025 tumbuh 4,66 persen (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 4,37 persen. Pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat berkaitan dengan peningkatan konsumsi masyarakat selama Bulan Ramadhan Tahun 1446 H. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I 2025 berkembang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya berapa pada level 4,37% (y-on-y). Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas produksi komoditas pertanian dan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat.

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulanan (Y-on-Y) Tahun 2023-2025

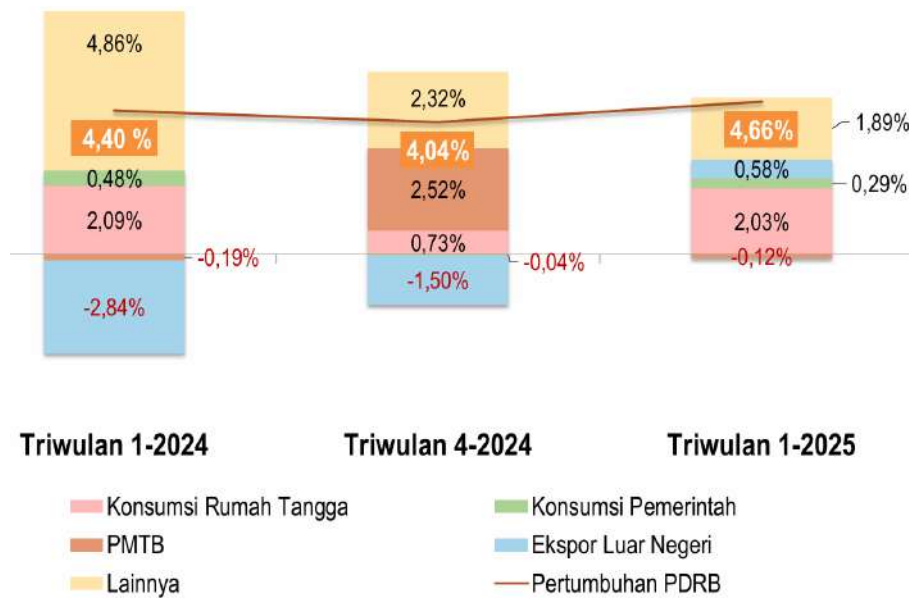


Sumber : BPS Provnsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran tertinggi triwulan I-2025 (y-o-y) berada pada komponen impor Luar Negeri yang tumbuh 6,28% disusul oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang sama-sama tumbuh 4,12%. Sementara untuk komponen impor luar negeri berkontraksi pada triwulan I-2025 hingga 31,02%, konsumsi LNPRT berkontraksi 1,41%, dan komponen PMTB berkontraksi 0,46%. Untuk triwulan I-2025 sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tertinggi dari sisi pengeluaran yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 2,03%, disusul oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 0,58%.

Pertumbuhan ekonomi dari komponen ekspor terjadi akibat peningkatan volume permintaan pada sebagian besar komoditi ekspor utama yaitu kopi, teh, dan rempah-rempah (33,65%), garam, belerang dan kapur (30,09%), dan lemak dan minyak hewan (15,54%).

Gambar 3.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat menurut Pengeluaran Triwulan I 2025 (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,45% (y-o-y) ditopang oleh produksi pertanian diantaranya produksi padi yang meningkat signifikan 23,29%, peningkatan produksi beberapa jenis tanaman hortikultura serta peningkatan produksi produk kehutanan seperti akasia. Pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,72% (y-o-y) disebabkan oleh peningkatan aktivitas kebutuhan bulan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. LU transportasi dan pergudangan tumbuh 3,96% (y-o-y), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,79% (y-o-y). Hal ini diakibatkan oleh peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat terutama pada angkutan udara, peningkatan penggunaan kargo seiring terus berkembangnya belanja *online*, serta kenaikan jumlah penumpang pesawat udara dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

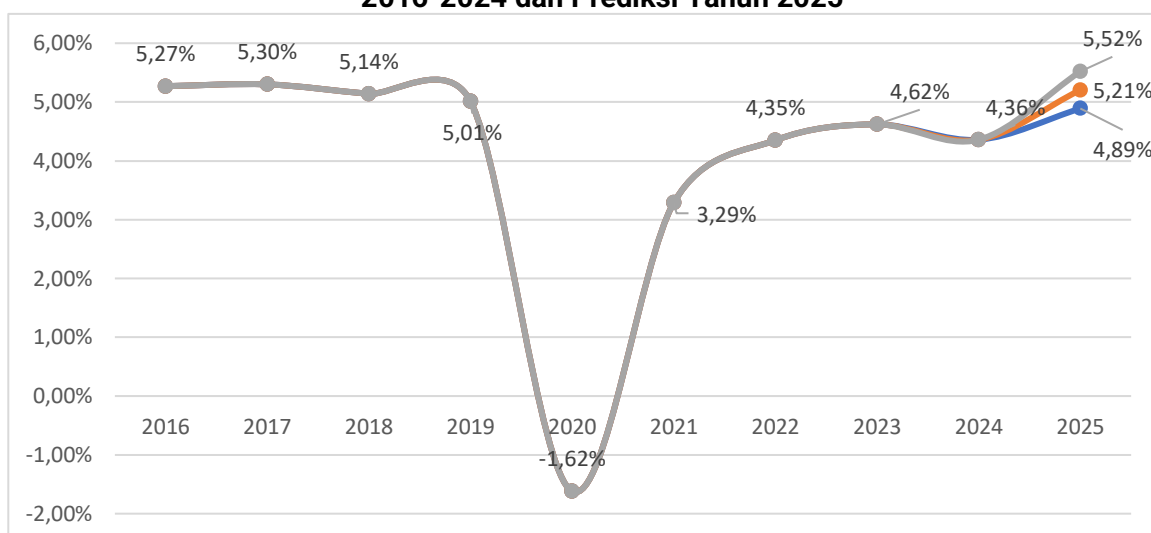
Gambar 3.3. Sumber Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha (y-o-y)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pada triwulan II 2025, ekonomi Sumatera Barat diperkirakan akan kembali tumbuh lebih tinggi menjadi sebesar 4,45 - 4,95% (y-o-y) akibat peningkatan aktivitas masyarakat terutama puasa bulan Ramadhan hingga perayaan hari besar keagamaan yaitu Idul Fitri dalam bentuk aktivitas mudik yang akan lebih meningkat serta hari raya Idul Adha. Di sisi permintaan domestik, konsumsi diperkirakan akan meningkat dipengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan keyakinan konsumen. Investasi turut meningkat seiring dengan berjalannya beberapa proyek strategis nasional diantaranya pengoperasian Jalan Tol Padang-Sicincin. Dari sisi ekspor perlu mendapat perhatian khusus mengingat pertumbuhan komponen ekspor dari triwulan I tahun 2024 hingga triwulan I tahun 2025 selalu berkontraksi secara *year on year*. Dari sisi sektoral, kinerja sektor pariwisata (LU perdagangan besar dan eceran, LU transportasi dan pergudangan, dan LU penyediaan akomodasi dan makan minum) diperkirakan akan meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,45% - 4,95% (y-o-y) lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 sebesar 4,66%, dan berada pada kisaran yang relatif lebih rendah pada periode yang sama tahun 2024 sebesar 4,71% (y-o-y).

Gambar 3.4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025



Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2025

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,89% - 5,52% (y-o-y) di tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,36% (y-o-y). Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2025 didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di semua sektor. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, konsumsi pemerintah dan permintaan impor.

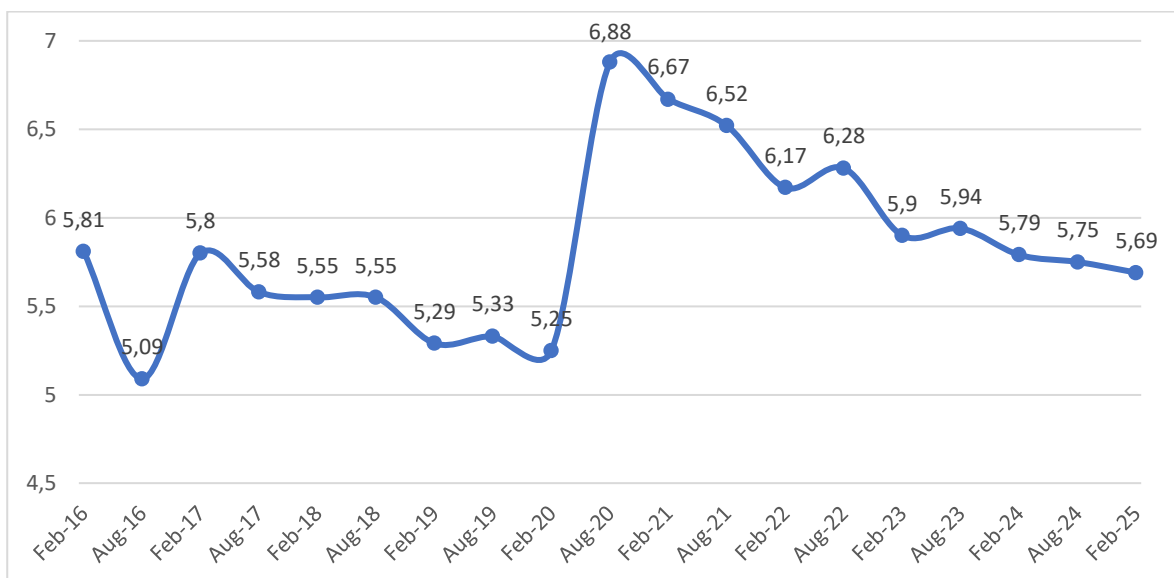
KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, telah ditetapkan target TPT untuk tahun 2025 adalah 5,55%. Sementara data terakhir dalam Berita Resmi Statistik (BRS) menunjukkan bahwa pada Bulan Februari 2025 TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 5,69% berkurang bila dibandingkan dengan Bulan Februari 2024 pada angka 5,79%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 yang meningkatkan jumlah pengangguran baru yang terlihat pada angka pengangguran bulan Agustus 2020 yang mencapai 6,88 persen,

mampu ditekan hingga turun ke angka 6,17 persen pada bulan Februari 2022 hingga turun ke angka 5,90 persen pada Bulan Februari 2023 dan terus berkurang ke angka 5,79% di bulan Februari 2024 dan ke angka 5,69% di bulan Februari 2025. Namun angka pengangguran ini relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran sebelum pandemi yang berada pada kisaran 5,25 persen. Perkembangan angka TPT di Provinsi Sumatera Barat terlihat pada gambar berikut.

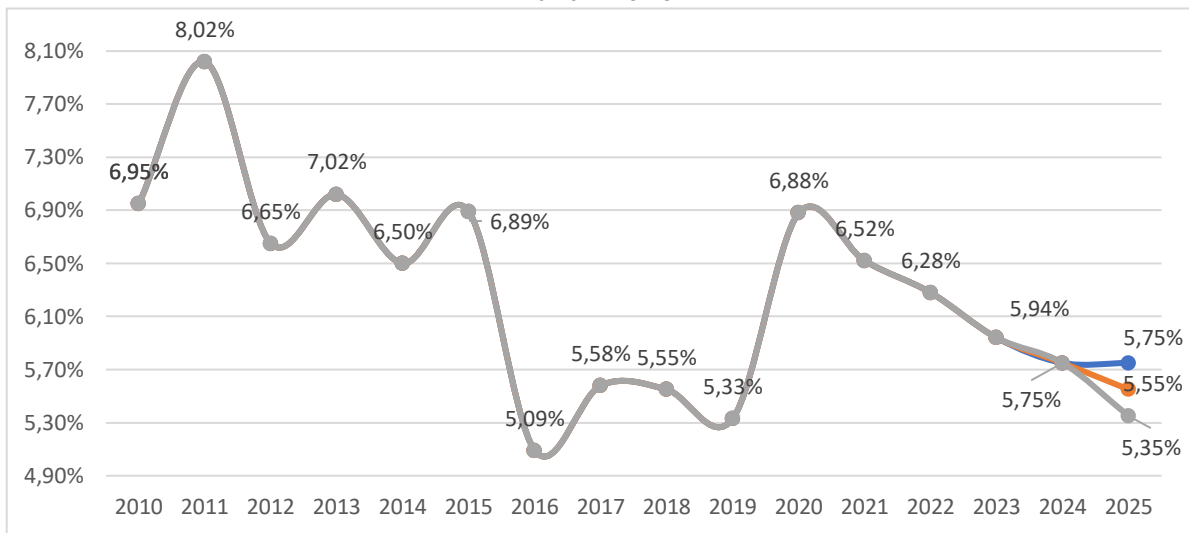
Gambar 3.5. Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Persiapan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. Perbaikan ekonomi masyarakat akan menurunkan angka pengangguran. Angka TPT Sumatera Barat yang pada Bulan Februari 2025 berada pada angka 5,69% diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya beberapa lapangan usaha akibat pandemi. Perbaikan ini diprediksi sesuai dengan target awal dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Secara keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 diprediksi berada pada kisaran 5,55% - 5,75% berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.

Gambar 3.6. Perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025

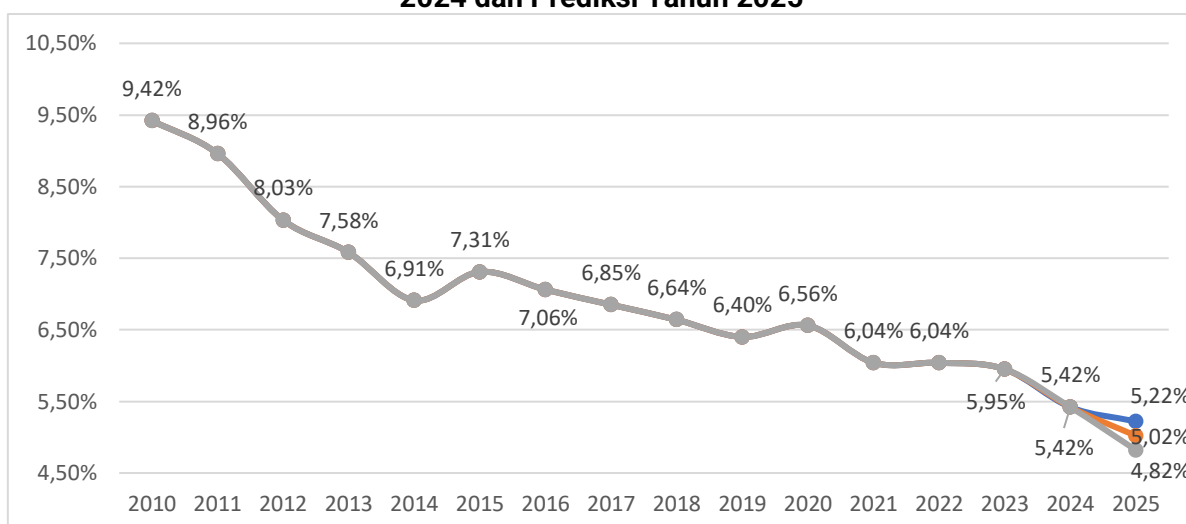


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisa Bappeda, 2025

KEMISKINAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, telah ditetapkan target Tingkat Kemiskinan untuk tahun 2025 adalah 5,65%. Pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin yang naik dari 344,23 ribu pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu pada bulan September 2020. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah membuat jumlah penduduk miskin terus berkurang hingga menjadi 343,82 ribu jiwa pada Bulan September 2022 dan menjadi 340,37 ribu jiwa pada bulan Maret tahun 2023. Walaupun angka kemiskinan di bulan Maret 2024 meningkat menjadi 5,97% dengan jumlah penduduk miskin 345,73 ribu, namun kondisi Bulan September 2024 kembali membaik ke posisi 5,42% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 315,43 ribu jiwa. Angka ini diprediksi akan terus membaik seiring dengan kembali pulihnya perekonomian di beberapa lapangan usaha. Secara keseluruhan target penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2025 diprediksi akan tercapai berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah.

Gambar 3.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 dan Prediksi Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Hasil Analisa Bappeda, 2024

Berdasarkan perkembangan capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Triwulan I Tahun 2025 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, maka terdapat penyesuaian proyeksi target untuk ketiga indikator makro pembangunan tersebut untuk tahun 2025 jika dibandingkan dengan target pada RKPD Tahun 2025 yang juga menyesuaikan dengan target yang dimandatkan kepada Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025- 2029 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2025			KET
		RKPD	RANCANGAN RPJMD 2025-2029	PERUBAHAN RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,4	4,89 – 5,52	Disesuaikan
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,10	-	-	Tetap
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29	58,32	62,29	Tetap
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,37 - 5,76	5,35 – 5,75	Disesuaikan
5	IPM	77,41	77,19	77,41	Tetap
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,79	74,26	74,79	Tetap
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	14,39	14,13	Tetap
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	9,91	9,47	Tetap

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2025			KET
		RKPD	RANCANGAN RPJMD 2025-2029	PERUBAHAN RKPD	
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.719	-	11.719	Tetap
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65	4,5- 5,1	4,82 – 5,22	Disesuaikan
7	Gini Rasio	0,289	0,274	0,289	Tetap

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Adanya perbedaan asumsi yang digunakan dalam dokumen RKPD, APBD, dan Perubahan RKPD merupakan hal yang tidak dapat dihindari, mengingat masing-masing dokumen disusun pada waktu dan kondisi yang berbeda. Asumsi makro dan struktur keuangan, seperti proyeksi pendapatan, belanja, transfer pusat, dan pembiayaan, disesuaikan dengan informasi dan data terakhir yang tersedia saat dokumen disusun. Dengan demikian, perbedaan asumsi antara RKPD, APBD, dan Perubahan RKPD mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga fleksibilitas, akurasi, dan relevansi perencanaan terhadap kondisi faktual dan kebijakan terbaru.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 juga sudah mendukung terhadap tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 ini. Beberapa tema atau isu Pembangunan tersebut adalah :

- 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
- 2) Program Makan Bepgizi Gratis (MBG)
- 3) Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem
- 4) Pengendalian Inflasi di daerah
- 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- 6) Dukungan swasembada pangan
- 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah, akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya setiap program dan kegiatan pembangunan yang sudah di rencanakan oleh pemerintah daerah. Untuk menyikapi hal ini diperlukan berbagai upaya kebijakan agar pendapatan bisa meningkat dan likuiditas keuangan daerah tetap terjamin sehingga kegiatan pembanguan daerah dapat terus berjalan. Kebijakan sebagaimana dimaksud adalah kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2025 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi.
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
4. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola

Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

6. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
7. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

Tabel 3.2. Proyeksi Target Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (juta rupiah)

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (RP)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
PENDAPATAN DAERAH			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.832.388.541.948	2.832.388.541.948	0
Pajak Daerah	2.114.428.147.371	2.114.428.147.371	0
Retribusi Daerah	418.152.450.667	418.152.450.667	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	144.997.550.509	144.997.550.509	0
Lain-lain PAD yang Sah	154.810.393.401	154.810.393.401	0
Pendapatan Transfer	3.423.868.351.000	3.292.433.711.000	(131.434.640.000)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.423.868.351.000	3.283.632.411.000	(140.235.940.000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	8.801.300.000	8.801.300.000
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.875.200.000	17.875.200.000	0
Pendapatan Hibah	17.875.200.000	17.875.200.000	0
JUMLAH PENDAPATAN	6.274.132.092.948	6.142.697.452.948	(131.434.640.000)

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan penjelasan yakni :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, pada perubahan tahun 2024, kebijakan Belanja yang dilakukan antara lain :

- a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara rinci diperuntukkan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan komunikasi insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan pajak dan Biaya insentif pemungutan retribusi.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan pengalokasikan Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang disesuaikan dengan 8 (delapan) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Selain mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan sesuai dengan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, juga diarahkan dengan mempedomani Asta Cita yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan.

c. Belanja Hibah

Adapun dengan kebijakan Belanja hibah pada Perubahan Tahun 2025 antara lain:

- Penganggaran Belanja Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - Belanja hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - Peruntukan belanja hibah diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
 - Belanja hibah dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Badan/Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
 - Belanja Hibah BOS
 - Belanja Bantuan Keuangan (Hibah) kepada partai politik merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, dan berpedoman pada PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 tahun 2018.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang lebih diarahkan juga untuk mendukung pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk juga mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung-gedung strategis daerah.
 3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
 4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Tabel 3.3. Proyeksi Target Perubahan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
BELANJA			
BELANJA OPERASI	4.651.549.209.669	4.572.286.330.160	(79.262.879.508)
Belanja Pegawai	2.645.455.313.089	2.761.162.168.143	115.706.855.054
Belanja Barang dan Jasa	1.844.469.337.396	1.654.650.247.413	(189.819.089.982)
Belanja Subsidi	6.500.000.000	2.925.000.000	(3.575.000.000)
Belanja Hibah	155.124.559.184	153.548.914.604	(1.575.644.580)
BELANJA MODAL	858.159.447.578	759.629.741.994	(98.529.705.584)
Belanja Modal Tanah	17.017.254.528	17.324.322.565	307.068.037
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.992.404.798	191.997.986.978	(19.994.417.820)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.710.598.059	161.008.859.685	(9.701.738.374)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	413.202.299.883	344.322.408.956	(68.879.890.927)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.236.890.310	44.976.163.810	(260.726.500)
BELANJA TIDAK TERDUGA	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	(159.515.305,20)
Belanja Tidak Terduga	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	(159.515.305,20)
BELANJA TRANSFER	891.337.199.489	1.023.283.065.887	131.945.866.398
Belanja Bagi Hasil	860.837.199.489	989.973.567.187	129.136.367.698
Belanja Bantuan Keuangan	30.500.000.000	33.309.498.700	2.809.498.700
Jumlah Belanja	6.438.050.092.948	6.392.043.858.948	(46.006.234.000)
Total Surplus/(Defisi)	-163.918.000.000	-249.346.406.000	(85.428.406.000)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BUMD, dan pada Bank Nagari. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah:

- Mengakomodir penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2025).

- b. Terhadap penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi car ratio perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya.
- c. Untuk pos pembayaran pokok hutang tahun depan dihindari sehingga tidak perlu dianggarkan.

Proyeksi/target pada Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Proyeksi Target Perubahan Penerimaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (dalam Rp. Ribu)

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (RP)
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.918.000.000	280.346.406.000	85.428.406.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	194.918.000.000	280.346.406.000	85.428.406.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Daerah	31.000.000.000	31.000.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000.000	31.000.000.000	0
Pembiayaan Netto	163.918.000.000	249.346.406.000	85.428.406.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	0	0

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2025 terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Presiden RI tanggal 20 Februari 2025 serta mengakomodir Prioritas Nasional yang termuat dalam Astacita yakni a) Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan; b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; d) Pengendalian inflasi di daerah; e) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; f) Dukungan swasembada pangan; dan g) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 hingga triwulan I serta evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Program maka upaya yang dilakukan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah memantapkan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah *on the track* mencapai target-target pembangunan, mengefektifkan pelaksanaan sub kegiatan yang dinilai masih rendah capaian fisik dan keuangannya serta mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan hingga akhir tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2025-2030 serta Asta Cita dengan tetap memperhatikan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Untuk itu, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah memperhatikan :

1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
2. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030 sesuai dengan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang di fokuskan pada pencapaian 8 (delapan) Misi yang diinternalisasi menjadi 8 (delapan) prioritas Pembangunan daerah yakni Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas, Lumbung Pangan nasional dan Ekonomi Berkelanjutan, Nagari/Desa sebagai basis kemajuan, Sumatera Barat

pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat, Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana, membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan local melalui dukungan keluarga yang berkualitas, Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM dan Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan public yang efektif.

3. Mendukung prioritas nasional yang termuat dalam Astacita RPJMN Tahun 2025-2029 yakni Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem; Pengendalian inflasi di daerah; Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; Dukungan swasembada pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **Tema RKP Tahun 2025** adalah :

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dengan target Tahun 2025

1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran (%) sebesar 4,5 – 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia (nilai) sebesar 0,56
6. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 38,6%
7. Nilai Tukar Petani (kumulatif) sebesar 113 – 115
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) sebesar 104 - 105

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel berikut.

Dalam rangkaian pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, maka dengan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020- 2024 untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, (3) peningkatan kesempatan kerja, dan (4) perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional, maka ditetapkan target sasaran untuk masing-masing regional dan Provinsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Regional dan Provinsi Tahun 2025

INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PADA RKP 2025			TARGET SUMBAR PADA RPJMN
	NASIONAL	PULAU SUMATERA	SUMATERA BARAT	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	4,8 – 5,1	4,69 – 5,19	6,4
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	-	4,50 – 5,10	4,50 – 5,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,5 – 5,0	4,2 - 4,7	5,37 – 5,76	5,37 – 5,76
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	-	0,57	0,59
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	-	0,274 – 0,279	0,274 – 0,279
Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	-	52,62	52,62

Sumber Data : RKP 2025 dan RPJMN 2028-2029

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan yng disusun pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu kepada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani, Yang Maju dan Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Racangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan

pembangunan daerah diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI : SUMATERA BARAT MADANI, YANG MAJU DAN BERKEADILAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2. Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3. Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat

VISI : SUMATERA BARAT MADANI, YANG MAJU DAN BERKEADILAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	berbasis keluarga berkualitas	Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik
		Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Misi Pertama, **“Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas”** bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi Kedua, **“Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan”** terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi Ketiga, **“Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan”** yang menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi strategi penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa.

Misi Keempat, **“Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat”** merupakan misi yang bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UMKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi Kelima, **“Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana”** yang menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan

Misi Keenam, **“Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal”** yang menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi Ketujuh, **“Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM”**, yang bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi Kedelapan, **“Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”**, yang bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan public.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rancangan RPJMD, dan dengan memperhatikan dukungan terhadap Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni:

**“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Produktifitas Sektor Strategis ekonomi tetap difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.
2. Akselerasi produktivitas sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan keamanan pangan di daerah serta mendukung kemandirian pangan nasional. Akselerasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang dengan meningkatkan

produksi padi dan jagung serta tanaman strategis lainnya, sehingga dengan adanya peningkatan produksi pangan akan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, dan menjaga ketahanan pangan dimasa depan.

3. Akselerasi produktivitas sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan kompetitif industri lokal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan akses ke pasar dan sumber daya.
4. Akselerasi produktivitas sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) serta wisatawan domestik (wisnus) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pariwisata guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan ini, perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan dan kreativitas pariwisata, serta meningkatkan destinasi pariwisata berkualitas dan mengamplifikasi dampak pelaksanaan event lokal, nasional dan internasional sehingga diharapkan sektor pariwisata mampu menopang secara signifikan peningkatan kinerja perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di masa depan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada :
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja
 - b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat hingga akhir Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2025			KET
		RKPD	RANCANGAN RPJMD 2025-2029	PERUBAHAN RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,4	4,90 – 5,30	Disesuaikan
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,10	-	-	Tetap
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29	58,32	62,29	Tetap

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2025			KET
		RKPD	RANCANGAN RPJMD 2025-2029	PERUBAHAN RKPD	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,37 - 5,76	5,6 – 5,8	Disesuaikan
5	IPM	77,41	77,19	77,41	Tetap
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,79	74,26	74,79	Tetap
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	14,39	14,13	Tetap
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,47	9,91	9,47	Tetap
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.719	-	11.719	Tetap
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65	4,5- 5,1	5,45 – 5,85	Disesuaikan
7	Gini Rasio	0,289	0,274	0,289	Tetap

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD Tahun 2025 dan memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2024, perkiraan capaian hingga akhir tahun 2025, serta perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat
3. Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2025-2030 yang tertuang dalam rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
4. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024 dan evaluasi tahun berjalan (2025).

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional (PN). Adapaun arah kebijakan masing-masing Prioritas Nasional (PN) tahun 2025 yakni :

1. PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia

2. PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Prioritas Nasional 2 untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Prioritas Nasional 3 untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Prioritas Nasional 4 untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

6. PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga

arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

7. PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

8. PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Serta Belanja Bersifat Mengikat Tahun 2025

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial, yang kemudian dalam target serta pelaksanaannya berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diatur lebih detail oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian secara lebih teknis pengaturan perhitungan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diatur dengan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012²¹ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bahwa Prioritas Pertama penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :

- a. Belanja wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dalam hal ini adalah pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial
- b. Belanja mengikat yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya dan penjabaran lebih detail bahwa belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan target serta mutu minimal layanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
Bidang Pendidikan				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun
Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
Bidang Pekerjaan Umum				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun
Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
		rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	Setiap tahun

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni :

1. Bidang Pendidikan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum

per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

- e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus
- f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
 - Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- Kulit tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

2. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
- Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darurat dengan melakukan :
 - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
 - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
- Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
 - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
 - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
 - melakukan penyuluhan
 - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
 - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
 - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
 - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.

Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni : pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.
- b. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
 - pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada
 - Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti

dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

6. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 namun hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya (2024) berdasarkan pada pencapaian sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 tetap digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang berkelanjutan dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode tahun 2025-2029. Sehingga terdapat sedikit perbedaan prioritas pembangunan pada RKPD 2025 (dimana sebelumnya terdapat 7 prioritas pembangunan) dengan Perubahan RKPD 2025 (terdapat 8 prioritas pembangunan).

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan Visi dan Misi pada rancangan RPJMD tahun 2025-2029 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2025-2029 serta menuju Visi RPJPD Tahun 2045 yakni Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 akan tetap difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni **“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Adapun Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yang telah megacu kepada rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan penterjemahan secara langsung dari 8 (delapan) Misi pada rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan pertama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam hal nilai-nilai budaya, religiusitas, serta semangat belajar masyarakatnya. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius yang perlu diatasi, seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK, serta kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Di sisi kesehatan, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota. Angka kematian ibu dan bayi yang belum sepenuhnya terkendali menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan ibu-anak masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun mutu layanan. Selain itu, beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes juga meningkat, menambah tantangan sistem kesehatan daerah.

Untuk itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi terhadap dunia kerja, serta kesehatan yang tidak hanya kuratif tetapi juga promotif dan preventif.

Sehingga pelaksanaan prioritas Pembangunan pertama ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar target angka statistik pembangunan manusia, tetapi lebih dari itu, diarahkan pada pembangunan karakter, kecerdasan, kesehatan mental dan fisik masyarakat Sumatera Barat agar menjadi manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua kunci utama dalam membuka masa depan masyarakat yang lebih cerah, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk melaksanakannya dengan dukungan semua elemen.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19
	Indeks Modal Manusia	0,58
Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91 Tahun
	Harapan Lama Sekolah	14,39 Tahun
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26 Tahun
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130 per 100.000 KH
	Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,5%

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
3. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
4. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
5. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialisasi seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
6. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
8. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pemenuhan Upaya	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	%	80	Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000	190	Dinas Kesehatan
	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)	daerah	2	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA	kabupaten/kota	8	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kabupaten/kota	18	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	%	39	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	%	98	Dinas Kesehatan
	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	kabupaten/kota	8,6	Dinas Kesehatan
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	%	85	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi	%	90,79	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit	%	85	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	95	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Upaya Kesehatan Masyarakat				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Akreditasi Institusi pelatihan	strata	A	Dinas Kesehatan
	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	580	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	%	95	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Saanin
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	%	50	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	%	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	kabupaten/kota	17	Dinas Kesehatan
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	Dinas Sosial
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali emas dalam event nasional	medali	29	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan	%	1	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	295,31	Dinas Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	84,5	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	28	Dinas Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	84,5	Dinas Pangan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dasawisma Mandiri	Dasawisma	12.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah KAN yang aktif	lembaga adat	500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah LPM Mandiri	LPM	37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Jumlah Posyandu Mandiri	Posyandu	2.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	%	1,62	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah	%	97,7	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	73,65	Dinas Pendidikan
	APK SLB	%	56,57	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	51	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	%	80	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	%	66	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	dokumen	12	Dinas Pendidikan
	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	Orang	24	Dinas Pendidikan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase serapan tenaga kerja	%	36,99	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	12,98	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan	%	80	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	peraturan perundang-undangan			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	83,05 / 3,45	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	87,27	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	80	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	62,5	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase SKPD yang terinovatif	%	40	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	12	Badan Penelitian Dan Pengembangan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

2. Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan

petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

Pelaksanaan prioritas Pembangunan 2, akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan ketahanan pangan Sumatera Barat dalam jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Prioritas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis data, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan strategis antar level pemerintahan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	84,01
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4%
Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rp. 83,628 ribu
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,84%
Sasaran 2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	68,69
	Indeks Ekonomi Biru	25,19
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613
	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,7%

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
2. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
3. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
4. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
7. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko

perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

Pencapaian sasaran Prioritas Prioritas Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Program Pembangunan mendukung Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	64,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	25.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan	%	1,11	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	produksi perikanan tangkap			
	Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	1.768	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	230.081	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,78	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	295.226	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	19	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	85	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	8,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	20.832	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	42,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	%	1,62	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	5,19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.507,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5,2	Biro Perekonomian
	Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	Biro Perekonomian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	62,5	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Persentase SKPD yang terinovatif	%	40	Badan Penelitian dan Pengembangan
	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	12	Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	295,31	Dinas Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	84,5	Dinas Pangan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	28	Dinas Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	84,5	Dinas Pangan
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	10	Dinas Kehutanan
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai	3	Dinas Kehutanan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3. Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi. Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosial-ekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan.

Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Nagari/desa harus difasilitasi menjadi “basis kemajuan”, yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun warganya.

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari—kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

Sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang mengejar status administratif “desa maju” atau “desa mandiri”, tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Desa Mandiri (%)	7,83
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	39,22
Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 - 5,76
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5- 5,1
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29

	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
5. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.
6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasim, dengan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program *open data nagari* untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.

8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

Pencapaian sasaran Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10. Program Pembangunan mendukung Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2025

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,04	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	58,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	25.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	1,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah sarana penangkapan ikan	unit	1.739	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah prasarana pelabuhan perikanan	unit	3	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	dokumen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	227.546	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	3,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	284.467	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB	unit	60	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan	kab/kota	19	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi perikanan budidaya laut	ton	79	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	86	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	7,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	19.280	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	41,6	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Daging	%	1,57	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Peternakan	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	4,94	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,57	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	8	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
17	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20	Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	60,12	Dinas Kehutanan
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
21	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.478,4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5,2	Biro Perekonomian
		Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	Biro Perekonomian

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
25	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	%	62,5	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase SKPD yang terinovatif	%	40	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	jumlah	10	Badan Penelitian dan Pengembangan
26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan (beras)	Kg/Kap/Tahun	294,15	Dinas Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	%	84	Dinas Pangan
27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	27	Dinas Pangan
28	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan masyarakat	%	84	Dinas Pangan
29	Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	60,12	Dinas Kehutanan
		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
30	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	10	Dinas Kehutanan
31	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
32	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	6,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	3,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
35	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
36	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
377	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
38	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
39	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
41	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
43	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
44	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
45	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
46	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	18	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA			PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
47	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	8,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	20.832	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	42,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
48	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
49	Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
50	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
51	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
52	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
53	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
54	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

4. Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini didukung

oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri.

Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah. Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat. Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih produktif, berorientasi ekspor, berbasis inovasi, dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Sehingga Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola sumber daya lokalnya menjadi kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi. Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	3,58
	Tingkat Inflasi (%)	2,8 - 3,6
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79
Sasaran 1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	8,46 - 8,53
Sasaran 2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 3 Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
6. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan kerja sama

dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.

7. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
8. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau "Minang Halal Hub" di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.

Pencapaian sasaran Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12. Program Pembangunan mendukung Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	6,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	juta US\$	1.507,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36,34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	3,95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	67	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	orang	1.650	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	koperasi	80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan	%	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah wirausaha muda baru	orang	348	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	%	8,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	ton	20.832	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan	Kg/kap/th	42,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	10	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi	%	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar	50.000	Dinas Kehutanan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPU	%	78	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	%	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pernyataan Minat	dokumen pernyataan minat	5	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Rasio	83,05 / 3,45	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	%	87,27	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Rp (triliun)	6,7	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi	%	80	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

5. Prioritas Pembangunan 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana.

Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang “pembangunan fisik,” tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan.

Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar. Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip “*no one left behind*” menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau

daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95
	Indeks Kinerja Infrastruktur	
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	52,62
Sasaran 1 Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (kumulatif)	18,08
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) (tahunan)	28,05
	Indeks Ketahanan Daerah	
Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,08
Sasaran 3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	2,95

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.

2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
3. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
4. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
6. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
7. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
8. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lain Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian sasaran Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	43,65	Dinas Perhubungan
	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi	Rekomendasi	1	Dinas Perhubungan
	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	Trayek	4	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan	dokumen	1	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	99,8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	58,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	75,04	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	71,79	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	%	8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun	%	43,65	Dinas Perhubungan
	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas	%	2,45	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	64,71	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem	batang	25.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	M2	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0,54	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Program Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	indeks	59,69	Dinas Kehutanan
	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit	20	Dinas Kehutanan
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi	10	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	%	83	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	70	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	%	51,7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah TPA Regional yang dibangun	lokasi	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan air limbah regional	%	88	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah drainase kewenangan provinsi yang dikelola	Km	25	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun	unit	3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	kawasan	2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih	%	25,62	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria	%	25	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang telah difasilitasi dapat dimanfaatkan secara optimal	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	89	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan	%	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	absentee yang dapat ditindaklanjuti			
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	%	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah Kosong yang difasilitasi dapat dimanfaatkan sesuai fungsi/peruntukannya	%	85	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan	%	75	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

6. Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif. Nilai ini pula yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru. Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial. Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

Pembangunan Sumatera Barat tidak hanya tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang jiwa masyarakatnya. Dengan memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya, serta menempatkan keluarga sebagai pilar sosial yang utama, Provinsi Sumatera Barat menegaskan

bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mencerdaskan, memuliakan, dan menyejahterakan masyarakat secara utuh, lahir dan batin. Melalui komitmen bersama dan kolaborasi antar elemen masyarakat, kita akan membangun Sumatera Barat yang harmonis, religius, dan penuh martabat budaya.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54
Sasaran 1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 - 60,65
Sasaran 2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390
Sasaran 3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 :

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal,

kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program “Masjid Ramah Anak dan Remaja” serta “Surau Digital” akan menjadi inovasi ke depan.

4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program “Sekolah Orang Tua,” konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Pencapaian sasaran Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16. Program Pembangunan mendukung Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Pendidikan	APK Pendidikan Menengah	%	97,7	Dinas Pendidikan
	APM Pendidikan Menengah	%	73,65	Dinas Pendidikan
	APK SLB	%	56,57	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	51	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti	%	85	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	83	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	63,16	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	orang	25	Dinas Sosial
	Persentase Data Fakir Miskin yang valid	%	100	Dinas Sosial
	Persentase Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif	persen	50	Dinas Sosial
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	23	Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	6	Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	26	Dinas Kebudayaan
	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	15	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	15	Dinas Kebudayaan

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	45000	Dinas Kebudayaan
Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	dokumen	6	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	13	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	nilai	2,74	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	nilai	3,13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	nilai	3,04	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	15	Dinas Kebudayaan
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	45000	Dinas Kebudayaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP	%	1,72	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di pengambil kebijakan	%	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	indeks	71,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)	%	93,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)	Kabupaten /Kota	6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	%	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya	%	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Prevalensi KB	%	56,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks pembangunan keluarga	indeks	65,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

7. Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM

Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga kekayaan tradisi dan seni Minangkabau menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas. Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43
Sasaran 1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang)	21.104.516
Sasaran 2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11
	Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisata Berbasis Kompetensi dan Keramahtamahan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program “Hospitality for Nagari Tourism” akan dilaksanakan di desa wisata.
3. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.
4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
6. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.
7. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
8. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup

penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

Pencapaian sasaran Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	%	58,28	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	%	75,04	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	71,79	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	%	81	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang	kali	15	Dinas Pariwisata
	Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya	DTW	19	Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	%	7	Dinas Pariwisata
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	%	7,5	Dinas Pariwisata
	Rata-rata lama tinggal wisman	hari	3,27	Dinas Pariwisata
	Rata-rata lama tinggal wisnus	hari	1,82	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Jumlah SDM	Orang	596	Dinas Pariwisata

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata yang bersertifikat			
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	produk	130	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	4,2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI	produk	200	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat	Orang	596	Dinas Pariwisata
	Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	Dinas Pariwisata
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

8. Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama.

Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada

transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KNERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	73,16
Sasaran 1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,9
	Indeks Pembangunan TIK	6,1
	Indeks Reformasi Hukum	70
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,84
Sasaran 3 Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.
2. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.

3. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan *Public Service Super App* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.
4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
5. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, *whistleblower system*, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama dengan KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan *data-driven planning*, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
8. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum tergali, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.
9. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.

10. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
11. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara Kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.
12. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

Pencapaian sasaran Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif, dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18. Program Pembangunan mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif Tahun 2025

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5.720	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	20	Biro Organisasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	14	Biro Organisasi
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13	Biro Organisasi
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	dokumen	1	Biro Pemerintahan
	Persentase fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah/Luar Negeri/Pihak ketiga	%	100	Biro Pemerintahan
	Persentase fasilitasi usulan penataan Nagari/desa	%	100	Biro Pemerintahan
	Persentase usulan gubernur tentang penegasan batas daerah	%	95	Biro Pemerintahan
	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi SPM kepada pengambilan kebijakan	dokumen	1	Biro Pemerintahan
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	%	90	Biro Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%	5,2	Biro Perekonomian
	Jumlah kebijakan perekonomian yang dikoordinasikan	kebijakan	7	Biro Perekonomian
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan dan LKPD	tepat waktu	tepat waktu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	7,2	Badan Pendapatan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	80	Inspektorat Daerah Provinsi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	85	Inspektorat Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Skala 1-5)	indeks	3,5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	90	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah	%	55	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	Biro Organisasi
	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	%	100	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	Perangkat Daerah	20	Biro Organisasi
	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Perangkat Daerah	14	Biro Organisasi
	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	13	Biro Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas Sub Kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Kepegawaian Daerah	Nilai penerapan sistem Merit	Nilai	350	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan	%	89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi	JP/Tahun	24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

4.2.4. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, terdapat beberapa program unggulan yang mendukung pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan telah direncanakan, Adapun Program unggulan tersebut antara lain yakni :

4.2.4.1. Prioritas Pembangunan 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di era global. Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam menciptakan generasi yang terampil, berkarakter, dan inovatif.

Selain itu, kesehatan yang optimal merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia yang produktif dan berdaya saing. Akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan berkualitas merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menempatkan sektor kesehatan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan manusia. Oleh karena itu, terdapat beberapa program unggulan dalam bidang pendidikan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut.

1. Program Unggulan Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak di seluruh wilayah, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerataan akses pendidikan tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan penguatan tata kelola lembaga pendidikan, melalui pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerataan distribusi dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan dan tata kelola satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan yang ingin dicapai, antara lain yakni meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan, menurunkannya kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi, meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik, terwujudnya satuan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.

2. Program Unggulan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi serta Tidak Mampu

Program ini dimaksudkan sebagai bentuk afirmasi dan dukungan nyata bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun memiliki semangat dan potensi untuk meraih prestasi. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri.

Adapun ruang lingkup intervensi yang dilakukan antara lain yakni penyediaan beasiswa penuh dan parsial bagi siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, kemitraan dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan beasiswa, penguatan mekanisme seleksi dan pemantauan penerima beasiswa secara transparan dan akuntabel.

Tujuan yang ingin dicapai, antara lain yakni meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi dari kelompok masyarakat miskin, terciptanya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat, terwujudnya generasi muda yang berprestasi, berintegritas, dan menjadi agen perubahan di masa depan serta berkurangnya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi.

3. Program Unggulan Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular

Program ini berorientasi pada upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Barat, di mana seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan terjangkau. Fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan peran puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta upaya pencegahan stunting dan pengendalian penyakit menular yang masih menjadi ancaman utama. Intervensi pada program unggulan ini antara lain yakni perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan kapasitas layanan Puskesmas dan Posyandu di daerah terpencil, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan distribusi tenaga medis secara merata, kampanye edukasi gizi dan intervensi sensitif-spesifik untuk pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV, dan DBD melalui deteksi dini dan pengobatan tuntas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni tercapainya cakupan UHC di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, menurunnya prevalensi stunting sesuai target nasional (<14%), meningkatnya akses layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, meningkatnya harapan hidup dan produktivitas penduduk Sumatera Barat serta terkendalinya penyebaran penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif.

4. Program Unggulan Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Masjid serta Pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Program unggulan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok pekerja informal dan tokoh masyarakat keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, namun selama ini belum terlayani oleh sistem jaminan sosial formal. Melalui penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan kelompok ini mendapatkan perlindungan dasar dari risiko kerja, kecelakaan, dan kematian. Adapun program unggulan ini mencakup pendaftaran dan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk garin, imam masjid, guru mengaji, petani, dan nelayan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, MUI, dan organisasi profesi keagamaan serta kelompok tani/nelayan, sosialisasi pentingnya perlindungan sosial dan manfaat program jaminan kerja serta monitoring dan evaluasi keberlangsungan kepesertaan dan manfaat yang diterima.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni tersedianya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal, terjaminnya kesejahteraan dan ketenangan para pengabdikan keagamaan dan pelaku ekonomi rakyat, menurunnya risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan tetap serta meningkatnya keadilan sosial dan jaminan perlindungan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.4.2. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan

Pangan dan ekonomi merupakan dua sektor yang saling menopang dan menjadi penggerak utama kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sumatera Barat sebagai salah satu daerah agraris, penguatan sektor pertanian, pemanfaatan potensi kehutanan sosial, serta transisi menuju energi baru terbarukan menjadi fokus strategis dalam membangun ketahanan pangan dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Untuk itu, ditetapkan tiga program unggulan utama yang saling terintegrasi. Ketiga program prioritas ini saling menguatkan dalam menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen anggaran, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta transisi energi bersih, Sumatera Barat diarahkan menjadi kawasan yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

1. Program Unggulan Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan sumber utama ketahanan pangan. Dengan mengalokasikan minimal 10% anggaran APBD ke sektor ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petani melalui skema asuransi. Alokasi anggaran 10% diarahkan untuk mendukung pembiayaan untuk sarana produksi pertanian, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan rantai pasok melalui pembangunan industri pengolahan hasil pertanian (hilirisasi), penyediaan akses pasar dan pembentukan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan serta implementasi asuransi usaha tani (AUTP) dan asuransi peternakan untuk melindungi petani dari gagal panen.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani, berkurangnya kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga, terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan daerah serta tumbuhnya agroindustri lokal yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah.

2. Program Unggulan Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan

Perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dan produktif. Pendayagunaan skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Program unggulan ini mencakup intervensi antara lain Fasilitasi percepatan legalisasi dan pemetaan wilayah perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dalam pengelolaan usaha produktif (ekowisata, agroforestry, HHBK), penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha, kolaborasi multipihak untuk penguatan kelembagaan dan akses pasar.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program unggulan ini antara lain yakni terbukanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, terjaganya fungsi ekologis hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, munculnya model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan penguatan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara lestari.

3. Program Unggulan Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Transisi energi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya, mikrohidro, biomassa, dan angin yang perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor produksi secara berkelanjutan. Program unggulan ini mencakup pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala rumah tangga dan komunitas, pemanfaatan mikrohidro di daerah terpencil dan kawasan pertanian, insentif bagi industri dan UMKM yang menggunakan EBT dalam proses produksinya serta Edukasi publik dan kemitraan investasi untuk pengembangan ekosistem energi bersih.

Tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni menurunnya ketergantungan pada energi fosil dan impor BBM, terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, terciptanya model ekonomi hijau yang efisien, inovatif, dan inklusif serta kontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

4.2.4.3. Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Penguatan nagari/desa sebagai pusat pertumbuhan baru merupakan strategi utama dalam mengatasi ketimpangan wilayah, mendorong pembangunan dari akar rumput, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Nagari harus menjadi ruang tumbuhnya inovasi, kreativitas, wirausaha, dan tata kehidupan masyarakat yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejumlah program prioritas diarahkan untuk memperkuat kapasitas nagari sebagai basis kemajuan.

Program-program unggulan ini dirancang untuk memperkuat nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, generasi muda, BUMNag, dan pelestarian lingkungan, maka nagari tidak hanya menjadi basis pertahanan sosial, tetapi juga menjadi pilar utama kemajuan daerah secara menyeluruh.

1. Program Unggulan Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub)

Program ini bertujuan untuk menghidupkan ruang-ruang publik kreatif di nagari sebagai wadah inovasi, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Fasilitas seperti internet gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik UMKM, dan Teras Nagari dijadikan simpul aktivitas masyarakat dalam membangun wirausaha dan ekspresi budaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni tumbuhnya wirausaha muda dan UMKM berbasis potensi lokal, meningkatnya literasi digital dan akses informasi, terciptanya ruang produktif, edukatif, dan partisipatif di nagari serta meningkatnya jejaring kolaborasi sosial dan ekonomi antarwarga.

2. Program Unggulan Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Potensial

Program ini mendukung pelibatan langsung masyarakat nagari dalam pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya, alam, dan sejarah lokal. Fokusnya adalah pada pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dengan prinsip pelestarian dan keberlanjutan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata, terpeliharanya nilai budaya dan kelestarian lingkungan, terwujudnya nagari wisata mandiri yang inklusif, terbukanya lapangan kerja baru bagi generasi muda desa.

3. Program Unggulan Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan

Generasi muda merupakan agen perubahan di nagari. Program ini menyediakan sarana olahraga, ruang kreatif, pelatihan kepemimpinan, dan pemberdayaan organisasi kepemudaan untuk mengarahkan energi positif kaum muda pada kegiatan produktif dan sosial.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari, terbentuknya karakter kepemimpinan dan kewirausahaan sosial, berkurangnya kenakalan remaja dan perilaku destruktif dan tumbuhnya generasi muda yang inovatif dan cinta nagari.

4. Program Unggulan Memfasilitasi dan Mendorong BUMNag sebagai Penggerak Ekonomi Nagari

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah instrumen utama dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif. Program ini mendorong penguatan kelembagaan, profesionalisme, serta pengembangan unit usaha yang menjawab kebutuhan pasar dan

masyarakat. Dengan tujuan yang Ingin dicapai yakni terwujudnya kemandirian ekonomi nagari, tersedianya lapangan kerja lokal, tumbuhnya unit usaha produktif dan berkelanjutan serta terjadi peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) secara signifikan.

5. Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan

Perumahan yang layak dan ramah lingkungan menjadi bagian dari kualitas hidup masyarakat nagari. Program ini mendorong penyediaan kawasan hunian yang aman, sehat, terjangkau, dan berbasis tata ruang berkelanjutan. Adapun tujuan yang Ingin dicapai yakni terpenuhinya hak dasar masyarakat atas hunian layak, meningkatnya kesadaran terhadap perumahan hijau dan adaptif, tertatanya lingkungan hidup yang sehat dan estetis di nagari serta terintegrasinya kawasan hunian dengan akses sosial ekonomi.

6. Program unggulan Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi pondasi dasar kehidupan masyarakat yang berkualitas. Program ini memberikan edukasi tentang sanitasi layak, air bersih, serta pemeliharaan lingkungan dalam keseharian masyarakat nagari. Adapun tujuan yang Ingin dicapai antara lain yakni menurunnya kejadian penyakit berbasis lingkungan, tumbuhnya kesadaran dan perubahan perilaku hidup bersih, terwujudnya lingkungan nagari yang sehat dan tertata serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

7. Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (Circular Economy)

Program ini mengadopsi prinsip circular economy, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Ini mendorong kreativitas masyarakat dalam mendaur ulang dan menciptakan usaha berbasis pengelolaan limbah. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni berkurangnya volume sampah rumah tangga dan lingkungan, terciptanya UMKM pengolahan sampah (eco-product), meningkatnya kesadaran ekonomi sirkular dan ramah lingkungan, terwujudnya nagari yang bersih, produktif, dan inovatif.

4.2.4.4. Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat memiliki posisi strategis yang dapat dijadikan simpul utama perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat. Untuk itu, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada inklusivitas pelaku usaha, penguatan industri, adopsi teknologi, serta pemanfaatan sistem keuangan dan industri halal sebagai keunggulan kompetitif. Sejumlah program prioritas berikut diarahkan untuk mendukung transformasi struktural perekonomian daerah.

Rangkaian program prioritas ini dirancang secara holistik untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat aktivitas perdagangan dan bisnis kawasan barat Indonesia. Penguatan infrastruktur logistik, transformasi industri, dukungan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi syariah dan digital akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1. Program Unggulan Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat

Peningkatan kapasitas dan konektivitas pelabuhan utama akan memperkuat peran Sumbar dalam perdagangan antarwilayah dan ekspor. Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama di Pantai Barat Sumatera dan Teluk Tapang sebagai penghubung kawasan industri dan pertanian di utara Sumbar akan dikembangkan secara terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan arus logistik dan efisiensi distribusi barang, mendorong ekspor komoditas unggulan daerah, menarik investasi dan memperluas pasar regional, serta mengurangi biaya logistik nasional.

2. Program Unggulan Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB

Transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri pengolahan menjadi kunci untuk peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Penguatan sektor ini mencakup hilirisasi produk pertanian, perikanan, peternakan, serta mineral lokal. Pelaksanaan program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menyerap tenaga kerja lokal dalam industri pengolahan, diversifikasi struktur ekonomi serta meningkatkan kontribusi sektor sekunder dalam PDRB.

3. Program Unggulan Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah menjadi kekuatan khas Sumatera Barat yang perlu diperluas baik dalam pembiayaan usaha, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, maupun dalam pengembangan UMKM syariah. Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat pembiayaan UMKM berbasis syariah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang etis dan adil serta mewujudkan ekosistem keuangan syariah daerah.

4. Program Unggulan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi/Keahlian

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan angkatan kerja di sektor formal maupun wirausaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, mempermudah akses tenaga kerja ke pasar kerja domestik dan internasional serta mengurangi angka pengangguran.

5. Program Unggulan Mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor

UMKM perlu diarahkan untuk naik kelas melalui ekspor produk unggulan daerah. Program ini mendukung akses pasar, perizinan ekspor, sertifikasi, serta partisipasi UMKM dalam pasar global, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor daerah, memperluas pasar produk lokal, mendorong standarisasi dan daya saing produk serta mewujudkan UMKM berorientasi ekspor.

6. Program Unggulan Memfasilitasi Pengembangan UMKM dan Sentra Produksi Berbasis Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, pemasaran, dan manajemen usaha menjadi kunci transformasi UMKM. Sentra produksi digital akan mempercepat adaptasi pelaku usaha kecil terhadap ekonomi digital, yang bertujuan untuk digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar dan efisiensi, terciptanya ekosistem usaha berbasis teknologi, akses lebih luas terhadap pembiayaan digital dan e-commerce serta peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM.

7. Program Unggulan Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur

Pemberdayaan generasi muda dan perempuan dalam kewirausahaan perlu dipercepat melalui pelatihan, inkubasi usaha, akses modal, dan mentoring, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha muda dan perempuan, mendorong kemandirian ekonomi dan inovasi sosial, meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi lokal, menciptakan wirausaha baru yang tangguh dan kreatif.

8. Program Unggulan Mendorong IKM Naik Kelas

Industri Kecil Menengah (IKM) perlu didorong agar naik kelas melalui pembinaan manajemen usaha, inovasi produk, serta akses terhadap permodalan dan pasar, yang bertujuan untuk peningkatan skala produksi dan jangkauan pasar IKM, perbaikan kualitas dan standarisasi produk, meningkatkan kontribusi IKM terhadap pertumbuhan industri daerah, terbentuknya IKM yang modern dan kompetitif.

9. Program Unggulan Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi

Digitalisasi lintas sektor menjadi pendorong utama efisiensi dan inklusivitas ekonomi. Program ini memfasilitasi digitalisasi administrasi usaha, distribusi produk, dan layanan publik ekonomi, yang bertujuan untuk terbangunnya budaya digital dalam ekosistem ekonomi lokal, meningkatnya efisiensi dan transparansi usaha, terbukanya peluang baru di sektor digital serta perluasan layanan publik dan pembiayaan digital bagi pelaku usaha.

10. Program Unggulan Memperkuat Industri Halal dan UMKM Halal

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam industri halal, mulai dari kuliner, fashion, kosmetik, hingga pariwisata. Penguatan UMKM halal dilakukan melalui sertifikasi, pelatihan, promosi, dan integrasi dalam ekosistem halal global, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk halal lokal, memperkuat identitas dan nilai budaya Minangkabau dalam ekonomi

global, menarik wisatawan dan investor industri halal serta mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal nasional.

4.2.4.5. Prioritas Pembangunan 5 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ketangguhan terhadap bencana serta keadilan antarwilayah. Program unggulan berikut menjadi pilar utama dari strategi pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat lima tahun ke depan, yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem infrastruktur daerah yang tangguh, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang. Tidak hanya memulihkan dan membangun secara fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, sosial, dan teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Sumatera Barat yang aman, maju, dan sejahtera

1. Program Unggulan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana

Program ini menekankan percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik yang terdampak bencana seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, serta sistem air bersih dan sanitasi. Pendekatan yang digunakan mengacu pada prinsip “Build Back Better”, yakni membangun kembali dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik dari sebelumnya. Fokus pelaksanaan program unggulan ini yakni penanganan kerusakan infrastruktur secara cepat dan tepat waktu, perencanaan desain infrastruktur tahan gempa dan adaptif terhadap risiko iklim, kolaborasi multipihak dalam pendanaan dan pelaksanaan rekon dan integrasi pemulihan dengan tata ruang dan pembangunan ekonomi lokal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program unggulan ini yakni menjamin kelangsungan pelayanan publik pasca-bencana, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dan mewujudkan infrastruktur yang lebih aman, tahan lama, dan inklusif.

2. Program Unggulan Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana

Nagari/desa adalah lini terdepan dalam menghadapi dan merespons bencana. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat nagari dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana melalui edukasi, kelembagaan, serta sarana prasarana dasar kebencanaan. Adapun fokus Program Unggulan tersebut antara lain yakni pembentukan dan penguatan Forum Nagari/Desa Tangguh Bencana (FPRB/DESTANA), penyusunan peta risiko dan

rencana kontinjensi tingkat nagari, penyediaan jalur evakuasi, rambu peringatan dini, dan tempat evakuasi yang memadai serta pelatihan dan simulasi evakuasi bersama masyarakat dan sekolah.

Adapun tujuan yang Ingin dicapai dari program unggulan ini yakni meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengurangi kerugian jiwa dan harta saat terjadi bencana, membangun budaya sadar risiko bencana di tingkat komunitas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Program Unggulan Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi merupakan tulang punggung pergerakan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta ketahanan pangan. Pemantapan kondisi infrastruktur ini mencakup pembangunan, rehabilitasi, serta perawatan secara berkala untuk memastikan konektivitas dan keberlanjutan fungsi infrastruktur strategis. Adapun fokus program unggulan yakni peningkatan kualitas dan konektivitas jalan provinsi dan kabupaten/kota, perbaikan jembatan strategis yang menghubungkan wilayah produksi dan distribusi, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana dan adaptasi iklim (infrastruktur hijau).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program unggulan ini antara lain yakni memperluas akses masyarakat terhadap pusat layanan dan ekonomi, meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, perikanan, dan UMKM, mendukung ketahanan pangan dan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan inklusif.

4.2.4.6. Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

Prioritas pembangunan 6 ini secara fundamental untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai adat, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai pondasi dalam membentuk karakter masyarakat yang harmonis, religius, inklusif dan berdaya, dengan keluarga sebagai unit dasar penguatan sosial.

Hal ini didasari bahwa Sumatera Barat dikenal dengan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” yang telah menjadi perekat kehidupan sosial dan sumber nilai dalam tata kelola masyarakat Minangkabau. Namun demikian, pengaruh globalisasi, urbanisasi, serta tantangan sosial baru (seperti disintegrasi keluarga, kenakalan remaja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta degradasi nilai adat) menuntut upaya serius

untuk membangun kembali kehidupan sosial budaya yang kuat berbasis agama, adat dan keluarga berkualitas.

Program-program unggulan dirancang untuk menyatukan kembali hubungan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Sumatera Barat melalui pendekatan keluarga dan kearifan lokal. Pembangunan tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga pembentukan manusia dan masyarakat yang berkarakter kuat, religius, dan berbudaya. Itulah pondasi utama yang akan menjamin keberlanjutan pembangunan dan peradaban daerah ke depan.

1. Program Unggulan Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK

Pengembangan kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan nilai-nilai ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Kawasan ini akan dijadikan pusat edukasi, pelatihan adat dan agama, kegiatan budaya, dan penguatan identitas ke-Minangkabauan. Sehingga program unggulan ini akan difokuskan pada revitalisasi kawasan Masjid Raya dengan fasilitas pelatihan adat, budaya, dan keagamaan, pelaksanaan kegiatan pembinaan generasi muda, pelatihan adat, dakwah dan kajian keislaman, serta penataan kawasan sebagai pusat wisata religi dan budaya berbasis ABS-SBK.

Program unggulan ini bertujuan antara lain menjadi pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai adat dan agama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan agama serta mengokohkan identitas Sumatera Barat sebagai daerah beradat dan religius.

2. Program Unggulan Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal

Pendidikan karakter menjadi elemen utama dalam membangun generasi berintegritas. Program ini memfokuskan pada integrasi nilai-nilai agama, adat dan kearifan lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran formal dan nonformal. Program unggulan ini akan difokuskan pada pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis ABS-SBK di sekolah, pelatihan guru dan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai gotong royong, hormat pada orang tua, dan cinta budaya lokal. Program unggulan ini bertujuan antara lain membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berkepribadian lokal, mencegah degradasi moral akibat pengaruh negatif media dan globalisasi, menjadikan pendidikan sebagai wahana pelestarian nilai luhur Minangkabau.

3. Program Unggulan Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan cerminan dari ABS-SBK dalam ranah ekonomi. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan beretika melalui penguatan sektor keuangan dan usaha syariah. Program unggulan ini akan difokuskan pembentukan

koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pelatihan dan fasilitasi pelaku UMKM syariah, dan promosi dan penguatan sistem perdagangan yang sesuai syariah dan adat. Program unggulan ini bertujuan antara lain menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis nilai dan etika Islam, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat nagari melalui sistem ekonomi adat, serta memperluas akses pembiayaan syariah untuk pelaku ekonomi kecil.

4. Program Unggulan Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Keluarga adalah unit terkecil dan utama dalam pembentukan karakter serta pelindung pertama dari ancaman sosial. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial, sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program unggulan ini akan difokuskan pada peningkatan layanan konseling keluarga dan edukasi peran orang tua, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program unggulan ini bertujuan antara lain untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan resilien, serta mendorong peran aktif perempuan dalam keluarga dan pembangunan.

5. Program Unggulan Pendampingan dan Fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus

Inklusi sosial menjadi bagian dari nilai adat dan agama, di mana semua warga harus mendapat perlakuan setara. Program ini memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak dasar dan dukungan sosial. Program unggulan ini akan difokuskan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, peningkatan akses terhadap pendidikan inklusif dan layanan kesehatan, fasilitasi bantuan alat bantu dan layanan sosial lainnya. Program unggulan ini bertujuan antara lain menjamin kesetaraan hak dan peran aktif penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka serta membangun masyarakat yang inklusif dan tidak diskriminatif.

6. Program Unggulan Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari

Masalah sosial seperti narkoba, alkohol, pergaulan bebas, dan judi online harus dicegah sejak dini melalui peran aktif keluarga, kaum (kelompok kerabat adat), dan nagari sebagai sistem sosial tradisional Minangkabau. Program unggulan ini akan difokuskan pada edukasi dan kampanye pencegahan penyakit masyarakat, pembentukan satgas dan forum nagari untuk ketahanan sosial serta revitalisasi lembaga adat untuk ikut serta dalam pembinaan moral. Program unggulan ini bertujuan antara lain untuk mencegah meningkatnya permasalahan sosial di tingkat komunitas, memperkuat peran sistem sosial adat dalam pengawasan dan pembinaan warga serta menghidupkan kembali kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial yang sehat.

4.2.4.7. Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM

Dalam rangka mewujudkan sektor pariwisata yang kompetitif, berkualitas, berbasis masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah, maka Sumatera Barat memiliki kekayaan potensi alam, budaya, kuliner, sejarah, serta adat sangat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun tantangan rendahnya daya saing destinasi, lemahnya kualitas layanan, kurangnya promosi, serta belum optimalnya sinergi dengan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, mengharuskan transformasi pendekatan secara menyeluruh. Untuk itu, penguatan sektor ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah, membuka lapangan kerja berbasis kearifan lokal, mendorong ekonomi inklusif berbasis masyarakat, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional dan internasional.

1. Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE

Pengembangan destinasi tidak cukup hanya dengan potensi alam dan budaya, tetapi harus memenuhi standar layanan yang aman dan berkelanjutan. Program ini mendorong pembenahan destinasi secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola utama dan penerapan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability). Program unggulan ini akan difokuskan pada identifikasi dan revitalisasi destinasi prioritas berbasis nagari/desa wisata, pendampingan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sertifikasi CHSE bagi pengelola destinasi serta penyediaan infrastruktur dasar (akses jalan, toilet, air bersih, signage ramah lingkungan).

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal dan, menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan domestik dan mancanegara.

2. Program Unggulan Penguatan Potensi Wisata Halal

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan filosofi ABS-SBK yang Islami, Sumatera Barat memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan wisata halal. Program ini akan memperkuat ekosistem wisata halal mulai dari makanan, akomodasi, aktivitas wisata hingga layanan ibadah. Program unggulan ini akan difokuskan pada sertifikasi halal untuk kuliner dan akomodasi, pelatihan pelaku usaha tentang layanan wisata halal, penyediaan infrastruktur

penunjang ibadah di destinasi dan promosi wisata halal ke pasar internasional seperti Timur Tengah dan Malaysia.

Program unggulan ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal unggulan nasional dan regional, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Muslim domestik dan mancanegara, dan mengembangkan pasar niche pariwisata yang potensial dan berkelanjutan.

3. Program Unggulan Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisata

Perubahan perilaku wisatawan yang semakin digital menuntut sektor pariwisata untuk bertransformasi. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital dalam promosi destinasi, pemesanan layanan, serta peningkatan pengalaman wisata. Program unggulan ini akan difokuskan pada pengembangan portal dan aplikasi pariwisata Sumbar yang terintegrasi, peningkatan konten digital (foto/video/storytelling) destinasi wisata, pelatihan pelaku wisata dalam pemasaran digital, dan kerjasama dengan platform online travel agent (OTA) dan media sosial.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas destinasi Sumatera Barat di pasar digital, mempermudah akses informasi dan pelayanan kepada wisatawan dan menjangkau pasar wisatawan milenial dan internasional dengan pendekatan digital.

4. Program Unggulan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia

MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) merupakan segmen pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang dan kekayaan budaya, Sumatera Barat berpotensi menjadi pusat MICE di wilayah barat Indonesia. Program unggulan ini akan difokuskan pada penguatan infrastruktur venue pertemuan dan pameran, promosi Sumatera Barat sebagai destinasi MICE nasional dan regional, pelatihan SDM pengelola event dan kerjasama dengan asosiasi, kementerian, dan BUMN untuk penyelenggaraan event di Sumbar.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan berbasis kegiatan konvensi dan pameran, mendorong belanja wisatawan lebih besar dan berkualitas dan meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan untuk event berskala besar.

5. Program Unggulan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi

Pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki kompetensi profesional agar layanan yang diberikan berkualitas dan memenuhi ekspektasi pasar. Sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting dalam standardisasi kualitas SDM. Program unggulan ini akan difokuskan pada pelatihan dan uji kompetensi bagi pemandu wisata, pelaku UMKM, pengelola

homestay, dan barista, seniman, dan lain-lain, fasilitasi pendaftaran dan penerbitan sertifikasi oleh lembaga berwenang (LSP) serta penguatan jejaring antar pelaku kreatif dan wisata berbasis klaster sektor.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing produk kreatif Sumatera Barat, menyiapkan SDM pariwisata yang siap kerja dan kompeten dan mendukung pertumbuhan wirausaha kreatif berbasis potensi lokal.

4.2.4.8. Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta didukung oleh birokrasi yang kompeten dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Sanngat disadari bahwa transformasi tata kelola pemerintahan merupakan pondasi utama dalam mendukung seluruh agenda pembangunan. Pemerintah yang profesional, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam kerangka itu, Sumatera Barat menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berbasis inovasi digital, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi profesional, adaptif dan berintegritas, membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, mendorong penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek pelayanan, serta memastikan setiap keputusan dan pelayanan yang diberikan berbasis aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, Sumatera Barat akan menjadi provinsi yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan berkeadilan.

1. Program Unggulan Menjadi Birokrasi Terbuka

Birokrasi terbuka berarti membangun pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Program unggulan difokuskan pada mendorong keterlibatan publik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas kepala daerah dan OPD melalui forum terbuka dan laporan kinerja berkala, optimalisasi penggunaan media sosial dan platform digital untuk mendengar aspirasi publik, serta penguatan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen.

Program unggulan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif serta memperkuat prinsip good governance dan anti korupsi.

2. Program Unggulan Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah

Optimalisasi kelembagaan pemerintahan diperlukan untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara efisien, sesuai fungsi dan tujuan pembangunan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus profesional, adaptif, dan berintegritas. Selain itu, inovasi menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan dan meningkatkan daya saing daerah.

Program unggulan difokuskan pada review kelembagaan dan penyusunan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran, peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan, rekrutmen berbasis kompetensi, dan penilaian kinerja yang objektif, penyederhanaan regulasi daerah agar tidak menghambat investasi dan pelayanan publik, pemberian insentif dan ruang eksperimen untuk inovasi layanan publik dan digitalisasi, serta penguatan innovation hub dan kompetisi inovasi antar OPD dan antar daerah.

Program unggulan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping namun efektif, menyediakan SDM aparatur yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan, memacu reformasi birokrasi dan budaya kerja berbasis hasil; serta menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

3. Program Unggulan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Digitalisasi layanan publik dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan transparansi. Sementara itu, keterbukaan informasi dan aspirasi masyarakat menjadi bahan utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Program unggulan difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan publik berbasis aplikasi dan single sign-on terpadu, pembangunan data center dan platform layanan digital (e-office, e-planning, e-budgeting, e-complaint, e-licensing) meningkatkan kualitas dan ketersediaan data terbuka (open data), pelibatan masyarakat secara aktif melalui musrenbang secara digital dan kanal aspirasi daring, monitoring partisipatif berbasis teknologi (dashboard real-time monitoring pembangunan).

Program unggulan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa tatap muka langsung, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi praktik korupsi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan serta mewujudkan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.3. PENYELARASAN DAN DUKUNGAN RKPD PROVINSI TERHADAP RKP TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 memperhatikan 8 (delapan) Misi (Asta Cita) yang diturunkan menjadi Program Prioritas dan di detailkan dengan Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Hal ini bertujuan akan selarasnya Prioritas dan program pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sehingga target capaian Nasional yang merupakan akumulasi dari pencapaian target masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat tercapai. Penyelarasan juga membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengambil bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan yang menuju kepada tujuan pembangunan nasional.

Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Provinsi terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2025

NO	AGENDA/PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025	KETERANGAN
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Prioritas 1
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Prioritas 6
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Prioritas 2
		Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Prioritas 7
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Prioritas 4
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 5
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Prioritas 1
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui	Prioritas 6

NO	AGENDA/PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025	KETERANGAN
	pemuda, dan penyandang disabilitas	Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Prioritas 4
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Prioritas 3
		Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Prioritas 2
		Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Prioritas 4
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 5
		Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Prioritas 7
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Prioritas 8
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Prioritas 2
		Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Prioritas 5
		Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	Prioritas 6

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Secara lebih konret, sub kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 juga mendukung secara langsung terhadap 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

4.3.1. Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.20. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69 – 85,23	Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (sedang)
	Indeks Aktualisasi Pancasila	76,37	-	-
	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	71-80 (kategori baik)	-	-
	Indeks Hak Asasi Manusia	2,75	-	-

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.21. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Memperkokoh ideologi Pancasila	Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme		KARAKTER KEBANGSAAN	Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Purnapaskibraka Duta Pancasila
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Penguatan demokrasi	Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI PUBLIK	dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0013 Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0015 Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.4.01.0013 Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.4.01.0015 Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
	Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pendapat di muka umum			
	Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi	Bukan kewenangan Provinsi
	Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Media Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
	Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi dan Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	APLIKASI INFORMATIKA	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis
	Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI PUBLIK	Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
Penegakan hak asasi manusia	Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	tata aturan yang berlaku			
	Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
	Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Gender dan Anak Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0005 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
	Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.03.0001 Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

4.3.2. Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 4.22. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Sasaran Pembangunan	Target	Sasaran Pembangunan	Target
1	Asia Power Index (Military Capability)	16	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06
2	Asia Power Index (Diplomatic Influence) ^{a)}	61,54	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50
3	Asia Power Index (Economic Relationship)	12,6	Indeks Daya Saing Daerah	3.58
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	63,5	Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya	57,76
5	Global Cybersecurity Index	94,92	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	60	Indeks Ekonomi Biru	25,19
7	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,21	Prevalansi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,84
8	Indeks Ketahanan Energi	6,77	Konsumsi listrik per kapita	707
		160	Intensitas energi primer	160
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	51,70
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,45-3,60	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08
11	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	63,40	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	41,23	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	41,23

No	RKP 2025		RKPD 2025	
	Sasaran Pembangunan	Target	Sasaran Pembangunan	Target
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8,57
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72
15	Indeks Ekonomi Hijau	68,69	Indeks Ekonomi Hijau	68,69
16	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,10
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29,00
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95
19	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan (%))	36,65	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	28,05
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif (%))	28,12	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	18,08
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	Indeks Ekonomi Biru	25,19
21	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	38,76	Indeks Ekonomi Biru	25,19
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	45	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.23. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Penguatan pertahanan negara	meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat komponen cadangan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
	peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan	mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembentukan ekosistem industri pertahanan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Penguatan keamanan negara	melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.01.0006 Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.09.0023 Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KARAKTER KEBANGSAAN	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Profesionalisme dan pelayanan kepolisian	memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme			
	peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Keamanan laut dan hidro-oseanograf	memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	personil lembaga keamanan laut			
	pemetaan batimetri dan alur laut.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Keamanan siber, sandi, dan sinyal	memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy			
	meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.01.0007 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0005 Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyelesaian perundingan perbatasan darat negara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0004 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah
	perbaiki tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	optimalisasi promosi aset soft power Indonesia.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy	meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN	4.01.03.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri		DAN OTONOMI DAERAH	Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Kerja Sama Pembangunan Internasional	penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Integrated National Financing Framework	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	promosi Trade, Tourism,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Investment (TTI) Terintegrasi	PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL	Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
	penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	Penguatan diplomasi ekonomi	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi
	kerja sama ekonomi internasional yang adaptif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.01.0001 Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0001 Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	perluasan kesepakatan kerja	URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.04 PROGRAM	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang	AN BIDANG TENAGA KERJA	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
	pengawasan proses akses Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Swasembada pangan	menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERIKANAN		
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0004 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0005 Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.4.16.0001 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.07.0001 Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			SARANA PERTANIAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.06.0002 Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.07.0003 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PRASARANA PERTANIAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PRASARANA PERTANIAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0006 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kelembagaan Korporasi Petani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.3.02.0003 Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0014 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0005 Fasilitas hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0006 Fasilitas PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.06.0008 Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.28.03 PROGRAM	3.28.03.1.07.0005 Pengendalian PBPHH (Kayu

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG KEHUTANAN	PENGELOLAAN HUTAN	dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.08.0003 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.3.01.0005 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.4.01.0005 pengembangan Usaha Perhutanan sosial
	memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
	meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian		PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peredaran Sarana Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PERTANIAN	DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PRASARANA PERTANIAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0014 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0017 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0019 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PERTANIAN	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0021 Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0022 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0023 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0024 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
		URUSAN PEMERINTAH	3.27.07 PROGRAM	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PERTANIAN	PENYULUHAN PERTANIAN	penyuluhan pertanian
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PANGAN	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
	merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.03 PROGRAM	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sinkronisasi rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
	memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.01.0007 Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sinkronisasi rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.02.0005 Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.02.0006 Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.3.03.0002 Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.01.0007 Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN	2.09.03.4.02.0005 Penetapan Kebijakan tata cara

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PANGAN	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.02.0006 Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.4.03.0002 Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.3.02.0001 Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota
	menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan	DAN PERIKANAN	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Sektor Kelautan dan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0006 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0008 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0009 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				database perizinan berusaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0008 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.4.02.0009 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.3.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.4.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.04.0004 Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
	melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.27.03 PROGRAM	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	jagung, singkong, kedelai, dan tebu	AN BIDANG PERTANIAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di tingkat Provinsi
	memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN	3.25.03.1.02.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	DAN PERIKANAN	PERIKANAN TANGKAP	
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERIKANAN	PEMASARAN HASIL PERIKANAN	konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.09.0001 Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar
	meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganeekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.3.02.0001 Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota
	merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN	2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca
	memperkuat tata kelola sistem pangan melalui			

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan	AN BIDANG PANGAN	DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGAR	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG STATISTIK	AAN STATISTIK SEKTORAL	yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
Swasembada energi	mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN	infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0001 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0003 Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
	mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0006 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.29.03 PROGRAM	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Laut sampai dengan 12 Mil Laut
	memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0005 Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0003 Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.08.0003 Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0005 Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
	mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	MINERAL DAN BATUBARA	Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3.29.03.1.01.0006 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut
Swasembada air	penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0005 Pembangunan Bendungan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau	PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0055 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0069 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0070 Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.01.0071 Rehabilitasi Bendungan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0005 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jaringan Irigasi Air Tanah
	peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0005 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.02.1.02.0010 Peningkatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.03.02 PROGRAM	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0031 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0033 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0036 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi
	pengelolaan risiko bencana daya rusak air	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0097 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0098 Pembangunan Kanal Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0106 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0108 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0109 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.03.02 PROGRAM	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir	AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Penampung Air Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0011 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0016 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN	1.03.05.1.01.0017 Peningkatan Kapasitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Swasembada pangan, energi, dan air	Pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.04.0001 Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.06.0001 Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.07.0001 Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.09.0001 Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.10.0001 Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.11.0001 Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.12.0001 Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	3.29.02.3.13.0001 Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)
Pengembangan ekonomi syariah	Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pariwisata ramah muslim			
	penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor
	penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
	penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf).	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Kebijakan ekonomi digital	melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
	mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pembiayaan ultra mikro			
	menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0004 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
	mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Kebijakan ekonomi hijau	mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.1.02.0001 Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0005 Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	menerapkan ekonomi sirkular industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
	menerapkan efisiensi sumber daya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.3.02.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.3.17.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.4.02.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SUMBER DAYA MINERAL		mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.04 PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	3.29.04.4.17.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.05.0005 Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.10.0001 Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.05.0005 Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAYA MINERAL		bumi pada wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.4.10.0001 Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
	mengembangkan produk ramah lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk
	menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	menguatkan ekosistem daur ulang	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.11 PROGRAM	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
	melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		LINGKUNGAN HIDUP	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
	peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
	peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.11 PROGRAM	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH	2.11.11 PROGRAM	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
	optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	perbaikan tata kelola persampahan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0014 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.3.10.0001 Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.3.10.0002 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.4.10.0001 Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.4.10.0002 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.3.03.0001 Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.03.0001 Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan
Keanekaragaman hayati	mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			AN HAYATI (KEHATI)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
	mengelola sumber daya genetik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN	2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
	pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
	peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
	peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
	pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.4.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
	peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pengembangan pengelolaan keamanan hayati(biosafety)	LINGKUNGAN HIDUP	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.3.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota
	meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
	meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.4.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
	menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.3.03.0001 Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas lingkungan	meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	meningkatkan pengelolaan air limbah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP	dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP	Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan kualitas lahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.27.05 PROGRAM	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PERTANIAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.05.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menurunkan laju deforestasi		ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Ekosistem Lahan Basah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.04.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.02 PROGRAM PERENCANAAN HUTAN	3.28.02.3.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi
	meningkatkan kualitas ekosistem gambut	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
	melakukan pengelolaan bahan	URUSAN PEMERINTAH	2.11.05 PROGRAM	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
	menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.3.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
	pengawasan dan pengamanan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	lingkungan hidup dan kehutanan	LINGKUNGAN HIDUP	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.02.0002 Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0006 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	3.28.08.4.04.0004 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
	penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
	menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.03 PROGRAM	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sinkronisasi rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi
	memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	menjadi kewenangan Provinsi
	mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.3.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.4.04.0001 Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
Pembangunan rendah karbon	menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN	2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	parameter kualitas lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0006 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	melakukan pembangunan rendah karbon	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	
	peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAYA MINERAL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
	efisiensi energi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.05.1.08.0002 Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN	usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0003 Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0004 Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.05.1.10.0001 Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN	daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0001 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0002 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.3.09.0003 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan transportasi berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.10.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.11.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0006 Pengelolaan Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0002 Pembangunan Bandar Udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0004 Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.03.0001 Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				yang Jaringan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.03.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05.1.04.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
	peningkatan cadangan karbon	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0007 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan
	pencegahan pengurangan cadangan karbon	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	implementasi praktik pertanian yang rendah karbon	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PRASARANA PERTANIAN	Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.1.01.0018 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di tingkat Provinsi
	peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERIKANAN	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	pengembangan industri hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
	pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.11 PROGRAM	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0011 Pengelolaan sampah Regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
	mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kesempatan dari ekonomi hijau		LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
	mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0003 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0004 Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAYA MINERAL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0005 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0007 Perencanaan kegiatan penyediaan biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0001 Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0002 Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0003 Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN	3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SUMBER DAYA MINERAL	ENERGI BARU TERBARUKAN	biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.06.0005 Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0004 Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAYA MINERAL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
	mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Pekerjaan hijau	mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.1.01.0007 Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.3.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	2.11.06.3.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.4.02.0001 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
	memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.11.08 PROGRAM	2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru	menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0006 Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy		PULAU-PULAU KECIL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun	DAN PERIKANAN	PULAU-PULAU KECIL	dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Daerah Kabupaten/Kota
	mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.02.0007 Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERIKANAN	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0004 Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0005 Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0007 Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0014 Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0012 Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0007 Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.07.0003 Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.3.11.0002 Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN	3.25.03.3.12.0002 Penerbitan Rekomendasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERIKANAN TANGKAP	perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.01.0004 Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN	3.25.04.1.04.0004 Penerbitan Rekomendasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERIKANAN BUDIDAYA	Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0001 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.3.06.0001 Fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar
	menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERHUBUNGAN		Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.3.02.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.1.03.0005 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir
	mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan,	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata			
	meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0010 Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global	DAN PERIKANAN	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

4.3.3. Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

Untuk mengawal keberhasilan proses meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.24. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	51	-	-
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	136,7	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17
3	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,92
5	Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	-	-
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)	2.926,18
7	Total Kredit/PDB (%)	37,8	Total Kredit/PDRB (%)	24,40
8	Inklusi Keuangan (%)	91	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	3,00 – 3,50	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37 – 5,76
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,10	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24
11	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	Proporsi jumlah UKM non pertanian	11,15
			Proporsi jumlah IKM	3,53
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	Rasio Kewirausahaan	3,59
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	22,10	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	43,08
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,11

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan Awa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pada RKP Tahun 2025 serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.25. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 3. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menyinerjikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu	PENATAAN RUANG		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.05.0006 Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.03.0002 Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara
	menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0027 Pemeliharaan Berkala Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0029 Pelebaran Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0034 Pembangunan Terowongan/Tunnel

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENATAAN RUANG		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0037 Pembangunan Underpass
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0039 Pembangunan Flyover
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.03.10 PROGRAM	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENYELENGGAR AAN JALAN	
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan
	mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH	2.16.03 PROGRAM	2.16.03.3.01.0013 Pembinaan dan fasilitasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.	AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	start-up digital di wilayah provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.3.01.0014 Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya	menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
	memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0004 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0009 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0010 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA KECIL,	2.17.07.1.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0012 Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
	melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
	mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0012 Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN MENENGAH		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0006 Fasilitas Inkubator Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERDAGANGAN	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
	mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0003 Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0003 Pengembangan Usaha Kecil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
	mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
Penguatan koperasi	penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0014 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAH	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
	integrasi data ekonomi kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAH	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
	percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAH	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual
	perluasan dan peningkatan pangsa pasar di	URUSAN PEMERINTAHAN	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia	AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAH	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.1.02.0014 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0006 Fasilitas Inkubator Usaha Kecil
	pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
	mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0014 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0015 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0016 Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
	memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0007 Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah
	menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			DESTINASI PARIWISATA	(berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
	penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.26.02 PROGRAM	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi	AN BIDANG PARIWISATA	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0008 Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar
	meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar
		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi
	pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0007 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.3.01.0007 Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0007 Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0012 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0013 Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0015 Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN BIDANG PARIWISATA	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pendampingan Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0004 Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0005 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0006 Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.1.02.0007 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
		Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara			
	diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark),	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0008 Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi
	pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.1.03.0011 Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	3.26.02.3.05.0001 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Mengembangkan industri kreatif	pembiayaan campuran (blended finance)		DESTINASI PARIWISATA	Kepariwisataan di Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
	memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif		DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0005 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Pendalaman sektor keuangan.	penguatan peran perbankan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan peran sektor keuangan nonbank	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

4.3.4. Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.26. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Rata – rata Nilai Pisa (Membaca)	396	Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	52,63
2	Rata – rata Nilai Pisa (Matematika)	404	Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	15,79
3	Rata – rata Nilai Pisa (Sains)	416	-	-
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (Literasi Membaca)	62,89	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	52,42
5	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional (Numerasi)	54,36	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	35,44
6	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,33	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91
7	Harapan lama sekolah (tahun)	13,32	Harapan Lama Sekolah	14,39
8	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	33,94	-	-
9	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38
10	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31
11	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
12	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,12	-	-
13	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	130
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50
15	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	71
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	akupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,424	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 – 0,390
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53-69,54
19	Indeks Perlindungan Anak	65,20	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15
20	Indeks Pembangunan Pemuda	64,56	-	-
21	Indeks Pembangunan Gender	92,15	-	-
22	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94	-	-
23	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69	-	-
24	Peringkat Indeks Inovasi Global	60	Indeks Inovasi Daerah	72,50
25	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37-5,76
26	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	-	-
27	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41
28	Peringkat pada SEA Games	3	-	-

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Prioritas Nasional Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.27. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0037 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0029 Pengadaan Alat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0003 Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0004 Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.3.04.0005 Pembangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Perpustakaan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0006 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0018 Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0028 Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
	Revitalisasi pendidikan nonformal	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Menengah dan Pendidikan Khusus
	penguatan tata kelola pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas
	menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK		Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.07.04 PROGRAM	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG TENAGA KERJA	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
	memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
	meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
	meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
	melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
	mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			N SUMBER DAYA MANUSIA	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
	mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0011 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0014 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Memperkuat Pendidikan,	perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Sains, dan Teknologi	bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini			
	pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0057 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0062 Fasilitas sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.03 PROGRAM	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya	BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Guru/Kepala Sekolah/TU
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0029 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0032 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bakat dan Kreativitas Siswa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	konten digital untuk pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0061 Perlengkapan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0076 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0077 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02.0078 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
	memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.4.04.0003 Pembangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics	BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0012 Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0014 Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0027 Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
	memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
	memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0038 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
	meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04.0035 Penyelarasan dan Kerjasama

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya			Kemitraan Akademi Komunitas
	meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	(universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif		KESEHATAN MASYARAKAT	
	menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
	memperkuat program gerakan masyarakat hidup	URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain)	BIDANG KESEHATAN	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Kerja dan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
	meningkatkan pelayanan kesehatan yang	URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan	BIDANG KESEHATAN	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	berasal dari keragaman hayati nusantara		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Minuman di Fasilitas Kesehatan
	menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi			
	memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dengan Kecanduan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0057 Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
	membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KESEHATAN MASYARAKAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0031 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	penguatan kelembagaan dan	URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan	BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya	BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.3.02.0041 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0043 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0051 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0052 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.3.02.0053 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penanggulangan Penyakit Kecacingan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0054 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
	mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.3.02.0046 Penyusunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pelarangan promosi	BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
	penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
	penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	dan farmakovigilans	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0046 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.02.02 PROGRAM	1.02.02.3.01.0041 Mendukung

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG KESEHATAN	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Puskesmas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
	peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			MANUSIA KESEHATAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0008 Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0010 Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.14.04 PROGRAM	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	penyediaan fasilitas pendukung keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0001 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
	penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	pemenuhan hak anak secara universal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak	DAN PERLINDUNGAN ANAK		perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
	peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.07 PROGRAM	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
	penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
	peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	politik, dan ekonomi	PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
	penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
	penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
	mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyandang disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
	mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
	memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penyangang disabilitas dapat dikembangkan			
	meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyangang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyangang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangang Disabilitas TerlAntar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0005 Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyangang disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN	2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0005 Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
	membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.3.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN	1.01.02 PROGRAM	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	tidak semestinya di masyarakat.	BIDANG PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Meningkatkan Prestasi Olahraga	mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KEOLAHRAGAA N	melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.3.05.0001 Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
	mengembangkan program siswa	URUSAN PEMERINTAHAN	2.19.03 PROGRAM	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
	meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	Pemerintah dengan Badan Usaha			Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
	mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KEOLAHRAGAA N	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
	memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGA N DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi

4.3.5. Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

Untuk mengawal keberhasilan proses Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.28. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,46 - 8,53
2	Biaya Logistik (% PDB)	13,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan proses proses Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negermaka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.29. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 5. proses Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.3.04.0001 Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.06.1.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0004 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0011 Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0007 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0008 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0009 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
	akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				(SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	- Peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besi-baja nonkonstruksi pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap: a. industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0009 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara) b. industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.			
Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global	- Pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui: a. penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru b.penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan c. peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Daerah Bidang Infrastruktur
	- Optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui: a. standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama b. peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0004 Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0005 Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				pelayanan bandar udara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.15.04.3.02.0003 Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
	- Perkuatan sistem logistik nasional melalui; a. penguatan kebijakan logistik b. pengintegrasian dan digitalisasi logistik c. pengembangan infrastruktur penunjang logistik d. penguatan pelaku logistik e. peningkatan sumber daya manusia logistik	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	- peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui: a. peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi b. peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global c. peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.3.03.0001 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.4.03.0001 Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.07 PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2.18.07.3.02.0002 Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi
	- peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui: a. peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global b. peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi c. peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi d. peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam e. peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif f. peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	integrasi dalam rantai nilai global g. peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle h. peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global			
	akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.1.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

4.3.6. Prioritas Nasional 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Untuk mengawal keberhasilan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.30. Sasaran Pembangunan Dan Target Pada RKP Dan RKPD Tahun 2025 Pada Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Tingkat kemiskinan	7,0-8,0	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15,00	-	-
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67,00	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,00
7	Persentase desa mandiri (%)	4,00	Persentase Desa Mandiri (%)	7,83
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,35	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.31. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 6. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Membangun desa dan membangun dari desa	peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
	penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01.0024 Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.01.0041 Mendukung Pembangunan Puskesmas

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0005 Pembangunan Bendungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0071 Rehabilitasi Bendungan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0011 Optimalisasi TPA/TPST/SPA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0011 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN	2.13.03.3.01.0005 Pengawasan kerjasama Kampung dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA	KERJA SAMA DESA	lembaga kerjasama Kampung
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	masyarakat desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.3.01.0017 Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.3.01.0018 Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota
	penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0017 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0018 Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI	2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA	PEMERINTAHAN DESA	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA		Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				yang Mengatur Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0013 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0020 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0022 Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
	pengembangan kawasan	URUSAN PEMERINTAHAN	2.13.03 PROGRAM	2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Pembangunan Kawasan Perdesaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01.0004 Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		MASYARAKAT DAN DESA		Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kelurahan/ kampung.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Pemerataan ekonomi	Pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara– Balikpapan– Samarinda)	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02.0010 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.1.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Memberantas kemiskinan	penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.05.0001 Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat
	penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
	peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
	reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	penduduk rentan lain	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0006 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0007 Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.05.0001 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				HIV/AIDS dan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			REHABILITASI SOSIAL	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sosial untuk kelompok rentan			Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	terdepan, dan terluar.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

4.3.7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba

Untuk mengawal pencapaian Prioritas Nasional Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.32. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPd Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba

NO	RKP 2025		RKPd 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	Indeks Reformasi Hukum	70
2	Indeks Persepsi Korupsi	38	Indeks Integritas Nasional	73,16
3	Indeks Materi Hukum	0,51	Indeks Reformasi Hukum	70
4	Indeks Integritas Nasional	74,52	Indeks Integritas Nasional	73,16
5	Indeks Pelayanan Publik	3,68	Indeks Pelayanan Publik	3,84
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
7	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	-	-
8	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,7	-	-
9	<i>Clearance rate</i> tindak pidana judi	35,00	-	-
10	<i>Clearance rate</i> tindak pidana penyelundupan	7,00	-	-
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92

12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,30-12,36	-	-
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,1-10,3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17
14	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1,0	Tingkat Inflasi (%)	2,80-3,60

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.33. Dukungan RKPd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPd PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Reformasi politik	Pengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PENCATATAN SIPIL		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.3.03.0003 Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
	menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.3.03.0004 Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Reformasi hukum	mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman			
	meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
	mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	penguatan budaya hukum	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Penyusunan Produk Hukum Penetapan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
	penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
Reformasi tata kelola pemerintahan	membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk maubergabung	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
	memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun),	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
	memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
	memperbaiki sistem pelayanan	KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional		KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
		KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
	penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
	penataan kelembagaan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 20025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	program pembangunan dan prioritas nasional		PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
		PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
	harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui: a. penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, b. peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, c. pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, d. optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
		KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
	penguatan manajemen kinerja pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan	meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			KESEHATAN MASYARAKAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
	memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan kemampuan surveillance dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui:	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	menutup semua akses ke situs perjudian online	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			PENGAMANAN INFORMASI	Pemerintah Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	memperkuat deteksi dan pencegahan tindak	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	pidana penyelundupan barang ilegal.			
	Arah kebijakan yang difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani melalui:	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
	penanganan konflik sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAM	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		AN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05.0001 Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05.0004 Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota
Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara	penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan pembina BUMN	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan a. ekosistem kesehatan bertaraf internasional b. hilirisasi industri berbasis sumber daya alam terutama mineral dan migas c. industri berteknologi menengah-tinggi d. energi baru terbarukan e. sistem logistik nasional f. pariwisata berkualitas dan berkelanjutan g. infrastruktur konektivitas h. infrastruktur Ibu Kota Nusantara i. pembiayaan mikro dan ultra mikro.	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi

4.3.8. Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur

Untuk mengawal keberhasilan pencapaian Prioritas Nasional Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.34. Sasaran Pembangunan dan Target pada RKP dan RKPD Tahun 2025 pada Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur

NO	RKP 2025		RKPD 2025	
	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET	SASARAN PEMBANGUNAN	TARGET
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	71,07	-	-
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58-60,65
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23-72,31
4	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	170,51

Sumber : RKP Tahun 2025 dan Ranwal RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan keberhasilan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka terdapat serangkaian arah kebijakan dalam RKP Tahun 2025, serta juga dukungan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.35. Dukungan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	antarumat beragama serta sesama anak bangsa	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT	2.13.05.1.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini	N MASYARAKAT DAN DESA	DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA	2.13.06.3.04.0001 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT	2.13.07.4.02.0001 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Penghayat Kepercayaan di Daerah
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.3.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.4.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
	menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
	menjamin kebebasan beribadah dan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing			Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi
	meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
	merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi	Bukan Kewenangan Provinsi
	meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Melestarikan budaya	meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
	membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia			Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.22.08.5.04.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
	merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.4.01.0006 Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih
	membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia			Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
	memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi,renda hnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	dokumentasi seni tradisional Indonesia			Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya
	membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
	menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
	mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi senimasyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum	BIDANG KEBUDAYAAN		perfilman daerah di Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi
	memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
	mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Prasarana Taman Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL	2.22.10.3.01.0001 Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi
	memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
	Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
	Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.3.02.0007 Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.4.01.0007 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
	Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0004 Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0005 Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.3.01.0006 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota
		URUSAN PEMERINTAHAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
Penanganan bencana	Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana	BIDANG KEBUDAYAAN		dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut	KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			LINGKUNGAN HIDUP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi
	Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana
	mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana

RKP TAHUN 2025		DUKUNGAN PADA RKPD PROVINSI TAHUN 2025		
FOKUS	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN
		LINGKUNGAN HIDUP	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
	Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat matrik tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan masih menggunakan sub kegiatan sebagaimana terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyesuaian/perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik Rencana Kerja ini memuat program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	866.425.655.074,00	838.175.385,00	321.956.685,00	-866.103.698.389,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.287.144.950,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	175.740.100,00	379.448.900,00	87.133.500,00	-88.606.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			868.894.950,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	118.418.600,00	232.744.485,00	188.844.185,00	70.425.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			233.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.318.700,00	0,00	0,00	-69.318.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			155.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	257.618.550,00	0,00	0,00	-257.618.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.441.400,00	0,00	0,00	-57.441.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	154.895.400,00	0,00	0,00	-154.895.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			208.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	865.292.222.324,00	225.982.000,00	45.979.000,00	-865.246.243.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu																			
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				1 Subtansi	1 Subtansi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.653.564.618.000,00	1.716.888.226.903,00	1.806.766.825.139,00	153.202.207.139,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.703.669.537.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	1.650.000.000.000,00	1.714.115.776.939,00	1.804.621.356.168,00	154.621.356.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.700.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.749.781.000,00	1.987.251.479,00	1.893.397.479,00	143.616.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	152.250.000,00	100.000.000,00	28.424.000,00	-123.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	203.000.000,00	150.000.000,00	44.300.000,00	-158.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			254.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	253.800.000,00	150.000.000,00	69.015.000,00	-184.785.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.206.787.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.205.787.000,00	385.198.485,00	110.332.492,00	-1.095.454.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	1.029.408.500,00	1.337.800.000,00	1.267.800.000,00	238.391.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	177.625.000,00	0,00	0,00	-177.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.885.000,00	1.237.800.000,00	1.229.400.000,00	1.169.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	404.700.000,00	100.000.000,00	38.400.000,00	-366.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	280.624.100,00	0,00	0,00	-280.624.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	106.574.400,00	0,00	0,00	-106.574.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	198.868.950,00	1.151.000.000,00	1.150.500.000,00	951.631.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	131.950.000,00	0,00	0,00	-131.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	203.000.000,00	100.000.000,00	1.880.000,00	-201.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	131.950.000,00	0,00	0,00	-131.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	181.014.100,00	500.000.000,00	16.572.000,00	-164.442.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			182.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.625.500,00	41.625.500,00	10.405.400,00	-31.220.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	304.500.000,00	2.159.000.000,00	2.117.550.000,00	1.813.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	101.500.000,00	0,00	0,00	-101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.510.588.100,00	554.768.332,00	311.133.657,00	-3.199.454.443,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.511.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111.191.700,00	234.466.700,00	81.046.500,00	-30.145.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	76.018.400,00	100.000.000,00	74.999.750,00	-1.018.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.014.887.620,00	1.389.204.000,00	1.595.998.305,00	581.110.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.075.000,00	0,00	0,00	-5.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	137.046.000,00	0,00	0,00	-137.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			138.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	203.000.000,00	0,00	0,00	-203.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUH JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	1.015.000.000,00	0,00	0,00	-1.015.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	101.500.000,00	0,00	0,00	-101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	2.980.500,00	100.000.000,00	0,00	-2.980.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	78.240.000,00	28.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	79.600.000,00	29.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.709.300,00	56.049.300,00	14.939.650,00	11.230.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	752.088.000,00	844.620.000,00	605.111.850,00	-146.976.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			753.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	25.400.000,00	0,00	0,00	-25.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.032.242.871,00	1.411.762.742,00	1.354.084.342,00	321.841.471,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.032.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Kota/Kab, atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	344.590.000,00	364.041.000,00	194.020.500,00	-150.569.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	101.500.000,00	0,00	0,00	-101.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	87.853.700,00	181.052.000,00	87.376.000,00	-477.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	630.980.800,00	500.000.000,00	200.000.000,00	-430.980.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			631.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																			
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	36.357.357.537,00	0,00	0,00	-36.357.357.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			37.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SLB APM Pendidikan Menengah APK Pendidikan Menengah				73,65 56,57 97,7 % % %	56,57 73,65 97,7 % % %	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APK Pendidikan Menengah Atas (%), APM Pendidikan Menengah Atas (%)				56,88 %	56,88 %	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00		-		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.001.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	200.000.000,00	309.639.000,00	-90.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				37 Unit	77 Unit	7.300.000.000,00	14.788.000.000,00	16.548.740.000,00	9.248.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	3 Unit	200.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	122.556.000,00	-77.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	7 Ruang	200.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	34 Paket	650.000.000,00	7.200.000.000,00	8.392.784.085,00	7.742.784.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1028 Paket	6.000.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	-5.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	12 Unit	150.000.000,00	4.293.242.454,00	4.293.242.454,00	4.143.242.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				40 Paket	18 Paket	42.650.499.000,00	4.925.976.000,00	4.925.976.000,00	-37.724.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			42.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2000 Peserta didik	1818 Peserta didik	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	5.461.202.000,00	-298.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				32000 Peserta Didik	36148 Peserta Didik	1.602.000.000,00	16.660.000.000,00	16.660.000.000,00	15.058.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.603.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				236 Satuan Pendidikan	346 Satuan Pendidikan	238.300.000.000,00	244.068.498.000,00	244.068.498.000,00	5.768.498.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			238.301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				53 Orang	30 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	25.285.000,00	-124.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				50 Orang	50 Orang	49.998.000,00	0,00	0,00	-49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				50 Konten Digital	50 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	4 Dokumen	812.704.700,00	670.000.000,00	670.000.000,00	-142.704.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			813.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.998.000,00	0,00	0,00	-49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	6250 Buku	50.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Unit	18 Unit	1.220.000.000,00	3.180.000.000,00	3.261.700.000,00	2.041.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.001.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	163.457.000,00	-236.543.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	18 Ruang	400.000.000,00	200.000.000,00	2.642.033.416,00	2.242.033.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	9 Ruang	2.260.000.000,00	3.220.000.000,00	3.220.000.000,00	960.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.001.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	49.998.000,00	0,00	0,00	-49.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				236 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	5.719.734.221,00	6.184.964.402,00	6.184.964.402,00	465.230.181,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK Pendidikan Menengah Kejuruan (%), APM Pendidikan Menengah Kejuruan (%)				37,27 %	37,27 %	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00		-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-			295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Unit	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				1 Ruang	4 Ruang	400.000.000,00	0,00	1.104.641.618,00	704.641.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	14 Ruang	400.000.000,00	0,00	2.316.234.427,00	1.916.234.427,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	4 Ruang	400.000.000,00	0,00	287.846.830,00	-112.153.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	203.840.043,00	-196.159.957,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	40 Unit	5.780.000.000,00	7.612.000.000,00	8.665.883.190,00	2.885.883.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	102.111.019,00	-97.888.981,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	5.685.000.000,00	5.685.000.000,00	5.535.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	2496 Paket	6.000.000.000,00	840.000.000,00	1.384.024.000,00	-4.615.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	48 Paket	95.249.125.000,00	48.774.217.000,00	63.714.661.400,00	-31.534.463.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			95.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10 Peserta didik	10 Peserta didik	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	9369 Peserta Didik	2.196.872.300,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.803.127.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				111 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	147.032.120.000,00	137.830.230.000,00	137.830.230.000,00	-9.201.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			148.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				50 Orang	175 Orang	452.821.600,00	100.000.000,00	26.827.508,00	-425.994.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.064.200.000,00	250.400.000,00	250.400.000,00	-813.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.065.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK																			
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik																			
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1 Buku	1 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	1 Ruang	2.000.000.000,00	300.000.000,00	428.946.937,00	-1.571.053.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.000.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	5 Ruang	200.000.000,00	500.000.000,00	696.111.293,00	496.111.293,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				111 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	7.250.000.000,00	8.638.483.206,00	8.638.483.206,00	1.388.483.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	146.037.206,00	-53.962.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APM SLB (%)				56,57 %	56,57 %	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	2 Unit	3.200.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-2.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas																		
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)																		
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																		
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas																		
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)																		
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																		
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	57 Paket	6.173.978.000,00	4.778.401.000,00	4.778.401.000,00	-1.395.577.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SLB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.174.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	494 Peserta Didik	1.246.551.900,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-746.551.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.247.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	100.000.000,00	41.314.500,00	-8.685.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	40.249.720.000,00	43.628.300.000,00	43.628.300.000,00	3.378.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.300.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				0 Orang	344 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	26.827.500,00	-123.172.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	1 Dokumen	644.626.700,00	200.000.100,00	200.000.100,00	-444.626.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	1 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik																		
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.100,00	0,00	0,00	-50.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			801.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.603.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	484.120.000,00	424.840.000,00	424.840.000,00	-59.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.010.000.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			401.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan				-	51 dokumen	341.148.800,00	300.000.000,00	242.300.000,00	10.851.200,00							352.000.000,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang ditetapkan (dokumen)				-	51 Dokumen	290.000.000,00	300.000.000,00	242.300.000,00	-47.700.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				1 Orang	40 Orang	46.000.000,00	300.000.000,00	242.300.000,00	196.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah				1 Buku	1 Buku	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			47.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-				-	-	51.148.800,00	0,00	0,00	-51.148.800,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	11.148.800,00	0,00	0,00	-11.148.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah				1 Buku	1 Buku	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan				-	80 %	1.206.125.200,00	1.229.646.511,00	433.370.011,00	874.800,00							1.207.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)				-	80 %	1.206.125.200,00	1.229.646.511,00	433.370.011,00	-772.755.189,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.207.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	554.391.950,00	609.646.511,00	220.088.511,00	-334.303.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	1 Laporan	651.733.250,00	620.000.000,00	213.281.500,00	-438.451.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			652.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi				-	66 %	532.918.000,00	100.000.000,00	0,00	2.082.000,00							535.000.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan menengah yang diterbitkan				-	66 %	224.091.400,00	100.000.000,00	0,00	-224.091.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	123.530.640,00	100.000.000,00	0,00	-123.530.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.560.760,00	0,00	0,00	-100.560.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah izin pendidikan khusus yang diterbitkan				-	66 %	308.826.600,00	0,00	0,00	-308.826.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	102.942.200,00	0,00	0,00	-102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	102.942.200,00	0,00	0,00	-102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	102.942.200,00	0,00	0,00	-102.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah				-	12 24 dokumen Orang	533.000.000,00	49.600.000,00	19.569.000,00	7.000.000,00							540.000.000,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun 2. Jumlah penerima penghargaan bahasa dan sastra daerah				-	12 Dokumen 24 Orang	533.000.000,00	49.600.000,00	19.569.000,00	-513.431.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				1 Kamus	1 Kamus	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi				1 Bahasa	1 Bahasa	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi				1 Publikasi	1 Publikasi	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				1 Orang	23 Orang	74.000.000,00	36.000.000,00	12.769.000,00	-61.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi				1 Buku	1 Buku	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				1 Peserta Didik	38 Peserta Didik	84.000.000,00	13.600.000,00	6.800.000,00	-77.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi																				
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	107.000.000,00	0,00	0,00	-107.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		108.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
		UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN																			2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00				
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00						1.810.891.739.850,00				
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	101.891.700,00	44.789.600,00	15.259.900,00	-86.631.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.326.200,00	14.790.800,00	3.697.700,00	-15.628.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		29.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	775.520.000,00	154.298.450,00	274.922.725,00	-500.597.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		693.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	112.200.000,00	31.302.000,00	31.302.000,00	-80.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			316.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	269.852.449,00	223.437.578,00	213.679.378,00	-56.173.071,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			193.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	15.620.000,00	34.448.200,00	17.224.100,00	1.604.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	20.212.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	20 Orang	49.998.000,00	92.553.000,00	16.530.000,00	-33.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	5 Konten Digital	49.998.000,00	92.553.000,00	16.530.000,00	-33.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	92.553.000,00	16.530.000,00	-33.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	72.445.000,00	9.680.750,00	-40.319.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	72.463.000,00	9.685.250,00	-40.314.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	72.445.000,00	9.680.750,00	-40.319.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20 Orang	15 Orang	50.000.000,00	55.335.000,00	6.095.250,00	-43.904.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	2 Konten Digital	50.000.000,00	55.348.000,00	6.098.500,00	-43.901.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	15 Orang	50.000.000,00	55.352.000,00	6.095.500,00	-43.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00					2.581.377.757.851,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00			
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00			
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00						-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	32.250.000,00	0,00	0,00	-32.250.000,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00						-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.335.950,00	12.932.350,00	5.078.400,00	-8.257.550,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.487.646.500,00	301.150.200,00	141.130.600,00	-2.346.515.900,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.750.000,00	14.773.900,00	3.693.475,00	-11.056.525,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	202.979.978,00	221.515.386,00	110.757.693,00	-92.222.285,00				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00						-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	179.676.900,00	0,00	0,00	-179.676.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.390.000,00	1.597.500,00	-4.902.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23.773.500,00	23.773.500,00	17.646.450,00	-6.127.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.502.824.347,00	2.525.730.168,00	2.513.245.168,00	10.420.821,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.936.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	11.360.000,00	11.360.000,00	5.680.000,00	-5.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	3.736.070.000,00	5.056.700.000,00	5.056.700.000,00	1.320.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	3.222.570.000,00	2.623.530.000,00	2.623.530.000,00	-599.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			351.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	313.950.000,00	331.240.000,00	331.240.000,00	17.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			61.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00					2.581.377.757.851,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	32.250.000,00	0,00	0,00	-32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.243.800,00	22.812.300,00	5.368.700,00	-27.875.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	126.163.300,00	121.756.500,00	49.822.400,00	-76.340.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			127.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.544.500,00	21.520.000,00	5.682.500,00	-30.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	175.998.066,00	187.598.500,00	93.799.250,00	-82.198.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			131.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	52.658.000,00	0,00	0,00	-52.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-50.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.361.500,00	32.358.050,00	21.570.635,00	-17.790.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157.039.328,00	179.517.512,00	179.517.512,00	22.478.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	9.250.000,00	7.100.000,00	3.550.000,00	-5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	5.638.720.000,00	4.662.450.000,00	4.662.450.000,00	-976.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	2.193.720.000,00	1.813.760.000,00	1.813.760.000,00	-379.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	300.500.000,00	234.260.000,00	234.260.000,00	-66.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			31.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.750.000,00	0,00	0,00	-30.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.156.300,00	2.579.600,00	644.900,00	-3.511.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.701.380.685,00	118.529.185,00	51.406.546,00	-1.649.974.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.869.000,00	16.996.300,00	4.249.075,00	-22.619.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	393.214.000,00	196.761.100,00	98.380.550,00	-294.833.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	248.672.400,00	0,00	0,00	-248.672.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.500.000,00	18.500.000,00	14.530.000,00	-13.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			33.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.908.916.912,00	1.847.550.098,00	1.840.054.498,00	-68.862.414,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	13.590.000,00	9.940.000,00	4.970.000,00	-8.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	2.215.200.000,00	3.305.310.000,00	3.305.310.000,00	1.090.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.975.350.000,00	1.240.070.000,00	1.240.070.000,00	-735.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			426.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	535.210.000,00	243.100.000,00	243.100.000,00	-292.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00					2.581.377.757.851,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			34.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.112.500,00	3.112.500,00	778.125,00	-2.334.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.905.287.800,00	69.100.460,00	26.425.115,00	-3.878.862.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.369.444,00	12.820.900,00	3.205.225,00	-8.164.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	208.961.000,00	209.369.900,00	104.684.950,00	-104.276.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			208.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	73.497.660,00	0,00	0,00	-73.497.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.700.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-4.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.100.000,00	35.100.000,00	30.555.000,00	-4.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	68.277.436,00	0,00	0,00	-68.277.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.582.418.760,00	1.801.405.320,00	1.795.175.120,00	212.756.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	8.520.000,00	5.025.900,00	2.512.950,00	-6.007.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	3.282.500.000,00	4.505.070.000,00	4.505.070.000,00	1.222.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	352.430.000,00	1.319.570.000,00	1.319.570.000,00	967.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			376.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				4 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	793.000.000,00	449.540.000,00	449.540.000,00	-343.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			795.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.200.350,00	3.200.350,00	804.337,00	-2.396.013,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.291.504.148,00	87.739.500,00	34.499.875,00	-1.257.004.273,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.296.295.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.930.000,00	6.765.000,00	1.691.250,00	-5.238.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.684.250,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	341.385.000,00	326.223.000,00	163.111.500,00	-178.273.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			192.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	122.477.200,00	0,00	0,00	-122.477.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.528.000,00	19.230.000,00	13.597.500,00	-16.930.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	337.314.052,00	416.987.719,00	405.231.506,00	67.917.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			295.431.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.110.000,00	2.920.000,00	1.460.000,00	-3.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				32 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	5.420.900.000,00	3.525.390.000,00	3.525.390.000,00	-1.895.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.551.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				18 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	1.775.430.000,00	1.435.940.000,00	1.435.940.000,00	-339.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	475.670.000,00	474.960.000,00	474.960.000,00	-710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.771.000,00	2.729.000,00	682.250,00	-2.088.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.314.550.100,00	67.084.300,00	27.638.575,00	-2.286.911.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.328.664.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.247.000,00	7.247.000,00	1.811.750,00	-5.435.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.247.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	193.321.082,00	291.586.753,00	145.793.377,00	-47.527.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			195.312.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.698.900,00	0,00	0,00	-27.698.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.020.000,00	7.020.000,00	1.755.000,00	-265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.030.000,00	21.600.000,00	17.100.000,00	-930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	648.649.456,00	887.087.682,00	868.108.182,00	219.458.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.950.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			26.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	7.100.000,00	8.560.000,00	4.280.000,00	-2.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	4.039.400.000,00	6.235.301.974,00	11.669.401.974,00	7.630.001.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.179.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				15 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	3.997.040.000,00	3.603.340.000,00	6.637.740.000,00	2.640.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	462.670.000,00	228.800.000,00	361.600.000,00	-101.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.162.500,00	3.162.500,00	790.625,00	-2.371.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.292.220.900,00	100.639.340,00	39.939.835,00	-1.252.281.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.192.359.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.269.000,00	19.329.000,00	4.832.250,00	-18.436.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			29.329.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	270.393.524,00	277.736.550,00	138.868.275,00	-131.525.249,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			196.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.060.000,00	5.030.000,00	1.257.500,00	-802.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.660.000,00	17.660.000,00	14.092.000,00	-3.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			13.503.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	401.145.126,00	454.334.216,00	448.793.780,00	47.648.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			329.237.050,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16.550.000,00	16.950.000,00	12.075.000,00	-4.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	8.760.000,00	7.139.300,00	3.569.650,00	-5.190.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	9.797.970.000,00	8.993.051.648,00	8.993.051.648,00	-804.918.352,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			14.864.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	4.452.500.000,00	3.584.750.000,00	3.584.750.000,00	-867.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			226.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				4 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	529.490.000,00	529.490.000,00	529.490.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.183.050,00	1.751.000.000,00	1.168.952.000,00	118.768.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.064.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.150.000,00	0,00	0,00	-12.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	21.728.706.941,00	7.787.170.256,00	5.922.488.215,00	-15.806.218.726,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		21.113.106.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.995.500,00	2.993.500,00	748.375,00	-2.247.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67.454.794,00	49.661.000,00	16.155.250,00	-51.299.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			163.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.785.000,00	9.605.000,00	2.401.250,00	-7.383.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	296.455.000,00	305.196.000,00	152.598.000,00	-143.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			291.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.484.376.100,00	150.000.000,00	157.840.000,00	-2.326.536.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.147.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.093.540,00	0,00	0,00	-35.093.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.419.445.413,00	11.326.855.641,00	10.831.066.061,00	411.620.648,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		9.340.931.150,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22.206.000,00	25.379.600,00	20.474.600,00	-1.731.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	161.878.376,00	240.030.156,00	227.646.890,00	65.768.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			111.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.777.674.500,00	1.275.728.400,00	611.808.200,00	-1.165.866.300,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.886.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.190.000,00	5.280.000,00	2.640.000,00	-7.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	754.051.453.521,00	651.345.972.784,00	685.701.638.756,00	13.800.564.480,00							767.852.018.001,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	367.754.177.921,00	363.222.063.478,00	373.927.490.979,00	6.173.313.058,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		388.959.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	5.698.490.000,00	10.580.450.000,00	10.580.450.000,00	4.881.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.822.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	304.072.788.900,00	234.824.943.206,00	258.621.985.427,00	-45.450.803.473,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.673.810.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	2.028.610.000,00	2.806.300.000,00	2.806.300.000,00	777.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.027.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	82.224.486.700,00	53.298.966.100,00	53.152.162.350,00	-29.072.324.350,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		83.218.698.001,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		SMKN 1 PARIAMAN								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.876.507.400,00	1.876.507.400,00	1.876.507.400,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	NON URUSAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
		SMKN 2 PARIAMAN								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	242.947.800,00	242.947.800,00	242.947.800,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meringkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	NON URUSAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
		SMKN 3 PARIAMAN								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		SMKN 4 PARIAMAN								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 BUKITTINGGI							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.873.200.000,00	1.873.200.000,00	1.873.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 2 BUKITTINGGI							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.767.414.032,00	1.767.414.032,00	1.767.414.032,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 SUMATERA BARAT							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 PADANG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	-	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.576.621.045,00	2.576.621.045,00	2.576.621.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			2.580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 2 PADANG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	744.798.771,00	744.798.771,00	744.798.771,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			745.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 4 PADANG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 5 PADANG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	-	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 6 PADANG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.172.542.627,00	1.172.542.627,00	1.172.542.627,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 8 PADANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.212.160.000,00	1.212.160.000,00	1.212.160.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 9 PADANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.158.750.000,00	1.158.750.000,00	1.158.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 10 PADANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMK PP NEGERI PADANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	340.880.000,00	340.880.000,00	340.880.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 PAYAKUMBUH								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.981.400.000,00	2.981.400.000,00	2.981.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
		SMKN 2 PAYAKUMBUH							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	3.645.016.000,00	3.645.016.000,00	3.645.016.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 3 PAYAKUMBUH							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 0	1 0	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
		SMKN 2 SAWAHLUNTO							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	293.095.000,00	293.095.000,00	293.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			295.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 AMPEK ANGKEK								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.384.203.978,00	1.384.203.978,00	1.384.203.978,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 2 LUBUK BASUNG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.755.120.000,00	2.755.120.000,00	2.755.120.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 KOTO BARU								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.906.505.000,00	1.906.505.000,00	1.906.505.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.910.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 SUNGAI RUMBAI								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.250.600.000,00	1.250.600.000,00	1.250.600.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SMKN 1 GUGUK								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 KECAMATAN LUAK								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 SULIKI								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN PP PADANG MENGATAS								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	-	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 0	1 0	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 ENAM LINGKUNG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	931.436.000,00	931.436.000,00	931.436.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 GUNUNG TALANG								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 LEMBAH GUMANTI								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	782.600.000,00	782.600.000,00	782.600.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 LINTAU BUO								3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00						2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 2 BATUSANGKAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 2 KEPULAUAN MENTAWAI							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 0	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 LUBUK SIKAPING							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 KINALI							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 TALAMAU							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 PASAMAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.067.678.700,00	1.067.678.700,00	1.067.678.700,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 SIJUNJUNG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	-	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	76.079.048,00	76.079.048,00	76.079.048,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 3 SIJUNJUNG							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMKN 1 PAINAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	234.100.000,00	234.100.000,00	234.100.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		SMKN 1 RANAH PESISIR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.351.502.070.636,00	2.427.486.831.281,00	2.546.552.269.468,00	-804.949.801.168,00							2.581.377.757.851,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	2.594.837.425.115,00	1.774.461.611.986,00	1.860.155.391.701,00	-783.945.685.265,00							1.810.891.739.850,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	36.357.357.537,00	33.106.655.401,00	33.106.655.401,00	-3.250.702.136,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		68.983.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			111.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		DINAS KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	99.128.332.782,00	98.978.051.510,00	101.797.756.083,00	-80.066.971.726,00							19.061.361.056,00		
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	488.151.398,00	245.101.000,00	146.875.000,00	-341.276.398,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		487.686.246,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1 Dokumen	428.180.398,00	232.901.000,00	140.779.000,00	-287.401.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			421.718.146,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1 Laporan	59.971.000,00	12.200.000,00	6.096.000,00	-53.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			65.968.100,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	68.350.827.515,00	67.172.319.688,00	72.023.875.599,00	3.673.048.084,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				509 Orang/ Bulan	553 Orang/ Bulan	67.647.442.426,00	66.727.224.688,00	71.346.535.599,00	3.699.093.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meringkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	649.304.489,00	442.960.000,00	676.320.000,00	27.015.511,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	54.080.600,00	2.135.000,00	1.020.000,00	-53.060.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	390.594.600,00	211.725.000,00	191.297.000,00	-199.297.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	214.005.000,00	194.900.000,00	182.900.000,00	-31.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	915.000,00	442.000,00	-99.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	76.589.600,00	15.910.000,00	7.955.000,00	-68.634.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	550.977.700,00	0,00	0,00	-550.977.700,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		714.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				451 Paket	451 Paket	357.000.000,00	0,00	0,00	-357.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			472.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	193.977.700,00	0,00	0,00	-193.977.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.633.104.667,00	4.031.794.795,00	1.765.317.976,00	132.213.309,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.794.735.077,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	99.994.000,00	30.172.000,00	7.530.500,00	-92.463.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	150.837.100,00	121.650.550,00	0,00	-150.837.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	115.720.000,00	0,00	0,00	-115.720.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	173.789.985,00	318.736.900,00	153.890.771,00	-19.899.214,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			318.594.744,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	177.055.442,00	374.185.700,00	140.325.100,00	-36.730.342,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			195.640.986,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	23.280.000,00	23.280.000,00	4.820.000,00	-18.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			58.873.651,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	699.433.640,00	2.970.775.145,00	1.315.028.605,00	615.594.965,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.590.844.846,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.387.188.600,00	279.281.300,00	240.000,00	-1.386.948.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		820.859.030,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	288.939.000,00	0,00	0,00	-288.939.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			403.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	29 Unit	0,00	279.281.300,00	240.000,00	240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			417.359.030,00	DINAS KESEHATAN	
1		NON URUSAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.683.383.491,00	3.921.017.695,00	3.673.001.785,00	-1.010.381.706,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.866.987.443,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	849.999.759,00	849.999.759,00	660.552.494,00	-189.447.265,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			927.999.759,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.995.796.584,00	1.866.359.056,00	1.772.382.474,00	-223.414.110,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.648.428.500,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.832.803.501,00	1.673.638.000,00	683.328.000,00	-1.149.475.501,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.088.874.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	303.000.000,00	303.000.000,00	183.200.000,00	-119.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			337.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				173 Unit	143 Unit	197.575.500,00	51.110.000,00	34.920.000,00	-162.655.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	487.838.000,00	487.838.000,00	49.868.000,00	-437.970.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			536.621.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	56 Unit	139.770.000,00	139.770.000,00	69.180.000,00	-70.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			153.747.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			264.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	144.294.236.137,00	120.864.761.441,00	129.033.409.017,00	-118.490.169.896,00							25.804.066.241,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.032.936.786,00	12.924.426.977,00	12.438.137.587,00	2.405.200.801,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.110.672.022,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				3 Kab/kota Layanan	3 Kabupaten Layanan	180.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-171.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				52 Unit	4 Unit	551.493.180,00	35.015.440,00	0,00	-551.493.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			606.642.498,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				19 Dokumen	19 Dokumen	129.506.448,00	59.671.805,00	59.671.805,00	-69.834.643,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			142.457.092,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	4 Paket	5.571.488.452,00	4.889.623.218,00	4.889.623.218,00	-681.865.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		6.128.637.297,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	133.327.011.042,00	107.680.313.934,00	116.411.930.765,00	-16.915.080.277,00			-	-	-		14.888.948.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				66616 Orang	66616 Orang	693.328.420,00	92.420.000,00	56.263.000,00	-637.065.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.363.261.262,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 % Orang	332.620 Orang	1.118.150.800,00	118.500.000,00	17.846.900,00	-1.100.303.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		1.230.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				4 Dokumen	6 Dokumen	1.400.000.000,00	581.520.000,00	488.154.000,00	-911.846.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	19.298.000,00	10.776.000,00	-139.224.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.272.000,00	13.380.000,00	-86.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		44.299.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	3 Dokumen	1.112.617.455,00	238.167.000,00	123.903.000,00	-988.714.455,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		2.746.492.850,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	29.138.000,00	8.127.000,00	-141.873.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		32.051.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	47.540.000,00	8.200.000,00	-241.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	15.040.000,00	8.250.000,00	-91.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		50.724.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.931.000,00	17.728.000,00	-17.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	432.958.000,00	278.880.986,00	278.880.986,00	-154.077.014,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	-			476.253.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.920.000,00	960.000,00	-249.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				3 Dokumen	3 Dokumen	173.539.627,00	77.935.000,00	77.935.000,00	-95.604.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	-			190.893.590,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				16 Orang	10 Orang	250.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-104.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	119.765.122.167,00	102.763.841.248,00	111.946.437.129,00	-7.818.685.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	597.635.560,00	283.998.000,00	186.158.000,00	-411.477.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			657.399.116,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	233.467.799,00	10.068.000,00	4.670.000,00	-228.797.799,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			17.899.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				52 Dokumen	26 Dokumen	3.486.716.600,00	1.881.995.500,00	2.147.498.500,00	-1.339.218.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.863.428.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	121.933.600,00	11.520.000,00	2.880.000,00	-119.053.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	937.829.987,00	71.770.000,00	36.765.000,00	-901.064.987,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.031.612.985,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	2 Paket	50.000.000,00	47.160.000,00	39.570.000,00	-10.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	51.880.000,00	32.895.000,00	-27.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				19 KAB/KOTA Keluarga	3.500 Keluarga	150.000.000,00	47.336.000,00	22.814.000,00	-127.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	105.000.000,00	20.501.900,00	20.501.900,00	-84.498.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		95.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	20.501.900,00	20.501.900,00	-84.498.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			95.700.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	829.288.309,00	239.518.630,00	162.838.765,00	-666.449.544,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		708.746.146,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	19 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	44.625.000,00	18.460.000,00	-31.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				36 Unit	44 Unit	544.314.679,00	9.920.000,00	5.488.000,00	-538.826.679,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			598.746.146,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	512.774.700,00	610.094.800,00	585.739.700,00	-276.454.560,00							236.320.140,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-				-	-	84.444.000,00	14.660.000,00	7.330.000,00	-77.114.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				580 Orang	580 Orang	84.444.000,00	14.660.000,00	7.330.000,00	-77.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	428.330.700,00	595.434.800,00	578.409.700,00	150.079.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		236.320.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				580 Orang	580 Orang	317.403.300,00	553.468.000,00	553.468.000,00	236.064.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.427.400,00	0,00	0,00	-34.427.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			136.870.140,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	300.329.000,00	6.970.000,00	0,00	-112.791.101,00							187.537.899,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-				-	-	237.336.687,00	1.830.000,00	0,00	-237.336.687,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		118.246.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				56 Sarana	12 Sarana	237.336.687,00	1.830.000,00	0,00	-237.336.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			118.246.355,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-				-	-	62.992.313,00	5.140.000,00	0,00	-62.992.313,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		69.291.544,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				10 Sarana	6 Sarana	62.992.313,00	5.140.000,00	0,00	-62.992.313,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			69.291.544,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	1.068.271.805,00	928.419.000,00	646.161.000,00	423.119.195,00							1.491.391.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	661.030.000,00	467.750.000,00	-32.250.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.201.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				11 Dokumen	7 Dokumen	500.000.000,00	661.030.000,00	467.750.000,00	-32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.201.838.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	86.769.000,00	5.269.000,00	-244.731.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	86.769.000,00	5.269.000,00	-244.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	318.271.805,00	180.620.000,00	173.142.000,00	-145.129.805,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		14.553.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				5 Dokumen	1 Dokumen	318.271.805,00	180.620.000,00	173.142.000,00	-145.129.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			14.553.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT								245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00					46.780.676.336,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	99.128.332.782,00	98.978.051.510,00	101.797.756.083,00	-80.066.971.726,00							19.061.361.056,00	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.387.188.600,00	279.281.300,00	240.000,00	-1.386.948.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		820.859.030,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	999.000.000,00	0,00	0,00	-999.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.832.803.501,00	1.673.638.000,00	683.328.000,00	-1.149.475.501,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.088.874.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	19.811.301.310,00	21.443.174.032,00	23.313.820.723,00	3.502.519.413,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		7.287.718.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.278.877.586,00	6.592.821.465,00	7.024.187.685,00	745.310.099,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	144.294.236.137,00	120.864.761.441,00	129.033.409.017,00	-118.490.169.896,00							25.804.066.241,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.032.936.786,00	12.924.426.977,00	12.438.137.587,00	2.405.200.801,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.110.672.022,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	101.432.248,00	101.432.248,00	100.509.748,00	-922.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				28 Unit	28 Unit	212.894.122,00	212.857.725,00	212.829.975,00	-64.147,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	829.288.309,00	239.518.630,00	162.838.765,00	-666.449.544,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		708.746.146,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan</i>				4 Unit	4 Unit	184.973.630,00	184.973.630,00	138.890.765,00	-46.082.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD BKOM & PELKES								245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00						46.780.676.336,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	99.128.332.782,00	98.978.051.510,00	101.797.756.083,00	-80.066.971.726,00							19.061.361.056,00		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.633.104.667,00	4.031.794.795,00	1.765.317.976,00	132.213.309,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.794.735.077,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.012.500,00	5.012.500,00	1.250.000,00	-3.762.500,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.516.250,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	5.026.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.533.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	NON URUSAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				16 Laporan	16 Laporan	0,00	29.516.000,00	14.758.000,00	14.758.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			94.530.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	NON URUSAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			76.050.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.683.383.491,00	3.921.017.695,00	3.673.001.785,00	-1.010.381.706,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.866.987.443,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	405.032.064,00	405.032.064,00	380.300.000,00	-24.732.064,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			526.541.683,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	752.089.544,00	743.641.316,00	815.965.217,00	63.875.673,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			977.716.407,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.832.803.501,00	1.673.638.000,00	683.328.000,00	-1.149.475.501,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.088.874.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	2 Unit	34.500.000,00	34.500.000,00	17.450.000,00	-17.050.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			77.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	14 Unit	15.120.000,00	15.120.000,00	7.560.000,00	-7.560.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			19.656.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	19.811.301.310,00	21.443.174.032,00	23.313.820.723,00	3.502.519.413,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		7.287.718.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.300.000.000,00	2.006.307.657,00	2.006.307.657,00	706.307.657,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	144.294.236.137,00	120.864.761.441,00	129.033.409.017,00	-118.490.169.896,00							25.804.066.241,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.032.936.786,00	12.924.426.977,00	12.438.137.587,00	2.405.200.801,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.110.672.022,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				14 Unit	15 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			29.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	125.323.700,00	125.323.700,00	0,00	-125.323.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			188.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	133.327.011.042,00	107.680.313.934,00	116.411.930.765,00	-16.915.080.277,00			-	-	-		14.888.948.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	35.533.200,00	23.001.000,00	22.001.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	512.774.700,00	610.094.800,00	585.739.700,00	-276.454.560,00							236.320.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	428.330.700,00	595.434.800,00	578.409.700,00	150.079.000,00			-	-	-		236.320.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				30 Orang	30 Orang	76.500.000,00	41.966.800,00	24.941.700,00	-51.558.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			99.450.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00						46.780.676.336,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	99.128.332.782,00	98.978.051.510,00	101.797.756.083,00	-80.066.971.726,00							19.061.361.056,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.633.104.667,00	4.031.794.795,00	1.765.317.976,00	132.213.309,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.794.735.077,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.940.000,00	44.940.000,00	42.990.000,00	-1.950.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.832.803.501,00	1.673.638.000,00	683.328.000,00	-1.149.475.501,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.088.874.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	19.811.301.310,00	21.443.174.032,00	23.313.820.723,00	3.502.519.413,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		7.287.718.460,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.807.423.724,00	5.047.794.910,00	5.047.794.910,00	240.371.186,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	144.294.236.137,00	120.864.761.441,00	129.033.409.017,00	-118.490.169.896,00							25.804.066.241,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.032.936.786,00	12.924.426.977,00	12.438.137.587,00	2.405.200.801,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.110.672.022,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	374.044.394,00	40.256.814,00	40.256.814,00	-333.787.580,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	133.327.011.042,00	107.680.313.934,00	116.411.930.765,00	-16.915.080.277,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		14.888.948.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	9.188.250,00	-240.811.750,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN	
		RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT								245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00						46.780.676.336,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							245.303.944.424,00	221.388.296.751,00	232.063.065.800,00	-13.240.878.624,00							46.780.676.336,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	99.128.332.782,00	98.978.051.510,00	101.797.756.083,00	-80.066.971.726,00							19.061.361.056,00		
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.633.104.667,00	4.031.794.795,00	1.765.317.976,00	132.213.309,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.794.735.077,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.683.383.491,00	3.921.017.695,00	3.673.001.785,00	-1.010.381.706,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.866.987.443,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	55.985.500,00	55.985.500,00	43.801.600,00	-12.183.900,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			61.584.050,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	624.470.040,00	0,00	0,00	-624.470.040,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			686.917.044,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.832.803.501,00	1.673.638.000,00	683.328.000,00	-1.149.475.501,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.088.874.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	55.000.000,00	42.300.000,00	21.150.000,00	-33.850.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	19.811.301.310,00	21.443.174.032,00	23.313.820.723,00	3.502.519.413,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		7.287.718.460,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.425.000.000,00	7.796.250.000,00	9.235.530.471,00	1.810.530.471,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.287.718.460,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	144.294.236.137,00	120.864.761.441,00	129.033.409.017,00	-118.490.169.896,00							25.804.066.241,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	10.032.936.786,00	12.924.426.977,00	12.438.137.587,00	2.405.200.801,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.110.672.022,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	23 Unit	1.677.077.395,00	4.927.128.027,00	4.927.128.027,00	3.250.050.632,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.844.785.135,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				-	1 Unit	0,00	861.592.000,00	861.592.000,00	861.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				3 Paket	4 Paket	837.176.847,00	1.640.026.000,00	1.315.026.000,00	477.849.153,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			785.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	133.327.011.042,00	107.680.313.934,00	116.411.930.765,00	-16.915.080.277,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		14.888.948.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>				1 Dokumen	12 Dokumen	1.457.711.027,00	703.650.000,00	703.650.000,00	-754.061.027,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Pungguang Kasiak Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.603.482.130,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI							226.100.000.000,00	259.639.197.228,00	261.996.053.537,00	35.896.053.537,00						330.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							226.100.000.000,00	259.639.197.228,00	261.996.053.537,00	35.896.053.537,00							330.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							226.100.000.000,00	259.639.197.228,00	261.996.053.537,00	35.896.053.537,00							330.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	220.000.000.000,00	248.639.197.228,00	250.996.053.537,00	60.000.000.000,00							280.000.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000.000,00	91.139.197.228,00	93.496.053.537,00	-6.503.946.463,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				760 Orang/ Bulan	764 Orang/ Bulan	100.000.000.000,00	91.139.197.228,00	93.496.053.537,00	-6.503.946.463,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	120.000.000.000,00	157.500.000.000,00	157.500.000.000,00	37.500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		180.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	120.000.000.000,00	157.500.000.000,00	157.500.000.000,00	37.500.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			180.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				95 %	95 %	6.100.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	43.900.000.000,00							50.000.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.</i>				90 %	90 %	6.100.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	4.900.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				2 Unit	1 Unit	6.100.000.000,00	0,00	0,00	-6.100.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				-	1 Unit	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bukik Apik Puhun	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN							70.849.554.000,00	66.292.872.187,00	66.709.126.181,00	-4.140.427.819,00						49.500.852.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							70.849.554.000,00	66.292.872.187,00	66.709.126.181,00	-4.140.427.819,00							49.500.852.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							70.849.554.000,00	66.292.872.187,00	66.709.126.181,00	-4.140.427.819,00							49.500.852.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				100 50 % %	100 50 % %	67.000.000.000,00	66.292.872.187,00	66.709.126.181,00	-19.933.000.000,00							47.067.000.000,00		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah				95 %	95 %	38.000.000.000,00	37.417.872.187,00	38.411.126.181,00	411.126.181,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				335 Orang/ Bulan	335 Orang/ Bulan	38.000.000.000,00	37.417.872.187,00	38.411.126.181,00	411.126.181,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)				50 %	50 %	29.000.000.000,00	28.875.000.000,00	28.298.000.000,00	-702.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		27.267.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	29.000.000.000,00	28.875.000.000,00	28.298.000.000,00	-702.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			27.267.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				89 %	89 %	3.688.402.000,00	0,00	0,00	-1.423.421.000,00							2.264.981.000,00		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				93 %	93 %	3.688.402.000,00	0,00	0,00	-3.688.402.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.264.981.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	0 Unit	1.188.402.000,00	0,00	0,00	-1.188.402.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.764.981.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				50 %	50 %	161.152.000,00	0,00	0,00	7.719.000,00							168.871.000,00		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				48 %	48 %	161.152.000,00	0,00	0,00	-161.152.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		168.871.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				123 Orang	123 Orang	161.152.000,00	0,00	0,00	-161.152.000,00	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			168.871.000,00	RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB. SAANIN	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR							183.997.634.000,00	175.703.029.088,00	167.955.424.792,00	-16.042.209.208,00							150.334.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							183.997.634.000,00	175.703.029.088,00	167.955.424.792,00	-16.042.209.208,00							150.334.000.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							183.997.634.000,00	175.703.029.088,00	167.955.424.792,00	-16.042.209.208,00							150.334.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				100 63 % %	100 63 % %	166.000.000.000,00	173.275.901.061,00	165.528.296.765,00	-15.666.000.000,00							150.334.000.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	66.000.000.000,00	63.025.901.061,00	64.646.296.765,00	-1.353.703.235,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		45.334.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				535 Orang/ Bulan	541 Orang/ Bulan	66.000.000.000,00	63.025.901.061,00	64.646.296.765,00	-1.353.703.235,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			45.334.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan				63 %	63 %	100.000.000.000,00	110.250.000.000,00	100.882.000.000,00	882.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		105.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100.000.000.000,00	110.250.000.000,00	100.882.000.000,00	882.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				95 85 % %	85 95 % %	17.836.482.000,00	2.427.128.027,00	2.427.128.027,00	-17.836.482.000,00							0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat				95 %	95 %	17.836.482.000,00	2.427.128.027,00	2.427.128.027,00	-15.409.353.973,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	16.284.782.000,00	0,00	0,00	-16.284.782.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	-	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	1 Unit	51.700.000,00	2.427.128.027,00	2.427.128.027,00	2.375.428.027,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				50 %	50 %	161.152.000,00	0,00	0,00	-161.152.000,00							0,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi				50 %	50 %	161.152.000,00	0,00	0,00	-161.152.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				400 Orang	400 Orang	161.152.000,00	0,00	0,00	-161.152.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH							145.604.793.000,00	143.245.214.379,00	144.272.986.579,00	-1.331.806.421,00							105.286.304.412,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							145.604.793.000,00	143.245.214.379,00	144.272.986.579,00	-1.331.806.421,00							105.286.304.412,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							145.604.793.000,00	143.245.214.379,00	144.272.986.579,00	-1.331.806.421,00							105.286.304.412,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD				100 50 % %	100 50 % %	140.000.000.000,00	140.818.086.433,00	141.845.858.633,00	-36.213.695.588,00							103.786.304.412,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</i>				100 %	100 %	50.000.000.000,00	46.318.086.433,00	47.345.858.633,00	-2.654.141.367,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		34.786.304.412,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				396 Orang/ Bulan	396 Orang/ Bulan	50.000.000.000,00	46.318.086.433,00	47.345.858.633,00	-2.654.141.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			34.786.304.412,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Tingkat Kemandirian Rumah Sakit</i>				50 %	50 %	90.000.000.000,00	94.500.000.000,00	94.500.000.000,00	4.500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		69.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	90.000.000.000,00	94.500.000.000,00	94.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			69.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				95 %	95 %	5.604.793.000,00	2.427.127.946,00	2.427.127.946,00	-4.104.793.000,00							1.500.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>				95 %	95 %	5.604.793.000,00	2.427.127.946,00	2.427.127.946,00	-3.177.665.054,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>				1 Unit	13 Unit	5.604.793.000,00	2.427.127.946,00	2.427.127.946,00	-3.177.665.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tataruang Provinsi Sumatera Barat</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	519.350.618,00	551.010.000,00	272.646.717,00	-246.703.901,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		555.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	232.340.618,00	264.000.000,00	140.188.158,00	-92.152.460,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			240.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	82.010.000,00	82.010.000,00	21.466.100,00	-60.543.900,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	110.992.459,00	-94.007.541,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			225.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	32.878.017.716,00	37.231.223.353,00	38.200.180.788,00	5.322.163.072,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.265.017.716,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				331 Orang/ Bulan	331 Orang/ Bulan	32.740.000.000,00	35.219.544.050,00	36.238.501.485,00	3.498.501.485,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			33.040.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	88.017.716,00	1.911.679.303,00	1.911.679.303,00	1.823.661.587,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.017.716,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik				-	1 Laporan	463.925.000,00	275.045.000,00	140.272.500,00	-323.652.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	263.925.000,00	275.045.000,00	140.272.500,00	-123.652.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	360 Stel	422.280.000,00	939.400.000,00	620.760.000,00	198.480.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		460.280.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	182.280.000,00	699.400.000,00	620.760.000,00	438.480.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			185.280.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	21.200.000,00	-43.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			75.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	185.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00	-85.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108.000.000,00	108.000.000,00	60.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	946.151.000,00	1.413.024.000,00	816.645.500,00	-129.505.500,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.105.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.459.000,00	14.790.250,00	-20.209.750,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	139.550.300,00	178.521.575,00	38.521.575,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			145.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	422.280.000,00	725.753.500,00	442.093.000,00	19.813.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			670.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.880.000.000,00	2.129.555.816,00	2.114.555.816,00	234.555.816,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.005.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.987.327.350,00	5.892.736.001,00	5.929.887.296,00	1.942.559.946,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	900.000.000,00	844.290.000,00	618.795.000,00	-281.205.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			900.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	700.000.000,00	657.000.000,00	502.750.000,00	-197.250.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			750.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelilhara				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			360.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.102.210.934,00	3.361.800.000,00	2.079.041.975,00	-1.023.168.959,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.202.210.934,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum				-	88 %	4.500.286.000,00	3.814.502.000,00	3.433.866.250,00	3.899.714.000,00							8.400.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Instalasi Jaringan Air Minum				-	2 Lokasi	4.500.286.000,00	3.814.502.000,00	3.433.866.250,00	-1.066.419.750,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.400.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	160.264.000,00	76.330.475,00	-123.669.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				19 Kabupat en/Kota	19 Kabupat en/Kota	3.150.286.000,00	3.057.918.000,00	2.945.504.275,00	-204.781.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				3 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	100.000.000,00	99.959.200,00	-600.040.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				19 Kabupat en/Kota	19 Kabupat en/Kota	450.000.000,00	496.320.000,00	312.072.300,00	-137.927.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPA Regional yang dibangun				-	3 lokasi	682.182.000,00	1.526.515.000,00	1.380.316.225,00	8.517.818.000,00							9.200.000.000,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pembangunan/ Pengembangan TPA Sampah Regional				-	2 Lokasi	682.182.000,00	1.526.515.000,00	1.380.316.225,00	698.134.225,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		9.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2 Kabupate n/Kota	2 Kabupate n/Kota	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan				19 Kabupat en/Kota	19 Kabupat en/Kota	95.000.000,00	0,00	80.688.000,00	-14.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				-	150 Ton/hari	0,00	0,00	723.869.275,00	723.869.275,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	82.182.000,00	1.526.515.000,00	575.758.950,00	493.576.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional				-	88 %	760.236.000,00	853.424.000,00	713.629.125,00	1.639.764.000,00							2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terfasilitasinya Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)				-	1 Laporan	760.236.000,00	853.424.000,00	713.629.125,00	-46.606.875,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.400.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	110.236.000,00	0,00	0,00	-110.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	270.000.000,00	256.160.275,00	56.160.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				4 kabupaten/kota	4 kabupaten/kota	450.000.000,00	583.424.000,00	457.468.850,00	7.468.850,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Drainase Kewenangan Provinsi yang dikelola				-	25 Km	568.409.000,00	4.770.000,00	0,00	29.931.591.000,00							30.500.000.000,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya pembangunan drainase primer				-	3450 m	568.409.000,00	4.770.000,00	0,00	-568.409.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.500.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	568.409.000,00	4.770.000,00	0,00	-568.409.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				-	3 unit	356.681.630.001,00	59.382.364.995,00	41.903.572.538,00	-331.027.300.001,00							25.654.330.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya perencanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi				-	3 Unit	356.681.630.001,00	59.382.364.995,00	41.903.572.538,00	-314.778.057.463,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.654.330.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				28 Orang	28 Orang	200.000.000,00	178.270.000,00	92.597.850,00	-107.402.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara																		
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				74 Rumah Negara	74 Rumah Negara	175.000.000,00	138.958.000,00	65.632.650,00	-109.367.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS BINA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	11.035.243.117,00	23.728.000.000,00	8.952.661.600,00	-2.082.581.517,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				4 Dokumen	6 Dokumen	345.052.848.295,00	35.182.964.034,00	32.687.188.857,00	-312.365.659.438,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.052.049.868,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				-	2 kawasan	1.694.729.000,00	4.050.644.739,00	3.999.836.940,00	81.180.001,00							1.775.909.001,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian kegiatan keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat				-	13 Laporan	1.694.729.000,00	4.050.644.739,00	3.999.836.940,00	2.305.107.940,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.775.909.001,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																			
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				1 Kawasan	0 Kawasan	593.468.361,00	0,00	88.044.978,00	-505.423.383,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			647.597.936,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	3.746.000.000,00	3.768.557.600,00	3.643.557.600,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																			
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>				13 Dokumen	13 Dokumen	200.000.000,00	143.800.000,00	67.244.575,00	-132.755.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi</i>				-	555 meter	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																			
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi</i>				1690 KM	7 Dokumen KM	4.000.000.000,00	304.621.210,00	152.310.605,00	-3.847.689.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																			
			<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya</i>				1690 KM	1690 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																			
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				135,5 KM	6.236 KM	104.750.000.000,00	32.912.125.219,00	31.947.648.263,00	-72.802.351.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																			
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				108 KM	7.86 KM	73.600.000.000,00	76.875.611.000,00	47.067.614.480,00	-26.532.385.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				5 Jembatan	5 Jembatan	84.000.000.000,00	33.710.000.000,00	29.093.269.421,00	-54.906.730.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																			
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur</i>				1 KM	0 KM	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>				2 Jembatan	0 Jembatan	85.200.000.000,00	0,00	0,00	-85.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																			
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>				1 KM	1.37 KM	15.000.000.000,00	10.120.000.000,00	9.461.288.480,00	-5.538.711.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				11 Dokumen	10 Dokumen	17.340.570.000,00	6.286.357.740,00	5.870.805.240,00	-11.469.764.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dibangun				10 KM	7.44 KM	91.679.420.000,00	92.380.654.000,00	89.636.260.624,00	-2.043.159.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1690 KM	1 Dokumen KM	1.500.000.000,00	800.000.000,00	750.000.000,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																			
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				2 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	800.000.000,00	750.000.000,00	-2.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				-	89 %	2.134.656.400,00	1.430.155.221,00	873.389.261,00	104.705.601,00							2.239.362.001,00		
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya persetujuan substansi dan penetapan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat				-	1 Perda	585.415.012,00	317.582.000,00	241.782.850,00	-343.632.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		614.685.763,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	235.415.012,00	92.582.000,00	102.190.200,00	-133.224.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			247.185.763,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																			
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				3 Publikasi	3 Publikasi	200.000.000,00	100.000.000,00	68.037.300,00	-131.962.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																			
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				225 Orang	225 Orang	150.000.000,00	125.000.000,00	71.555.350,00	-78.444.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			157.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Tata Ruang				-	3 Laporan	955.636.451,00	325.000.000,00	140.591.500,00	-815.044.951,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.003.418.273,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	175.000.000,00	138.496.400,00	-511.503.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			682.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																			
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				14 Orang	14 Orang	305.636.451,00	150.000.000,00	2.095.100,00	-303.541.351,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			320.918.273,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				-	16 Dokumen	592.046.650,00	257.667.221,00	218.178.711,00	-373.867.939,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		618.162.740,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																			
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	1 Laporan	347.659.400,00	105.492.000,00	99.435.250,00	-248.224.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			364.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																			
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	244.387.250,00	152.175.221,00	118.743.461,00	-125.643.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			254.162.740,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				-	1 Laporan	1.558.287,00	529.906.000,00	272.836.200,00	271.277.913,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.095.225,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																			
			Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			397.260,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	84.320.000,00	37.813.900,00	37.513.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	115.586.000,00	57.935.300,00	57.635.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																			
			Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	150.000.000,00	143.873.200,00	143.673.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			397.260,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang																			
			Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang				1 Berita Acara	1 Berita Acara	300.000,00	90.000.000,00	6.570.000,00	6.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			595.890,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.12.1.04.0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																			
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	258.287,00	90.000.000,00	26.643.800,00	26.385.513,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			513.035,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00					222.173.316.604,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
1.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun				-	3 unit	356.681.630.001,00	59.382.364.995,00	41.903.572.538,00	-331.027.300.001,00							25.654.330.000,00		
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG				-	1 Laporan	356.681.630.001,00	59.382.364.995,00	41.903.572.538,00	-314.778.057.463,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.654.330.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																			
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				19 Kabupat en/Kota	0 Kabupate n/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				50 Dokumen	60 Dokumen	218.538.589,00	154.172.961,00	105.491.581,00	-113.047.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			227.280.132,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
2.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya				-	2 kawasan	1.694.729.000,00	4.050.644.739,00	3.999.836.940,00	81.180.001,00							1.775.909.001,00		
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya penanganan masalah teknis keciptakaryaan - P2BG				-	3 Laporan	1.694.729.000,00	4.050.644.739,00	3.999.836.940,00	2.305.107.940,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.775.909.001,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan				19 kabupat en/kota	19 kabupat en/kota	676.260.639,00	160.844.739,00	75.989.787,00	-600.270.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			703.311.065,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00					222.173.316.604,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi - UPTD Laboraorium Bahan Konstruksi				-	13 Laporan	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				100 KM	100 KM	2.003.968.000,00	1.120.845.000,00	803.707.687,00	-1.200.260.313,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		2.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD dengan Baik				-	1 Laporan	463.925.000,00	275.045.000,00	140.272.500,00	-323.652.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	254.324.355,00	254.324.355,00	154.324.355,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.034.046.044,00	0,00	0,00	-2.034.046.044,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	23.317.800,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	83.850.000,00	83.850.000,00	-12.150.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	434.766.495,00	434.766.495,00	-15.233.505,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	480.000.000,00	167.331.000,00	267.200.000,00	-212.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	800.000.000,00	768.266.000,00	781.738.000,00	-18.262.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Workshop dan Peralatan				-	30 Unit	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		2.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.038.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	-12.288.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		17.641.800,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	116.000.000,00	86.198.600,00	43.099.300,00	-72.900.700,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		127.600.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	142.400.000,00	71.200.000,00	0,00	-142.400.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		156.640.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		1.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77.601.700,00	79.019.600,00	0,00	-77.601.700,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		85.361.870,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	37.397.800,00	39.300.000,00	0,00	-37.397.800,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		41.137.580,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.400.000,00	20.058.000,00	16.182.600,00	-13.217.400,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		32.340.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	276.923.283,00	241.789.990,00	241.789.990,00	-35.133.293,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		304.615.611,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	119.730.000,00	119.730.000,00	63.315.000,00	-56.415.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			131.703.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	131.101.000,00	131.101.000,00	104.501.000,00	-26.600.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			144.211.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I				-	115.6 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				55 Jembatan	55 Jembatan	320.600.000,00	270.600.000,00	270.600.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			352.660.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				260.1 KM	260.1 KM	227.250.000,00	0,00	0,00	-227.250.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			249.975.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				260.1 KM	260.1 KM	8.994.184.393,00	5.899.212.810,00	5.799.791.810,00	-3.194.392.583,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.893.602.832,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.952 KM	0.043 KM	2.280.000.000,00	400.000.000,00	320.000.000,00	-1.960.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.508.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	-11.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	84.540.000,00	99.986.000,00	49.993.000,00	-34.547.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			92.994.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	71.200.000,00	67.819.000,00	0,00	-71.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			78.320.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.792.200,00	48.213.400,00	0,00	-42.792.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			47.071.420,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1.071.641.700,00	8.898.000,00	0,00	-1.071.641.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.178.805.870,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.020.000,00	28.650.000,00	24.127.500,00	-3.892.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.822.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	376.920.404,00	316.020.424,00	276.016.871,00	-100.903.533,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			414.612.444,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	128.130.000,00	120.430.000,00	72.915.000,00	-55.215.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			140.943.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	219.135.000,00	207.034.000,00	147.884.500,00	-71.250.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			241.048.500,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	222.787.200,00	0,00	0,00	-222.787.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			245.065.920,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II				-	121.05 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				73 Jembatan	73 Jembatan	268.536.000,00	268.536.000,00	268.536.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			295.389.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				263,75 KM	263,75 KM	210.026.460,00	157.315.220,00	157.315.220,00	-52.711.240,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			231.029.106,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	0,69 KM	0,00	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				263,75 KM	263,75 KM	6.996.525.646,00	5.127.985.648,00	5.266.668.567,00	-1.729.857.079,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.745.657.058,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	0.214 KM	3.000.000.000,00	813.253.308,00	1.411.772.200,00	-1.588.227.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	-11.250.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	96.070.000,00	77.759.000,00	38.879.500,00	-57.190.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			105.677.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	142.400.000,00	35.600.000,00	0,00	-142.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			156.640.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.262.000,00	8.980.200,00	0,00	-61.262.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			67.388.200,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	83.005.900,00	57.047.800,00	0,00	-83.005.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			91.306.490,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	15.600.000,00	-3.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			21.120.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.824.150,00	237.062.942,00	237.062.942,00	10.238.792,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			249.506.565,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	115.530.000,00	81.430.000,00	43.990.000,00	-71.540.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			127.083.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	151.334.000,00	151.334.000,00	112.734.000,00	-38.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			166.467.400,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	3.550.000,00	-3.550.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.810.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-110.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III				-	104.4 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				51 Jembatan	51 Jembatan	418.706.345,00	60.669.831,00	39.189.078,00	-379.517.267,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			460.576.996,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				198.83 KM	198.83 KM	140.017.640,00	157.042.388,00	157.042.388,00	17.024.748,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			154.019.404,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	0,2 KM	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				198.83 KM	198.83 KM	6.540.568.701,00	4.060.778.839,00	4.124.907.410,00	-2.415.661.291,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.194.625.572,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	2 KM	2.900.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-2.900.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.190.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	6.963.400,00	-8.036.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.247.000,00	130.247.000,00	142.098.199,00	11.851.199,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			143.271.700,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	3 Unit	213.600.000,00	106.800.000,00	0,00	-213.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			234.960.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.138.600,00	53.138.600,00	0,00	-53.138.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			58.452.460,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	195.889.100,00	76.031.900,00	0,00	-195.889.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			215.478.010,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	35.000.000,00	7.000.000,00	-193.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.650.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.870.000,00	27.870.000,00	10.006.920,00	-17.863.080,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.657.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	359.019.259,00	359.019.259,00	293.435.646,00	-65.583.613,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.657.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	147.030.000,00	147.030.000,00	102.973.800,00	-44.056.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			161.733.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	361.836.000,00	361.836.000,00	140.528.600,00	-221.307.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			398.019.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.810.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV				-	133.7 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				83 Jembatan	83 Jembatan	280.800.000,00	180.800.000,00	180.800.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			308.880.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	0.062 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				270.70 KM	270.70 KM	5.828.317.525,00	4.078.932.241,00	4.122.183.905,00	-1.706.133.620,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.965.373.454,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	0.04 KM	3.858.223.300,00	200.000.000,00	120.000.000,00	-3.738.223.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			4.244.045.630,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	25.600.000,00	6.915.450,00	-8.084.550,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		16.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	95.858.000,00	74.288.000,00	62.410.000,00	-33.448.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		105.443.800,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang</i>				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	-71.200.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		78.320.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	65.663.700,00	17.130.400,00	0,00	-65.663.700,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		72.230.070,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	10 Unit	146.292.300,00	1.130.381.400,00	0,00	-146.292.300,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		160.921.530,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			231.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21.380.000,00	-3.620.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	303.552.046,00	226.824.150,00	244.623.862,00	-58.928.184,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			333.907.251,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	286.157.000,00	256.931.000,00	130.215.000,00	-155.942.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			314.772.700,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.100.000,00	1.420.000,00	710.000,00	-6.390.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			7.810.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	116.578.500,00	116.578.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				-	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00		
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V				-	118.98 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				79 Jembatan	79 Jembatan	955.149.499,00	225.286.000,00	318.956.220,00	-636.193.279,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Atar Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.050.664.449,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				220,11 KM	220,11 KM	140.017.640,00	105.013.230,00	116.372.751,00	-23.644.889,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			154.019.404,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				220,11 KM	220,11 KM	6.472.506.946,00	3.085.960.820,00	3.055.732.408,00	-3.416.774.538,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.119.757.642,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,49 KM	1,49 KM	2.228.179.206,00	200.000.000,00	187.146.000,00	-2.041.033.206,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.450.997.128,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
		UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00						222.173.316.604,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							999.634.563.785,00	420.878.783.744,00	362.347.935.738,00	-637.286.628.047,00							222.173.316.604,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	60.634.129.440,00	63.111.792.279,00	57.691.290.161,00	8.986.509.881,00							69.620.639.321,00		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	3.093.312.000,00	2.995.384.255,00	1.954.064.529,00	-1.139.247.471,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.780.527.100,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	-11.250.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		16.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	189.908.000,00	165.448.000,00	82.724.000,00	-107.184.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		208.898.800,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang				-	12 Bulan	6.059.968.844,00	3.003.427.780,00	691.650.500,00	-5.368.318.344,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.022.157.080,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	-35.600.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			39.160.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		1.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.826.000,00	26.434.000,00	0,00	-99.826.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		109.808.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	57.731.800,00	86.562.180,00	2.557.500,00	-55.174.300,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		63.504.980,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	12 Bulan	8.396.604.128,00	10.352.515.891,00	10.230.216.252,00	1.833.612.124,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.945.140.271,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	59.250.000,00	43.567.500,00	13.567.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268.547.636,00	237.362.814,00	237.362.814,00	-31.184.822,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			295.402.400,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang				-	20 Unit	8.800.671.134,00	7.763.786.000,00	5.581.498.875,00	-3.219.172.259,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.092.517.154,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	256.390.000,00	252.623.000,00	164.978.500,00	-91.411.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			282.029.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	108.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-58.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			118.800.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan				81 %	81 %	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-499.595.229.663,00							72.383.076.281,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI				104.4 Km 115.6 Km 117.6 Km 118.98 Km 121.05 Km 133.7 Km 13 Laporan 30 Unit 555 meter	117.6 Km	571.978.305.944,00	286.704.615.510,00	252.352.035.238,00	-319.626.270.706,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		72.383.076.281,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				125 Jembatan	125 Jembatan	197.208.544,00	164.500.000,00	200.541.661,00	3.333.117,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			216.929.398,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				217.96 KM	217.96 KM	140.017.640,00	157.174.820,00	157.174.820,00	17.157.180,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			154.019.404,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				-	51.82 KM	0,00	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				217.96 KM	217.96 KM	7.731.712.459,00	4.681.340.186,00	4.584.400.000,00	-3.147.312.459,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.149.474.204,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.6 KM	0.6 KM	2.275.800.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-2.215.800.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.503.380.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	33.763.743.989,00	33.919.631.357,54	29.361.976.125,54	235.056.011,00							33.998.800.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	820.000.000,00	208.000.000,00	71.360.000,00	-748.640.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		995.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	390.000.000,00	71.000.000,00	35.360.000,00	-354.640.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	33.600.000,00	16.800.000,00	-183.200.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			475.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	103.400.000,00	19.200.000,00	-210.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.988.657.374,00	17.803.330.196,00	18.245.267.322,00	1.256.609.948,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		18.770.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/ Bulan	124 Orang/ Bulan	16.282.457.374,00	17.102.730.196,00	17.550.007.322,00	1.267.549.948,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			18.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	706.200.000,00	700.600.000,00	695.260.000,00	-10.940.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			770.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	264.400.000,00	234.400.000,00	234.400.000,00	-30.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			190.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	197.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-107.500.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		198.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	97.500.000,00	0,00	0,00	-97.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			106.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				135 Orang	135 Orang	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			92.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.955.350.426,00	7.775.974.382,00	3.658.166.466,77	1.702.816.040,77			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.061.400.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00	-13.500.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			19.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	209.229.780,00	42.242.000,00	-77.758.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			180.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.300.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	456.705.400,00	123.780.600,00	-126.219.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	346.786.130,00	86.291.706,27	31.291.706,27	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	43.250.000,00	-26.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			83.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.150.000,00	-13.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	624.502.626,00	4.020.548.679,00	1.934.706.340,00	1.310.203.714,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	109.998.500,00	6.748.500,00	-193.251.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.947.000.000,00	1.741.000.000,00	1.735.000.000,00	-4.212.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.083.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.435.173.189,00	4.587.831.759,54	4.402.885.517,77	-32.287.671,23			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.060.700.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	56.037.400,00	-13.962.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			58.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	699.210.000,00	699.210.000,00	99.210.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			680.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000,00	2.073.460.593,00	1.983.485.179,00	183.485.179,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.155.663.000,00	1.479.095.020,00	924.896.819,00	-2.230.766.181,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.550.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	500.000.000,00	494.890.000,00	270.845.000,00	-229.155.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	365.000.000,00	203.150.000,00	-296.850.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			640.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	138.851.799,00	-71.148.201,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			230.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	141.019.173.011,00	95.017.038.952,46	62.878.831.243,46	14.060.236.989,00							155.079.410.000,00		
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.656.373.775,00	39.458.394.907,00	28.464.775.178,00	-29.191.598.597,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		63.416.673.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,067 KM	0,067 KM	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.650.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	180.430.000,00	0,00	0,00	-180.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			198.473.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				4 Lembaga	4 Lembaga	857.460.000,00	447.440.000,00	304.302.000,00	-553.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			970.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,638 KM	0,638 KM	5.679.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-679.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.050.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir																			
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				0,340 KM	0,340 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0102	Pembangunan Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Dibangun				0,438 Unit	0,438 Unit	7.983.575.000,00	0,00	0,00	-7.983.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.800.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,20 KM	0,20 KM	3.883.565.000,00	1.648.729.520,00	1.632.229.520,00	-2.251.335.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.970.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,420 KM	0,420 KM	4.976.060.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-3.976.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			4.460.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0114	Peningkatan Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan				0 Unit	0,065 Unit	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																			
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				0 Titik	0 Titik	500.000.000,00	0,00	86.441.250,00	-413.558.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1,78 KM	1,78 KM	14.802.340.000,00	19.804.576.000,00	11.005.790.371,00	-3.796.549.629,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			17.325.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0,710 Unit	0,710 Unit	3.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00	-3.220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.150.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	655.000.000,00	0,00	0,00	-655.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			715.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.305.000.000,00	750.333.100,00	750.333.100,00	-554.666.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			797.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	83.362.799.236,00	55.558.644.045,46	34.414.056.065,46	-48.948.743.170,54			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		91.662.737.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	1 Bendung	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.750.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				26.095 KM	26.095 KM	39.862.977.050,00	21.416.386.310,00	9.126.708.440,00	-30.736.268.610,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			43.849.274.755,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				7 Bendung	7 Bendung	13.250.000.000,00	8.981.453.140,00	1.179.713.030,00	-12.070.286.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			14.575.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya				4 Lembaga	4 Lembaga	1.635.000.000,00	1.045.460.000,00	563.245.000,00	-1.071.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.798.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	2.592.692.950,00	2.069.508.000,00	1.619.508.000,00	-973.184.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.851.962.245,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																			
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				2 Lembaga	2 Lembaga	280.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			308.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																			
			Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola dan terawasi alokasi airnya				1 DI	1 DI	100.000.000,00	3.660.000,00	1.830.000,00	-98.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	4.546.366.000,00	1.500.704.000,00	895.825.070,00	295.434.000,00							4.841.800.000,00		
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-				-	-	3.091.279.000,00	1.148.360.000,00	719.005.070,00	-2.372.273.930,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.224.800.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																			
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				48 Orang	48 Orang	437.930.100,00	117.488.000,00	116.788.000,00	-321.142.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			420.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	168.697.600,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-166.357.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			180.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				250 Orang	250 Orang	984.650.900,00	499.436.000,00	274.429.070,00	-710.221.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	675.168.400,00	260.138.000,00	143.684.000,00	-531.484.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			730.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.702.000,00	0,00	0,00	-24.702.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			29.800.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				250 Orang	250 Orang	464.999.000,00	177.558.000,00	174.360.000,00	-290.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				50 Orang	50 Orang	80.644.000,00	4.680.000,00	3.744.000,00	-76.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			85.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				15 Lembaga	15 Lembaga	254.487.000,00	86.720.000,00	3.660.000,00	-250.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			280.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	482.316.500,00	91.664.000,00	3.900.000,00	-478.416.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		544.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	51.014.500,00	0,00	0,00	-51.014.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			57.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				5 Perangkat Pendukung	5 Perangkat Pendukung	75.564.500,00	0,00	0,00	-75.564.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			99.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	188.625.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-187.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			215.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																			
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	167.112.500,00	90.104.000,00	2.340.000,00	-164.772.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			173.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-				-	-	972.770.500,00	260.680.000,00	172.920.000,00	-799.850.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.073.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				25 Paket Pekerjaan	25 Paket Pekerjaan	206.865.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	-200.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			228.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				5 Bangunan Konstruksi	5 Bangunan Konstruksi	69.835.000,00	0,00	0,00	-69.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	196.070.500,00	20.220.000,00	20.220.000,00	-175.850.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	234.220.000,00	146.460.000,00	-353.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
		UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	33.763.743.989,00	33.919.631.357,54	29.361.976.125,54	235.056.011,00							33.998.800.000,00		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.955.350.426,00	7.775.974.382,00	3.658.166.466,77	1.702.816.040,77			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.061.400.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.600.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	216.845.000,00	1.649.600,00	0,00	-216.845.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			237.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.000.000,00	63.627.274,00	45.304.096,00	2.304.096,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			47.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	18.033.600,00	18.033.600,00	12.033.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.600.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	110.000.000,00	698.152.887,00	475.557.293,50	365.557.293,50	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			121.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.947.000.000,00	1.741.000.000,00	1.735.000.000,00	-4.212.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.083.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.435.173.189,00	4.587.831.759,54	4.402.885.517,77	-32.287.671,23			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.060.700.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.100.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			121.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	237.161.600,00	72.000.000,00	60.000.000,00	-177.161.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			121.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	755.000.000,00	747.572.172,00	747.572.172,00	-7.427.828,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			820.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.155.663.000,00	1.479.095.020,00	924.896.819,00	-2.230.766.181,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.550.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	34.340.420,00	34.340.420,00	-15.659.580,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	4 Unit	10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.525.000.000,00	62.000.000,00	0,00	-1.525.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.675.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	1.875.000,00	-125.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	141.019.173.011,00	95.017.038.952,46	62.878.831.243,46	14.060.236.989,00							155.079.410.000,00		
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.656.373.775,00	39.458.394.907,00	28.464.775.178,00	-29.191.598.597,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		63.416.673.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.02 KM	0 KM	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	1 Unit	200.000.000,00	37.660.000,00	37.660.000,00	-162.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	0.1 KM	1.900.000.000,00	3.177.195.882,00	3.177.195.882,00	1.277.195.882,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000.000,00	705.819.380,00	705.819.380,00	-1.794.180.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.750.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	12.264.120,00	12.264.120,00	-87.735.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				3 KM	0.4 KM	400.000.000,00	20.161.000,00	20.161.000,00	-379.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			440.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	83.362.799.236,00	55.558.644.045,46	34.414.056.065,46	-48.948.743.170,54			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		91.662.737.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				160 KM	160 KM	7.477.838.400,00	8.312.669.083,00	8.312.669.083,00	834.830.683,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				40 Bendung	40 Bendung	2.600.000.000,00	2.445.089.886,00	2.445.089.886,00	-154.910.114,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.800.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																			
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				5 Lembaga	5 Lembaga	2.500.000.000,00	2.372.565.955,00	2.372.565.955,00	-127.434.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			440.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
		UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN								179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00						193.920.010.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							179.329.283.000,00	130.437.374.310,00	93.136.632.439,00	-86.192.650.561,00							193.920.010.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	33.763.743.989,00	33.919.631.357,54	29.361.976.125,54	235.056.011,00							33.998.800.000,00		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.955.350.426,00	7.775.974.382,00	3.658.166.466,77	1.702.816.040,77			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.061.400.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.241.700,00	6.706.700,00	1.676.675,00	-6.565.025,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			12.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	30.000.000,00	13.201.920,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.615.500,00	226.081.212,00	121.799.306,00	108.183.806,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			25.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.850.000,00	47.971.000,00	23.985.500,00	21.135.500,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.600.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.300.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	123.295.600,00	1.435.281.700,00	717.640.850,00	594.345.250,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			112.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.947.000.000,00	1.741.000.000,00	1.735.000.000,00	-4.212.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.083.500.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.862.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-4.162.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.435.173.189,00	4.587.831.759,54	4.402.885.517,77	-32.287.671,23			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.060.700.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97.181.700,00	101.039.683,00	101.039.683,00	3.857.983,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			132.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.675.600,00	8.675.600,00	8.675.600,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			17.600.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	755.154.289,00	703.873.711,54	634.865.483,77	-120.288.805,23	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			99.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.155.663.000,00	1.479.095.020,00	924.896.819,00	-2.230.766.181,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.550.200.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	91.061.000,00	91.061.000,00	91.061.000,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			99.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	1 Unit	40.000.000,00	14.853.600,00	14.853.600,00	-25.146.400,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10 Unit	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			22.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	82.212.000,00	70.060.000,00	35.030.000,00	-47.182.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			90.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	23 Unit	15.390.000,00	15.390.000,00	15.390.000,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	141.019.173.011,00	95.017.038.952,46	62.878.831.243,46	14.060.236.989,00							155.079.410.000,00		
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	57.656.373.775,00	39.458.394.907,00	28.464.775.178,00	-29.191.598.597,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		63.416.673.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.15 KM	0.15 KM	87.696.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-71.696.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			255.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam																			
			Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	396.820.300,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-375.220.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 KM	8 KM	600.000.000,00	752.702.000,00	851.064.650,00	251.064.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	1.609.427.475,00	531.844.405,00	531.844.405,00	-1.077.583.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.350.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	250.202.000,00	250.202.000,00	-549.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			880.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.42 KM	0.42 KM	370.000.000,00	61.867.500,00	61.867.500,00	-308.132.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			460.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	83.362.799.236,00	55.558.644.045,46	34.414.056.065,46	-48.948.743.170,54			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		91.662.737.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				119 KM	119 KM	6.475.665.375,00	5.387.464.077,46	5.348.339.077,46	-1.127.326.297,54	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.400.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				40 Bendung	40 Bendung	1.790.187.300,00	1.627.120.835,00	1.627.120.835,00	-163.066.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.980.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
	1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																			
			Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				4 Lembaga	4 Lembaga	2.298.438.161,00	1.817.266.759,00	1.817.266.759,00	-481.171.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							26.835.615.969,00	127.309.603.269,00	124.219.128.025,50	97.383.512.056,50							111.121.773.574,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							26.017.785.969,00	127.283.068.269,00	124.205.708.025,50	98.187.922.056,50							110.222.160.574,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							26.017.785.969,00	127.283.068.269,00	124.205.708.025,50	98.187.922.056,50							110.222.160.574,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	10.296.785.969,00	12.757.488.618,00	9.608.700.374,50	79.457.274.605,00							89.754.060.574,00		
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	151.031.900,00	41.618.000,00	20.985.750,00	-130.046.150,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		166.135.090,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	46.550.000,00	24.843.000,00	10.920.750,00	-35.629.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			51.205.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.607.000,00	4.575.000,00	2.745.000,00	-5.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.467.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	95.874.900,00	12.200.000,00	7.320.000,00	-88.554.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			105.462.390,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.677.623.000,00	7.744.177.293,00	7.966.855.241,00	289.232.241,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		76.616.719.641,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	58 Orang/ Bulan	7.100.000.000,00	7.185.817.293,00	7.410.055.241,00	310.055.241,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			75.981.334.341,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	577.623.000,00	558.360.000,00	556.800.000,00	-20.823.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			635.385.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	131.459.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	-95.059.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		144.604.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			40.040.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				18 Laporan	18 Laporan	95.059.000,00	0,00	0,00	-95.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			104.564.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	96.871.000,00	99.781.000,00	16.000.000,00	-80.871.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		106.558.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	41.250.000,00	0,00	0,00	-41.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			45.375.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	55.621.000,00	99.781.000,00	16.000.000,00	-39.621.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			61.183.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	773.417.523,00	1.605.371.833,00	763.384.241,50	-10.033.281,50			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		6.386.911.773,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.789.600,00	9.789.600,00	2.447.400,00	-7.342.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.768.560,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	115.024.600,00	196.322.000,00	61.562.800,00	-53.461.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			126.527.060,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.811.000,00	126.095.300,00	40.834.825,00	-29.976.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			77.892.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	13.585.000,00	13.585.000,00	10.188.750,00	-3.396.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			14.943.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	559.207.323,00	1.254.579.933,00	647.100.466,50	87.893.143,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.151.280.553,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-3.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	517.254.000,00	1.958.845.000,00	0,00	-517.254.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		568.979.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	479.479.000,00	1.922.070.000,00	0,00	-479.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			527.426.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	36.775.000,00	36.775.000,00	0,00	-36.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			40.452.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	479.778.704,00	543.988.142,00	543.763.142,00	63.984.438,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.247.865.744,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	900.000,00	675.000,00	-2.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	476.778.704,00	543.088.142,00	543.088.142,00	66.309.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.244.565.744,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	469.350.842,00	727.307.350,00	261.312.000,00	-208.038.842,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		516.285.926,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	268.020.000,00	268.020.000,00	140.860.000,00	-127.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			294.822.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	39.150.000,00	46.450.000,00	23.225.000,00	-15.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			43.065.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	162.180.842,00	412.837.350,00	97.227.000,00	-64.953.842,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			178.398.926,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	1.821.000.000,00	281.530.990,00	260.444.990,00	3.282.100.000,00							5.103.100.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	1.300.000.000,00	146.627.490,00	145.163.490,00	-1.154.836.510,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			660.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	146.627.490,00	145.163.490,00	-554.836.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			770.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	236.000.000,00	36.808.000,00	24.480.000,00	-211.520.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		259.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	36.808.000,00	24.480.000,00	-125.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				50 Orang	50 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			39.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		3.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																			
			Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	285.000.000,00	98.095.500,00	90.801.500,00	-194.198.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	285.000.000,00	98.095.500,00	90.801.500,00	-194.198.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			313.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	12.200.000.000,00	5.497.533.752,00	5.344.012.752,00	1.295.000.000,00							13.495.000.000,00		
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	500.000.000,00	113.335.500,00	106.045.500,00	-393.954.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		625.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	12.200.000,00	6.100.000,00	-293.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	101.135.500,00	99.945.500,00	-100.054.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-				-	-	11.700.000.000,00	5.384.198.252,00	5.237.967.252,00	-6.462.032.748,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		12.870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	5.000.000.000,00	1.762.152.000,00	1.615.921.000,00	-3.384.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																			
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				10 Hektar	10 Hektar	6.700.000.000,00	3.622.046.252,00	3.622.046.252,00	-3.077.953.748,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.370.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	1.700.000.000,00	108.746.514.909,00	108.992.549.909,00	170.000.000,00							1.870.000.000,00		
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-				-	-	1.700.000.000,00	108.746.514.909,00	108.992.549.909,00	107.292.549.909,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.870.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				57 Dokumen	57 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				200 Lokasi	200 Lokasi	1.200.000.000,00	108.724.018.909,00	108.979.951.909,00	107.779.951.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	22.496.000,00	12.598.000,00	-187.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							817.830.000,00	26.535.000,00	13.420.000,00	-804.410.000,00							899.613.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							817.830.000,00	26.535.000,00	13.420.000,00	-804.410.000,00							899.613.000,00	
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-				-	-	397.000.000,00	8.235.000,00	4.270.000,00	39.700.000,00							436.700.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	-				-	-	397.000.000,00	8.235.000,00	4.270.000,00	-392.730.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		436.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.03.1.01.0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	397.000.000,00	8.235.000,00	4.270.000,00	-392.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			436.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	101.000.000,00	4.575.000,00	3.050.000,00	10.100.000,00							111.100.000,00	
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	101.000.000,00	4.575.000,00	3.050.000,00	-97.950.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		111.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	-64.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			72.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.1.01.0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00	3.050.000,00	1.525.000,00	-33.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	102.000.000,00	4.575.000,00	3.050.000,00	10.200.000,00							112.200.000,00	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	102.000.000,00	4.575.000,00	3.050.000,00	-98.950.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		112.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.1.01.0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	4.575.000,00	3.050.000,00	-98.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			112.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-				-	-	157.830.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	15.783.000,00							173.613.000,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	157.830.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	-156.305.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		173.613.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria																		
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria				1 Berita Acara	1 Berita Acara	157.830.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	-156.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			173.613.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-				-	-	60.000.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	6.000.000,00							66.000.000,00	
	2.10.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	60.000.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	-58.475.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.07.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	4.575.000,00	1.525.000,00	-58.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							13.558.025.000,00	18.236.922.974,00	18.933.860.690,00	5.375.835.690,00							19.852.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.558.025.000,00	18.236.922.974,00	18.933.860.690,00	5.375.835.690,00							19.852.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.558.025.000,00	18.236.922.974,00	18.933.860.690,00	5.375.835.690,00							19.852.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	10.486.225.000,00	15.891.535.055,00	15.748.057.771,00	4.463.775.000,00							14.950.000.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						3.000.000,00	41.350.000,00	25.350.000,00	22.350.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	25.490.000,00	18.070.000,00	17.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	9.360.000,00	4.680.000,00	3.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	6.500.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						10.455.225.000,00	9.857.491.963,00	10.198.343.906,00	-256.881.094,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		10.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	10.453.225.000,00	9.661.471.963,00	10.002.323.906,00	-450.901.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	158.520.000,00	158.520.000,00	157.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	36.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						3.000.000,00	87.710.000,00	87.710.000,00	84.710.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	55.130.000,00	55.130.000,00	54.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	32.580.000,00	32.580.000,00	31.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						2.000.000,00	0,00	177.800.000,00	175.800.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				144 Paket	144 Paket	1.000.000,00	0,00	177.800.000,00	176.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	9.000.000,00	3.322.515.906,00	2.609.767.606,00	2.600.767.606,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat	1.350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	3.170.100,00	3.170.100,00	2.170.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	108.921.200,00	91.215.500,00	90.215.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	53.947.000,00	42.297.500,00	41.297.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	3.156.477.606,00	2.473.084.506,00	2.472.084.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						6.000.000,00	1.436.623.400,00	1.436.623.400,00	1.430.623.400,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.292.140.000,00	1.292.140.000,00	1.291.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Paket	1 Paket	1.000.000,00	38.204.000,00	38.204.000,00	37.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	6 Unit	1.000.000,00	106.279.400,00	106.279.400,00	105.279.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.000.000,00	878.293.786,00	944.912.859,00	940.912.859,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	138.363.159,00	138.363.159,00	137.363.159,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	735.930.627,00	802.549.700,00	801.549.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						4.000.000,00	267.550.000,00	267.550.000,00	263.550.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	1.000.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	224.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	25 Unit	1.000.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	15.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	23.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti				83 85 % %	83 85 % %	2.508.430.000,00	2.336.637.919,00	3.185.027.919,00	1.943.570.000,00							4.452.000.000,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	2.256.430.000,00	2.288.477.919,00	3.163.482.919,00	907.052.919,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		3.752.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Orang	30 Orang	50.000.000,00	15.260.000,00	7.330.000,00	-42.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP																		
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia				60 Unit	31 Unit	1.000.000,00	51.765.000,00	51.765.000,00	50.765.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	99.480.000,00	30.670.000,00	29.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	7.510.000,00	3.380.000,00	-46.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				1 laporan	1 laporan	2.099.430.000,00	2.098.562.919,00	3.057.287.919,00	957.857.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			2.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				40 Orang	40 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	10.900.000,00	10.050.000,00	-39.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	7.140.000,00	3.340.000,00	-123.660.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	7.140.000,00	3.340.000,00	-71.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																			
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				50 %	50 %	125.000.000,00	41.020.000,00	18.205.000,00	-106.795.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Pihak Terkait dan Masyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	39.190.000,00	17.290.000,00	-57.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.830.000,00	915.000,00	-49.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran				63,16 %	63,16 %	563.370.000,00	8.750.000,00	775.000,00	-113.370.000,00							450.000.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	<i>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>				1 Laporan	1 Laporan	423.923.000,00	8.750.000,00	775.000,00	-423.148.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)</i>				40 Orang	40 Orang	330.440.000,00	0,00	0,00	-330.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			<i>Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	93.483.000,00	8.750.000,00	775.000,00	-92.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>				1 Laporan	1 Laporan	139.447.000,00	0,00	0,00	-139.447.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Satpol PP, Damkar, Pihak Terkait dan Masyarakat		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>				1 Laporan	1 Laporan	139.447.000,00	0,00	0,00	-139.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	8.828.379.754,00	11.262.560.516,00	10.041.696.877,00	54.360.246,00							8.882.740.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	114.000.000,00	73.380.000,00	37.572.000,00	-76.428.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		38.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	89.000.000,00	67.620.000,00	34.692.000,00	-54.308.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	1.440.000,00	720.000,00	-7.280.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	-8.560.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	1.440.000,00	720.000,00	-6.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.225.466.041,00	5.999.860.526,00	6.197.181.736,00	-28.284.305,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		6.127.706.081,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	0,00	5.813.400.526,00	6.018.564.736,00	6.018.564.736,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.113.706.081,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1	NON URUSAN							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.849.908.754,00	16.330.193.486,00	14.469.086.653,00	-4.380.822.101,00							18.434.740.000,00	
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	162.880.000,00	163.705.000,00	167.270.000,00	4.390.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	39.379.000,00	22.755.000,00	11.347.000,00	-28.032.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	43.570.000,00	87.825.500,00	30.456.500,00	-13.113.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		28.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.400.000,00	66.660.000,00	22.400.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.997.500,00	145.000,00	-4.855.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.170.000,00	16.168.000,00	7.911.500,00	-8.258.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			13.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	87.500.000,00	50.852.000,00	12.183.000,00	-75.317.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		82.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	67.500.000,00	0,00	0,00	-67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			67.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	50.852.000,00	12.183.000,00	-7.817.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	367.374.854,00	1.339.049.099,00	658.084.195,00	290.709.341,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		472.792.354,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.800.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.971.466,00	2.250.000,00	-5.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	5.856.250,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.374.854,00	117.759.000,00	87.910.100,00	67.535.246,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			21.792.354,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	174.837.400,00	43.701.000,00	26.701.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			18.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	5.940.000,00	4.455.000,00	-1.545.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	295.000.000,00	1.013.884.983,00	503.662.395,00	208.662.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			390.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.105.700,00	-3.894.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	172.000.000,00	1.025.971.973,00	567.143.800,00	395.143.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	21.884.500,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			11.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	64 Unit	75.000.000,00	615.561.473,00	559.443.800,00	484.443.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			16.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			18.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	75.000.000,00	388.526.000,00	7.700.000,00	-67.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.360.330.962,00	1.468.396.418,00	1.510.598.646,00	150.267.684,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.283.741.565,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.750.000,00	-2.250.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	207.178.000,00	252.178.000,00	77.178.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			226.558.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.490.000,00	3.622.500,00	-11.377.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.165.330.962,00	1.241.728.418,00	1.252.048.146,00	86.717.184,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.036.183.065,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	458.137.897,00	1.217.225.000,00	1.028.477.000,00	570.339.103,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		795.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	19 Unit	243.137.897,00	435.050.000,00	435.050.000,00	191.912.103,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			675.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	18.567.000,00	18.567.000,00	18.567.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	15 Unit	0,00	486.512.000,00	408.152.000,00	408.152.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	272.096.000,00	161.708.000,00	-38.292.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			80.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	10.021.529.000,00	5.067.632.970,00	4.427.389.776,00	-469.529.000,00							9.552.000.000,00		
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-				-	-	1.300.000.000,00	235.940.000,00	167.344.000,00	-1.132.656.000,00			-	-	-		1.940.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	235.940.000,00	167.344.000,00	-232.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				425 Orang	425 Orang	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	6.165.000.000,00	4.455.431.470,00	3.977.059.276,00	-2.187.940.724,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.920.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																			
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	240.000.000,00	700.000.000,00	612.595.506,00	372.595.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			240.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																			
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				300 Orang	170 Orang	450.000.000,00	48.700.000,00	36.050.000,00	-413.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	3 Dokumen	1.450.000.000,00	320.160.000,00	188.540.000,00	-1.261.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana																			
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																			
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				60 Orang	60 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			180.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				750 Keluarga	500 Keluarga	1.995.000.000,00	386.995.465,00	380.695.465,00	-1.614.304.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			750.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																			
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	1.149.576.005,00	1.148.981.005,00	48.981.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				120 Orang	555 Orang	750.000.000,00	1.850.000.000,00	1.610.197.300,00	860.197.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.800.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	1.251.000.000,00	201.375.000,00	148.212.000,00	-1.102.788.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.251.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				60 Orang	60 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			180.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1125 Orang	260 Orang	450.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-320.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	356.000.000,00	71.375.000,00	18.212.000,00	-337.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			356.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			65.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	1.305.529.000,00	174.886.500,00	134.774.500,00	-1.170.754.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.441.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	100 Keluarga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	174.886.500,00	134.774.500,00	-15.225.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			71.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				80 Orang	80 Orang	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			240.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				60 Orang	60 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			180.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				19 kabupat en/kota	19 kabupat en/kota	170.529.000,00	0,00	0,00	-170.529.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL								179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00					216.203.871.959,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00		
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	536.371.300,00	124.100.700,00	56.321.075,00	-480.050.225,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.050.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	104.486.200,00	33.996.700,00	12.955.575,00	-91.530.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	42.135.700,00	12.778.600,00	6.933.000,00	-35.202.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	111.646.400,00	33.967.100,00	28.712.500,00	-82.933.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			180.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	78.103.000,00	43.358.300,00	7.720.000,00	-70.383.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/ Bulan	170 Orang/ Bulan	21.636.545.151,00	20.289.076.549,00	20.966.268.289,00	-670.276.862,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			27.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	350.000.000,00	351.600.000,00	329.880.000,00	-20.120.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			375.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	35.457.000,00	0,00	0,00	-35.457.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			39.002.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	238.093.000,00	57.608.800,00	23.743.500,00	-214.349.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	69.240.000,00	51.000.000,00	25.500.000,00	-43.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	54.327.400,00	5.231.400,00	2.000.000,00	-52.327.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	31.044.700,00	3.324.700,00	1.400.000,00	-29.644.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	105.786.000,00	6.927.600,00	3.277.400,00	-102.508.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				170 Orang	170 Orang	400.000.000,00	64.478.541,00	31.880.521,00	-368.119.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.063.898,00	24.063.898,00	6.015.975,00	-24.047.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	85.854.441,00	18.066.294,00	0,00	-85.854.441,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.750.000,00	25.950.000,00	8.625.000,00	-33.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	200.000.000,00	262.199.100,00	122.538.975,00	-77.461.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.101.000,00	120.470.800,00	45.900.273,50	20.799.273,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.768.000,00	0,00	0,00	-12.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	487.289.620,00	2.717.329.955,00	1.504.092.496,00	1.016.802.876,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.285.408.800,00	597.000.000,00	447.750.000,00	-837.658.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	62.516.200,00	19.895.000,00	0,00	-62.516.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	51.444.480,00	14.484.480,00	0,00	-51.444.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	1.950.000,00	-1.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	240.000.000,00	232.900.500,00	188.135.625,00	-51.864.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	22.200.000,00	18.500.000,00	9.300.000,00	-12.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.365.838.147,00	1.266.960.980,00	1.275.214.502,00	-90.623.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	209.320.000,00	171.370.000,00	111.785.000,00	-97.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	55.250.000,00	46.600.000,00	23.300.000,00	-31.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	330.094.900,00	40.025.115,00	50.510.115,00	-279.584.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	2.058.247.000,00	1.355.916.100,00	1.039.052.800,00	-2.058.247.000,00							0,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	91.554.100,00	12.846.300,00	9.409.500,00	-82.144.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				78 Dokumen	78 Dokumen	91.554.100,00	12.846.300,00	9.409.500,00	-82.144.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial				-	100 %	1.966.692.900,00	1.343.069.800,00	1.029.643.300,00	-937.049.600,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				1280 Keluarga	1280 Keluarga	683.882.400,00	550.867.400,00	327.847.850,00	-356.034.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				987 Lembaga	987 Lembaga	1.196.610.500,00	792.202.400,00	701.795.450,00	-494.815.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				100 %	100 %	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanntar dalam panti				100 %	100 %	14.158.986.955,00	8.859.958.234,00	8.837.248.383,00	-5.321.738.572,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Panti Penyandang Disabilitas		15.025.760.068,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				326 Orang	326 Orang	2.693.586.500,00	2.620.861.500,00	2.652.156.750,00	-41.429.750,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		3.431.400.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				288 Orang	100 Orang	1.333.692.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	-1.133.692.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		1.333.692.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				293 Orang	293 Orang	3.269.658.000,00	0,00	0,00	-3.269.658.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				300 Orang	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		300.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.255.390.000,00	1.355.390.000,00	1.255.390.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	50.752.000,00	50.752.000,00	50.752.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				257 Orang	100 Orang	1.213.711.000,00	982.786.000,00	982.786.000,00	-230.925.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			83.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				3 Dokumen	2 Dokumen	177.418.400,00	116.100.600,00	72.049.950,00	-105.368.450,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlanntar dalam panti				100 %	100 %	92.753.356.989,00	41.458.797.047,00	40.378.384.417,00	-52.374.972.572,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak Terlanntar dalam panti		122.276.413.309,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				1716 Orang	1668 Orang	305.040.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	-2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			305.600.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				3173 Orang	3173 Orang	24.505.072.900,00	24.180.737.100,00	24.180.737.100,00	-324.335.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			33.801.600.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				2599 Orang	2599 Orang	9.496.643.700,00	0,00	0,00	-9.496.643.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.800.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				2469 Orang	35 Orang	36.318.064.010,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-36.178.064.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			46.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				3200 Orang	3200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				1945 Orang	165 Orang	2.812.226.500,00	1.618.618.000,00	1.618.618.000,00	-1.193.608.500,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3200 Orang	2187 Orang	7.801.102.000,00	6.410.749.000,00	5.195.104.420,00	-2.605.997.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			23.088.613.080,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				5 Dokumen	4 Dokumen	819.573.000,00	484.416.000,00	484.416.000,00	-335.157.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar dalam panti				100 %	100 %	5.180.728.689,00	4.095.532.310,00	4.067.783.290,00	-1.112.945.399,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pati		6.868.153.258,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	401.301.700,00	380.143.800,00	380.143.800,00	-21.157.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sijunjung Limo Nagari, Sijunjung Batuabab, Kab. Agam, Candung, Lasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			432.608.520,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	101.407.000,00	0,00	0,00	-101.407.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	509.740.000,00	0,00	0,00	-509.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Sijunjung Limo Nagari, Sijunjung Banda Dalam Kab. Agam, Candung, Lasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	40 Orang	50.436.800,00	0,00	0,00	-50.436.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti				100 %	100 %	3.130.407.900,00	1.123.851.800,00	1.123.851.800,00	-2.006.556.100,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		3.557.922.320,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				20 Orang	44 Orang	380.407.900,00	373.851.800,00	373.851.800,00	-6.556.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			207.922.320,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				44 Orang	44 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				44 Orang	44 Orang	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				44 Orang	44 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				44 Orang	44 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				100 %	100 %	881.500.000,00	771.090.829,00	304.721.215,00	293.500.000,00							1.175.000.000,00		
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak				25 Kajian Teknis	25 Kajian Teknis	65.000.000,00	45.245.000,00	28.185.250,00	-36.814.750,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Anak yang diangkat sesuai Peraturan		75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI																			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	65.000.000,00	45.245.000,00	28.185.250,00	-36.814.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	816.500.000,00	725.845.829,00	276.535.965,00	-539.964.035,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				600 Keluarga	600 Keluarga	413.886.000,00	210.447.200,00	108.490.000,00	-305.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				450 Keluarga	450 Keluarga	402.614.000,00	515.398.629,00	168.045.965,00	-234.568.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	544.924.000,00	213.401.400,00	194.773.916,00	-544.924.000,00							0,00		
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-				-	-	544.924.000,00	213.401.400,00	194.773.916,00	-350.150.084,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				75 Orang	300 Orang	200.727.550,00	106.445.550,00	93.586.550,00	-107.141.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				75 Orang	150 Orang	121.661.000,00	72.179.850,00	70.628.616,00	-51.032.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				3 Unit	3 Unit	74.010.450,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-66.660.450,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	94.357.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	-76.857.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				90 Orang	90 Orang	54.168.000,00	7.426.000,00	5.708.750,00	-48.459.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	131.499.173,00	131.499.173,00	67.542.755,00	15.937.827,00							147.437.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-				-	-	131.499.173,00	131.499.173,00	67.542.755,00	-63.956.418,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		147.437.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	1 Makam	131.499.173,00	131.499.173,00	67.542.755,00	-63.956.418,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			147.437.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00						216.203.871.959,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	69.000.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-8.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			71.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			11.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			23.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.639.700,00	3.580.000,00	1.991.000,00	-12.648.700,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.090.000,00	0,00	0,00	-2.090.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	49.060.800,00	1.291.200,00	1.137.200,00	-47.923.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			280.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	38.980.600,00	14.062.362,00	8.409.600,00	-30.571.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.980.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.978.000,00	4.645.000,00	1.437.000,00	-7.541.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.850.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	16.413.300,00	13.302.347,00	-51.697.653,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			91.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			116.800.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			156.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	35.636.600,00	0,00	0,00	-35.636.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	84.600.000,00	83.820.000,00	83.820.000,00	-780.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			92.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	602.248.685,00	530.444.940,00	507.673.158,00	-94.575.527,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			548.950.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	36.800.000,00	11.350.000,00	7.275.000,00	-29.525.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16.890.000,00	3.370.000,00	2.030.000,00	-14.860.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.030.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.006.398.918,00	0,00	0,00	-1.006.398.918,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.107.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-				-	-	92.753.356.989,00	41.458.797.047,00	40.378.384.417,00	-52.374.972.572,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		122.276.413.309,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				155 Orang	155 Orang	1.919.569.000,00	1.899.959.600,00	1.899.959.600,00	-19.609.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.990.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				155 Orang	155 Orang	323.634.250,00	134.115.650,00	134.115.650,00	-189.518.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			189.260.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				155 Orang	155 Orang	381.437.800,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-181.437.800,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			319.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				155 Orang	155 Orang	10.015.417,00	0,00	0,00	-10.015.417,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			12.869.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				160 Orang	160 Orang	1.126.124.100,00	554.573.200,00	754.573.200,00	-371.550.900,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.250.215.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	172.461.600,00	143.625.000,00	143.625.000,00	-28.836.600,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			191.494.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	756.639.375,00	301.500.000,00	301.500.000,00	-455.139.375,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			831.781.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				75 Orang	75 Orang	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				12 Orang	12 Orang	28.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-26.400.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			31.680.000,00	DINAS SOSIAL	
		PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) "HARAPAN" PADANG PANJANG								179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00					216.203.871.959,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	69.000.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-8.280.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			72.864.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.302.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.900.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				670 Paket	670 Paket	12.374.000,00	12.374.000,00	3.093.500,00	-9.280.500,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.846.550,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	17.414.900,00	0,00	0,00	-17.414.900,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				383 Paket	383 Paket	48.040.000,00	0,00	0,00	-48.040.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.965.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3116 Paket	3116 Paket	97.929.950,00	51.259.950,00	23.452.125,00	-74.477.825,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			198.017.132,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17487 Paket	17487 Paket	20.570.000,00	16.670.000,00	4.842.500,00	-15.727.500,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			38.500.110,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	53.280.000,00	41.825.095,00	34.446.063,00	-18.833.937,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			77.660.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	39.734.800,00	38.387.700,00	0,00	-39.734.800,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			51.077.620,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	92.681.680,00	31.022.780,00	21.674.900,00	-71.006.780,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			197.112.300,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.515.262.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				32547 Laporan	32547 Laporan	109.305.000,00	108.705.000,00	99.495.000,00	-9.810.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			119.575.500,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	627.624.469,00	567.853.356,00	553.176.280,00	-74.448.189,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			571.219.994,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	26.900.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-2.300.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.110.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	5.840.000,00	4.840.000,00	1.690.000,00	-4.150.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.251.400,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	284.529.961,00	49.000.000,00	24.500.000,00	-260.029.961,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas lata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.130.101.780,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	92.753.356.989,00	41.458.797.047,00	40.378.384.417,00	-52.374.972.572,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		122.276.413.309,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.064.000.000,00	1.104.700.000,00	1.104.700.000,00	40.700.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.178.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	288.170.000,00	293.210.000,00	293.210.000,00	5.040.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			305.349.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	74.770.000,00	74.770.000,00	74.770.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			89.758.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	9.101.850,00	9.958.350,00	9.958.350,00	856.500,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.475.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	875.210.397,00	854.247.397,00	825.267.397,00	-49.943.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			830.047.397,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	16.160.000,00	16.160.000,00	0,00	-16.160.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			46.596.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	347.195.000,00	0,00	0,00	-347.195.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.666.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.140.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) "TRI MURNI" PADANG PANJANG							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00					216.203.871.959,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	69.000.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-8.280.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.900.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			13.789.567,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	9 Paket	8.250.000,00	0,00	0,00	-8.250.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			7.425.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	14.615.900,00	7.417.000,00	2.908.000,00	-11.707.900,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			19.235.590,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.829.800,00	0,00	0,00	-38.829.800,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			46.828.650,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	101.715.180,00	0,00	0,00	-101.715.180,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.974.358,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	144.278.226,00	36.884.206,00	22.165.300,00	-122.112.926,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.498.068,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.204.000,00	10.130.000,00	3.122.000,00	-8.082.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.822.800,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	86.176.956,00	34.738.031,00	44.078.335,50	-42.098.620,50	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			88.426.790,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	85.338.400,00	0,00	0,00	-85.338.400,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			246.979.040,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	88.960.500,00	0,00	2.085.618,00	-86.874.882,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			145.799.104,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	157.657.200,00	157.657.200,00	145.113.000,00	-12.544.200,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			173.422.920,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	538.593.878,00	532.939.428,00	508.673.158,00	-29.920.720,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			540.056.029,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	19.750.000,00	15.900.000,00	9.100.000,00	-10.650.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.725.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	58 Unit	23.450.000,00	7.760.000,00	4.340.000,00	-19.110.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.895.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	490.025.000,00	0,00	0,00	-490.025.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			477.180.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-				-	-	92.753.356.989,00	41.458.797.047,00	40.378.384.417,00	-52.374.972.572,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.276.413.309,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.283.459.800,00	1.343.083.000,00	1.343.083.000,00	59.623.200,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.405.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	755.594.000,00	619.154.900,00	619.154.900,00	-136.439.100,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			763.612.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	163.800.000,00	42.320.000,00	42.320.000,00	-121.480.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			34.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	55.254.990,00	89.860.550,00	56.302.500,00	1.047.510,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			37.224.055,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	360.836.600,00	230.769.300,00	230.769.300,00	-130.067.300,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			360.475.610,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	498.655.100,00	371.150.000,00	371.150.000,00	-127.505.100,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			702.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	89.205.600,00	0,00	0,00	-89.205.600,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			97.282.037,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																					
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	11.040.000,00	5.520.000,00	12.250.000,00	1.210.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.144.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																					
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	24.000.000,00	16.800.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.400.000,00	DINAS SOSIAL			
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "SABAI NAN ALUIH" SICINCIN																				216.203.871.959,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00				
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00				
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00				
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	69.000.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-8.280.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.488.000,00	29.488.000,00	7.372.000,00	-22.116.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	171.737.465,00	21.118.800,00	700.000,00	-171.037.465,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.582.400,00	60.182.400,00	23.419.600,00	-33.162.800,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS SOSIAL			
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.864.000,00	5.864.000,00	1.466.000,00	-4.398.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81.094.000,00	75.432.088,00	37.716.044,00	-43.377.956,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.628.300,00	0,00	35.000.000,00	-85.628.300,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	46.214.200,00	0,00	800.000,00	-45.414.200,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	844.422.000,00	0,00	0,00	-844.422.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan yang berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	0,00	0,00	-15.600.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.224.000,00	175.224.000,00	111.714.000,00	-63.510.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	786.378.178,00	728.129.272,00	711.654.670,00	-74.723.508,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	36.050.000,00	44.250.000,00	23.100.000,00	-12.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	29 Unit	7.550.000,00	18.890.000,00	9.140.000,00	1.590.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.890.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	757.208.000,00	50.000.000,00	65.350.000,00	-691.858.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	5.180.728.689,00	4.095.532.310,00	4.067.783.290,00	-1.112.945.399,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		6.868.153.258,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	1.475.186.200,00	1.470.686.200,00	1.470.686.200,00	-4.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.806.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	396.893.520,00	241.951.920,00	241.951.920,00	-154.941.600,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	184.056.000,00	80.139.200,00	80.139.200,00	-103.916.800,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	110.413.000,00	110.413.000,00	110.413.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				110 Orang	110 Orang	409.685.000,00	394.865.000,00	355.712.500,00	-53.972.500,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				-	-	25.821.137,00	0,00	0,00	-25.821.137,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	15 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				32 Orang	10 Orang	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuing, Sicincin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "KASIH SAYANG IBU" TANAH DATAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.720.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	-8.160.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			66.792.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	151.612.590,00	0,00	0,00	-151.612.590,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			19.624.359,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	25.500.000,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.225.000,00	6.600.000,00	6.290.200,00	-7.934.800,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			43.637.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.688.000,00	0,00	795.600,00	-1.892.400,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			239.747.428,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.475.880,00	1.898.390,00	1.898.390,00	-41.577.490,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			177.356.383,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	227.732.430,00	37.218.278,00	22.808.339,00	-204.924.091,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			205.181.493,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.680.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	-2.330.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.805.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	33 Paket	0,00	0,00	2.380.400,00	2.380.400,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	118.684.000,00	44.976.397,00	33.268.118,00	-85.415.882,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			145.503.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				12 Unit	1 Unit	2.750.000,00	550.000,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.245.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.807.600,00	0,00	0,00	-7.807.600,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			24.404.490,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	32.219.900,00	0,00	0,00	-32.219.900,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			78.722.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			279.499.922,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.150.000,00	67.150.000,00	47.073.500,00	-20.076.500,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			88.061.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	546.038.052,00	533.779.428,00	507.373.158,00	-38.664.894,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			752.836.797,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	61.848.776,00	50.402.026,00	26.916.691,00	-34.932.085,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.283.611,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	16.570.000,00	2.920.000,00	9.436.000,00	-7.134.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.730.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.898.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6 Unit	994.271.050,00	216.751.300,00	16.204.500,00	-978.066.550,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			232.375.220,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	155.679.090,00	0,00	0,00	-155.679.090,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			370.980.588,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	5.180.728.689,00	4.095.532.310,00	4.067.783.290,00	-1.112.945.399,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		6.868.153.258,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	894.250.000,00	954.182.450,00	954.182.450,00	59.932.450,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			986.370.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	174.155.020,00	153.963.370,00	153.963.370,00	-20.191.650,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			186.598.027,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	62.613.500,00	1.408.000,00	1.408.000,00	-61.205.500,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			46.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	2.210.000,00	0,00	0,00	-2.210.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			203.533.572,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	63.181.960,00	64.582.150,00	64.582.150,00	1.400.190,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			71.040.365,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	187.300.000,00	134.900.000,00	134.900.000,00	-52.400.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			271.573.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	61.677.852,00	74.297.220,00	85.700.700,00	24.022.848,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			81.873.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				70 Orang	70 Orang	30.400.000,00	0,00	0,00	-30.400.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			36.656.274,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				70 Orang	10 Orang	24.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			26.400.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL TUNA GRAHITA (PSBG) "HARAPAN IBU" PADANG							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00						216.203.871.959,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.720.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.128.000,00	679.400,00	2.820.000,00	-19.308.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			16.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.605.200,00	0,00	0,00	-4.605.200,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			93.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	51.713.010,00	9.836.838,00	11.755.221,00	-39.957.789,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			170.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.500.000,00	895.000,00	1.810.000,00	-4.690.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.521.586,00	13.631.124,00	6.815.562,00	-46.706.024,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	204.025.800,00	0,00	0,00	-204.025.800,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	43.552.240,00	0,00	0,00	-43.552.240,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.620.000,00	85.620.000,00	71.050.517,00	-38.569.483,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	632.174.469,00	573.853.356,00	539.052.536,00	-93.121.933,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			520.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	86.600.000,00	24.150.000,00	14.938.500,00	-71.661.500,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	29.520.000,00	0,00	13.080.000,00	-16.440.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.050.699.780,00	0,00	0,00	-1.050.699.780,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			930.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	14.158.986.955,00	8.859.958.234,00	8.837.248.383,00	-5.321.738.572,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		15.025.760.068,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.347.310.750,00	1.344.325.000,00	1.341.820.000,00	-5.490.750,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	406.902.550,00	107.172.506,00	107.100.000,00	-299.802.550,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			361.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	19.543.560,00	102.783.140,00	107.390.140,00	87.846.580,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			157.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	14.855.980,00	6.526.450,00	6.526.450,00	-8.329.530,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	613.031.500,00	334.559.894,00	374.987.249,00	-238.044.251,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			724.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	26.200.000,00	0,00	0,00	-26.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	13.560.000,00	0,00	0,00	-13.560.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PANTI SOSIAL TUNA NETRA (PSBN) "TUAH SAKATO" PADANG								179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00					216.203.871.959,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	60.720.000,00	52.560.000,00	52.560.000,00	-8.160.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			59.880.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			14.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				140 Paket	140 Paket	12.881.000,00	8.945.000,00	2.236.250,00	-10.644.750,00	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			14.705.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	28.187.400,00	1.815.000,00	0,00	-28.187.400,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			30.569.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	13.998.000,00	2.498.000,00	718.000,00	-13.280.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			29.296.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1541 Paket	1541 Paket	47.980.800,00	47.011.200,00	20.630.000,00	-27.350.800,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			81.658.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				10215 Paket	10215 Paket	6.260.000,00	7.190.000,00	1.797.500,00	-4.462.500,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			6.260.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128 Laporan	128 Laporan	57.990.000,00	37.500.000,00	18.750.000,00	-39.240.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			83.650.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	110.700.200,00	24.440.300,00	30.365.500,00	-80.334.700,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			52.738.400,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	16.750.000,00	11.550.000,00	5.550.000,00	-11.200.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			16.750.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	29.701.000,00	29.701.000,00	29.701.000,00	0,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			29.701.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	494.442.865,00	548.831.694,00	548.831.694,00	54.388.829,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			536.291.918,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	43.100.000,00	0,00	0,00	-43.100.000,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			43.100.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	46.428.800,00	62.828.800,00	60.492.300,00	14.063.500,00	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			69.911.400,00	DINAS SOSIAL	
		PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW) "ANDAM DEWI" SOLOK							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00					216.203.871.959,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							179.559.943.127,00	93.828.453.943,00	89.624.394.827,00	-89.935.548.300,00							216.203.871.959,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	58.923.072.461,00	34.014.065.601,00	31.806.694.802,00	6.487.403.843,00							65.410.476.304,00		
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.799.135.151,00	21.167.725.349,00	21.789.331.789,00	-1.009.803.362,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		28.211.138.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	80.880.000,00	60.720.000,00	60.720.000,00	-20.160.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	323.494.690,00	59.556.100,00	28.900.000,00	-294.594.690,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		145.135.926,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	17.270.000,00	0,00	0,00	-17.270.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	756.436.000,00	71.406.141,00	35.157.921,00	-721.278.079,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		123.975.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	29.400.000,00	0,00	0,00	-29.400.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.424.803.733,00	4.013.816.711,00	2.130.703.447,00	-1.294.100.286,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.849.957.989,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	29.260.300,00	9.962.800,00	2.490.700,00	-26.769.600,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	121.959.256,00	13.628.878,00	0,00	-121.959.256,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			118.938.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	132.266.335,00	44.104.260,00	6.037.500,00	-126.228.835,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	75.678.700,00	37.674.700,00	18.837.350,00	-56.841.350,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	22.952.000,00	6.100.000,00	3.050.000,00	-19.902.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			20.968.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	-510.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	215.986.000,00	52.805.967,00	26.402.983,00	-189.583.017,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			198.575.337,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	16.755.523.284,00	735.291.623,00	666.556.898,00	-16.088.966.386,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		13.285.101.839,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	642.704.400,00	0,00	0,00	-642.704.400,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			36.686.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	108.350.000,00	0,00	0,00	-108.350.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	77.078.500,00	7.807.600,00	0,00	-77.078.500,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	21.698.900,00	4.200.000,00	0,00	-21.698.900,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			63.595.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	11.076.732.164,00	136.923,00	154.251.380,00	-10.922.480.784,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.921.075.563,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			18.235.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.525.066.732,00	6.944.526.536,00	6.607.857.866,00	-917.208.866,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		5.977.249.751,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	4.500.000,00	1.875.000,00	-5.125.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.880.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	66.174.000,00	80.478.000,00	66.539.980,00	365.980,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			56.478.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	-600.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	708.487.585,00	528.401.380,00	542.339.400,00	-166.148.185,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			535.273.779,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.802.241.571,00	897.642.441,00	491.865.806,00	-6.310.375.765,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		11.767.917.099,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			51.800.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	-	65.350.000,00	50.100.000,00	11.650.000,00	-53.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	28.540.000,00	12.360.000,00	6.180.000,00	-22.360.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			29.540.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	218.576.900,00	124.000,00	0,00	-218.576.900,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			99.200.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	117.020.700.493,00	57.342.480.840,00	56.211.609.339,00	32.450.258.162,00							149.470.958.655,00		
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	-				-	-	1.797.219.960,00	1.804.341.449,00	1.804.341.449,00	7.121.489,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.742.709.700,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	766.500.000,00	693.686.500,00	693.686.500,00	-72.813.500,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			640.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	245.187.500,00	249.445.989,00	317.497.989,00	72.310.489,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			227.468.900,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	188.652.000,00	288.111.000,00	220.059.000,00	31.407.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			331.071.400,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	32.491.460,00	30.491.460,00	30.491.460,00	-2.000.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			24.726.050,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	143.264.000,00	175.768.000,00	175.768.000,00	32.504.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			165.964.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	195.400.000,00	140.950.000,00	140.950.000,00	-54.450.000,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			158.100.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	50 Orang	225.725.000,00	225.888.500,00	225.888.500,00	163.500,00	Kab. Solok, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			194.879.350,00	DINAS SOSIAL	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00					33.250.225.460,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00		
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	183.185.905,00	103.640.000,00	56.620.000,00	-126.565.905,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	83.185.905,00	59.630.000,00	34.615.000,00	-48.570.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	27.760.000,00	13.880.000,00	-31.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	16.250.000,00	8.125.000,00	-46.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.865.160.000,00	22.880.176.973,00	23.615.677.343,00	-3.249.482.657,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.992.572.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/ Bulan	156 Orang/ Bulan	26.500.000.000,00	22.532.256.973,00	23.281.637.343,00	-3.218.362.657,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.567.572.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	320.160.000,00	320.160.000,00	320.160.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	45.000.000,00	27.760.000,00	13.880.000,00	-31.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		117.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				156 Paket	156 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	51.000.000,00	12.712.000,00	-22.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	29.000.000,00	40.000.000,00	39.795.600,00	10.795.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	40.000.000,00	354.123.200,00	222.789.265,00	182.789.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.960.000,00	8.970.000,00	6.715.000,00	-3.245.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	2.842.344.026,00	1.412.103.077,00	962.103.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	899.952.402,00	83.767.100,00	-116.232.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	31 Unit	200.000.000,00	899.952.402,00	83.767.100,00	-116.232.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.426.000.000,00	2.376.819.740,00	2.318.070.440,00	-107.929.560,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.520.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	520.000.000,00	430.737.300,00	378.138.000,00	-141.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			525.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.903.000.000,00	1.943.082.440,00	1.939.182.440,00	36.182.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.990.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	705.000.000,00	984.588.700,00	335.000.000,00	-370.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		832.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	110.000.000,00	77.190.000,00	77.190.000,00	-32.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	300.000.000,00	351.800.000,00	191.500.000,00	-108.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			340.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	50.140.000,00	25.070.000,00	-34.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	8 Unit	150.000.000,00	425.458.700,00	1.240.000,00	-148.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			87.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-				-	-	50.000.000,00	29.258.000,00	6.900.000,00	10.000.000,00							60.000.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	50.000.000,00	29.258.000,00	6.900.000,00	-43.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	29.258.000,00	6.900.000,00	-43.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	725.000.000,00	2.727.957.490,00	2.469.402.490,00	100.000.000,00							825.000.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	580.000.000,00	2.702.767.490,00	2.455.062.490,00	1.875.062.490,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		645.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				35 Lembaga	35 Lembaga	180.000.000,00	188.096.090,00	154.476.090,00	-25.523.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-				-	-	50.000.000,00	25.190.000,00	14.340.000,00	-35.660.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	10 LPK	50.000.000,00	25.190.000,00	14.340.000,00	-35.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				35 Perusahaan	35 Perusahaan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	415.000.000,00	177.172.300,00	90.982.150,00	210.997.460,00							625.997.460,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	195.000.000,00	50.806.300,00	28.603.150,00	-166.396.850,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		345.897.460,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			13.255.510,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				5800 Orang	5800 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			127.641.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				220 Orang	220 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	40 Orang	80.000.000,00	39.396.300,00	22.178.150,00	-57.821.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	11.410.000,00	6.425.000,00	-13.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi																		
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi				4 Lembaga	4 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	145.000.000,00	125.856.000,00	62.124.000,00	-82.876.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				15000 Orang	15000 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				300 Orang	200 Orang	85.000.000,00	125.856.000,00	62.124.000,00	-22.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	75.000.000,00	510.000,00	255.000,00	-74.745.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	510.000,00	255.000,00	-74.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	305.000.000,00	182.835.000,00	134.020.000,00	130.000.000,00							435.000.000,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-				-	-	135.000.000,00	148.475.000,00	109.340.000,00	-25.660.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		185.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				0 Perusahaan	0 Perusahaan	25.000.000,00	31.665.000,00	16.657.000,00	-8.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				5 Perusahaan	5 Perusahaan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	116.810.000,00	92.683.000,00	7.683.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	50 Perkara	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	20 Perkara	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				19 Lembaga	19 Lembaga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																		
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	50 Perusahaan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-				-	-	55.000.000,00	34.360.000,00	24.680.000,00	-30.320.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	55.000.000,00	34.360.000,00	24.680.000,00	-30.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	250.885.142,00							1.304.433.620,00		
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	-880.829.493,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.304.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				0 Perusaha an	0 Perusaha an	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																			
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				0 Kasus	0 Kasus	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				5 Perusaha an	5 Perusaha an	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							653.000.000,00	109.989.931,00	46.661.970,00	-606.338.030,00							912.622.000,00		
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							653.000.000,00	109.989.931,00	46.661.970,00	-606.338.030,00							912.622.000,00		
1.	3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00							52.600.000,00		
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		52.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																			
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				0 Kawasan Transmigra si	0 Kawasan Transmigra si	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																			
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	405.000.000,00	71.659.931,00	26.474.970,00	160.000.000,00							565.000.000,00		
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	405.000.000,00	71.659.931,00	26.474.970,00	-378.525.030,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		565.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																			
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)				100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i>				100 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	68.000.000,00	4.452.000,00	2.215.000,00	-65.785.000,00	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			<i>Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>				90 Orang	90 Orang	242.000.000,00	61.107.931,00	21.209.970,00	-220.790.030,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			320.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			<i>Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>				1 Lokasi	1 Lokasi	60.000.000,00	6.100.000,00	3.050.000,00	-56.950.000,00	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	213.000.000,00	38.330.000,00	20.187.000,00	82.022.000,00							295.022.000,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-				-	-	213.000.000,00	38.330.000,00	20.187.000,00	-192.813.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		295.022.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman																		
			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>				60 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	60.000.000,00	9.210.000,00	4.687.000,00	-55.313.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			105.022.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman																		
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>				3 Satuan P ermukiman	1 Satuan P ermukiman	153.000.000,00	29.120.000,00	15.500.000,00	-137.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			190.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BLK PADANG PANJANG							34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00							33.250.225.460,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	19.328.500,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	87.801.500,00	87.802.150,00	82.802.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	725.000.000,00	2.727.957.490,00	2.469.402.490,00	100.000.000,00							825.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	580.000.000,00	2.702.767.490,00	2.455.062.490,00	1.875.062.490,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		645.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				32 Orang	224 Orang	200.000.000,00	1.419.268.000,00	1.298.635.000,00	1.098.635.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BLK PAYAKUMBUH								34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00					33.250.225.460,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	141.515.500,00	129.507.500,00	124.507.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	725.000.000,00	2.727.957.490,00	2.469.402.490,00	100.000.000,00							825.000.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	580.000.000,00	2.702.767.490,00	2.455.062.490,00	1.875.062.490,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		645.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				48 Orang	160 Orang	200.000.000,00	1.095.403.400,00	1.001.951.400,00	801.951.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA							34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00						33.250.225.460,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	25.000.000,00	3.889.800,00	-6.110.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	250.885.142,00							1.304.433.620,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	-880.829.493,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.304.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				99 Perusaha aan	99 Perusah aan	316.000.000,00	114.711.475,00	100.347.985,00	-215.652.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			363.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1							34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00						33.250.225.460,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	32.372.700,00	7.797.700,00	-17.202.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	250.885.142,00							1.304.433.620,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	-880.829.493,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.304.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				476 Perusa haan	476 Perusa haan	150.000.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	-147.600.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				55 Kasus	55 Kasus	89.080.000,00	4.416.000,00	2.208.000,00	-86.872.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		99.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				24 Perusah aan	24 Perusah aan	35.000.000,00	36.425.000,00	36.425.000,00	1.425.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2							34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00						33.250.225.460,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen- Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	250.885.142,00							1.304.433.620,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	-880.829.493,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.304.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				238 Perusa haan	238 Perusa haan	80.445.000,00	26.900.000,00	13.450.000,00	-66.995.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				27 Kasus	27 Kasus	61.000.000,00	16.110.000,00	8.055.000,00	-52.945.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		74.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				12 Perusah aan	12 Perusah aan	24.000.000,00	13.290.000,00	6.645.000,00	-17.355.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3							34.506.837.498,00	34.446.916.157,00	31.318.483.215,00	-3.188.354.283,00					33.250.225.460,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.853.837.498,00	34.336.926.226,00	31.271.821.245,00	-2.582.016.253,00							32.337.603.460,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	31.305.289.020,00	30.996.766.961,00	28.397.797.620,00	-2.218.116.640,00							29.087.172.380,00	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	825.943.115,00	3.716.589.146,00	1.961.162.737,00	1.135.219.622,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.122.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.989.615,00	6.000.000,00	1.497.000,00	-8.492.615,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.997.900,00	6.020.720,00	3.951.145,00	-6.046.755,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.995.600,00	24.113.000,00	7.102.500,00	-2.893.100,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	250.885.142,00							1.304.433.620,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.053.548.478,00	222.936.475,00	172.718.985,00	-880.829.493,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.304.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				159 Perusa haan	159 Perusa haan	60.000.000,00	2.684.000,00	1.220.000,00	-58.780.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				18 Kasus	18 Kasus	31.380.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	-29.940.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				8 Perusaha an	8 Perusaha an	26.643.478,00	720.000,00	528.000,00	-26.115.478,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.433.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				85 %	85 %	10.437.554.905,00	12.512.980.188,00	11.265.281.480,00	4.053.945.095,00							14.491.500.000,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	400.036.600,00	81.886.000,00	39.912.000,00	-360.124.600,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar, OPD urusan PPPA dan PPKB se Prov Sumbar, Stakeholder dan instansi Terkait		540.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	203.008.300,00	64.250.000,00	31.242.000,00	-171.766.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	91.298.000,00	12.092.000,00	5.922.000,00	-85.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	4 Laporan	105.730.300,00	5.544.000,00	2.748.000,00	-102.982.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase tertib adinistrasi keuangan</i>				100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	6.603.382.400,00	7.289.163.904,00	7.514.504.995,00	911.122.595,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	ASN DP3AP2KB Prov. Sumbar		8.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	6.219.401.000,00	6.987.162.904,00	7.216.810.995,00	997.409.995,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			8.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	344.598.000,00	293.361.000,00	293.374.000,00	-51.224.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	39.383.400,00	8.640.000,00	4.320.000,00	-35.063.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>				100 %	100 %	94.894.750,00	64.300.000,00	64.300.000,00	-30.594.750,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	DP3AP2KB Prov. Sumbar		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	54.700.000,00	64.300.000,00	64.300.000,00	9.600.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	36.844.750,00	0,00	0,00	-36.844.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	NON URUSAN							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	224.708.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-219.708.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	0 Paket	41.250.000,00	0,00	0,00	-41.250.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	4 Orang	183.458.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-178.458.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	912.714.345,00	2.706.211.522,00	1.749.238.355,00	836.524.010,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		2.035.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	25.449.800,00	6.355.800,00	6.355.800,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	NON URUSAN							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	48.580.402,00	2.829.600,00	0,00	-48.580.402,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	10.000.000,00	15.297.000,00	69.847.000,00	59.847.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	110.533.550,00	202.794.320,00	133.759.862,00	23.226.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	36.100.000,00	149.103.600,00	86.351.000,00	50.251.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.140.000,00	16.620.000,00	28.900.000,00	12.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.160.000,00	0,00	0,00	-4.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	627.979.593,00	2.119.927.552,00	1.340.602.318,00	712.622.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.971.000,00	0,00	0,00	-4.971.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	262.368.960,00	667.986.000,00	73.661.120,00	-188.707.840,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.050.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	9.641.480,00	646.070.000,00	0,00	-9.641.480,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	-3.416.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	249.311.480,00	18.500.000,00	52.761.120,00	-196.550.360,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.478.214.850,00	1.446.694.072,00	1.410.101.010,00	-68.113.840,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.551.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	656.500,00	328.000,00	-922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	342.901.500,00	306.547.500,00	253.308.000,00	-89.593.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.134.063.350,00	1.139.490.072,00	1.156.465.010,00	22.401.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	461.235.000,00	246.738.690,00	408.564.000,00	-52.671.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		445.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	9 Unit	123.600.000,00	123.600.000,00	96.500.000,00	-27.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	4.150.000,00	0,00	0,00	-4.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	78 Unit	120.100.000,00	75.650.000,00	67.770.000,00	-52.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.385.000,00	47.488.690,00	244.294.000,00	45.909.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan				15,09 %	15,09 %	1.289.972.450,00	943.787.000,00	898.543.000,00	150.027.550,00							1.440.000.000,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Gender Terlaksananya pembinaan PUG dan PPRG				100 % 19 Kab/Kota	100 % 19 Kab/Kota	196.000.000,00	44.915.000,00	24.156.000,00	-171.844.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	24.840.000,00	13.320.000,00	-36.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				2 Dokumen	2 Dokumen	146.000.000,00	20.075.000,00	10.836.000,00	-135.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kaikus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	286.000.000,00	252.975.000,00	358.655.000,00	72.655.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Kewirausahaan Perempuan dan Anggota kaukus Perempuan Politik Indonesia		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	125.450.000,00	231.880.000,00	201.880.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				3 Lembaga	3 Lembaga	256.000.000,00	127.525.000,00	126.775.000,00	-129.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang di tingkatkan kapasitas kelembagaannya Terlaksananya Pembinaan terhadap organisasi perempuan				100 % 19 Kab/Kota	100 % 19 Kab/Kota	807.972.450,00	645.897.000,00	515.732.000,00	-292.240.450,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pengurus dan Anggota Organisasi Perempuan		850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi				2 Lembaga	2 Lembaga	25.000.000,00	18.910.000,00	8.580.000,00	-16.420.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi				100 Orang	100 Orang	782.972.450,00	626.987.000,00	507.152.000,00	-275.820.450,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				96 %	96 %	1.510.674.995,00	1.097.031.000,00	1.048.564.000,00	224.583.155,00							1.735.258.150,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan terhadap perempuan				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	95.000.000,00	39.660.000,00	20.280.000,00	-74.720.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait Provinsi,Instansi Vertikal Provinsi OPD pengampu PPA Kabu paten/Kota,Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	39.660.000,00	20.280.000,00	-49.720.000,00	Kota Bukittinggi, GuguaK Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				19 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	1.075.416.845,00	950.751.000,00	950.751.000,00	-124.665.845,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan perempuan Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat		1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				50 Orang	20 Orang	37.549.995,00	751.000,00	751.000,00	-36.798.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.037.866.850,00	950.000.000,00	950.000.000,00	-87.866.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga				71,5 indeks	71,5 indeks	120.763.000,00	46.275.000,00	387.944.000,00	39.237.000,00							160.000.000,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan pada keluarga Terlaksananya upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak				19 Kab/Kota 37,5 indeks	19 Kab/Kota 37,5 indeks	120.763.000,00	46.275.000,00	387.944.000,00	267.181.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Masyarakat,Pemerintah daerah dan Stakeholder terkait		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	70.763.000,00	12.125.000,00	799.000,00	-69.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	34.150.000,00	387.145.000,00	337.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)				93,75 %	93,75 %	146.509.000,00	17.759.000,00	7.221.000,00	23.491.000,00							170.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak dalam kelembagaan data, yang dikumpulkan, diolah analisis dan disajikan				100 %	100 %	146.509.000,00	17.759.000,00	7.221.000,00	-139.288.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait		170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	76.509.000,00	289.000,00	136.000,00	-76.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				4 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	17.470.000,00	7.085.000,00	-62.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)				6 Kabupat en/Kota	6 Kabupat en/Kota	766.584.100,00	254.256.000,00	370.509.000,00	368.415.900,00							1.135.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan provinsi yang ditingkatkan pelembagaannya				100 %	100 %	331.760.000,00	222.722.000,00	360.772.000,00	29.012.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		640.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	210.765.000,00	207.440.000,00	103.720.000,00	-107.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				19 perangkat daerah	19 perangkat daerah	120.995.000,00	15.282.000,00	257.052.000,00	136.057.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya				100 %	100 %	434.824.100,00	31.534.000,00	9.737.000,00	-425.087.100,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		495.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				3000 Orang	300 Orang	238.747.400,00	10.650.000,00	3.925.000,00	-234.822.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																			
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	181.026.700,00	20.384.000,00	5.612.000,00	-175.414.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																			
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.050.000,00	500.000,00	200.000,00	-14.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif				96 %	96 %	833.730.000,00	2.566.626.000,00	2.311.190.000,00	151.270.000,00							985.000.000,00		
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	225.505.000,00	564.770.000,00	328.180.000,00	102.675.000,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	135.505.000,00	547.410.000,00	318.550.000,00	183.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi				130 Orang	130 Orang	90.000.000,00	17.360.000,00	9.630.000,00	-80.370.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kapasitas lembaga penyedia layanan bagi anak Terlaksananya koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus				100 % 19 Kab/Kota	100 % 19 Kab/Kota	168.225.000,00	503.601.000,00	469.588.000,00	301.363.000,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD terkait, OPD Pengampu PPA Kab/Kota, Instansi Vertikal, serta lembaga penyedia layanan anak Provinsi Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat			185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	380.351.000,00	372.448.000,00	347.448.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																			
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	123.225.000,00	123.250.000,00	97.140.000,00	-26.085.000,00	Kota Bukittinggi, Guguk Panjang, Bukik Cangang/Kayu Rmg.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							772.882.000,00	1.455.286.000,00	1.451.520.000,00	678.638.000,00							1.055.000.000,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya				90 %	90 %	160.000.000,00	17.920.000,00	12.040.000,00	-10.000.000,00							150.000.000,00		
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian penduduk				100 %	100 %	160.000.000,00	17.920.000,00	12.040.000,00	-147.960.000,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	12.760.000,00	10.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	5.160.000,00	2.040.000,00	-37.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB				56,32 %	56,32 %	200.000.000,00	99.670.000,00	49.430.000,00	30.000.000,00							230.000.000,00		
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE program KKBPK Terlaksananya Advokasi Promosi dan KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal				100 % 2 Laporan	100 % 2 Laporan	200.000.000,00	99.670.000,00	49.430.000,00	-150.570.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra kerja PPKB Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
			Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	4.960.000,00	3.480.000,00	-46.520.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				3 Daerah	3 Daerah	150.000.000,00	94.710.000,00	45.950.000,00	-104.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga				65,54 indeks	65,54 indeks	412.882.000,00	1.337.696.000,00	1.390.050.000,00	262.118.000,00							675.000.000,00		
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				100 %	100 %	296.202.000,00	951.654.000,00	1.099.690.000,00	803.488.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Mitra Kerja, ASN lingkup Provinsi Sumatera Barat, Masyarakat, Kader KB/TPK		530.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	236.202.000,00	614.892.000,00	760.280.000,00	524.078.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																			
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	336.762.000,00	339.410.000,00	279.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				100 %	100 %	116.680.000,00	386.042.000,00	290.360.000,00	173.680.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pokja Kampung KB, Kader BKB/BKR/BKL		145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas																			
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas				1 Kabupat en/Kota	1 Kabupat en/Kota	61.200.000,00	17.110.000,00	16.650.000,00	-44.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Organisasi	3 Organisasi	55.480.000,00	368.932.000,00	273.710.000,00	218.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00						21.171.758.150,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.878.670.450,00	18.894.000.188,00	17.740.772.480,00	1.862.102.030,00							21.171.758.150,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							15.105.788.450,00	17.438.714.188,00	16.289.252.480,00	1.183.464.030,00							20.116.758.150,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	10.437.554.905,00	12.512.980.188,00	11.265.281.480,00	4.053.945.095,00							14.491.500.000,00	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan bahan logistik dan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	912.714.345,00	2.706.211.522,00	1.749.238.355,00	836.524.010,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Pegawai Lingkup UPTD PPA		2.035.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.000.000,00	13.253.300,00	2.947.200,00	-12.052.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	160.936.350,00	80.475.175,00	77.475.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	461.235.000,00	246.738.690,00	408.564.000,00	-52.671.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		445.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				96 %	96 %	1.510.674.995,00	1.097.031.000,00	1.048.564.000,00	224.583.155,00							1.735.258.150,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan				40 Orang	40 Orang	340.258.150,00	106.620.000,00	77.533.000,00	-262.725.150,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang menjadi kewenangan Provinsi		410.258.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				40 Orang	40 Orang	140.258.150,00	13.730.000,00	9.180.000,00	-131.078.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			160.258.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				20 Layanan	31 Layanan	200.000.000,00	92.890.000,00	68.353.000,00	-131.647.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif				96 %	96 %	833.730.000,00	2.566.626.000,00	2.311.190.000,00	151.270.000,00							985.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	440.000.000,00	1.498.255.000,00	1.513.422.000,00	1.073.422.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Provinsi		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	620.000,00	310.000,00	-149.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				30 Layanan	81 Layanan	290.000.000,00	1.497.635.000,00	1.513.112.000,00	1.223.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKI MAN-PENUGAS AN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PANGAN								63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00						95.817.692.446,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	25.371.939.500,00	19.155.192.101,00	17.844.664.491,00	1.966.352.946,00							27.338.292.446,00		
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	406.000.000,00	20.558.000,00	11.287.000,00	-394.713.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		466.300.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	88.000.000,00	8.956.000,00	8.932.000,00	-79.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			96.800.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	45.000.000,00	5.502.000,00	2.355.000,00	-42.645.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			49.500.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	273.000.000,00	6.100.000,00	0,00	-273.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			320.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.602.945.911,00	13.052.703.357,00	13.143.896.626,00	-2.459.049.285,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.419.100.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	15.117.940.311,00	12.708.468.357,00	12.814.471.626,00	-2.303.468.685,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			15.000.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	410.005.600,00	314.640.000,00	314.640.000,00	-95.365.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			336.600.000,00	DINAS PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	29.595.000,00	14.785.000,00	-60.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			82.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	138.400.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	57.200.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		154.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	138.400.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	57.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			154.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	88.922.000,00	14.868.000,00	7.434.000,00	-81.488.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		91.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	95 Paket	69.000.000,00	0,00	0,00	-69.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			69.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	19.922.000,00	14.868.000,00	7.434.000,00	-12.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			22.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	936.118.638,00	2.539.887.873,00	1.575.385.115,00	639.266.477,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.119.700.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.991.508,00	29.760.500,00	7.433.000,00	-34.558.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			46.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.630,00	24.999.630,00	0,00	-24.999.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			27.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			55.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.867.500,00	147.498.000,00	59.596.025,00	4.728.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.340.000,00	105.146.600,00	68.066.700,00	35.726.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			38.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.460.000,00	6.900.000,00	4.860.000,00	-9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			16.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	59.460.000,00	59.460.000,00	3.050.000,00	-56.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			66.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	2.065.395.223,00	1.402.887.490,00	902.887.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			550.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.303.459.400,00	266.052.570,00	9.990.040,00	-1.293.469.360,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.395.200.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	99.965.400,00	0,00	0,00	-99.965.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	49.174.000,00	74.174.000,00	0,00	-49.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			66.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	19.320.000,00	19.320.000,00	5.744.000,00	-13.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			66.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.500.435.733,00	2.371.777.733,00	2.172.191.710,00	-328.244.023,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.767.992.446,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	19.902.000,00	2.500.000,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			33.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	383.620.000,00	292.620.000,00	-107.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			440.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.615.435.733,00	1.548.235.733,00	1.577.951.710,00	-37.484.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.776.992.446,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.395.657.818,00	533.744.568,00	568.880.000,00	-1.826.777.818,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.925.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				22 Unit	22 Unit	160.040.068,00	160.040.068,00	163.440.000,00	3.399.932,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			275.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	35 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	49.550.000,00	-50.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	312.277.350,00	72.654.500,00	39.054.000,00	-273.223.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			440.000.000,00	DINAS PANGAN	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	30.037.648.000,00	3.059.070.948,00	2.066.187.214,00	29.224.252.000,00							59.261.900.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	26.442.648.000,00	1.934.240.068,00	1.406.683.686,00	-25.035.964.314,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		54.709.900.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	4.350.000.000,00	720.714.068,00	567.511.300,00	-3.782.488.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			5.000.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-246.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			350.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	550.000.000,00	216.141.386,00	-2.783.858.614,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.300.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi																			
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	-96.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																			
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				100 Unit	100 Unit	16.850.000.000,00	41.190.000,00	16.520.000,00	-16.833.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			43.737.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi																			
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	-196.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																			
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	6.671.000,00	4.171.000,00	-95.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-				-	-	2.575.000.000,00	797.683.880,00	463.975.528,00	-2.111.024.472,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.835.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				50 Ton	50 Ton	150.000.000,00	54.500.000,00	29.000.000,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			165.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				200 Ton	200 Ton	2.300.000.000,00	719.125.880,00	431.475.528,00	-1.868.524.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.530.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	24.058.000,00	3.500.000,00	-121.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			140.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-				-	-	1.020.000.000,00	327.147.000,00	195.528.000,00	-824.472.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.717.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	110.447.000,00	88.300.000,00	-211.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			990.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	207.000.000,00	98.358.000,00	-551.642.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			650.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	9.700.000,00	8.870.000,00	-61.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			77.000.000,00	DINAS PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	5.900.000.000,00	417.902.990,00	321.400.000,00	670.000.000,00							6.570.000.000,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	4.600.000,00	2.700.000,00	-97.300.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	4.600.000,00	2.700.000,00	-97.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	-				-	-	5.800.000.000,00	413.302.990,00	318.700.000,00	-5.481.300.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		6.460.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	386.765.990,00	301.700.000,00	-3.198.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.850.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	2.200.000.000,00	22.837.000,00	15.100.000,00	-2.184.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	3.700.000,00	1.900.000,00	-98.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	409.631.500,00							2.647.500.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	-1.866.428.270,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.647.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	101.496.150,00	92.136.754,00	-357.863.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			495.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			137.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	79.500.000,00	63.800.000,00	-86.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			165.000.000,00	DINAS PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	25.371.939.500,00	19.155.192.101,00	17.844.664.491,00	1.966.352.946,00							27.338.292.446,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	936.118.638,00	2.539.887.873,00	1.575.385.115,00	639.266.477,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.119.700.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	3.658.600,00	-10.341.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			14.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	4.378.500,00	-5.621.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			25.700.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	30.000.000,00	8.284.700,00	-11.715.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			18.600.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	5.135.000,00	-4.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			10.100.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.370.000,00	-1.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			24.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.303.459.400,00	266.052.570,00	9.990.040,00	-1.293.469.360,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.395.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	26.953.920,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			25.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	4.246.040,00	-5.753.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			7.700.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.500.435.733,00	2.371.777.733,00	2.172.191.710,00	-328.244.023,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.767.992.446,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.620.000,00	-3.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			9.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	130.530.000,00	-54.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.395.657.818,00	533.744.568,00	568.880.000,00	-1.826.777.818,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.925.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	24.820.000,00	-25.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.423.340.400,00	1.050.000,00	166.696.000,00	-1.256.644.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.650.000.000,00	DINAS PANGAN	
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	409.631.500,00							2.647.500.000,00		
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	-1.866.428.270,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.647.500.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																			
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				130 Sertifikat	60 Sertifikat	562.868.500,00	59.000.000,00	52.000.000,00	-510.868.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			880.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	46.850.000,00	28.900.000,00	-121.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	39.040.000,00	19.060.000,00	-180.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			220.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	151.429.066,00	109.843.476,00	-490.156.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PANGAN	
		UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN								63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							63.547.456.000,00	23.118.981.255,00	20.603.691.935,00	-42.943.764.065,00							95.817.692.446,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	25.371.939.500,00	19.155.192.101,00	17.844.664.491,00	1.966.352.946,00							27.338.292.446,00		
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	936.118.638,00	2.539.887.873,00	1.575.385.115,00	639.266.477,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.119.700.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	6.920.000,00	1.732.300,00	-12.267.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			24.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	3.693.820,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			18.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	7.014.100,00	1.745.200,00	-18.254.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			30.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.100.000,00	1.187.600,00	-8.812.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			15.000.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.600.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			24.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.303.459.400,00	266.052.570,00	9.990.040,00	-1.293.469.360,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.395.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.050.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			27.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	132.880.100,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			25.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	2.724.550,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			18.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.500.435.733,00	2.371.777.733,00	2.172.191.710,00	-328.244.023,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.767.992.446,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			9.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	255.000.000,00	223.020.000,00	162.720.000,00	-92.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.395.657.818,00	533.744.568,00	568.880.000,00	-1.826.777.818,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.925.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	37.320.000,00	-12.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			60.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			240.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	2.000.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-1.840.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.000.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-1.840.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.000.000.000,00	DINAS PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	30.037.648.000,00	3.059.070.948,00	2.066.187.214,00	29.224.252.000,00							59.261.900.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	26.442.648.000,00	1.934.240.068,00	1.406.683.686,00	-25.035.964.314,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		54.709.900.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	953.648.000,00	591.840.000,00	591.840.000,00	-361.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins				1 Laporan	1 Laporan	639.000.000,00	325.000,00	0,00	-639.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			702.900.000,00	DINAS PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	409.631.500,00							2.647.500.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.237.868.500,00	486.815.216,00	371.440.230,00	-1.866.428.270,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.647.500.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00					25.537.132.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	16.554.585.898,00	19.528.339.048,00	17.338.253.286,00	-1.478.953.898,00							15.075.632.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	62.000.000,00	75.720.000,00	38.940.000,00	-23.060.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00	69.705.000,00	35.930.000,00	8.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	2.160.000,00	1.086.000,00	-3.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	3.855.000,00	1.924.000,00	-28.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.476.570.566,00	10.805.280.825,00	11.142.295.680,00	-334.274.886,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	11.067.610.566,00	10.527.360.825,00	10.864.375.680,00	-203.234.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			9.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	408.960.000,00	277.920.000,00	277.920.000,00	-131.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	184.000.000,00	205.830.000,00	197.330.000,00	13.330.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	181.830.000,00	173.330.000,00	13.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	193.250.000,00	80.000.000,00	121.520.000,00	-71.730.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		243.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				103 Paket	0 Paket	68.250.000,00	0,00	56.620.000,00	-11.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			68.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	5 Orang	25.000.000,00	30.250.000,00	15.150.000,00	-9.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.144.973.258,00	2.508.638.092,00	1.077.929.032,00	-67.044.226,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		892.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-3.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	2 Paket	14.663.000,00	8.163.000,00	0,00	-14.663.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	70.000.000,00	134.237.000,00	41.037.700,00	-28.962.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	30.000.000,00	105.362.000,00	27.381.500,00	-2.618.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	60 Dokumen	10.000.000,00	9.700.000,00	7.260.000,00	-2.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 0	1 Laporan	5.000.000,00	11.663.250,00	4.943.750,00	-56.250,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	601.963.000,00	1.823.756.297,00	911.891.149,00	309.928.149,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	157.655.099,00	228.332.279,00	0,00	-157.655.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	158.764.200,00	1.426.923.200,00	36.897.932,00	-121.866.268,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		626.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	32.219.000,00	1.292.140.000,00	0,00	-32.219.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	54.675.200,00	62.913.200,00	0,00	-54.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	5 Unit	71.870.000,00	71.870.000,00	36.897.932,00	-34.972.068,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			301.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.366.682.333,00	2.246.696.931,00	2.294.386.373,00	-72.295.960,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	6.980.000,00	3.985.000,00	-8.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				152.502 Laporan	36 Laporan	200.000.000,00	220.000.000,00	155.056.000,00	-44.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1.822.442.333,00	1.687.771.853,00	1.899.401.818,00	76.959.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	967.345.541,00	604.250.000,00	853.954.269,00	-113.391.272,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.070.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	15 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	128.950.000,00	-121.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	33 Unit	50.000.000,00	49.910.000,00	28.300.000,00	-21.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	3 Unit	263.117.541,00	300.000.000,00	98.943.000,00	-164.174.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	197.567.000,00	197.567.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	222.580.800,00	22.580.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	102.318.000,00	16.775.000,00	8.235.000,00	-2.318.000,00							100.000.000,00		
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	6.100.000,00	915.000,00	-49.085.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				19 Dokumen	19 Dokumen	50.000.000,00	6.100.000,00	915.000,00	-49.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-				-	-	52.318.000,00	10.675.000,00	7.320.000,00	-44.998.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				19 Dokumen	19 Dokumen	52.318.000,00	10.675.000,00	7.320.000,00	-44.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	1.713.993.902,00	1.214.009.922,00	1.167.629.922,00	166.721.098,00							1.880.715.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-				-	-	1.478.993.902,00	1.206.869.922,00	1.164.057.922,00	-314.935.980,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.565.715.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				19 Dokumen	19 Dokumen	430.000.000,00	123.307.000,00	105.544.000,00	-324.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	35.600.000,00	19.240.000,00	-70.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	2.440.000,00	1.891.000,00	-58.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	96.900.000,00	16.780.000,00	8.640.000,00	-88.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	235.000.000,00	7.140.000,00	3.572.000,00	-231.428.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				2 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	7.140.000,00	3.572.000,00	-31.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	119.327.000,00	101.824.950,00	101.824.950,00	-109.327.000,00							10.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-				-	-	119.327.000,00	101.824.950,00	101.824.950,00	-17.502.050,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 0	1 Dokumen	119.327.000,00	101.824.950,00	101.824.950,00	-17.502.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	1.172.760.200,00	225.486.660,00	217.240.330,00	2.019.214.800,00							3.191.975.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.172.760.200,00	225.486.660,00	217.240.330,00	-955.519.870,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.191.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	-72.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	158.225.000,00	28.594.000,00	16.364.000,00	-23.225.000,00							135.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	158.225.000,00	28.594.000,00	16.364.000,00	-141.861.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				4 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	3.355.000,00	1.680.000,00	-48.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	33.061.000,00	21.299.000,00	11.354.000,00	-21.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				3 Badan Usaha	6 Badan Usaha	75.164.000,00	3.940.000,00	3.330.000,00	-71.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-				-	-	52.170.000,00	0,00	0,00	-37.170.000,00							15.000.000,00	
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-				-	-	52.170.000,00	0,00	0,00	-52.170.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.170.000,00	0,00	0,00	-52.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	358.252.000,00	1.061.805.000,00	919.781.000,00	-941.000,00							357.311.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	358.252.000,00	1.061.805.000,00	919.781.000,00	561.529.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		357.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				24 Dokumen	24 Dokumen	155.000.000,00	784.895.000,00	784.895.000,00	629.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			159.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				10 Orang	10 Orang	155.977.000,00	259.620.000,00	125.800.000,00	-30.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			116.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				10 Keluarga	10 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				6 Lembaga	1 Lembaga	47.275.000,00	17.290.000,00	9.086.000,00	-38.189.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	106.927.000,00	32.260.000,00	13.965.000,00	5.654.000,00							112.581.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	106.927.000,00	32.260.000,00	13.965.000,00	-92.962.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				22 Entitas	2 Entitas	106.927.000,00	32.260.000,00	13.965.000,00	-92.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	134.312.000,00	31.195.000,00	24.525.000,00	28.447.000,00							162.759.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-				-	-	134.312.000,00	31.195.000,00	24.525.000,00	-109.787.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		162.759.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				3 Perkara	5 Perkara	35.489.000,00	2.480.000,00	1.870.000,00	-33.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			43.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				100 Pengaduan	7 Pengaduan	98.823.000,00	28.715.000,00	22.655.000,00	-76.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			119.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	3.173.200.000,00	3.948.683.659,00	3.662.873.694,00	1.322.959.000,00							4.496.159.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-				-	-	3.173.200.000,00	3.948.683.659,00	3.662.873.694,00	489.673.694,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.496.159.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	232.440.000,00	231.220.000,00	-18.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			471.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				19 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	4.160.000,00	2.080.000,00	-32.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PERSAMPAHAN								23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00						25.537.132.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	16.554.585.898,00	19.528.339.048,00	17.338.253.286,00	-1.478.953.898,00							15.075.632.000,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.144.973.258,00	2.508.638.092,00	1.077.929.032,00	-67.044.226,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		892.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	21 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.366.682.333,00	2.246.696.931,00	2.294.386.373,00	-72.295.960,00			-	-	-		1.980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.800.000,00	112.800.000,00	80.490.000,00	-32.310.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	23 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	3.173.200.000,00	3.948.683.659,00	3.662.873.694,00	1.322.959.000,00							4.496.159.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-				-	-	3.173.200.000,00	3.948.683.659,00	3.662.873.694,00	489.673.694,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.496.159.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				2 Unit	2 Unit	2.862.200.000,00	3.687.083.659,00	3.417.991.619,00	555.791.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			4.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	11.582.075,00	-13.417.925,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.159.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN								23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00						25.537.132.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	16.554.585.898,00	19.528.339.048,00	17.338.253.286,00	-1.478.953.898,00							15.075.632.000,00		
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.144.973.258,00	2.508.638.092,00	1.077.929.032,00	-67.044.226,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		892.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	56.383.056,00	0,00	0,00	-56.383.056,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.040.000,00	0,00	0,00	-3.040.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	83.268.303,00	0,00	0,00	-83.268.303,00	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Panglun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.366.682.333,00	2.246.696.931,00	2.294.386.373,00	-72.295.960,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	64.440.000,00	64.145.078,00	44.973.555,00	-19.466.445,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	1.713.993.902,00	1.214.009.922,00	1.167.629.922,00	166.721.098,00							1.880.715.000,00		
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-				-	-	1.478.993.902,00	1.206.869.922,00	1.164.057.922,00	-314.935.980,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.565.715.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				150 Dokumen	150 Dokumen	802.093.902,00	1.028.742.922,00	1.028.742.922,00	226.649.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			1.105.715.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS								23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00						25.537.132.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.646.071.000,00	26.188.973.239,00	23.470.692.182,00	-175.378.818,00							25.537.132.000,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	16.554.585.898,00	19.528.339.048,00	17.338.253.286,00	-1.478.953.898,00							15.075.632.000,00		
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	184.000.000,00	205.830.000,00	197.330.000,00	13.330.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	193.250.000,00	80.000.000,00	121.520.000,00	-71.730.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		243.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	7 Orang	100.000.000,00	49.750.000,00	49.750.000,00	-50.250.000,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.144.973.258,00	2.508.638.092,00	1.077.929.032,00	-67.044.226,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		892.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	7.900.000,00	7.900.000,00	1.950.000,00	-5.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 0	6 Paket	50.000.800,00	38.300.800,00	15.472.300,00	-34.528.500,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.100.000,00	5.100.200,00	1.275.000,00	-3.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	25.000.000,00	131.123.266,00	65.467.633,00	40.467.633,00	-	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.366.682.333,00	2.246.696.931,00	2.294.386.373,00	-72.295.960,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.980.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	155.000.000,00	110.480.000,00	-44.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	967.345.541,00	604.250.000,00	853.954.269,00	-113.391.272,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.070.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.340.000,00	4.340.000,00	1.805.000,00	-2.535.000,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	199.888.000,00	0,00	175.808.469,00	-24.079.531,00	Kota Padang, Koto Tengah, Balai Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.000.000,00	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.574.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000,00	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.574.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	1.172.760.200,00	225.486.660,00	217.240.330,00	2.019.214.800,00							3.191.975.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	1.172.760.200,00	225.486.660,00	217.240.330,00	-955.519.870,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.191.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.092.760.200,00	211.086.660,00	210.040.330,00	-882.719.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			3.111.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.527.023.152,00	8.951.668.506,00	7.450.079.096,00	-4.076.944.056,00						11.238.094.418,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.527.023.152,00	8.951.668.506,00	7.450.079.096,00	-4.076.944.056,00							11.238.094.418,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.527.023.152,00	8.951.668.506,00	7.450.079.096,00	-4.076.944.056,00							11.238.094.418,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				-	100 %	9.705.067.152,00	8.491.634.506,00	7.207.177.096,00	-1.000.803.734,00							8.704.263.418,00	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	493.859.500,00	159.596.000,00	97.158.000,00	-396.701.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		415.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	223.396.500,00	99.381.000,00	49.560.000,00	-173.836.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	134.509.000,00	13.015.000,00	6.498.000,00	-128.011.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	135.954.000,00	47.200.000,00	41.100.000,00	-94.854.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrtasi Keuangan				-	100 %	5.335.277.252,00	4.689.577.077,00	4.841.718.140,00	-493.559.112,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.342.889.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	4.881.984.152,00	4.510.297.077,00	4.673.538.140,00	-208.446.012,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.272.889.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1700 Dokumen	1700 Dokumen	390.000.000,00	157.080.000,00	157.080.000,00	-232.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	63.293.100,00	22.200.000,00	11.100.000,00	-52.193.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 %	118.744.000,00	47.735.000,00	43.010.000,00	-75.734.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	101.945.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	-63.645.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.799.000,00	9.435.000,00	4.710.000,00	-12.089.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	345.762.000,00	0,00	0,00	-345.762.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	0 Paket	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			88.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	2 Orang	261.762.000,00	0,00	0,00	-261.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrai Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.178.519.175,00	1.564.473.135,00	740.644.293,00	-437.874.882,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		915.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	25.000.000,00	6.248.200,00	-38.751.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	153.000.000,00	0,00	0,00	-153.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	5 Paket	202.077.100,00	145.547.500,00	43.340.800,00	-158.736.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.031.200,00	158.926.600,00	37.887.500,00	-38.143.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	15.360.000,00	10.860.000,00	-39.140.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	485.410.875,00	1.154.639.035,00	577.307.793,00	91.896.918,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-65.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan				-	100 %	281.433.916,00	600.000.000,00	300.000.000,00	18.566.084,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	186.433.916,00	600.000.000,00	300.000.000,00	113.566.084,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	1.236.231.240,00	1.035.520.032,00	979.885.032,00	-256.346.208,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.299.588.895,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	486.202.500,00	253.740.000,00	198.105.000,00	-288.097.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			510.512.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.028.740,00	781.780.032,00	781.780.032,00	31.751.292,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			789.076.270,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	715.240.069,00	394.733.262,00	204.761.631,00	-510.478.438,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		428.285.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	8 Unit	304.320.000,00	135.000.000,00	73.650.000,00	-230.670.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			263.130.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	93.390.000,00	49.250.000,00	24.625.000,00	-68.765.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.155.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	183.533.262,00	91.766.631,00	-138.233.369,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	8 Unit	87.530.069,00	26.950.000,00	14.720.000,00	-72.810.069,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik				70 98,5 % %	70 98,5 % %	528.515.000,00	195.242.000,00	104.820.000,00	486.485.000,00							1.015.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat				100 persen	100 persen	125.000.000,00	38.641.000,00	17.059.000,00	-107.941.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.636.000,00	671.000,00	-24.329.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	9.075.000,00	4.045.000,00	-45.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.510.000,00	3.233.000,00	-21.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	18.420.000,00	9.110.000,00	-15.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat				100 persen	100 persen	203.515.000,00	96.166.000,00	57.505.000,00	-146.010.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		545.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	63.515.000,00	72.890.000,00	45.295.000,00	-18.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	23.276.000,00	12.210.000,00	-37.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat				100 persen	100 persen	200.000.000,00	60.435.000,00	30.256.000,00	-169.744.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	41.125.000,00	21.170.000,00	-78.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	19.310.000,00	9.086.000,00	-90.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun				100 97 % %	100 97 % %	528.515.000,00	117.834.000,00	57.771.000,00	316.000,00							528.831.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat				100 persen	100 persen	125.000.000,00	36.693.000,00	18.242.000,00	-106.758.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	8.093.000,00	4.363.000,00	-20.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.368.000,00	5.838.000,00	-19.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	15.232.000,00	8.041.000,00	-41.959.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat				100 persen	100 persen	203.515.000,00	47.380.000,00	22.132.000,00	-181.383.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		228.831.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	88.515.000,00	15.828.000,00	6.900.000,00	-81.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			113.831.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	11.946.000,00	5.539.000,00	-44.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	14.967.000,00	7.397.000,00	-17.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	4.639.000,00	2.296.000,00	-12.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat				100 persen	100 persen	200.000.000,00	33.761.000,00	17.397.000,00	-182.603.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	6.344.000,00	3.172.000,00	-96.828.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	27.417.000,00	14.225.000,00	-85.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data				15 1,1 inovasi %	1,1 15 % inovasi	548.974.000,00	131.518.000,00	72.625.000,00	171.026.000,00							720.000.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 persen	100 persen	348.974.000,00	109.512.000,00	60.809.000,00	-288.165.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		420.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	163.202.000,00	46.312.000,00	30.048.000,00	-133.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	40.772.000,00	20.480.000,00	10.317.000,00	-30.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	10.140.000,00	5.070.000,00	-44.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	32.580.000,00	15.374.000,00	-59.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya SOM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				100 persen	100 persen	200.000.000,00	22.006.000,00	11.816.000,00	-188.184.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	7.076.000,00	3.538.000,00	-96.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				120 Orang	60 Orang	100.000.000,00	14.930.000,00	8.278.000,00	-91.722.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun				2 jenis	2 jenis	215.952.000,00	15.440.000,00	7.686.000,00	54.048.000,00							270.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan				100 persen	100 persen	215.952.000,00	15.440.000,00	7.686.000,00	-208.266.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	7.320.000,00	3.660.000,00	-86.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.952.000,00	8.120.000,00	4.026.000,00	-121.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								14.924.356.000,00	14.784.832.810,00	12.334.483.893,00	-2.589.872.107,00					9.642.387.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.924.356.000,00	14.784.832.810,00	12.334.483.893,00	-2.589.872.107,00							9.642.387.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							14.924.356.000,00	14.784.832.810,00	12.334.483.893,00	-2.589.872.107,00							9.642.387.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	9.582.614.000,00	12.290.052.810,00	10.548.379.143,00	-6.995.114.000,00							2.587.500.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	108.955.000,00	138.372.624,00	28.100.000,00	-80.855.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	80.000.000,00	62.100.000,00	19.100.000,00	-60.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	28.955.000,00	76.272.624,00	9.000.000,00	-19.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.192.778.845,00	7.064.885.380,00	7.245.134.026,00	52.355.181,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.982.778.845,00	6.775.085.380,00	6.984.344.026,00	1.565.181,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	170.000.000,00	261.800.000,00	248.470.000,00	78.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	40.000.000,00	28.000.000,00	12.320.000,00	-27.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	78.300.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	78.300.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	656.716.000,00	2.885.794.505,00	1.518.540.201,00	861.824.201,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		680.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.200.000,00	27.101.800,00	6.775.450,00	-3.424.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	29.436.000,00	20.605.200,00	0,00	-29.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50.000.000,00	165.256.190,00	89.270.113,00	39.270.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	45.000.000,00	170.294.000,00	84.464.175,00	39.464.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	22.080.000,00	22.340.000,00	16.755.000,00	-5.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	2.480.197.315,00	1.321.275.463,00	821.275.463,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	15.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.251.014.155,00	1.261.336.701,00	1.541.673.116,00	290.658.961,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.237.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	1.750.000,00	437.500,00	-2.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	229.343.000,00	245.902.949,00	174.154.064,00	-55.188.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.019.171.155,00	1.013.683.752,00	1.367.081.552,00	347.910.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			980.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.850.000,00	261.363.600,00	136.631.800,00	-69.218.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	22.063.600,00	11.881.800,00	-14.118.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	159.850.000,00	180.700.000,00	95.450.000,00	-64.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	58.600.000,00	29.300.000,00	19.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-				-	-	1.304.887.000,00	421.040.000,00	144.570.000,00	350.000.000,00							1.654.887.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.304.887.000,00	421.040.000,00	144.570.000,00	-1.160.317.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.654.887.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	154.887.000,00	28.000.000,00	14.900.000,00	-139.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			154.887.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000.000,00	393.040.000,00	129.670.000,00	-870.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	953.910.000,00	872.066.000,00	656.884.500,00	446.090.000,00							1.400.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-				-	-	953.910.000,00	872.066.000,00	656.884.500,00	-297.025.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																		
			jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	68.750.000,00	101.868.000,00	71.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	30.000.000,00	104.899.000,00	85.023.000,00	55.023.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				6 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000,00	268.700.000,00	196.780.000,00	-403.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa																		
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				55 Orang	55 Orang	50.000.000,00	238.580.000,00	160.105.000,00	110.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				55 Orang	55 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	163.910.000,00	191.137.000,00	113.108.500,00	-50.801.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	3.082.945.000,00	1.201.674.000,00	984.650.250,00	817.055.000,00							3.900.000.000,00		
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.082.945.000,00	1.201.674.000,00	984.650.250,00	-2.098.294.750,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				7 Dokumen	7 Dokumen	52.945.000,00	0,00	0,00	-52.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				19 Dokumen	19 Dokumen	420.000.000,00	130.540.000,00	71.519.000,00	-348.481.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				125 Lembaga	125 Lembaga	500.000.000,00	174.700.000,00	127.314.000,00	-372.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	300.000.000,00	67.070.000,00	34.875.000,00	-265.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	171.999.000,00	93.577.250,00	-306.422.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				19 Laporan	19 Laporan	1.350.000.000,00	657.365.000,00	657.365.000,00	-692.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				19 Keluarga	19 Keluarga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				27 Keluarga	27 Keluarga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		DINAS PERHUBUNGAN								20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00					21.178.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	15.556.723.800,00	16.658.569.908,00	15.174.113.933,00	501.276.200,00							16.058.000.000,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	252.002.183,00	42.195.000,00	24.310.000,00	-227.692.183,00			-	-	Instansi terkait		395.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	58.138.300,00	15.285.000,00	9.215.000,00	-48.923.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	59.656.000,00	15.345.000,00	13.295.000,00	-46.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	61.487.600,00	0,00	0,00	-61.487.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1200 Data	0 Data	43.693.283,00	0,00	0,00	-43.693.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	29.027.000,00	11.565.000,00	1.800.000,00	-27.227.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	10.694.061.733,00	10.084.112.043,00	10.363.599.157,00	-330.462.576,00			-	-	Instansi terkait		10.760.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	10.411.002.333,00	9.803.092.043,00	10.107.619.157,00	-303.383.176,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	221.489.000,00	255.000.000,00	234.000.000,00	12.511.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	61.570.400,00	26.020.000,00	21.980.000,00	-39.590.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	109.042.500,00	60.052.500,00	43.752.500,00	-65.290.000,00			-	-	Instansi terkait		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.002.500,00	60.052.500,00	43.752.500,00	-26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	39.040.000,00	0,00	0,00	-39.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	432.076.000,00	135.899.000,00	21.091.000,00	-410.985.000,00			-	-	Instansi terkait		260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	113.250.000,00	63.750.000,00	0,00	-113.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	8 Orang	318.826.000,00	72.149.000,00	21.091.000,00	-297.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	826.689.085,00	2.623.093.166,00	1.614.840.415,40	788.151.330,40			-	-	Instansi terkait		908.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.765.000,00	35.762.600,00	21.433.000,00	-19.332.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.932.400,00	32.642.600,00	14.411.000,00	-17.521.400,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.689.485,00	56.689.485,00	6.000.000,00	-44.689.485,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	221.698.400,00	131.700.178,00	51.788.800,00	-169.909.600,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.610.000,00	120.653.600,00	71.785.700,00	46.175.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.030.000,00	12.120.000,00	6.060.000,00	-9.970.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	404.631.000,00	2.233.524.703,00	1.443.361.915,40	1.038.730.915,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	275.359.080,00	148.630.840,00	48.150.000,00	-227.209.080,00			-	-	Instansi terkait		290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.348.800,00	48.150.000,00	48.150.000,00	-32.198.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	113.249.280,00	98.112.040,00	0,00	-113.249.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.310.437.219,00	3.130.606.559,00	2.803.426.060,60	492.988.841,60			-	-	Instansi terkait		2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.145.000,00	17.098.200,00	5.000.000,00	-13.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	298.699.500,00	436.300.000,00	278.853.000,00	-19.846.500,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.993.592.719,00	2.677.208.359,00	2.519.573.060,60	525.980.341,60	Kab. Pesisir Selaian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				80 %	80 %	497.211.000,00	347.407.800,00	218.875.800,00	-278.335.200,00			-	-	Instansi terkait		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	134.991.000,00	119.917.800,00	119.917.800,00	-15.073.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	38.130.000,00	31.490.000,00	20.590.000,00	-17.540.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	324.090.000,00	196.000.000,00	78.368.000,00	-245.722.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas				2,45 43,65 % %	2,45 %	3.798.898.200,00	2.253.810.929,00	1.726.781.372,00	-188.898.200,00							3.610.000.000,00		
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	930.520.500,00	1.088.155.000,00	1.170.494.000,00	239.973.500,00			-	-	Masyarakat dan Instansi terkait		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	867.132.500,00	88.155.000,00	54.294.000,00	-812.838.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	63.388.000,00	1.000.000.000,00	1.116.200.000,00	1.052.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				27 %	27 %	987.000.000,00	428.284.000,00	413.795.187,00	-573.204.813,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				82 Unit	75 Unit	787.000.000,00	425.844.000,00	412.355.187,00	-374.644.813,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				330 Unit	330 Unit	200.000.000,00	2.440.000,00	1.440.000,00	-198.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	922.826.000,00	631.654.329,00	110.283.100,00	-812.542.900,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		1.290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	880.807.500,00	606.970.329,00	98.170.100,00	-782.637.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	42.018.500,00	24.684.000,00	12.113.000,00	-29.905.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan				7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	80.000.000,00	5.490.000,00	2.440.000,00	-77.560.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	5.490.000,00	2.440.000,00	-77.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan				3 Dokumen	1 Dokumen	283.786.000,00	62.747.600,00	9.207.085,00	-274.578.915,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	116.336.000,00	62.747.600,00	9.207.085,00	-107.128.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	0 Laporan	47.450.000,00	0,00	0,00	-47.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	190.867.500,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-189.037.500,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	190.867.500,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-189.037.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-73.170.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				600 Unit	600 Unit	75.000.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-73.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi				5 Rekome ndasi	5 Rekome ndasi	1.255.236.000,00	6.710.000,00	3.172.000,00	84.764.000,00							1.340.000.000,00	
	2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase tertibnya perizinan angkutan laut				100 %	100 %	150.000.000,00	3.050.000,00	1.952.000,00	-148.048.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Instansi terkait dan masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	3.050.000,00	1.952.000,00	-148.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana				100 %	100 %	150.000.000,00	1.830.000,00	732.000,00	-149.268.000,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1.830.000,00	732.000,00	-149.268.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				2 Dokumen	1 Dokumen	955.236.000,00	1.830.000,00	488.000,00	-954.748.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Instansi terkait dan masyarakat		960.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Laporan	1 Laporan	155.236.000,00	1.830.000,00	488.000,00	-154.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Instansi Terkait dan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan				1 dokumen	1 dokumen	215.942.000,00	4.880.000,00	2.880.000,00	-45.942.000,00							170.000.000,00	
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi				1 Usulan	1 Usulan	215.942.000,00	4.880.000,00	2.880.000,00	-213.062.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.106.800,00	2.440.000,00	1.440.000,00	-83.666.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	130.835.200,00	2.440.000,00	1.440.000,00	-129.395.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIKIS DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00						21.178.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	15.556.723.800,00	16.658.569.908,00	15.174.113.933,00	501.276.200,00							16.058.000.000,00	
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	159.845.000,00	86.573.000,00	36.069.000,00	-123.776.000,00			-	-	Instansi terkait		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	64.903.000,00	30.543.000,00	12.704.000,00	-52.199.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	826.689.085,00	2.623.093.166,00	1.614.840.415,40	788.151.330,40			-	-	-		908.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	22.437.600,00	0,00	0,00	-22.437.600,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	275.359.080,00	148.630.840,00	48.150.000,00	-227.209.080,00			-	-	Instansi terkait		290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.565.000,00	2.368.800,00	0,00	-2.565.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	33.843.560,00	0,00	0,00	-33.843.560,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.310.437.219,00	3.130.606.559,00	2.803.426.060,60	492.988.841,60			-	-	-		2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				53 %	53 %	3.798.898.200,00	2.253.810.929,00	1.726.781.372,00	-188.898.200,00							3.610.000.000,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun				1 %	1 %	328.898.200,00	33.820.000,00	16.902.000,00	-311.996.200,00			-	-	-		670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				2 Unit	2 Unit	56.290.000,00	5.980.000,00	2.982.000,00	-53.308.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				10 Orang	10 Orang	83.604.000,00	1.920.000,00	960.000,00	-82.644.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	0 Unit	21.356.840,00	0,00	0,00	-21.356.840,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00						21.178.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20.826.800.000,00	18.923.970.837,00	16.906.947.305,00	-3.919.852.695,00							21.178.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	15.556.723.800,00	16.658.569.908,00	15.174.113.933,00	501.276.200,00							16.058.000.000,00	
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	159.845.000,00	86.573.000,00	36.069.000,00	-123.776.000,00			-	-	Instansi terkait		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	94.942.000,00	56.030.000,00	23.365.000,00	-71.577.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	826.689.085,00	2.623.093.166,00	1.614.840.415,40	788.151.330,40			-	-	Instansi terkait		908.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0 Paket	12.895.200,00	0,00	0,00	-12.895.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>				100 %	100 %	275.359.080,00	148.630.840,00	48.150.000,00	-227.209.080,00			-	-	Instansi terkait		290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0 Paket	6.246.000,00	0,00	0,00	-6.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	0 Unit	39.106.440,00	0,00	0,00	-39.106.440,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	2.310.437.219,00	3.130.606.559,00	2.803.426.060,60	492.988.841,60			-	-	Instansi terkait		2.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun				69,5 %	69,10 %	3.798.898.200,00	2.253.810.929,00	1.726.781.372,00	-188.898.200,00							3.610.000.000,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun</i>				1 %	1 %	328.898.200,00	33.820.000,00	16.902.000,00	-311.996.200,00			-	-	Instansi terkait dan masyarakat		670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B																		
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B																		
			<i>Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi</i>				3 Unit	3 Unit	67.596.300,00	3.050.000,00	1.525.000,00	-66.071.300,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B																		
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.				10 Orang	7 Orang	66.979.000,00	3.050.000,00	1.525.000,00	-65.454.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	1 Unit	33.072.060,00	19.820.000,00	9.910.000,00	-23.162.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK								41.862.084.000,00	31.560.975.587,00	30.612.119.337,50	-11.249.964.662,50						43.381.148.600,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.862.084.000,00	31.560.975.587,00	30.612.119.337,50	-11.249.964.662,50							43.381.148.600,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							40.204.084.000,00	31.256.091.587,00	30.452.150.337,50	-9.751.933.662,50							41.428.648.600,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD				88 100 BB persen persen indeks	100 88 BB persen persen indeks	19.531.838.079,00	16.874.621.628,00	15.795.005.613,50	-639.289.479,00							18.892.548.600,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	464.579.200,00	125.100.000,00	129.750.000,00	-334.829.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		469.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	301.251.200,00	125.100.000,00	129.750.000,00	-171.501.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	30.444.000,00	0,00	0,00	-30.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	107.884.000,00	0,00	0,00	-107.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	4 Data	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			99.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu																			
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				0 Substansi	0 Substansi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	10.974.933.100,00	9.628.030.952,00	9.896.667.099,00	-1.078.266.001,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.055.298.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	10.447.584.000,00	9.361.295.952,00	9.623.103.099,00	-824.480.901,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.525.298.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	467.349.100,00	266.735.000,00	273.564.000,00	-193.785.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 persen	100 persen	197.630.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	-94.030.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	167.630.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	-64.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	431.000.000,00	36.525.000,00	36.525.000,00	-394.475.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		506.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	112.500.000,00	0,00	0,00	-112.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			112.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	295.000.000,00	36.525.000,00	36.525.000,00	-258.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	3.772.593.949,00	3.749.105.182,00	2.828.267.485,50	-944.326.463,50			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.253.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	178.760.680,00	0,00	0,00	-178.760.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	178.565.700,00	100.332.700,00	55.332.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			49.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.860.000,00	14.520.000,00	10.890.000,00	-11.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.051.723.269,00	1.851.809.482,00	1.012.834.785,50	-1.038.888.483,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.925.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.419.250.000,00	1.679.210.000,00	1.679.210.000,00	259.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 persen	100 persen	1.095.507.700,00	627.134.890,00	589.167.560,00	-506.340.140,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	642.704.400,00	595.000.000,00	0,00	-642.704.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	253.803.300,00	0,00	55.500.000,00	-198.303.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	6 Unit	16.000.000,00	32.134.890,00	533.667.560,00	517.667.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	183.000.000,00	0,00	0,00	-183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	2.084.604.130,00	2.169.954.704,00	1.905.258.169,00	-179.345.961,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.428.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	993.000.000,00	981.150.000,00	719.853.465,00	-273.146.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.086.604.130,00	1.188.804.704,00	1.185.404.704,00	98.800.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 persen	100 persen	510.990.000,00	435.170.900,00	305.770.300,00	-205.219.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	205.240.000,00	205.240.000,00	112.930.000,00	-92.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	105.750.000,00	120.730.900,00	74.540.300,00	-31.209.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	109.200.000,00	118.300.000,00	-81.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0.7 Ha	0.7 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi				40 persen	40 6,1 persen indeks	9.377.118.000,00	5.662.353.000,00	5.964.625.463,00	-577.118.000,00							8.800.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan program strategis pemerintah				40 persen	40 persen	9.377.118.000,00	5.662.353.000,00	5.964.625.463,00	-3.412.492.537,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	115.930.000,00	73.976.000,00	-176.024.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Konten Informasi Publik				750 Konten	750 Konten	490.500.000,00	109.500.000,00	45.000.000,00	-445.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			990.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				10 Persentase	10 Persentase	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				40 Persentase	40 Persentase	450.000.000,00	750.000.000,00	821.247.750,00	371.247.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			137.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	1.636.618.000,00	1.199.092.000,00	1.132.909.000,00	-503.709.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.035.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				50 Komunitas	50 Komunitas	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			137.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				50 Permohonan	50 Permohonan	300.000.000,00	57.331.000,00	25.565.500,00	-274.434.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000,00	0,00	155.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis				66 Media	66 Media	5.300.000.000,00	3.430.500.000,00	3.710.927.213,00	-1.589.072.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (skala 1-5)				3,5 indeks	3,5 indeks	11.295.127.921,00	8.719.116.959,00	8.692.519.261,00	2.440.972.079,00							13.736.100.000,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo				47 OPD	47 OPD	81.181.000,00	66.959.459,00	66.959.459,00	-14.221.541,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	81.181.000,00	66.959.459,00	66.959.459,00	-14.221.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			129.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (Skala 1-5)				3,5 indeks	3,5 indeks	11.213.946.921,00	8.652.157.500,00	8.625.559.802,00	-2.588.387.119,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.606.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang ditetapkan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				10 Aplikasi	10 Aplikasi	29.005.100,00	0,00	0,00	-29.005.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			154.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	42.332.000,00	18.691.000,00	4.291.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	37.536.000,00	13.348.000,00	-86.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				8 Aplikasi	8 Aplikasi	173.893.800,00	42.302.000,00	20.290.302,00	-153.603.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																		
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				19 unit	19 unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				19 kabupat en/kota	19 kabupat en/kota	295.078.752,00	0,00	0,00	-295.078.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				0 Aplikasi	0 Aplikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	9.600.000,00	5.520.000,00	-69.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.083.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	8.236.940.000,00	8.213.062.500,00	8.213.062.500,00	-23.877.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	4 Aplikasi	45.350.000,00	0,00	0,00	-45.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			38.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	804.279.269,00	245.500.000,00	245.500.000,00	-558.779.269,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			425.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	1.250.000.000,00	61.825.000,00	109.148.000,00	-1.140.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.375.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							875.000.000,00	212.484.000,00	111.629.000,00	-763.371.000,00							962.500.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				90 persen	90 persen	875.000.000,00	212.484.000,00	111.629.000,00	87.500.000,00							962.500.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				90 persen	90 persen	875.000.000,00	212.484.000,00	111.629.000,00	-763.371.000,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		962.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				150 Orang	150 Orang	325.000.000,00	45.200.000,00	34.400.000,00	-290.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			357.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00	21.484.000,00	21.484.000,00	-178.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				90 Persentase	90 Persentase	100.000.000,00	13.445.000,00	13.445.000,00	-86.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	16.980.000,00	13.320.000,00	-86.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				47 Dokumen	47 Dokumen	150.000.000,00	115.375.000,00	28.980.000,00	-121.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							783.000.000,00	92.400.000,00	48.340.000,00	-734.660.000,00							990.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah				55 persen	55 persen	783.000.000,00	92.400.000,00	48.340.000,00	207.000.000,00							990.000.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah				55 persen	55 persen	683.000.000,00	78.000.000,00	41.140.000,00	-641.860.000,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00	-92.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	-142.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	3 Laporan	183.000.000,00	26.000.000,00	14.800.000,00	-168.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	250.000.000,00	22.400.000,00	11.540.000,00	-238.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				47 OPD	47 OPD	100.000.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	-92.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100.000.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	-92.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00					45.226.706.446,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00							45.226.706.446,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00							45.226.706.446,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	22.308.694.049,00	15.526.652.720,00	14.818.282.953,00	-5.385.013.839,00							16.923.680.210,00		
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	261.972.700,00	58.835.000,00	12.970.000,00	-249.002.700,00			-	-	-		288.169.970,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	114.522.600,00	15.015.000,00	7.300.000,00	-107.222.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.974.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	79.166.400,00	36.260.000,00	1.890.000,00	-77.276.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.083.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen Laporan	4 dokumen Laporan	68.283.700,00	7.560.000,00	3.780.000,00	-64.503.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.112.070,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	15.750.165.419,00	8.308.085.696,00	8.580.521.705,00	-7.169.643.714,00			-	-	-		9.625.181.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	15.409.891.719,00	8.027.159.696,00	8.304.098.705,00	-7.105.793.014,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.250.880.890,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	6 Dokumen	318.427.600,00	280.926.000,00	276.423.000,00	-42.004.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.270.360,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	21.846.100,00	0,00	0,00	-21.846.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.030.710,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	49.415.100,00	39.100.000,00	42.430.000,00	-6.985.100,00			-	-	-		54.010.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				16 Dokumen	9 Dokumen	39.100.000,00	39.100.000,00	42.430.000,00	3.330.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.010.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.315.100,00	0,00	0,00	-5.315.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	317.060.000,00	7.280.000,00	2.500.000,00	-314.560.000,00			-	-	-		296.791.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				60 Paket	60 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.025.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				93 Orang	1 Orang	227.060.000,00	7.280.000,00	2.500.000,00	-224.560.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			249.766.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	1.354.679.355,00	2.330.507.285,00	2.351.441.532,00	996.762.177,00			-	-	-		1.465.278.358,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				31 Paket	37 Paket	62.358.200,00	50.570.800,00	12.791.200,00	-49.567.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.594.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	2 Paket	89.828.400,00	532.341.536,00	0,00	-89.828.400,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.811.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	10 Paket	353.446.400,00	25.296.300,00	11.882.000,00	-341.564.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			388.791.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	57 Paket	211.658.600,00	285.927.790,00	159.344.400,00	-52.314.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			232.824.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	20.400.100,00	57.315.000,00	40.549.500,00	20.149.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.440.110,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	3 Dokumen	5.880.000,00	4.440.000,00	0,00	-5.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.468.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	100 Laporan	530.716.355,00	1.374.615.859,00	2.126.874.432,00	1.596.158.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			558.919.058,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>				100 %	100 %	1.397.233.400,00	533.273.200,00	316.250.000,00	-1.080.983.400,00			-	-	-		1.698.264.040,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	335.431.000,00	0,00	0,00	-335.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			530.281.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				-	25 Unit	0,00	0,00	316.250.000,00	316.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	515.675.200,00	418.460.000,00	0,00	-515.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			567.242.720,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	5 Unit	546.127.200,00	114.813.200,00	0,00	-546.127.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.739.920,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.205.445.075,00	3.582.405.539,00	2.772.829.716,00	567.384.641,00			-	-	-		2.425.989.582,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	2.332.383,00	2.332.383,00	1.166.192,00	-1.166.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.565.621,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	452.681.600,00	601.997.600,00	446.984.825,00	-5.696.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			497.949.760,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1.750.431.092,00	2.978.075.556,00	2.324.678.699,00	574.247.607,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.925.474.201,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	972.723.000,00	667.166.000,00	739.340.000,00	-233.383.000,00			-	-	-		1.069.995.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	130.890.000,00	101.020.000,00	57.210.000,00	-73.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			143.979.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108 Unit	46 Unit	98.350.000,00	30.260.000,00	15.130.000,00	-83.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			108.185.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	662.303.000,00	465.886.000,00	647.000.000,00	-15.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			728.533.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	21.400.000,00	30.000.000,00	0,00	-21.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.540.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	7.190.000,00	0,00	0,00	-7.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.909.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi				3,95 %	3,95 %	70.469.000,00	19.430.900,00	0,00	7.046.900,00							77.515.900,00		
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan				6 koperasi	6 koperasi	70.469.000,00	19.430.900,00	0,00	-70.469.000,00			-	-	-		77.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	70.469.000,00	19.430.900,00	0,00	-70.469.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan				67 %	67 %	351.147.000,00	0,00	0,00	35.114.700,00							386.261.700,00		
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-						251.147.000,00	0,00	0,00	-251.147.000,00			-	-	-		276.261.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				14 Unit Usaha	0 Unit Usaha	251.147.000,00	0,00	0,00	-251.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			276.261.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat				45 koperasi	45 koperasi	331.905.000,00	0,00	0,00	33.190.500,00							365.095.500,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				45 unit usaha	45 unit usaha	331.905.000,00	0,00	0,00	-331.905.000,00			-	-	-		365.095.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				45 Unit Usaha	0 Unit Usaha	331.905.000,00	0,00	0,00	-331.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			365.095.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern				80 koperasi	80 koperasi	1.778.695.000,00	1.901.613.900,00	1.598.911.000,00	177.869.500,00							1.956.564.500,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan				150 koperasi	150 koperasi	1.778.695.000,00	1.901.613.900,00	1.598.911.000,00	-179.784.000,00			-	-	-		1.956.564.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				25 Unit Usaha	40 Unit Usaha	909.452.000,00	1.295.569.100,00	1.157.586.000,00	248.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.397.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				300 Unit Usaha	60 Unit Usaha	869.243.000,00	606.044.800,00	441.325.000,00	-427.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			956.167.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi				130 buah	130 buah	12.535.358.051,00	10.795.826.000,00	6.184.762.000,00	744.663.595,00							13.280.021.646,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-						12.535.358.051,00	10.795.826.000,00	6.184.762.000,00	-6.350.596.051,00			-	-	-		13.280.021.646,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				3150 Unit Usaha	50 Unit Usaha	6.230.344.200,00	3.946.001.000,00	2.044.767.500,00	-4.185.576.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.619.506.410,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	650.000.000,00	6.527.570.000,00	2.937.679.000,00	2.287.679.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata				1000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	696.143.800,00	36.700.000,00	819.194.000,00	123.050.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			765.758.180,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha																		
			Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi				1330 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1.150.000.000,00	85.555.000,00	43.800.000,00	-1.106.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.265.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha				4,2 %	4,2 %	7.874.591.900,00	4.788.276.000,00	3.111.460.000,00	787.459.190,00							8.662.051.090,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-				-	-	7.874.591.900,00	4.788.276.000,00	3.111.460.000,00	-4.763.131.900,00			-	-	-		8.662.051.090,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				290 Unit Usaha	290 Unit Usaha	2.700.000.000,00	1.708.478.500,00	1.052.670.000,00	-1.647.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.970.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang																		
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				650 Lembaga	0 Lembaga	1.829.533.800,00	0,00	0,00	-1.829.533.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.012.487.180,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Wirausaha yang Difasilitasi				1450 Orang	1450 Orang	2.879.699.500,00	3.079.797.500,00	2.058.790.000,00	-820.909.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.167.669.450,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI							48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00							45.226.706.446,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00							45.226.706.446,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							48.501.329.000,00	34.251.799.520,00	26.004.321.953,00	-22.497.007.047,00							45.226.706.446,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	22.308.694.049,00	15.526.652.720,00	14.818.282.953,00	-5.385.013.839,00							16.923.680.210,00	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.354.679.355,00	2.330.507.285,00	2.351.441.532,00	996.762.177,00			-	-	-		1.465.278.358,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.640.200,00	0,00	0,00	-18.640.200,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.504.220,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	56.751.100,00	0,00	0,00	-56.751.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.426.210,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	972.723.000,00	667.166.000,00	739.340.000,00	-233.383.000,00			-	-	-		1.069.995.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				69 Unit	69 Unit	52.590.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-32.590.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.849.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUKM yang dilatih				1.650 orang	1.650 orang	3.250.469.000,00	1.220.000.000,00	290.906.000,00	325.046.900,00							3.575.515.900,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-						3.250.469.000,00	1.220.000.000,00	290.906.000,00	-2.959.563.000,00			-	-	-		3.575.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				1382 Orang	0 Orang	3.250.469.000,00	1.220.000.000,00	290.906.000,00	-2.959.563.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.575.515.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi				130 buah	130 buah	12.535.358.051,00	10.795.826.000,00	6.184.762.000,00	744.663.595,00							13.280.021.646,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	12.535.358.051,00	10.795.826.000,00	6.184.762.000,00	-6.350.596.051,00			-	-	-		13.280.021.646,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				1428 Orang	0 Orang	3.808.870.051,00	200.000.000,00	339.321.500,00	-3.469.548.551,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.189.757.056,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha				4,2 %	4,2 %	7.874.591.900,00	4.788.276.000,00	3.111.460.000,00	787.459.190,00							8.662.051.090,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-				-	-	7.874.591.900,00	4.788.276.000,00	3.111.460.000,00	-4.763.131.900,00			-	-	-		8.662.051.090,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				400 Orang	0 Orang	465.358.600,00	0,00	0,00	-465.358.600,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			511.894.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
									15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	10.786.632.635,00	12.610.430.791,00	11.312.927.525,50	1.617.149.894,00							12.403.782.529,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah				85 %	85 %	159.470.062,00	94.726.000,00	16.715.000,00	-142.755.062,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	41.255.000,00	9.150.000,00	1.525.000,00	-39.730.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	44.208.912,00	16.262.000,00	3.660.000,00	-40.548.912,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meringkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	74.006.150,00	69.314.000,00	11.530.000,00	-62.476.150,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	8.298.708.593,00	7.843.523.786,00	8.135.684.263,00	-163.024.330,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.022.299.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	0,00	7.632.021.786,00	7.929.464.263,00	7.929.464.263,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.792.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							15.211.505.635,00	14.349.738.791,00	11.928.198.081,50	-3.283.307.553,50							17.503.782.529,00	
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	203.017.500,00	202.560.000,00	202.560.000,00	-457.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.830.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	33.557.445,00	8.942.000,00	3.660.000,00	-29.897.445,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			54.469.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		14.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	130.750.000,00	118.098.000,00	8.446.000,00	-122.304.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		152.987.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	0 Paket	60.750.000,00	0,00	0,00	-60.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			67.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	3 Orang	70.000.000,00	118.098.000,00	8.446.000,00	-61.554.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.487.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	827.168.080,00	2.756.204.929,00	1.485.403.647,50	658.235.567,50			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.634.170.029,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	6 Paket	18.000.000,00	18.002.400,00	18.002.400,00	2.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.981.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	9 Paket	37.190.000,00	37.190.000,00	18.730.000,00	-18.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.981.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	23 Paket	73.500.000,00	187.129.800,00	71.743.800,00	-1.756.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			73.678.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	19.500.000,00	182.816.000,00	64.224.000,00	44.724.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.495.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	4 Dokumen	18.120.000,00	18.120.000,00	13.590.000,00	-4.530.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	489.850.112,00	2.312.946.729,00	1.299.113.447,50	809.263.335,50	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.312.946.729,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	171.007.968,00	0,00	0,00	-171.007.968,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			171.007.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan				100 %	100 %	92.425.900,00	91.925.900,00	14.030.000,00	-78.395.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah		59.282.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	14.030.000,00	14.030.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	91.925.900,00	91.925.900,00	0,00	-91.925.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			59.282.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	892.520.000,00	1.317.042.176,00	1.302.868.115,00	410.348.115,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		911.539.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	167.520.000,00	167.520.000,00	167.520.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			170.370.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1 Laporan	725.000.000,00	1.149.522.176,00	1.135.348.115,00	410.348.115,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			741.168.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	376.390.000,00	379.710.000,00	340.580.500,00	-35.809.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		344.104.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	184.260.000,00	184.260.000,00	184.260.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			209.434.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	7 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	3.125.000,00	-9.375.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	38 Unit	49.130.000,00	52.450.000,00	27.055.000,00	-22.075.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	130.500.000,00	130.500.000,00	126.140.500,00	-4.359.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			93.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal				100 %	100 %	1.079.762.000,00	371.965.000,00	92.549.500,00	120.238.000,00							1.200.000.000,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	28.612.500,00	15.231.250,00	-34.768.750,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	28.612.500,00	15.231.250,00	-34.768.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				2 dokumen	2 dokumen	1.029.762.000,00	343.352.500,00	77.318.250,00	-952.443.750,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		1.130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	83.000.000,00	42.369.300,00	23.485.650,00	-59.514.350,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				19 Daerah	19 Daerah	197.823.502,00	38.502.002,00	18.751.001,00	-179.072.501,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	5 Dokumen	305.845.598,00	65.201.198,00	35.081.599,00	-270.763.999,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	0 Dokumen	443.092.900,00	197.280.000,00	0,00	-443.092.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat				5 Dokumen	5 Dokumen	852.444.000,00	218.524.900,00	89.679.450,00	97.556.000,00							950.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat				5 Dokumen	5 Dokumen	852.444.000,00	218.524.900,00	89.679.450,00	-762.764.550,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	594.954.000,00	186.744.600,00	74.179.300,00	-520.774.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	257.490.000,00	31.780.300,00	15.500.150,00	-241.989.850,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu				87,27 83,05 / 3,45 % Nilai/Rasio	83,05 / 3,45 87,27 Nilai/Rasio %	1.586.358.000,00	843.563.600,00	279.784.356,00	288.642.000,00							1.875.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,05 / 3,45 nilai / asio	83,05 / 3,45 nilai / asio	1.586.358.000,00	843.563.600,00	279.784.356,00	-1.306.573.644,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		1.875.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				15 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	136.827.112,00	32.398.412,00	16.619.206,00	-120.207.906,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	1.107.058.488,00	768.298.888,00	241.732.000,00	-865.326.488,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.245.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				20 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	342.472.400,00	42.866.300,00	21.433.150,00	-321.039.250,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				6,7 Trilyun Rupiah	17,4 Trilyun Rupiah	832.431.000,00	286.105.500,00	143.682.750,00	167.569.000,00							1.000.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)				6,7 Trilyun Rupiah	17,4 Trilyun Rupiah	832.431.000,00	286.105.500,00	143.682.750,00	-688.748.250,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan usaha	50 Kegiatan usaha	235.360.000,00	48.558.100,00	20.279.050,00	-215.080.950,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	258.283.000,00	93.242.900,00	46.571.450,00	-211.711.550,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	338.788.000,00	144.304.500,00	76.832.250,00	-261.955.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi				80 %	80 %	73.878.000,00	19.149.000,00	9.574.500,00	1.122.000,00							75.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data Penanaman Modal yang berbasis teknologi				1 Dokumen	1 Dokumen	73.878.000,00	19.149.000,00	9.574.500,00	-64.303.500,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.878.000,00	19.149.000,00	9.574.500,00	-64.303.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90							37.822.548.608,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90							37.822.548.608,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90							37.822.548.608,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	18.342.309.403,00	15.446.195.484,00	14.046.076.055,00	165.177.597,00							18.507.487.000,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	1.163.268.981,00	472.827.185,00	221.307.568,00	-941.961.413,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.775.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	139.248.300,00	132.466.000,00	60.153.750,00	-79.094.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	162.581.381,00	32.206.300,00	14.843.075,00	-147.738.306,00	Kota Padang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			295.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	253.452.500,00	153.446.085,00	76.088.043,00	-177.364.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			380.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				19 Data	19 Data	144.974.100,00	49.490.000,00	21.883.750,00	-123.090.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	212.852.200,00	105.218.800,00	48.338.950,00	-164.513.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	107.393.500,00	0,00	0,00	-107.393.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	1 Berita Acara	142.767.000,00	0,00	0,00	-142.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	11.017.047.322,00	10.088.192.304,00	10.287.565.189,00	-729.482.133,00		-		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.230.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	10.442.047.322,00	9.534.992.304,00	9.837.026.564,00	-605.020.758,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			9.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	361.200.000,00	357.637.500,00	-42.362.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00	192.000.000,00	92.901.125,00	-27.098.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	230.000.000,00	119.124.600,00	70.875.900,00	-159.124.100,00		-		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		195.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	47.330.200,00	37.791.300,00	-52.208.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	18.541.000,00	8.177.750,00	-31.822.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	53.253.400,00	24.906.850,00	-75.093.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			45.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				100	100	20.010.000,00	67.397.200,00	36.696.950,00	16.686.950,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000,00	9.901.300,00	3.619.075,00	3.609.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	44.975.200,00	28.285.200,00	18.285.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	12.520.700,00	4.792.675,00	-5.207.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	180.000.000,00	165.877.000,00	46.026.000,00	-133.974.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Stel Paket	100 Stel Paket	75.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	105.000.000,00	105.877.000,00	46.026.000,00	-58.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.330.667.922,00	972.323.368,00	382.280.900,00	-948.387.022,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.457.487.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	62.236.750,00	19.059.188,00	-30.940.812,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	100.173.700,00	36.048.600,00	0,00	-100.173.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	108.700.000,00	76.403.000,00	50.000.000,00	-58.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	83.249.575,00	28.148.644,00	-71.851.356,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	39.975.000,00	34.435.000,00	8.608.750,00	-31.366.250,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.350.000,00	7.150.000,00	5.362.500,00	-16.987.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Orang Laporan	10 Orang Laporan	4.870.000,00	11.020.000,00	4.705.000,00	-165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	517.487.000,00	512.860.228,00	255.942.614,00	-261.544.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			517.487.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Arsip Dokumen	1 Arsip Dokumen	7.355.800,00	7.562.300,00	1.890.575,00	-5.465.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	373.583.920,00	202.502.720,00	75.000.000,00	-298.583.920,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				124 Paket	124 Paket	80.005.000,00	10.000,00	0,00	-80.005.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	198.271.920,00	132.952.720,00	75.000.000,00	-123.271.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.156.808.578,00	2.774.036.989,00	2.619.278.989,00	462.470.411,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.305.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1800 Laporan	1800 Laporan	20.000.000,00	19.300.000,00	7.475.000,00	-12.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	300.882.000,00	203.832.000,00	156.807.000,00	-144.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.890.072.484,00	1.845.972.484,00	845.972.484,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	1.870.922.680,00	583.914.118,00	307.044.559,00	-1.563.878.121,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.885.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52.000.000,00	53.690.000,00	28.095.000,00	-23.905.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	142.444.118,00	73.884.559,00	-126.115.441,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	17.500.000,00	4.375.000,00	-20.625.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	90.270.000,00	100.180.000,00	50.090.000,00	-40.180.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	200.146.580,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-72.746.580,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan Jumlah wirausaha muda baru				18 348 % orang	18 348 % orang	3.605.338.000,00	4.814.010.548,00	3.107.121.750,00	529.792.000,00							4.135.130.000,00		
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				100 %	100 %	2.605.338.000,00	4.014.010.548,00	2.504.546.000,00	-100.792.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.135.130.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																			
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				298 Orang	298 Orang	678.569.000,00	2.050.000.000,00	1.424.028.650,00	745.459.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																			
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				5 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																			
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	91.639.000,00	414.010.548,00	18.745.000,00	-72.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																			
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				0 Persentase	100 Persentase	335.130.000,00	150.000.000,00	122.775.000,00	-212.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			335.130.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	168.307.000,00	-31.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				348 Orang	348 Orang	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	770.690.350,00	-429.309.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	1.000.000.000,00	800.000.000,00	602.575.750,00	-397.424.250,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				2 Organisasi	2 Organisasi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	602.575.750,00	-397.424.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional				1 29 % medali	1 29 % medali	28.833.343.597,00	27.672.584.959,00	31.097.233.474,10	-14.380.466.989,00							14.452.876.608,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				100 %	100 %	2.779.639.120,00	1.126.931.050,00	133.211.500,00	-2.646.427.620,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				7 Dokumen	7 Dokumen	650.002.500,00	300.000.000,00	133.211.500,00	-516.791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				100 %	100 %	3.826.394.710,00	4.635.703.331,00	1.908.306.125,00	-1.918.088.585,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.983.633.121,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				140 Orang	122 Orang	1.342.761.589,00	1.105.752.000,00	284.072.500,00	-1.058.689.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	218.456.875,00	-81.543.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				19 Kegiatan	19 Kegiatan	683.633.121,00	1.950.000.000,00	1.405.776.750,00	722.143.629,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			683.633.121,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				100 %	100 %	6.628.387.767,00	3.415.217.478,00	3.725.299.474,10	-2.903.088.292,90			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.889.821.487,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	200 Orang	137.709.000,00	100.000.000,00	577.211.824,10	439.502.824,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	30 Orang	198.505.697,00	0,00	0,00	-198.505.697,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			398.505.697,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				7 Pelatda	7 Pelatda	450.000.000,00	300.000.000,00	260.150.000,00	-189.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	13.923.400,00	-36.076.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																			
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				20 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				100 %	100 %	15.598.922.000,00	18.494.733.100,00	25.330.416.375,00	9.731.494.375,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		729.422.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				4 Dokumen	4 Dokumen	3.568.922.000,00	4.494.733.100,00	4.330.416.375,00	761.494.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			669.422.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																			
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	12.030.000.000,00	14.000.000.000,00	21.000.000.000,00	8.970.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan				5,44 %	5,44 %	3.182.055.000,00	2.100.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.455.000.000,00							727.055.000,00		
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				100 %	100 %	3.182.055.000,00	2.100.000.000,00	3.000.000.000,00	-182.055.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		727.055.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																			
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			245.257.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi																			
			Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	414.874.000,00	100.000.000,00	0,00	-414.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi																			
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				200 Orang	200 Orang	767.181.000,00	0,00	0,00	-767.181.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			81.798.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		UPTD KBOR							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90						37.822.548.608,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90							37.822.548.608,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							53.963.046.000,00	50.032.790.991,00	51.250.431.279,10	-2.712.614.720,90							37.822.548.608,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	18.342.309.403,00	15.446.195.484,00	14.046.076.055,00	165.177.597,00							18.507.487.000,00		
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.330.667.922,00	972.323.368,00	382.280.900,00	-948.387.022,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.457.487.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	70.000.000,00	16.614.515,00	4.153.629,00	-65.846.371,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	200.000.000,00	93.920.400,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	59.756.422,00	14.938.000,00	0,00	-59.756.422,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	10.005.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	5.880.000,00	4.410.000,00	-20.590.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	373.583.920,00	202.502.720,00	75.000.000,00	-298.583.920,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	50.307.000,00	24.540.000,00	0,00	-50.307.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.156.808.578,00	2.774.036.989,00	2.619.278.989,00	462.470.411,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.305.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	175.000.000,00	126.252.000,00	81.144.000,00	-93.856.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			175.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	645.926.578,00	526.580.505,00	525.380.505,00	-120.546.073,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	1.870.922.680,00	583.914.118,00	307.044.559,00	-1.563.878.121,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.885.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	43.200.000,00	23.200.000,00	-76.800.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	499.610.100,00	0,00	0,00	-499.610.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	499.896.000,00	99.500.000,00	0,00	-499.896.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan Jumlah medali emas dalam event nasional				1 29 % medali	1 29 % medali	28.833.343.597,00	27.672.584.959,00	31.097.233.474,10	-14.380.466.989,00							14.452.876.608,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				100 %	100 %	2.779.639.120,00	1.126.931.050,00	133.211.500,00	-2.646.427.620,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.850.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																			
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				15 Unit	15 Unit	2.129.636.620,00	826.931.050,00	0,00	-2.129.636.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				100 %	100 %	3.826.394.710,00	4.635.703.331,00	1.908.306.125,00	-1.918.088.585,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.983.633.121,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																			
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				50 Orang	50 Orang	1.500.000.000,00	1.279.951.331,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				100 %	100 %	6.628.387.767,00	3.415.217.478,00	3.725.299.474,10	-2.903.088.292,90			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.889.821.487,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																			
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				70 Orang	70 Orang	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			950.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																			
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				119 Orang	119 Orang	4.792.173.070,00	2.965.217.478,00	2.874.014.250,00	-1.918.158.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.791.315.790,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS KEBUDAYAAN							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00								39.847.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	8.998.828.620,00	17.037.322.695,00	15.722.277.343,00	7.628.671.380,00							16.627.500.000,00		
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	219.999.700,00	56.317.925,00	56.317.925,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		154.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	219.999.700,00	56.317.925,00	56.317.925,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	2.733.036.000,00	9.519.089.824,00	9.805.243.197,00	7.072.207.197,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		9.832.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	2.431.036.000,00	9.184.169.824,00	9.470.333.197,00	7.039.297.197,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			9.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	265.000.000,00	334.920.000,00	334.910.000,00	69.910.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			291.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstrasi Barang Milik Daerah				-	100 %	200.000.000,00	154.800.000,00	86.800.000,00	-113.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	154.800.000,00	86.800.000,00	-113.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.279.711.720,00	2.292.262.313,00	1.438.822.309,00	159.110.589,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.463.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	65.000.000,00	35.000.000,00	22.050.500,00	-42.949.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			71.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	140.000.000,00	212.821.135,00	137.078.295,00	-2.921.705,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			154.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	246.235.407,00	247.167.800,00	207.167.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			44.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000,00	4.548.000,00	3.411.000,00	-24.589.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			30.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	800.000.000,00	1.793.657.771,00	1.029.114.714,00	229.114.714,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			880.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				-	100 %	550.000.000,00	1.398.113.500,00	1.186.351.554,00	636.351.554,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		605.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	150.000.000,00	125.820.700,00	107.121.800,00	-42.878.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	10 Unit	350.000.000,00	72.292.800,00	533.162.700,00	183.162.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			385.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	546.067.054,00	546.067.054,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.235.920.900,00	2.965.002.856,00	2.795.927.856,00	-439.993.044,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		3.530.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	35.000.000,00	23.500.000,00	19.275.000,00	-15.725.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			38.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	550.000.000,00	385.150.000,00	-114.850.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.600.000.000,00	2.391.502.856,00	2.391.502.856,00	-208.497.144,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			2.860.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.000.160.000,00	488.054.502,00	352.814.502,00	-647.345.498,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		822.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	105.250.000,00	-44.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	300.000.000,00	170.000.000,00	79.510.000,00	-220.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	300.000.000,00	168.054.502,00	168.054.502,00	-131.945.498,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			27.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan				-	8 Karya Budaya	4.680.034.898,00	5.929.732.000,00	5.908.807.500,00	4.469.965.102,00							9.150.000.000,00		
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik				-	8 karya	330.107.500,00	960.452.000,00	905.140.000,00	575.032.500,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		5.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				10 Objek	10 Objek	75.000.000,00	960.452.000,00	905.140.000,00	830.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			4.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				100 Orang	100 Orang	255.107.500,00	0,00	0,00	-255.107.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang dilestarikan Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina</i>				-	141 lembaga 175 orang	900.000.000,00	1.867.450.000,00	1.955.200.000,00	1.055.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				30 Objek	30 Objek	300.000.000,00	719.260.000,00	719.260.000,00	419.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>				1000 Orang	1000 Orang	600.000.000,00	1.148.190.000,00	1.235.940.000,00	635.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan				-	23 kesenian tradisional	1.650.000.000,00	1.812.226.000,00	1.812.226.000,00	1.750.000.000,00							3.400.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan</i>				-	23 kesenian	1.650.000.000,00	1.812.226.000,00	1.812.226.000,00	162.226.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		3.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				240 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	1.812.226.000,00	1.812.226.000,00	1.612.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>				5 Sertifikat	50 Sertifikat	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>				-	50 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				25 Lembaga	11 Lembaga	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				-	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan				-	2 dokumen	700.000.000,00	113.330.000,00	109.570.000,00	1.900.000.000,00							2.600.000.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	<i>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan</i>				-	2 dokumen	700.000.000,00	113.330.000,00	109.570.000,00	-590.430.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				38 Orang	38 Orang	200.000.000,00	113.330.000,00	109.570.000,00	-90.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				8 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya				-	100 %	339.820.000,00	174.550.000,00	110.575.000,00	3.310.180.000,00							3.650.000.000,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan				-	8 Cagar Budaya	163.000.000,00	78.250.000,00	70.625.000,00	-92.375.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	12 Objek	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	63.000.000,00	78.250.000,00	70.625.000,00	7.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah juru pelihara CB yang ditingkatkan SDMnya				-	26 orang	176.820.000,00	96.300.000,00	39.950.000,00	-136.870.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		3.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				10 Objek	6 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	1 Objek	0,00	96.300.000,00	39.950.000,00	39.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	5 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																		
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	100 Orang	176.820.000,00	0,00	0,00	-176.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN								20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00						39.847.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	8.998.828.620,00	17.037.322.695,00	15.722.277.343,00	7.628.671.380,00							16.627.500.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.279.711.720,00	2.292.262.313,00	1.438.822.309,00	159.110.589,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		1.463.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.235.920.900,00	2.965.002.856,00	2.795.927.856,00	-439.993.044,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		3.530.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.000.160.000,00	488.054.502,00	352.814.502,00	-647.345.498,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		822.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				-	-	3.801.704.400,00	2.842.634.927,00	2.768.403.619,00	618.295.600,00							4.420.000.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	-				-	-	3.801.704.400,00	2.842.634.927,00	2.768.403.619,00	-1.033.300.781,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		4.420.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				700 Unit	700 Unit	1.200.000.000,00	592.649.500,00	592.649.500,00	-607.350.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				5 Orang	4 Orang	260.000.000,00	9.414.000,00	0,00	-260.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				22 Unit	25 Unit	1.468.000.000,00	1.828.817.527,00	1.781.407.619,00	313.407.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				6 Unit	11 Unit	673.704.400,00	389.568.000,00	389.568.000,00	-284.136.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Koto Tinggi Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	22.185.900,00	4.778.500,00	-195.221.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							20.170.387.918,00	27.909.795.622,00	26.431.859.462,00	6.261.471.544,00							39.847.500.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	8.998.828.620,00	17.037.322.695,00	15.722.277.343,00	7.628.671.380,00							16.627.500.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.279.711.720,00	2.292.262.313,00	1.438.822.309,00	159.110.589,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.463.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.031.330,00	0,00	0,00	-10.031.330,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.067.390,00	0,00	0,00	-15.067.390,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.613.000,00	0,00	0,00	-15.613.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.235.920.900,00	2.965.002.856,00	2.795.927.856,00	-439.993.044,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.530.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.920.900,00	0,00	0,00	-4.920.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.000.160.000,00	488.054.502,00	352.814.502,00	-647.345.498,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		822.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.160.000,00	0,00	0,00	-25.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	4.680.034.898,00	5.929.732.000,00	5.908.807.500,00	4.469.965.102,00							9.150.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	330.107.500,00	960.452.000,00	905.140.000,00	575.032.500,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		5.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				-	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-				-	-	3.449.927.398,00	3.101.830.000,00	3.048.467.500,00	-401.459.898,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	1.999.927.398,00	0,00	0,00	-1.999.927.398,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				18 Laporan	18 Laporan	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				-	13 Laporan	0,00	1.861.830.000,00	1.861.830.000,00	1.861.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				7 Sertifikat	5 Sertifikat	0,00	1.240.000.000,00	1.186.637.500,00	1.186.637.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								16.905.655.000,00	16.082.708.825,00	15.613.413.731,00	-1.292.241.269,00					16.178.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.905.655.000,00	16.082.708.825,00	15.613.413.731,00	-1.292.241.269,00							16.178.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.712.626.000,00	1.624.217.000,00	1.494.457.900,00	-218.168.100,00							944.500.000,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP				1,72 %	1,72 %	1.210.470.000,00	1.511.810.500,00	1.391.219.900,00	-500.970.000,00							709.500.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP				8 Perpusta kaan	8 Perpusta kaan	1.033.470.000,00	940.118.580,00	891.553.580,00	-141.916.420,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		555.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpusta kaan	1 Perpusta kaan	200.000.000,00	49.956.000,00	49.956.000,00	-150.044.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																		
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				250 Eksemplar	150 Eksemplar	59.484.000,00	354.648.580,00	353.720.580,00	294.236.580,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpust akan	15 Perpust akan	45.000.000,00	64.768.000,00	43.150.000,00	-1.850.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				70 Orang	200 Orang	40.000.000,00	15.011.000,00	11.940.000,00	-28.060.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	0 Layanan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			42.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				600 Eksemplar	2615 Eksemplar	210.200.000,00	356.929.000,00	352.456.000,00	142.256.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																			
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			32.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi																			
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				66,30 Nilai	0 Nilai	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi																			
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				16 Indeks	0 Indeks	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi																			
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				10 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	188.786.000,00	41.980.000,00	41.285.000,00	-147.501.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																			
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	56.826.000,00	39.046.000,00	4.046.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi																			
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				15 Perpustakaan	0 Perpustakaan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			48.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan				26530 Orang	26530 Orang	177.000.000,00	571.691.920,00	499.666.320,00	322.666.320,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				18 Lokus	14 Lokus	85.200.000,00	175.960.000,00	115.409.400,00	30.209.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-	1 Perpustakaan	0,00	22.499.880,00	22.499.880,00	22.499.880,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				10 Orang	12 Orang	26.800.000,00	307.499.540,00	307.499.540,00	280.699.540,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			27.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	35.000.000,00	31.392.500,00	25.092.500,00	-9.907.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			37.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	34.340.000,00	29.165.000,00	-835.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno				223 jumlah	223 jumlah	502.156.000,00	112.406.500,00	103.238.000,00	-267.156.000,00							235.000.000,00		
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan				2 KCKR	2 KCKR	124.900.000,00	18.994.000,00	18.994.000,00	-105.906.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																			
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				350 Eksemplar	500 Eksemplar	114.750.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	-113.729.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																			
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				2 Penerbit	10 Penerbit	10.150.000,00	17.973.000,00	17.973.000,00	7.823.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan				2 Buku	2 Buku	121.000.000,00	22.008.000,00	18.408.000,00	-102.592.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																			
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				450 Entry	500 Entry	60.000.000,00	15.116.000,00	15.116.000,00	-44.884.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																			
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	1 Naskah	61.000.000,00	6.892.000,00	3.292.000,00	-57.708.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital				2 Naskah	2 Naskah	164.800.000,00	71.404.500,00	65.836.000,00	-98.964.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																			
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				5 Eksemplar	10 Eksemplar	79.800.000,00	28.944.500,00	26.486.000,00	-53.314.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																			
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				60 Orang	100 Orang	85.000.000,00	42.460.000,00	39.350.000,00	-45.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka				1 Koleksi	1 Koleksi	91.456.000,00	0,00	0,00	-91.456.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		95.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				300 Eksemplar	0 Eksemplar	55.456.000,00	0,00	0,00	-55.456.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			57.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				300 Eksemplar	0 Eksemplar	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							15.193.029.000,00	14.458.491.825,00	14.118.955.831,00	-1.074.073.169,00							15.233.500.000,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	14.659.915.000,00	14.356.094.925,00	14.053.870.131,00	7.085.000,00							14.667.000.000,00		
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	196.500.000,00	76.890.000,00	73.570.000,00	-122.930.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		201.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	8.880.000,00	7.680.000,00	-32.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			42.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	55.500.000,00	10.080.000,00	8.880.000,00	-46.620.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	57.500.000,00	40.800.000,00	39.880.000,00	-17.620.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			58.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	43.500.000,00	17.130.000,00	17.130.000,00	-26.370.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	11.257.000.000,00	10.261.132.606,00	10.604.955.951,00	-652.044.049,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.270.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	10.997.000.000,00	10.062.532.606,00	10.413.195.951,00	-583.804.049,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	166.920.000,00	166.920.000,00	-8.080.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	31.680.000,00	24.840.000,00	-60.160.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	102.865.000,00	0,00	0,00	-102.865.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		112.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	29.365.000,00	0,00	0,00	-29.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	121.900.000,00	74.200.000,00	73.300.000,00	-48.600.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	0 Paket	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			53.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				72 Orang	75 Orang	67.900.000,00	74.200.000,00	73.300.000,00	5.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	315.650.000,00	1.298.982.424,00	776.297.285,00	460.647.285,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		331.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.500.000,00	32.175.000,00	22.522.500,00	-4.977.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.500.000,00	29.519.669,00	20.657.700,00	8.157.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	32.000.000,00	156.296.600,00	108.686.230,00	76.686.230,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21.000.000,00	99.134.100,00	69.438.000,00	48.438.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	108 Dokumen	20.500.000,00	20.500.000,00	15.273.000,00	-5.227.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	80 Laporan	191.850.000,00	961.357.055,00	539.719.855,00	347.869.855,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			195.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	0 Dokumen	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	57.960.000,00	298.312.500,00	259.702.000,00	201.742.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	36 Unit	57.960.000,00	298.312.500,00	259.702.000,00	201.742.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.422.640.000,00	2.205.984.895,00	2.150.934.895,00	-271.705.105,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.477.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.600.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	-7.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	757.040.000,00	723.329.160,00	670.279.160,00	-86.760.840,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			800.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.650.000.000,00	1.472.655.735,00	1.472.655.735,00	-177.344.265,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.660.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	185.400.000,00	140.592.500,00	115.110.000,00	-70.290.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		193.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	117.900.000,00	80.280.000,00	60.280.000,00	-57.620.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	67 Unit	62.500.000,00	60.312.500,00	54.830.000,00	-7.670.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban				73 %	73 %	277.923.000,00	87.965.900,00	55.285.700,00	25.077.000,00							303.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur				10 Pencipta Arsip	10 Pencipta Arsip	148.523.000,00	44.732.600,00	26.648.300,00	-121.874.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				300 Arsip	500 Arsip	17.500.000,00	736.000,00	368.000,00	-17.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi																		
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				150 Arsip	300 Arsip	15.000.000,00	736.000,00	368.000,00	-14.632.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				300 Arsip	300 Arsip	17.500.000,00	1.070.600,00	419.300,00	-17.080.700,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan																		
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	35.624.000,00	21.652.000,00	1.652.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi																		
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				30 Instansi	30 Instansi	15.000.000,00	2.726.000,00	1.921.000,00	-13.079.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis																		
			Jumlah arsiparis				1 Dokumen	0 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adak BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																			
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan				19 Laporan	19 Laporan	6.523.000,00	0,00	0,00	-6.523.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																			
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				31 Lembaga	5 Lembaga	40.000.000,00	3.840.000,00	1.920.000,00	-38.080.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			42.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip																			
			Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip				6 Lembaga	0 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Akses layanan Arsip Statis Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah Jumlah arsip statis yang dipreservasi				15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	15 Pengguna Arsip 1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip	92.500.000,00	16.461.300,00	10.812.400,00	-81.687.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		98.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																			
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				100 Arsip	100 Arsip	22.500.000,00	720.000,00	333.000,00	-22.167.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan																			
			Jumlah Orang yang diwawancarai				3 Orang	0 Orang	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip																			
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				1 Arsip	1 Arsip	20.000.000,00	4.242.000,00	930.000,00	-19.070.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																			
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi				3002 Arsip	3002 Arsip	27.500.000,00	11.499.300,00	9.549.400,00	-17.950.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				5 Simpul Jaringan	5 Simpul Jaringan	36.900.000,00	26.772.000,00	17.825.000,00	-19.075.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				500 Pengguna	500 Pengguna	23.900.000,00	8.472.000,00	4.124.000,00	-19.776.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	18.300.000,00	13.701.000,00	701.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat				76,66 %	76,66 %	181.313.000,00	14.431.000,00	9.800.000,00	5.187.000,00							186.500.000,00		
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun				12 Pencipta Arsip	12 Pencipta Arsip	67.900.000,00	0,00	0,00	-67.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		68.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	0 Arsip	67.900.000,00	0,00	0,00	-67.900.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			68.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan				9 Kali	9 Kali	57.913.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	-48.733.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				800 Arsip	800 Arsip	34.000.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	-24.820.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				600 Arsip	0 Arsip	23.913.000,00	0,00	0,00	-23.913.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan				3 OPD	3 OPD	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				4 Daftar	0 Daftar	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis				6 Daftar Arsip	6 Daftar Arsip	29.500.000,00	5.251.000,00	620.000,00	-28.880.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		31.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	0 Arsip	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	1 Arsip	15.000.000,00	5.251.000,00	620.000,00	-14.380.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
4.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi				1 regulasi	1 regulasi	73.878.000,00	0,00	0,00	3.122.000,00							77.000.000,00		
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup				1 SOP	1 SOP	73.878.000,00	0,00	0,00	-73.878.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		77.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.04.1.01.0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																			
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan				1 SOP	0 SOP	30.878.000,00	0,00	0,00	-30.878.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.04.1.01.0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																			
			Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1 Arsip	0 Arsip	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00		
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbra		550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0 Data	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	23.050.000.000,00	21.607.121.553,00	22.210.490.043,00	-839.509.957,00		-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		23.167.400.571,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang/ Bulan	156 Orang/ Bulan	22.000.000.000,00	20.925.821.553,00	21.535.100.043,00	-464.899.957,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.012.400.571,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000,00	681.300.000,00	675.390.000,00	-224.610.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			990.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	555.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	-381.000.000,00		-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov SUmbar		610.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			247.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	630.946.238,00	0,00	0,00	-630.946.238,00		-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		663.790.861,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				198 Paket	198 Paket	277.500.000,00	0,00	0,00	-277.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				198 Orang	198 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				198 Orang	5 Orang	53.446.238,00	0,00	0,00	-53.446.238,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			58.790.861,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			44.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	149.576.900,00	118.208.100,00	-81.791.900,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	-42.500.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.283.693.200,00	2.908.593.764,00	1.617.650.936,00	-666.042.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.392.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	630.000.000,00	435.000.000,00	35.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKp Prov Sumbar		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	-5.250.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	515.000.000,00	420.000.000,00	313.692.000,00	-201.308.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				63 Laporan	63 Laporan	3.470.800.000,00	3.482.684.370,00	3.463.034.370,00	-7.765.630,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.960.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DKP Prov Sumbar		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	329.200.000,00	225.250.000,00	122.250.000,00	-206.950.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	25.720.000,00	12.860.000,00	-62.140.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	51.410.000,00	900.000,00	-999.100.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	19.620.000,00	9.810.000,00	-40.190.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil Jumlah kawasan konservasi yang dikelola				350 64,71 7 25.000 M2 % kawasan batang	25.000 350 64,71 7 batang M2 % kawasan	3.650.000.000,00	2.931.650.490,00	546.719.745,00	365.000.000,00							4.015.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	2.450.000.000,00	2.831.650.490,00	446.719.745,00	-2.003.280.255,00		-		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		2.695.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				0 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				0.5 Ha	0.5 Ha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				0 Orang	0 Orang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			660.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	1.200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.100.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		1.320.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				5000 Orang	5000 Orang	1.050.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.155.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah sarana penangkapan ikan Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah prasarana pelabuhan perikanan				3 100 230.081 1,11 1.768 unit dokumen ton % unit	100 1,11 1.768 230.081 3 dokumen % unit ton unit	28.062.725.176,00	18.630.315.100,00	6.716.259.388,00	5.371.224.824,00							33.433.950.000,00		
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut				100 %	100 %	15.082.029.200,00	5.092.400.000,00	5.092.400.000,00	-9.989.629.200,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nelayan		17.047.250.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			181.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1160 Unit	113 Unit	14.932.029.200,00	5.092.400.000,00	5.092.400.000,00	-9.839.629.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			16.865.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat				200 unit	200 unit	1.925.741.700,00	348.001.500,00	348.001.500,00	-1.577.740.200,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nelayan Perairan Umum		3.124.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				200 Unit	200 Unit	1.925.741.700,00	348.001.500,00	348.001.500,00	-1.577.740.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.124.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				100 %	100 %	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nelayan		715.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																			
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	100 Persentase	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Nelayan		275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya				3,78 %	3,78 %	11.997.093.600,00	8.299.042.388,00	5.472.086.768,00	2.484.406.400,00							14.481.500.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Usaha Budiadaya Air Laut dan Payau				90 Orang	90 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembudidaya		137.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			137.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				100 %	100 %	5.795.992.800,00	3.191.534.988,00	330.049.618,00	-5.465.943.182,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembudidaya		7.056.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			880.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	6.076.100.800,00	5.107.507.400,00	5.142.037.150,00	-934.063.650,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pembudidaya		7.287.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	5.476.100.800,00	5.007.507.400,00	5.071.615.150,00	-404.485.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.627.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				90 %	90 %	10.523.622.300,00	1.358.361.150,00	452.204.850,00	2.104.377.700,00							12.628.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	10.048.622.300,00	1.358.361.150,00	452.204.850,00	-9.596.417.450,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Masyarakat pesisir		12.105.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi																		
			Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani				12 Perkara	12 Perkara	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				0 Hari Operasi	0 Hari Operasi	3.000.000.000,00	418.361.150,00	225.326.900,00	-2.774.673.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.01.0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	5.538.622.300,00	0,00	0,00	-5.538.622.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			6.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	360.000.000,00	680.000.000,00	0,00	-360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANAN)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			610.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Bidang Budidaya di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	475.000.000,00	0,00	0,00	-475.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembudidaya		522.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	475.000.000,00	0,00	0,00	-475.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			522.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				20.832 8,05 42,4 % Kg/kap/th	20.832 42,4 8,05 ton Kg/kap/th %	6.047.102.540,00	597.262.000,00	521.565.760,00	882.897.460,00							6.930.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran		935.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	0,00	0,00	-1.050.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			935.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	3.147.102.540,00	150.000.000,00	74.303.760,00	-3.072.798.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran		3.520.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	3 Kegiatan	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			990.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				3 Kegiatan	3 Kegiatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			660.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan pengolahan ikan				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	1.850.000.000,00	447.262.000,00	447.262.000,00	-1.402.738.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pengolah dan pemasaran		2.475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1.850.000.000,00	447.262.000,00	447.262.000,00	-1.402.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00						118.453.181.483,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	10.000.000,00	2.612.719,00	2.612.719,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	130.000.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	106.647.460,00	0,00	0,00	-106.647.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			205.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	85.000.000,00	72.652.090,00	-27.347.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	PPMHP		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	12.000.000,00	6.800.000,00	-8.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.250.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	-20.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			49.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Tingkat konsumsi ikan Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan				42,4 8,05 20.832 Kg/kap/th % ton	20.832 42,4 8,05 ton Kg/kap/th % 	6.047.102.540,00	597.262.000,00	521.565.760,00	882.897.460,00							6.930.000.000,00			
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	3.147.102.540,00	150.000.000,00	74.303.760,00	-3.072.798.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Masyarakat		3.520.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																				
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				5 Kegiatan	5 Kegiatan	700.000.000,00	150.000.000,00	74.303.760,00	-625.696.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			770.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																				
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.047.102.540,00	0,00	0,00	-1.047.102.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)								103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00								118.453.181.483,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.838.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-21.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	10.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	130.291.000,00	65.145.500,00	65.145.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	149.756.000,00	0,00	0,00	-149.756.000,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	87.613.200,00	0,00	0,00	-87.613.200,00	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			83.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			396.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	3 Unit	84.800.000,00	30.000.000,00	17.325.000,00	-67.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	11.997.093.600,00	8.299.042.388,00	5.472.086.768,00	2.484.406.400,00							14.481.500.000,00		
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	5.795.992.800,00	3.191.534.988,00	330.049.618,00	-5.465.943.182,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		7.056.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																			
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				2 Unit	2 Unit	2.800.000.000,00	2.127.800.000,00	0,00	-2.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			4.070.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit	5 Unit	1.145.992.800,00	914.691.988,00	240.623.818,00	-905.368.982,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.171.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Pembudidaya				0 Orang	0 Orang	500.000.000,00	149.043.000,00	89.425.800,00	-410.574.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00					118.453.181.483,00				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.727.400,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-11.477.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.000.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	160.000.000,00	99.772.474,00	99.772.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	89.013.000,00	0,00	0,00	-89.013.000,00	Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			99.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.000.000,00	205.000.000,00	199.750.000,00	-95.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			159.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	55.000.000,00	29.100.000,00	4.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	9.150.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-4.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.065.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	2.700.000.000,00	0,00	0,00	-2.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.630.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-				-	-	3.650.000.000,00	2.931.650.490,00	546.719.745,00	365.000.000,00							4.015.000.000,00		
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	2.450.000.000,00	2.831.650.490,00	446.719.745,00	-2.003.280.255,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.695.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																			
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				332510.53 Ha	332510.53 Ha	1.500.000.000,00	2.831.650.490,00	446.719.745,00	-1.053.280.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	11.997.093.600,00	8.299.042.388,00	5.472.086.768,00	2.484.406.400,00							14.481.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	6.076.100.800,00	5.107.507.400,00	5.142.037.150,00	-934.063.650,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		7.287.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	100.000.000,00	70.422.000,00	-529.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			660.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	10.523.622.300,00	1.358.361.150,00	452.204.850,00	2.104.377.700,00							12.628.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	10.048.622.300,00	1.358.361.150,00	452.204.850,00	-9.596.417.450,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		12.105.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	700.000.000,00	260.000.000,00	226.877.950,00	-473.122.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			770.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I								103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00						118.453.181.483,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	10.000.000,00	2.511.925,00	-147.488.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	120.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	61.500.000,00	0,00	0,00	-61.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	438.500.000,00	0,00	0,00	-438.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	112.992.000,00	0,00	0,00	-112.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			256.291.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	448.000.000,00	315.000.000,00	300.150.000,00	-147.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			492.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	57.000.000,00	25.000.000,00	14.475.000,00	-42.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			62.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	28.062.725.176,00	18.630.315.100,00	6.716.259.388,00	5.371.224.824,00							33.433.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		715.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	100 Persentase	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	10.354.954.276,00	13.189.913.600,00	1.275.857.888,00	-9.079.096.388,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		12.272.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	2.825.000.000,00	9.245.200.000,00	0,00	-2.825.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.667.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	1.500.000.000,00	273.564.500,00	258.613.138,00	-1.241.386.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00					118.453.181.483,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	245.103.104,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-235.103.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	115.000.000,00	69.459.500,00	69.459.500,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	92.826.000,00	0,00	0,00	-92.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			121.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	102.157.756,00	0,00	0,00	-102.157.756,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			89.319.291,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	391.028.000,00	0,00	0,00	-391.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			276.014.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	756.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			831.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	35.700.000,00	20.000.000,00	10.975.000,00	-24.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	72.430.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-47.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			74.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	116.922.780,00	0,00	0,00	-116.922.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	28.062.725.176,00	18.630.315.100,00	6.716.259.388,00	5.371.224.824,00							33.433.950.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	10.354.954.276,00	13.189.913.600,00	1.275.857.888,00	-9.079.096.388,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		12.272.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	1.892.447.929,00	2.590.000.000,00	0,00	-1.892.447.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.870.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				3 Layanan	3 Layanan	1.487.506.347,00	809.650.500,00	921.432.750,00	-566.073.597,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.620.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III								103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00					118.453.181.483,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							103.380.937.754,00	64.734.262.115,00	44.667.776.568,00	-58.713.161.186,00							118.453.181.483,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	43.100.394.138,00	32.917.630.987,00	30.958.940.057,00	3.864.337.345,00							46.964.731.483,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.462.361.704,00	4.043.335.064,00	2.280.046.554,00	-1.182.315.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.056.500.360,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	6.498.000,00	4.748.000,00	-45.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	10.900.600,00	2.169.200,00	-27.830.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			33.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	150.174.800,00	78.393.200,00	78.393.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.992.033.416,00	630.000.000,00	435.000.000,00	-3.557.033.416,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.881.924.691,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			495.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	398.000.000,00	0,00	0,00	-398.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			437.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	212.000.000,00	0,00	0,00	-212.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			233.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.252.300.000,00	5.900.684.370,00	5.591.528.460,00	-660.771.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.854.650.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.657.752.780,00	562.490.000,00	267.875.000,00	-4.389.877.780,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.179.965.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	16.190.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	28.062.725.176,00	18.630.315.100,00	6.716.259.388,00	5.371.224.824,00							33.433.950.000,00		
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	10.354.954.276,00	13.189.913.600,00	1.275.857.888,00	-9.079.096.388,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		12.272.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	1.650.000.000,00	0,00	0,00	-1.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.815.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Layanan	1 Layanan	1.000.000.000,00	271.498.600,00	95.812.000,00	-904.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		DINAS PARIWISATA							38.386.130.000,00	20.818.416.354,00	20.646.700.412,00	-17.739.429.588,00							30.932.500.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							38.386.130.000,00	20.818.416.354,00	20.646.700.412,00	-17.739.429.588,00							30.932.500.000,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							38.386.130.000,00	20.818.416.354,00	20.646.700.412,00	-17.739.429.588,00							30.932.500.000,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	15.263.816.000,00	12.278.630.654,00	10.382.493.812,00	-291.316.000,00							14.972.500.000,00		
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas				1 Tahun	1 Tahun	198.630.000,00	0,00	2.700.000,00	-195.930.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		455.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	29.730.000,00	0,00	0,00	-29.730.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0 Laporan	79.100.000,00	0,00	0,00	-79.100.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	39.800.000,00	0,00	0,00	-39.800.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			95.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	2.700.000,00	-47.300.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas				12 Bulan	12 Bulan	8.203.275.303,00	7.550.217.537,00	7.902.359.914,00	-300.915.389,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.322.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	7.910.195.303,00	7.304.217.537,00	7.668.419.914,00	-241.775.389,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	246.000.000,00	233.940.000,00	-41.060.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			285.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	18.080.000,00	0,00	0,00	-18.080.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			37.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		211.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearh				1 Tahun	1 Tahun	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		305.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	0 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				58 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	3.581.910.697,00	3.088.413.117,00	1.093.941.454,00	-2.487.969.243,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.724.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	95.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	-86.250.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	35.000.000,00	6.338.500,00	-73.661.500,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	10 Paket	500.000.000,00	322.516.700,00	129.358.225,00	-370.641.775,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	151.518.900,00	90.886.620,00	40.886.620,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.636.910.697,00	2.544.377.517,00	858.608.109,00	-1.778.302.588,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	195.000.000,00	0,00	0,00	-195.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	970.000.000,00	0,00	0,00	-970.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	7 Unit	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pmerintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.375.000.000,00	1.325.000.000,00	1.212.942.444,00	-162.057.556,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.425.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	360.000.000,00	274.500.000,00	-100.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			390.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	965.000.000,00	938.442.444,00	-61.557.556,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.035.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintah Daerah				1 Tahun	1 Tahun	575.000.000,00	315.000.000,00	170.550.000,00	-404.450.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		630.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	10 Unit	300.000.000,00	175.000.000,00	100.550.000,00	-199.450.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			325.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	90 Unit	175.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-130.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW Unggulan Provinsi Berdaya Saing Nasional Yang Diintervensi Penguembangannya Jumlah Intervensi Pada Destinasi International Kawasan Gunung Talang				15 19 DTW Kali	15 19 DTW Kali	6.860.000.000,00	1.118.182.000,00	2.374.302.000,00	-4.135.000.000,00							2.725.000.000,00		
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 DTW	1 DTW	400.000.000,00	0,00	1.135.000.000,00	735.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																			
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				6 Lokasi	1 Lokasi	250.000.000,00	0,00	1.135.000.000,00	885.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sijantang Koto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			275.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 DTW	1 DTW	4.960.000.000,00	1.118.182.000,00	1.239.302.000,00	-3.720.698.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		1.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				7 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				3 Lokasi	1 Lokasi	1.660.000.000,00	150.834.000,00	150.834.000,00	-1.509.166.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi																			
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata				2 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	867.348.000,00	488.468.000,00	288.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)																			
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021				15 Usaha	0 Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar																			
			Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi				20 Usaha Pariwisata	0 Usaha Pariwisata	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				60 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata Lama Tinggal Wisnus Rata-rata Lama Tinggal Wisman Persentase Peningkatan Kunjungan Wisman Persentase Peningkatan Kunjungan Wisnus				7,5 1.82 3.27 7 % Hari %	1.82 3.27 7 7.5 Hari % %	8.130.000.000,00	4.868.690.000,00	4.995.748.000,00	-180.000.000,00							7.950.000.000,00		
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daaar Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				3 Kegiatan	2 Kegiatan	8.130.000.000,00	4.868.690.000,00	4.995.748.000,00	-3.134.252.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		7.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000.000,00	150.000.000,00	210.000.000,00	-2.490.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	0 Dokumen	1.450.000.000,00	0,00	0,00	-1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.980.000.000,00	4.718.690.000,00	4.785.748.000,00	805.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		4.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Yang Terdaftar HKI				200 Produk	200 Produk	3.636.950.000,00	1.039.188.700,00	1.278.434.600,00	-486.950.000,00							3.150.000.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif				200 Produk	2 Kegiatan	2.764.985.000,00	855.996.100,00	916.062.900,00	-1.848.922.100,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	2.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	1.544.061.000,00	192.314.200,00	192.314.200,00	-1.351.746.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		1.250.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.220.924.000,00	663.681.900,00	723.748.700,00	-497.175.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		950.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				-	1 Kegiatan	871.965.000,00	183.192.600,00	362.371.700,00	-509.593.300,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	950.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	183.192.600,00	362.371.700,00	112.371.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				100 Orang	0 Orang	321.965.000,00	0,00	0,00	-321.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				5 Lembaga	0 Lembaga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat				596 10 Orang %	10 596 % Orang	4.495.364.000,00	1.513.725.000,00	1.615.722.000,00	-2.360.364.000,00							2.135.000.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100 orang	2 Kegiatan	2.545.364.000,00	727.525.000,00	1.067.242.000,00	-1.478.122.000,00			-	-	-	1.030.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				250 Orang	55 Orang	2.094.314.000,00	0,00	255.990.000,00	-1.838.324.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA)				50 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	555 Orang	100.000.000,00	727.525.000,00	811.252.000,00	711.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0 Laporan	51.050.000,00	0,00	0,00	-51.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				4 Kegiat	1 Kegiatan	1.950.000.000,00	786.200.000,00	548.480.000,00	-1.401.520.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	1.105.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				500 Orang	280 Orang	900.000.000,00	786.200.000,00	548.480.000,00	-351.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan		155.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				50 0	0 0	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				250 Orang	0 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00					198.146.000.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	800.000.000,00	584.420.000,00	225.600.000,00	-574.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	-273.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	80.920.000,00	37.190.000,00	-462.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	180.200.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	51.080.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	245.940.000,00	119.950.000,00	119.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				334 Orang/ Bulan	334 Orang/ Bulan	48.624.282.898,00	46.470.025.217,00	47.697.537.243,00	-926.745.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	310.680.000,00	270.120.000,00	270.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			325.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-137.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	138.400.000,00	138.400.000,00	135.830.000,00	-2.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	11.820.000,00	5.900.000,00	-194.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	11.820.000,00	5.900.000,00	-94.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	94 Paket	211.500.000,00	0,00	0,00	-211.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.600,00	543.016.154,00	543.016.154,00	443.015.554,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	297.370.700,00	297.170.700,00	247.170.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.676.712.428,00	3.416.701.405,00	2.008.914.500,00	332.202.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	40.776.800,00	25.458.440,00	-174.541.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	494.964.728,00	635.519.000,00	635.519.000,00	140.554.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.759.932.157,00	2.060.545.692,00	2.060.545.692,00	300.613.535,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	350.000.000,00	382.550.000,00	382.550.000,00	32.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	117.342.500,00	81.915.500,00	-18.084.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	45.158.898.000,00	21.649.837.482,00	21.342.115.334,00	2.641.102.000,00							47.800.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	10.300.000.000,00	6.282.735.240,00	6.205.224.296,00	-4.094.775.704,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		11.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan				12 laporan	12 laporan	3.200.000.000,00	530.012.480,00	500.289.830,00	-2.699.710.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				12 laporan	12 laporan	2.000.000.000,00	1.799.927.900,00	1.772.563.900,00	-227.436.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura				12 laporan	12 laporan	1.500.000.000,00	50.000.000,00	29.575.706,00	-1.470.424.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	34.858.898.000,00	15.367.102.242,00	15.136.891.038,00	-19.722.006.962,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		36.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	12 laporan	24.458.898.000,00	14.135.617.242,00	14.061.281.538,00	-10.397.616.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			25.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	29.389.519.000,00	1.024.472.039,00	886.451.800,00	-28.503.067.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			30.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	1.385.480.850,00	963.950.000,00	363.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	284.148.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	60.852.000,00							345.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	284.148.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	-238.788.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		345.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.06.1.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	84.148.000,00	0,00	0,00	-84.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	-54.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			120.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00		
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		4.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																			
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				12 Unit	12 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																			
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				12 Unit	12 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN								184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00					198.146.000.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00		
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	90.600.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	67.500.000,00	0,00	0,00	-67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	4.996.500,00	4.996.500,00	-5.003.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	78.135.100,00	48.233.450,00	-1.766.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	5.000.000,00	2.921.800,00	-22.078.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	216.887.000,00	124.323.000,00	124.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	190.000.000,00	136.947.076,00	-53.052.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	3.610.000,00	2.150.000,00	-7.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00	1.053.653.844,00	1.053.119.728,00	153.119.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			950.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	41.399.750,00	51.300.000,00	51.300.000,00	9.900.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	37.491.000,00	37.491.000,00	12.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	45.158.898.000,00	21.649.837.482,00	21.342.115.334,00	2.641.102.000,00							47.800.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	34.858.898.000,00	15.367.102.242,00	15.136.891.038,00	-19.722.006.962,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		36.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	12 laporan	4.000.000.000,00	835.280.000,00	826.802.000,00	-3.173.198.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			5.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	1.192.086.150,00	11.903.150,00	-288.096.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.566.821.000,00	1.681.282.720,00	1.097.913.220,00	-12.468.907.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			420.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	58.560.000,00	58.560.000,00	58.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 0	1 0	50.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	39 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	25.900.000,00	12.950.000,00	-12.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	380.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	2.940.000,00	-3.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	90.247.500,00	-29.752.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			130.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	556.628.409,00	644.686.688,00	641.386.688,00	84.758.279,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	3 Unit	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	45.158.898.000,00	21.649.837.482,00	21.342.115.334,00	2.641.102.000,00							47.800.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	34.858.898.000,00	15.367.102.242,00	15.136.891.038,00	-19.722.006.962,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		36.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				12 Sertifikat	12 Sertifikat	2.000.000.000,00	260.000.000,00	129.189.500,00	-1.870.810.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	12 laporan	1.400.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	-1.323.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	758.860.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.566.821.000,00	1.681.282.720,00	1.097.913.220,00	-12.468.907.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00						198.146.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				20 Paket	20 Paket	33.750.000,00	0,00	0,00	-33.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	11.711.500,00	11.711.500,00	1.711.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	84.119.400,00	68.508.150,00	18.508.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	74.039.000,00	74.039.000,00	49.039.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	431.926.000,00	211.744.000,00	211.744.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	30.500.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	20.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	110.700.000,00	84.600.600,00	-115.399.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	596.515.512,00	722.480.432,00	721.655.432,00	125.139.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00	-3.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	45.158.898.000,00	21.649.837.482,00	21.342.115.334,00	2.641.102.000,00							47.800.000.000,00		
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	34.858.898.000,00	15.367.102.242,00	15.136.891.038,00	-19.722.006.962,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		36.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																			
			Jumlah Sertifikat Benih				12 Sertifikat	12 Sertifikat	2.000.000.000,00	55.925.000,00	40.778.000,00	-1.959.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																			
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				12 laporan	12 laporan	1.000.000.000,00	3.280.000,00	1.840.000,00	-998.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																			
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																			
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	199.320.000,00	199.320.000,00	-100.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				2 Ha	2 Ha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	2.966.503.000,00	714.362.860,00	678.388.290,00	633.497.000,00							3.600.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	2.966.503.000,00	714.362.860,00	678.388.290,00	-2.288.114.710,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	10 Ha	250.000.000,00	15.610.000,00	15.610.000,00	-234.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	10 Ha	200.000.000,00	41.086.000,00	29.706.000,00	-170.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				5 Ha	5 Ha	150.000.000,00	42.265.000,00	24.560.000,00	-125.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.566.821.000,00	1.681.282.720,00	1.097.913.220,00	-12.468.907.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				10 Kelompok	10 Kelompok	1.000.000.000,00	105.267.000,00	51.852.000,00	-948.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00						198.146.000.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	64.440.000,00	64.440.000,00	64.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	87 Paket	72.750.000,00	0,00	0,00	-72.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	69.032.150,00	48.901.300,00	-1.098.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	46.216.200,00	32.419.200,00	7.419.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	403.486.990,00	242.914.966,00	242.914.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	6.000.000,00	450.000,00	337.500,00	-5.662.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		215.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.719.615,00	-1.280.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	649.251.434,00	1.200.353.978,00	981.953.978,00	332.702.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	82.250.000,00	88.650.000,00	88.455.000,00	6.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00						48.400.000.000,00		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000.000,00	25.171.200,00	25.171.200,00	-1.874.828.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan				12 Ha	12 Ha	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		1.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	2.966.503.000,00	714.362.860,00	678.388.290,00	633.497.000,00							3.600.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	2.966.503.000,00	714.362.860,00	678.388.290,00	-2.288.114.710,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	850.000.000,00	343.328.340,00	342.944.770,00	-507.055.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			900.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	10 Ha	400.000.000,00	70.142.000,00	63.636.000,00	-336.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	10 Ha	300.000.000,00	51.931.520,00	51.931.520,00	-248.068.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulungan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	6.150.000.000,00	98.070.000,00	109.567.000,00	-6.040.433.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		6.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.566.821.000,00	1.681.282.720,00	1.097.913.220,00	-12.468.907.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				12 Kelompok	12 Kelompok	1.850.000.000,00	200.722.720,00	174.820.720,00	-1.675.179.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		UPTD BALAI MEKANISASI DAN SARANA PRASARANA PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							184.212.062.550,00	165.387.269.930,00	160.624.057.251,00	-23.588.005.299,00							198.146.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	66.196.173.550,00	70.307.851.629,00	66.507.934.857,00	6.944.826.450,00							73.141.000.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.674.282.898,00	47.306.105.217,00	48.457.157.243,00	-1.217.125.655,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.395.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	163.080.000,00	141.240.000,00	141.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	11.095.949,00	8.321.962,00	-1.678.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	408.529.300,00	338.974.900,00	288.974.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	143.764.900,00	114.369.900,00	89.369.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.787.191.674,00	1.518.084.435,00	1.518.084.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	133.088.950,00	133.088.950,00	33.088.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	-2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.000.000,00	112.000.000,00	81.750.000,00	-30.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	655.862.753,00	1.279.997.986,00	1.279.997.986,00	624.135.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	143.200.000,00	143.200.000,00	108.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	96.475.000,00	96.475.000,00	71.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	45.158.898.000,00	21.649.837.482,00	21.342.115.334,00	2.641.102.000,00							47.800.000.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	10.300.000.000,00	6.282.735.240,00	6.205.224.296,00	-4.094.775.704,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		11.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	3.300.000.000,00	3.902.794.860,00	3.902.794.860,00	602.794.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	710.000.000,00	240.000.000,00	219.430.000,00	-490.570.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		965.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	633.000.000,00	0,00	0,00	-633.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	37 Paket	85.500.000,00	0,00	0,00	-85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.006.713.028,00	10.447.481.097,00	6.499.614.484,00	2.492.901.456,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.565.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.910,00	7.499.039,00	-2.500.961,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	244.706.865,00	161.642.178,00	111.642.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.000.000,00	41.386.300,00	33.886.500,00	8.886.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	568.267.100,00	302.571.350,00	302.571.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.600.000.000,00	204.365.750,00	158.547.390,00	-1.441.452.610,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.940.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.566.527.874,00	10.401.991.065,00	9.865.639.240,00	2.299.111.366,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.206.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	571.920.000,00	406.095.000,00	206.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	804.372.881,00	1.458.053.445,00	1.458.053.445,00	653.680.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			850.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.005.649.750,00	1.111.668.500,00	1.076.046.500,00	70.396.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.230.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	36.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	-14.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	2.510.481.000,00							48.400.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	45.889.519.000,00	70.890.505.239,00	70.842.778.550,00	24.953.259.550,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		48.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	500.025.000,00	500.025.000,00	200.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	23.716.821.000,00	1.779.352.720,00	1.207.480.220,00	1.143.179.000,00							24.860.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	6.150.000.000,00	98.070.000,00	109.567.000,00	-6.040.433.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		6.400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	2.500.000.000,00	48.500.000,00	24.250.000,00	-2.475.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	3.500.000.000,00	49.570.000,00	85.317.000,00	-3.414.683.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	13.566.821.000,00	1.681.282.720,00	1.097.913.220,00	-12.468.907.780,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		14.260.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																			
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																			
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				12 Kelompok	12 Kelompok	8.316.821.000,00	1.375.293.000,00	871.240.500,00	-7.445.580.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			9.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00					155.237.327.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00		
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	550.000.000,00	11.660.000,00	6.100.000,00	-543.900.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1 Dokumen	232.325.300,00	1.830.000,00	0,00	-232.325.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	1.830.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	67.674.700,00	8.000.000,00	6.100.000,00	-61.574.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	20.637.527.731,00	19.998.749.594,00	20.560.497.487,00	-77.030.244,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		24.050.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	19.717.527.731,00	19.232.069.594,00	19.817.097.487,00	99.569.756,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			23.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	800.000.000,00	758.880.000,00	743.400.000,00	-56.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	7.800.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	300.000.000,00	368.755.000,00	353.200.000,00	53.200.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	358.080.000,00	353.200.000,00	253.200.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingsuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	7.930.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingsuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	2.745.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingsuang Aua Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur				100 %	100 %	500.000.000,00	252.400.000,00	100.442.000,00	-399.558.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		540.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	0 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				190 Orang	25 Orang	200.000.000,00	252.400.000,00	100.442.000,00	-99.558.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			240.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	41.414.000,00	33.614.000,00	8.388.000,00	-33.026.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	300.000.000,00	314.611.506,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	230.000.000,00	256.410.550,00	162.193.300,00	-67.806.700,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			230.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	291.354.900,00	130.781.200,00	30.781.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.386.000,00	-13.614.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	902.918.920,00	4.480.249.514,00	2.267.899.459,00	1.364.980.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>				100 %	100 %	1.130.879.500,00	1.368.023.490,00	53.622.000,00	-1.077.257.500,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				25 Paket	25 Paket	357.349.500,00	147.220.500,00	0,00	-357.349.500,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				25 Unit	25 Unit	473.530.000,00	1.054.042.990,00	30.000.000,00	-443.530.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	166.760.000,00	23.622.000,00	-276.378.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	4.830.000.000,00	5.347.011.952,00	5.229.714.652,00	399.714.652,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		4.340.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.330.000.000,00	1.266.720.000,00	1.149.422.700,00	-180.577.300,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.340.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	4.080.291.952,00	4.080.291.952,00	580.291.952,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	30 Unit	600.000.000,00	561.410.000,00	305.580.000,00	-294.420.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	100 Unit	300.000.000,00	245.370.000,00	123.790.000,00	-176.210.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	653.472.000,00	259.272.000,00	9.272.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	240 Unit	200.000.000,00	24.750.000,00	13.400.000,00	-186.600.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging				1,62 %	1,62 %	78.077.170.800,00	14.928.929.204,00	12.925.350.487,00	6.922.829.200,00							85.000.000.000,00		
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang dikelola				100 %	100 %	100.000.000,00	150.032.000,00	137.741.000,00	37.741.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																			
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	150.032.000,00	137.741.000,00	37.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				100 %	100 %	4.559.353.400,00	3.508.828.383,00	2.663.304.500,00	-1.896.048.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		5.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	90.065.000,00	110.858.500,00	-289.141.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																			
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan				21 Kali	21 Kali	8.366.554.400,00	6.344.895.399,00	5.085.716.240,00	-3.280.838.160,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		9.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																			
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1 laporan	1.000.000.000,00	1.893.938.000,00	1.416.058.750,00	416.058.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																			
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	374.356.825,00	233.947.660,00	-766.052.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Puskesmas, Peternak, Petshop		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																			
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia				5 Komoditi	5 Komoditi	64.951.263.000,00	4.925.173.422,00	5.038.588.747,00	-59.912.674.253,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		70.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				500000 Ekor	12870 Ekor	64.951.263.000,00	4.925.173.422,00	5.038.588.747,00	-59.912.674.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			70.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, Kelompok Tani		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan																		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	2 Unit	250.000.000,00	82.095.000,00	64.395.000,00	-185.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola				24 Wilayah	24 Wilayah	350.000.000,00	200.760.705,00	126.463.005,00	-223.536.995,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, UPTD		450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	200.760.705,00	126.463.005,00	-23.536.995,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				5,19 %	5,19 %	19.570.431.628,00	6.866.061.311,00	6.069.420.172,00	6.746.453.372,00							26.316.885.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan				170 Kali	170 Kali	12.425.000.000,00	3.149.749.228,00	2.775.731.665,00	-9.649.268.335,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Puskesmas, Masyarakat		17.416.885.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000.000,00	162.759.760,00	133.731.110,00	-3.166.268.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemem Risiko Zoonosis																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			516.885.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000.000,00	954.081.200,00	954.081.200,00	-6.045.918.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			7.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				300 Kasus	300 Kasus	825.000.000,00	207.140.725,00	113.286.725,00	-711.713.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				675 Kali	675 Kali	2.750.000.000,00	8.430.000,00	5.316.000,00	-2.744.684.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak dan Dinas		2.900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	8.430.000,00	5.316.000,00	-794.684.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000.000,00	0,00	0,00	-1.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		2.100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.296.833.628,00	3.654.728.083,00	3.248.760.507,00	-48.073.121,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH	4.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan																			
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	1.450.000.000,00	1.168.437.100,00	846.597.550,00	-603.402.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		1.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan				10 Sertifikat	10 Sertifikat	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																			
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan				10 Unit	10 Unit	598.598.000,00	53.154.000,00	39.612.000,00	-558.986.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, UPH, Pengusaha	1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya																			
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	1 Kasus	255.000.000,00	27.850.000,00	22.700.000,00	-232.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)																			
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				10 Sertifikat	10 Sertifikat	343.598.000,00	25.304.000,00	16.912.000,00	-326.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				3 %	3 %	400.000.000,00	203.653.890,00	142.743.390,00	0,00							400.000.000,00		
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Izin Usaha	1 Izin Usaha	100.000.000,00	14.080.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPTD, UPH	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	14.080.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya				20 %	20 %	2.200.000.000,00	975.641.500,00	362.415.000,00	100.000.000,00							2.300.000.000,00		
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya				20 %	20 %	150.000.000,00	105.960.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani, Peternak, Penyuluh	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	150.000.000,00	105.960.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan				50 Kali	50 Kali	1.450.000.000,00	808.801.500,00	362.415.000,00	-1.087.585.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Dinas, UPH, Masyarakat	1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																			
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	1.450.000.000,00	808.801.500,00	362.415.000,00	-1.087.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya				100 %	100 %	600.000.000,00	60.880.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Kelompok Tani		650.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																					
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	60.880.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																					
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
		UPTD TERNAK UNGGAS																				155.237.327.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00				
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00				
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00				
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	70.310.760,00	41.515.700,00	-38.484.300,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	13.948.000,00	3.487.000,00	-11.513.000,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	242.883.000,00	249.834.000,00	124.917.000,00	-117.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	82.520.000,00	52.821.915,00	2.821.915,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging				1,62 %	1,62 %	78.077.170.800,00	14.928.929.204,00	12.925.350.487,00	6.922.829.200,00							85.000.000.000,00				
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				100 %	100 %	4.559.353.400,00	3.508.828.383,00	2.663.304.500,00	-1.896.048.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		5.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																					
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	1 laporan	2.070.721.400,00	2.095.073.383,00	1.554.460.000,00	-516.261.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan				12 Kali	12 Kali	8.366.554.400,00	6.344.895.399,00	5.085.716.240,00	-3.280.838.160,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		9.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi</i>				1 laporan	1 laporan	1.020.775.400,00	809.287.552,00	736.052.052,00	-284.723.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik</i>				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			<i>Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	765.700.000,00	615.660.000,00	91.082.230,00	-674.617.770,00	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD TERNAK RUMINANSIA							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00						155.237.327.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	150.876.912,00	78.811.712,00	28.811.712,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	5.552.500,00	1.388.000,00	-13.612.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	265.488.000,00	236.123.000,00	118.061.500,00	-147.426.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				28 Unit	28 Unit	160.000.000,00	274.455.000,00	244.740.000,00	84.740.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			160.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging				1,62 %	1,62 %	78.077.170.800,00	14.928.929.204,00	12.925.350.487,00	6.922.829.200,00							85.000.000.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				100 %	100 %	4.559.353.400,00	3.508.828.383,00	2.663.304.500,00	-1.896.048.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		5.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				1 laporan	1 laporan	1.888.632.000,00	1.323.690.000,00	997.986.000,00	-890.646.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan</i>				12 Kali	12 Kali	8.366.554.400,00	6.344.895.399,00	5.085.716.240,00	-3.280.838.160,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Kelompok Tani		9.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1 laporan	1.391.442.000,00	981.493.997,00	848.798.997,00	-542.643.003,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	493.272.000,00	119.908.000,00	0,00	-493.272.000,00	Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)								137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00						155.237.327.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	142.850.000,00	48.762.375,00	-151.237.625,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	82.250.000,00	20.562.500,00	-39.437.500,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	263.000.000,00	131.500.000,00	-118.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	246.750.000,00	140.825.000,00	-9.175.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging				1,62 %	1,62 %	78.077.170.800,00	14.928.929.204,00	12.925.350.487,00	6.922.829.200,00							85.000.000.000,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan				12 Kali	12 Kali	8.366.554.400,00	6.344.895.399,00	5.085.716.240,00	-3.280.838.160,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak		9.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1 laporan	3.570.000.000,00	2.083.565.025,00	1.721.325.175,00	-1.848.674.825,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			4.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	486.500.000,00	205.830.000,00	-794.170.000,00	Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			2.190.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT								137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00						155.237.327.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	149.998.523,00	106.462.882,00	91.255.782,00	-58.742.741,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	37.244.440,00	37.244.440,00	-12.755.560,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.701.477,00	249.002.000,00	112.822.500,00	14.121.023,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	77.204.952,00	61.004.952,00	-38.995.048,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	219.480.000,00	175.000.000,00	-325.000.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				5,19 %	5,19 %	19.570.431.628,00	6.866.061.311,00	6.069.420.172,00	6.746.453.372,00							26.316.885.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan				170 Kali	170 Kali	12.425.000.000,00	3.149.749.228,00	2.775.731.665,00	-9.649.268.335,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peternak, Masyarakat		17.416.885.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	1.825.767.543,00	1.574.632.630,00	774.632.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			7.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.296.833.628,00	3.654.728.083,00	3.248.760.507,00	-48.073.121,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD dan Peternak		4.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.824.813.912,00	1.813.316.912,00	813.316.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				3 %	3 %	400.000.000,00	203.653.890,00	142.743.390,00	0,00							400.000.000,00	
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	189.573.890,00	142.743.390,00	-157.256.610,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	137.505.890,00	117.923.390,00	-32.076.610,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)								137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00						155.237.327.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							137.562.388.731,00	61.814.534.862,00	51.295.409.331,00	-86.266.979.400,00							155.237.327.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	33.250.949.523,00	36.917.371.152,00	31.081.730.690,00	2.029.050.477,00							35.280.000.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.392.542.292,00	7.354.827.964,00	3.553.490.684,00	160.948.392,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		2.840.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.211.372,00	30.222.000,00	18.247.416,00	-83.963.956,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	14.845.000,00	1.997.800,00	-48.002.200,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	138.927.000,00	276.066.000,00	117.269.000,00	-21.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	1.910.000.000,00	2.215.943.152,00	1.224.663.867,00	-685.336.133,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		1.860.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	50.011.200,00	23.230.000,00	-76.770.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging				1,62 %	1,62 %	78.077.170.800,00	14.928.929.204,00	12.925.350.487,00	6.922.829.200,00							85.000.000.000,00	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan				57 Kali	57 Kali	8.366.554.400,00	6.344.895.399,00	5.085.716.240,00	-3.280.838.160,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, Peternak		9.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	1 Dokumen	384.337.000,00	202.254.000,00	129.533.606,00	-254.803.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan				20 %	20 %	4.063.836.780,00	1.922.877.805,00	713.749.592,00	1.876.605.220,00							5.940.442.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	3.713.836.780,00	1.722.117.100,00	587.286.587,00	-3.126.550.193,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		5.490.442.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	504.864.780,00	198.474.100,00	50.979.357,00	-453.885.423,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis				5,19 %	5,19 %	19.570.431.628,00	6.866.061.311,00	6.069.420.172,00	6.746.453.372,00							26.316.885.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.296.833.628,00	3.654.728.083,00	3.248.760.507,00	-48.073.121,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD, UPH, Pedagang		4.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	846.833.628,00	661.477.071,00	588.846.045,00	-257.987.583,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			1.850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi				3 %	3 %	400.000.000,00	203.653.890,00	142.743.390,00	0,00							400.000.000,00	
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	189.573.890,00	142.743.390,00	-157.256.610,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	UPTD		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	52.068.000,00	24.820.000,00	-125.180.000,00	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-187.096.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				352 Orang/ Bulan	340 Orang/ Bulan	48.000.000.000,00	44.298.080.723,00	45.687.417.793,00	-2.312.582.207,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	984.329.200,00	990.422.308,00	989.806.564,00	5.477.364,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	24.756.000,00	-175.244.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-53.050.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.400.000.000,00	0,00	0,00	-1.400.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				400 Paket	400 Paket	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	-230.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	200.000.000,00	90.663.950,00	90.663.950,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	480.000.000,00	352.036.725,00	246.751.625,00	-233.248.375,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	158.970.500,00	112.926.000,00	-27.074.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	769.903.088,00	5.208.621.887,00	2.375.682.795,00	1.605.779.707,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.476.454.000,00	1.028.244.500,00	192.710.656,00	-2.283.743.344,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	482.074.000,00	600.000.000,00	0,00	-482.074.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				20 Unit	20 Unit	644.380.000,00	0,00	0,00	-644.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	12 Unit	600.000.000,00	428.244.500,00	192.710.656,00	-407.289.344,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	330.409.068,00	309.166.800,00	309.166.800,00	-21.242.268,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.267.480.717,00	1.391.633.316,00	1.336.633.316,00	69.152.599,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43 Unit	43 Unit	800.000.000,00	616.000.000,00	646.380.121,00	-153.619.879,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	80 Unit	0,00	101.570.000,00	101.570.000,00	101.570.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	460.000.000,00	410.350.000,00	-289.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	6.666.171.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-6.466.171.700,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																			
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				10 Unit	10 Unit	6.666.171.700,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-6.466.171.700,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	300 Ha	658.881.500,00	0,00	0,00	-658.881.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	1000 Ha	945.600.000,00	0,00	0,00	-945.600.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				10 Unit Manajemen	10 Unit Manajemen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	-				-	-	23.464.449.000,00	0,00	0,00	-23.464.449.000,00							0,00	
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	-				-	-	23.464.449.000,00	0,00	0,00	-23.464.449.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				90 Orang	90 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				5 Ha	5 Ha	23.294.449.000,00	0,00	0,00	-23.294.449.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
4.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				100 Kelompok	100 Kelompok	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	320.576.122,00	320.576.122,00	-279.423.878,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50000 Hektar	50000 Hektar	894.540.000,00	0,00	0,00	-894.540.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
5.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-				-	-	2.500.501.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-2.500.501.000,00							0,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	2.500.501.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-2.400.501.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				2 Lembaga	2 Lembaga	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.501.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.400.501.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00					0,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meringkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	10.000.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3	NON URUSAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-8.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	76.434.000,00	58.020.000,00	58.020.000,00	-18.414.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.589.928,00	105.003.928,00	105.003.928,00	66.414.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	600.000.000,00	424.026.302,00	424.026.302,00	-175.973.698,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-				-	-	1.700.000.000,00	402.000.000,00	1.002.000.000,00	-698.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih																			
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				2 Sertifikat	2 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih																			
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				10 Sertifikat	10 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit																			
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				20 Sertifikat	20 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																			
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																			
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				1000000 Batang	1000000 Batang	1.400.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	-998.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		0,00	DINAS KEHUTANAN	
		UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)								138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	398.160.027,00	142.829.629,00	142.829.629,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.180.000,00	42.180.000,00	27.858.167,00	-14.321.833,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	149.000.628,00	155.172.201,00	146.745.620,00	-2.255.008,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	34.100.000,00	-900.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	200.000.000,00	125.217.383,00	60.217.383,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				75 Ha	75 Ha	780.563.500,00	415.384.500,00	415.384.500,00	-365.179.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																				
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																				
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																				
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	1000 Ha	193.640.000,00	133.640.000,00	61.640.000,00	-132.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00			
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																				
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																				
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5 Unit	5 Unit	1.130.000.000,00	307.000.078,00	307.000.078,00	-822.999.922,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																				
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																				
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	5000 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN		
		UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)									138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00			
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00			
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00			
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN		
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.264.000,00	-4.736.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	47.815.700,00	31.160.000,00	11.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.470.000,00	4.683.000,00	-5.317.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	1.160.000,00	-2.320.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	291.597.686,00	106.121.000,00	106.121.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.920.000,00	37.920.000,00	33.750.000,00	-4.170.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.582.906,00	167.149.620,00	156.733.505,00	3.150.599,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	70.000.000,00	51.323.606,00	-13.676.394,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				75 Ha	75 Ha	798.414.000,00	429.235.000,00	429.235.000,00	-369.179.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																			
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	10 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1000 Ha	1000 Ha	160.580.000,00	100.580.000,00	4.795.000,00	-155.785.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	2 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	5000 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	5.100.000,00	-14.900.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	1.950.000,00	-8.050.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	0,00	271.256.548,00	97.673.844,00	97.673.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32.640.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.835.128,00	178.453.755,00	166.953.755,00	6.118.627,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	45.731.604,00	10.731.604,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	1 Ha	771.008.800,00	401.829.800,00	401.829.800,00	-369.179.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				3000 Ha	3000 Ha	171.600.000,00	111.600.000,00	0,00	-171.600.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	-				-	-	1.700.000.000,00	402.000.000,00	1.002.000.000,00	-698.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				-	0 Batang	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				10 Unit	10 Unit	1.130.000.000,00	384.000.000,00	783.100.000,00	-346.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				800 Hektar	800 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	915.000,00	-2.565.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	376.575.189,00	161.683.672,00	161.683.672,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3	NON URUSAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	114.930.000,00	114.930.000,00	95.494.000,00	-19.436.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	295.409.400,00	360.445.111,00	340.430.020,00	45.020.620,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	30.345.000,00	-4.655.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	5.500.000,00	-59.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00		-		Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00		-		Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	25 Ha	911.811.500,00	550.632.500,00	550.632.500,00	-361.179.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																			
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				83.191 Ha	83.191 Ha	257.720.000,00	161.720.000,00	49.720.000,00	-208.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				5000 Unit	2 Unit	1.730.000.000,00	266.000.000,00	496.000.000,00	-1.234.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	2 Kel/3500 Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.440.500,00	-559.500,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	46.068.000,00	43.988.000,00	23.988.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	-4.820.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	870.000,00	-2.610.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	256.469.586,00	84.739.743,00	84.739.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.279.600,00	63.279.600,00	59.219.932,00	-4.059.668,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	146.832.906,00	153.649.620,00	153.649.620,00	6.816.714,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	20.112.299,00	-44.887.701,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				125 Ha	125 Ha	732.790.000,00	363.611.000,00	363.611.000,00	-369.179.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				4 Ha	4 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				50 Ha	50 Ha	160.580.000,00	100.580.000,00	28.602.500,00	-131.977.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				1 Kelompok	1 Kelompok	100.000.000,00	13.400.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				2 Unit	2 Unit	1.130.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	-749.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																			
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				882 Hektar	882 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
		UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)									138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00		
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	997.000,00	-9.003.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	22.194.000,00	5.551.000,00	-14.449.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.447.758,00	-7.552.242,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	168.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	275.872.408,00	122.542.584,00	122.542.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34.200.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	2.400.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.335.128,00	163.649.620,00	156.649.620,00	5.314.492,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	34.100.000,00	-900.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	31.600.000,00	-33.400.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				135 Ha	100 Ha	732.790.000,00	367.611.000,00	367.611.000,00	-365.179.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				10 Ha	10 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	5000 Ha	171.600.000,00	104.700.000,00	27.000.000,00	-144.600.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok Kelompok	0 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				10 Unit	10 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	0 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	-3.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	298.442.800,00	134.299.260,00	134.299.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.728.536,00	31.728.536,00	28.185.402,00	-3.543.134,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	177.941.388,00	177.941.388,00	176.441.388,00	-1.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				600 Ha	600 Ha	750.640.500,00	381.461.500,00	381.461.500,00	-369.179.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				1 Jenis Ha	1 Jenis Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																			
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				100 Laporan	100 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				1 Ha	1 Ha	127.520.000,00	67.520.000,00	38.476.000,00	-89.044.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				100 Kelompok	100 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				20 Unit	20 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				50000 Hektar	50000 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
		UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00		
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	248.269.391,00	90.150.800,00	90.150.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	31.164.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	10.836.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	140.742.525,00	152.473.134,00	152.173.132,00	11.430.607,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	44.510.426,00	9.510.426,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	52.060.000,00	-12.940.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				10 Laporan	10 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				76767 Ha	76767 Ha	160.580.000,00	100.580.000,00	23.009.338,00	-137.570.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				3 Unit	3 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																			
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				6 Orang	6 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				3000 Hektar	3000 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
		UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)								138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00		
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00		
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	246.950.000,00	246.950.000,00	-503.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	1.295.000,00	-8.705.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	2.565.000,00	-915.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	0,00	318.950.258,00	135.184.229,00	135.184.229,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3	NON URUSAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.528.000,00	35.028.000,00	29.268.180,00	-8.259.820,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.262.906,00	180.262.906,00	175.762.906,00	-4.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	43.343.387,00	8.343.387,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	62.500.000,00	150.000.000,00	73.547.217,00	11.047.217,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00		
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	100 Ha	750.640.500,00	381.461.500,00	381.461.500,00	-369.179.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																			
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				2 Ha	2 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																			
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhlungan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				0 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	0 Ha	160.580.000,00	100.580.000,00	23.590.000,00	-136.990.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
2.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																			
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				3 Orang	3 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya</i>				2 Unit	2 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			<i>Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>				5.000 Hektar	4.036 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
		UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X DAN UNIT XI)							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00						0,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							138.198.964.754,00	72.537.600.775,00	67.473.763.143,00	-70.725.201.611,00							0,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	64.560.762.754,00	63.110.871.473,00	57.556.001.003,00	-64.560.762.754,00							0,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	24.008.000,00	12.904.000,00	-687.096.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.334.329.200,00	45.338.503.031,00	46.701.980.357,00	-2.632.348.843,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.297.063.088,00	9.736.211.991,00	4.469.072.036,00	2.172.008.948,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.500.000,00	5.363.668,00	-4.636.332,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	-3.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	445.933.286,00	165.669.979,00	165.669.979,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.885.416.466,00	4.184.383.951,00	4.007.592.911,00	122.176.445,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.406.796,00	26.406.796,00	24.564.000,00	-1.842.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	144.582.906,00	153.649.620,00	153.649.620,00	9.066.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.717.500.000,00	2.552.570.000,00	1.924.791.043,00	-1.792.708.957,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-				-	-	23.878.712.000,00	6.058.753.102,00	5.934.085.940,00	-23.878.712.000,00							0,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	800.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	-285.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	8.882.540.300,00	3.960.253.102,00	3.960.253.102,00	-4.922.287.198,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				0 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-				-	-	4.850.000.000,00	981.500.000,00	256.832.838,00	-4.593.167.162,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				0 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				0 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-23.794.540.000,00							0,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-				-	-	23.794.540.000,00	3.267.976.200,00	3.883.676.200,00	-19.910.863.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																			
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				0 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																			
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	5 Unit	1.130.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	-864.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																			
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																			
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				5000 Hektar	5000 Hektar	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			0,00	DINAS KEHUTANAN	
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00		
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00		
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	13.502.107.380,00	12.209.695.606,00	12.732.477.744,00	-327.107.380,00							13.175.000.000,00		
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	368.412.917,00	29.000.000,00	17.290.000,00	-351.122.917,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	113.608.600,00	29.000.000,00	17.290.000,00	-96.318.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	157.387.112,00	0,00	0,00	-157.387.112,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			130.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	97.417.205,00	0,00	0,00	-97.417.205,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.238.246.268,00	8.175.296.972,00	8.649.660.378,00	411.414.110,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.760.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan	8.005.171.268,00	8.016.836.972,00	8.429.660.378,00	424.489.110,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	158.460.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	33.075.000,00	0,00	0,00	-33.075.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	335.000.000,00	98.600.000,00	75.600.000,00	-259.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		380.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000,00	98.600.000,00	75.600.000,00	-9.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	378.945.000,00	0,00	0,00	-378.945.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		420.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				132 Paket	132 Paket	82.500.000,00	0,00	0,00	-82.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				62 Orang	9 Orang	246.445.000,00	0,00	0,00	-246.445.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			260.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.440.896.511,00	1.716.921.835,00	2.205.822.354,00	764.925.843,00			-	-	-		645.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	100.000.000,00	31.545.000,00	7.886.250,00	-92.113.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	46 Paket	180.000.000,00	151.337.000,00	0,00	-180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1000 Paket	15 Paket	0,00	85.862.100,00	44.765.600,00	44.765.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3		NON URUSAN							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				800 Paket	10 Paket	100.000.000,00	73.435.000,00	16.371.250,00	-83.628.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	910.896.511,00	0,00	0,00	-910.896.511,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	1.374.742.735,00	2.136.799.254,00	2.136.799.254,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	NON URUSAN							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							14.873.420.380,00	16.209.695.606,00	15.785.140.244,00	911.719.864,00							14.347.000.000,00	
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	270.638.000,00	76.398.200,00	24.947.000,00	-245.691.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		138.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	103.128.000,00	0,00	0,00	-103.128.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	6 Unit	167.510.000,00	76.398.200,00	24.947.000,00	-142.563.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.774.998.684,00	1.865.707.839,00	1.570.183.012,00	-204.815.672,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.830.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	8.125.000,00	-16.875.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	397.800.000,00	429.037.900,00	-20.962.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.299.998.684,00	1.457.907.839,00	1.133.020.112,00	-166.978.572,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	694.970.000,00	247.770.760,00	188.975.000,00	-505.995.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		602.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	154.350.000,00	-45.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	8 Unit	49.970.000,00	37.170.000,00	19.335.000,00	-30.635.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	30.020.760,00	0,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	29 Unit	125.000.000,00	30.580.000,00	15.290.000,00	-109.710.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-				-	-	284.148.000,00	0,00	0,00	35.852.000,00							320.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	84.148.000,00	0,00	0,00	-84.148.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	84.148.000,00	0,00	0,00	-84.148.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-				-	-	27.407.000,00	0,00	0,00	-5.407.000,00							22.000.000,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-				-	-	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		17.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			6.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-				-	-	5.407.000,00	0,00	0,00	-5.407.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.407.000,00	0,00	0,00	-5.407.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-				-	-	386.441.000,00	1.800.000.000,00	1.395.862.500,00	73.559.000,00							460.000.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-				-	-	386.441.000,00	1.800.000.000,00	1.395.862.500,00	1.009.421.500,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		460.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			<i>Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				1 unit	2 unit	36.441.000,00	1.800.000.000,00	1.395.862.500,00	1.359.421.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-				-	-	673.317.000,00	2.200.000.000,00	1.656.800.000,00	-303.317.000,00							370.000.000,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		270.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			270.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			<i>Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-				-	-	223.317.000,00	2.200.000.000,00	1.656.800.000,00	1.433.483.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				20 Keluarga	523 Keluarga	70.000.000,00	2.200.000.000,00	1.656.800.000,00	1.586.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.317.000,00	0,00	0,00	-153.317.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00						33.570.277.471,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							24.830.291.996,00	24.349.082.150,86	22.036.016.310,00	-2.794.275.686,00							25.746.287.031,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	20.246.264.047,00	21.137.361.644,86	18.948.432.461,00	295.653.724,00							20.541.917.771,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 %	85 %	190.756.000,00	22.292.000,00	11.146.000,00	-179.610.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		311.287.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	28.220.000,00	6.432.000,00	3.216.000,00	-25.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	7.320.000,00	3.660.000,00	-20.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			26.287.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	51.230.000,00	8.540.000,00	4.270.000,00	-46.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0 Berita Acara	87.306.000,00	0,00	0,00	-87.306.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum				12 bulan	12 bulan	13.594.690.876,00	13.946.764.335,00	14.378.481.983,00	783.791.107,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		14.213.354.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	13.185.063.976,00	13.557.044.335,00	13.994.801.983,00	809.738.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			13.808.005.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	398.688.500,00	389.720.000,00	383.680.000,00	-15.008.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			393.864.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	0 Laporan	10.938.400,00	0,00	0,00	-10.938.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			11.485.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	45.617.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-42.617.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		121.957.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			77.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	39.617.000,00	0,00	0,00	-39.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			41.597.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disipln dan kapasitas sumber daya aparatur				60 %	60 %	350.011.116,00	30.527.327,99	15.263.664,00	-334.747.452,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		359.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	69.750.000,00	0,00	0,00	-69.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			69.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				165 Orang	3 Orang	280.261.116,00	30.527.327,99	15.263.664,00	-264.997.452,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			290.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.734.921.403,00	3.785.283.441,87	1.905.623.785,00	170.702.382,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.019.152.121,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.149.000,00	20.149.000,00	5.028.000,00	-15.121.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			20.546.461,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	165.429.600,00	3.300.000,00	0,00	-165.429.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			62.269.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				49 Paket	42 Paket	159.310.000,00	275.796.500,00	91.476.000,00	-67.834.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			97.209.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	9 Paket	42.450.000,00	70.321.800,00	50.652.800,00	8.202.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			59.705.560,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	33 Dokumen	7.350.000,00	7.350.000,00	5.390.000,00	-1.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			7.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	50 Laporan	1.241.213.903,00	3.307.217.941,87	1.724.053.285,00	482.839.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			644.070.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	478.868.044,00	100.692.184,00	50.041.380,00	-428.826.664,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		471.963.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	64.813.600,00	81.594.800,00	0,00	-64.813.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			65.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	5 Unit	261.462.200,00	0,00	50.041.380,00	-211.420.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			278.655.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	2.420.580.818,00	2.559.134.656,00	2.325.284.649,00	-95.296.169,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.555.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			12.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	274.280.000,00	275.049.000,00	195.574.000,00	-78.706.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			274.280.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.853.000.818,00	1.997.963.756,00	1.894.876.649,00	41.875.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.945.682.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.430.818.790,00	689.667.700,00	259.591.000,00	-1.171.227.790,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.488.792.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	287.120.000,00	287.120.000,00	168.180.000,00	-118.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			320.990.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				112 Unit	63 Unit	86.840.000,00	86.840.000,00	47.915.000,00	-38.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			97.340.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	356.601.518,00	82.000.000,00	0,00	-356.601.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			356.601.518,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	330.295.672,00	0,00	0,00	-330.295.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			341.095.672,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata				5.720 jumlah usaha	5.720 jumlah usaha	186.585.000,00	0,00	0,00	21.846.000,00							208.431.000,00	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan elektronik				1 dokumen	0 dokumen	130.963.000,00	0,00	0,00	-130.963.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		139.021.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	130.963.000,00	0,00	0,00	-130.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			139.021.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-				-	-	55.622.000,00	0,00	0,00	-55.622.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		69.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	0 Dokumen	55.622.000,00	0,00	0,00	-55.622.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			69.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi				6.5 %	6.5 %	397.807.000,00	0,00	0,00	19.055.000,00							416.862.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota				19 kab/kota	19 kab/kota	397.807.000,00	0,00	0,00	-397.807.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		416.862.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				70 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			258.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas																		
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				50 Orang	0 Orang	47.807.000,00	0,00	0,00	-47.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			58.862.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				6 %	6 %	533.998.500,00	0,00	0,00	25.878.000,00							559.876.500,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor				1 laporan	1 laporan	40.580.000,00	0,00	0,00	-40.580.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	0 Laporan	40.580.000,00	0,00	0,00	-40.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota				19 kab/kota	0 kab/kota	402.931.500,00	0,00	0,00	-402.931.500,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		428.809.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	129.444.000,00	0,00	0,00	-129.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			142.383.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				11 Laporan	0 Laporan	273.487.500,00	0,00	0,00	-273.487.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			286.426.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota				19 kab/kota	0 kab/kota	90.487.000,00	0,00	0,00	-90.487.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		90.487.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	0 Laporan	90.487.000,00	0,00	0,00	-90.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			90.487.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor				1.507,97 juta US\$	1.507,97 juta US\$	155.375.000,00	0,00	0,00	156.089.000,00							311.464.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi				4 kali	0 kali	155.375.000,00	0,00	0,00	-155.375.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		311.464.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	155.375.000,00	0,00	0,00	-155.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			311.464.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan				90 %	90 %	3.209.824.293,00	1.694.043.960,00	1.618.634.649,00	174.306.907,00							3.384.131.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan				350 orang	150 orang	2.490.053.500,00	1.476.502.000,00	1.435.124.000,00	-1.054.929.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.490.053.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				8 BPSK	8 BPSK	1.946.703.000,00	1.476.502.000,00	1.435.124.000,00	-511.579.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.946.703.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen																		
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				10 LPKSM	0 LPKSM	48.219.500,00	0,00	0,00	-48.219.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			48.219.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																		
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				80 Pengaduan	0 Pengaduan	495.131.000,00	0,00	0,00	-495.131.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			495.131.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan				19 kab/kota	19 kab/kota	248.117.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	-246.967.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		288.650.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				2 Laporan	2 Laporan	248.117.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	-246.967.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			288.650.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran				5 %	5 %	642.919.000,00	1.949.250.110,00	1.644.635.000,00	250.358.000,00							893.277.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan				8 kali	2 kali	266.899.000,00	232.580.000,00	208.720.000,00	-58.179.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		510.037.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				12 UMKM	11 UMKM	266.899.000,00	232.580.000,00	208.720.000,00	-58.179.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			510.037.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pemasaran produk UMKM Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan				-	5 kali	376.020.000,00	1.716.670.110,00	1.435.915.000,00	1.059.895.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku usaha		383.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				500 UMKM	549 UMKM	376.020.000,00	1.716.670.110,00	1.435.915.000,00	1.059.895.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			383.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.268.435.744,00	6.948.761.690,14	5.305.358.177,00	-1.963.077.567,00							7.823.990.440,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan				25 Sentra	25 Sentra	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	486.909.100,00							6.973.626.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri				2715 IKM dan orang	973 IKM dan orang	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	-1.528.638.523,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		6.973.626.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				13 Dokumen	26 Dokumen	4.670.615.000,00	5.253.708.793,00	4.223.252.546,00	-447.362.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			4.904.145.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUi				78 %	78 %	166.614.000,00	19.140.000,00	16.714.000,00	22.978.000,00							189.592.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah aparat dan pelaku industri yang mendapatkan bintek IUI dan pengawasan				100 orang	50 orang	166.614.000,00	19.140.000,00	16.714.000,00	-149.900.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		189.592.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	166.614.000,00	19.140.000,00	16.714.000,00	-149.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			189.592.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri				47.673 unit usaha	47.673 unit usaha	72.624.000,00	177.170.000,00	154.880.000,00	18.476.000,00							91.100.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat				30 buku	40 buku	72.624.000,00	177.170.000,00	154.880.000,00	82.256.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		91.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	72.624.000,00	177.170.000,00	154.880.000,00	82.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			91.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD LOGAM								32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00						33.570.277.471,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							24.830.291.996,00	24.349.082.150,86	22.036.016.310,00	-2.794.275.686,00							25.746.287.031,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	20.246.264.047,00	21.137.361.644,86	18.948.432.461,00	295.653.724,00							20.541.917.771,00	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	478.868.044,00	100.692.184,00	50.041.380,00	-428.826.664,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		471.963.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	15.075.000,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			43.962.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	NON URUSAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							24.830.291.996,00	24.349.082.150,86	22.036.016.310,00	-2.794.275.686,00							25.746.287.031,00	
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.268.435.744,00	6.948.761.690,14	5.305.358.177,00	-1.963.077.567,00							7.823.990.440,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.734.921.403,00	3.785.283.441,87	1.905.623.785,00	170.702.382,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.019.152.121,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	9.795.000,00	9.795.000,00	2.430.000,00	-7.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			9.795.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	17 Paket	10.000.000,00	19.669.300,00	5.615.700,00	-4.384.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	4 Paket	7.366.700,00	18.705.100,00	5.595.000,00	-1.771.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			7.366.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	9 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	-405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.620.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>				12 bulan	12 bulan	2.420.580.818,00	2.559.134.656,00	2.325.284.649,00	-95.296.169,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.555.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	94.200.000,00	87.062.900,00	66.594.000,00	-27.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			94.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>				12 bulan	12 bulan	1.430.818.790,00	689.667.700,00	259.591.000,00	-1.171.227.790,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.488.792.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				27 Unit	9 Unit	29.780.000,00	29.780.000,00	7.760.000,00	-22.020.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			29.845.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0 Unit	138.400.000,00	0,00	0,00	-138.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			138.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan				25 Sentra	25 Sentra	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	486.909.100,00							6.973.626.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri</i>				45 IKM dan orang	80 IKM dan orang	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	-1.528.638.523,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		6.973.626.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	827.514.900,00	866.065.392,00	624.726.392,00	-202.788.508,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			943.775.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00						33.570.277.471,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.268.435.744,00	6.948.761.690,14	5.305.358.177,00	-1.963.077.567,00							7.823.990.440,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	20.246.264.047,00	21.137.361.644,86	18.948.432.461,00	295.653.724,00							20.541.917.771,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tertib administrasi umum</i>				12 bulan	12 bulan	1.734.921.403,00	3.785.283.441,87	1.905.623.785,00	170.702.382,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.019.152.121,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	0 Paket	1.957.200,00	1.165.200,00	0,00	-1.957.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			8.993.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	0 Paket	17.661.300,00	0,00	0,00	-17.661.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			28.880.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	0 Paket	7.813.300,00	5.328.900,00	0,00	-7.813.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			12.913.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	450.000,00	14.853.000,00	2.620.100,00	2.170.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			6.881.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	2.424.000,00	0,00	0,00	-2.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.620.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	478.868.044,00	100.692.184,00	50.041.380,00	-428.826.664,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		471.963.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	72.641.744,00	1.596.464,00	0,00	-72.641.744,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			35.828.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	2.420.580.818,00	2.559.134.656,00	2.325.284.649,00	-95.296.169,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.555.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.300.000,00	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.430.818.790,00	689.667.700,00	259.591.000,00	-1.171.227.790,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.488.792.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	8 Unit	13.290.000,00	13.290.000,00	5.080.000,00	-8.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			13.330.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.781.600,00	171.407.700,00	21.476.000,00	-56.305.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan				25 Sentra	25 Sentra	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	486.909.100,00							6.973.626.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri				320 IKM dan orang	50 IKM dan orang	6.486.716.900,00	6.320.878.126,14	4.958.078.377,00	-1.528.638.523,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		6.973.626.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				6 Dokumen	1 Dokumen	988.587.000,00	201.103.941,14	110.099.439,00	-878.487.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.125.706.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00						33.570.277.471,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							32.098.727.740,00	31.297.843.841,00	27.341.374.487,00	-4.757.353.253,00							33.570.277.471,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							24.830.291.996,00	24.349.082.150,86	22.036.016.310,00	-2.794.275.686,00							25.746.287.031,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	20.246.264.047,00	21.137.361.644,86	18.948.432.461,00	295.653.724,00							20.541.917.771,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.734.921.403,00	3.785.283.441.87	1.905.623.785,00	170.702.382,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.019.152.121,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	8.993.000,00	5.047.300,00	1.261.000,00	-7.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			8.993.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	18 Paket	14.518.400,00	14.824.300,00	4.297.600,00	-10.220.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			14.518.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	9.300.000,00	8.520.100,00	4.774.300,00	-4.525.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			9.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	1.215.000,00	-405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.620.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	478.868.044,00	100.692.184,00	50.041.380,00	-428.826.664,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		471.963.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	48.101.600,00	2.425.920,00	0,00	-48.101.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			48.417.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	2.420.580.818,00	2.559.134.656,00	2.325.284.649,00	-95.296.169,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		2.555.662.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.200.000,00	900.000,00	-800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			1.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	137.100.000,00	137.559.000,00	110.040.000,00	-27.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			137.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum				12 bulan	12 bulan	1.430.818.790,00	689.667.700,00	259.591.000,00	-1.171.227.790,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.488.792.190,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	14 Unit	30.710.000,00	19.230.000,00	9.180.000,00	-21.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			31.190.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku				26 %	26 %	3.209.824.293,00	1.694.043.960,00	1.618.634.649,00	174.306.907,00							3.384.131.200,00		
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi				19 kab/kota	19 kab/kota	471.653.793,00	215.241.960,00	182.360.649,00	-289.293.144,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		605.427.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi																			
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				750 Sertifikat	1391 Sertifikat	117.731.200,00	43.271.627,00	39.078.870,00	-78.652.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			177.631.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				300 laporan	300 laporan	265.079.630,00	97.670.908,00	73.911.181,00	-191.168.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			335.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			Jumlah produk potensial yang dipantau				7 Produk	7 Produk	88.842.963,00	74.299.425,00	69.370.598,00	-19.472.365,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital			92.146.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BIRO UMUM							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00						213.613.176.898,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				84,55 100 90,20 80 84,55 Nilai % Persen % Nilai	100 %	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	38.973.000,00	4.880.000,00	-95.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	73.481.820,00	8.582.000,00	0,00	-73.481.820,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			73.481.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	73.481.820,00	8.903.000,00	0,00	-73.481.820,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			73.481.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				400 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan	47.291.284.809,00	56.770.020.770,00	60.034.241.634,00	12.742.956.825,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			55.066.098.376,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	530.271.189,00	1.198.536.000,00	1.166.130.000,00	635.858.811,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			530.271.189,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	104.726.196,00	31.650.000,00	15.705.000,00	-89.021.196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			97.424.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	447.250.000,00	620.347.149,00	620.347.149,00	173.097.149,00	Kota Bukittinggi, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			422.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	104.726.196,00	31.650.000,00	15.705.000,00	-89.021.196,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			104.726.196,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	32.364.561,00	0,00	0,00	-32.364.561,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.364.561,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	32.364.561,00	0,00	0,00	-32.364.561,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			32.364.561,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				582 Paket	582 Paket	436.500.000,00	0,00	0,00	-436.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			437.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	308.743.087,00	21.400.000,00	47.500.000,00	-261.243.087,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			308.743.087,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	30 Paket	85.376.400,00	97.810.400,00	72.493.600,00	-12.882.800,00	Kab. Padang Pariaman, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.233.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	255.699.600,00	680.917.750,00	955.905.750,00	700.206.150,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	30 Paket	440.879.240,00	3.010.403.810,00	2.218.625.110,00	1.777.745.870,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	576.503.400,00	865.101.300,00	726.318.650,00	149.815.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			576.503.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	179.112.600,00	238.625.000,00	148.000.000,00	-31.112.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			179.112.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.058.000,00	49.920.000,00	22.400.000,00	-27.658.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.058.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	9.987.473.082,00	5.773.094.431,00	2.832.774.816,00	-7.154.698.266,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	1 Dokumen	52.826.332,00	28.009.000,00	13.970.000,00	-38.856.332,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	5.000.000.000,00	7.306.915.000,00	5.576.915.000,00	576.915.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	7 Unit	2.491.755.000,00	3.978.836.000,00	6.042.152.000,00	3.550.397.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.439.716.625,00	1.197.510.625,00	1.019.510.625,00	-420.206.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	40 Unit	700.000.000,00	526.244.380,00	586.510.280,00	-113.489.720,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	12 Laporan	51.996.100,00	6.012.000,00	3.542.000,00	-48.454.100,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.269.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.045.709.480,00	4.885.718.960,00	4.289.343.560,00	-756.365.920,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.245.709.480,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.190.100.000,00	1.177.560.000,00	1.115.960.000,00	-74.140.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.224.687.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.120.952.284,00	15.660.721.249,00	15.765.290.858,00	1.644.338.574,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	230.982.000,00	230.982.000,00	189.082.000,00	-41.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			230.982.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	1.503.976.141,00	1.509.019.030,00	1.257.469.015,00	-246.507.126,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	50 Unit	62.950.000,00	60.500.000,00	15.000.000,00	-47.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	150 Unit	295.935.878,00	277.170.878,00	134.150.000,00	-161.785.878,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	5.358.426.256,00	7.037.952.830,00	7.241.459.250,00	1.883.032.994,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10 Unit	380.840.953,00	366.376.453,00	190.590.726,00	-190.250.227,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			380.840.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	4.206.097.192,00	4.839.222.309,00	4.839.222.309,00	633.125.117,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.595.734.246,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	252.244.496,00	252.244.496,00	252.244.496,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			252.244.496,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	10 Paket	246.410.000,00	245.895.000,00	245.895.000,00	-515.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			243.489.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	3.607.442.696,00	4.241.082.813,00	4.241.082.813,00	633.640.117,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumaha-tanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	20.463.170.512,00	19.988.249.454,00	15.717.878.319,00	-4.745.292.193,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	20 Paket	9.605.152.136,00	9.559.754.036,00	7.378.609.724,00	-2.226.542.412,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	20 Paket	7.569.708.005,00	7.737.721.905,00	5.877.232.032,00	-1.692.475.973,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				15 Paket	10 Paket	3.288.310.371,00	2.690.773.513,00	2.462.036.563,00	-826.273.808,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN								195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00						213.613.176.898,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				100 Persen	100 Persen	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				85 Persen	85 Persen	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	213.577.880,00	145.200.000,00	68.100.000,00	-145.477.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	14.639.600,00	0,00	0,00	-14.639.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.142.700,00	0,00	0,00	-13.142.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.288.200,00	0,00	0,00	-10.288.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.862.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	- Dokumen	144.334.200,00	0,00	0,00	-144.334.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			168.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	36.785.800,00	28.950.000,00	21.925.000,00	-14.860.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			34.528.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.063.000,00	0,00	0,00	-19.063.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.312.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				450 Dokumen	450 Dokumen	206.030.200,00	155.456.000,00	58.022.000,00	-148.008.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.717.569,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				125 Orang	8 Orang	270.170.800,00	96.747.800,00	12.540.000,00	-257.630.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			316.780.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	49.811.000,00	0,00	0,00	-49.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	127.192.600,00	196.629.200,00	146.697.300,00	19.504.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			133.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.480.000,00	92.064.300,00	306.034.650,00	277.554.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	322.728.000,00	322.728.000,00	241.935.000,00	-80.793.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	3.579.305.024,00	3.428.132.025,00	3.040.075.171,00	-539.229.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.856.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			234.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan				100 Persen	100 Persen	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	0,00	0,00	129.785.600,00	129.785.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			920.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.837.600,00	0,00	0,00	-4.837.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	36.960.000,00	123.731.000,00	24.825.000,00	-12.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	26.219.900,00	18.800.000,00	8.650.000,00	-17.569.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.779.000,00	58.779.000,00	58.573.200,00	-205.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			62.579.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	1.735.257.775,00	1.752.301.546,00	1.742.301.546,00	7.043.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.899.114.468,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				100 Persen	100 Persen	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	11 Unit	325.510.000,00	328.710.000,00	172.905.000,00	-152.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.628.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	31.980.000,00	31.980.000,00	18.680.000,00	-13.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.232.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	12.232.100,00	0,00	0,00	-12.232.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Optimalisasi Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan				100 Persen	100 Persen	5.123.436.000,00	4.362.276.200,00	1.294.124.000,00	-3.829.312.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		4.934.796.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				295 Dokumen	295 Dokumen	398.853.728,00	510.583.328,00	9.510.000,00	-389.343.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			472.512.612,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				102 Laporan	102 Laporan	2.992.200.000,00	2.553.457.300,00	1.082.144.000,00	-1.910.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.900.574.136,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				255 Laporan	255 Laporan	1.732.382.272,00	1.298.235.572,00	202.470.000,00	-1.529.912.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.561.709.367,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan yang difasilitasi dengan baik				100 Persen	100 Persen	9.971.817.621,00	9.554.114.929,00	6.696.768.000,00	-3.275.049.621,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Administrasi Pimpinan		10.695.882.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				24 Laporan	24 Laporan	1.370.000.000,00	1.369.579.000,00	646.475.000,00	-723.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.423.451.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.682.693.650,00	7.300.214.358,00	6.046.813.000,00	-1.635.880.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.275.433.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				24 Laporan	24 Laporan	919.123.971,00	884.321.571,00	3.480.000,00	-915.643.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			996.996.166,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00					213.613.176.898,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 persen	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah				-	100 persen	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	86.884.000,00	18.280.000,00	13.984.000,00	-72.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	34.205.000,00	13.328.000,00	2.440.000,00	-31.765.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	13.384.000,00	8.504.000,00	-11.496.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4 Laporan	30.269.000,00	4.880.000,00	0,00	-30.269.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-5.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.103.800,00	0,00	0,00	-17.103.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	undefined undefined	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	78 Paket	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	7 Orang	100.000.000,00	20.300.000,00	13.350.000,00	-86.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	50.000.000,00	0,00	122.781.620,00	72.781.620,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1500 Paket	6 Paket	60.000.000,00	84.155.000,00	23.679.200,00	-36.320.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1500 Paket	1 Paket	60.003.200,00	64.735.000,00	41.675.000,00	-18.328.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	21.960.000,00	0,00	0,00	-21.960.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	80 Laporan	750.000.000,00	1.112.146.260,00	980.975.000,00	230.975.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	159.400.000,00	0,00	284.400.000,00	125.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.000.000,00	4.750.000,00	-5.250.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	4.050.000,00	3.787.500,00	-11.212.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	89.758.756,00	89.758.756,00	-241.244,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00	-32.810.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	-23.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	14 Unit	47.880.000,00	9.540.000,00	21.670.000,00	-26.210.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Usulan Gubernur Tentang Penegasan Batas Daerah Rekomendasi Kebijakan Tentang Implementasi SPM Kepada Pengambil Kebijakan				-	100 1 Persen Dokumen	3.784.762.984,00	475.852.984,00	743.027.484,00	565.237.016,00							4.350.000.000,00		
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.				-	100 persen	1.334.762.984,00	267.581.984,00	246.478.484,00	-1.088.284.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	34.674.000,00	17.177.500,00	-482.822.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	2 Dokumen	486.427.984,00	215.827.984,00	212.167.984,00	-274.260.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4 Dokumen	8 Dokumen	348.335.000,00	17.080.000,00	17.133.000,00	-331.202.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah				-	100 persen	1.200.000.000,00	110.393.000,00	237.272.000,00	-962.728.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				6 Dokumen	20 Dokumen	350.000.000,00	80.148.000,00	61.872.000,00	-288.128.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				19 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	19.570.000,00	157.200.000,00	-192.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	10.675.000,00	18.200.000,00	-481.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah				-	undefined undefined	1.250.000.000,00	97.878.000,00	259.277.000,00	-990.723.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																			
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	46.688.000,00	139.422.000,00	-460.578.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																			
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	20.130.000,00	19.017.000,00	-230.983.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	31.060.000,00	100.838.000,00	-299.162.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00					213.613.176.898,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	3.660.000,00	1.020.000,00	-38.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.887.000,00	0,00	0,00	-5.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	18.040.000,00	0,00	0,00	-18.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 orang/12 bulan Dokumen	5 orang/12 bulan Dokumen	120.337.500,00	102.960.000,00	0,00	-120.337.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.661.000,00	0,00	0,00	-13.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.077.000,00	0,00	0,00	-11.077.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 bulan Orang	12 bulan Orang	120.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 unit Paket	9 unit Paket	36.383.800,00	5.903.300,00	11.806.600,00	-24.577.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 unit Paket	3 unit Paket	44.115.000,00	8.823.000,00	35.791.500,00	-8.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	31.822.200,00	104.586.900,00	104.565.900,00	72.743.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.446.400,00	25.054.200,00	25.054.200,00	12.607.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	3.020.000,00	0,00	0,00	-3.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	419.480.941,00	1.015.989.465,70	635.005.678,00	215.524.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	604.500,00	0,00	0,00	-604.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 unit Paket	12 unit Paket	24.247.800,00	0,00	1.000.000,00	-23.247.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	112.504.500,00	0,00	141.473.400,00	28.968.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	2.264.000,00	1.480.000,00	370.000,00	-1.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 unit Laporan	15 unit Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 orang Laporan	3 orang Laporan	118.681.407,00	199.638.134,00	199.638.134,00	80.956.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	163.502.552,00	84.640.000,00	83.490.000,00	-80.012.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	22.050.000,00	23.630.000,00	23.630.000,00	1.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			36.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-				-	-	2.122.360.577,00	386.135.000,00	392.345.000,00	522.639.423,00							2.645.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	660.330.937,00	51.240.000,00	45.025.000,00	-615.305.937,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		890.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	153.412.000,00	36.600.000,00	38.925.000,00	-114.487.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	277.306.600,00	7.320.000,00	3.660.000,00	-273.646.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	12 Laporan	229.612.337,00	7.320.000,00	2.440.000,00	-227.172.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-				-	-	835.000.000,00	231.660.000,00	216.660.000,00	-618.340.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		975.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	229.220.000,00	214.220.000,00	-235.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	260.000.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-258.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				13 Laporan	13 Laporan	125.000.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-123.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	627.029.640,00	103.235.000,00	130.660.000,00	-496.369.640,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				135 Orang	135 Orang	142.519.000,00	52.980.000,00	98.950.000,00	-43.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	197.251.500,00	21.490.000,00	21.340.000,00	-175.911.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	287.259.140,00	28.765.000,00	10.370.000,00	-276.889.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00						213.613.176.898,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	21.562.100,00	17.756.100,00	5.300.000,00	-16.262.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	3.184.000,00	809.000,00	0,00	-3.184.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.005.000,00	1.263.500,00	0,00	-10.005.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	89.052.000,00	0,00	0,00	-89.052.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.529.400,00	1.601.500,00	0,00	-2.529.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.400.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.032.400,00	1.000.000,00	0,00	-1.032.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	15.000.000,00	69.981.000,00	6.649.820,00	-8.350.180,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.150.000,00	18.200.000,00	2.500.000,00	-12.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	20.000.300,00	48.695.200,00	59.583.900,00	39.583.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.002.000,00	16.170.000,00	7.666.700,00	664.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	60 Laporan	1.212.652.420,00	1.069.733.120,00	727.587.930,00	-485.064.490,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			248.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.391.600,00	19.970.700,00	0,00	-4.391.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	35.691.680,00	48.949.480,00	0,00	-35.691.680,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.005.000,00	105.000,00	-1.395.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	44.090.000,00	44.090.000,00	24.195.000,00	-19.895.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				17 Unit	17 Unit	5.520.000,00	10.470.000,00	5.235.000,00	-285.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.818.835.100,00	611.005.400,00	103.376.000,00	1.156.164.900,00							2.975.000.000,00		
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-				-	-	485.264.100,00	185.772.500,00	60.769.000,00	-424.495.100,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		840.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	309.444.100,00	88.872.100,00	9.896.000,00	-299.548.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	175.820.000,00	96.900.400,00	50.873.000,00	-124.947.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-				-	-	388.824.000,00	186.925.900,00	323.000,00	-388.501.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	213.146.000,00	70.892.100,00	323.000,00	-212.823.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	85.688.000,00	52.608.000,00	0,00	-85.688.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	1 Dokumen	89.990.000,00	63.425.800,00	0,00	-89.990.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-				-	-	944.747.000,00	238.307.000,00	42.284.000,00	-902.463.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.455.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	305.410.000,00	58.012.600,00	16.904.000,00	-288.506.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	142.036.000,00	26.702.600,00	5.650.000,00	-136.386.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.925.000,00	6.665.600,00	0,00	-250.925.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	111.188.000,00	72.880.600,00	19.730.000,00	-91.458.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			245.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	135.188.000,00	74.045.600,00	0,00	-135.188.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00					213.613.176.898,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	28.623.000,00	13.762.800,00	4.792.000,00	-23.831.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			38.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.911.600,00	43.538.700,00	18.450.000,00	9.538.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.255.800,00	83.871.500,00	37.601.000,00	26.345.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			12.255.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	152.500.000,00	4.099.400,00	1.185.000,00	-151.315.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.539.300,00	28.808.900,00	9.600.000,00	-939.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			11.539.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.199.600,00	3.007.000,00	0,00	-7.199.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			7.599.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	5.369.000,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			3.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	70.200.000,00	30.167.000,00	5.000.000,00	-65.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00		-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	58.168.600,00	329.905.900,00	119.463.093,00	61.294.493,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	39.017.000,00	11.900.000,00	2.975.000,00	-36.042.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	106.645.540,00	4.134.194.952,00	3.223.692.452,00	3.117.046.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	29.500.560,00	96.650.220,00	0,00	-29.500.560,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			33.351.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	12.100.000,00	21.800.000,00	9.450.000,00	-2.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			12.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	132.300.000,00	158.632.000,00	79.316.000,00	-52.984.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12.580.000,00	4.260.000,00	2.130.000,00	-10.450.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar				undefined 13 6 undefined Lembaga dokumen undefined	13 6 undefined Lembaga dokumen undefined	24.522.927.000,00	16.562.003.628,00	36.590.920.018,00	-11.915.000.000,00							12.607.927.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya fasilitasi pembinaan mental spiritual				100 %	100 %	21.357.927.000,00	14.813.033.728,00	35.024.186.618,00	13.666.259.618,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		10.457.927.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	2.900.000.000,00	2.292.354.400,00	2.174.555.214,00	-725.444.786,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			3.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				100 Lembaga	100 Lembaga	18.457.927.000,00	12.520.679.328,00	32.849.631.404,00	14.391.704.404,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			7.357.927.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 %	100 %	2.415.000.000,00	1.373.251.500,00	1.403.755.000,00	-1.011.245.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.015.000.000,00	1.241.990.000,00	1.323.355.000,00	-691.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	44.961.500,00	17.760.000,00	-182.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	86.300.000,00	62.640.000,00	-137.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				100 %	100 %	750.000.000,00	375.718.400,00	162.978.400,00	-587.021.600,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	-		1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	224.655.000,00	84.577.500,00	-165.422.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	91.113.400,00	52.225.900,00	-197.774.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	59.950.000,00	26.175.000,00	-223.825.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO HUKUM							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00					213.613.176.898,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	33.000.000,00	8.326.000,00	2.135.000,00	-30.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	1.056.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	1.056.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 orang/ Dokumen	5 orang/ Dokumen	95.160.000,00	0,00	0,00	-95.160.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.192.000,00	7.320.000,00	3.660.000,00	-3.532.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 unit/ Dokumen	2 Dokumen	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.863.500,00	0,00	0,00	-5.863.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	2.076.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	10 Orang	189.600.000,00	107.000.000,00	46.000.000,00	-143.600.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Unit/ Paket	2 Paket	24.998.750,00	5.306.550,00	0,00	-24.998.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Unit/ Paket	1 Paket	21.588.000,00	24.765.000,00	9.470.000,00	-12.118.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	27.193.400,00	149.020.600,00	31.978.300,00	4.784.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	8 Paket	25.000.000,00	170.008.000,00	42.502.000,00	17.502.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Jenis/ Dokumen	6 Dokumen	24.900.000,00	24.900.000,00	18.675.000,00	-6.225.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	100 Laporan	1.560.093.170,00	808.934.770,00	748.563.045,00	-811.530.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			464.669.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	2.000.000,00	3.408.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	16 Unit	67.742.180,00	199.199.080,00	146.171.840,00	78.429.660,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 rekening/12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	4.400.000,00	4.200.000,00	3.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				100 %	100 %	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	7 Unit	69.490.000,00	69.490.000,00	38.045.000,00	-31.445.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12 Unit	9.810.000,00	9.810.000,00	4.905.000,00	-4.905.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum				90 %	90 %	1.220.939.000,00	387.624.000,00	298.413.000,00	1.091.721.000,00							2.312.660.000,00		
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi				100 % 90 %	100 % 90 %	753.588.000,00	164.234.000,00	78.968.000,00	-674.620.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		1.455.716.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																			
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				65 perda dan pergub/ Dokumen	65 Dokumen	310.051.000,00	52.104.000,00	25.577.000,00	-284.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				800 kepgub/ Dokumen	800 Dokumen	31.000.000,00	8.424.000,00	4.212.000,00	-26.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.716.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				160 buku/ Dokumen	160 Dokumen	108.087.000,00	13.044.000,00	4.323.000,00	-103.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				80 rancangan PHD/ Dokumen	80 Dokumen	304.450.000,00	90.662.000,00	44.856.000,00	-259.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi Persentase fasilitasi bantuan hukum				100 % 90 %	100 % 90 %	467.351.000,00	223.390.000,00	219.445.000,00	-247.906.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Daerah, dan Masyarakat		856.944.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				7 perkara/ Kasus	7 Kasus	352.194.000,00	161.350.000,00	158.425.000,00	-193.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			656.944.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				8 bantuan hukum/ Kasus	8 Kasus	115.157.000,00	62.040.000,00	61.020.000,00	-54.137.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI								195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00						213.613.176.898,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				-	100 %	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				-	85 %	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.490.000,00	0,00	0,00	-14.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.660.000,00	0,00	0,00	-9.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	15.943.300,00	7.660.000,00	3.660.000,00	-12.283.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	95.760.000,00	0,00	0,00	-95.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrtasi Barang Milik Daerah				-	100 %	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Daerah</i>				-	100 %	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	2 Orang	150.349.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	-142.849.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	112.289.485,00	0,00	0,00	-112.289.485,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	187.578.000,00	86.142.500,00	0,00	-187.578.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3 Paket	11.407.500,00	87.140.300,00	22.020.600,00	10.613.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	34.020.000,00	38.424.000,00	9.605.800,00	-24.414.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	200 Laporan	1.156.250.000,00	1.079.829.141,00	540.039.570,00	-616.210.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	100 %	10.445.242.045,00	13.647.612.885,00	13.952.743.745,00	3.507.501.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.085.311.120,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	198.565.000,00	94.195.500,00	0,00	-198.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	20 Unit	138.929.500,00	55.410.900,00	0,00	-138.929.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	84.269.073,00	85.682.009,00	85.682.009,00	1.412.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik				-	100 %	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4 Unit	71.500.000,00	71.500.000,00	38.950.000,00	-32.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	22 Unit	40.000.000,00	19.360.000,00	9.620.000,00	-30.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran				-	100 %	1.786.405.200,00	350.355.650,00	193.267.501,00	-1.786.405.200,00							0,00		
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Ketentuan				-	100 %	573.188.150,00	154.972.000,00	89.424.000,00	-483.764.150,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	145.784.750,00	30.200.000,00	15.036.000,00	-130.748.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	245.225.200,00	82.372.000,00	53.188.000,00	-192.037.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				0 0	1 0	182.178.200,00	42.400.000,00	21.200.000,00	-160.978.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General				-	94 Nilai	1.213.217.050,00	195.383.650,00	103.843.501,00	-1.109.373.549,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	227.462.200,00	60.020.000,00	26.176.800,00	-201.285.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	207.505.000,00	59.300.000,00	27.718.000,00	-179.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	1 Laporan	103.480.750,00	52.578.650,00	36.124.925,00	-67.355.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	196.994.700,00	10.675.000,00	7.418.776,00	-189.575.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	477.774.400,00	12.810.000,00	6.405.000,00	-471.369.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00					213.613.176.898,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							195.111.171.872,00	192.815.405.777,70	195.597.978.405,00	486.806.533,00							213.613.176.898,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	157.269.855.011,00	173.730.386.115,70	157.124.559.902,00	29.212.734.887,00							186.482.589.898,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	952.633.820,00	462.317.600,00	182.573.200,00	-770.060.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.224.981.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	34.881.000,00	11.260.000,00	3.283.200,00	-31.597.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.490.000,00	4.800.000,00	0,00	-7.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	16.848.000,00	8.424.000,00	-11.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	48.915.761.394,00	58.184.010.570,00	61.254.416.554,00	12.338.655.160,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.759.361.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	93.360.000,00	0,00	0,00	-93.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.999.000,00	5.184.000,00	1.969.920,00	-6.029.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	805.525.396,00	826.617.149,00	796.452.149,00	-9.073.247,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		827.138.556,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.309.900,00	2.768.000,00	0,00	-4.309.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.024.793.087,00	552.371.800,00	237.681.820,00	-1.787.111.267,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.055.741.188,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	27 Orang	106.700.000,00	26.320.000,00	31.120.000,00	-75.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	22.619.317.546,00	26.741.934.618,70	18.976.931.496,00	-3.642.386.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.488.051.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	107.532.690,00	45.200.000,00	0,00	-107.532.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	68.205.940,00	50.002.440,00	14.599.005,00	-53.606.935,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.780.000,00	64.523.000,00	16.130.750,00	-649.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	479.563.432,00	1.120.828.396,00	556.157.800,00	76.594.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	2 Dokumen	0,00	142.874.408,00	107.155.806,00	107.155.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	22.649.949.957,00	24.066.965.410,00	23.472.411.319,00	822.461.362,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.036.044.448,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79.120.938,00	89.758.756,00	89.758.756,00	10.637.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.059.745.880,00	10.504.693.191,00	9.703.356.991,00	643.611.111,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.247.182.953,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	71.100.000,00	71.100.000,00	73.400.000,00	2.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	15.090.000,00	15.090.000,00	7.545.000,00	-7.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-				-	-	2.585.087.000,00	312.043.000,00	152.069.500,00	-345.087.000,00							2.240.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.708.022.800,00	177.800.000,00	89.490.000,00	-1.618.532.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				1 Laporan	1 Laporan	490.982.550,00	19.200.000,00	9.600.000,00	-481.382.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	1 Laporan	456.283.000,00	65.200.000,00	31.560.000,00	-424.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	760.757.250,00	93.400.000,00	48.330.000,00	-712.427.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	877.064.200,00	134.243.000,00	62.579.500,00	-814.484.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		870.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	94.661.200,00	27.000.000,00	14.120.000,00	-80.541.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	40.693.000,00	16.190.000,00	-363.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	402.403.000,00	66.550.000,00	32.269.500,00	-370.133.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							121.761.869.496,00	192.669.377.716,00	163.471.571.527,00	41.709.702.031,00						243.950.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							121.761.869.496,00	192.669.377.716,00	163.471.571.527,00	41.709.702.031,00							243.950.000.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							121.761.869.496,00	192.669.377.716,00	163.471.571.527,00	41.709.702.031,00							243.950.000.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	78.493.306.296,00	98.925.420.850,00	97.678.374.370,00	50.826.693.704,00							129.320.000.000,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	824.079.000,00	651.958.000,00	285.193.900,00	-538.885.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	271.845.000,00	208.424.000,00	109.480.900,00	-162.364.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	174.030.000,00	220.944.000,00	55.988.000,00	-118.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	378.204.000,00	222.590.000,00	119.725.000,00	-258.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.821.272.500,00	13.676.790.341,00	13.533.952.578,00	-287.319.922,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/ Bulan	89 Orang/ Bulan	12.100.000.000,00	12.085.735.841,00	12.431.501.078,00	331.501.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				10000 Dokumen	10000 Dokumen	1.192.845.000,00	1.231.586.500,00	979.842.500,00	-213.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	528.427.500,00	359.468.000,00	122.609.000,00	-405.818.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	544.233.000,00	521.406.000,00	521.406.000,00	-22.827.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.055.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	414.450.000,00	498.796.000,00	498.796.000,00	84.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			510.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	99.844.000,00	22.610.000,00	22.610.000,00	-77.234.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	29.939.000,00	0,00	0,00	-29.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	198.050.000,00	0,00	0,00	-198.050.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				200 Paket	200 Paket	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				200 Orang	200 Orang	87.050.000,00	0,00	0,00	-87.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.294.442.780,00	7.295.354.338,00	6.805.217.664,00	2.510.774.884,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.980.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	94.130.780,00	90.697.000,00	90.697.000,00	-3.433.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	115.000.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00	-15.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	245.230.000,00	770.287.582,00	770.287.582,00	525.057.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	985.420.000,00	1.100.386.456,00	1.100.386.456,00	114.966.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	156.852.000,00	518.036.500,00	518.036.500,00	361.184.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22 Dokumen	22 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				108 Laporan	108 Laporan	185.400.000,00	1.476.100.000,00	1.476.100.000,00	1.290.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2400 Laporan	2400 Laporan	2.120.200.000,00	2.296.400.000,00	1.809.763.326,00	-310.436.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				625 Dokumen	625 Dokumen	107.210.000,00	46.646.800,00	46.646.800,00	-60.563.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	647.000.000,00	643.500.000,00	608.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.116.057.956,00	7.112.328.651,00	6.649.180.635,00	1.533.122.679,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	3.636.739.000,00	3.636.739.000,00	3.136.739.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	322.412.000,00	1.116.339.936,00	1.010.025.056,00	687.613.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				79 Unit	79 Unit	438.620.000,00	1.657.198.136,00	1.300.365.000,00	861.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.017.700.956,00	74.858.400,00	74.858.400,00	-942.842.556,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.235.200.000,00	191.907.900,00	191.907.900,00	-1.043.292.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.202.125.000,00	435.285.279,00	435.285.279,00	-766.839.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.473.868.367,00	17.268.821.306,00	16.702.005.868,00	10.228.137.501,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	195.200.000,00	113.126.000,00	113.126.000,00	-82.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.001.822.400,00	2.861.841.840,00	2.861.841.840,00	860.019.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	280.800.000,00	1.697.772.216,00	1.697.772.216,00	1.416.972.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	3.996.045.967,00	12.596.081.250,00	12.029.265.812,00	8.033.219.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.596.833.513,00	8.281.699.814,00	9.064.355.325,00	5.467.521.812,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.610.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	612.000.000,00	149.500.000,00	149.500.000,00	-462.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	64 Unit	998.700.000,00	998.700.000,00	998.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				400 Unit	400 Unit	58.450.000,00	206.500.000,00	206.500.000,00	148.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				161 Unit	161 Unit	50.600.000,00	168.040.000,00	168.040.000,00	117.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	526.132.000,00	3.911.364.228,00	3.911.364.228,00	3.385.232.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	557.935.000,00	1.856.887.286,00	2.257.551.996,00	1.699.616.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	793.016.513,00	990.708.300,00	1.372.699.101,00	579.682.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	43.186.150.000,00	43.398.996.600,00	43.398.996.600,00	212.846.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65/14 Orang/ Bulan	65/14 Orang/ Bulan	42.500.000.000,00	41.713.806.600,00	41.713.806.600,00	-786.193.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			42.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	521.450.000,00	1.486.940.000,00	1.486.940.000,00	965.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	65 Orang	164.700.000,00	198.250.000,00	198.250.000,00	33.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	438.319.180,00	718.065.800,00	718.065.800,00	279.746.620,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.265.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				65 Dokumen	65 Dokumen	15.193.000,00	16.093.000,00	16.093.000,00	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	40.792.000,00	95.160.000,00	95.160.000,00	54.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				24 Laporan	24 Laporan	103.330.000,00	143.400.000,00	143.400.000,00	40.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			680.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	279.004.180,00	463.412.800,00	463.412.800,00	184.408.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	43.268.563.200,00	93.743.956.866,00	65.793.197.157,00	71.361.436.800,00							114.630.000.000,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	-				-	-	8.959.588.000,00	34.094.631.100,00	25.321.681.600,00	16.362.093.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.050.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	785.000.000,00	1.473.531.200,00	805.672.200,00	20.672.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				10 Dokumen	10 Dokumen	2.656.503.000,00	9.003.413.000,00	5.134.110.000,00	2.477.607.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	113.835.000,00	367.167.000,00	190.896.000,00	77.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	348.000.000,00	352.746.000,00	281.958.000,00	-66.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	56.250.000,00	819.921.900,00	414.589.400,00	358.339.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				39000 Orang	39000 Orang	5.000.000.000,00	22.077.852.000,00	18.494.456.000,00	13.494.456.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	3.530.297.300,00	7.449.684.500,00	4.095.912.500,00	565.615.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.840.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	761.887.600,00	1.663.257.500,00	890.046.500,00	128.158.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	574.825.400,00	993.300.200,00	590.640.200,00	15.814.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	727.474.400,00	1.553.126.300,00	838.583.300,00	111.108.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	575.062.800,00	1.627.969.700,00	864.016.700,00	288.953.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	11.047.000,00	89.031.700,00	89.031.700,00	77.984.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	880.000.100,00	1.522.999.100,00	823.594.100,00	-56.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	4.253.105.900,00	9.066.876.700,00	5.146.747.024,00	893.641.124,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	3 Laporan	646.688.000,00	1.333.912.300,00	763.154.300,00	116.466.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	786.500.600,00	1.533.198.000,00	846.078.000,00	59.577.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	770.249.300,00	1.492.589.900,00	828.803.900,00	58.554.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	1.004.470.000,00	1.516.030.800,00	847.552.800,00	-156.917.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	562.671.100,00	1.475.226.200,00	827.350.200,00	264.679.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	90.464.400,00	450.022.800,00	301.148.000,00	210.683.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	179.159.300,00	313.566.800,00	201.891.800,00	22.732.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	212.903.200,00	952.329.900,00	530.768.024,00	317.864.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	12.560.114.400,00	11.005.283.868,00	9.389.109.884,00	-3.171.004.516,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				48 Dokumen	48 Dokumen	6.138.524.400,00	3.306.153.048,00	1.911.464.024,00	-4.227.060.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				30 Orang	30 Orang	725.620.000,00	2.110.632.600,00	2.093.680.600,00	1.368.060.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	265.200.000,00	550.547.300,00	550.547.300,00	285.347.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	818.270.000,00	299.477.000,00	299.097.000,00	-519.173.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	612.500.000,00	428.473.920,00	226.996.960,00	-385.503.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				452 Dokumen	452 Dokumen	4.000.000.000,00	4.310.000.000,00	4.307.324.000,00	307.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	6.468.200.000,00	14.980.877.400,00	12.784.447.400,00	6.316.247.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.715.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				390 Laporan	390 Laporan	87.200.000,00	200.120.000,00	106.970.000,00	19.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				65 Dokumen	65 Dokumen	124.800.000,00	200.724.100,00	112.902.100,00	-11.897.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				195 Dokumen	195 Dokumen	6.256.200.000,00	14.580.033.300,00	12.564.575.300,00	6.308.375.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	233.820.000,00	723.981.600,00	393.407.906,00	159.587.906,00		-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		775.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	135.420.000,00	548.669.800,00	289.511.386,00	154.091.386,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	3 Laporan	98.400.000,00	175.311.800,00	103.896.520,00	5.496.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	7.263.437.600,00	16.422.621.698,00	8.661.890.843,00	1.398.453.243,00		-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		28.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24 Dokumen	24 Dokumen	4.898.568.000,00	6.906.724.000,00	3.297.531.024,00	-1.601.036.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	6.465.500,00	166.042.180,00	95.546.090,00	89.080.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				10 Dokumen	10 Dokumen	742.854.000,00	2.209.257.018,00	1.108.628.509,00	365.774.509,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	856.200.000,00	4.000.776.000,00	2.549.928.000,00	1.693.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				3 Dokumen	3 Dokumen	759.350.100,00	3.139.822.500,00	1.610.257.220,00	850.907.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00					29.067.461.995,00				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00							29.067.461.995,00		
	5.01	PERENCANAAN							23.883.955.118,00	20.326.084.874,00	16.878.123.718,00	-7.005.831.400,00							29.067.461.995,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	17.725.733.803,00	17.709.888.374,00	15.158.442.968,00	-2.029.039.808,00							15.696.693.995,00		
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	106.436.500,00	61.732.000,00	4.758.000,00	-101.678.500,00		-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		226.710.746,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	56.606.000,00	26.962.000,00	0,00	-56.606.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			162.312.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.147.000,00	5.490.000,00	0,00	-14.147.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.432.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	35.683.500,00	29.280.000,00	4.758.000,00	-30.925.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.965.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	11.916.378.635,00	11.126.535.112,00	11.504.770.638,00	-411.607.997,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		9.785.108.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	100 Orang/ Bulan	11.640.495.535,00	10.894.551.112,00	11.288.050.638,00	-352.444.897,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.202.358.434,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	236.511.800,00	216.720.000,00	216.720.000,00	-19.791.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			509.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	39.371.300,00	15.264.000,00	0,00	-39.371.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	140.474.900,00	109.759.690,00	109.759.690,00	-30.715.210,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		316.674.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	119.400.000,00	109.759.690,00	109.759.690,00	-9.640.310,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			135.549.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			131.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.774.900,00	0,00	0,00	-9.774.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			49.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	447.218.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	-422.218.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		580.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	168 Paket	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			144.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	84 Orang	312.218.000,00	0,00	0,00	-312.218.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			309.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	65.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.877.356.600,00	3.232.331.464,00	1.508.750.372,00	-1.368.606.228,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.812.441.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	6 Paket	33.892.500,00	33.859.500,00	8.480.000,00	-25.412.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			259.248.914,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	7 Paket	157.400.000,00	164.590.700,00	7.190.700,00	-150.209.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			57.893.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	68 Paket	114.440.100,00	310.688.454,00	107.051.354,00	-7.388.746,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			421.377.079,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9 Paket	0,00	264.249.600,00	66.062.000,00	66.062.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.376.624.000,00	2.081.943.210,00	942.966.318,00	-1.433.657.682,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			740.021.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000,00	377.000.000,00	377.000.000,00	182.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				100 %	100 %	32.076.000,00	574.590.840,00	0,00	-32.076.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		669.538.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	10 Paket	32.076.000,00	220.834.700,00	0,00	-32.076.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	17 Unit	0,00	353.756.140,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			512.038.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.715.153.168,00	1.792.039.268,00	1.682.254.268,00	-32.898.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.737.668.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	348.090.000,00	371.340.000,00	265.305.000,00	-82.785.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			437.724.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.367.063.168,00	1.420.699.268,00	1.416.949.268,00	49.886.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.299.944.869,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				100 %	100 %	490.640.000,00	747.900.000,00	323.150.000,00	-167.490.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		567.902.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	362.490.000,00	357.000.000,00	216.000.000,00	-146.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			244.009.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	42 Unit	61.900.000,00	61.750.000,00	37.230.000,00	-24.670.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.131.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.400.000,00	279.800.000,00	45.720.000,00	39.320.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.261.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				48 Unit	23 Unit	59.850.000,00	49.350.000,00	24.200.000,00	-35.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi				92 %	92 %	400.000.000,00	1.371.298.000,00	931.834.000,00	4.721.738.000,00							5.121.738.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	1.120.393.000,00	788.392.000,00	388.392.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.962.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			146.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			660.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	1.120.393.000,00	788.392.000,00	388.392.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.540.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	109.200.000,00	72.593.000,00	72.593.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		874.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	109.200.000,00	72.593.000,00	72.593.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				38 Orang	38 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			187.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	0,00	141.705.000,00	70.849.000,00	70.849.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.285.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			297.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			196.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				38 Dokumen	38 Dokumen	0,00	141.705.000,00	70.849.000,00	70.849.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			792.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				70 %	70 %	5.758.221.315,00	1.244.898.500,00	787.846.750,00	2.490.808.685,00							8.249.030.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3 Dokumen	3 Dokumen	1.131.261.350,00	559.845.000,00	353.827.000,00	-777.434.350,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.859.985.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	328.888.800,00	108.550.000,00	68.700.000,00	-260.188.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			344.429.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	43.941.700,00	30.500.000,00	15.250.000,00	-28.691.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			238.355.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	106.860.750,00	4.880.000,00	0,00	-106.860.750,00	Kota Padang, Padang Barat, Fiamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			111.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	60.130.800,00	47.415.000,00	23.677.000,00	-36.453.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	165.803.500,00	128.300.000,00	76.150.000,00	-89.653.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			593.757.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	74.132.000,00	61.000.000,00	30.500.000,00	-43.632.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			664.296.725,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	129.810.900,00	6.100.000,00	0,00	-129.810.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			269.463.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	221.692.900,00	173.100.000,00	139.550.000,00	-82.142.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			494.759.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				-	3 Dokumen	1.582.574.410,00	321.227.500,00	178.701.750,00	-1.403.872.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2.195.692.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	500.722.200,00	77.230.000,00	62.615.000,00	-438.107.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			524.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	45.586.100,00	54.851.000,00	27.425.500,00	-18.160.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			281.259.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	143.705.900,00	5.924.000,00	0,00	-143.705.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.602.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	136.560.600,00	39.570.000,00	19.885.000,00	-116.675.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	455.202.000,00	22.150.000,00	11.075.000,00	-444.127.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			476.710.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	43.067.509,00	53.375.000,00	26.687.500,00	-16.380.009,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			286.026.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	182.080.800,00	6.100.000,00	0,00	-182.080.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			190.684.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	75.649.301,00	62.027.500,00	31.013.750,00	-44.635.551,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.013.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				-	3 Dokumen	3.044.385.555,00	363.826.000,00	255.318.000,00	-2.789.067.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3.193.352.012,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200,00	106.550.000,00	83.425.000,00	-644.898.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			762.737.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	364.161.600,00	50.056.000,00	25.028.000,00	-339.133.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			381.368.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	318.641.400,00	6.950.000,00	0,00	-318.641.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			333.697.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	82.764.000,00	23.080.000,00	11.540.000,00	-71.224.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			86.674.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	728.323.200,00	55.694.000,00	40.947.000,00	-687.376.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			762.737.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	227.601.000,00	3.740.000,00	0,00	-227.601.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			238.355.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	594.571.155,00	117.756.000,00	94.378.000,00	-500.193.155,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			627.780.382,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								1.355.098.062.333,00	954.701.536.819,30	1.081.712.378.222,10	-273.385.684.110,90						1.407.736.649.930,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.355.098.062.333,00	954.701.536.819,30	1.081.712.378.222,10	-273.385.684.110,90							1.407.736.649.930,00		
	5.02	KEUANGAN							1.355.098.062.333,00	954.701.536.819,30	1.081.712.378.222,10	-273.385.684.110,90							1.407.736.649.930,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	17.909.396.104,00	23.304.577.119,00	19.192.163.429,00	-404.567.766,00							17.504.828.338,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				-	90 persen	66.494.300,00	48.911.000,00	28.373.000,00	-38.121.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		153.970.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	37.326.500,00	21.655.000,00	10.736.000,00	-26.590.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			94.064.960,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.157.000,00	9.180.000,00	4.357.000,00	-5.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.412.290,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.626.000,00	7.216.000,00	3.530.000,00	-3.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			24.493.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	12.384.800,00	10.860.000,00	9.750.000,00	-2.634.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	12 Bulan	15.651.203.329,00	15.243.264.013,00	15.865.716.397,00	214.513.068,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		15.579.946.566,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	15.232.993.429,00	14.887.656.013,00	15.522.472.397,00	289.478.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.271.062.386,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	375.890.700,00	338.696.000,00	335.288.000,00	-40.602.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			244.303.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	42.319.200,00	16.912.000,00	7.956.000,00	-34.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			64.580.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah SKPD				-	12 bulan	22.633.100,00	10.980.000,00	4.822.000,00	-17.811.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		21.321.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.906.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.396.200,00	5.091.000,00	2.428.000,00	-968.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.185.770,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.236.900,00	5.889.000,00	2.394.000,00	-8.842.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.228.860,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	90 Persen	496.933.400,00	75.100.000,00	62.600.000,00	-434.333.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		45.987.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.562.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	346.933.400,00	75.100.000,00	62.600.000,00	-284.333.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.425.080,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	12 Bulan	876.271.544,00	5.502.664.714,00	2.502.314.820,00	1.626.043.276,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		589.324.742,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.315.500,00	14.725.500,00	3.695.500,00	-7.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.693.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.015.100,00	32.743.100,00	60.000,00	-6.955.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.972.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.910.100,00	446.184.600,00	118.407.900,00	74.497.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.399.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.140.000,00	1.335.764.050,00	386.995.200,00	366.855.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.999.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	144 Dokumen	8.380.000,00	8.640.000,00	9.720.000,00	1.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.218.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.500.000,00	45.500.000,00	22.900.000,00	-22.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	546.999.800,00	3.421.907.464,00	1.707.336.220,00	1.160.336.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			310.241.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	193.011.044,00	197.200.000,00	253.200.000,00	60.188.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			191.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah				-	89 Persen	118.795.300,00	1.699.270.180,00	120.000.000,00	1.204.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		246.371.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	57.589.100,00	97.739.000,00	0,00	-57.589.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	6 Unit	61.206.200,00	1.601.531.180,00	120.000.000,00	58.793.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			126.371.630,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 Persen	472.465.131,00	503.287.212,00	488.837.212,00	16.372.081,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		516.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	-13.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	457.465.131,00	498.287.212,00	487.587.212,00	30.122.081,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				-	100 Persen	204.600.000,00	221.100.000,00	119.500.000,00	-85.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	BPKAD Provinsi Sumatera Barat		351.406.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	181.000.000,00	181.000.000,00	99.450.000,00	-81.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			329.439.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	23.600.000,00	40.100.000,00	20.050.000,00	-3.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.967.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD				-	tepat waktu tepat waktu	1.334.746.873.229,00	930.150.004.700,30	1.061.612.863.793,10	55.484.948.363,00							1.390.231.821.592,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu Penyampaian APBD				-	Tepat Waktu	4.375.277.917,00	1.300.962.000,00	1.203.874.000,00	-3.171.403.917,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		4.530.050.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	448.078.000,00	24.534.000,00	12.264.000,00	-435.814.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	448.514.600,00	23.350.000,00	11.669.000,00	-436.845.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			441.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	114.673.600,00	3.050.000,00	1.525.000,00	-113.148.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	112.645.500,00	1.950.000,00	975.000,00	-111.670.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	136.636.500,00	0,00	0,00	-136.636.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			345.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	69.453.900,00	0,00	0,00	-69.453.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	3 Dokumen	1.730.963.800,00	1.050.358.000,00	1.032.581.000,00	-698.382.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.250.050.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	2 Dokumen	572.297.900,00	25.510.000,00	12.755.000,00	-559.542.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			625.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	620.164.117,00	26.600.000,00	15.600.000,00	-604.564.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			406.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				51 Orang	51 Orang	121.850.000,00	145.610.000,00	116.505.000,00	-5.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			408.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota dengan opini WTP				-	19 Kab/Kota	1.769.497.792,00	103.683.000,00	63.089.000,00	-1.706.408.792,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Barat		1.789.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				19 Laporan	19 Laporan	235.797.900,00	16.360.000,00	8.265.000,00	-227.532.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			188.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	19 Laporan	293.212.822,00	17.640.000,00	10.295.000,00	-282.917.822,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			187.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	19 Laporan	312.160.578,00	14.880.000,00	9.015.000,00	-303.145.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			237.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				19 Dokumen	19 Dokumen	324.051.924,00	40.103.000,00	27.889.000,00	-296.162.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	318.156.768,00	0,00	0,00	-318.156.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			185.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				19 Lembaga	19 Lembaga	146.656.000,00	0,00	0,00	-146.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			79.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			173.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			139.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			131.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				19 Orang	19 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			119.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	139.461.800,00	14.700.000,00	7.625.000,00	-131.836.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			118.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan				-	Tepat Waktu	1.694.176.463,00	268.868.000,00	139.789.000,00	-1.554.387.463,00		-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		1.685.829.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	282.770.418,00	45.596.000,00	15.700.000,00	-267.070.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			282.770.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				86 Dokumen	86 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	285.020.582,00	57.800.000,00	25.605.000,00	-259.415.582,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			313.522.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	311.095.500,00	63.592.000,00	29.314.000,00	-281.781.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			342.205.024,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	320.414.473,00	47.400.000,00	21.950.000,00	-298.464.473,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			352.455.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	394.875.490,00	54.480.000,00	47.220.000,00	-347.655.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			394.875.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Penyampaian LKPD				-	Tepat Waktu	1.566.607.524,00	135.056.000,00	78.325.000,00	-1.488.282.524,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		1.226.941.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	160.452.915,00	30.000.000,00	13.500.000,00	-146.952.915,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.452.915,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				43 Laporan	43 Laporan	381.413.863,00	40.900.000,00	23.950.000,00	-357.463.863,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			381.413.863,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	624.811.337,00	49.696.000,00	30.750.000,00	-594.061.337,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			624.811.337,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	60.263.200,00	14.460.000,00	10.125.000,00	-50.138.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.263.235,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	139.666.209,00	0,00	0,00	-139.666.209,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				156 Orang	156 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah				-	90 persen	1.325.341.313.533,00	928.341.435.700,30	1.060.127.786.793,10	-265.213.526.739,90			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kab/ Kota di Provinsi Sumatera Barat		1.381.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				19 Laporan	3 Laporan	560.900.674.068,00	30.500.000.000,00	33.309.498.700,00	-527.591.175.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	28.581.517.665,00	37.004.236.211,30	36.844.720.906,10	8.263.203.241,10	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			31.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				19 Laporan	57 Laporan	735.859.121.800,00	860.837.199.489,00	989.973.567.187,00	254.114.445.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.300.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah				-	93 %	2.441.793.000,00	1.246.955.000,00	907.351.000,00	-2.441.793.000,00							0,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah				-	94 Persen	2.441.793.000,00	1.246.955.000,00	907.351.000,00	-1.534.442.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	145.483.000,00	174.538.000,00	85.427.000,00	-60.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	260.576.000,00	41.384.000,00	20.632.000,00	-239.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	38.644.000,00	69.992.000,00	43.916.000,00	5.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	340.977.000,00	34.888.000,00	34.886.000,00	-306.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	227.318.000,00	16.266.000,00	8.140.000,00	-219.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	204.586.000,00	645.833.000,00	478.412.000,00	273.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	170.448.000,00	0,00	0,00	-170.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	122.751.000,00	0,00	0,00	-122.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				35 Dokumen	200 Dokumen	659.222.000,00	206.460.000,00	189.976.000,00	-469.246.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	113.650.000,00	28.364.000,00	28.362.000,00	-85.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	55.839.000,00	0,00	0,00	-55.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	70 Orang	102.299.000,00	29.230.000,00	17.600.000,00	-84.699.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	100 %		-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-	100 %		-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	191.732.000,00	31.490.000,00	15.731.000,00	-176.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.850.000,00	14.640.000,00	7.320.000,00	-48.530.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				18 Laporan	18 Laporan	114.739.000,00	169.280.000,00	154.640.000,00	39.901.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	1 Berita Acara	38.251.000,00	28.820.000,00	17.110.000,00	-21.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrtasi Keuangan</i>				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas iata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				205 Orang/ Bulan	205 Orang/ Bulan	47.523.640.609,00	47.382.980.953,00	47.929.210.271,00	405.569.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	628.112.712,00	549.897.176,00	514.802.176,00	-113.310.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas iata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	7.536.000,00	3.768.000,00	-66.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas iata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>				-	100 %	591.440.000,00	256.300.000,00	256.300.000,00	-335.140.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	396.000.000,00	256.300.000,00	256.300.000,00	-139.700.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	195.440.000,00	0,00	0,00	-195.440.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</i>				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				75 Paket	75 Paket	112.500.000,00	0,00	0,00	-112.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	6 Orang	109.512.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-80.712.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrtasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.910.000,00	34.910.000,00	8.726.000,00	-26.184.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	228.605.600,00	475.779.600,00	151.732.000,00	-76.873.600,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	345.719.600,00	682.924.000,00	198.334.000,00	-147.385.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	2.296.982.000,00	2.135.503.000,00	2.035.503.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.360.000,00	27.360.000,00	27.264.000,00	-96.000,00	Kota Padang, Pacang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	866.685.846,00	4.856.659.612,00	2.329.299.863,00	1.462.614.017,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				-	100 %	3.086.976.800,00	5.214.006.030,00	181.619.500,00	-2.905.357.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	4 Unit	700.000.000,00	2.896.070.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550.000.000,00	604.210.000,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				81 Unit	112 Unit	1.085.320.800,00	1.365.910.030,00	181.619.500,00	-903.701.300,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	201.656.000,00	0,00	0,00	-201.656.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	347.816.000,00	0,00	-550.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1430 Laporan	1430 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	850.200.000,00	850.200.000,00	640.860.000,00	-209.340.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.083.851.436,00	1.195.185.032,00	1.192.785.032,00	108.933.596,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</i>				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	11 Unit	247.350.000,00	247.350.000,00	137.350.000,00	-110.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				80 Unit	80 Unit	127.460.000,00	127.460.000,00	63.480.000,00	-63.980.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	4 Unit	650.000.000,00	363.440.000,00	181.700.000,00	-468.300.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Tercapainya Target PAD</i>				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	87.455.000,00	44.075.000,00	-115.925.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	156.820.000,00	93.810.000,00	8.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	107.810.000,00	457.550.000,00	144.237.500,00	36.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			129.372.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				18 Sarana dan Prasarana	18 Sarana dan Prasarana	959.557.740,00	0,00	0,00	-959.557.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	29.310.000,00	14.655.000,00	-70.345.000,00	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	111.945.000,00	101.800.000,00	50.610.000,00	-61.335.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			134.334.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	20.100.000,00	10.620.000,00	-49.380.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			66.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				18 Laporan	18 Laporan	120.000.000,00	125.000.000,00	63.830.000,00	-56.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			132.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	90.703.500,00	64.820.000,00	29.410.000,00	-61.293.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	59.984.000,00	166.500.000,00	83.250.000,00	23.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			123.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.479.800,00	0,00	0,00	-1.479.800,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	74.520.000,00	79.680.000,00	79.680.000,00	5.160.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			74.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6.522.000,00	0,00	0,00	-6.522.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.420.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	-	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	8.744.100,00	24.494.100,00	6.125.000,00	-2.619.100,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.744.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.065.500,00	321.871.700,00	104.603.200,00	-95.462.300,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			229.358.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.358.600,00	256.323.800,00	91.081.100,00	36.722.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	1.980.000,00	-660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.229.326,00	1.254.882.763,00	609.721.982,00	592.492.656,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.229.326,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	4.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	2.040.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	714.469.500,00	833.028.000,00	655.560.000,00	-58.909.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			714.469.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	725.901.085,00	728.101.538,00	715.725.538,00	-10.175.547,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			522.929.433,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	15.700.000,00	0,00	0,00	-15.700.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	48.300.000,00	64.000.000,00	34.125.000,00	-14.175.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			72.060.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	60.680.000,00	154.530.000,00	77.260.000,00	16.580.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	250.870.000,00	202.444.000,00	101.222.000,00	-149.648.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.870.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	8.670.000,00	8.670.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.340.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	23.267.963,00	17.340.000,00	0,00	-23.267.963,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.615.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	16.615.000,00	106.400.000,00	53.200.000,00	36.585.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.605.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	57.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	243.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			57.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen Dokumen SSPD	1 Dokumen Dokumen SSPD	583.947.645,00	388.856.000,00	290.000.000,00	-293.947.645,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			710.322.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	261.687.500,00	0,00	0,00	-261.687.500,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			261.687.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN									79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.965.000,00	0,00	0,00	-2.965.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.210.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.960.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.240.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.100.000,00	64.320.000,00	58.200.000,00	-9.900.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			68.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.730.000,00	4.298.000,00	1.939.000,00	-791.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.456.500,00	52.002.100,00	27.108.700,00	-23.347.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			54.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	38.462.000,00	24.295.500,00	10.795.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.006.264,00	304.054.638,00	151.745.319,00	102.739.055,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.127.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 0	0 0	39.060.000,00	39.060.000,00	39.060.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.060.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	183.528.000,00	183.528.000,00	171.522.000,00	-12.006.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			186.876.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	231.307.864,00	224.396.890,00	209.425.925,00	-21.881.939,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.002.002.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	49.200.000,00	71.500.000,00	48.500.000,00	-700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	12.870.000,00	12.870.000,00	10.350.000,00	-2.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.510.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.500.000,00	69.936.000,00	15.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.932.500,00	8.932.500,00	5.697.615,00	-3.234.885,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.052.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.870.000,00	7.520.000,00	7.730.000,00	-5.140.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.630.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.556.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	53.444.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.806.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				500 Dokumen SSPD	500 Dokumen SSPD	65.500.000,00	36.600.000,00	15.075.000,00	-50.425.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			92.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	27.848.000,00	0,00	0,00	-27.848.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.198.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00								19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.106.900,00	0,00	0,00	-2.106.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.317.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.821.100,00	0,00	0,00	-2.821.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.821.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	72.930.000,00	62.280.000,00	56.160.000,00	-16.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.234.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.620.000,00	4.620.000,00	1.155.000,00	-3.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.082.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.878.500,00	0,00	0,00	-2.878.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.172.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.609.700,00	42.609.700,00	20.081.025,00	-22.528.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			47.375.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.100,00	32.649.000,00	20.857.200,00	5.857.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.312.000,00	0,00	0,00	-3.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.643.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	50.339.825,00	436.222.637,00	218.111.318,00	167.771.493,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			54.571.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.166.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	102.380.400,00	115.009.200,00	109.479.351,00	7.098.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			112.618.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	281.423.283,00	314.155.646,00	293.196.295,00	11.773.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			245.832.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	48.700.000,00	48.700.000,00	26.200.000,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			53.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	20 Unit	13.360.000,00	13.360.000,00	6.520.000,00	-6.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.696.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	35.504.000,00	35.504.000,00	17.752.000,00	-17.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			32.780.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	10.517.900,00	10.517.900,00	6.458.950,00	-4.058.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.157.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Tercapainya Target PAD</i>				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	15.605.000,00	11.760.000,00	5.880.000,00	-9.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.993.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	16.339.750,00	0,00	0,00	-16.339.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.973.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				28835 Dokumen SSPD	28835 Dokumen SSPD	117.535.000,00	31.224.000,00	15.612.000,00	-101.923.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			161.986.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	31.507.494,00	0,00	0,00	-31.507.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			67.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.118.800,00	0,00	0,00	-3.118.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.118.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 laporan Dokumen	12 laporan Dokumen	87.140.000,00	66.360.000,00	64.320.000,00	-22.820.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			87.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.421.900,00	2.421.900,00	603.500,00	-1.818.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.421.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	43.565.800,00	88.620.800,00	34.949.050,00	-8.616.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			69.009.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	27.932.500,00	22.314.000,00	14.729.300,00	-13.203.200,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			36.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	2.160.000,00	-720.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.428.622,00	359.232.587,00	201.780.444,00	161.351.822,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			43.978.622,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			59.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.268.000,00	204.828.000,00	195.602.750,00	-4.665.250,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.268.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	281.423.283,00	314.155.646,00	314.155.646,00	32.732.363,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			281.423.283,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	47.400.000,00	47.400.000,00	27.775.000,00	-19.625.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			47.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	17.460.000,00	17.460.000,00	11.650.000,00	-5.810.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.045.750,00	11.045.750,00	5.522.875,00	-5.522.875,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.045.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0 Laporan	5.400.000,00	23.760.000,00	0,00	-5.400.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.630.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.342.750,00	50.000.000,00	0,00	-19.342.750,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.642.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				550 wajib pajak Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	167.873.521,00	16.380.000,00	0,00	-167.873.521,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			140.677.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.441.000,00	0,00	0,00	-10.441.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.089.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.821.000,00	0,00	0,00	-2.821.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	82.302.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-17.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				8 orang Paket	8 orang Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	2.442.000,00	2.442.000,00	3.470.400,00	1.028.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan Paket	12 bulan Paket	68.463.000,00	68.463.000,00	45.280.350,00	-23.182.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	24.790.000,00	31.675.000,00	17.210.700,00	-7.579.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	1.080.000,00	-360.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	99.706.000,00	313.125.962,00	166.896.481,00	67.190.481,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100% Dokumen	100% Dokumen	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	301.788.000,00	301.788.000,00	269.847.000,00	-31.941.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	453.283.549,00	451.840.490,00	451.840.490,00	-1.443.059,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	41.500.000,00	51.300.000,00	35.600.000,00	-5.900.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan Unit	12 bulan Unit	17.080.000,00	17.080.000,00	18.650.000,00	1.570.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.045.750,00	11.045.750,00	5.522.875,00	-5.522.875,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	16.605.000,00	7.720.000,00	14.280.000,00	-2.325.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	40.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				550 wajib Pajak Dokumen SSPD	550 wajib Pajak Dokumen SSPD	76.200.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	-70.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	32.994.300,00	0,00	0,00	-32.994.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.387.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	96.742.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-32.422.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.160.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			41.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.990.400,00	2.990.400,00	735.000,00	-2.255.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.429.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.695.300,00	55.415.300,00	15.796.300,00	-34.899.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			56.160.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.100,00	21.750.100,00	5.437.300,00	-9.562.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	2.430.000,00	-810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.120.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.480.000,00	595.683.637,00	307.304.119,00	258.824.119,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.080.000,00	40.080.000,00	40.080.000,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	159.052.000,00	169.156.000,00	150.130.000,00	-8.922.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			163.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	276.923.283,00	314.155.646,00	314.155.646,00	37.232.363,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			281.423.283,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	34.280.000,00	34.280.000,00	19.246.000,00	-15.034.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			42.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	16.660.000,00	16.660.000,00	8.830.000,00	-7.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.460.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.188.000,00	52.500.000,00	26.248.000,00	-1.940.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.036.500,00	11.036.500,00	5.518.250,00	-5.518.250,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.036.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	1 Laporan	16.470.000,00	5.000.000,00	0,00	-16.470.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	10 Laporan	17.500.000,00	46.117.500,00	28.220.000,00	10.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	101.850.000,00	16.350.000,00	11.865.000,00	-89.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				0 Laporan	0 Laporan	18.400.000,00	0,00	0,00	-18.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.120.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	72.462.000,00	62.280.000,00	54.120.000,00	-18.342.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			72.462.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.797.000,00	2.797.000,00	688.000,00	-2.109.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.797.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.722.800,00	48.722.800,00	16.907.000,00	-31.815.800,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.772.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				42500 Paket	42500 Paket	15.000.000,00	21.750.000,00	10.717.500,00	-4.282.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.060.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	48.040.333,00	343.239.288,00	174.179.144,00	126.138.811,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.040.333,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.060.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	143.544.000,00	143.544.000,00	140.988.000,00	-2.556.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			143.544.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.802.345,00	224.396.890,00	224.396.890,00	23.594.545,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.802.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	3 Unit	45.850.000,00	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	25 Unit	16.810.000,00	16.810.000,00	9.870.000,00	-6.940.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.810.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	23.600.000,00	-6.200.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.052.500,00	7.190.000,00	3.595.000,00	-7.457.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.750.000,00	13.630.000,00	3.376.000,00	-5.374.000,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				90 Laporan	90 Laporan	17.384.550,00	60.428.000,00	14.000.000,00	-3.384.550,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.384.550,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				450 Dokumen SSPD	450 Dokumen SSPD	107.482.500,00	26.100.000,00	0,00	-107.482.500,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.513.950,00	0,00	0,00	-22.513.950,00	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.513.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.962.000,00	0,00	0,00	-1.962.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.203.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.510.000,00	0,00	0,00	-6.510.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.383.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 orang Dokumen	4 orang Dokumen	82.090.000,00	64.320.000,00	56.670.000,00	-25.420.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.478.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	9 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 buah Paket	50 buah Paket	1.699.000,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.106.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	23.731.500,00	24.843.500,00	29.921.200,00	6.189.700,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			57.402.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	8.335.000,00	13.150.000,00	14.575.000,00	6.240.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.348.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.240.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	65.712.862,00	615.331.308,00	328.689.546,00	262.976.684,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.773.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	146.376.000,00	146.376.000,00	140.841.000,00	-5.535.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			146.376.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	321.552.554,00	314.155.646,00	275.264.654,00	-46.287.900,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			257.944.581,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit Unit	5 unit Unit	29.650.000,00	29.650.000,00	49.650.000,00	20.000.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			49.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 unit Unit	50 unit Unit	13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.970.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.053.400,00	11.053.400,00	16.311.700,00	5.258.300,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.053.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.455.000,00	0,00	0,00	-4.455.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	0 Laporan	12.300.000,00	92.115.000,00	0,00	-12.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				500 Wajib Pajak Dokumen SSPD	500 Wajib Pajak Dokumen SSPD	62.400.000,00	33.473.000,00	12.838.000,00	-49.562.000,00	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			93.314.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.396.000,00	0,00	0,00	-9.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			27.279.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.721.000,00	0,00	0,00	-2.721.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.721.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000,00	0,00	0,00	-2.721.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.721.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.711.000,00	0,00	0,00	-1.711.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.711.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	94.168.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-29.848.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			94.168.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</i>				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				7 Paket	7 Paket	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	2.403.000,00	4.680.000,00	2.640.000,00	237.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.403.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	937.300,00	0,00	0,00	-937.300,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			937.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.125.100,00	52.120.700,00	30.150.400,00	7.025.300,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.125.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.143.300,00	15.563.300,00	9.036.000,00	4.892.700,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.143.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.824.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	85.125.000,00	789.768.123,00	446.309.962,00	361.184.962,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			85.125.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				-	100 %	3.086.976.800,00	5.214.006.030,00	181.619.500,00	-2.905.357.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	173.394.000,00	173.394.000,00	173.394.000,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			173.394.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	321.552.554,00	314.155.646,00	314.155.646,00	-7.396.908,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			321.552.554,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	47.850.000,00	47.850.000,00	24.600.000,00	-23.250.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			47.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	12.870.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.870.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	157.404.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.445.750,00	7.190.000,00	3.595.000,00	-9.850.750,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.445.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			4.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	80.000.000,00	72.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	212.120.215,00	15.840.000,00	0,00	-212.120.215,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			212.120.215,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	45.870.000,00	0,00	0,00	-45.870.000,00	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.870.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.810.000,00	0,00	0,00	-4.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.810.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00							1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	64.320.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.980.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5		NON URUSAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.946.100,00	2.946.100,00	2.946.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.946.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.730.500,00	56.514.500,00	52.549.435,00	8.818.935,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			43.730.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.701.100,00	25.650.000,00	21.486.000,00	9.784.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.701.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.824.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	NON URUSAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	33.188.000,00	349.608.253,00	180.875.253,00	147.687.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			39.010.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			23.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133.704.000,00	133.704.000,00	147.369.900,00	13.665.900,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			133.704.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	367.242.822,00	362.081.734,00	289.761.173,00	-77.481.649,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			367.242.822,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	31.600.000,00	51.600.000,00	0,00	-31.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			51.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	0 Unit	0,00	0,00	40.901.000,00	40.901.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	0,00	18.230.000,00	18.230.000,00	18.230.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.220.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54.600.000,00	54.600.000,00	29.800.000,00	-24.800.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			54.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	16.290.000,00	16.290.000,00	12.740.000,00	-3.550.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.290.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.420.165,00	80.000.000,00	37.150.000,00	24.729.835,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.420.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	45.000.000,00	14.724.000,00	7.362.000,00	-37.638.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.700.000,00	0,00	0,00	-9.700.000,00	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.266.080,00	0,00	0,00	-2.266.080,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.266.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.089.800,00	0,00	0,00	-3.089.800,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.089.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.680.000,00	0,00	0,00	-3.680.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.680.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	80.140.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-15.820.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			80.140.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.525.000,00	2.525.000,00	630.000,00	-1.895.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.373.500,00	50.059.230,00	29.534.600,00	-11.838.900,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			19.110.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.600.196,00	39.441.896,00	11.610.400,00	-9.989.796,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.795.096,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.592.000,00	3.592.000,00	1.672.000,00	-1.920.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.781.000,00	417.010.919,00	217.010.497,00	189.229.497,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			392.443.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	211.068.000,00	211.068.000,00	183.798.000,00	-27.270.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			181.368.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	281.423.283,00	403.914.402,00	376.966.665,00	95.543.382,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			122.731.407,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	40.760.000,00	-7.240.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	9.260.000,00	24.210.000,00	15.700.000,00	6.440.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.960.000,00	4.980.000,00	-5.020.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	-	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	33.885.250,00	38.759.600,00	16.658.000,00	-17.227.250,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	248.040.000,00	15.624.000,00	7.812.000,00	-240.228.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.810.000,00	0,00	0,00	-50.810.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.810.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	1.860.000,00	0,00	0,00	-1.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	66.322.000,00	64.320.000,00	58.200.000,00	-8.122.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</i>				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				8 Paket	8 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	2.848.800,00	2.848.800,00	1.787.800,00	-1.061.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	23.273.700,00	23.447.700,00	23.197.800,00	-75.900,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	6.599.000,00	5.631.000,00	5.631.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	NON URUSAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	33.253.338,00	272.691.720,00	150.253.360,00	117.000.022,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	58.080.000,00	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	129.564.000,00	129.564.000,00	129.564.000,00	0,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	317.052.554,00	314.155.646,00	293.196.295,00	-23.856.259,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	47.800.000,00	47.800.000,00	23.950.000,00	-23.850.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	12.610.000,00	12.610.000,00	6.710.000,00	-5.900.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	19.900.000,00	-9.900.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.052.500,00	11.052.500,00	5.521.250,00	-5.531.250,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.040.000,00	10.040.000,00	10.539.000,00	499.000,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	17.699.750,00	79.734.500,00	45.000.000,00	27.300.250,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	88.923.724,00	11.700.000,00	9.065.000,00	-79.858.724,00	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23.947.500,00	0,00	0,00	-23.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	77.220.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-12.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.355.000,00	4.355.000,00	1.786.000,00	-2.569.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	51.543.400,00	57.858.400,00	23.116.400,00	-28.427.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	15.075.000,00	44.134.900,00	18.111.500,00	3.036.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	1.920.000,00	-720.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	50.885.000,00	528.571.270,00	311.838.035,00	260.953.035,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	144.366.000,00	164.106.000,00	127.584.000,00	-16.782.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	245.762.814,00	314.155.646,00	314.155.646,00	68.392.832,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	28.600.000,00	28.600.000,00	21.427.000,00	-7.173.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	17.020.000,00	16.250.000,00	8.125.000,00	-8.895.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.800.000,00	35.800.000,00	17.900.000,00	-17.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.613.952,00	15.613.952,00	7.806.976,00	-7.806.976,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16.440.000,00	7.440.000,00	3.720.000,00	-12.720.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.484.200,00	0,00	0,00	-9.484.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				980 Dokumen SSPD	980 Dokumen SSPD	76.290.000,00	75.944.000,00	63.972.000,00	-12.318.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	14.701.500,00	0,00	0,00	-14.701.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.868.000,00	0,00	0,00	-2.868.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	76.480.000,00	54.120.000,00	54.120.000,00	-22.360.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.665.200,00	2.650.000,00	1.564.000,00	-1.101.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	4 Paket	28.897.700,00	30.213.700,00	22.136.800,00	-6.760.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	11.880.000,00	22.530.000,00	19.056.500,00	7.176.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.648.000,00	3.648.000,00	2.736.000,00	-912.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	63 Laporan	44.564.990,00	313.700.830,00	148.646.420,00	104.081.430,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	133.012.800,00	133.012.800,00	133.012.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	3 Laporan	157.039.328,00	224.396.890,00	179.517.512,00	22.478.184,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	8.520.000,00	24.330.000,00	12.300.000,00	3.780.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.810.000,00	0,00	0,00	-5.810.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.790.000,00	15.053.488,00	13.621.744,00	2.831.744,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.430.000,00	0,00	0,00	-10.430.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	24.000.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00	27.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				950 Dokumen SSPD	132 Dokumen SSPD	72.000.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	-70.560.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	39.300.000,00	0,00	0,00	-39.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	4.176.000,00	0,00	0,00	-4.176.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.176.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	6.590.000,00	0,00	0,00	-6.590.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	73.860.000,00	64.320.000,00	58.200.000,00	-15.660.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			83.860.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			9.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.977.600,00	2.977.600,00	2.977.600,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.977.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59.271.300,00	56.108.000,00	33.091.900,00	-26.179.400,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			69.297.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.897.000,00	26.359.400,00	20.701.560,00	6.804.560,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.897.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	69.157.333,00	343.894.351,00	193.938.040,00	124.780.707,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			89.344.333,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	19.785.000,00	19.785.000,00	19.785.000,00	0,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			20.028.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.985.000,00	122.025.000,00	108.821.100,00	-14.163.900,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			132.985.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.559.151,00	224.396.890,00	224.396.890,00	-2.162.261,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			237.363.074,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	45.650.000,00	45.650.000,00	25.150.000,00	-20.500.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	16 Unit	10.600.000,00	10.600.000,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	28.266.000,00	28.266.000,00	14.012.000,00	-14.254.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			28.274.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.190.000,00	13.190.000,00	6.595.000,00	-6.595.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.190.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.175.000,00	9.100.000,00	4.550.000,00	-19.625.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			34.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	18.200.000,00	85.656.000,00	25.295.000,00	7.095.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangghnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				480 Dokumen SSPD	480 Dokumen SSPD	54.850.000,00	19.800.000,00	9.900.000,00	-44.950.000,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			83.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.413.172,00	0,00	0,00	-16.413.172,00	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.413.172,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00						19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.876.000,00	0,00	0,00	-1.876.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	106.180.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	-41.860.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.682.000,00	2.682.000,00	666.000,00	-2.016.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.206.900,00	40.671.900,00	14.149.200,00	-26.057.700,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.038.200,00	22.438.200,00	7.499.268,00	-6.538.932,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.060.000,00	3.060.000,00	1.620.000,00	-1.440.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahn daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	64.847.200,00	670.801.078,00	335.400.539,00	270.553.339,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	154.368.000,00	166.068.000,00	164.178.000,00	9.810.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	326.083.752,00	359.035.024,00	359.035.024,00	32.951.272,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	51.150.000,00	51.150.000,00	26.200.000,00	-24.950.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	16.960.000,00	16.960.000,00	8.480.000,00	-8.480.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahn daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.800.000,00	36.800.000,00	29.800.000,00	0,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.052.500,00	11.052.500,00	11.279.650,00	227.150,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-8.100.000,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.092.750,00	53.786.900,00	3.000.000,00	-16.092.750,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	108.956.034,00	3.420.000,00	1.710.000,00	-107.246.034,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	31.910.400,00	0,00	0,00	-31.910.400,00	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00								19.797.066.091,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.920.000,00	0,00	0,00	-3.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	86.880.000,00	62.280.000,00	62.280.000,00	-24.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			32.760.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	1.886.000,00	1.886.000,00	464.800,00	-1.421.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.886.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.664.600,00	41.664.600,00	11.183.600,00	-30.481.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			48.636.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	22.990.000,00	5.747.500,00	-9.252.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	-450.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.773.400,00	595.280.122,00	297.630.061,00	235.856.661,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			67.853.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.080.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.080.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.476.000,00	128.556.000,00	121.428.000,00	-6.048.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			127.476.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	279.280.209,00	269.276.268,00	269.276.268,00	-10.003.941,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			241.412.814,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	46.250.000,00	46.250.000,00	25.500.000,00	-20.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			46.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	16.590.200,00	16.590.000,00	8.200.000,00	-8.390.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	29.810.000,00	29.810.000,00	14.900.000,00	-14.910.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.052.500,00	11.052.500,00	6.431.250,00	-4.621.250,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.052.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.750.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-9.250.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	18.592.200,00	81.813.000,00	72.953.200,00	54.361.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.592.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				0 Dokumen SSPD	0 Dokumen SSPD	58.447.350,00	14.148.000,00	7.074.000,00	-51.373.350,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			78.697.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	42.201.900,00	0,00	0,00	-42.201.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.001.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN								79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00					19.797.066.091,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00		
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				-	100 %	502.635.280,00	244.230.000,00	194.801.000,00	-307.834.280,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.896.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.199.800,00	0,00	0,00	-2.199.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Pariaman Tengah, Pauh Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.199.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.520.000,00	0,00	0,00	-1.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	70.920.000,00	62.280.000,00	56.160.000,00	-14.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</i>				-	100 %	369.762.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-340.962.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				16 Paket	16 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	2.421.000,00	2.421.000,00	602.000,00	-1.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.421.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	57.627.200,00	68.068.700,00	42.524.100,00	-15.103.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			57.630.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	11.471.000,00	51.571.700,00	32.527.100,00	21.056.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.471.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	3.660.000,00	3.660.000,00	2.745.000,00	-915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.660.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	30 Laporan	43.491.264,00	359.886.761,00	179.904.881,00	136.413.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			43.491.264,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.060.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	10.929.271.655,00	11.620.339.460,00	10.725.129.708,00	-204.141.947,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.870.256.317,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	210.876.000,00	210.876.000,00	173.220.000,00	-37.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			210.876.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	183.386.806,00	224.396.890,00	174.022.572,00	-9.364.234,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			160.641.876,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik				-	100 %	3.093.993.415,00	3.154.476.490,00	1.814.729.011,00	-1.279.264.404,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.628.684.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	46.250.000,00	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	26 Unit	17.480.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			17.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	-29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			29.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11.045.750,00	11.045.750,00	9.117.876,00	-1.927.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.045.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target PAD				-	7,2 %	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	16.595.000,00	9.800.000,00	20.200.000,00	3.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			16.595.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	21.281.055,00	80.000.000,00	58.000.000,00	36.718.945,00	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.801.055,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertangihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				6000 Dokumen SSPD	6000 Dokumen SSPD	140.677.500,00	16.890.000,00	16.249.000,00	-124.428.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			140.677.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	18.773.173,00	0,00	0,00	-18.773.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			18.733.173,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
	5.02	KEUANGAN							79.599.572.758,00	95.154.008.330,00	77.308.760.018,00	-2.290.812.740,00							19.797.066.091,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	73.434.205.520,00	91.230.614.750,00	75.127.724.118,00	-59.724.455.029,00							13.709.750.491,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	49.712.951.321,00	49.149.774.129,00	49.602.570.447,00	-110.380.874,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.106.477.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	45.240.000,00	52.560.000,00	0,00	-45.240.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			43.435.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			52.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	5.147.175.049,00	21.562.688.641,00	12.323.774.452,00	7.176.599.403,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.736.336.424,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.298.400,00	3.298.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	0,00	84.046.000,00	84.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	757.356.250,00	1.825.343.656,00	1.284.046.100,00	526.689.850,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.086.976.800,00	5.214.006.030,00	181.619.500,00	-2.905.357.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-78.051.638,00							6.087.315.600,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	6.165.367.238,00	3.923.393.580,00	2.181.035.900,00	-3.984.331.338,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.087.315.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	627.729.200,00	402.305.080,00	247.513.200,00	-380.216.000,00	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							22.505.991.146,00	18.469.854.138,00	17.622.269.812,00	-4.883.721.334,00						20.505.488.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							22.505.991.146,00	18.469.854.138,00	17.622.269.812,00	-4.883.721.334,00							20.505.488.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							22.505.991.146,00	18.469.854.138,00	17.622.269.812,00	-4.883.721.334,00							20.505.488.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	14.606.454.146,00	16.141.029.638,00	14.309.514.411,00	-2.001.303.146,00							12.605.151.000,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	213.056.600,00	84.705.000,00	42.705.000,00	-170.351.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		312.072.335,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	57.582.900,00	6.100.000,00	0,00	-57.582.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			82.513.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	97.765.400,00	50.655.000,00	20.605.000,00	-77.160.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			169.558.835,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	57.708.300,00	27.950.000,00	22.100.000,00	-35.608.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				14 Dokumen	14 Dokumen	10.967.607.213,00	10.780.782.931,00	11.161.442.826,00	193.835.613,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		8.845.973.432,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	10.751.087.413,00	10.574.982.931,00	10.955.642.826,00	204.555.413,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.629.453.632,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	216.519.800,00	205.800.000,00	205.800.000,00	-10.719.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			216.519.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 0	0 0	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang dikelola				74 Orang	74 Orang	285.385.100,00	122.060.000,00	22.890.000,00	-262.495.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		272.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	92 Paket	127.500.000,00	0,00	0,00	-127.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			127.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				300 Orang	300 Orang	157.885.100,00	122.060.000,00	22.890.000,00	-134.995.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	1.264.211.907,00	2.466.148.259,00	1.368.072.848,00	103.860.941,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		1.279.511.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.470.200,00	4.470.200,00	4.470.200,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			21.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	165.000.000,00	184.004.400,00	195.959.800,00	30.959.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	175.000.000,00	170.867.000,00	152.109.600,00	-22.890.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	25.000.000,00	16.506.000,00	8.506.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	901.741.707,00	2.066.806.659,00	999.027.248,00	97.285.541,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			900.431.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah				3 Jenis	3 Jenis	242.800.000,00	645.114.340,00	195.881.050,00	-46.918.950,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	122.904.000,00	46.801.400,00	11.801.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	142.800.000,00	380.478.340,00	108.246.650,00	-34.553.350,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	141.732.000,00	40.833.000,00	-24.167.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				1 Tahun	1 Tahun	1.205.670.026,00	1.213.623.108,00	1.212.498.687,00	6.828.661,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		1.182.244.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.769.000,00	769.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	-10.840.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			14.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	936.830.026,00	944.783.108,00	951.729.687,00	14.899.661,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			909.344.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah				6 Unit	6 Unit	351.223.300,00	752.096.000,00	229.524.000,00	-121.699.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN di Lingkungan BKD		427.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	107.350.000,00	107.350.000,00	87.670.000,00	-19.680.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	73.300,00	0,00	0,00	-73.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			47.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	153.800.000,00	554.746.000,00	61.854.000,00	-91.946.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%				45 %	45 %	7.899.537.000,00	2.328.824.500,00	3.312.755.401,00	800.000,00							7.900.337.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS				45 %	45 %	4.628.537.000,00	223.295.500,00	1.390.191.400,00	-3.238.345.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN dan Masyarakat umum		4.628.537.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	11.985.000,00	10.680.000,00	-14.320.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	909.537.000,00	140.660.000,00	138.580.000,00	-770.957.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			909.537.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				700 Dokumen	700 Dokumen	70.000.000,00	3.120.000,00	1.560.000,00	-68.440.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	3.500.000.000,00	44.330.500,00	1.225.271.400,00	-2.274.728.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	79.000.000,00	18.200.000,00	9.100.000,00	-69.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			59.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan				90 %	90 %	1.335.000.000,00	1.374.789.000,00	1.499.747.000,00	164.747.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.335.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	65.000.000,00	31.120.000,00	15.560.000,00	-49.440.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3 Laporan	3 Laporan	320.000.000,00	122.726.000,00	91.400.000,00	-228.600.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	1.220.943.000,00	1.392.787.000,00	442.787.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesenjangan kompetensi dengan kinerja Persentase kesenjangan kualifikasi dengan kompetensi				70 %	70 %	1.556.000.000,00	550.550.000,00	318.857.000,00	-1.237.143.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Barat		1.556.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	47.430.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	130.550.000,00	130.550.000,00	-119.450.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	68.455.000,00	39.814.000,00	14.814.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	730.700.500,00	123.610.000,00	73.663.000,00	-657.037.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	15.100.000,00	12.050.000,00	-27.950.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				3 Orang	3 Orang	144.299.500,00	110.960.000,00	37.780.000,00	-106.519.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	6.405.000,00	3.199.000,00	-11.801.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	1.830.000,00	915.000,00	-29.085.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>				1 Laporan	1 Laporan	106.000.000,00	32.180.000,00	13.871.000,00	-92.129.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			106.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	9.150.000,00	4.575.000,00	-55.425.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	4.880.000,00	2.440.000,00	-32.560.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase menurunnya pelanggaran hukuman disiplin ASN</i>				5 %	5 %	380.000.000,00	180.190.000,00	103.960.001,00	-276.039.999,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	ASN Pemprov Sumatera Bara		380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	4.680.000,00	2.340.000,00	-32.660.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				12 Orang	12 Orang	115.000.000,00	63.970.000,00	1.265.001,00	-113.734.999,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				800 Orang	800 Orang	25.000.000,00	9.100.000,00	8.185.000,00	-16.815.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	99.320.000,00	90.610.000,00	-89.390.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	3.120.000,00	1.560.000,00	-23.440.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							23.701.396.000,00	21.695.996.855,00	18.585.805.321,00	-5.115.590.679,00						25.028.000.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							23.701.396.000,00	21.695.996.855,00	18.585.805.321,00	-5.115.590.679,00							25.028.000.000,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							23.701.396.000,00	21.695.996.855,00	18.585.805.321,00	-5.115.590.679,00							25.028.000.000,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	16.103.514.000,00	16.123.024.927,00	14.775.894.647,00	147.486.000,00							16.251.000.000,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-		93.000.000,00	33.310.001,00	20.005.001,00	-72.994.999,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		98.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	19.510.001,00	13.105.001,00	-46.894.999,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			63.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	33.000.000,00	13.800.000,00	6.900.000,00	-26.100.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-		11.515.000.000,00	10.406.991.933,00	10.757.982.271,00	-757.017.729,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		11.538.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	11.240.000.000,00	10.165.850.933,00	10.516.841.271,00	-723.158.729,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			11.260.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	228.960.000,00	228.960.000,00	3.960.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			225.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	12.181.000,00	12.181.000,00	-37.819.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			53.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-		28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-		185.000.000,00	203.000.770,00	135.168.000,00	-49.832.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		195.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				73 Orang	73 Orang	125.000.000,00	203.000.770,00	135.168.000,00	10.168.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			130.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-		1.003.650.000,00	1.119.028.901,00	545.335.848,00	-458.314.152,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.036.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.023.417,00	10.005.017,00	-29.994.983,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			43.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	21.710.000,00	3.500.000,00	-21.500.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	28.583.700,00	3.000.000,00	-32.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			38.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	115.000.000,00	253.896.444,00	132.905.372,00	17.905.372,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			120.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	60.765.000,00	21.192.500,00	-8.807.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	8.650.000,00	4.860.000,00	3.645.000,00	-5.005.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			10.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	709.190.340,00	371.087.959,00	-378.912.041,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			760.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	467.000.000,00	168.601.120,00	8.440.920,00	-458.559.080,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		490.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	44.391.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	118.960.120,00	8.440.920,00	-6.559.080,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	337.000.000,00	5.250.000,00	0,00	-337.000.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			340.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		2.200.000.000,00	2.539.994.202,00	2.362.204.607,00	162.204.607,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.215.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	4.750.000,00	-7.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	338.000.000,00	516.128.500,00	345.894.000,00	7.894.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			345.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.850.000.000,00	2.011.865.702,00	2.011.560.607,00	161.560.607,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.855.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		611.064.000,00	1.623.298.000,00	917.958.000,00	306.894.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		649.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	41.190.000,00	41.190.000,00	-3.810.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			48.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	89.850.000,00	78.250.000,00	-11.750.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			95.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.488.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.988.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			11.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.576.000,00	205.100.000,00	108.730.000,00	58.154.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	1.148.008.000,00	623.558.000,00	608.558.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			20.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	24.150.000,00	11.350.000,00	-88.650.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	105.000.000,00	52.380.000,00	-247.620.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			310.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lamanya ASN mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase aparatur mengikuti diklat sesuai Tupoksi dan persyaratan jabatan				-	24 89 JP/Tahun %	7.597.882.000,00	5.572.971.928,00	3.809.910.674,00	1.179.118.000,00							8.777.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-		1.100.000.000,00	924.980.000,00	648.013.560,00	-451.986.440,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.155.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				150 Orang	150 Orang	1.050.000.000,00	921.175.000,00	644.208.560,00	-405.791.440,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.805.000,00	3.805.000,00	-46.195.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	5.450.000.000,00	4.162.741.928,00	2.824.925.114,00	-2.625.074.886,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.542.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				80 Orang	80 Orang	200.000.000,00	104.955.000,00	89.677.500,00	-110.322.500,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			210.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	3 Laporan	600.000.000,00	415.430.000,00	348.608.000,00	-251.392.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			610.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	15.120.000,00	9.760.000,00	-90.240.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			110.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				260 Orang	260 Orang	4.500.000.000,00	3.612.596.928,00	2.369.559.614,00	-2.130.440.386,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			5.560.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	14.640.000,00	7.320.000,00	-42.680.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			52.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-				-	-	1.047.882.000,00	485.250.000,00	336.972.000,00	-710.910.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.080.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri																		
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				210 Orang	210 Orang	1.022.000.000,00	483.180.000,00	334.902.000,00	-687.098.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.050.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.03.0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	25.882.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-23.812.000,00	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							17.272.793.000,00	8.843.078.552,00	8.364.958.892,00	-8.907.834.108,00							18.094.558.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							17.272.793.000,00	8.843.078.552,00	8.364.958.892,00	-8.907.834.108,00							18.094.558.000,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	8.428.058.000,00	7.621.446.632,00	7.290.752.972,00	746.500.000,00							9.174.558.000,00	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	340.000.000,00	125.100.000,00	85.910.000,00	-254.090.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	185.000.000,00	95.820.000,00	67.280.000,00	-117.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			190.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	29.280.000,00	18.630.000,00	-101.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.386.388.000,00	5.392.502.605,00	5.534.237.834,00	-852.150.166,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		6.997.558.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	6.160.588.000,00	5.202.422.605,00	5.373.077.834,00	-787.510.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			6.760.558.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	190.800.000,00	190.080.000,00	161.160.000,00	-29.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			37.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	47.000.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	-23.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		51.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	-1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			27.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			16.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	123.500.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-110.700.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		166.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			31.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	93.500.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-80.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			135.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	798.690.000,00	1.067.410.475,00	684.291.136,00	-114.398.864,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		925.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			3.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.590.000,00	0,00	0,00	-27.590.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			80.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	46.500.000,00	120.000.000,00	107.295.500,00	60.795.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.000.000,00	91.207.500,00	69.169.900,00	51.169.900,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			24.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	-360.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			8.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	849.962.975,00	501.585.736,00	-198.414.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	13.403.250,00	0,00	0,00	-13.403.250,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	13.403.250,00	0,00	0,00	-13.403.250,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	544.076.750,00	850.033.552,00	799.914.002,00	255.837.252,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		463.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	10.571.550,00	3.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			13.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	39.200.000,00	30.700.000,00	700.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	503.076.750,00	800.262.002,00	766.214.002,00	263.137.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			390.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	175.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-25.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		195.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	160.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			170.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			25.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	8.844.735.000,00	1.221.631.920,00	1.074.205.920,00	75.265.000,00							8.920.000.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	2.625.000.000,00	494.350.000,00	449.350.000,00	-2.175.650.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.630.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000,00	459.150.000,00	414.150.000,00	-785.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	-1.114.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	814.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00	-759.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		815.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	40.000.000,00	55.000.000,00	-245.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			275.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	239.000.000,00	0,00	0,00	-239.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			240.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	2.705.000.000,00	209.971.000,00	185.971.000,00	-2.519.029.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.725.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	80.356.000,00	80.356.000,00	-519.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			605.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	41.120.000,00	0,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			280.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			350.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			290.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	88.495.000,00	105.615.000,00	-194.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	2.700.735.000,00	437.310.920,00	383.884.920,00	-2.316.850.080,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.750.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				6 Dokumen	6 Dokumen	1.450.735.000,00	312.160.920,00	261.160.920,00	-1.189.574.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			1.450.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				6 Laporan	6 Laporan	850.000.000,00	62.650.000,00	62.650.000,00	-787.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	62.500.000,00	60.074.000,00	-339.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGHUBUNG							17.538.117.161,00	18.306.931.268,00	15.668.351.161,00	-1.869.766.000,00							21.222.405.300,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							17.538.117.161,00	18.306.931.268,00	15.668.351.161,00	-1.869.766.000,00							21.222.405.300,00	
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG							17.538.117.161,00	18.306.931.268,00	15.668.351.161,00	-1.869.766.000,00							21.222.405.300,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				-	100 %	13.335.681.161,00	14.602.531.398,00	12.857.005.701,00	36.724.139,00							13.372.405.300,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	66.123.000,00	103.930.000,00	61.168.000,00	-4.955.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.181.100,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	43.701.000,00	39.850.000,00	4.990.000,00	-38.711.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.621.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	-5.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.801.000,00	58.320.000,00	53.298.000,00	39.497.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			15.181.100,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.729.806.000,00	6.996.569.552,00	7.215.770.765,00	-1.514.035.235,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.031.006.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	8.500.000.000,00	6.751.859.552,00	6.999.245.765,00	-1.500.754.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	217.800.000,00	217.800.000,00	203.280.000,00	-14.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			217.800.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	12.006.000,00	26.910.000,00	13.245.000,00	1.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.206.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	117.713.000,00	179.240.000,00	174.920.000,00	57.207.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		118.664.300,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	108.200.000,00	170.600.000,00	170.600.000,00	62.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			108.200.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.286.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	-1.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.614.600,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.227.000,00	5.760.000,00	2.880.000,00	-3.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.849.700,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	94.662.000,00	0,00	0,00	-94.662.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	0,00	0,00	-33.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	80 Orang	60.912.000,00	0,00	0,00	-60.912.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	872.591.710,00	1.925.666.049,00	1.175.206.059,00	302.614.349,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		912.553.300,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.503.300,00	20.503.300,00	20.503.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			22.553.300,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	173.474.960,00	179.978.105,00	130.752.740,00	-42.722.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.664.500,00	94.995.000,00	58.902.400,00	12.237.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60.140.000,00	60.140.000,00	50.332.000,00	-9.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	571.808.950,00	1.570.049.644,00	914.715.619,00	342.906.669,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	110.005.000,00	570.790.220,00	254.319.300,00	144.314.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	11 Unit	110.005.000,00	570.790.220,00	254.319.300,00	144.314.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.814.776.139,00	2.760.628.267,00	2.760.628.267,00	-54.147.872,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.425.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	19.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	386.148.000,00	382.149.600,00	382.149.600,00	-3.998.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.409.528.139,00	2.369.378.667,00	2.369.378.667,00	-40.149.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	530.004.312,00	2.065.707.310,00	1.214.993.310,00	684.988.998,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		595.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	287.904.312,00	387.887.310,00	387.387.310,00	99.482.998,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	62 Unit	43.720.000,00	73.590.000,00	42.190.000,00	-1.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			45.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	198.380.000,00	1.604.230.000,00	785.416.000,00	587.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	-				-	-	4.202.436.000,00	3.704.399.870,00	2.811.345.460,00	3.647.564.000,00							7.850.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-				-	-	4.202.436.000,00	3.704.399.870,00	2.811.345.460,00	-1.391.090.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	1 Laporan	1.043.877.035,00	1.522.000.000,00	1.406.000.000,00	362.122.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			4.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				12 Laporan	6 Laporan	428.565.382,00	469.839.870,00	248.030.460,00	-180.534.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				7 Laporan	7 Laporan	696.098.087,00	548.790.000,00	307.285.000,00	-388.813.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			700.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Laporan	4 Laporan	334.489.540,00	195.480.000,00	89.460.000,00	-245.029.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	1 Laporan	1.699.405.956,00	968.290.000,00	760.570.000,00	-938.835.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			2.000.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI								37.971.411.385,00	35.178.903.215,00	32.264.560.276,00	-5.706.851.109,00					37.478.077.955,00			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							37.971.411.385,00	35.178.903.215,00	32.264.560.276,00	-5.706.851.109,00							37.478.077.955,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							37.971.411.385,00	35.178.903.215,00	32.264.560.276,00	-5.706.851.109,00							37.478.077.955,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	27.119.107.326,00	29.737.710.315,00	27.840.091.966,00	-2.006.596.369,00							25.112.510.957,00		
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	85.315.100,00	47.816.000,00	26.815.000,00	-58.500.100,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		141.531.038,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	58.590.600,00	33.725.000,00	21.569.000,00	-37.021.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			74.942.810,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.964.300,00	8.235.000,00	3.294.000,00	-11.670.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			0,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen Laporan	4 Dokumen Laporan	11.760.200,00	5.856.000,00	1.952.000,00	-9.808.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			66.588.228,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.276.656.516,00	17.489.654.830,00	21.966.470.527,00	1.689.814.011,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.161.995.359,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 ORANG Orang/ Bulan	110 ORANG Orang/ Bulan	20.000.000.000,00	17.265.254.830,00	21.742.070.527,00	1.742.070.527,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			12.111.272.283,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				67 Dokumen Dokumen	67 Dokumen Dokumen	240.800.818,00	224.400.000,00	224.400.000,00	-16.400.818,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			13.074.593,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Dokumen Laporan	13 Dokumen Laporan	35.855.698,00	0,00	0,00	-35.855.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			37.648.483,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	66.181.159,00	52.400.000,00	52.400.000,00	-13.781.159,00		-		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		68.503.861,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Unit Dokumen	8 Unit Dokumen	52.400.000,00	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			50.565.060,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	7.324.359,00	0,00	0,00	-7.324.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			7.443.391,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	6.456.800,00	0,00	0,00	-6.456.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			10.495.410,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.610.983.300,00	1.839.387.000,00	1.128.085.000,00	-482.898.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		422.899.977,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				200 stel Paket	200 stel Paket	123.870.000,00	0,00	0,00	-123.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			204.241.950,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				110 orang Orang	110 orang Orang	1.487.113.300,00	1.839.387.000,00	1.128.085.000,00	-359.028.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			218.658.027,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.341.750.073,00	1.819.961.589,00	1.051.168.383,00	-290.581.690,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.687.874.322,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 buah Paket	12 buah Paket	6.540.581,00	23.161.800,00	13.161.800,00	6.621.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			6.867.610,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	34.343.600,00	357.457.400,00	83.397.450,00	49.053.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			361.267.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	91.387.700,00	0,00	0,00	-91.387.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			310.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 unit Paket	12 unit Paket	207.517.200,00	338.252.800,00	264.436.800,00	56.919.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			175.576.744,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				100 kotak Paket	100 kotak Paket	60.885.287,00	61.600.000,00	45.315.000,00	-15.570.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			63.929.551,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				264 eksemplar Dokumen	264 eksemplar Dokumen	37.784.880,00	17.152.000,00	17.140.000,00	-20.644.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			39.674.124,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	903.290.825,00	1.022.337.589,00	627.717.333,00	-275.573.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			730.558.793,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.260.681.240,00	4.273.515.300,00	1.898.989.200,00	638.307.960,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.159.471.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit Unit	1 unit Unit	661.500.000,00	2.010.392.000,00	654.100.000,00	-7.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			694.575.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				184 unit Paket	184 unit Paket	375.406.400,00	1.315.206.400,00	1.149.002.500,00	773.596.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			127.776.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit Unit	14 Unit Unit	180.379.840,00	929.216.900,00	77.186.700,00	-103.193.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			326.095.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit Unit	1 unit Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			8.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit Unit	6 Unit Unit	43.395.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	-24.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.025.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.400.085.168,00	1.374.626.696,00	1.284.000.296,00	-116.084.872,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.190.611.081,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 surat Laporan	12 surat Laporan	5.600.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	-1.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			26.696.282,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 rekening Laporan	8 rekening Laporan	341.652.000,00	290.054.400,00	200.508.000,00	-141.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			346.645.881,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 orang Laporan	15 orang Laporan	1.052.833.168,00	1.080.332.296,00	1.079.252.296,00	26.419.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			817.268.918,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.077.454.770,00	2.840.348.900,00	432.163.560,00	-645.291.210,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		279.624.319,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit Unit	8 Unit Unit	223.618.600,00	175.168.600,00	177.168.600,00	-46.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			113.528.284,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit Unit	45 Unit Unit	31.670.000,00	24.730.000,00	20.970.000,00	-10.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			81.682.020,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit Unit	1 unit Unit	801.656.170,00	2.624.210.300,00	217.784.960,00	-583.871.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.576.250,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan Unit	12 bulan Unit	20.510.000,00	16.240.000,00	16.240.000,00	-4.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			61.261.515,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan Unit	12 bulan Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			11.576.250,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	7.243.556.578,00	3.862.619.100,00	3.719.549.210,00	-462.439.579,00							6.781.116.999,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	6.807.579.824,00	2.352.652.700,00	2.209.387.810,00	-4.598.192.014,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.429.906.703,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				379 laporan Laporan	379 laporan Laporan	3.879.504.820,00	927.491.400,00	1.216.821.300,00	-2.662.683.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			3.941.428.933,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				177 laporan Laporan	177 laporan Laporan	815.377.781,00	737.960.400,00	663.021.200,00	-152.356.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			783.303.787,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				102 Laporan Laporan	102 Laporan Laporan	36.450.000,00	29.265.000,00	26.415.000,00	-10.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			132.186.912,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				52 laporan Laporan	52 laporan Laporan	184.126.500,00	105.771.000,00	98.890.000,00	-85.236.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			200.874.684,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				4 laporan Laporan	4 laporan Laporan	974.050.270,00	239.005.700,00	2.976.000,00	-971.074.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			483.758.550,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Laporan Kesepakatan	1 Laporan Kesepakatann	195.036.400,00	142.259.000,00	92.869.510,00	-102.166.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			129.168.081,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				5 laporan Dokumen	5 laporan Dokumen	723.034.053,00	170.900.200,00	108.394.800,00	-614.639.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			759.185.756,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	435.976.754,00	1.509.966.400,00	1.510.161.400,00	1.074.184.646,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		351.210.296,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				100 % Laporan	100 % Laporan	109.153.654,00	25.000.000,00	25.195.000,00	-83.958.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			114.611.336,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100 % Laporan	100 % Laporan	326.823.100,00	1.484.966.400,00	1.484.966.400,00	1.158.143.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			236.598.960,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	3.608.747.481,00	1.578.573.800,00	704.919.100,00	1.975.702.518,00							5.584.449.999,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	827.318.500,00	182.824.800,00	104.857.800,00	-722.460.700,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		954.426.325,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Dokumen Rekomend asi	1 Dokumen Rekomend asi	439.552.600,00	14.640.000,00	5.002.000,00	-434.550.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			724.109.767,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Dokumen Rekomend asi	1 Dokumen Rekomend asi	387.765.900,00	168.184.800,00	99.855.800,00	-287.910.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			230.316.558,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	2.781.428.981,00	1.395.749.000,00	600.061.300,00	-2.181.367.681,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.630.023.674,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan Perangkat Daerah	1 Laporan Perangkat Daerah	1.033.550.020,00	272.520.100,00	143.066.100,00	-890.483.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.085.227.521,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 Laporan Perangkat Daerah	1 Laporan Perangkat Daerah	184.508.679,00	62.135.200,00	48.505.200,00	-136.003.479,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.165.797.946,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Laporan Kegiatan	4 Laporan Kegiatan	577.113.500,00	811.965.700,00	333.540.000,00	-243.573.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.253.322.986,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Laporan Perangkat Daerah	2 Laporan Perangkat Daerah	986.256.782,00	249.128.000,00	74.950.000,00	-911.306.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas			1.125.675.221,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							13.524.540.258,00	26.815.366.952,00	71.591.006.191,00	58.066.465.933,00							14.505.453.771,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							13.524.540.258,00	26.815.366.952,00	71.591.006.191,00	58.066.465.933,00							14.505.453.771,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %	100 %	8.181.027.258,00	15.418.311.156,32	12.149.771.491,00	764.190.313,00							8.945.217.571,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	154.290.900,00	66.876.000,00	28.656.000,00	-125.634.900,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiak BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		185.484.535,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	91.000.000,00	47.424.000,00	22.560.000,00	-68.440.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiak BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			112.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	16.221.100,00	12.156.000,00	2.448.000,00	-13.773.100,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiak BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			18.654.265,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	47.069.800,00	7.296.000,00	3.648.000,00	-43.421.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiak BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			54.130.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	5.893.735.816,00	6.060.392.869,00	6.222.291.325,00	328.555.509,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		6.640.385.842,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	5.657.166.116,00	5.800.772.869,00	5.975.421.325,00	318.255.209,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			6.239.275.387,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	211.005.000,00	244.320.000,00	244.320.000,00	33.315.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			371.711.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	25.564.700,00	15.300.000,00	2.550.000,00	-23.014.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			29.399.405,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				12 bulan	12 bulan	49.499.800,00	41.420.000,00	40.310.000,00	-9.189.800,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		56.924.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	7 Dokumen	34.000.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00	5.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			39.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	2.220.000,00	1.110.000,00	-7.890.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	6.499.800,00	0,00	0,00	-6.499.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			7.474.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				80 %	80 %	151.814.000,00	0,00	0,00	-151.814.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		187.652.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			31.912.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0 Orang	121.814.000,00	0,00	0,00	-121.814.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			155.739.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				12 bulan	12 bulan	1.034.935.408,00	7.974.589.987,32	4.894.772.266,00	3.859.836.858,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		871.135.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9.248.000,00	9.248.000,00	2.311.700,00	-6.936.300,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			10.635.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	35.198.400,00	35.198.400,00	0,00	-35.198.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			8.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			18.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	54.268.200,00	328.008.900,00	228.074.900,00	173.806.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			94.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	42.300.000,00	254.801.800,00	166.628.700,00	124.328.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			46.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	22.548.000,00	22.528.000,00	20.928.000,00	-1.620.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.600.000,00	15.650.000,00	7.825.000,00	-7.775.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			17.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	771.143.408,00	7.244.154.887,32	4.404.003.966,00	3.632.860.558,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10.429.400,00	0,00	0,00	-10.429.400,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.200.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			79.580.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	82.519.400,00	130.713.900,00	28.671.000,00	-53.848.400,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		75.099.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Paket	0 Paket	18.121.600,00	37.230.000,00	0,00	-18.121.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			17.599.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	64.397.800,00	93.483.900,00	28.671.000,00	-35.726.800,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	592.541.934,00	735.648.400,00	696.760.900,00	104.218.966,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		681.423.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			5.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.200.000,00	106.050.000,00	74.662.500,00	4.462.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			80.730.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	517.341.934,00	624.598.400,00	619.598.400,00	102.256.466,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			594.943.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				12 Bulan	12 Bulan	221.690.000,00	408.670.000,00	238.310.000,00	16.620.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat		247.112.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	139.300.000,00	160.900.000,00	86.600.000,00	-52.700.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			160.195.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	37.750.000,00	37.750.000,00	25.700.000,00	-12.050.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			29.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.640.000,00	210.020.000,00	126.010.000,00	81.370.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi				2,74 nilai	2,74 nilai	295.514.000,00	3.854.672.595,68	2.608.766.500,00	55.827.100,00							351.341.100,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	295.514.000,00	3.854.672.595,68	2.608.766.500,00	2.313.252.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Generasi Muda, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Etnis/Paguyuban, Ormas, dan Instansi Terkait		351.341.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				690 Orang	510 Orang	100.514.000,00	1.234.432.000,00	1.139.222.000,00	1.038.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			115.591.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				215 Orang	155 Orang	65.000.000,00	1.175.471.095,68	24.775.000,00	-40.225.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			74.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				120 Orang	60 Orang	25.000.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	31.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			28.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				57 Orang	56 Orang	50.000.000,00	1.388.569.500,00	1.388.569.500,00	1.338.569.500,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			57.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik				3,3 Nilai	3,3 Nilai	3.466.762.000,00	5.883.189.200,00	5.507.898.200,00	520.014.300,00							3.986.776.300,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.466.762.000,00	5.883.189.200,00	5.507.898.200,00	2.041.136.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Generasi Muda, Instansi Vertikal, dan OPD terkait		3.986.776.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				450 Orang	940 Orang	3.356.762.000,00	5.867.839.200,00	5.492.548.200,00	2.135.786.200,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			3.756.776.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	50 Orang	60.000.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	-44.650.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			138.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			92.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi				100 %	100 %	85.244.000,00	103.574.000,00	56.050.000,00	12.786.600,00							98.030.600,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				1 rekomendasi	1 rekomendasi	85.244.000,00	103.574.000,00	56.050.000,00	-29.194.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pengurus Ormas dan Masyarakat		98.030.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				140 Orang	150 Orang	55.244.000,00	103.574.000,00	56.050.000,00	806.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			63.530.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				14 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			34.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya				3,13 Nilai	3,13 Nilai	859.502.000,00	713.720.000,00	565.910.000,00	-467.378.450,00							392.123.550,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				1 rekomendasi	1 rekomendasi	859.502.000,00	713.720.000,00	565.910.000,00	-293.592.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Pelajar, Generasi Muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		392.123.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	370 Orang	150.000.000,00	552.760.000,00	464.180.000,00	314.180.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			156.373.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				375 Orang	130 Orang	668.525.000,00	160.960.000,00	101.730.000,00	-566.795.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			166.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	0 Laporan	40.977.000,00	0,00	0,00	-40.977.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			69.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan				3,04 Nilai	3,04 Nilai	636.491.000,00	841.900.000,00	50.702.610.000,00	95.473.650,00							731.964.650,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				5 rekomend asi	5 rekomend asi	636.491.000,00	841.900.000,00	50.702.610.000,00	50.066.119.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah	Aparatur, Tokoh mayarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Instansi Vertikal dan OPD terkait		731.964.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60 Orang	95 Orang	85.000.000,00	53.900.000,00	50.037.800.000,00	49.952.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			97.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	75 Orang	128.000.000,00	92.480.000,00	57.450.000,00	-70.550.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			147.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	154.000.000,00	9.760.000,00	4.880.000,00	-149.120.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			177.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				22 Dokumen	13 Dokumen	269.491.000,00	685.760.000,00	602.480.000,00	332.989.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BASandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah			309.914.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H																		
									8.579.278.069.784,00	6.438.050.092.948,00	6.500.845.443.658,70	-2.078.432.626.125,30						7.064.464.902.287,00		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan mempedomani hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan (2025) kondisi Triwulan I, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk mengakomodir kebijakan nasional dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, kebijakan daerah dengan megakomodir Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dilantik oleh Presiden RI pada tanggal 20 Februari 2025, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga merupakan upaya untuk tetap menjaga agar pencapaian target-target pembangunan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 juga dapat tercapai, mengingat Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Nasional.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan perubahan Penjabaran APBD 2025 yang telah dilakukan untuk mengakomodir beberapa regulasi serta kebijakan daerah terutama kewajiban Pemerintah Daerah yang mengalami tunda bayar pada tahun anggaran 2024 serta hasil verifikasi rancangan Perubahan Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi. Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan acuan bagi :

1. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
4. Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dalam penyusunannya, untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Risiko-risiko yang diidentifikasi, baik yang bersifat internal (seperti keterbatasan kapasitas pelaksana, ketidaksesuaian regulasi, dan penyesuaian anggaran) maupun eksternal (seperti dinamika ekonomi nasional, bencana alam, dan gangguan stabilitas sosial), dikelola secara sistematis melalui langkah identifikasi, analisis, penilaian, serta penyusunan rencana mitigasi dan responsif.

Bappeda bersama perangkat daerah memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara adaptif dan terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui mekanisme pemantuan dan evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat tetap diarahkan secara efektif dan berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan yang dinamis.

Evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme ini bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi, keterpaduan, dan ketercapaian antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan pembangunan daerah.

Bappeda berperan sebagai leading sektor dalam mengoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara triwulanan maupun tahunan dengan pendekatan evaluasi hasil (outcome-based evaluation). Perangkat daerah bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik melalui format yang telah ditentukan. Laporan ini mencakup realisasi input, output, dan capaian indikator outcome yang relevan, disertai analisis

capaian dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Lebih lanjut, Bappeda melakukan validasi dan analisis terhadap konsistensi capaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan mekanisme ini tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan adanya sistem umpan balik (*feedback loop*) yang berkelanjutan antara perencanaan dan pelaksanaan, guna menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RPJMD dan sasaran pembangunan nasional.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

**DAFTAR PENERIMA HIBAH
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS KESEHATAN
2025 Perubahan

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025031910111248NU50003203	028/01.04.00/ORG/III/2025- PALANG MERAH INDONESIA Jalan sisingamangaraja no 34, kel. simpang haru, kec padang timur, kota padang Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	HIBAH PERUBAHAN PMI 2025	026/01.04.00/KEU/III/2025	18 Maret 2025	1,191,008,400	Layak	439,635,000	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		00 0000	439,635,000
Total						1.191.008.400		439.635.000				439.635.000

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD




QZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

**HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS SOSIAL
2025 Perubahan**

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025031310110424NU50002993	PSAA. MUHAMMADIYAH CABANG GUGUK II KAB. LIMA PULUH KOTA Jr. Kubang Tungkek Kelurahan Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Hibah Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan Makanan, Penyediaan Asrana yang Mudah di Akses (Palang Panti), Dan Sosial Entrepreneur (UEP) Tahun 2026	003/PAM- CGII/II- 2025	25 Februari 2025	301,430,800	Tidak Layak	0	0		09 April 2025	0
2.	HBH2025031410110341NU50003010	PSAA. IKHWANUS- SHAFI KAB. AGAM Gobah Bawah Jorong Lasi Mudo Kelurahan Lasi Kecamatan Candung KAB. AGAM	PERMOHONAN HIBAH	04/PSAA- IS/II/2025	17 Februari 2025	157,700,000	Tidak Layak	0	0		09 April 2025	0
Total						459.130.800		0				0

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



[Signature]
YQZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

**HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025 Perubahan**

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025020710110296NU50002202	13.31.001- KWARDA 03 GERAKAN PRAMUKA SUMATERA BARAT JL. PRAMUKA RAYA NO. 12, BELAKANG KAMPUS AKBP, PADANG - 25135 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Anggaran Tambahan Tahun 2025	17 - 03 - A	30 Januari 2025	2,594,800,000	Layak	1,000,000,000	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		15 April 2025	1,000,000,000
2.	HBH2025033010111551NU50003523	13.31.002- KONI SUMATERA BARAT Jl. Rasuna Said No. 87 Kelurahan 0 Kecamatan 0 0	Proposal Rencana Kegiatan dan Anggaran Belanja KONI Provinsi Sumatera Barat pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025	379/K- SB/KU/III/2025	28 Maret 2025	25,448,023,000	Layak	21,000,000,000	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		15 April 2025	21,000,000,000
Total						28.042.823.000		22.000.000.000				22.000.000.000

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



[Signature]
IQZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

**HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2025 Perubahan**

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025032610111486NU50003450	KOPERASI KONSUMEN KOPAS BUNDO KANDUANG PASAR BANDA BUEK RT 02 RW 03 KEL. BANDAR BUAT KEC. LUBUK KILANGAN KOTA PADANG BANDA BUEK KOTA PADA G Jl. Pasar Bandar Buat RT 02 RW 03 Kelurahan 0 Kecamatan 0 KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Koperasi Konsumen Kopas Bundo Kanduang	01/Kop- SP/Pdg.2024	10 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		22 April 2025	25,000,000
Total						25.000.000		25.000.000				25.000.000

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



YUZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

**HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2025 Perubahan**

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025030510110917NU50002753	555-665-2023-KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT Jl. K.H Ahmad Dahlan No.31 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah APBD Perubahan Tahun 2025	21/KPID- SB/II/2025	11 Februari 2025	1,500,000,000	Layak	1,184,216,713	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		29 April 2025	1,184,216,713
Total						1.500.000.000		1.184.216.713				1.184.216.713

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



YUZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2025 Perubahan

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
1.	HBH2025011510110193NU5000	MESJID BAITURRAHMAN KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO TIMUR NAGARI GUNUNG PADANG ALAIHBH2025 NAGARI GUNUNG PADANG ALAI KEC. V KOTO TIMUR KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT Kelurahan Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur KAB. PADANG PARIAMAN	MASJID BAITURRAHMAN GUNUNG PADANG ALAI V KOTO TIMUR	03/MB/GN/GPA/XI/2024	25 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
2.	HBH2025011510110194NU5000	TAQWA KAB. LIMA PULUH KOTA BUKIK BARISAN JORONG KOTO GADANG NAGARI MAEKHBH2025 JORONG KOTO GADANG Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID TAQWA	05/TAQWA/MAEK/2023	25 April 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
3.	HBH2025011510110195NU5000	NURUL FALAH KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JR. SUAYAN RANDAHHBH2025 JORONG SUAYAN Kelurahan Suayan Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID NURUL FALAH	01/PPMNF/SR/III-2023	04 Maret 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
4.	HBH2025011510110196NU5000	BAITUL HIDAYAH KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JORONG KOTO NAGARI AMPALUHBH2025 JORONG KOTO Kelurahan Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID BAITUL HIDAYAH	02/MBHDYH/06/2022	02 Januari 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
5.	HBH2025011710110197NU5001	NURUL ILMI SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG KAB. AGAM LUBUK BASUNG SIMPANG SAGO MANGGOPOH NAGARI MANGGOPOHHBH2025 JORONG SAGO NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KAB. AGAM Kelurahan Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Pembangunan Masjid	428/108.21.09/SMA.03/LL-2024	03 September 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
6.	HBH2025011710110198NU5002	RAYA NURUL IHSAN KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAHHBH2025 JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAH KEC. TANJUNG EMAS KAB. TANAH DATAR Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	MASJID RAYA NURUL IHSAN	48/PMRNI/NKT/2024	30 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
7.	HBH2025011710110199NU5003	'AINUL YAQIN KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM NAGARI SIKUCUA BARAT KOTO PANJANG ALAHAN TABEKHBH2025 KORONG KOTO PANJANG NAGARI SIKUCUA BARAT KEC. V KOTO KAMPUNG DALAM KAB. PADANG	Pembangunan Masjid	012/MAY/H/2023	19 Februari 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		PARIAMAN Kelurahan Sikurur Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN										
8.	HBH2025011710110200NU5004	AL-JIHAD KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS TUIK IV KOTO MUDIEK, BATANG KAPAS, KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT 25661, INDONESIA HBH2025 Masjid Al Jihad Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Mohon bantuan pembangunan masjid	03/PM AL-T/NT/IV.KT.KM/2024	25 Oktober 2024	93,800,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
9.	HBH2025011710110201NU5005	JABAL RAHMAH KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG SIMPANG SAWAH SILUPAK NAGARI TANJUNG LABUAH HBH2025 JORONG SIMPANG SAWAH SILUPAK NAGARI TANJUANG LABUAH KEC.SUMPUR KUDUS KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Tanjuang Labuah Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	Pembangunan Masjid	PMJR/TJ.Labuah/01-2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
10.	HBH2025012010110202NU5006	JIHAD KOTA PADANG KURANJI JL. SIMPANG KOTO TINGGA HBH2025 JI Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh KOTA PADANG	Permohonan bantuan dana	08/M-Jihad/SKT/II/2025	10 Januari 2025	141,403,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
11.	HBH2025012110110214NU5007	MASJID ASRA AL BAKRIE KOTA PADANG PADANG BARAT JL. OLO LADANG NO. 13 KEL. OLO HBH2025 KEL. OLO KEC.PADANG BARAT KOTA PADANG Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	MASJID ASRA AL- BAKRIE	38/PM-ASRA/XI/2024	06 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
12.	HBH2025012110110215NU5008	MASJID NURUL IKHLAS KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG SIBOLIN NAGARI SISAWAH HBH2025 JORONG SIBOLIN NAGARI SISAWAH KEC. SUMPUR KUDUS KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	MASJID NURUL IKHLAS	28/MM/Sis-2024	05 November 2024	30,000,000	Tidak Layak	0 0			30 April 2025	0
13.	HBH2025012110110216NU5009	MASJID AL-HASANATAIN KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG KORONG SIMPANG TIGO NAGARI SINTUK HBH2025 Simpang Tigo Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	Mohon Bantuan Dana Pembangunan Masjid	04/M.HSN-STK/II-2024	00 0000	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
14.	HBH2025012110110217NU5010	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. SOLOK KUBUNG JORONG KAJAI NAGARI KOTO BARU HBH2025 KORONG PAKAN AKEK JORONG KAJAI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KAB. SOLOK	Pembangunan Mushalla	-	11 Oktober 2023	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung KAB. SOLOK										
15.	HBH2025012110110218NU5011	MASJID SYUHADA KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI NAGARI PALANGKI, KECAMATAN IV NAGARIHBH2025 NAGARI PALANGKI KEC. IV NAGARI KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID SYUHADA'	10/PMSy/PLK/III/2024	10 Maret 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
16.	HBH2025012110110219NU5013	MASJID AL-MUHAJIRIN KAB. SIJUNJUNG KOTO VII JORONG KOTO PANJANG NAG. LIMO KOTO KEC. KOTO VII KAB. SIJUNJUNGBH2025 JORONG KOTO PANJANG NAGARI LIMO KOTO KEC. KOTO VII KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Limo Koto Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	MASJID AL MUHAJIRIN	02/PM-AM/TL/JKP/LK/2024	03 Juli 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
17.	HBH2025012110110222NU5016	MASJID NURUL IKHLAS KAB. SIJUNJUNG KAMANG BARU JORONG BANJAR TENGAH NAGARI AIE AMOHBH2025 JORONG LUBUAK KAPIEK NAGARI AIE AMO KEC. KAMANG BARU KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Aia Amo Kecamatan Kamang Baru KAB. SIJUNJUNG	MASJID NURUL IKHLAS	01/MNH/AA-2024	18 April 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
18.	HBH2025012110110223NU5017	MASJID AL-MANAR KAB. AGAM KAMANG MAGEK JORONG GATAH NAGARI MAGEK KECAMATAN KAMANG MAGEK KAB. AGAM SUMATERA BARATBH2025 Jorong Gatah Nagari Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam Kelurahan Magek Kecamatan Kamang Magek KAB. AGAM	Pembangunan Masjid	015/PGRS/MSJD/UJUANG/VII/2024	26 Juli 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
19.	HBH2025012110110224NU5018	MASJID AKBAR KAB. AGAM PALUPUH JORONG SIMAUNG MUDIAK NAGARI NAN TUJUAHBH2025 Jalan simauang Mudiak nagari nan tujuh Kec. Palupuh Kab. Agam Kelurahan Nan Tujuh Kecamatan Palupuh KAB. AGAM	Hibah kemajid Akbar Jorong Simaung Mudiak, Palupuah, Agam	2/PMAS/I-2025	02 Januari 2025	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
20.	HBH2025012110110225NU5019	MUSHALLA NURUL HIDAYAH KOTA PADANG KOTO TANGAH TVRI SUMBAR JL.BY.PASS 25 PADANG.HBH2025 Jl Padang By Pass KM 16 Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	03/PPM-Nurul Hidayah/2023	07 Maret 2023	192,747,060	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
21.	HBH2025012110110227NU5020	MUSHALLA MUSHALLAH AR-RAHMAN KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG KOTO TANGAHHBH2025 JORNG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAH KEC. TANJUNG EMAS KAB. TANAH DATAR Kelurahan Koto Tangah	HIBAH MUSHALLAH SURAU AR-RAHMAN	03/M.S.N.I/2024	02 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR										
22.	HBH2025012110110228NU5021	MUSHALLA MUSHALLAH TAQWA KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO TANGAH HBH2025 JORONG SUNGAI SALAK NAGARI KOTO TANGAH KEC. TANJUNG EMAS KAB. TANAH DATAR Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	MUSHALLA TAQWA	01/Mus.Taqwa/Jr.SS/NKT-2024	30 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
23.	HBH2025012110110229NU5022	MUSHALLA MUSHALLA NAHDATUL ISLAM KOTA PADANG PADANG BARAT PASIR PURUS ATASA HBH2025 PASIR PURUS ATAS KEC. PADANG BARAT KEL. RIMBO KALUANG Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	HIBAH MUSHALLA NAHDATUL ISLAM	01/MNI/RK/XII/2024	10 Desember 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
24.	HBH2025012110110230NU5023	MASJID TAQWA KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JL. PROF. M. YAMIN, SH MUARO SIJUNJUNG HBH2025 MUARO SIJUNJUNG KEC. SIJUNJUNG KAB SIJUNJUNG Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	Renovasi Masjid	003/Masjid Taqwa/I/2024	24 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
25.	HBH2025012110110212NU5024	MUSHALLA AL-IKHLAS KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. HULU AIR NAGARI HARAU HBH2025 Hulu Air Kelurahan Harau Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA AL IKHLAS JORONG HULU AIA	001/PMAl-HR/2022	25 Maret 2022	45,145,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
26.	HBH2025012210110233NU5000	MUSHALLA NURUL IMAN KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JR. BATUANG BARIRIK, NAG. TANJUANG BARINGIN SELATAN HBH2025 Jl Kp Chaniago Tangah Tanjung Beringin Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Mushalla	03/MNI/2023	09 Agustus 2023	152,405,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
27.	HBH2025012210110234NU5000	MASJID DARUL IKHLAS KAB. PADANG PARIAMAN BATANG GASAN NAGARI GASAN GADANG KORONG MANDAHILING HBH2025 KORONG MANDAHILIANG NAGARI GASAN GADANG KEC. BATANG GASAN KAB. PADANG PARIAMAN Kelurahan Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH MASJID DARUL IKHLAS	10/PMSy/PLK/III/2024	20 Desember 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
28.	HBH2025012210110235NU5000	MASJID BAITURRAHMAN KOTA PADANG KURANJI RAMBUTAN RAYA BELIMBING HBH2025 JLN.RAMBUTAN RAYA,RT.003 RW.013 KEL. KURANJI KEC. KURANJI KOTA PADANG Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Pembangunan Masjid	03/MBR-KR/JI/2025	21 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
29.	HBH2025012210110236NU5000	MASJID BAITUL AMAL KAB. PESISIR SELATAN AIRPURA KAMPUNG BATANG TINDIH NAGARI PULAU	Pembangunan Masjid	01/PM-PRI/III/2024	24 Februari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		RAJOHBH2025 KP. BATANG TINDIH NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA KEC. AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura KAB. PESISIR SELATAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
30.	HBH2025012310110239NU50002150	MASJID AS- SAKINAH KOTA PADANG NANGGALO KOMP. CEMARA II RT. 04 RW. 01 GURUN LAWEHBH2025 KOMPLEK CEMARA II KAMPUNG KOTO KELURAHAN GURUN LAWEH KEC. NANGGALO KOTA PADANG Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Pembangunan Masjid	06/MASJID-AS SAKINAH/-2025	05 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
31.	HBH2025012310110240NU50002151	MUSHALLA NURUL YAQIN ANDALEH KAB. SOLOK KUBUNG JALAN PINCURAN 4 JORONG GALANGGANG TANGAH SALAYOHBH2025 Jalan Andaleh Pincuran Ampek Jorong Galanggang Tengah Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Kelurahan Salayo Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Permohonan Dana Hibah Tahun 2024	100/02/NSLY-2024	04 Desember 2024	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
32.	HBH2025012310110241NU50002152	MUSHALLA AR-RAAFI KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JORONG V TIKALAK, NAG. TANJUANG BARINGIN SELATANHBH2025 Jalan Tikalak Baru Jorong V Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	004/M-Er Raafi/2023	30 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
33.	HBH2025012310110242NU50002153	MUSHALLA MUTMAINAH KAB. PESISIR SELATAN KOTO XI TARUSAN SIGUNTURHBH2025 Kampung Jirat Nagari Siguntur Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Siguntur Kecamatan Koto Xi Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	Bantuan Biaya Pembangunan	/SM/KP-J/SGT/VI-2024	06 Desember 2024	52,550,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
34.	HBH2025012310110243NU50002154	MUSHALLA NURUL IKHSAN KAB. SIJUNJUNG KOTO VII JORONG SUNGAI GEMIRI NAGARI PADANG LAWEHHBH2025 Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Kelurahan Padang Laweh Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Dana Bantuan	4/PMNI/PDL-2024	10 Juli 2024	27,725,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
35.	HBH2025012310110244NU50002155	MASJID AL- ANSHOR KAB. SIJUNJUNG KOTO VII JORONG TERATAK BETUNG PADANG LAWEHHBH2025 Jorong Taratak Betung Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Kelurahan Padang Laweh Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid	16/MAA/PDL/4/2024	04 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
36.	HBH2025012310110246NU50002156	MASJID NURUL HUDA KAB. SIJUNJUNG KUPITAN JORONG SIMANCUNG NAGARI PADANG SIBUSUK HBH2025 Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Bantuan Dana	01/MNH/I/2025	01 Februari 2025	61,998,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
37.	HBH2025012310110247NU50002158	MASJID NURUL HUDA KAB. SIJUNJUNG KOTO VII JORONG KOTO PANJANG, NAGARI LIMO KOTO, KECAMATAN KOTO VII, KAB. SIJUNJUNG HBH2025 NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Limo Koto Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	Pembangunan Masjid	71/PMGN/LM/11/2024	06 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
38.	HBH2025012410110249NU50002161	MASJID AL-KAMIL KOTA PADANG PADANG BARAT JL. SAMUDRA KEL. PURUS HBH2025 Jln. Samudra , Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	03.008/P-Msj-Alkml/I/2025	13 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
39.	HBH2025012410110250NU50002163	MASJID MASJID NURUL IMAN KANDANG HARIMAU KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG KANDANG HARIMAU NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG HBH2025 Jorong Kandang Harimau Nagari Sijunjung Kec. Sijunjung kab. sijunjung Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	Pembangunan Masjid	03/MNI-KDH/Sjj-2025	21 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
40.	HBH2025012410110252NU50002164	MASJID AL-MUNAWWARAH KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR GUGUNG NAG.PADANG GALUGUA KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 KAMPUNG GUGUNG JORONG MAKMUR NAGARI PADANG GELUGUR KEC. PADANG GELUGUR KAB. PASAMAN Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	Pembangunan Masjid	007/SP/AM/V/2024	27 Mei 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
41.	HBH2025012410110253NU50002165	MASJID ISTIQAMAH KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JR. TABEK PANJANG NAG. KT. BARU SIMALANGGANG HBH2025 Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Kelurahan Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Istiqomah Jorong Tabek Panjang	005/001/PP-MITB/I/2025	15 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
42.	HBH2025012410110254NU50002166	MASJID MUKHLISIN KOTA BUKITTINGGI MANDIANGIN K. SELAYAN JL. SOEKARNO HATTA-MANGGIS GANTIANG HBH2025 Manggis Jalan Soekarno Hatta	Masjid Mukhlisin Manggis	01/P3M-BKT/I/2025	22 Desember 0025	55,115,200	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Manggis/Ganting Kecamatan Mandiingin K. Selayan KOTA BUKITTINGGI										
43.	HBH2025012410110255NU50002167	MASJID MUJAHIDIN KAB. AGAM TILATANG KAMANG JR. RAWANG BUNIAN HBH2025 JORONG RAWANG BUNIAN Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	MESJID AL-MUJAHIDIN RAWANG BUNIAN	02/PAN-PEM-MJHN/I/2025	12 Januari 2025	288,424,960	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
44.	HBH2025012710110256NU50002168	MASJID AL-IKHLAS KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JORONG TAMBUN IJUK NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG HBH2025 JORONG TAMBUN IJUK KENAGARIAN KOTO TANGAH SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH Kelurahan Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan Dana Hibah	09/PPMB-MAI/VIII/2024	10 Agustus 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
45.	HBH2025013010110258NU50002170	MASJID AL-IHSAN KAB. SOLOK SELATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH JR. SAWAH KAREH BALUN HBH2025 Jln. Sawah Kareh, Jorong batang limpaung, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	001/AL-IHSAN/I/2025	09 Januari 2025	50	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
46.	HBH2025013110110260NU50002173	MASJID NURUL HUDA KAB. SOLOK GUNUNG TALANG BALAI PANDAN CUPAK HBH2025 BALAI PANDAN CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana Untuk Melanjutkan Pembangunan Tempat Berwuduk Masjid Nurul Huda	05/MNH-BP/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
47.	HBH2025020210110264NU50002174	MUSHALLA SURAU SUMABUR KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU NAGARI TARAM HBH2025 jorong bala cubadak Kelurahan Taram Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan pencairan dana	01/PSS/XI/2023	24 November 2023	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
48.	HBH2025020310110265NU50002175	MASJID NURUL IMAN KAB. SOLOK SELATAN SANGIR BATANG HARI NAGARI RANAH PANTAI CERMIN HBH2025 Nagari Ranah Pantai Cermin Kelurahan Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	001/PP-MNI/I/2025	20 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
49.	HBH2025020310110267NU50002176	MASJID MUSLIMIN KAB. LIMA PULUH KOTA SITUJUAH LIMO NAGARI JR. KOTO NAGARI SITUJUAH BATUA HBH2025 Jorong Koto Nagari Situjuh Batua Kec. Situjuhah Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota Kelurahan Situjuhah Batua Kecamatan Situjuhah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana untuk Pembuatan Tempat Berwudhu	14/M-Mslm/Kt-2024	04 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
50.	HBH2025020410110268NU50002177	MASJID NUR HAQ KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG KUBU JORONG PADANG KUBU NAGARI BINJAI HBH2025 JORONG PADANG KUBU Kelurahan Binjai Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	MASJID NURUL HAQ PADANG KUBU	001/BPN-MNH/II/2025	04 Februari 2025	338,705,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
51.	HBH2025020410110269NU50002178	MASJID AL-IHSAN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. ATAS LABAN NAGARI HALABAN HBH2025 Jorong Atas Laban Kelurahan Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/YMA-I/HLBN-LK/ /2024	01 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
52.	HBH2025020410110270NU50002179	MASJID MUSLIMIN GODUANG KAB. LIMA PULUH KOTA MUNGKA JORONG LOBUAH TUNGGANG NAGARI SIMPANG KAPUAK HBH2025 Jorong Lobuah Tunggang Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Simpang Kapuak Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/MM-LBT/N-SPK/V-2024	05 Januari 2024	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
53.	HBH2025020410110271NU50002180	MASJID WUSTHA KAB. LIMA PULUH KOTA SITUJUAH LIMO NAGARI JR. TANJUANG SIMANTUANG NAG. SITUJUAH GDG HBH2025 Jorong Tanjuang Simantuang Nagari Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Pembangunan Masjid	10/MW/Tj.S-SG/2024	01 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
54.	HBH2025020510110272NU50002181	MASJID UKHUWWAH KAB. SOLOK SELATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH JR. ULU SULITI I PAKAN RABAA UTARA DUO HBH2025 ULU SULITI 1 NAGARI PAKAN RABAA UTARA DUO KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN Kelurahan Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh KAB. SOLOK SELATAN	PEMBANGUNAN TEMPAT BERWUDUK MASJID JAMI' UKHUWWAH ULU SULITI	01/PMU-US/2025	21 Januari 2025	114,815,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
55.	HBH2025020510110273NU50002182	MASJID ISTIQAMAH KAB. PESISIR SELATAN AIRPURA KAMPUNG KOTO PANDAN NAGARI INDERAPURA TIMUR HBH2025 Kampung Koto Pandan Kelurahan Inderapura Timur Kecamatan Airpura KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	02/06/Masjid.Istiqamah/2024	11 Oktober 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
56.	HBH2025020510110221NU50002183	MASJID HAYATUN NUFUS KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. PURWAJAYA NAGARI SARILAMAK HBH2025 Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	04/M.Hyn/Pj/2025	06 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
57.	HBH2025020510110277NU50002187	MASJID DARUL FALAH KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. PD. MANGUNAI NAGARI AMPALU HBH2025 Jln. Alang Lawas - Ampalu Km 7,8 Jorong Padang Mangunai Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Pulu Kota Kelurahan Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	07/Mdf-PDM/III/2025	09 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
58.	HBH2025020510110279NU50002188	MASJID DARUL MUTTAQIN KAB. PESISIR SELATAN LINGGO SARI BAGANTI KEL.IV MUARA GADANG HBH2025 MASJID DARUL MUTTAQIN, KAMPUNG MUARO GADANG BARAT, NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT Kelurahan Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti KAB. PESISIR SELATAN	PEMBANGUNAN MASJID	001/A/PM.DM/MGAH/III-2024	16 Maret 2025	117,610,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
59.	HBH2025020510110280NU50002189	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN PASIR TAMPANG JORONG PASIR BINTUNGAN NAGARI AIA GADANG HBH2025 JOR. PASIR BINTUNGAN NAGARI AIA GADANG BARAT KEC. PASAMAN BARAT Kelurahan Aia Gadang Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	BANTUAN DANA MESJID	0005/MRNX/X/2025	15 Januari 2025	75,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
60.	HBH2025020510110281NU50002190	MASJID IHSAN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. KOTO MALINTANG NAG. BALAI PANJANG HBH2025 Jorong Koto Malintang Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Perhonoran Bantuan Dana	/PMI/KTM-BLP/III-2023	03 Januari 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
61.	HBH2025020510110283NU50002192	MASJID NURUL IKHLAS KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN JORONG BANDAREJO DUSUN IV NAGARI LINGKUANG AUA HBH2025 KAPLINGAN SIMPANG EMPAT Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana dari Kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat	28/PMNI.KAV/DES-2024	20 Desember 2024	55,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
62.	HBH2025020510110287NU50002196	MASJID ASH-HAABUL JANNAH KOTA PADANG KOTO TANGAH LUBUK GADING I PENGEMBANGAN KELURAHAN LUBUK BUAYA KEC. KOTO TANGAH HBH2025 KOMPLEK LUBUK GADING I PENGEMBANGAN KELURAHAN LUBUK BUAYA Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	HIBAH MASJID ASH- HAABUL JANNAH	01/PM-AHJ/I/2024	01 Januari 2024	20,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
63.	HBH2025020510110276NU50002198	MASJID AL--IKHLAS KELOK MARO KOTA PADANG KOTO TANGAH JL.	Usulan Masjid Kunjungan Tim Ramadhan Provinsi	400.14/Kesra-2025	22 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		RAYO PARAK BURUK RT.001/005, KEL. BATIPUH PANJANG. HBH2025 Jl. Raya parak buruk, RT.001 RW.005 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	Sumatera Barat Tahun 2025						Kelembagaan Bina Spiritual			
64.	HBH2025020510110294NU50002199	MASJID DARUL FALAH KAB. PESISIR SELATAN BAYANG TALAOK KENAGARIAN TALAOK HBH2025 Kampung Talaok Kelurahan Talaok Kecamatan Bayang KAB. PESISIR SELATAN	Masjid Darul Falah Talaok	04/P-M.DF/TLK/01/2025	29 Januari 2025	737,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
65.	HBH2025020510110295NU50002200	MASJID BAITURRAHIM KAB. PESISIR SELATAN BAYANG LUBUK BEGALUNG KENAGARIAN AUR BEGALUNG HBH2025 LUBUK BEGALUNG, NAGARI AUR BEGALUNG Kelurahan Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang KAB. PESISIR SELATAN	MASJID BAITURRAHIM LUBUK BEGALUNG	5/MBLB/ABT/2025	03 Februari 2025	140,600,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
66.	HBH2025020710110297NU50002203	MASJID AL-MUKMININ KAB. LIMA PULUH KOTA GUNUANG OMEH JR. IKAN BANYAK NAG. PANDAM GADANG HBH2025 JORONG IKAN BANYAK Kelurahan Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID AL MUKMININ	012/PM-AL/II-2023	12 November 2023	120,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
67.	HBH2025020710110304NU50002209	MASJID MUSLIMIN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. LB. JANTAN NAGARI GURUN HBH2025 Jr.Lb.Jantan Nagari Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Gurun Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan Dana Hibah	01/PENG-MJM/LJ-GRN/V-2024	05 Agustus 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
68.	HBH2025020710110302NU50002210	MASJID AL-MUHSININ KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JOR. KOTO BARU NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG HBH2025 Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kelurahan Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan Pembangunan Mesjid Al- Muhsinin	01/MA-KBS/XII-2024	12 September 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
69.	HBH2025020710110305NU50002211	MASJID MASJID MAULANA SIDDIQIN KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN JORONG PADANG DURIAN HIJAU NAGARI LINGKUNG AUA KEC. PASAMAN HBH2025 Jorong Padang Hijau Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Hibah	01/MMS/JR.PD-2025	05 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
70.	HBH2025020710110306NU50002212	MASJID AL- MUKHLISIN KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN JORONG KAMPUNG CUBADAK NAGARI LINGKUANG AUA TIMUR HBH2025 Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Timur Kecamatan Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat	Permohonan Bantuan Dana Hibah	Istimewa	31 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT										
71.	HBH2025021010110308NU50002213	MASJID NURUL YAQIN KAB. PESISIR SELATAN PANCUNG SOAL KOTO BARU NAGARI Inderapura HBH2025 Jl. Koto Baru Kampung Berok Kelurahan Inderapura Kecamatan Pancung Soal KAB. PESISIR SELATAN	PROPOSAL PERMOHONAN DANA HINAH	04/PP/MASJID-NY/III/2024	25 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
72.	HBH2025021010110309NU50002214	MASJID DARUL FALAH KAB. PESISIR SELATAN LINGGO SARI BAGANTI DURIAN PANDAAN HBH2025 Durian Pandaan, Kampuang Durian Pandaan, Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kelurahan Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti KAB. PESISIR SELATAN	PEMBANGUNAN MASJID	001/PMD FDP/-AHP/I/2024	31 Januari 2024	175,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
73.	HBH2025021010110310NU50002215	MASJID MUKHLISIN KAB. LIMA PULUH KOTA SITUJUAH LIMO NAGARI JR. KOCIAK NAGARI SITUJUAH GADANG HBH2025 Jorong Kociak Nagari Situjuah Gadang Kelurahan Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid	10/MM/KC-SG/2024	24 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
74.	HBH2025021010110311NU50002216	MASJID MUHAJIRIN KAB. DHARMASRAYA SUNGAI RUMBAI JORONG IRADAT KURNIA KOTO SALAK HBH2025 Jorong Iradat Nagari Kurnia Koto Salak Kelurahan Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	22/MM/-2025	01 Mei 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
75.	HBH2025021010110316NU50002218	MASJID RAYA KAPALO KOTO KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. KAPALO KOTO NAG. HALABAN HBH2025 Jorong Kapalo Koto Nagari Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban Kelurahan Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/MR/2025	06 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
76.	HBH2025021010110321NU50002220	MASJID BERKAH KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG KORONG TOBOH RIMBO KADUDUAK NAGARI TOBOH GADANG TIMUR HBH2025 Korong Toboh Rimbo Kaduduak Nagari Toboh Gadang Timur Kec. Sintuak Toboh Gadang Kab. Padang Pariaman Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Hibah	03/BRKH-II-20224	02 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
77.	HBH2025021010110318NU50002221	MASJID ISTIQMAL KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. MANGUNAI NAGARI AMPALU HBH2025 Jorong Mangunai Nagari Ampalu Kelurahan Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Perhonoran Bantuan Dana	001/MI-APL/I/2025	01 Desember 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
78.	HBH2025021010110320NU50002222	MASJID DARUSSALAM LAPAU TEMPURUNG KAB. PASAMAN BARAT KINALI TEMPURUNG, JORONG AMPEK KOTO, NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI HBH2025 Tempurung, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali KAB. PASAMAN BARAT	PEMBANGUNAN MASJID	01/MD/LT-2025	31 Januari 2025	98,200,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
79.	HBH2025021010110312NU50002224	MASJID NURUL IMAN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. BANJAR SARI NAGARI LABUH GUNUNG HBH2025 Jorong Banjar Sari Nagari Labuah Gunuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	04/PM-NI/2025	16 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
80.	HBH2025021010110326NU50002227	AHU-0000359.AH.01.08 -BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA NASIONAL SUMATERA BARAT HBH2025 Jl. Bagindo Aziz Chan No.19 Kota Padang Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Operasional Program Bamagnas	01/SP-DPW-Bamagnas/11/2024	22 November 2024	250,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
81.	HBH2025021010110325NU50002228	MASJID MASJID AS-SA'ID KAB. DHARMASRAYA SUNGAI RUMBAI JORONG SUNGAI KEMUNING NAGARI SUNGAI RUMBAI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI HBH2025 Jorong Sungai Kemuning Nagari Sungai Rumbai Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	07/M.Assaid/S.Rumbai/-2025	01 September 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
82.	HBH2025021010110328NU50002230	MUSHALLA SURAU AMPALU KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KORONG TOBOH BARU HBH2025 KORONG TOBOH BARU TOBOH GADANG NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN HIBAH	03/TBTG/II-2024	03 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
83.	HBH2025021010110330NU50002232	MASJID NURUL FALAH KAB. SOLOK LEMBANG JAYA JORONG BAWAH GUNUANG NAGARI BATU BAJANJANG HBH2025 Jorong bawah gunuang Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya KAB. SOLOK	Bantuan pembangunan mesjid Nurul Falah	04/MNF/NBJJ-2025	01 Oktober 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
84.	HBH2025021110110331NU50002233	MASJID SYAFRUDDIN PRAWIRA NEGARA KAB. SOLOK SELATAN SANGIR JUJUAN JORONG SIMPANG TIGO BIDAR ALAM HBH2025	PERMOHONAN BANTUAN DANA	001/PP-MSPN/1/2025	26 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		JORONG SIMPANG TIGO Kelurahan Bidar Alam Kecamatan Sangir Jujuan KAB. SOLOK SELATAN										
85.	HBH2025021110110315NU50002234	MASJID FATHURRAHMAN KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR TANAH LAPANG SONTANG NAG.SONTANG CUBADAK HBH2025 JORONG SONTANG NAGARI SONTANG CUBADAK Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	MOHON BANTUAN DANA HIBAH	02/PP-MJD-FR/SC/III/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
86.	HBH2025021110110313NU50002235	MASJID JAMI KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR BALIMBING NAG.PADANG GELUGUR KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 JORONG MAKMUR Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	MOHON BANTUAN DANA HIBAH	02/PP-MJD-JB/PDG/III/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
87.	HBH2025021110110317NU50002236	MUSHALLA DARUL FALAH KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JR. BK GOMBAK SITUAK NAG. MUNGO HBH2025 Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak Kelurahan Mungo Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Pembangunan	03/SDF/BGS/2024	24 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
88.	HBH2025021110110335NU50002237	MUSHALLA NURUL YAKIN KAB. SOLOK SELATAN PAUH DUO JORONG BANJUAAN NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO HBH2025 Jorong Banuaran Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Kelurahan Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo KAB. SOLOK SELATAN	PEMBANGUNAN MUSHALLAH	01/MUSHALLAH.N.Y/II-2025	03 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
89.	HBH2025021110110338NU50002239	MASJID JAMI KAB. SIJUNJUNG KUPITAN JORONG KAPALO KOTO NAGARI PADANG SIBUSUK HBH2025 Jalan Pasar Raya, Jorong Kapalo Koto, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan KAB. SIJUNJUNG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02//MSJ-JM/PDS/2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
90.	HBH2025021110110337NU50002241	MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS LIMAU SUNDAI KENAGARIAN IV KOTO HILIE HBH2025 Limau Sundai Kenagarian IV Koto Hilie Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	013/PMTM//IVKH/IX-2024	13 September 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
91.	HBH2025021110110340NU50002242	MASJID MAKMUR KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JR. T.J. KALIANG SEI. KAMUYANG HBH2025 jorong tanjuang kaliang nagari sungai kamuyang kec.luak.kab limapuluh kota Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan bantuan dana	02/MM/SKM/2025	30 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
92.	HBH2025021110110339NU50002243	MASJID BAITURRAHMAN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JORONG TIGO ALUR NAGARI BT. BALANG HBH2025 Jorong Tiga Alur, Kenagarian Batu Balang, Kec. Harau Kelurahan Batu Balang Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/PMB-TA/BB/3/2024	20 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
93.	HBH2025021110110343NU50002246	MUSHALLA BAITUL MAKMUR KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS KAMPUNG LIMAU HANTU KENAGARIAN TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK HBH2025 Limau Hantu Kampung Bungo Tanjung Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kelurahan IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	01/PMBMLH/VI/2024	06 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
94.	HBH2025021110110345NU50002247	MUSHALLA SURAU BAGHU DT MANGKUDUN KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG SIMPANG AMPEK KORONG SUNGAI ASAM NAGARI SUNGAI ASAM HBH2025 KORONG SUNGAI ASAM NAGARI SUNGAI ASAM Kelurahan Sungai Asam Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	SAFARI RAMADHAN	01/Pemb.SB/II/2023	02 Desember 2023	50,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
95.	HBH2025021110110346NU50002248	MASJID MUKHLISIN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JORONG ROGEH NAGARI BUKIK SIKUMPA KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA HBH2025 Jorong Rogeh Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban Kelurahan Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/MESJID/2025	20 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
96.	HBH2025021110110353NU50002250	MASJID AL-IHSAN KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO TIMUR NAGARI LIMAU PURUT KAMPUNG SAGIT HBH2025 Korong Kp.Sagit Kelurahan Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur KAB. PADANG PARIAMAN	Permintaan Permohonan Dana	01/MAI-LP/II/2025	03 Januari 2025	50,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
97.	HBH2025021110110355NU50002251	MUSHALLA SURAU BANDA BAKALI KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG NAGARI SICINCIN PAUH SICINCIN HBH2025 KORONG PAUAH NAGARI SICINCIN KECAMATAN 2 X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Sicincin Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH	01/ST/Nag-Scc/2025	05 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
98.	HBH2025021110110369NU50002253	MUSHALLA NUR HIDAYAH KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH TIMUR KEL BALAI JARING HBH2025 kelurahan balai jaring kecamatan payakumbuh timur kota payakumbuh Kelurahan Balai Jaring Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan bantuan dana	001/M-NHD/I/2024	17 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
99.	HBH2025021110110368NU50002254	MUSHALLA BULUAH APO KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KORONG TOBOH SAWAH MANSI HBH2025 NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN HIBAH	02/TBSM/II-2024	03 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
100.	HBH2025021110110370NU50002255	MASJID MUJAHIDIN KAB. LIMA PULUH KOTA BUKIK BARISAN JR. SOPAN TANAH NAGARI MAEK HBH2025 MASJID MUJAHIDDIN JORONG SOPAN TANAH Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Permintaan permohonan dana	-	20 Maret 2024	25,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
101.	HBH2025021110110352NU50002256	MUSHALLA BAITUL 'ILMI KAB. PESISIR SELATAN SUTERA KOMPLEK SDN 15 LANSANO HBH2025 Komplek SDN 15 Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Kelurahan Lansano Taratak Kecamatan Sutera KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	01/PMDI/02/01-2025	01 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
102.	HBH2025021110110354NU50002257	MASJID MUKHLISHIN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. PAUH TINGGI NAG. HALABAN HBH2025 Pauh Tinggi Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban Kelurahan Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan	../PP/Mesjid-M/2025	13 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
103.	HBH2025021110110371NU50002258	MUSHALLA SURAU TOBOH TANGAH PADANG KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KORONG TOBOH TANGAH PADANG HBH2025 NAGARI TOBOH GADANG TIMUR KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/TTP/II-2024	01 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
104.	HBH2025021110110372NU50002259	MASJID AR-RAHMAH KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JORONG BATU TANYUH NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA HBH2025 JORONG BATU TANYUH Kelurahan Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	Permintaan permohonan dana	01/MA/III/2023	06 Maret 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
105.	HBH2025021110110375NU50002260	MUSHALLA MUSHALLA BABUL IMAN KAB. SIJUNJUNG LUBUAK TAROK NAGARI BULUH KASOK KEC.LUBUK TAROK LUBUAK TAROK, KAB. SIJUNJUNG SUMATERA BARAT HBH2025	HIBAH MUSHALLA BABUL IMAN (SAFARI RAMADHAN)	01/Babul-Iman/I/2024	08 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		JORONG KOTO, NAGARI BULUH KASOK, KECAMATAN LUBUK TAROK, KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Buluah Kasok Kecamatan Lubuak Tarok KAB. SIJUNJUNG										
106.	HBH2025021110110376NU50002261	MASJID NURUL HUDA KAB. SOLOK BUKIT SUNDI BUKIT TANDANG HBH2025 JORONG SAWAH KANDIH Kelurahan Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi KAB. SOLOK	PEMBANGUNAN MASJID NURUL HUDA	400.8/01/MJNH.NBKT/2025	03 Februari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
107.	HBH2025021110110373NU50002262	MASJID MUTMAINNAH KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. LURAH BUKIK NAG. BALAI PANJANG HBH2025 Jorong Lurah Bukik Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/MAL/BLP-2025	16 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
108.	HBH2025021110110374NU50002263	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI KOTO SEI. GAYO LUMPO HBH2025 Kampung Koto Nagari Sungai Gayo Lumpo Kelurahan Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	../P.Mush.NI Koto.SGL/I/2024	07 Desember 2024	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
109.	HBH2025021110110378NU50002264	MASJID NURUL FALAH KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JOR. DALAM KOTO NAGARI TAEH.BARUAH HBH2025 JORONG DALAM KOTO Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/PMNF-DK/TB/IX/2024	17 Oktober 2024	35,000,000	Layak	35,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	35,000,000
110.	HBH2025021210110388NU50002267	MASJID NURUL YAQIN KAB. PASAMAN BARAT KOTO BALINGKA JOR.TANAH DATAR HBH2025 JORONG TANAH DATAR Kelurahan Parit Kecamatan Koto Balingka KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID NURUL YAQIN	01/PMNQ-KP.KPH/II/2025	04 Februari 2025	110,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
111.	HBH2025021210110377NU50002269	MUSHALLA ISTIQAMAH KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN PK. SINAYAN HBH2025 Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	2st/M.Istiqomah/J-PRB/1-2025	13 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
112.	HBH2025021210110390NU50002270	MASJID BAITURRAHMI KAB. DHARMASRAYA SITIUNG JORONG SUNGAI LANSEK NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG HBH2025 Jorong Sungai Langsung Nagari Siguntur Kacamatan Sitiung Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	../MBTRMI/SGT-2024	01 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
113.	HBH2025021210110410NU50002271	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JR. XII KAMPUNG NAG. SEI. KAMUYANG HBH2025	Permohonan Bantuan Dana	05/PMNI-XIikmp/III/2024	23 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Jorong XII Kampuang Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA										
114.	HBH2025021210110419NU50002272	MASJID JAMIATUL WUSTHA KAB. SOLOK SELATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH JR. SUNGAI PANGKUA PAKAN RABAA HBH2025 Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan Kelurahan Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh KAB. SOLOK SELATAN	PEMBANGUNAN MASJID	03/M-JW/IX/20245	01 Desember 2024	2,078,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
115.	HBH2025021210110489NU50002277	MUSHALLA MUSHALLA NUR IKHLAS KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JORONG SUBALADUNG NAGARI SUNGAI KAMUYANG LUAK, KAB. LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT HBH2025 Jorong Subaladung Nagari Sungai Kamuyang, Kec Luak Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	05//JR-SBLD/PMN/2025	13 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
116.	HBH2025021210110490NU50002279	MASJID AL-MUSTAQIM KAB. DHARMASRAYA SITIUNG JORONG SIGUNTUR RANAH NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG KAB DHARMASRAYA HBH2025 Jorong Siguntur Ranah Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	01/PGRS/Masj.AM/X/2025	04 Februari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
117.	HBH2025021210110493NU50002281	MUSHALLA NURUL JANNAH KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG KAMPUNG JAMBAK PEGAMBIRAN AMPALU NAN XX RT.03 RW.20 HBH2025 Mushalla Nurul Jannah Kampung Jambak RW 20 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	Proposal Bantuan Dana Hibah	/MNJ/I/2025	01 Desember 2025	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
118.	HBH2025021210110495NU50002282	MUSHALLA SHOLIHIN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN BULAKAN HBH2025 jorong bulakan nagari tanjuang gadang kec.lareh sago halaban kab.limapuluh kota Kelurahan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan bantuan dana	01/PMS/JB-TG/P/2025	24 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
119.	HBH2025021210110498NU50002286	MASJID AL - HUDA KOTA PADANG PADANG TIMUR JATI KOTO PANJANG HBH2025 Jln.Jati Koto Panjang RT 003 / 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/ Pgrs-Mjd Alhuda/ JKP-JRG/I/2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
120.	HBH2025021310110499NU50002287	MASJID AL-JADID KOTA PADANG KURANJI KABUN JALAN TUNGGANG RT. 04 RW. 02 NO. 85 KELURAHAN PASAR AMBACANG HBH2025 RT 04 RW II Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	MOHON BANTUAN DANA	003/PMJ-B/II/2025	30 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
121.	HBH2025021310110501NU50002288	MASJID NURUL MUTTAQIN LIMPATO KAB. PASAMAN BARAT KINALI LIMPATO KECAMATAN KINALI HBH2025 Limpato Jorong Limpato Nagari Anam Selatan Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana Rehab	01/NM/2024	20 November 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
122.	HBH2025021310110500NU50002289	MASJID NURUS SHOLIHIN KOTA PADANG KOTO TANGAH SUNGAI BANGEK RT.003/007, KEL. BALAI GADANG HBH2025 SUNGAI BANGEK RT 003 RW 007 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID NURUS SHOLIHIN	140/PMNS/SBG/BG/02-2025	06 Februari 2025	244,850,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
123.	HBH2025021310110503NU50002291	MASJID SYUHADA KAB. TANAH DATAR PADANG GANTING JORONG KOTO GADANG, NAGARI PADANG GANTING HBH2025 Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	Bantuan Hibah Kunjungan Tim Ramadhan Tahun 2025	019/PMS/TK/KG-PDG/XII/2024	23 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
124.	HBH2025021310110450NU50002294	MUSHALLA AL MUJAHIDIN KAB. DHARMASRAYA KOTO BESAR JORONG BARU NAGARI BONJOL HBH2025 Jorong Baru Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Kelurahan Bonjol Kecamatan Koto Besar KAB. DHARMASRAYA	permohonan bantuan dana	640/Msh AM/57/2025	02 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
125.	HBH2025021310110351NU50002295	MASJID ISTIQOMAH KAB. LIMA PULUH KOTA SULIKI JR. LOMBAH NAGARI SUNGAI RIMBANG HBH2025 Jorong Lombah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Sungai Rimbang Kecamatan Suliki KAB. LIMA PULUH KOTA	Masjid Istiqomah Jorong Lombah, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota	01/MIL/IX/2024	20 September 2024	54,255,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
126.	HBH2025021310110347NU50002296	MASJID AL-BUSYRA KAB. LIMA PULUH KOTA MUNGKA JR. SIMP.3 KENANGA NAG. SEI. ANTUAN HBH2025 Jorong Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan MungkaKab. Lima Puluh Kota Kelurahan Sungai Antuan Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	Pengurus Masjid Albusyra Padang Lawas, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota	12/ALBS/PL/-X-2024	28 Oktober 2024	135,168,950	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
127.	HBH2025021310110348NU50002298	MASJID SYUHADA KAB. LIMA PULUH KOTA SITUJUAH LIMO NAGARI NAGARI SITUJUAH GADANG KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI HBH2025 Jorong Situjuah Gadang Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan	Pengurus Masjid Syuhada' Situjuah Gadang, Jorong Situjuah Gadang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota	01/SEKRET-MS/SG/2024	25 Juni 2024	1,384,802,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA										
128.	HBH2025021310110530NU50002299	MUSHALLA AL-HIDAYAH KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI JORONG TANJUNG UDANI NAGARI PALANGKI HBH2025 JORONG TANJUNG UDANI, NAGARI PALANGKI, KECAMATAN IV NAGARI, KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MUSHOLLA AL- HIDAYAH (SAFARI RAMADHAN)	/M.A.T.U/PIK-2024	25 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
129.	HBH2025021310110529NU50002302	10310656-TK TUNAS HARAPAN KOTO TANGAH HBH2025 JORONG DATAR Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PEMBANGUNAN PERMOHONAN BANTUAN TK TUNAS HARAPN KOTO TANGAH	420/05/TK-TH-KTT/BB/II/2024	22 September 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
130.	HBH2025021310110533NU50002304	MASJID BAITURAHIM KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG SILUKAH NAGARI DURIAN GADANG HBH2025 JORONG SILUKAH, NAGARI DURIAN GADANG, KECAMATAN SIJUNJUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID BAITURRAHIM (SAFARI RAMADHAN)	/M-BTR/SLK/DR.GD-2023	03 April 2023	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
131.	HBH2025021310110536NU50002305	10310667-TK AL MISBAH HBH2025 Jorong lubuak Nago Kelurahan Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah/alat Permainan	420/010/TK.alm.pkl/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
132.	HBH2025021310110350NU50002306	MASJID TAQWA KAB. LIMA PULUH KOTA SULIKI JORONG BETUNG NAGARI KURAI HBH2025 Jorong Botuang Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Kurai Kecamatan Suliki KAB. LIMA PULUH KOTA	Pengurus Masjid Taqwa Jorong Botuang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota	01/M.Taqwa-Botuang/XII-2024	12 Desember 2024	51,042,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
133.	HBH2025021310110538NU50002307	60730049-SD IT MUTIARA QURAN HBH2025 Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kec. Gunung Talang, Kabupaten Solok Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	PERMOHONAN BANTUAN DANA	001/ SPm/ YWMQ/ I/ 2025	13 Januari 2025	100,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
134.	HBH2025021310110344NU50002308	MASJID NURUL YATIM KAB. LIMA PULUH KOTA SULIKI JR. SIBOKA NAG. ANDIANG HBH2025 Jorong Siboka Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Andiang Kecamatan Suliki KAB. LIMA PULUH KOTA	Pengurus Mesjid Nurul Yatim, Jorong Siboka, Nagari Andiang Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota	0/MNY/II/2025	22 Januari 2025	81,090,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
135.	HBH2025021310110540NU50002310	10309450-TK TUNAS HARAPAN BATU BALABUAH HBH2025 Jorong Batu Balabuah I Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Keramik Ruangan	420/05/TK-TH /SN/BB/II/2025	13 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
136.	HBH2025021310110545NU50002311	10309449-TK TUNAS HARAPAN PANGKALAN HBH2025 Jrg. Banjaranah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kelurahan Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH PAUD	420/7/ TK.TH-PKL/II-2024	25 Februari 2024	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
137.	HBH2025021310110551NU50002312	10309451-TK TUNAS HARAPAN GUNTUNG HBH2025 Jorong Guntung Nagarai Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	03/TK.THG.BB/II/2024	23 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
138.	HBH2025021310110553NU50002313	MASJID ISTIQAMAH KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JR. TABING SEI. KAMUYANG HBH2025 jorong tabing , nagari sungai kamuyang, kecamatan luak Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan dana	01/Peng MI/JT/II/2025	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
139.	HBH2025021310110554NU50002314	69784416-KB HARAPAN BUNDO HBH2025 jorong panarian nagari talang Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	penyedian meja,kursi anak dan pembuatan kanopi sekolah	420/04/PAUD-KB.HB/NGT-2025	13 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
140.	HBH2025021310110555NU50002315	70040785-TK ALAM AL FATH AIR PUTIH HBH2025 Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN DANA HIBAH	05/TK. AAF/AP/I-2024	28 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
141.	HBH2025021410110546NU50002316	69784415-KB RESTU BUNDO HBH2025 jorong kayu jao nagari batang baru kec gunung talang kab solok Kelurahan Batang Baru Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	RENOVASI DAPUR DAN GUDANG	420/04/paud-kB.RB/BB-TU/2025	12 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
142.	HBH2025021410110560NU50002317	69784417-KB TERATAI HBH2025 jorong pandan permai nagari sungai janiah kabupaten solok kecamatan gunung talang Kelurahan Sungai Janiah Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	pengusulan pembelian laptop	420/05-/PAUD-KB.TRT/NSJ-II/2025	12 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
143.	HBH2025021410110564NU50002318	MASJID AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH KOTA PADANG KURANJI JL. BY. PASS SUNGAI SAPIH HBH2025 SUNGAI SAPIH KURANJI Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	MOHON BANTUAN DANA	016/EX/MR-ASS/II/2025	17 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
144.	HBH2025021410110565NU50002319	69784403-KB RESTU BUNDA III HBH2025 JR. TANGAH PADANG Kelurahan Jawi Jawi Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	Pembelian Komputer,Kolam Bola,Seragam propesi,plank merek,cat tembok	420/03/PAUD-KB.RBIII/NJJ/-XII/2025	13 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
145.	HBH2025021410110566NU50002320	MASJID JAMIATUL MUSLIMIN KOTA PADANG KURANJI KOMPLEK TARUKO I KELURAHAN KORONG GADANG HBH2025 Komplek Taruko I, Kelurahan Korong	PEMBANGUNAN MASJID	010/MJM/KGK/V/2024	02 Mei 2024	215,413,500	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG										
146.	HBH2025021410110572NU50002331	MUSHALLA AL-MUTAQIN KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING KP. POLAK, SEI LANDAI, NAG. SUNDATA SELATAN HBH2025 Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Selatan Kecamatan Lubuak Sikapiang Kabupaten pasaman Kelurahan Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan bantuan dana hibah	08/PM-AMKP/IV/2024	20 April 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
147.	HBH2025021410110537NU50002337	10309397-TK PERTIWI ANDALEH HBH2025 JORONG KAPALO KOTO ANDALEH KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT Kelurahan Andaleh Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	TK PERTIWI ANDALEH	420/01/TK.PTW.a/I/2024	01 Maret 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
148.	HBH2025021410110262NU50002339	MASJID HIDAYAH KAB. SOLOK LEMBAH GUMANTI NAGARI SUNGAI NANAM HBH2025 JORONG PADANG LAWEH Kelurahan Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti KAB. SOLOK	HIBAH MASJID AL HIDAYAH PADANG LAWEH	001/MAH/SN/2025	24 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
149.	HBH2025021410110557NU50002340	10309398-TK LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERTIWI II HBH2025 Jorong Ampang Kanagarian Piobang.Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Piobang Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan bantuan	420/07/TK.PRT.II-PBG/II2024	21 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
150.	HBH2025021410110590NU50002344	10309349-TK HARAPAN BUNDO AMPALU HBH2025 Jorong Padang Aur Kelurahan Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Pengadaan Sarana dan Prasarana	421/05/TK HBA/APL/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
151.	HBH2025021410110593NU50002347	10310671-TK PEMBINA GUGUAK HBH2025 Jorong Baliak Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Simpang Sugiran Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH	420/10/TK.P.GG,SS/II-2024	27 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
152.	HBH2025021410110597NU50002349	69784418-KB PERMATA IBU TALANG HBH2025 Jorong Koto Gaek Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	dana hibah	420/04/PAUD-KB.PI /NJJ-XII/2025	16 Februari 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
153.	HBH2025021510110602NU50002353	69784453-TK. RAUDHATUL HUSNA HBH2025 Jln. Lintas Sumatera KM.12 Jorong Sungai Lasi Nagari Pianggu Kecamatan	Sarana dan Prasarana Pembelajaran PAUD	16/TK.RH-SL/PG-2025	10 Februari 2025	14,000,000	Layak	14,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi,		30 April 2025	14,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok Kelurahan Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi KAB. SOLOK							Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
154.	HBH2025021510110535NU50002355	10310673-TK KENANGA PADANG LOWEHHBH2025 Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Sungai Antuan Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	[Permohonan Bantuan Alat Pembelajaran	420/08/TK-KNG/[DL/II-2024	11 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
155.	HBH2025021510110603NU50002357	MUSHALLA 0 0 0 0HBH2025 Mushalla Nurul Iman Jorong Koto Lamo Kenagarian Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	05 MARET 2024	02/PSNI-KL/III/TP-2024	05 Maret 2025	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
156.	HBH2025021510110608NU50002359	69784330-KB LENTERA HATIBH2025 Jorong Talago, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Kelurahan Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH	420/04/PAUD-KB.LH/KGG/TU//2025	12 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
157.	HBH2025021510110616NU50002365	10310657-TK AISIYYAH BANJA LOWEHHBH2025 BANJA LOWEH GADANG Kelurahan Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	03/TK.ASY.BJL.BB/II/2024	23 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
158.	HBH2025021510110619NU50002366	69784406-KB CEMARAHBH2025 Jorong Sukarami, Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Kelurahan Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH	420/04/PAUD-KB.CR/KGG/TU//2025	12 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
159.	HBH2025021510110623NU50002372	69784402-KB PERMATA IBU LUBUK SELASIBH2025 JR LUBUAK SELASIH NAGARI BATANG BARUS Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	rehab gedung	04	12 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
160.	HBH2025021510110626NU50002374	69784444-TK BUNDO KANDUANGHBH2025 jorong guguak pila nagari guguk sarai kecamatan IX koto Sungai lasi Kab.solok Kelurahan Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana Hibah	900 /05.E/TK- BDK/GGS- 2025	12 Februari 2025	15,600,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
161.	HBH2025021510110621NU50002375	69850588-TK MUTIARA BUNDAH2025	Permohonan Bantuan perubahan dana hibah	011/TK-MB/II/2025	14 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi,		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		JL. RAYA NEGARA KM 13, LERENG KULIN KETINGGIAN Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	2024						Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
162.	HBH2025021510110627NU50002377	69842755-KB ANANDA HBH2025 JORONG PIANGGU Kelurahan Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi KAB. SOLOK	SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PAUD	900/07/AND/PG-2025	15 Februari 2025	16,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
163.	HBH2025021610110628NU50002378	69784984-KB DOA IBU HBH2025 Jorong Taratak Nagari Siaro-aro Kelurahan Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi KAB. SOLOK	Lembaga PAUD	01/KB-DI/02-2025	08 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
164.	HBH2025021610110629NU50002380	69784407-KB BUNDO KANDUANG HBH2025 JRONG LINJUANG KOTO TINGGI NAGARI KOTO GAEK GUGUAK Kelurahan Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	sarana dan prasarana(infocus,kursi guru,mandi bola,lemari buku)	04	12 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
165.	HBH2025021610110595NU50002381	69784437-TK SULUH BUDI HBH2025 Jorong Aro Talang Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	TK SULUH BUDI TALANG	420/12/TK.SB/II-2025	14 Februari 2025	20,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
166.	HBH2025021610110542NU50002383	69850591-TK AL MA ARIF HBH2025 Jl. Gg Utama Purwajaya Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PROPOSAL BANTUAN HIBAH	05/TK-AM/PWJ/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
167.	HBH2025021710110639NU50002387	MASJID NURUL HAQ KOTA PADANG KOTO TANGAH KOMP.JUNDUL IV KEL.PARUPUK TABING HBH2025 Jondul Iv Blok BB No 4 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Biaya Renovasi Masjid	/P-MNH/J.4.12/IX/2024	20 September 2024	390,098,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
168.	HBH2025021710110645NU50002393	MASJID BESAR AT-TAUBAH KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG PALAK, NAGARI LADANG PANJANG, KECAMATAN TIGO NAGARI HBH2025 Padang Palak Nagari Ladang Panjang	Perhonoran Bantuan Dana	05/PMKCTN/LDP/IX-2024	18 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Tigo Nagari Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN										
169.	HBH2025021710110642NU50002394	69784412-KB AZ-ZUKHRUF HBH2025 JORONG SAWAH TALUAK NAGARI CUPAK KEC.GUNUNG TALANG Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	mobiler (infocus,tv,lemari)	420	15 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
170.	HBH2025021710110644NU50002395	MASJID BAITUL MAKMUR KAB. TANAH DATAR PADANG GANTING JORONG KOTO ALAM, NAGARI PADANG GANTIANG HBH2025 Jorong Koto Alam Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	Permohonan Bantuan Dana	../PGR/MBM-KA/03/2025	15 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
171.	HBH2025021710110652NU50002398	MASJID AL-IMAN KOTA PADANG PADANG TIMUR KEL.ANDALASH HBH2025 Kp Baru Andalas Timur Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah	05/MAI-PGS/II/2025	01 Januari 2025	223,098,088	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
172.	HBH2025021710110336NU50002400	MASJID AL-MUTTAQIN KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 KAYU TANAM NAGARI KAYU TANAM PASA GALOMBANG HBH2025 JORONG PASA GALOMBANG Kelurahan Kayu Tanam Kecamatan x Kayu Tanam KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	A-6-01/PMA/I/2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
173.	HBH2025021710110654NU50002403	MASJID BABURRAHMAH KAB. TANAH DATAR PADANG GANTING JORONG RAJO DANI, NAGARI PADANG GANTIANG HBH2025 Jorong Rajo Dani Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	Perhonoran Bantuan Dana	../PMB/RD/PG/2025	12 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
174.	HBH2025021710110579NU50002405	MASJID NURUL SAKINAH KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 KAYU TANAM NAGARI GUGUAK PD. LAPAI HBH2025 JORONG PADANG LAPAI Kelurahan Guguak Kecamatan x Kayu Tanam KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PM-MNS/I-2025	25 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
175.	HBH2025021710110658NU50002406	MUSHALLA NURUL JANNAH KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG TOMBANG NAGARI SUMPUR KUDUS HBH2025 JORONG TOMBANG NAGARI SUMPUR KUDUS KEC. SUMPUR KUDUS KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	Pembangunan Mushalla	01/MNJ/SPK/2025	17 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
176.	HBH2025021710110661NU50002407	69784425-TK ISLAM BINA INSAN KAMIL HBH2025 Jorong Balai Pandan Cupak Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	Proposal Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE), MOBILER PAUD 2025	014/TK-IBIK/CPK/TU-2025	13 Februari 2025	17,800,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
									Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
177.	HBH2025021710110662NU50002409	MASJID NURRAHMI KAB. AGAM TILATANG KAMANG JR. INDURING NAGARI KAPAUHBH2025 JORONG INDURING Kelurahan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	TIM SAFARI RAMADHAN	01/N-R/PB-2025	02 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
178.	HBH2025021710110668NU50002411	MASJID AL-MUKHLISIN KOTA PADANG PADANG SELATAN KOMPLEK VILLA MEGA KEL. MATA AIRHBH2025 KOMPLEK VILLA MEGA KEL.MATA AIR KEC. PADANG SELATAN KOTA PADANG Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Renovasi Masjid	004/AM-II/PDG/2025	01 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
179.	HBH2025021710110672NU50002414	69784337-KB KASIH IBUHBH2025 jorong koto gadang nagari talang Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	RENOVASI PAGAR	420/04/PAUD-KB-KI/NGT/2025	13 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
180.	HBH2025021710110673NU50002415	MASJID NURUL YAQIN KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG SITONGEK NAGARI TAMPARUNGOHBH2025 JORONG SITONGEK NAGARI TAMPARUNGO KEC. SUMPUR KUDUS KAB. SIJUNJUNG Kelurahan Tamparungo Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	Pembangunan Masjid	01/PMNY/TPR 2025	18 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
181.	HBH2025021710110674NU50002416	MASJID AQSA KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI BUNGA PASANG II, KENAGARIAN BUNGA PASANG SALIDOHBH2025 KAMPUNG BUNGA PASANG II NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Pembangunan Masjid	01/PMA/BPII-NBPS/1/2025	04 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
182.	HBH2025021710110676NU50002417	MUSHALLA AKMALUL HIDAYAH KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO UTARA JORONG MELUR NAGARI LUBUAK JANTANHBH2025 JORONG MELUR NAGARI LUBUK JANTAN KEC. LINTAU BUO KAB. TANAH DATAR Kelurahan Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara KAB. TANAH DATAR	Pembangunan Masjid	03/Peng.SAH/LJ-2025	21 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
183.	HBH2025021710110680NU50002419	MUSHALLA TAQWA (SIMPANG) KAB. PADANG PARIAMAN BATANG ANAI NAGARI KETAPING SIMPANG KATAPIANGHBH2025 korong simpang nagari katapiang kecamatan batang anai Kelurahan Katapiang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	Agenda safari Ramadhan	01/TAQWA/I/2025	30 Januari 2025	14,400,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
184.	HBH2025021810110556NU50002427	69965940-TK TAHFIDZ RAHMATUL AISY HBH2025 Jalan Jalur Dua RSUD Arosuka Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD TAHUN 2025	0040/TKTAHRA-2025	14 Februari 2025	32,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
185.	HBH2025021810110690NU50002432	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR KAMPUNG BUAH KERAS NAG.PADANG GALUGUA KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 KP. BUKOREH JR. SENTOSA Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	02/PPM-NI/B/III/2022	10 Maret 2022	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
186.	HBH2025021810110691NU50002434	MASJID JAMI KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR AEK BARGOT NAG.SONTANG CUBADAK KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 AEK MATOGU JR. BINUBU KUBU GADANG Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	02/PP-JM/SC/IV/2023	09 Januari 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
187.	HBH2025021810110694NU50002440	MASJID IBRAHIM KAB. PASAMAN BARAT RANAH BATAHAN JORONG MUYOREJO, NAGARI DESA BARU HBH2025 JORONG MUYOREJO Kelurahan Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PP-IB/DB/IV/2023	08 Februari 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
188.	HBH2025021810110697NU50002442	MASJID AL-MUNAWWARAH KAB. SOLOK SELATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH JR BATANG LIMPAUNG TERATAK PANAS PAKAN RABAA TENGAH HBH2025 JORONG BATANG LIMPAUNG TERATAK PANAS Kelurahan Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh KAB. SOLOK SELATAN	LANJUTAN PEMBANGUNAN DAN PRASARANAN IBADAH	01/M-AM/BTP-PRTg/V-2024	02 Mei 2024	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
189.	HBH2025021810110700NU50002443	MUSHALLA MUSHALLA SURAU BATUANG KAB. PADANG PARIAMAN ENAM LINGKUNG 2 X 11 ENAM LINGKUANG, KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 KORONG BARI NAGARI SICINCIN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Sicincin Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	Proposal Bantuan Dana Hibah	02/SB/Nag-Scc/2025	03 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
190.	HBH2025021810110261NU50002444	MASJID RAHMAD KAB. SOLOK X KOTO SINGKARAK LIMO NINIK NAGARI KOTO SANI HBH2025 JORONG LIMO NINIK NAGARI KOTO SANI Kelurahan Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak KAB. SOLOK	HIBAH MASJID RAHMAT JORONG LIMO NINIAK KOTO SANI (SAFARI RAMADHAN)	1/PMR-LM/2025	05 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
191.	HBH2025021810110701NU50002445	MASJID NURUL IKHLAS KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR SIPIONGOT NAG.SONTANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PM-NI/S/2023	09 Januari 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		CUBADAK KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 SIPIONGOT JR. RAMBAH Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
192.	HBH2025021810110698NU50002446	MUSHALLA AL-IKHLAS KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR HUTA BARU NAG.SONTANG CUBADAK KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 JANJI MANAHAN JR. RAMBAH Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PM-AI/JM/2023	09 Januari 2023	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
193.	HBH2025021810110695NU50002447	69784447-KB HARAPAN IBU HBH2025 JORONG BATANG PAMO Kelurahan Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi KAB. SOLOK	Sarana dan Prasarana Pembelajaran PAUD	04/KB-HI/01-2025	31 Januari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
194.	HBH2025021810110703NU50002448	MASJID BAITURRAHMAN KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR TAPUS LAMAH HBH2025 TAPUS JR. SENTOSA Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PMR-BR/T/2023	31 Januari 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
195.	HBH2025021910110707NU50002453	10309406-TK PERTIWI LAREH HBH2025 lareh nan panjang Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	DEVI FEBRIANI,SPd	420/11/TK-PL/2024	20 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
196.	HBH2025021910110702NU50002454	MUSHALLA MUSHALLA NURUL IMAN KAB. PASAMAN TIGO NAGARI SUNGAI BARANGAN JORONG KAMPUNG KAJAI NAGARI LADANG PANJANG BARATH HBH2025 Sungai Barangan Jorong Kampung Kajai Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	...	17 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
197.	HBH2025021910110708NU50002455	MASJID BAITUL AMAL KAB. TANAH DATAR PADANG GANTING JORONG KOTO GADANG HILIR, NAGARI PADANG GANTIANG HBH2025 Jorong Koto Gadang Hilir Nagari Padang Gantiang Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	Perhonoran Bantuan Dana	03/PMBA/KGH/2025	17 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
198.	HBH2025021910110710NU50002458	MASJID DARUSSALAM KAB. AGAM BASO JORONG SUNGAI SARIAK NAGARI KOTO TINGGI HBH2025 JORONG SUNGAI SARIAK NAGARI KOTO TINGGI Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN	02/PRMDSS/2025	23 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
199.	HBH2025021910110712NU50002459	MASJID RAYA DARUSSALAM KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI MUARO BODI KEC. IV NAGARI HBH2025 JORONG DUSUN TUO Kelurahan Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID RAYA DARUSSALAM MUARO BODI	02/MRD/Ma.Bodi-2024	02 Mei 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
200.	HBH2025021910110711NU50002460	MUSHALLA AL-HIDAYAH KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI JORONG TAMBANG AMEH NAGARI PALANGKI HBH2025 JORONG TAMBANG AMEH Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MUSHALLA AL HIDAYAH TAMBANG AMEH PALANGKI (SAFARI RAMADHAN)	01//Al-hidy//2025	01 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
201.	HBH2025021910110307NU50002462	MUSHALLA AL- FATH KAB. LIMA PULUH KOTA PANGKALAN KOTO BARU JORONG SIMPANG TIGA NAGARI KOTO ALAM HBH2025 jorong simpang tigo , nagari koto alam , kecamatan pangkalan koto baru,kabupaten lima puluh kota Kelurahan 0 Kecamatan 0 KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSOLLLA AL-FATH	01/MSL-AL-FATH/KTA/1/2025	13 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
202.	HBH2025021910110715NU50002463	MASJID AL- JADID KOTA PADANG KURANJI JL. KAMPUNG LALANG KEL. PASAR AMBACANG HBH2025 KAMPUNG LALANG KEL. PASAR AMBACANG KEC. KURANJI KOTA PADANG Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kurangi KOTA PADANG	Pembangunan Masjid	01/Masjid-AJ//2025	28 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
203.	HBH2025021910110670NU50002464	69783736-KB KASIH BUNDA HBH2025 Jorong Banda Balai Nagari Limau Lunggo Kelurahan Limau Lunggo Kecamatan Lembang Jaya KAB. SOLOK	Proposal pengajuan dana hibah paud	05/PAUD-KB.NLLG/2025	05 Januari 2025	12,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
204.	HBH2025022010110717NU50002468	MUSHALLA ILALANG KAB. PADANG PARIAMAN ULAKAN TAPAKIH NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG KORNG MANGGOPOH UJUNG KECAMATANA ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARATH HBH2025 KORONG MANGGOPOH UJUNG UTARA NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/SI/XII-2024	16 Desember 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
205.	HBH2025022010110719NU50002469	MASJID AN-NUR KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING BELAKANG GELOLA, NAG. TANJUNG BARINGIN UTARA HBH2025 NAGARI TANJUNG BERINGIN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	03/Mesjid An-Nur/2022	10 Januari 2023	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
206.	HBH2025022010110720NU50002470	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN PLASMA TIGA JLR. 8 JORONG BUKIT NILAM NAGARI AUA KUNIANG HBH2025 JORONG BUKIK NILAM NAGARI LEMBAH BINUANG AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Aua	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID NURUL IMAN	03/PMNI/JBN/X/2023	01 November 2023	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kuniang Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT										
207.	HBH2025022010110722NU50002473	MASJID DARUL AKHYAR KAB. AGAM BASO JORONG KOTO GADANG NAGARI KOTO TINGGI HBH2025 Jorong Pincuran Puti Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso KAB. AGAM	PEMBANGUNAN MASJID	02/PRMDSS/2025	31 Januari 2025	450,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
208.	HBH2025022010110721NU50002475	MASJID AL-IKHLAS KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING KP. PARIT, KP. TANGAH, NAG. TANJUNG BARINGIN HBH2025 NAGARI TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	Istimewa	26 April 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
209.	HBH2025022010110724NU50002476	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR PADANG BALAI NAG SONTANG CUBADAK KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 PADANG BALAI JR. RAMBAH Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	001/PMNI-PB/III/2022	20 Maret 2022	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
210.	HBH2025022010110726NU50002478	10309610-TK ABA PAKANDANGAN HBH2025 PASA PAKANDANGAN Kelurahan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH TK PAKANDANGAN	45/TK-ABA/PKD/X-2024	31 Oktober 2024	15,200,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
211.	HBH2025022010110725NU50002480	69923958-KB AISIYAH HBH2025 KORONG PASAR PAKANDANGAN NAGARI PAKANDANGAN Kelurahan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN SAPRAS LEMBAGA PAUD	801/39/KB-AISYH/EL/VIII-2024	08 Agustus 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
212.	HBH2025022010110728NU50002482	MASJID NURUL HUDA KOTA PADANG PAUH JL. SIMPANG PIAI KELURAHAN CUPAK TANGAH HBH2025 SIMPANG PIAI NO.36 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN	16/Peng-MNHSP/CPT/VI.2025	14 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
213.	HBH2025022010110730NU50002484	10309654-TK HARAPAN KITA TANJUNG AUR HBH2025 KORONG TANJUNG AUR NAGARI PAKANDANGAN Kelurahan Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN PENGADAAN MULTIMEDIA	801/50/TK-HK-TA/PKD/EL/XI-2024	01 November 2021	35,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
214.	HBH2025022010110729NU50002485	69832378-KB FLAMBOYAN I HBH2025 KORONG HILALANG GADANG Kelurahan Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH KB FLAMBOYAN III	801/29/PP-PAUD FLMBYN-III/EL/VIII-2024	08 Agustus 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
215.	HBH2025022010110731NU50002488	MASJID RAYA DESA KAMPUNG BARU KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH JALAN KI HAJAR DEWANTORO NO. 2 KP.BARU KOTA PARIAMAN HBH2025	PEMBANGUNAN MASJID	09/PMKB/II/2025	05 Februari 2025	4,013,000,000	Tidak Layak	0	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 2 Desa Kampung Baru Pariaman,Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN										
216.	HBH2025022010110732NU50002489	MASJID RAYA KALAMPAIAN KAB. PADANG PARIAMAN VII KOTO SUNGAI SARIK NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN AMPALU TINGGI HBH2025 NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN AMPALU TINGGI Kelurahan Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sarik KAB. PADANG PARIAMAN	SAFARI RAMADHAN	01/Pemb.M.K/III/2024	28 Juni 2024	50,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
217.	HBH2025022010110733NU50002490	MASJID RAYA AMBUNG KAPUR KAB. PADANG PARIAMAN VII KOTO SUNGAI SARIK NAGARI AMBUNG KAPUA SUNGAI SARIK HBH2025 Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sarik KAB. PADANG PARIAMAN	PEMBANGUNAN MASJID	07/PMak/II/2025	05 Februari 2025	75,725,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
218.	HBH2025022110110734NU50002493	MASJID JAMI' KAB. AGAM BANUHAMPU JALAN PADANG LUAR -TALUAK AMPEK SUKU NAGARI TALUAK AMPEK SUKU HBH2025 JORONG TALUAK Kelurahan Taluak Ampek Suku Kecamatan Banuhampu KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN SAFARI RAMADHAN	03/MJT/I-2025	07 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
219.	HBH2025022110110738NU50002496	MASJID NURUL FALAH KOTA SOLOK TANJUNG HARAPAN KELURAHAN NAN BALIMO HBH2025 Perumahan Griya Ampang Kualo Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan KOTA SOLOK	Proposal Bantuan Dana Hibah	01/MNF/VIII/2024	14 Agustus 2024	122,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
220.	HBH2025022110110739NU50002498	MASJID NURUL IMAN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. KETINGGIAN NAGARI SARILAMAK HBH2025 JORONG KATINGGIAN Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/Mni-Ktg/I/2025	03 Februari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
221.	HBH2025022110110740NU50002499	MASJID MUHSININ KAB. LIMA PULUH KOTA MUNGKA KOTO BARU NAGARI MUNGKA KECAMATAN MUNGKA HBH2025 JORONG MUNGKA TANGAH Kelurahan Mungka Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN	006/MM-MK/I-2025	31 Januari 2025	35,000,000	Layak	35,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	35,000,000
222.	HBH2025022110110741NU50002500	MASJID RAYA DARUL FALLAH KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI JL. JENDRAL SUDIRMAN, KAMPUNG KOTO, KENAGARIAN SALIDO HBH2025 Jl. Koto Salido Kenagarian Salido Painan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir	Permohonan Bantuan Masjid	21 Januari 2025	21 Januari 2025	1,892,932,767	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Selatan Kelurahan Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN										
223.	HBH2025022110110562NU50002501	10309337-TK DHARMASARI HBH2025 SARILAMAK Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Bantuan TK Dharmasari	03/TK-DS/SRL/II-2024	03 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
224.	HBH2025022110110591NU50002502	MUSHALLA FAJAR ASASI KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TIMUR SIGANDO RT VHBH2025 JL AHMAD YANI RT VIII Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PENG-MFA/KK/II/2025	17 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
225.	HBH2025022110110742NU50002503	MASJID AL-MUTTAQIN KOTA PADANG KOTO TANGAH KOMP. PERMATA BIRU, RT.05, KEL. BATANGKABUNG GANTING HBH2025 KOMP. PERMATA BIRU/SINGGALANG BLOK B KELURAHAN BATANG KABUNG KEC. KOTO TANGAH KOTA PADANG Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Pembangunan Masjid	03/PMA/II/2024	26 Februari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
226.	HBH2025022110110589NU50002504	MUSHALLA AL- HIDAYAH KAB. TANAH DATAR X KOTO JORONG PADANG LAWEH HILIE BALAI NAGARI PANINJAUAN HBH2025 JORONG HILIE BALAI Kelurahan Paninjauan Kecamatan X Koto KAB. TANAH DATAR	Permohonan Bantuan Dana	02/P-MAH/II/2025	05 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
227.	HBH2025022110110743NU50002505	MUSHALLA BAU KAB. AGAM BASO BARUAH ANDALEH KENAGARIAN PADANG TAROK HBH2025 Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso KAB. AGAM	Perhonoran Bantuan Dana	01/PM/SB/JB/II-25	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
228.	HBH2025022110110744NU50002507	MUSHALLA MUSLIMIN KAB. AGAM BASO PADANG LAWEH JORONG UJUNG GUGUK KENAGARIAN PADANG TAROK HBH2025 Padang Laweh Jorong Ujung Guguak Nagari Padang Tarok Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso KAB. AGAM	Proposal Permohonan Bantuan	01/PM/MS/UG/I-25	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
229.	HBH2025022110110746NU50002508	69850585-TK PAUD HIDAYATULLAH HBH2025 jorong pintu koto nagari bukit limbuku Kelurahan Bukik Limbuku Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	permohonan bantuan dana hibah	420/23/TK-HDY/BKL/2024	20 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
230.	HBH2025022110110588NU50002510	MUSHALLA NURUL QURAN KAB. TANAH DATAR RAMBATAN JORONG RAMBATAN NAGARI RAMBATAN KEC. RAMBATAN HBH2025 JORONG RAMBATAN Kelurahan Rambatan Kecamatan Rambatan KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	29/NQ/001/2025	25 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
231.	HBH2025022110110263NU50002513	MASJID RAYA SINGKARAK KAB. SOLOK X KOTO SINGKARAK JORONG DALIMO HBH2025 JORONG DALIMO Kelurahan Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak KAB. SOLOK	HIBAH MASJID RAYA SINGKARAK (SAFARI RAMADHAN)	03/PPK.MRS/2024	13 Januari 0225	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
232.	HBH2025022110110727NU50002523	MUSHALLA AMBACANG KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG NAGARI PUNGGUANG KASIAK AMBACANG HBH2025 AMBACANG PUNGGUANG KASIAK Kelurahan Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	BANTUAN MUSALLA SURAU AMBACANG PUNGGUNG KASIK	01/SAB/01-2025	22 Februari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
233.	HBH2025022110110751NU50002524	MASJID NURUL IMAN KAB. AGAM TILATANG KAMANG JR.PGRM HBH2025 JORONG PGRM NAGARI GADUT KEC.TILATANG KAMANG KAB. AGAM Kelurahan Gadut Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	Pembangunan Masjid	01/PMNI-PG/I-2025	03 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
234.	HBH2025022210110754NU50002526	10309299-TK AL HIDAYAH TALANG HBH2025 Jorong Talang Kelurahan Talang Maur Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Alat Pembelajaran	420/05/TK.AHD.TL/I/2024	08 Januari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
235.	HBH2025022210110663NU50002527	10309344-TK GANESA HBH2025 Jorong Lubuak Ameh,nagari Gunuang Malintang Kelurahan Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan TK GANESA	14/TK-GNS-/GML/II-2026	22 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
236.	HBH2025022210110755NU50002529	69783749-KB ANANDA HBH2025 Jorong Atas Mesjid Kelurahan Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya KAB. SOLOK	BANTUAN HIBAH PENGADAAN SARANA PRASARANA	10/KB.AND/BJJ-2025	11 Januari 2025	12,500,000	Layak	12,500,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	12,500,000
237.	HBH2025022410110759NU50002537	10309442-TK TUNAS BANGSA MAEK HBH2025 Jorong Koto Gadang Maek Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	YUNI HELPIDA,S.Pd	01/TK-TB.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
238.	HBH2025022410110760NU50002538	MUSHALLA NURUL HUDA KOTA PADANG KOTO TANGAH AIR DINGIN RT.02/10, KEL.BALAI GADANG HBH2025 JL.PARAK ANEH RT.03 RW.10 KEL. BALAI GADANG, KEC. KOTO TANGAH,	SAFARI RAMADHAN	01/Pemb.Mushallah Nurul Huda/I/2025	17 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		KOTA PADANG Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG										
239.	HBH2025022410110761NU50002539	MUSHALLA NURUL IKHLAS KOTA PADANG LUBUK KILANGAN RT01/RW02 PADANG BESI HBH2025 RT01/RW02 Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN	044/MNI/PB/02-2025	12 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
240.	HBH2025022410110763NU50002541	MUSHALLA JABBAR RAHMAH KOTA PADANG PAUH KAMPUNG TANJUNG RT. 03 RW. 03 CUPAK TANGAH HBH2025 KAMPUNG TANJUNG RT.03/RW.03 KEL.CUPAK TANGAH Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN	03/MJR/II/2025	10 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
241.	HBH2025022410110764NU50002542	MUSHALLA NURUL YAQIN KOTA PADANG PADANG UTARA PARAK KOPI, ALAI PARAK KOPI, ALAI PARAK KOPI, KEC. PADANG UTARA, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25171, INDONESIA HBH2025 JL. Rawang Parak Kopi RT 04 RW 10 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Bantuan Pembangunan Mushalla Nurul Yaqin	006/MNY/APK/PU/II-2025	13 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
242.	HBH2025022410110766NU50002543	MUSHALLA HAMINAH SAID KOTA PADANG KURANJI JL. KANDANG BATU LUBUK LINTAH HBH2025 JL. KANDANG BATU LUBUK LINTAH, KURANJI, KOTA PADANG Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN	009/PMHS/II/2025	17 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
243.	HBH2025022410110665NU50002544	10309384-TK NASYIATUL AISIYIAH MUNGKA HBH2025 Jorong Mungka Tengah Kelurahan Mungka Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Alat Pembelajaran	420/04/TK-NA/MK/II/2024	23 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	15,000,000
244.	HBH2025022410110767NU50002546	MASJID NURUL HAQ KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG KOTO RAYA NAGARI LAKITAN SELATAN HBH2025 AMPUNG KOTO RAYA, NAGARI LAKITAN SELATAN Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	SAFARI RAMADHAN	002/PM-NH/11-2025	11 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
245.	HBH2025022410110769NU50002550	MUSHALLA KALARAI KOTA PARIAMAN PARIAMAN UTARA JL.MUNGGU PANJANG NO.31 DESA CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARATH HBH2025 JL. MUNGGU PANJANG NO. 31 DESA CUBADAK AIR UTARA KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN	HIBAH MUSHALLA KALARAI (SAFARI RAMADHAN)	01/MK/DS-CAU/I/2025	23 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Cubadak Air Utara Kecamatan Pariaman Utara KOTA PARIAMAN										
246.	HBH2025022410110775NU50002553	MUSHALLA BAITUL HASANAH KAB. SOLOK PANTAI CERMIN JORONG KOTO TINGGI NAGARI SURIANHBH2025 Jorong Koto Tinggi, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Kelurahan Surian Kecamatan Pantai Cermin KAB. SOLOK	PERMOHONAN BANTUAN DANA	001/ PM-BH/II/2025	02 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
247.	HBH2025022410110779NU50002556	10310607-SMP YULIN PRATAMA HBH2025 JL. Sutan Syahril Gang Bambu Mata Air Mato Aie Kec. Padang Selatan Kota Padang Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Bantuan Peralatan Komputer dan Kursi Siswa	081/PH/SMP-YYPP/II/2025	25 Februari 2025	111,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 April 2025	20,000,000
248.	HBH2025022410110776NU50002557	MASJID ISTIQOMAH KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO PADANG BELIMBING, JR. SUNGAI TALANG HBH2025 PADANG BELIMBING JORONG SUNGAI TALANG KECAMATAN LUHAK NAN DUO, KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Sungai Talang Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	HIBAH MASJID ISTIQOMAH PADANG BELIMBING (SAFARI RAMADHAN)	02/DKM-I/IV/2024	12 April 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
249.	HBH2025022410110747NU50002558	MASJID BAITUL KARIM KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG KOTO, NAGARI SOLOK AMBAH HBH2025 JORONG KOTO RANAH Kelurahan Solok Ambah Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID BAITUL KARIM (SAFARI RAMADHAN)	08/M.BTM/Sol.A-2024	19 April 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
250.	HBH2025022410110782NU50002559	MUSHALLA BAITUL HIKMAH KAB. LIMA PULUH KOTA SITUJUAH LIMO NAGARI JR. SEI JILATANG NAG. BANDA DALAM HBH2025 Jorong Sungai Jilatang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kelurahan Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan	01/MBH/SJL-BD/2025	17 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
251.	HBH2025022410110781NU50002560	MASJID NURUL YAQIN KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JORONG BUKIK GOMBAK SITUAK NAGARI MUNGO HBH2025 Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak Kelurahan Mungo Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Perhonoran Bantuan Dana	../Peng/M-NY/BGS/II-2025	12 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
252.	HBH2025022510110784NU50002567	10309446-TK TUNAS HARAPAN PILADANG HBH2025 Jorong Piladang Nagari Koto Tengah Batu Hampa. Kelurahan Koto Tengah	Pembelian APE Dalam dan APE Luar	420/11/TK THP/AKB/II-2025	25 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Batu Ampa Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA										
253.	HBH2025022510110790NU50002568	MASJID ISTIQAMAH KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH JL.IMAM BONJOL KEL. TANAH GARAM HBH2025 Jl. Imam Bonjol RT.002/RW.001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah	15/MI/KTG/II/2025	20 Februari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
254.	HBH2025022510110791NU50002569	MUSHALLA AL- FIRDAUS KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JORONG KUBANG RASAU NAGARI BALAI PANJANG KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN HBH2025 Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Perhonoran Bantuan Dana	../PMAB/KBR-BLP/IX-2025	03 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
255.	HBH2025022510110792NU50002570	MUSHALLA SURAU MUNGGUAK KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JORONG BUKIK GOMBAK SITUAK NAGARI MUNGO HBH2025 Jorong Bukik Gombak Situak Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kelurahan Mungo Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Mohon Bantuan Dana Pembangunan Surau	01/PP-MJI/II/2025	14 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
256.	HBH2025022510110793NU50002571	MASJID NURUL HIDAYAH KOTA PADANG LUBUK KILANGAN JL. BUKIT NGALAU RT. 002 RW. 004 KEL. BATU GADANG HBH2025 Jalan Bukit Ngalau, Kelurahan Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Padang Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	PEMBANGUNAN MASJID	09/MRNH-BTG/II-2025	10 Februari 2025	107,900,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
257.	HBH2025022510110795NU50002572	MASJID JAMIK KOTA PADANG LUBUK KILANGAN LUBUAK SARIAK RT. 03 RW. 02 KEL. PADANG BESI KEC. LUBUK KILANGAN KOTA PADANG HBH2025 Lubuk Sariik, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	PEMBANGUNAN MASJID	14/MJ/LS/PB/LK/II-2025	18 Februari 2025	546,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
258.	HBH2025022510110794NU50002573	MUSHALLA SURAU AN NUR KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JORONG BALAI GADANG BAWAH NAGARI MUNGO LUAK, KAB. LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT HBH2025 Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kelurahan Mungo Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Perhonoran Bantuan Dana	01/PP-MJI/II/2025	14 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
259.	HBH2025022510110796NU50002574	MASJID MASJID MAIMUNAH KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH JL. WR MONGONSIDI NO 8 DUSUN LAPAI DESA CIMPARUAH HBH2025 Dusun Lapai Desa Cimparuh Kecamatan	Permohonan Bantuan Dana	002/PPM/Maimunah/V/2024	01 Mei 2024	4,010,157,979	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Pariaman Tengah Kota Pariaman Kelurahan Cimparuh Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN										
260.	HBH2025022510110798NU50002575	MUSHALLA SURAU PURUIH (MUSHOLLA TAQWA) KAB. SOLOK X KOTO SINGKARAK JORONG SUMAGEK NAGARI SUMANI HBH2025 JORONG SUMAGEK, NAGARI SUMANI, KECAMATAN X KOTO SINGKARAK, KABUPATEN SOLOK Kelurahan Sumani Kecamatan X Koto Singkarak KAB. SOLOK	HIBAH SURAU PURUIH (MUSHALLA TAQWA) (SAFARI RAMADHAN)	01/PSP/I-2025	04 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
261.	HBH2025022510110800NU50002577	10309409-TK PERTIWI SUNGAI NANIANG HBH2025 SUNGAI NANIANG Kelurahan Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan bantuan dana Hibah, meloteng ruangan serbaguna, gudang, WC, Teras, memflaster dinding luar.	420/08/TK-P-SN/BB/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
262.	HBH2025022510110718NU50002580	MUSHALLA SURAU BANDA KAB. PADANG PARIAMAN ULAKAN TAPAKIH NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG ULAKAN KORONG CUBADAK PALAK GADANG KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARATH HBH2025 SURAU CUBADAK NAGARI MANGGOPOH PALAK GADANG KECAMATAN ULAKAN TAPAKIH Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/SB/XII-2024	19 Desember 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
263.	HBH2025022510110803NU50002582	MASJID RAYA HULU PASAMAN KAB. PASAMAN DUO KOTO BETUNG JR.HULU PASAMAN NAGARI CUBADAK HBH2025 BETUNG JORONG HULU PASAMAN NAGARI CUBADAK TIMUR KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Cubadak Kecamatan Duo Koto KAB. PASAMAN	MOHON BANTUAN DANA	01/PMRH/2024	29 Oktober 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
264.	HBH2025022510110806NU50002583	MASJID RAHMATULLAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JR. V TIKALAK, NAG. TANJUNG BARINGIN HBH2025 JORONG V TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK SIKAPING PASAMAN Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	013/a-MSJ-Rahmatullah/JR-V/2024	17 Desember 2024	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
265.	HBH2025022510110805NU50002584	MASJID AL-JIHAD KAB. PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH JORONG KARTINI, MUARO KIAWAI HILIR KECAMATAN GUNUNG TULEH HBH2025 Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Hilir Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	PROPOSAL BANTUAN DANA MEMBANGUN MASJID	01/M.AJ/K-MKH/XI/2024	15 November 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
266.	HBH2025022510110807NU50002585	MASJID AL-MUKHLISIN KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS NAGARI SUMPUR KUDUS SELATAN HBH2025 JORONG KAMPUNG BARU, NAGARI SUMPUR KUDUS SELATAN, KECAMATAN SUMPUR KUDUS, KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Sumpur Kudus Selatan Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID AL-MUKHLISIN (SAFARI RAMADHAN)	01/PM-AM/SPKS-2025	05 Januari 2025	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
267.	HBH2025022510110810NU50002592	MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR PASAR INPRES TAPUS NAG PADANG GALUGUA KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 PASAR INPRES TAPUS JR. SENTOSA Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PM.T-MUHAMMADIYAH/PIT/2025	04 Februari 2025	120,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
268.	HBH2025022610110812NU50002595	MUSHALLA NURUL HIDAYAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING BATUNG BARIRIK, JR. VI, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 JORONG VI BATUNG BARIRIK TANJUNGBARINGIN KECAMAAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	02/PPMNH-JRA/I.2024	05 Desember 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
269.	HBH2025022610110813NU50002596	MUSHALLA DARRUSSALAM KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO BLOK D PLASMA 5 NAGARI GIRI MAJU HBH2025 BLOK D PLASMAN 5 NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO Kelurahan Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA	01	11 November 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
270.	HBH2025022610110815NU50002597	MASJID SYARIATUL IHSAN KOTA PADANG PADANG BARAT JL. BEROK I NO. 24 HBH2025 Jalan Berok 1 nomor 24, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	PEMBANGUNAN MASJID	13/MSI/BN/PDG/II/2025	10 Februari 2025	79,845,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
271.	HBH2025022610110814NU50002600	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO JALUR 5 BARAT JAMBAK SELATAN HBH2025 JAMBAK SELATAN JORONG JAMBAK KOTO BARU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA	01	04 November 0024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
272.	HBH2025022610110822NU50002602	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN RAO SELATAN ABAM HBH2025 NAGARI LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN Kelurahan	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PP-MNI/JR.ABAM/XI/2024	08 November 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN										
273.	HBH2025022610110819NU50002603	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. AGAM BASO JORONG UJUNG GUGUK KENAGARIAN PADANG TAROK HBH2025 Jorong Ujung Guguk Kenagarian Padang Tarok Kelurahan Padang Tarok Kecamatan Baso KAB. AGAM	Perhonoran Bantuan Dana	01/PMI/NI/UG/I-25	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
274.	HBH2025022610110826NU50002607	MASJID NURUL FALAH TEMPURUNG KAB. PASAMAN BARAT KINALI TEMPURUNG, JORONG AMPEK KOTO, NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI HBH2025 JORONG LAPAU TEMPURUNG KENAGARIAN AMPEK KOTO KEC. KINALI KAB. PASAMAN BARAT Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali KAB. PASAMAN BARAT	Renovasi MASJID	02/MNF/AK/10-2024	01 Oktober 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
275.	HBH2025022610110828NU50002612	MASJID TAZKIR KAB. LIMA PULUH KOTA GUNUANG OMEH JR. AIA ANGEK NAG. KOTO TINGGI HBH2025 Jorong Aia Angek Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh Kab Lima Puluh Kota Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh KAB. LIMA PULUH KOTA	Masjid Tazkir Bela Negara, Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	01/413/MTBN/1-2025	01 Januari 2025	474,800,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
276.	HBH2025022610110831NU50002614	MASJID AL-JAMI KAB. DHARMASRAYA KOTO SALAK PADANG TENGAH II PADUKUAN KOTO SALAK HBH2025 JORONG PADANG TENGAH II, NAGARI PADUKUAN Kelurahan Padukuan Kecamatan Koto Salak KAB. DHARMASRAYA	SAFARI RAMADHAN	12/M-AJ/PTD/X/2024	17 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
277.	HBH2025022610110832NU50002615	MUSHALLA TABIANG KAB. PADANG PARIAMAN PATAMUAN NAGARI TANDIKEK UTARA SIALANG HBH2025 TABIANG KORONG SIALANG, NAGARI TANDIKEK UTARA Kelurahan Tandikek Utara Kecamatan Patamuhan KAB. PADANG PARIAMAN	SAFARI RAMADHAN	05/SR-TB/TDK.U/II-2024	01 November 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
278.	HBH2025022610110836NU50002619	MASJID AL-MUKARRAMAH KAB. LIMA PULUH KOTA BUKIK BARISAN JORONG GUNTUANG NAGARI BANJA LOWEH KECAMATAN BUKIK BARISAN HBH2025 Jorong Guntuang, Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kab Lima Puluh Kota Kelurahan Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Pengurus Masjid Al Mukarramah Guntuang	002/PBD/DKM-MAG/V/2024	06 Mei 2024	56,500,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
279.	HBH2025022610110835NU50002620	MUSHALLA SURAU TANAH DINGIN KAB. PASAMAN RAO SELATAN TOBEK ATEH NAGARI TANJUNG BETUNG TIMUR KECAMATAN RAO SELATAN HBH2025 Jorong Kampung Tujuh Nagari Tanjuang Betung Timur Kecamatan Rao Selatan	PROPOSAL BANTUAN DANA MEMBANGUN MUSHOLA	01/PRTSTA/JKP-NTBT/2025	30 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN										
280.	HBH2025022610110838NU50002623	MUSHALLA NURUL HASANAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JR. VII MUARO MANGGUNG, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 Jorong Muara Manggung Tanjung Baringin Selatan, Lubuk Sikaping, Pasaman Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PROPOSAL BANTUAN DANA MEMBANGUN MUSHOLA	01/MNH-JMM/2024	20 November 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
281.	HBH2025022610110830NU50002625	MUSHALLA AL-IKHSAN KAB. PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH MUARA KIAWAI HILIR DEKAT LAPANGAN BOLA HBH2025 NAGARI MUARO KIAWAI HILIR KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MUSHOLLA	01/AI-Ikhsan/JK-MKH/X/2024	11 November 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
282.	HBH2025022610110839NU50002627	MASJID NURUL HAQ KAB. PASAMAN RAO SELATAN MUARA GONDANG LAMA HBH2025 Jorong Rambahan Selatan Nagari Tanjuang Betung Timur Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN	PROPOSAL BANTUAN DANA MEMBANGUN MASJID	03/PM-NH/TBT/2024	09 Januari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
283.	HBH2025022610110840NU50002628	MUSHALLA IBRAHIM MUHAMMAD KAB. PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH JORONG PASAR RAYA NAGARI MUARA KIAWAI HBH2025 NAGARI MUARO KIAWAI KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MUSHOLLA	01/M-IMJAB/JK-KH/XI/2024	15 November 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
284.	HBH2025022710110592NU50002634	MUSHALLA AS-SALAM KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG BARAT JL. LADANG RT.03 KELURAHAN SILAING BAWAH KEC . PADANG PANJANG BARAT HBH2025 JL ST SYAHRIL Gg PUTI BUNGSU RT 06 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat KOTA PADANG PANJANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MUSHALA	02/SB-11/PPMA/II/2025	05 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
285.	HBH2025022710110289NU50002635	MASJID TAQWA ISLAMIC CENTRE KAB. PASAMAN BARAT KINALI ALAMANDA, JORONG BUNUIK, NAGARI KINALI, KECAMATAN KINALI HBH2025 JORONG PADANG JIRAIK NAGARI BUNUIK Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan MCK Masjid Taqwa Muhammadiyah Bunuik Kinali dari Kunjungan Tim Safari Ramadhan Prov. Sumatera Barat	03/MTMA-PB/XI/2024	03 Oktober 2024	50,950,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
286.	HBH2025022710110288NU50002640	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN BARAT SUNGAI AUR JR. S. TANANG HBH2025 JORONG SUNGAI TANANG NAGARI KASIK PUTIH SUNGAI TANANG	Permohonan Bantuan Dana dari Kunjungan Tim Safari Ramadhan Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	100.3.3.2/MNH/WN-KS/2024	01 Januari 2024	55,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Sungai Aua Kecamatan Sungaiaur KAB. PASAMAN BARAT										
287.	HBH2025022710110850NU50002645	MUSHALLA MUSHALLA NURUL 'ALA NURIN KOTA PADANG KURANJI LAPAU MANGGIS KEL.GUNUNG SARIK KEC.KURANJI KOTA PADANG HBH2025 LAPAU MANGGIAH Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MUSH.NURUL'ALaNurin/LP/GS/XII/2024	05 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
288.	HBH2025022710110860NU50002647	MASJID MUKHLISIN KAB. LIMA PULUH KOTA GUGUAK JORONG KALUDAN NAGARI SUNGAI TALANG HBH2025 JORONG KALUDAN, NAGARI SUNGAI TALANG KECAMATAN GUGUAK Kelurahan 0 Kecamatan 0 KAB. LIMA PULUH KOTA	Renovasi Masjid Mukhlisin	002/PMM-KLD/Sek/II-2025	01 Februari 2025	141,720,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
289.	HBH2025022710110856NU50002648	MUSHALLA AL-AMIN KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JR. PADANG PARIK PANJANG HBH2025 JORONG PADANG PARIK Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/PSAA-PPP/TB/I/2025	14 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
290.	HBH2025022710110851NU50002649	MUSHALLA MUSHALLA NURUL IKHLAS KOTA PADANG KURANJI RIMBO TAROK KEL.KURANJI KOTA PADANG HBH2025 RIMBO TAROK Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana Hibah	06/SPm/I/2025	17 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
291.	HBH2025022710110848NU50002650	MUSHALLA DARUL FALAH KAB. TANAH DATAR BATIPUH JALAN PADANG PANJANG - SOLOK, BATANG ARAU, JORONG KUBU NAN EMPAT, KENAGARIAN BATIPUAH BARUAH, BATIPUAH HBH2025 JORONG KUBU NAN LIMO Kelurahan Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PM-DF/IX-2024	27 Desember 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
292.	HBH2025022710110866NU50002658	MUSHALLA SURAU TABEK KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG NAGARI LUBUK PANDAN BALAI SATU HBH2025 SURAU TABEK KORONG BALAI SATU, NAGARI LUBUK PANDAN Kelurahan Lubuk Pandan Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PP-ST/BL-ST/2024	29 Februari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
293.	HBH2025022710110867NU50002660	MASJID USHULUDDIN KAB. LIMA PULUH KOTA MUNGKA JR. MAUR NAGARI TALANG MAUR HBH2025 Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Talang Maur Kecamatan Mungka KAB. LIMA PULUH KOTA	Bantuan Dana Rehab Bangunan WC Masjid	01/MSJ-USHU/II/2025	19 Februari 2025	60,725,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
294.	HBH2025022710110291NU50002663	MASJID AL-MUTTAQIN KAB. PASAMAN BARAT LEMBAH MELINTANG JORONG IRIAN HBH2025 JORONG IRIAN Kelurahan Ujung	Permohonan Bantuan dan Kunjungan Tim Safari Ramadhan Prov.	12/AI-Muttaqin/XI/2024	01 November 2024	55,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Gading Kecamatan Lembah Melintang KAB. PASAMAN BARAT	Sumatera Barat Tahun 2024									
295.	HBH2025022710110873NU50002665	MASJID RAYA GAUANG KAB. SOLOK KUBUNG GALANGGANG GAUANG HBH2025 Galanggang Gauang Kelurahan Gaung Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Perhonoran Bantuan Dana	01/PM-RG/NGU/I-2025	01 Januari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
296.	HBH2025022710110875NU50002666	MASJID RAYA SINGGULING KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG SINGGULING LUBUK ALUNG LUBUK ALUNG, KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 Singguliang Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA MASJID RAYA SINGGULIANG NAGARI SINGGULIANG KECAMATAN LUBUK ALUNG	01/MR-SGLA/II-2025	02 Desember 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
297.	HBH2025022710110878NU50002670	MASJID RAYA PUNGGUNG LADING KOTA PARIAMAN PARIAMAN SELATAN DESA PUNGGUNG LADING HBH2025 Desa punggung lading, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Kelurahan Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan KOTA PARIAMAN	permohonan bantuan dana	1/MR PGL//I/2025	02 Februari 2025	50,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
298.	HBH2025022710110876NU50002672	MASJID NURUL FALAH KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG KOTO TINGGI NAGARI TANJUNG BONAI AUR HBH2025 Jorong Koto Tinggi, Nagari Tanjung Bonai Aur Kelurahan Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Falah	01/PMNF/TbA-2025	17 Februari 2025	61,800,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
299.	HBH2025022810110854NU50002675	MASJID JIHAD KAB. AGAM AMPEK NAGARI SITANANG KECIL NAGARI BATUKAMBING HBH2025 SITANANG KECIL NAGARI BATUKAMBING Kelurahan Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari KAB. AGAM	SAFARI RAMADHAN	-	10 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
300.	HBH2025022810110869NU50002676	MUSHALLA AKBAR KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 KAYU TANAM NAGARI ANDURING LUBUK AUR HBH2025 MUSHALLA AKBAR, NAGARI ANDURING LUBUK ALUR Kelurahan Anduriang Kecamatan x Kayu Tanam KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	10/PPM.A/KP-I/X-2024	24 Oktober 2024	20,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
301.	HBH2025022810110884NU50002678	MASJID M.NUR KOTA PADANG PADANG TIMUR JL. ANDALAS GANG SARGA INDAH HBH2025 JALAN ANDALAS GANG SARGA INDAH NOMOR 1, KELURAHAN ANDALAS, KECAMATAN PADANG TIMUR, KOTA PADANG Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	PEMBANGUNAN MASJID	04/P.M.NUR/II/2025	25 Februari 2025	31,634,000	Layak	31,634,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	31,634,000
302.	HBH2025022810110883NU50002679	MASJID TAQWA KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO JORONG KAPA TIMUR, NAGARI KAPA HBH2025 KAPA TIMUR NAGARI KAPA Kelurahan	SAFARI RAMADHAN 2025	09/P.MTKP/2024	08 Oktober 2024	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT										
303.	HBH2025022810110887NU50002681	MUSHALLA SABILUL MUTTAQIN DHARMASRAYA KOTO BARU JORONG SEBERANG PIRUKO BARAT KECAMATAN KOTO BARU KAB. DHARMASRAYA HBH2025 JORONG SEBERANG PIRUKO BARAT, KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN DHAMASRAYA, SUMATERA BARAT Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru KAB. DHARMASRAYA	PEMBANGUNAN MASJID	-	25 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
304.	HBH2025022810110891NU50002685	MUSHALLA BAITUL IKHLAS KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH BARAT KEL. NUNANGDAYA BANGUN HBH2025 jil.bandung, kel. nunang daya bangun, kec. payakumbuh barat Kelurahan Nunang Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	PERMOHONAN BANTUAN	001/PR/Baitul Ikhlas/VII/2024	28 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
305.	HBH2025030310110657NU50002699	69784446-KB HARAPAN BANGSA HBH2025 Koto Tuo , Jorong Pangkua Kaciak Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kelurahan 0 Kecamatan 0 KAB. SOLOK	Permohonan Dana Hibah	03/KB-HB/02-2025	08 Februari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0 0			30 April 2025	0
306.	HBH2025030310110888NU50002702	MUSHALLA MUSLIM (AL-MUTTAQIN) KAB. AGAM KAMANG MAGEK KOMPLEK PERKANTORAN KAMANG MUDIAK HBH2025 Simpang Aia Tabik Kelurahan Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek KAB. AGAM	Bantuan pembangunan Mushalla Muslim Simpang Aia Tabik	04/PMN/KM/II-2025	02 Februari 2025	574,014,784	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
307.	HBH2025030310110853NU50002703	MASJID ISLAH KAB. LIMA PULUH KOTA SULIKI JR. SIALANG NAG. SUNGAI RIMBANG HBH2025 JORONG SIALANG Kelurahan Sungai Rimbang Kecamatan Suliki KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/MIS/II/2025	15 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
308.	HBH2025030310110531NU50002707	MASJID DARUL QUDUS KAB. SOLOK GUNUNG TALANG PENARIAN TALANG HBH2025 Jorong Panarian Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DARUL QUDUS	01/PMDQ/I/NTLG-2025	04 Januari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
309.	HBH2025030310110756NU50002708	MUSHALLA BAITURRAHIM KAB. SOLOK GUNUNG TALANG JR. ARO KENAGARIAN TALANG HBH2025 Simpang IV Jorong Aro Kelurahan Talang Kecamatan Gunung Talang KAB. SOLOK	BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHALLA BAITURRAHIM	400.8/01/MJNH.NBKT/2025	03 Februari 2025	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
310.	HBH2025030410110789NU50002713	MUSHALLA MULTAZAM KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH PARAK ANAU KEL.TANAH GARAM HBH2025 Parak Anau Kelurahan Tanah Garam Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Perhonoran Bantuan Dana	02/Mushalla Multazzam/II/2025	18 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
311.	HBH2025030410110881NU50002714	MUSHALLA AR-RAHMAN KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH TAPIAN LAPUANG RT 002/RW 001 KELURAHAN TANAH GARAM HBH2025 Tapian Lapuang RT.001/RW.002 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Musholla Ar-Rahman Tapanian Lapung	05/MSL-AR/II/2025	21 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
312.	HBH2025030410110904NU50002715	MASJID AL-FALAH KAB. PADANG PARIAMAN NAN SABARIS KORONG MUARO NAGARI KURAI TAJI HBH2025 Korong Muaro Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MAF/NKT/II/2025	15 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
313.	HBH2025030410110906NU50002716	MASJID RAYA KAMPUNG APAR KOTA PARIAMAN PARIAMAN SELATAN DUSUN ATAS KP APAR HBH2025 Dusun Atas Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Kelurahan Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan KOTA PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/ Proposal/MRKA/II/2025	12 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
314.	HBH2025030410110901NU50002718	MUSHALLA MUSHALLA AL-HIDAYAH KAB. PASAMAN TIGO NAGARI DURIAN KUNIK NAGARI LADANG PANJANG HBH2025 Jorong Nagari Saparampek Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Mohon Bantuan Dana	01/PPM.AL-H/II/2025	24 Februari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
315.	HBH2025030410110908NU50002721	MASJID AL-IKHSAN KOTA SOLOK TANJUNG HARAPAN TANJUNG PAKU KECAMATAN TANJUNG HARAPAN HBH2025 Jl. Patimura RT. 03 RW. 02 Parak Kudo Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Dana Hibah	/M.AI-Ihsan/PB/VIII-2024	04 Agustus 2024	60,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
316.	HBH2025030410110909NU50002722	MASJID BABUSSALAM KAB. DHARMASRAYA PULAU PUNJUNG JL. LINTAS SUMATERA KM 1 PULAU PUNJUNG HBH2025 Jorong Kumbang Panjang, Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Kelurahan Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung KAB. DHARMASRAYA	Proposal Permohonan Dana Hibah	1/MAB/PLP-2025	04 Januari 2025	300,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
317.	HBH2025030410110852NU50002724	MUSHALLA BAITUSSALAM KOTA PADANG KURANJI KP.ANAU GUO RT.003 RW.006 KEL.KURANJI KEC.KURANJI KOTA PADANG HBH2025 KAMPUNG ANAU GUO Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana Hibah	01/PP-MB/MS/1/2025	10 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
318.	HBH2025030410110910NU50002725	MASJID RAYA PAKASAI KOTA PARIAMAN PARIAMAN TIMUR PAKASAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARATH HBH2025 Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman Kelurahan Pakasai Kecamatan Pariaman Timur KOTA PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	03/0-MRP/II-2025	24 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
319.	HBH2025030410110912NU50002726	MASJID IQRAR KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH JL.GELANGGANG TANGAH KEL.IX KORONG HBH2025 Jl. Gelanggang Tangah Kel. IX Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	400/44/Kesra-2025	12 Februari 2025	30,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
320.	HBH2025030410110913NU50002727	MUSHALLA NURUL TAQWA KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM SIKUCUA BARATH HBH2025 Aie Sonsang Durian Angik, Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto, Kampung Dalam Kelurahan Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MNT/II/2025	03 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
321.	HBH2025030410110911NU50002728	MASJID NURUL IMAN KAB. AGAM IV ANGKAT CANDUNG JORONG LUNDANG NAGARI PANAMPUANG HBH2025 Jorong lundang Kelurahan Panampung Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	Hibah untuk Masjid Nurul Iman Lundang	003/PMNIL/2025	20 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
322.	HBH2025030410110915NU50002731	MASJID MASJID AL- BARAKAH KAB. AGAM AMPEK ANGKEK JL. PESANTREN JORONG CIBUAK AMEH NAGARI PASIA KEC. AMPEK ANGKEK KAB. AGAM SUMBAR IV ANGKAT CANDUNG, KAB. AGAM SUMATERA BARATH HBH2025 Jorong Cibuak Ameh Kelurahan Pasia Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	Perhonoran Bantuan Dana	017.1/SPm/YPD-PMD/02/2025	10 Januari 2025	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
323.	HBH2025030410110918NU50002736	MDT-311213030020 MDT NURUL HIDAYAH JOR. MUARO GAMBOK SIJUNJUNG SIJUNJUNG ALAMAT LENGKAP : JR. RIMBUH DANDAN NAGARI MUARO KEC. SIJUNJUNG KAB.SIJUNJUNG SUMATERA BARATH HBH2025 Jln.M.Yamin,SH, Muaro Gambok Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kab. Sijunjung Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	025/MDTA-NH/XII/2024	15 Desember 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
324.	HBH2025030410110914NU50002737	MASJID BAITURRAHMAN KAB. PESISIR SELATAN SILAUT KAMPUNG TSM NAGARI TALANG BINJAI HBH2025 Kampung TSM Silaut II Kelurahan Talang Binjai Kecamatan Silaut KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	07/DKM-M/BR/N-TLB/XI-2024	26 November 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
325.	HBH2025030410110919NU50002738	MUSHALLA MUSHALLA NURUL ILMI KAB. PASAMAN TIGO NAGARI JALAN PROYEK PADANG SAGO JORONG PADANG KUBU NAGARI BINJAI TIGO NAGARI, KAB. PASAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 Jorong Padang Kubu Kelurahan Binjai Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Pembangunan Mu Nurul Ilmi	4010/ I / PPMNIMTs-BI/II/2025	27 Februari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
326.	HBH2025030510110921NU50002740	MASJID QURA KAB. TANAH DATAR BATIPUH JORONG BATANG GADIH HBH2025 Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Kelurahan Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA	020/ PENG-MQ-BG/BB-TD/II/25	17 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
327.	HBH2025030510110922NU50002743	PPS. JABAL RAHMAH HBH2025 JL. UJUNG TANJUNG KARANG SAGO SAGO SALIDO, KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN PROV SUMBAR Kelurahan Sago Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana Pembangunan Pagar Pembatas Tanah	035/B/2/YJR/PS/IX/2024	06 September 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
328.	HBH2025030510110926NU50002744	MUSHALLA AL-HIJRAH KOTA PADANG BUNGUS TELUK KABUNG KOMP. GATES KEL. BUNGUS BARAT KEC. BUNGUS TELUK KABUNG HBH2025 KOMP GATES, KEL. BUNGUS BARAT, KEC. BUNGUS TELUK KABUNG, KOTA PADANG Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MUSHALLA AL-HIJRAH (SAFARI RAMADHAN)	01/Mushalla Al-Hijrah/BB/2025	25 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
329.	HBH2025030510110928NU50002747	MASJID TAQWA KAB. PASAMAN BARAT RANAH BATAHAN JORONG SAWAH MUDI K NAGARI BATAHAN HBH2025 Jorong sawah mudiak nagari batahan kec. ranah batahan kab. Pasaman Barat Kelurahan Batahan Kecamatan Ranah Batahan KAB. PASAMAN BARAT	HIBAH KE MASJID taQWA JORONG SAWAH MUDI AK	01/MTS/SM/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
330.	HBH2025030510110929NU50002748	MUSHALLA AL-MUKMIN KOTA PADANG PAUH KELURAHAN LAMBUNG BUKIT HBH2025 JL. GUNUNG NAGO LAMBUNG BUKIT RT.002/RW.002 Kelurahan Lambung Bukik Kecamatan Pauh KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MA-L.Bukit/1/2025	30 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
331.	HBH2025030610110937NU50002757	MASJID AL HUDA KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR BINUBU BARU NAG.SONTANG CUBADAK KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 BINUBU BARU JR. BINUBU KUBU GADANG Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PM.AL-HUDA/BB/2025	24 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
332.	HBH2025030610110938NU50002759	MASJID AL-AZHAR KAB. PASAMAN RAO SELATAN KAUMAN SELATAN HBH2025 KAUMAN SELATAN Kelurahan Tanjung	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/B/PP-AL/I/2023	15 Januari 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Betung Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN										
333.	HBH2025030610110940NU50002761	MASJID NURUL HUDA KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI TERATAK TENGAH, KENAGARIAN TERATAK TENGAH LUMPO HBH2025 Teratak Tengah Kelurahan Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	../PM-NHTT/I/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
334.	HBH2025030610110936NU50002764	MUSHALLA SURAU MIFTAHUL JANNAH KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM KORONG KAJAI NAGARI CAMPAGO BARATH HBH2025 KORONG KAJAI NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH SURAU MIFTAHUL JANNAH (SAFARI RAMADHAN)	01/SMJ/BC/I-2025	13 Januari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
335.	HBH2025030610110942NU50002765	MASJID TAUFIK KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. KUBANG RASAU NAGARI BALAI PANJANG HBH2025 Jorong Kubang Rasau Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah dari Propinsi Sumatera Barat	../PMAB/KBR-BLP/IX-2025	09 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
336.	HBH2025030610110943NU50002766	MASJID MUQARRABIN KAB. AGAM IV ANGKAT CANDUNG JORONG AMPANG NAGARI AMPANG GADANG KEC. AMPEK ANGKEK HBH2025 Jorong Ampang Gadang Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Agam Kelurahan Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	007/ma/JA-II/2025	13 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
337.	HBH2025030610110322NU50002767	MASJID AL--MUHAJIRIN KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG KOMPLEK JALA UTAMA PARAK LAWEH PULAU AIE NAN XX HBH2025 Komplek jala Utama II RWXI Kelurahan parak laweh pulau aia nan xx , Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Kelurahan 0 Kecamatan 0 0	MOHON BANTUAN DANA	011/P-M/PRL/PDG/II/2025	28 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
338.	HBH2025030610110945NU50002769	MASJID ISTIQAMAH KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH BARAT KEL.BULAKAN BALAI KANDI KEC. PAYAKUMBUH BARATH HBH2025 Hibah untuk masjid Agung Istiqomah Jl. Sukarno hatta Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	Hibah ke masjid agung Istiqomah	03/peng.Ma Istikomah/01/2025	01 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
339.	HBH2025030610110946NU50002770	MASJID AL-IKHLAS PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH KAB. AGAM LUBUK BASUNG SIMPANG IV TAPI JORONG BALAI AHAD KEC. LUBUK BASUNG HBH2025 JL. H. AGUS SALIM SIMPANG IV JORONG II BALAI AHAD Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	HIBAH MASJID AL IKHLAS PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYYAH	001/MAI.PAP/X/2024	01 Oktober 2024	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
340.	HBH2025030610110947NU50002771	0 0 HBH2025 KORONG GANTING KENAGARIAN SUNGAI ASAM Kelurahan Sungai Asam Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/014/PPNY AF-SAT/X/2024	03 Januari 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
341.	HBH2025030610110948NU50002772	MASJID AL-FURQAN MUHAMMADIYAH KOTA PADANG PADANG TIMUR JL.ABD.MUIS NO.23 B KEL.JATI BARU HBH2025 jl. Abdul muis no 23B Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID ALFURQON	004/PPTFWM/I/2025	01 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
342.	HBH2025030610110949NU50002773	MASJID NURUL HUDA KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG SUMBARU NAGARI KAMBANG HBH2025 KAMPUNG SUMBARU Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MASJID NURUL HUDA KP SUMBARU (SAFARI RAMADHAN 2025)	14/PMNH/SMBR/I-2024	26 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
343.	HBH2025030610110950NU50002775	0 0 HBH2025 JL. SYEKH BURHANUDDIN, SINTOGA Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/PP/PONPES-AR/X-2024	11 Oktober 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
344.	HBH2025030610110952NU50002776	MASJID NURUL ULUM KAB. PESISIR SELATAN KOTO XI TARUSAN BARUNG BARUNG BALANTAI HBH2025 BARUNG BARUNG BALANTAI Kelurahan Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto Xi Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MASJID RAYA NURUL ULUM (SAFARI RAMADHAN 2025)	025/MS-RNU/BBB/I/2025	15 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
345.	HBH2025030610110951NU50002777	MASJID TAQWA KAB. PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH RABI JONGGOR HBH2025 Rabi jonggor kec. gunung tuleh kab. Pasaman barat Kelurahan Rabi Jonggor Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	Hibah ke masjid Taqwa rabi jonggor	04/PM/VI/2025	27 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
346.	HBH2025030610110953NU50002778	MUSHALLA SURAU TINGGA KAB. AGAM TILATANG KAMANG JORONG PINCURAN HBH2025 jorong Pincuran Nagari Koto Tengah Kecamatan tilatang Kamang Kbaupaten Agam Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	06/ST-PP/Pcrn/I/2025	25 Januari 2025	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
347.	HBH2025030610110957NU50002782	MASJID AL-IKHSAN KAB. SIJUNJUNG KAMANG BARU JORONG PARIK RANTANG, NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG HBH2025 Jorong parik rantang Kelurahan Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru KAB. SIJUNJUNG	Hibah Untuk Masjid Al-Ikhsan	01//M.IKHSAN-PRK/2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
348.	HBH2025030610110415NU50002783	MASJID ABRAR KAB. DHARMASRAYA SITIUNG JORONG SILULUK NAGARI SUGUNTUR KECAMATAN SITIUNG HBH2025 Jorong Siluluk Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	01/Masj.A/XI/2025	30 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
349.	HBH2025030610110956NU50002784	MASJID AL-IKHLAS KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG NAGARI SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG KORONG RIMBO PANJANG HBH2025 Nagari Sungai Abang Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana Lanjutan Pembangunan Masjid	003/Mas-AI/SA/X-2024	10 Juni 2024	316,375,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
350.	HBH2025030610110958NU50002786	MASJID TAQWA KOTO MAGEK KAB. PADANG PARIAMAN IV KOTO AUR MALINTANG NAGARI BALAI BAIK MAGEK HBH2025 Nagari Balai Baiak Malai III Koto Kelurahan Balai Baiak Malai III Koto Kecamatan IV Koto Aur Malintang KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	01/MT/KP-TGH-2023	20 September 2023	37,275,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
351.	HBH2025030710110959NU50002787	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN TIGO NAGARI BELUKAR PANJANG NAGARI MALAMPAH BARATH HBH2025 Belukar Panjang, Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Kelurahan Malampah Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah Masjid	09/P-Pem/MNH/2024	10 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
352.	HBH2025030710110960NU50002788	MASJID NURUL HUDA KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO UTARA JORONG DAHLIA NAGARI LUBUK JANTAN HBH2025 Jorong Dahlia Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN DANA BANTUAN DANA PEMBUATAN KANOPI MASJID	01/MNH-JD/18/2025	18 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
353.	HBH2025030710110961NU50002789	MASJID TAQWA KOTA SAWAHLUNTO BARANGIN RT 01 / RW 02 KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 Masjid Taqwa Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Tempat Berwudlu Masjid Taqwa	06/MT/LB/II-2025	02 Oktober 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
354.	HBH2025030710110962NU50002790	MASJID JAMI'ATUL HASANAH KAB. PASAMAN MAPAT TUNGGUL	PROPOSAL BANTUAN DANA MEMBANGUN	-	05 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		JORONG MALANCAR NAGARI PINTU PADANG HBH2025 Malancar, Nagari Pintu Padang, Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Kelurahan Pintu Padang Kecamatan Mapat Tunggul KAB. PASAMAN	MASJID									
355.	HBH2025030710110964NU50002793	MASJID NURUL IHSAN KOTA PADANG KOTO TANGAH KOMP. PERUMDAM III/4 TUNGGUL HITAM, KOTA PADANG HBH2025 Kelurahan dadok tunggul hitam kec. koto tengah kota padang Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID NURUL IHSAN DADOK TUNGGUL HITAM KOTO TANGAH PADANG	15/SRT-P/MNI-DTH/2/2025	19 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
356.	HBH2025030710110966NU50002796	MASJID NURUL YAQIN KAB. SOLOK SELATAN SUNGAI PAGU KAMPUNG PALAK HBH2025 Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Kelurahan Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	03/P.MNY/JR.KP/I-2025	05 Januari 2025	79,085,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
357.	HBH2025030710110968NU50002798	MUSHALLA NURUL IHSAN KOTA SAWAHLUNTO TALAWI DESA KUMBAYAU KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 DESA KUMBAYAU, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO Kelurahan Kumbayau Kecamatan Talawi KOTA SAWAHLUNTO	HIBAH MUSHALLA NURUL IHSAN (SAFARI RAMADHAN)	/PM.NI/Kby/I/2025	06 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
358.	HBH2025030710110969NU50002799	MASJID AL-BARQAH KAB. PASAMAN DUO KOTO LANAI HILIR-JORONG BANDAR PADANG PEMBANGUNAN-NAGARI CUBADAK HBH2025 Jorong BDR.PDG Nagari Cubadak Barat Kecamatn Dua Koto Kabupaten Pasaman Kelurahan Cubadak Kecamatan Duo Koto KAB. PASAMAN	PERMOHONAN PENCAIRAN	-	05 Maret 2025	27,500,000	Layak	27,500,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	27,500,000
359.	HBH2025030710110970NU50002800	MUSHALLA NURUL HUDA KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG GANTIANG NAGARI SIJUNJUNG HBH2025 JORONG GANTING, NAGARI SIJUNJUNG, KECAMATAN SIJUNJUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Sijunjung Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MUSHALLA NURUL HUDA JORONG GANTING	15/MSH/NH/01/SJJ/2022	04 Februari 2022	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
360.	HBH2025030710110971NU50002801	MASJID JAMI' TARUYAN KAB. AGAM MATUR JORONG TARUYAN NAGARI TIGO BALAI KEC.MATUR KAB.AGAM SUMBAR HBH2025 Jorong taruyan nag. tigo balai kec. matur kab. Agam Kelurahan Tigo Balai Kecamatan Matur KAB. AGAM	HIBAH KE MASJID JAMI' TARUYAN	01/MJ-TRY/II/2025	03 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
361.	HBH2025030710110974NU50002802	MUSHALLA DIAUR KAB. PADANG PARIAMAN NAN SABARIS NAGARI PADANG BINTUNGAN KORONG MEDAN BAIK HBH2025 Korong Medan Baik Nagari Padang	PERMOHONAN BANTUAN DANA	2003/WN-PDBT/II-2025	28 Februari 2025	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Bintungan Kelurahan Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN										
362.	HBH2025030710110972NU50002803	MUSHALLA OLO MAMBUANG KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM NAGARI CAMPAGO OLO MANSI KORONG BUKIT CALIAK HBH2025 NAGARI CAMPAGO OLO MANSI KORONG BUKIK CALIAK KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH SURAU ISTIQAMAH OLO MAMBUANG BUKIK CALIAK (SAFARI RAMADHAN)	01/SI.OM.BK/III/2025	05 Maret 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
363.	HBH2025030710110973NU50002804	MUSHALLA MUSHALLA BERKAH KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG PALAK ATOK KAMPUNG LADANG SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG, KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 Nagari Sungai Abang Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	05/MB-PA/LA/2025	18 Maret 2024	29,300,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
364.	HBH2025030710110925NU50002805	MUSHALLA MUSHALLA NURUL IMAN KAB. PASAMAN TIGO NAGARI AIR LUNDANG JORONG PARIT BATU NAGARI LADANG PANJANG BARATH HBH2025 AIR LUNDANG JORONG PARIT BATU Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	HIBAH MUSHALLA NURUL IMAN (SAFARI RAMADHAN)	01/PM/NI/V/2024	18 Februari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
365.	HBH2025030710110975NU50002806	MUSHALLA GADANG TANJUNG MEDAN KAB. PADANG PARIAMAN ULAKAN TAPAKIH NAGARI SANDI ULAKAN KORONG TANJUNG MEDAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARATH HBH2025 Korong Taluak Nibuanh Tanjuang Medan Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/P3-SGTJM/NSU/III-2024	02 Maret 2024	338,265,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
366.	HBH2025030710110976NU50002807	MUSHALLA SURAU KOTO SAIYO KAB. PADANG PARIAMAN ULAKAN TAPAKIH NAGARI SEI. KORONG SIKABU GIMBA KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARATH HBH2025 Korong Sikabu Mudiak Nagari Sungai Gimba Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih Kelurahan Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakih KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	/SP/PP-SKS/III-2025	03 Maret 2025	914,850,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
367.	HBH2025030710110890NU50002809	MUSHALLA AL--KARIM KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI JORONG DUSUN TUO NAGARI MUARO	HIBAH MUSHOLLAH AL KARIM	02/MAK/Ma.Bodi-2024	01 Februari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		BODIHBH2025 JORONG DUSUN TUO Kelurahan Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG							Kelembagaan Bina Spiritual			
368.	HBH2025030710110977NU50002810	MUSHALLA SURAU KAPALO LURAH KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAHHBH2025 JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	HIBAH SURAU KAPALO LURAH	/PENG/SKL-2024	15 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
369.	HBH2025031010110986NU50002834	MASJID HASANAH KAB. PASAMAN DUO KOTO PADANG PANJANG, JR. TANJUNG MAS NAGARI SIMPANG TONANGHBH2025 NAGARI SIMPANG TONANG UTARA, KECAMATAN DUA KOTO, KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	ISTIMEWA	02 Februari 2024	35,000,000	Layak	35,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	35,000,000
370.	HBH2025031010110988NU50002837	MUSHALLA SURAU TOBIANG KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAHHBH2025 JORONG KOTO TANGAH NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	HIBAH MUSHALLAH SURAU TOBIANG (SAFARI RAMADHAN)	05/M.S.TB/2024	15 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
371.	HBH2025031010110923NU50002839	TPQ-411213070959 TPQ FASTABIQUL KHAIRAT SITUJUUAH BATUA SITUJUUAH LIMO NAGARI LIMA PULUH KOTA ALAMAT LENGKAP : JR. KOTO NAG. SITUJUUAH BATUAHBH2025 Jorong Koto Kelurahan Situjuuah Batua Kecamatan Situjuuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan	05/TPQ-FKH/KT.SB/XII/2024	10 Desember 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
372.	HBH2025031010110983NU50002841	MUSHALLA RIYADATUL AMAL KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH DESA KAMPUNG BARUHBH2025 Perumahan kampung baru Desa kampung baru Pariaman tengan kota pariaman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Hibah ke mushallah Riyadatul Amal	4/MRA/KP/P/II/2025	26 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
373.	HBH2025031010110993NU50002842	MUSHALLA NURUL TAQWA KAB. DHARMASRAYA KOTO BARU KOTOHBH2025 MUSHALLAH NURUL TAQWA, JORONG KOTO NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KOTA BARU Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru KAB. DHARMASRAYA	PERMOHONAN DANA HIBAH	20/NT/I-2025	24 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
374.	HBH2025031010110992NU50002843	MASJID MIFTAHUL JANNAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIPORA UTARA DUSUN KARYA BAKTI DESA	Perhonoran Bantuan Dana	07/MJ/III/2025	04 Maret 2025	35,000,000	Layak	35,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	35,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		SIPORA JAYA KM.08 KECAMATAN SIPORA UTARAHBH2025 Dusun Karya Bakti Kelurahan Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI							Kelembagaan Bina Spiritual			
375.	HBH20250310101110990NU50002846	MASJID AL-FALAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIBERUT UTARA MUARA SIKABALUAN KECAMATAN SIBERUT UTARA KAB. KEPULAUAN MENTAWAIHBH2025 Dusun Muara Kelurahan Muara Sikabalan Kecamatan Siberut Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Perhonoran Bantuan Dana	01/PR/AL-FALAH/III/2025	05 Maret 2025	35,000,000	Layak	35,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	35,000,000
376.	HBH2025031010111000NU50002858	MUSHALLA BABUL KHAIRAT KAB. SIJUNJUNG IV NAGARI NAGARI MUARO BODIHBH2025 JORONG DUSUN TUO Kelurahan Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MUSHOLLA BABUL KHAIRAT	02/MBK/Ma.Bodi-2023	03 Maret 2023	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
377.	HBH2025031010111005NU50002862	MASJID AS-SAKINAH KOTA PADANG KOTO TANGAH KOMP. VILLA ANGGREK I RT.004/013, KEL. BALAI GADANG.HBH2025 Villa Anggrek Tahap 1 RT.04/ RW 13 Air Dingin Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	permohonan dana hibah	15/MAS/II/2025	31 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
378.	HBH2025031110111010NU50002868	MASJID TAQWA KAB. AGAM TANJUNG RAYA JORONG BALAI BELO NAGARI KOTO KACIAKHBH2025 Jorong Balai Belo Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Kelurahan Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid	01/MTBB-2025	25 Februari 2025	380,100,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
379.	HBH2025031110111011NU50002871	MASJID RAYA LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH JL.LUBUK SIKARAH KEL. SINAPA PILIANGHBH2025 Jl Lubuk Sikarah Kel. Sinapa Piliang Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	003/MR.Lbs/KD.SLK/II-2025	25 April 2025	89,100,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
380.	HBH2025031110111012NU50002873	MASJID NURUL ISLAM KOTA PADANG PAUH JL. KOTO BARU RT. 01 RW. 05 LIMAU MANIS SELATANHBH2025 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	01/MNI/I-2025	22 Januari 2025	100,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
381.	HBH2025031110111018NU50002879	MASJID DARUSSALAM KAB. SOLOK SELATAN SANGIR JORONG TANDAI BUKIK BULEK NAGARI LUBUK GADANG TENGGARAHBH2025 JORONG TANDAI BUKIK BULEK Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	005/PM/DRS-TBB/III/2025	07 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
382.	HBH2025031110111016NU50002883	MASJID ALFURQAN KAB. DHARMASRAYA SUNGAI RUMBAI SUNGAI RUMBAI HBH2025 Jorong Tarandam Nagari Sungai Kec. Sungai rumbai Kab. Dhamasraya Kelurahan Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai KAB. DHARMASRAYA	Permohonan Bantuan Dana Kelanjutan Pembangunan Mesjid Al Fueqan	02/M/03/2025	03 Maret 2025	175,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
383.	HBH2025031110111014NU50002884	MASJID AL-HANIF KOTA BUKITTINGGI AUR BIRUGO TIGO BALEH JL. URIP SUMOHARJO-SAPIRAN HBH2025 KELURAHAN PIRAN KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh KOTA BUKITTINGGI	PERMOHONAN BANTUAN	03/PM-AH/Per/3/2025	10 Maret 2025	57,970,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
384.	HBH2025031110111021NU50002885	MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING PASAR LAMA, NAG. DURIAN TINGGI HBH2025 PASAR LAMA NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	HIBAH MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH LUBUK SIKAPING (SAFARI RAMADHAN)	15/MTM/26/IV/2024	26 April 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
385.	HBH2025031110111006NU50002886	431213010004 MAJELIS TAKLIM NURUL IMAN KAMPUNG LADANG IV KOTO HILIE BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 Kampung Ladang Jalamu Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	01/KMT-MNI/LS/I/2025	22 Januari 2025	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
386.	HBH2025031110111022NU50002887	MASJID BABUSSALAM KAB. SOLOK KUBUNG HALABAN JORONG, JL. SUBARANG KOTO BARU, PANYAKALAN, KEC. KUBUNG, SOLOK, SUMATERA BARAT 27361 HBH2025 Jorong Subarang Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Kelurahan Koto Baru Kecamatan Kubung KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	03/BBS/III-2025	10 Maret 2025	55,009,600	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
387.	HBH2025031110111023NU50002888	MASJID SALMAN KAB. SOLOK SELATAN SANGIR JORONG TANGGO AKAR NAGARI LUBUK GADANG UTARA HBH2025 Jalan Raya Tanggo Aka Jorong Tanggo Aka Nagari Lubuk Gadang Utara Kelurahan Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat 2025	02/P.pms.T/III-2025	03 Maret 2025	425,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
388.	HBH2025031110111024NU50002889	MASJID RAYA PASILIHAN KAB. SOLOK X KOTO DIATAS PASILIHAN HBH2025 NAGARI PASILIHAN KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK Kelurahan Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas KAB. SOLOK	PERMOHONAN BANTUAN	/PMRY/NSPL-2025	04 Maret 2025	69,591,700	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
389.	HBH2025031110111025NU50002890	MASJID NUR IMAN KOTA BUKITTINGGI GUGUAK PANJANG BUKIK APIK LAPAU BATU HBH2025 Lapau Batu Kelurahan Bukik Apit Puhun Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi Kelurahan Bukik Apik Puhun Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Bantuan Dana	08/MNI-BKT/III-2025	11 Maret 2025	77,975,400	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
390.	HBH2025031110111026NU50002891	MUSHALLA AL-IKHLAS BTI KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH TIMUR KEL PADANG TANGAH PAYOBADAR HBH2025 Komplek Perumahan Bumi Tiaka Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Bantuan Dana	03/Mushalla/II/2025	20 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
391.	HBH2025031110111028NU50002892	MASJID TAQWA KAB. AGAM TILATANG KAMANG JORONG NGUNGUN NAGARI KOTO TANGAH HBH2025 JORONG NGUNGUN NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	REKOMENDASI USULAN HIBAH DAN BANSOS	400/106/Kesra/III/2025	05 Maret 2025	51,096,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
392.	HBH2025031110111007NU50002893	431213010021 MAJELIS TAKLIM NURUL HUDA SUNGAI NYALO SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 Sungai Nyalo Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	01/MTNH-SN.IVKM/I/2025	27 Januari 2025	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
393.	HBH2025031110111004NU50002894	431213010005 MAJELIS TAKLIM NURUL ISTIQAMAH LIMAU SUNDAI IV KOTO HILIE BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 Kampung Limau Sundai Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	01/KMT-MNI/LS/XII/2024	30 Desember 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
394.	HBH2025031110111029NU50002895	MASJID DARUSSALAM KOTA PADANG PADANG SELATAN JL. PAMANCUNGAN KEL. PASA GADANG HBH2025 Pemancungan kelurahan pasa gadang kec. padang selatan kota padang Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID DARUSSALAM PEMANCUNGAN	04/MDS-PMC/1/2025	04 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
395.	HBH2025031110111030NU50002897	MASJID AL-MUNAWIR KAB. DHARMASRAYA TIMPEH JORONG MULYA JAYA, NAGARI TABEK, KECAMATAN TIMPEH, KAB. DHARMASRAYA SUMATRA BARATH HBH2025 Jorong Mulya Jaya Kelurahan Tabek Kecamatan Timpeh KAB. DHARMASRAYA	Perhonoran Bantuan Dana	450/1/AL-MNR-MJ/I-2025	10 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
396.	HBH2025031110111031NU50002898	MASJID BAITUL JIHAD KOTA PADANG PADANG TIMUR KUBU DALAM PARAK KARAKAH HBH2025 Komplek Filano Jaya II Rw. 05 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana Hibah	04/MJB/2/2025	02 Desember 2025	54,996,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
397.	HBH2025031210111034NU50002913	MUSHALLA NURUL HAQ KOTA PADANG BUNGUS TELUK KABUNG KP.PINANG KEL.BUNGUS TIMUR HBH2025 KAMPUNG PINANG RT 04 RW 05 KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MUSHALLA NURUL HAQ KAMPUNG PINANG (SAFARI RAMADHAN)	001/PMNH.KP.BT/I-2025	13 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
398.	HBH2025031210111036NU50002915	MASJID AL-FALAH KAB. TANAH DATAR SALIMPAUNG JORONG KANDANG MALABUANG LAWANG MANDAHILING HBH2025 Jorong Kandang Malabuang Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpauang KAB. TANAH DATAR	PEMBANGUNAN MASJID	/M.AF-KDM/III/2025	11 Maret 2025	75,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
399.	HBH2025031210111039NU50002919	MASJID NURUL HIKMAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING TAMPUNIAK BY PASS, NAG. PAUAH HBH2025 Tampuniak Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kelurahan Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	05/PM-NH/2024	02 Mei 2024	200,704,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
400.	HBH2025031210111040NU50002921	MASJID BAITURRAHMAN KOTA SAWAHLUNTO TALAWI DUSUN BATU TIJAK KABAU DESA DATAR MANSIANG KEC. TALAWI KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 Batu Tijak Kabau Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Kelurahan Data Mansiang Kecamatan Talawi KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	1/PMB/I/2025	10 Februari 2025	190,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
401.	HBH2025031210111041NU50002922	MASJID DARUSSALAM KOTA PADANG PADANG SELATAN JL. SEBERANG PALINGGAM RT 01 RW 04 KEL. SEBERANG PALINGGAM HBH2025 Jl. seberang palinggam RT 01 RW 04 Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Hibah ke masjid Darussalam seberang palinggam mata air	004/04/2025	10 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
402.	HBH2025031210111042NU50002924	MASJID TAQWA KAB. AGAM TANJUNG RAYA JORONG LUBUK SAO NAGARI DALKO HBH2025 JORONG LUBUK SAO NAGARI TANJUNG SANI Kelurahan Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya KAB. AGAM	SAFARI RAMADHAN 2025	01/M/TQ/III/2025	03 Maret 2025	50,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
403.	HBH2025031210111043NU50002925	MASJID AL-ITTIHAD KOTA PADANG LUBUK KILANGAN SIMPANG TIGO INDARUNG RT 03 RW VIII KEL. INDARUNG KEC. LUBUK KILANGAN KOTA PADANG HBH2025 JALAN RAYA INDARUNG NO.25, KECAMATAN LUBUK KILANGAN, KOTA PADANG Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN PEMBIAYAAN	14-SPT/02/2025	24 Februari 2025	32,485,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
404.	HBH2025031210111044NU50002927	MASJID AL-FALAH KAB. DHARMASRAYA KOTO BARU PADANG BINTUNGAN 1 HBH2025 JL. POROS PADANG BINTUNGAN , NAGARI SIALANG GAUNG Kelurahan Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru KAB. DHARMASRAYA	SAFARI RAMADHAN 2025	045/DKM-MAPB	03 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
405.	HBH2025031210111045NU50002928	MASJID JAMIK AUR KUNING KOTA BUKITTINGGI AUR BIRUGO TIGO BALEH JL. PROF. M. YAMIN, SH, AUR KUNING HBH2025 Jln. Prof.M.Yamin RT 02/ RW 01, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh KOTA BUKITTINGGI	PERMOHONAN BANTUAN DANA	04/PENG-MU-AK/III/2025	07 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
406.	HBH2025031210111046NU50002929	MASJID AN-NUR SYUKUR KOTA PADANG LUBUK KILANGAN NO. 36.A RT. 03 RW 09 KEL. INDARUNG HBH2025 JALAN RAYA PADANG-SOLOK NOMOR 36 A Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	04/MANS-KI/04.2025	01 Maret 2025	36,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
407.	HBH2025031210111049NU50002932	MASJID NURUL IMAN KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA GADIH ANGIK NAGARI TIKU V JORONG HBH2025 JL. ABADI, JORONG GADIH ANGIK Kelurahan Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	SAFARI RAMADHAN 2025	01/MSJD-NI/I-2025	20 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
408.	HBH2025031210111050NU50002934	MASJID AL-HIDAYAH KOTA PARIAMAN PARIAMAN SELATAN DESA SUNGAI KASAI KEC.PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN SUMATERA BARATH HBH2025 Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Kelurahan Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	001/MAH/SKS/I-2025	13 Januari 2025	100,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
409.	HBH2025031310111051NU50002939	MASJID NURUL BAKTI KAB. SOLOK SELATAN SANGIR JORONG TIMBULUN NAGARI LUBUK GADANG KEC. SANGIR KAB. SOLOK SELATAN HBH2025 JORONG TIMBULUN NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	03/MNB/S-III/2024	01 Maret 2024	65,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
410.	HBH2025031310110823NU50002943	69832107-KB AZ-ZAHRA HBH2025 KOMPLEK PALAPA SAIYO A.15/4 Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana Rehap Bangunan PAUD	08/PAUD-AZ/BTA/XI-2024	25 November 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
411.	HBH2025031310111013NU50002947	MASJID NURUL ISLAM BATU SANGKA DILAM KAB. SOLOK BUKIT SUNDI JORONG BATU SANGKA NAGARI DILAM HBH2025 Jl. Batu Sangka-Tabek, Jorong Batu Sangka Nagari Dilam Kelurahan Dilam Kecamatan Bukit Sundi KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	09/Pengurus/03/2025	03 Maret 2025	50,640,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
412.	HBH2025031310111066NU50002949	MASJID IJTIHAD KOTA PAYAKUMBUH LAMPOSI TIGO NAGORI KEL. PADANG SIKABU KEC. LAMPOSI TIGO NAGARI HBH2025 Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Bantuan Dana	-	19 Mei 2024	50,600,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
413.	HBH2025031310111069NU50002951	431213050002 BKMT KECAMATAN PASAR USANG NAGARI SUNGAI BULUAH BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JL. PADANG - BUKITTINGGI NO. 24 PASAR USANG Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	010/BA/BKMT/XI-2024	25 November 2024	26,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
414.	HBH2025031310111071NU50002952	MASJID MUHSININ KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH UTARA JLN.MANUNGGAL LINGKUNGAN TAROK KEIURAHAN TIGO KOTO DIA TE HBH2025 Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Kelurahan Tambago Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH	Proposal Bantuan Dana Hibah	06/PMM-TR/TKDa/2024	21 Mei 2024	460,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
415.	HBH2025031310111070NU50002953	431203050032 BKMT NAGARI SUNGAI BULUAH SELATAN MASJID JAMIATUL MUKMININ NAGARI SUNGAI BULUAH SELATAN BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG KAYU KAPUR Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	02/BKMT/MJ-KP-SBS/IX-2024	10 November 2024	12,250,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
416.	HBH2025031310111072NU50002954	MASJID NURUL ULUM KAB. SOLOK SELATAN SANGIR BATANG HARI NAGARI ABAI HBH2025 NAGARI ABAI KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN Kelurahan Abai Kecamatan Sangir Batang Hari KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	19/MRNU/III/2024	12 Maret 2024	57,830,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
417.	HBH2025031310111073NU50002955	MASJID NURUL IMAN KAB. SOLOK LEMBAH GUMANTI TARATAK TANGAH SUNGAI NANAM HBH2025 Jorong Taratak Tengah Kelurahan Sungai Nanam Kecamatan Lembah	Proposal Bantuan Dana Hibah	10/P-MNI/TRT-2025	03 Maret 2025	109,289,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Gumanti Kabupaten Solok Kelurahan Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti KAB. SOLOK										
418.	HBH2025031310111074NU50002956	MUSHALLA AL-IKHLAS KAB. AGAM PALUPUH PADANG MANGGIH NAGARI NAN TUJUAH HBH2025 Padang manggih jorong simancuang hilia Kelurahan Nan Tujuah Kecamatan Palupuh KAB. AGAM	HIBAH KE MUSHALLA AL IKHLAS PADANG MANGGIS JORONG SIMANCUANG HILIA AGAM	02/JSN/NT/2025	06 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
419.	HBH2025031310111068NU50002958	431203050039 BKMT RAHMAT BAITULLAH NAGARI KASANG TANJUNG KORONG SUNGAI PINANG NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG SUNGAI PINANG Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	005/BKMT/SP-MRB/XII-2024	15 Desember 2024	9,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
420.	HBH2025031310111075NU50002959	431203050001 BKMT PADANG PARIAMAN JL. KIAMBANG LUBUK PANDAN LUBUK PANDAN 2X11 ENAM LINGKUNG PADANG PARIAMAN HBH2025 JL. KIAMBANG LUBUK PANDAN Kelurahan Lubuk Pandan Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	007/KAB/BKMT/XI-2024	25 November 2024	75,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
421.	HBH2025031310111067NU50002962	431203050038 BKMT MASJID AL MUBARAK NAGARI KASANG MASJID AL MUBARAK NAGARI KASANG NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG SEI PINANG Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	005/BKMT/SP/XI-2024	01 Februari 2025	18,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
422.	HBH2025031310111064NU50002964	431203050025 BKMT NAGARI BUAYAN MASJID NURUL HASANAH BUAYAN NAGARI BUAYAN BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 BUAYAN LUBUK ALUNG Kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	04/BKMT-BYN/XI-2024	20 November 2024	25,200,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
423.	HBH2025031310111079NU50002965	MASJID BAITUSSALAM KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH UTARA KEL. KOTO BARU KEC. PAYAKUMBUH UTARA HBH2025 Koto Baru balai janggo kel. Kapalo Koto Kelurahan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH	Hibah ke masjid Babussalam jl. Bundo Payakumbuh utara kota payakumbu	012/Msj. BS//2025	08 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
424.	HBH2025031310111081NU50002966	70035719-TK ASTILLA AZIZY HBH2025 PERUM TAMAN SAKINAH PERMAI BLOK A NO 1 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	HIBAH TK ASTILLA AZIZY	03.01/YZDI/TK-AA//2025	10 Januari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
425.	HBH2025031310111063NU50002967	431203050035 BKMT MASJID ANSHARULLAH KORONG KASAI MASJID ANSHARULLAH KORONG KASAI NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG KASAI Kelurahan Kasang	PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	008/BKMT-DR/Proposal/X/2024	22 Desember 2024	10,150,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN										
426.	HBH2025031310111061NU50002968	431203050027 BKMT NAGARI KASANG MASJID AL-MUJAHIDIN KORONG KASAI NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 KASANG Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM	-	02 Januari 2025	24,850,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
427.	HBH2025031310111062NU50002969	431203050034 BKMT MASJID NURUL FALAH DUKU MASJID NURUL FALAH DUKU NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 NAGARI KASANG Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	008/BKMT-DR/Proposal/X/2024	22 November 2024	9,100,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
428.	HBH2025031310111082NU50002970	MASJID DARUSSALAM KOTA PADANG NANGGALO KP. LERENG RT 1 RW I KEL TABING BANDA GADANG HBH2025 KAMPUNG LERENG KELURAHAN TABING BANDA GADANG GUNUNG PANGGILUN Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	400.70/kesra-2025	13 Maret 2025	57,314,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
429.	HBH2025031310111080NU50002971	MUSHALLA TALAGO KAB. PADANG PARIAMAN SUNGAI GARINGGING NAGARI MALAI III KOTO, DURIAN SIRAMPEH KORONG LAMBEH HBH2025 KORONG LAMBEH, NAGARI MALAI III KOTO, KECAMATAN SUNGAI GERINGGING, KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Malai III Koto Kecamatan Sungai Garingging KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH SURAU TALAGO KORONG LAMBEH (SAFARI RAMADHAN)	01/ST/BC/III-2025	07 Maret 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
430.	HBH2025031310111083NU50002972	MASJID NURUL HUDA KAB. SIJUNJUNG KAMANG BARU JORONG KOTO TUO NAGARI AIE AMO KEC. KAMANG BARU KAB. SIJUNJUNG HBH2025 JORONG KOTO TUO Kelurahan Aia Amo Kecamatan Kamang Baru KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID NURUL HUDA AIE AMO SIJUNJUNG	01/MNH/AA-2024	18 Maret 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
431.	HBH2025031310111060NU50002973	431203050026 BKMT NAGARI KATAPIANG MASJID RAYA NAGARI KATAPIANG NAGARI KATAPIANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 NAGARI KATAPIANG Kelurahan Katapiang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	01/BA/BKMT/XI-2024	20 November 2024	52,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
432.	HBH2025031310111058NU50002975	431203050042 BKMT AISYAH KORONG PALAPA SAIYO MASJID TAQWA PALAPA SAIYO NAGARI SUNGAI BULUAH SELATAN BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG PALAPA SAIYO Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	01/BKMT-APS/PROPOSAL/XI/2024	22 November 2024	10,850,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
433.	HBH2025031310111055NU50002976	431203050028 BKMT NAGARI SUNGAI BULUAH MASJID SYUHADA PASAR USANG NAGARI SUNGAI BULUAH BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 PASAR USANG Kelurahan Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	5/BKMT-SB/XI/2024	17 November 2024	24,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
434.	HBH2025031310111056NU50002979	431213050015 BKMT MASJID AL-JAMIUL HADI KOMP AVIA JAYA BAKUANG NAGARI KASANG NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 KOMPLEK AVIA JAYA BAKUNG DUKU Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	02/BKMT-MJH/Proposal/X/2024	29 November 2024	10,850,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
435.	HBH2025031310111078NU50002980	MUSHALLA MUSHALLA AL-TAQWA KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG LAWEH MUDIAK NAGARI LADANG PANJANG BARATH HBH2025 NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN	01/PM/PLM/VI/2023	12 Juni 2023	84,465,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
436.	HBH2025031310111052NU50002981	431203050044 BKMT MUSHALLA NUR HAYAT MUSHALLA NURHAYAT NAGARI KASANG BATANG ANAI PADANG PARIAMAN HBH2025 JORONG KASAI Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN BAJU SERAGAM BKMT	001/BKMT-MUS/Kor-Kas/II/2025	20 Januari 2025	10,500,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
437.	HBH2025031310111087NU50002982	MASJID TARHIM KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS PADANG DATAR NAGARI TANJUNG BARULAK HBH2025 Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	Permohonan Bantuan Dana	03/P-MT/TB/2025	25 Februari 2025	200,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
438.	HBH20250313101110293NU50002988	MASJID RAYA NURUL HUDA KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO JLR IV JAMBAK TIMUR NAGARI KOTO BARU HBH2025 Jorong Jambak Selatan Nagari Jambak Selatan Kelurahan Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	MOHON BANTUAN DANA	11/MRNI/II/2025	09 Februari 2025	91,500,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
439.	HBH2025031410111091NU50003000	MASJID JUAMA KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG BARAT JL. RAHMAH EL YUNUSIYAH RT VII	Permohonan Bantuan Dana	06/PM-MZ/III/2024	20 Maret 2024	297,150,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		KEL. PASAR USANG HBH2025 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat KOTA PADANG PANJANG							Kelembagaan Bina Spiritual			
440.	HBH2025031410111092NU50003001	MASJID NURUL IMAN KAB. DHARMASRAYA SITIUNG JORONG TARATAK NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT HBH2025 JORONG TARATAK NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA Kelurahan Siguntur Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	Permohonan Bantuan Dana	21/MNI/TRT/III-2025	07 Maret 2025	51,035,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
441.	HBH2025031410111094NU50003004	MASJID JAMI' TAQWA PAUAH KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JL. SANGKAR BULAN, NAG. PAUAH LUBUK SIKAPING , KAB. PASAMAN HBH2025 Jorong Pauah Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kelurahan Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/MARET/1446/2024	01 Maret 2025	73,560,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
442.	HBH2025031410111095NU50003005	MASJID BAITUL AMAL KAB. PASAMAN BARAT LEMBAH MELINTANG KAMPUNG JUAR JORONG SALIDO BARAT NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT HBH2025 JORONG SALIDO BARAT,NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana Hibah	05/MBA-KJ/2024	15 Maret 2024	50,380,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
443.	HBH2025031410111101NU50003011	MASJID AGUNG AL-MUTTAQIN KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JL.A. YANI LUBUK SIKAPING HBH2025 NAGARI PAUAH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN	10/BPPIC-MA/V/2024	07 Mei 2024	118,900,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
444.	HBH2025031410111103NU50003013	MASJID JABAL NUR KAB. SOLOK SELATAN SUNGAI PAGU MANTIRAI INDAH HBH2025 Jorong Mantirai Indah Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Kelurahan Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	01/PM/Masjid-JB/III-2025	06 Maret 2025	61,850,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
445.	HBH2025031410111109NU50003019	MASJID AL- IHSAN KAB. SOLOK LEMBANG JAYA SELAYO TANANG BUKIT SILEH HBH2025 Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Kelurahan Selayo Tanang B. Sileh Kecamatan Lembang Jaya KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	04/M-AI/III/2024	02 Maret 2025	88,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
446.	HBH2025031410111084NU50003022	MASJID JIHAD KABUN KAB. PADANG PARIAMAN NAN SABARIS NAGARI PAUH KAMBAR PASAR HBH2025 KORONG PASAR NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Hibah	05/PMJK-NPK/III/2025	04 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
447.	HBH2025031410111111NU50003023	MASJID RAYA GADUR KAB. PADANG PARIAMAN ENAM LINGKUNG KAMPUNG DALAM GADUR HBH2025 KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Gadur Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN	019/MJD/GD/ VI LKG/ 2024	01 Juli 2024	140,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
448.	HBH2025031410110290NU50003029	MASJID AL--JIHAD KAB. PASAMAN BARAT RANAH BATAHAN JORONG TAMING BATAHAN, NAGARI BATAHAN HBH2025 JORONG TAMING BATAHAN NAGARI BATAHAN BARAT Kelurahan Batahan Kecamatan Ranah Batahan KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan dan Kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	01/AL-JIHAD/P-XII/2024	01 Desember 2024	84,475,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
449.	HBH2025031410111115NU50003030	AHU-0015062.AH.01.04-YAYASAN WAKAF ASHHABUL QURAN BUKITTINGGI HBH2025 Jln. Situpo Raya No 20 Gang Mawar, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang. Kota Bukittinggi Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI	PERMOHONAN BANTUAN DANA	03/ MQAQ-BKT/I-2025	01 Januari 2025	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
450.	HBH2025031410111117NU50003033	MASJID ISTIQLAL KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH BARAT KELURAHAN.LABUH BASING HBH2025 Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Bantuan Dana	10/ISTQ-LBS/V-2024	20 Mei 2024	101,040,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
451.	HBH2025031410111119NU50003037	MASJID IV LINGKUANG KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG NAGARI SINGGULING LUBUK ALUNG KORONG SINGGULIANG HBH2025 SINGGULIANG I NAGARI SINGGULIANG LUBUK ALUNG PADANG PARIAMAN Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	-	09 Maret 2025	1,952,480,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
452.	HBH2025031410111122NU50003038	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN RAO UTARA JORONG V MUARO MAGO HBH2025	Permohonan Bantuan Dana	02/MNI-KBM/VI/2024	12 Juni 2024	72,518,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Muaro Mago Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Kelurahan Koto Rajo Kecamatan Rao Utara KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
453.	HBH2025031410111125NU50003039	MASJID ANNUR KAB. SIJUNJUNG TANJUNG GADANG JR. KOTO RANAH NAGARI TANJUNG GADANG HBH2025 Jorong Koto Ranah Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Bantuan Dana	02/01/Tj.G-2025	30 Januari 2025	74,800,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
454.	HBH2025031410111127NU50003041	MASJID ISHLAH KAB. LIMA PULUH KOTA GUGUAK JORONG SIAMANG BUNYI NAGARI KUBANG HBH2025 JORONG SIAMANG BUNYI NAGARI KUBANG Kelurahan Kubang Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MI-SB/2025	06 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
455.	HBH2025031410111118NU50003042	MUSHALLA MUHAJIRIN KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS BUKIT TAMBUN TULANG HBH2025 Kampung Bukit Tambun Tulang Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	03/M.M/II/2024	20 Agustus 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
456.	HBH2025031410111131NU50003043	MASJID RAYA PAUH SANGIK KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JR. AMBACANG KUNYIK NAG. PAUH SANGIK HBH2025 JL. SIMPANG BATUHAMPAR Kelurahan Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	/PMR-PS/2025	18 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
457.	HBH2025031410111132NU50003044	MUSHALLA AL--HUSNA KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JORONG SIMPANG GANTI NAGARI BATUHAMPAR HBH2025 JORONG SIMPANG GANTI NAGARI BATUHAMPAR Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/PPM-AH/2024	07 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
458.	HBH2025031410111129NU50003046	MUSHALLA SURAU NAPA KAMPUNG SOLOK KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM SUNGAI JANIAH NAGARI SIKUCUR V KOTO KAMPUNG DALAM, KAB. PADANG PARIAMAN HBH2025 SUNGAI JANIAH NAGARI SIKUCUR KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH SURAU NAPA KAMPUNG SOLOK (SAFARI RAMADHAN)	01/SNP/KS/III-2025	03 Maret 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
459.	HBH2025031410111144NU50003052	MASJID NURUL HUDA KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG TAMPUNIK NAGARI KAMBANG TIMUR HBH2025 Kampung Tampunik Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	05/PMNH-KP.T/X-2024	24 Oktober 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
460.	HBH2025031410111143NU50003053	MUSHALLA RAUDHATUL JANNAH KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG KOTO RAWANG LAKITAN TIMURHBH2025 KOTO RAWANG Kelurahan Lakitan Timur Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	18/MSH.RJ/XI-2024	11 November 2024	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
461.	HBH2025031410110955NU50003054	MUSHALLA JABAL UHUD KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG SARI BULAN KOTO PULAI NAGARI KAMBANG TIMUR HBH2025 Sari Bulan Koto Pulai Kelurahan Kambang Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	24/MUSH.JB.UH/SRB.KTP/X-2024	14 Oktober 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
462.	HBH2025031410111141NU50003055	431213010020 MAJELIS TAKLIM DARUL FALLAH TERATAK TUIK IV KOTO MUDIEK BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 (MUSHALAH DARUL FALLAH) NAGARI TUIK IV MUDIK Kelurahan Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/MKMT/VIII/2025	04 Februari 2025	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
463.	HBH2025031710111140NU50003084	MASJID NURUL HIKMAH KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG GANTIANG NAGARI KAMBANG TIMUR HBH2025 JORONG GANTIANG Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	22/M.NH.GT.N.KBG.T/III-2024	27 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
464.	HBH2025031710111155NU50003085	MASJID NURUL JADID KAB. SOLOK HILIRAN GUMANTI JORONG TALANG BARAT KENAGARIAN TALANG BABUNGO HBH2025 Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Kelurahan Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	06/NJ/TLB/III/2025	07 Maret 2025	63,550,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
465.	HBH2025031710111153NU50003086	431203710009 MAJLIS TAKLIM MASJID NURUL AMAL JURAI KEL. BUNGUS BARAT KEC. BUNGUS TELUK KABUNG BUNGUS BARAT BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG HBH2025 JARUAI KELURAHAN BUNGUS BARAT KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MAJELIS TAKLIM MASJID NURUL AMAL	01/MT-MNA-BB/I-2024	09 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
466.	HBH2025031710111142NU50003087	431203130040 BKMT PERMATA MASJID DARUL FALAH KOTA BUKITTINGGI JL. SIMPANG AUR DALAM KEL. TAROK DIPO KEC. GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI HBH2025 Jl.Simpang Aur Dalam Kel.Tarok Dipo Kec.Guguak Panjang Kota Bukittinggi	Permohonan Bantuan BKMT	B.01/PMT-Darul Falah/01/2025	30 Januari 2025	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI										
467.	HBH2025031710111157NU50003088	MASJID MUKHLISIN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. TARATAK TJ. GADANG HBH2025 0 Kelurahan 0 Kecamatan 0 0	SAFARI RAMADHAN 2025	08/P-MM/TRT-TG/XI/2024	12 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
468.	HBH2025031710111154NU50003090	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. PESISIR SELATAN RANAH PESISIR LB. GAJAH SUNGAI TUNU HBH2025 BALAI RABA LAMO KAMPUNG KOTO KABUN, NAGARI SUNGAI TUNU Kelurahan Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	-	25 Januari 2025	20,000,000	Tidak Layak	0 0			30 April 2025	0
469.	HBH2025031710111156NU50003091	MUSHALLA NURUL HIKMAH KAB. TANAH DATAR SALIMPAUNG SUMANIK HBH2025 JORONG GUGUAK TINGGI NAGARI SUMANIK KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR Kelurahan 0 Kecamatan Salimpauang KAB. TANAH DATAR	RENOVASI MUSHOLLA NURUL HIKMAH	01/PanRen/Musholla NH//2024	12 Februari 2024	215,561,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
470.	HBH2025031710111146NU50003096	MUSHALLA AL-MUKMIN KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG KOTO PULAI NAGARI KAMBANG TIMUR HBH2025 Kampung Koto Pulai Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	Mohon Bantuan Dana	09/Mus-AI-Mkmin/2024	12 November 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
471.	HBH2025031710111162NU50003097	MASJID DARUSSALAM KAB. PESISIR SELATAN BAYANG AMBACANG KENAGARIAN SAWAH LAWEH PASAR BARU HBH2025 Kampung Ambacang Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Bayang KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	01 Ist/MDKA-KSLPB-KBKPS/03-2025	02 Maret 2025	60,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
472.	HBH2025031710111168NU50003101	MASJID NURUL HUDA KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JR. POGANG NAG. TAEH BUKIK HBH2025 JORONG POGANG Kelurahan Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN	01/PPM/JP.TB/1-2025	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
473.	HBH2025031710111171NU50003103	MASJID NURUL HIKMAH KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG KOTO RAYA NAGARI LAKITAN SELATAN HBH2025 ILALANG LAWEH KAMPUNG KOTO RAYA LAKITAN SELATAN Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	15/Phn/7/2023	27 Juli 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
474.	HBH2025031710111169NU50003104	431213010012 MAJELIS TAKLIM AZZAHRA TELUK KASAI KOTO NAN DUO BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 Teluk Kasai Kelurahan Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	03/KMT-AZ//2025	07 Januari 2025	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
475.	HBH2025031710111158NU50003106	MUSHALLA AL-MUKMIN KOTA PADANG BUNGUS TELUK KABUNG JARUAI KEL. BUNGUS BARAT HBH2025 JARUAI, KELURAHAN BUNGUS BARAT, KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG, KOTA PADANG Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MUSHALLA AL MUKMIN (SAFARI RAMADHAN)	01/MAKP/I-2025	18 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
476.	HBH2025031710111172NU50003110	431203710011 MAJLIS TAKLIM MUSHALLA MIFTAHUL JANNAH JL. BATUNG KEL. TELUK KABUNG UTARA KEC. BUNGUS TELUK KABUNG PADANG TELUK KABUNG UTARA BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG HBH2025 BATUNG RT 03 RW 01 KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MAJELIS TAKLIM MIFTAHUL JANNAH	01/MTI-I/2024	22 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
477.	HBH2025031710111178NU50003115	MUSHALLA PINTIR KAYU KAB. PADANG PARIAMAN NAN SABARIS NAGARI SUNUR BARAT KORONG PINTIR KAYU HBH2025 Jln. Pintir kayu nagari sunua barat, kecamatan nan sabariss, kabupaten padang pariaman Kelurahan Sunua Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/Prop-S.PTKY-1/2025	24 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
478.	HBH2025031710111179NU50003116	MASJID JAMI KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR KAMPUNG PADANG NAG.PADANG GALUGUA KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 RAMBAH JR. RAMBAH Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PP-MJ/PDG/II/2022	21 Februari 2022	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
479.	HBH2025031710111177NU50003117	MUSHALLA NURUL ILMI KAB. PESISIR SELATAN KOTO XI TARUSAN KAMPUNG KOTO NAGARI SUNGAI PINANG HBH2025 KAMPUNG KOTO NAGARI SUNGAI PINANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Koto Xi Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MUSHALLA NURUL ILMI	002/Istimewa/MNI-SP/III-2025	03 Maret 2025	20,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
480.	HBH2025031710111182NU50003118	MUSHALLA ISTIQOMAH KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG STKIP YDB PULAU JANTUANG PASA MUDIAK LUBUK ALUNG, KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 Nagari Lubuk Alung Kelurahan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	07/Peng-MI/NLA/II/2025	18 Februari 2025	23,750,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
481.	HBH2025031810111184NU50003123	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN RAO SELATAN AUR TAJUNGKANG HBH2025	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	Istimewa	21 Desember 2022	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		LANSEK KADOK JR. II KOTO PANJANG Kelurahan Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
482.	HBH2025031810111195NU50003139	MASJID AN-NUR KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH UTARA BALAI BARU KEC. PAYAKUMBUH UTARA HBH2025 Jl. Sudirman RT 001 RW 008 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Kelurahan Balai Baru Kecamatan Payakumbuh Utara KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Hibah	011/MA-BB/2025	18 Maret 2025	50,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
483.	HBH2025031810111193NU50003144	MASJID AL-HIDAYAH KOTA PADANG PADANG TIMUR JL.SUNDA NO.15 RT.003 RW.002 KOMPL.PT.KAI HBH2025 Jl. sunda Komp. PT KAI Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID HIDAYAH JL. SUNDA KOMP. PT KAI	017/B/MAH/III/2025	22 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
484.	HBH2025031810111204NU50003147	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN JORONG KAMPUNG CUBADAK NAGARI LINGKUANG AUA HBH2025 JL. KKN DUSUN BARAT KAMPUNG CUBADAK Kelurahan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	SAFARI RAMADHAN	007.SP/ALMD/III/2024	18 April 2024	50,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
485.	HBH2025031810111205NU50003148	MASJID AL-MUHAJIRIN KOTA PADANG LUBUK KILANGAN KOMP. GRIYA ARGO LESTARI III KEL. KOTO LALANG KEC. LUBUK KILANGAN KOTA PADANG HBH2025 HIBAH KE MASJID MUHAJIRIN GRIYA AGRO LESTARI III Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID MUHAJIRIN GRIYA AGRO LESTARI III KEL. KOTO LALANG LUKI PADANG	01/PM-AM/KL-LK/I/2025	22 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
486.	HBH2025031810111206NU50003149	431203050213 MT MIFTAHUL 'IZZAH SIMPANG TIGO SUNGAI ASAM SUNGAI ASAM 2 X 11 ENAM LINGKUNG PADANG PARIAMAN HBH2025 SIMPANG TIGO SUNGAI ASAM, NAGARI SUNGAI ASAM Kelurahan Sungai Asam Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MT.MI.N-SA	08 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
487.	HBH2025031810111113NU50003150	MASJID ISTIQAMAH KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. PADANG AMBACANG NAGARI BT. BALANG HBH2025 JORONG PADANG AMBACANG Kelurahan Batu Balang Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	SAFARI RAMADHAN 2025	23/PMI/PA-BB/2024	18 Desember 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
488.	HBH2025031810111208NU50003152	MUSHALLA AL JABAL NUR KAB. PADANG PARIAMAN IV KOTO AUR MALINTANG PULAI TINGGI KORONG KOTO PANJANG HBH2025 PULAI TINGGI KORONG KOTO PANJANG NAGARI III KOTO AUR MALINTANG SELATAN KECAMATAN IV	HIBAH MUSHALLA AL JABAR NUR PULAI TINGGI (SAFARI RAMADHAN)	02/MAN-KTPJ/II/2025	21 Februari 2025	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang KAB. PADANG PARIAMAN										
489.	HBH2025031810111214NU50003159	MUSHALLA IHSAN SUMUR TUAK KAB. TANAH DATAR PADANG GANTING JORONG KOTO GADANG HILIR, NAGARI PADANG GANTING HBH2025 JORONG KOTO GADANG HILIR, NAGARI PADANG GANTING, KECAMATAN PADANG GANTING, KABUPATEN TANAH DATAR Kelurahan Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting KAB. TANAH DATAR	HIBAH MUSHALLA IHSAN SUMUR TUAK (SAFARI RAMADHAN)	/MI/Pdg 2025	15 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
490.	HBH2025031810111217NU50003162	MASJID NURUL HUDA KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS SUNGAI NYALO KENAGARIAN IV MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS HBH2025 Sungai nyalo Kenagarian IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan Kelurahan Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Mohon Bantuan Dana Hibah	01/PMN/SN/II/2025	12 Februari 2025	267,344,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
491.	HBH2025031910111220NU50003165	MUSHALLA RAUDHAH KOTA PADANG KURANJI KOMP. KEHUTANAN KAMPUNG KELAWI KEL. LUBUK LINTAH HBH2025 Komp Kehutanan Kampung Kelawi Timur Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	05/U/MR/VIII-2023	01 Agustus 2023	135,230,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
492.	HBH2025031910111221NU50003167	MASJID BABUL KHAIRAT KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI JL. TENTARA PELAJAR, KENAGARIAN PAINAN SELATAN HBH2025 Muaro Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Painan Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	02/MBK/PSP/VIII-2024	01 Maret 2025	35,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
493.	HBH2025031910111231NU50003178	MASJID DARUSSALAM KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI KAMPUNG KOTO LAMO, KENAGARIAN SALIDO SARI BULAN HBH2025 Nagari Salido Saribulan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	01/PMD/SSB/II/2025	01 Januari 2025	100,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
494.	HBH2025031910111234NU50003183	431203710013 MAJLIS TAKLIM MUSHALLA RAUDHATUL JANNAH JL. SARASAH KEL. BUNGUS TIMUR KEC. BUNGUS TELUK KABUNG PADANG BUNGUS TIMUR BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG HBH2025 SARASAH KAMPUNG PINANG KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kelurahan	HIBAH MAJELIS TAKLIM MUSHALLA RAUDHATUL JANNAH	03/MT.MRJS.BT/I-2024	05 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG										
495.	HBH2025031910110237NU50003189	MASJID NURUL IBADAH KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG JL. PADAT KARYA RT. 05 RW. 07 KAMPUNG MELAYU TANAH SIRAH PIAI NAN XX LUBUK BEGALUNG HBH2025 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	HIBAH UNTUK MASJID NURUL IBADAH TANAH SIRAH PIAI LUBEG	01/M.N.I-KM/V/2024	13 Mei 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
496.	HBH2025031910110292NU50003193	MASJID BAITURRAHMAN KAB. PASAMAN BARAT SASAK RANAH PESISIR JORONG PADANG HALABAN NAGARI SASAK, KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE HBH2025 JORONG PADANG HALABAN Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana	02/P.MR-BR/JR.PDH/11/2024	13 November 2024	54,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
497.	HBH2025031910111242NU50003194	MASJID MUHSININ KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN DURIAN GUNJO JORONG DURIAN HUTAN NAGARI AIA GADANG HBH2025 JORONG DURIAN HUTAN Kelurahan Aia Gadang Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	SAFARI RAMADHAN 2025	ISTIMEWA	12 Maret 2025	143,740,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
498.	HBH2025031910111243NU50003195	MASJID ISTIQOMAH KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JOR. PARIT DALAM NAGARI TAEH BARUAH. HBH2025 JORONG PARIT DALAM Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PMI-PD//TB/IX/2024	12 September 2024	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
499.	HBH2025031910111244NU50003198	MASJID AL-MUTTAQIN KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH BARAT KEL TANJUNG PAUH. PAYAKUMBUH BARATH HBH2025 Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Bantuan Dana	09/PMA.TP//III-2025	10 Maret 2025	834,955,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
500.	HBH2025031910111247NU50003200	PESANTREN DARUL FALAH SUNGAI TANANG KEL. SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUR KAB.PASAMAN BARATH HBH2025 Nagari Sungai Tanang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Kelurahan Sungai Aua Kecamatan Sungaiaur KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana	021/YPP-DF//III/SP/2025	14 Maret 2025	237,014,820	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
501.	HBH2025031910111251NU50003206	431203710010 MAJELIS TAKLIM MUSHALLA JABAL NUR KOMP RAMBAI, KEL. BUNGUS BARAT, KEC. BUNGUS TELUK KABUNG, PADANG BUNGUS BARAT BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG HBH2025 PERUMNAS RAMBAI SAIYO	HIBAH MAJELIS TAKLIM MUSHALLA JABAL NUR	01/MTIJN/BB/2024	01 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		KELURAHAN BUNGUS BARAT KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kelurahan Bungus Barat Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG										
502.	HBH2025031910111255NU50003210	MUSHALLA NURUL IMAN KOTA SAWAHLUNTO TALAWI DESA KUMBAYAU KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 DESA KUMBAYAU KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO Kelurahan Kumbayau Kecamatan Talawi KOTA SAWAHLUNTO	HIBAH MUSHALLA NURUL IMAN DESA KUMBAYAU (SAFARI RAMADHAN)	/PM.NI/Kby/II/2025	27 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
503.	HBH2025032010111258NU50003212	MASJID UBUDIYAH KAB. PASAMAN PADANG GELUGUR GUNUNG TUA NAG.SITOMBOL KEC.PADANG GELUGUR HBH2025 GUNUNG TUA JR. SELAMAT Kelurahan Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	02/PM-Ubudiyyah/G.Tua/2025	06 Januari 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
504.	HBH2025032010111260NU50003214	MASJID RAYA ANDALAS KOTA PADANG PADANG TIMUR JL. RAYA ANDALAS NO. 56 KELURAHAN ANDALASH HBH2025 Jl Andalas Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	001/C/MRA/III-2025	10 Maret 2025	191,700,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
505.	HBH2025032010111262NU50003215	MASJID ISTIQAMAH KOTA BUKITTINGGI AUR BIRUGO TIGO BALEH JL. KUBU TANJUNG-KUBU TANJUANG HBH2025 Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Bantuan Dana	002/MI-AL/KT/II/2025	13 Maret 2025	170,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
506.	HBH2025032010111263NU50003216	MASJID BADANO KOTA PARIAMAN PARIAMAN TIMUR BUNGO TANJUNG MUDIK HBH2025 KENAGARIAN SUNGAI ROTAN DESA BUNGO TANJUNG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan PARIAMAN Timur KOTA PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN	/MRB-SR/III-2025	13 Maret 2025	177,550,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
507.	HBH2025032010111261NU50003219	MASJID NURUL HUDA KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG JL. RAYA LUBUK BEGALUNG NO. 36 HBH2025 KELURAHAN LUBUK BEGALUNG KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN	01/MNH/LB/IV/25	05 Maret 2025	71,768,451	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
508.	HBH2025032010111266NU50003220	MASJID RAYA SARUASO KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG SARUASO BARAT NAGARI SARUASO HBH2025 JORONG SARUASO BARAT NAGARI SARUASO Kelurahan Saruasos Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA	022/MRS/TJ/SRS-TJ/II/2025	10 Maret 2025	50,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
509.	HBH2025032010111265NU50003221	MUSHALLA MUSHALLA ALHIDAYAH KAB. PASAMAN BARAT PASAMAN JORONG JAMBU NAGARI AUA KUNIANG KEC. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT HBH2025 Jorong Jambu Baru Kelurahan Aua Kuniang Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana Mushalla	01/PBK-MAH/I/2025	10 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
510.	HBH2025032010111269NU50003224	MASJID DARUSSALAM KAB. SOLOK LEMBANG JAYA KOTO GADANG KOTO ANAU HBH2025 Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Kelurahan Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya KAB. SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	98/MRDKA/X/2024	10 Maret 2024	75,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
511.	HBH2025032010111270NU50003225	MASJID DARUL MA'ARIF KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH JL. SB ALAMSAH NO. 32 KEL. PONDOK DUO HBH2025 Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	01/III/MDM/25	14 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
512.	HBH2025032010111271NU50003226	MASJID RAYA PARIT MALINTANG KAB. PADANG PARIAMAN ENAM LINGKUNG PASA BALAI PARIT MALINTANG HBH2025 KORONG PASA BALAI NAGARI PARIK MALINTANG KECAMATAN ANAM LINGKUANG KABUPATE PADANG PARIAMAN Kelurahan Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN	Ist/PMRPM/N-PM/III-2025	02 Maret 2025	82,560,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
513.	HBH2025032010111273NU50003227	MUSHALLA NURUL ISLAM KAB. SOLOK PANTAI CERMIN KAMPUNG TANGAH JORONG KAYU MANANG NAGARI SURIAN KEC. PANTAI CERMIN KAB. SOLOK SUMATERA BARAT HBH2025 KAMPUNG TANGAH JORONG KAYU MANANG NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK Kelurahan Surian Kecamatan Pantai Cermin KAB. SOLOK	HIBAH MUSHALLA NURUL ISLAM JORONG KAYU MANANG (SAFARI RAMADHAN)	/Jr-KT/2024	12 Desember 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
514.	HBH2025032010111274NU50003228	MASJID AL-MUKARRAMAH KOTA PADANG PADANG SELATAN RW 4 SEBERANG PEBAYAN KEL. BATANG ARAU HBH2025 Jl. Seberang Pebayan Rw 04 Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Perhonoran Bantuan Dana	026/PM-ALMH/II/2025	26 Februari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
515.	HBH2025032010111275NU50003230	MASJID RAYA TELUK BAYUR KOTA PADANG PADANG SELATAN JL. SAMARINDA KEL. TELUK BAYUR HBH2025 JALAN SAMARINDA, TELUK BAYUR Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PM/MRTB/II/2025	16 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
516.	HBH2025032010111278NU50003232	MASJID PAHLAWAN KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI LUMPO, KENAGARIAN LUMPO HBH2025 LUMPO, KENAGARIAN LUMPO, KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Kelurahan Lumpo Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MASJID RAYA PAHLAWAN LUMPO (SAFARI RAMADHAN)	04/MR-PL/I/2025	15 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
517.	HBH2025032010111279NU50003233	MASJID TAQWA KAB. PESISIR SELATAN KOTO XI TARUSAN TANJUNG NAGARI NANGGALO HBH2025 TANJUNG NAGARI NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kelurahan Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MASJID TAQWA TANJUNG NANGGALO (SAFARI RAMADHAN)	04/PM/MT-Tjg/III-2025	13 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
518.	HBH2025032010111281NU50003234	MASJID NURUL HIDAYAH KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH JL DIPONEGORO NO. 50 KAMPUNG PONDOK HBH2025 Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Pembangunan Masjid	001/MNH/KPPDK/III-2025	07 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
519.	HBH2025032010111283NU50003240	MASJID AL- MUKARRABIN KAB. AGAM LUBUK BASUNG SURAU AMPANGAN DUSUN II JORONG PADANG TONGGA NAGARI LUBUK BASUNG HBH2025 DUSUN I JORONG PADANG TONGGA NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM Kelurahan Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	HIBAH MASJID AL MUQARRABIN (SAFARI RAMADHAN)	01/PPRM/2025	25 Januari 2025	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000
520.	HBH2025032010111285NU50003241	MASJID NURUL IKHWAN KAMPUNG TONGAH KAB. PASAMAN PANTI KAMPUNG TONGAH JORONG PETOK TIMUR NAGARI PANTI SELATAN HBH2025 KAMPUNG TONGAH JORONG PETOK TIMUR NAGARI PANTI SELATAN KEC. PANTI KAB. PASAMAN Kelurahan Panti Kecamatan Panti KAB. PASAMAN	Pembangunan Masjid	6/PMNI-KPT/2024	07 Mei 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
521.	HBH2025032010111294NU50003245	MASJID BABURRRRAHMAH KOTA BUKITTINGGI MANDIANGIN K. SELAYAN JL. VETERAN KEL. KUBU GULAI BANCAH HBH2025 Kelurahan Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin K. Selayan KOTA BUKITTINGGI	Pembangunan Masjid	02/Masjid-BR/III-2025	10 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
522.	HBH2025032010111293NU50003246	MASJID AL-MUHAJIRIN KOTA PADANG KOTO TANGAH NUANSA INDAH 3 QURUN LAWEH KEL. KOTO PANJANG IKUR KOTO KOTO TANGAH HBH2025 Komp. Nuansa Indah 3 Gurun Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	HIBAH KE MASJID AL MUHAJIRIN KOMP NUANSA INDAH 3	20/PM-AM/II/2025	15 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
523.	HBH2025032010111297NU50003251	MASJID BAITURRAHMAN KOTO HILALANG KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM SIMPANG KOTO HILALANG SIKUCUA TIMUR KEC. V KOTO KAMPUNG DALAM KAB. PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT HBH2025 SIMPANG KOTO HILALANG SIKUCUA TIMUR KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH MASJID BAITURRAHMAN	/MB/KSKH/1-2024	07 September 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
524.	HBH2025032110111305NU50003258	MASJID NURUL IMAN KAB. PASAMAN RAO KAMPUNG PETANI JORONG VI SORIK HBH2025 KAMPUNG PETANI JR.VI SORIK Kelurahan Taruang Taruang Kecamatan Rao KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	01/PMNI/KP.P VI/V/2024	06 Mei 2024	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
525.	HBH2025032110111287NU50003260	13.GR.J.SMBR.363 GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA (GKII) PADANG JL. PASAR MELINTANG DALAM NO.17 KEL.BELAKANG PONDOK HBH2025 Jalan Pasar Melintang Dalam No. 17 RT 02 RW 04 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Perhonoran Bantuan Dana	015/BPJ-GK11PDG/Proposal/X/2024	28 Oktober 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
526.	HBH2025032110111286NU50003263	13.GR.J.SMBR.355 GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS) PEMULIHAN PADANG JL. KAMPUNG SEBELAH III PADANG HBH2025 Jl. Kampung Sebelah IV No.IV RT.002 RW.006 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Perhonoran Bantuan Dana	177/GPPS/SP/06/2024	14 Juni 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
527.	HBH20250321101110868NU50003264	10310805-TK WATHNIL UMMI HBH2025 JL. AMBON NO.14/E Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	RENOVASI ATAP DAN BANGUNAN	20/YWU/XII.2024	16 Desember 2024	86,000,000	Tidak Layak	0 0			30 April 2025	0
528.	HBH2025032110111309NU50003265	MASJID NURUL HUDA KAB. AGAM IV ANGKAT CANDUNG JORONG TANJUNG ALAM NAGARI BIARO GADANG HBH2025 Jorong tanjung alam nagari biaro gadang kecamatan ampek angkek kabupaten agam Kelurahan Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	149/DKM-NH/II/2025	24 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
529.	HBH2025032110111311NU50003267	MASJID NUR SYUHADA KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH JL.TAPIAN PINANG GURUN BAGANRT.02 RW.04 KEL. VI	Permohonan Bantuan Dana	003/MNS-GB/SLK-2025	10 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		SUKUHBH2025 KELURAHAN VI SUKU KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK							Kelembagaan Bina Spiritual			
530.	HBH2025032110111312NU50003268	MASJID DARUSSALAM KAB. PESISIR SELATAN SILAUT KAMPUNG SUMBER SARI NAGARI DURIAN SERIBUHBH2025 Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Durian Seribu Kecamatan Silaut KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	2/PMD/NDS/III-2025	12 Maret 2025	97,335,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
531.	HBH2025032110111314NU50003269	MASJID BAITUR RAHMAN KAB. DHARMASRAYA SITIUNG JORONG KOTO DAULAT NAGARI SUNGAI DUOHBH2025 SUNGAI DUO KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA Kelurahan Sungai Duo Kecamatan Sitiung KAB. DHARMASRAYA	PERMOHONAN BANTUAN	01/MJSD/XII/2024	02 Januari 2025	61,250,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
532.	HBH2025032110111322NU50003270	MASJID DARUSSALAM KAB. AGAM AMPEK NAGARI PADANG KALAM NAGARI SITANANGHBH2025 Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Kelurahan Sitanang Kecamatan Ampek Nagari KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	04/JPP/STNG/II-2019	25 Februari 2019	70,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
533.	HBH2025032110111324NU50003271	MASJID JAMI AL-HIDAYAH KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG TANJUNG RAYA, NAGARI KUMANIS, KECAMATAN SUMPUR KUDUSHBH2025 Jorong Tanjung Raya Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Kelurahan Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Bantuan Dana	01/01/MJA/KMS-2024	04 April 2024	77,600,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
534.	HBH2025032110111325NU50003273	MASJID MASJID TAQWA PASAR USANG KAB. AGAM LUBUK BASUNG JLN. LINDUNG BULAN PASAR USANG LUBUK BASUNG LUBUK BASUNG , KAB. AGAM SUMATERA BARAT HBH2025 Jln Lindung Bulan Pasar Usang Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	05/MT/PU.LBS/III-2021	05 Maret 2025	104,310,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
535.	HBH2025032110111151NU50003275	MASJID NURUL YAQIN KOTA BUKITTINGGI GUGUAK PANJANG BUKIK CANGANGHBH2025 Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kelurahan Bukik Cangang/Kayu Rmg. Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI	Pembangunan Masjid	14/Msjd-NY/BC-KR/Prop/03/2025	10 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
536.	HBH2025032210111332NU50003282	AHU-0009246.AH.01.04 TAHUN 2015 - YAYASAN RUMAH GADANG CEREBRAL PALSYHBH2025	permohonan bantuan dana Hibah	B.03.108/RAGACP/III/2025	18 Maret 2025	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Jln. Jamal-Jamil Nomor 5 RT 05 RW 01 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG										
537.	HBH2025032310111304NU50003288	MUSHALLA AMBACANG KAB. PADANG PARIAMAN NAN SABARIS NAGARI KURAI TAJI TIMUR KORONG AMBACANG HBH2025 Korong Ambacang Nagari Kurai Taji Timur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris KAB. PADANG PARIAMAN	permohonan bantuan dana	Zainil Fajri	04 Februari 0025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
538.	HBH2025032410111344NU50003293	MASJID DARUL AMANAH KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG PERUMAHAN GRIYA ELOK KELURAHAN BATUANG TABA NAN XX HBH2025 Komplek Griya Elok Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Kelurahan Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	07/PMDAGE/BT/III/2025	15 Maret 2025	50,113,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
539.	HBH2025032410111346NU50003297	MASJID NURUL ILMI KAB. PESISIR SELATAN RANAH PESISIR KAMPUNG PALEH KOTO VIII HILIR HBH2025 Paneh Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kecamatan Pesisir Selatan Kelurahan Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	05/P/MNI/XI-2025	17 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
540.	HBH2025032410111350NU50003299	MASJID RAYA KORONG GADANG KOTA PADANG KURANJI JL. RAYA KORONG GADANG KURANJI HBH2025 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	10/P-04/B-1/MRKG/III/2025	24 Maret 2025	407,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
541.	HBH2025032410111348NU50003300	MASJID BAITUL MAKMUR KAB. SOLOK HILIRAN GUMANTI JORONG SUNGAI BATARAK NAGARI SUNGAI ABU HBH2025 Nagari Talang Babungo Kelurahan Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti KAB. SOLOK	Mohon Bantuan Dana Hibah	400.6.2/72/kesra-2025	21 Maret 2025	77,900,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
542.	HBH2025032410111360NU50003308	MASJID NURUL AMAN KAB. AGAM LUBUK BASUNG BATANG PIARAU JORONG SAGO MANGGOPOH HBH2025 BATANG PIARAU JORONG SAGO MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM Kelurahan Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	HIBAH MASJID NURUL AMAN	02/MNA/BP-SAGO/I-2025	13 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
543.	HBH2025032410111358NU50003310	MASJID NURUL IMAN KAB. SOLOK PANTAI CERMIN GADUNG SURIAN HBH2025 JORONG GADUANG NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN	Permohonan Bantuan Dana	001/PP-MNI/XI/2024	29 November 2024	150,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		KABUPATEN SOLOK Kelurahan Surian Kecamatan Pantai Cermin KAB. SOLOK										
544.	HBH2025032410111362NU50003311	MASJID AL-WUSTHA KAB. AGAM PELEMBAYAN ALAHAN ANGGANG JORONG GUMARANG II NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANGHBH2025 ALAHAN ANGGANG JORONG GUMARANG II NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM Kelurahan Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang KAB. AGAM	HIBAH MASJID AL WUSTHA ALAHAN ANGGANG	005/PMAA-JGII-2025	03 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
545.	HBH2025032410111363NU50003312	AHU-0012009.AH.01.04.TAHUN 2020- YAYASAN AL QUDWAH ISLAMIC PESISIR SELATANHBH2025 Jln. Lingkar Baru Cimpu Surantih Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera KAB. PESISIR SELATAN	Perhonoran Bantuan Dana	04/SK-SP/YAIP-RTAQ/VII/2024	25 Juli 2024	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
546.	HBH2025032410111366NU50003315	MASJID BAITURRAHIM KAB. DHARMASRAYA KOTO BESAR JORONG SAKATO NAGARI ABAI SIATHBH2025 NAGARI ABAI SIAT KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA Kelurahan Abai Siat Kecamatan Koto Besar KAB. DHARMASRAYA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	01/M.BR/I-2025	07 Januari 2025	145,550,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
547.	HBH2025032410111367NU50003316	AHU-0000095-AH.01.22-KELUARGA BESAR MARGA GULO (KBMG) PADANG-SUMBARHBH2025 Komplek Vila Mega Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Perhonoran Bantuan Dana	24/BPH-KMBG/PDG/II/2025	14 Februari 2025	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
548.	HBH2025032410111361NU50003318	MASJID AL-HIKMAH KAB. PESISIR SELATAN IV JURAI JL. JENDERAL SUDIRMAN KAMPUNG BALAI LAMO, KENAGARIAN SALIDOHBH2025 Balai Lamo Kelurahan Salido Kecamatan IV Jurai KAB. PESISIR SELATAN	Proposal Permohonan Dana Hibah	002/Masjid. AL-HMK/III/2025	21 Maret 2025	58,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
549.	HBH2025032410111371NU50003320	MASJID NURUL YAQIN KAB. PESISIR SELATAN KOTO XI TARUSAN CUMATEH NAGARI DUKUHBH2025 CUMATEH NAGARI DUKU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kelurahan Duku Kecamatan Koto XI Tarusan KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH MASJID NURUL YAQIN CUMATEH (SAFARI RAMADHAN)	Ist/MNY.C/I-2025	06 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
550.	HBH2025032410111372NU50003321	MUSHALLA MUSHALLA ATH THAYYIBAH KOTA PADANG KURANJI JL.RAYA BELIMBING/NAGARI BELIMBING KEL.KURANJI KEC.KURANJI KURANJI, KOTA PADANG SUMATERA BARAT HBH2025 jln kelok belimbing RT 08 / RW III kelurahan kurangi kecamatan kurangi kota padang Kelurahan Kurangi Kecamatan Kurangi KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/M-AT/KRI/III/2023	10 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
551.	HBH2025032510111376NU50003329	MUSHALLA AL- AZHAR KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO JR. ABDUR	BANTUAN DANA HIBAH	03/PAA/KP/II/2024	16 Januari 2024	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		RAHMANHBH2025 JORONG ABDUL RAHMAN Kelurahan Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo KAB. TANAH DATAR										
552.	HBH2025032510111380NU50003330	MUSHALLA DARUL FALAH KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO UTARA JORONG TANGAH PADANG NAGARI TAPI SELO KECAMATAN LINTAU BUO UTARAHBH2025 JORONG TANGAH PADANG Kelurahan 0 Kecamatan Lintau Buo Utara KAB. TANAH DATAR	HIBAH BANTUAN SOSIAL	002/PSL/TS-2023	16 Maret 2023	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
553.	HBH2025032510111389NU50003338	MASJID AL-HIDAYAH KOTA SAWAHLUNTO SILUNGKANG DESA TARATAK BANCAH KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTOHBH2025 Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota sawahlunto Kelurahan Taratak Boncah Kecamatan Silungkang KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	4/MA-TB/III/2025	03 Maret 2025	64,340,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
554.	HBH2025032510111387NU50003339	MUSHALLA KAPUAH KAB. PADANG PARIAMAN ENAM LINGKUNG NAGARI GADURHBH2025 KORONG KAPUAH, NAGARI GADUR Kelurahan Gadur Kecamatan Enam Lingkung KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	/SKP.GDR-EL/III-2025	05 Maret 2025	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
555.	HBH2025032510111393NU50003341	MASJID NURUL ISLAM KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG PASAR GOMPONG NAGARI KAMBANG BARATHHBH2025 kampung pasar gompong nagari kambang barat kecamatqan lengayang kabupaten pesisir selatan Kelurahan Kambang Barat Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	-	04 Maret 2025	101,325,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
556.	HBH2025032510111394NU50003342	MUSHALLA SURAU KARIANG KOTA PADANG KURANJI JL LUBUK LINTAHHBH2025 JL. PARAK RUMBIO RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN 2025	02/B/PENG/SK/I/2025	02 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
557.	HBH2025032510111395NU50003343	MASJID MUJAHIDIN KOTA SAWAHLUNTO SILUNGKANG DUSUN SUNGAI CACANG SILUNGKANG OSOHBH2025 Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Kelurahan Silungkang Oso Kecamatan Silungkang KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	03/Ms.Mjd/Silk.Oso/2025	06 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
558.	HBH2025032510111392NU50003344	030303201500208 STASI ST. FRANSISKUS ASISI UGAI, DESA MADOBAG, KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIHBH2025 Dusun Ugai Kelurahan Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Perhonoran Bantuan Dana	02/PAN/GK-SYP/VII-2024	08 Juli 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
559.	HBH2025032510111396NU50003345	MASJID AL-KAUTSAR KOTA SOLOK TANJUNG HARAPAN KOMPLEK POLRES SOLOK KECAMATAN TANJUNG HARAPAN HBH2025 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	15/Alkautsar/II/2025	19 Februari 2025	67,500,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
560.	HBH2025032510111388NU50003347	030303201500205 STASI ST. YOHANES PURO PURO, DESA MUARA SIBERUT, KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI HBH2025 Puro Kelurahan Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Perhonoran Bantuan Dana	01/PAN/GK-SYP/VII-2024	08 Juli 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
561.	HBH2025032510111398NU50003349	MUSHALLA NURUL HUDA KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA KP. TANGAH BUKIK SARIK DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA HBH2025 BUKIK SARIAK JORONG BUKIK SARIAK Kelurahan Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-NH/BKS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
562.	HBH2025032510111401NU50003351	MUSHALLA NURUL KHASIIN KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA LAPAU AMBACANG DURIAN KAPEH TIKU UTARA HBH2025 LAPAU AMBACANG JORONG BUKIK BATU APUANG Kelurahan Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN DANA BANTUAN	01/M-NK/LA/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
563.	HBH2025032510111400NU50003352	MUSHALLA MUSHALLA AL- MUKMININ MUNAWWARAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP DUSUN MABOLA DESA SIKAKAP KECAMATAN SIKAKAP SIKAKAP, KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT HBH2025 Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Bantuan Dana	01/MAM/MBL/I/2025	05 Maret 2025	82,950,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
564.	HBH2025032510111404NU50003353	MUSHALLA NURUL BILAD KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA PADANG PANJI DURIAN KAPEH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM HBH2025 PADANG PANJI JORONG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-NB/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
565.	HBH2025032510111403NU50003354	KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 223-338-2021- LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA PROVINSI SUMATERA BARAT HBH2025 Komp. TNI Angkatan Udara Sutan Syahrir Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	Perhonoran Bantuan Dana	01/LPDG-SB/SP/II/2024	05 Januari 2024	50,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
566.	HBH2025032510111399NU50003355	MUSHALLA MUSHALLA AT-TAUWWABIN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JORONG BANCANAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU HBH2025 Jorong Bancan Nagari Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Batu Balang Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Melanjutkan Pembangunan Mushalla Attawwabin	../PP-MA/BB/2024	20 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
567.	HBH2025032510111406NU50003356	MUSHALLA NURUL IMAN KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA SIMPANG JAGUNG SUNGAI SIRAH DURIAN KAPEH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM HBH2025 LAMBAH JORONG BUKIK BATU APUANG Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-AY/BBA/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
568.	HBH2025032510111405NU50003357	MASJID AL-ABROR KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIBERUT UTARA DESA MONGAN POULA KEC. SIBERUT UTARA KAB.KEPULAUAN MENTAWAI HBH2025 Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Manganpoula Kecamatan Siberut Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Bantuan Dana	01/M-AI-Abr/III-2025	07 Maret 2025	111,375,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
569.	HBH2025032510111408NU50003359	MUSHALLA TOPAH KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA HBH2025 NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MT/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
570.	HBH2025032510111407NU50003360	MUSHALLA NURUL TAQWA KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA ANAK AIA TAJUN SUNGAI SIRAH DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA HBH2025 NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-NT/SS/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
571.	HBH2025032510111409NU50003361	MUSHALLA SYUHADA KOTA SAWAHLUNTO TALAWI DUSUN KUNDI DESA TALAWI MUDIK KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 Dusun Kundi Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota sawahlunto Kelurahan Talawi Mudiak Kecamatan Talawi KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	03/MSM TLW/2025	03 Maret 2025	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
572.	HBH2025032510111410NU50003362	MASJID AMALIYAH KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH TIMUR KEL. TIAKAR HBH2025 KOMPLEKS GELANGGANG KUBU GADANG KELURAHAN TIAKAR KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH Kelurahan Padang Tiakar Hilir Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH	PERMOHONAN BANTUAN	-	04 Maret 2025	129,250,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
573.	HBH2025032510111411NU50003363	MASJID ALFALAH KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA DURIAN KAPEH TIKU UTARA HBH2025 NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-AF/DKDS/III-2025	12 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
574.	HBH2025032510111412NU50003365	MASJID TAQWA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP MUARA TAIKAKO DESA TAIKAKAO KECAMATAN SIKAKAP HBH2025 Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Taikako Kecamatan Sikakap KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Bantuan Dana	01/MTT/Tkk/I/2025	05 Maret 2025	82,950,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
575.	HBH2025032510111413NU50003367	MASJID RAYA ALAM SURAMBI SUNGAI PAGU KAB. SOLOK SELATAN SUNGAI PAGU PASIR TALANG HBH2025 Jorong Pasir Talang Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Kelurahan Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	15/PMDS-MB/K/IX/25	03 Maret 2025	60,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
576.	HBH2025032510111415NU50003368	MASJID BAITURRAHMAN KOTA BUKITTINGGI MANDIANGIN K. SELAYAN JL. BANTO DARANO HBH2025 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin K. Selayan KOTA BUKITTINGGI	Permohonan Bantuan Dana	04/PMBD/III-2025	05 Maret 2025	55,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
577.	HBH2025032510111416NU50003369	MASJID AL-FALAH KAB. PASAMAN BONJOL KAMPUNG PASIR HBH2025 Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Kelurahan Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/M-ALFALAH/Bji/2025	12 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
578.	HBH2025032510111418NU50003371	MASJID JAMIK KAB. AGAM BANUHAMPU CINGKARIANG NAGARI CINGKARIANG HBH2025 Cingkariang Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Kelurahan Cingkariang Kecamatan Banuhampu KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	03/PMJ-CKR/XII/2024	20 Desember 2024	75,270,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
579.	HBH2025032510111420NU50003373	MUSHALLA NURUL AKHYAR KAB. PESISIR SELATAN PANCUNG SOAL TALANG PASAK SIMPANG LAMA INDERAPURA HBH2025 Kampung Rawang Gemulau Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	01/SP/M-NA/II/2025	13 Februari 2025	139,336,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
580.	HBH2025032510111419NU50003374	MASJID BAITUL AMAN KAB. TANAH DATAR RAMBATAN JORONG BALIMBING NAGARI BALIMBING HBH2025	PERMOHON BANTUAN HIBAH	06/PMB/BLB/2025	13 Maret 2025	2,257,510,960	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		JORONG BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR Kelurahan Balimbing Kecamatan Rambatan KAB. TANAH DATAR										
581.	HBH2025032510111319NU50003378	431203060629 MAJELIS TAKLIM PERMATA NAGARI KAMANG HILIA NAGARI KAMANG HILIA, KEC. KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM KAMANG HILIA KAMANG MAGEK KAB. AGAM HBH2025 Jl.M Saleh, Dt.Rajo Pangulu Jorong IV Kampuang, Nagari Kamang Hilia, Kec.Kamang Magek,Kab.Agam Kelurahan Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek KAB. AGAM	Pemohonan bantuan BKMT	B-106/Kua.03.06.15/PP.8/03/2025	18 Maret 2025	5,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
582.	HBH2025032510111426NU50003381	MASJID MASJID NURUL HUDA KOTA PADANG KOTO TANGAH JLN. SIDINGIN, KEL. PARUPUK TABING KOTO TANGAH , KOTA PADANG SUMATERA BARAT HBH2025 KELURAHAN PARUKUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	05/PMNH/2025	04 Februari 2025	2,470,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
583.	HBH2025032510111428NU50003382	MASJID ARRAHMAN KOTA SAWAHLUNTO LEMBAH SEGAR DESA LUNTO TIMUR KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar Kota sawahlunto Kelurahan Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	/Masj.Ar-Rah/LT/II/2025	05 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
584.	HBH2025032510111429NU50003383	MASJID JAMI KAB. AGAM IV ANGKAT CANDUNG JORONG KOTO MARAPAK NAGARI LAMBAH HBH2025 Jorong Koto Marapak Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabuapten Agam Kelurahan Lambah Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	01/III/MJK-2025	14 Maret 2025	70,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
585.	HBH2025032510111432NU50003384	MASJID NURUL HAQ KOTA SAWAHLUNTO BARANGIN DESA TALAGO GUNUNG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO HBH2025 Desa Talago Gunung Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Kelurahan Talago Gunung Kecamatan Barangin KOTA SAWAHLUNTO	Permohonan Bantuan Dana	04/MNH/DSN-GB/2025	19 Maret 2025	50,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
586.	HBH2025032510111436NU50003385	MASJID JAMI KAB. AGAM AMPEK NAGARI KAMPUNG BETUNG JORONG KAMPUNG MELAYU NAGARI SITALANG HBH2025 Kampung Betong Jorong Kampung Melayu Nagari Sitalang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Kelurahan Sitalang Kecamatan Ampek Nagari KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	03/MJ.STL/II-2025	20 Februari 2025	57,570,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
587.	HBH2025032510111441NU50003388	MASJID NURUL IMAN KOTA PARIAMAN PARIAMAN UTARA JL. SITI MANGGOPOH NARAS 1 KECAMATAN PARIAMAN UTARA HBH2025 Jl. Siti Manggopoh Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Kelurahan Naras I Kecamatan Pariaman Utara KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	132/MNI-NRS1/2025	25 Maret 2025	548,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
588.	HBH2025032510111443NU50003389	MASJID AL-MUTTAQIN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIBERUT UTARA DESA SIRILOGUI KEC. SIBERUT UTARA HBH2025 Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Sirilogui Kecamatan Siberut Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan Bantuan Dana	02/PPMA/Sr/III/2025	05 Maret 2025	68,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
589.	HBH2025032510111430NU50003393	431203060013 NURUL IMAN JORONG LADANG TIBARAU NAGARI KOTO TANGAH JORONG LADANG TIBARAU NAGARI KOTO TANGAH TILATANG KAMANG AGAM HBH2025 Jorong Ladang tibarau Nagari Koto Tengah Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang KAB. AGAM	Bantuan Dana Hibah	01/MT/NI/Latip/I/2025	18 Januari 2025	10,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
590.	HBH2025032610111343NU50003415	TPQ-431203130002 RTQ PONDOK QURAN DARUL FALAH TAROK DIPO GUGUK PANJANG BUKITTINGGI ALAMAT LENGKAP : JL. SIMPANG AUR DALAM, AUR KUNING HBH2025 Simpang Aur Dalam, Kel.Tarok Dipo, Kec Guguak Panjang, kota Bukittinggi Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang KOTA BUKITTINGGI	Pondok Tahfidz Darul Falah	10/PT/Darul Falah/BKT/XI/2024	20 November 2024	78,200,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
591.	HBH2025032610111288NU50003418	13.GR.J.SMBR.341 BNKP RESSORT PADANG JL. KARYA NO. 6 PADANG, KEL. BELAKANG PONDOK KEC, PADANG SELATAN, KOTA PADANG, KODE OS.25211 HBH2025 Jln. Karya No.06 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	07/R-44/J-PDG/II/2025	10 Februari 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
592.	HBH2025032610111457NU50003421	MUSHALLA SURAU ENSKU POKIAH ANDOMO KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO JORONG LUBUK BATANG LINTAU BUO, KAB. TANAH DATAR SUMATERA BARAT HBH2025 JORONG LUBUK BATANG Kelurahan Buo Kecamatan Lintau Buo KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/SEPO/LB/III/2025	05 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
593.	HBH2025032610111459NU50003423	AHU-0001623.AH.01.08. TAHUN 2021- PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA DI INDONESIA WILAYAH SUMATERA BARA HBH2025 Gurun Dalam No. 1 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Mohon Bantuan Dana Sidang MPL PGIW Sum- Bar	004/PSW-MPL-PGIW.SB/II/2025	05 Februari 2025	30,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
594.	HBH2025032610111460NU50003424	MASJID BAITUL INABAH KOTA PAYAKUMBUH PAYAKUMBUH SELATAN KEL. PADANG KARAMBIA HBH2025 Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan KOTA PAYAKUMBUH	Permohonan Bantuan Dana	001/MBI/II/2025	25 Februari 2025	119,962,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
595.	HBH2025032610111461NU50003426	MUSHALLA SURAU TOBOH DURIAN KAB. PADANG PARIAMAN SINTUAK TOBOH GADANG NAGARI TOBOH GADANG SELATAN KORONG TOBOH DURIAN HBH2025 NAGARI TOBOH GADANG SELATAN KORONG TOBOH DURIAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN Kelurahan Toboh Gadang Kecamatan Sintuak Toboh Gadang KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH SURAU TOBOH DURIAN	01/TBD/II-2024	05 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
596.	HBH2025032610111462NU50003427	MASJID ISTIQOMAH KAB. AGAM IV KOTO JORONG GUGUAK RANDAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO HBH2025 HIBAH KE MASJID ISTIQOMAH JORONG GUGUAK RANDAH Kelurahan Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto KAB. AGAM	HIBAH KE MASJID ISTIQOMAH GUGUAK RANDAH AGAM	01/MIGGR-PGS/III/2025	25 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
597.	HBH2025032610111465NU50003428	MUSHALLA AL- ISTIQOMAH KAB. PASAMAN BARAT GUNUNG TULEH JR. SIMPANG TIGA ALIN, NAGARI MUARA KIAWAI HBH2025 JR. SIMPANG TIGA ALIN, NAGARI MUARA KIAWAI KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunungtuleh KAB. PASAMAN BARAT	HIBAH MUSHALLA AL- ISTIQOMAH JORONG SIMPANG TIGA ALIN	Istimewa/2024	18 Maret 2024	10,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0
598.	HBH2025032610111466NU50003429	431203050293 BKMT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KAMPUNG PAUH CAMPAGO V KOTO KAMPUNG DALAM KAB. PADANG PARIAMAN HBH2025 KAMPUNG PAUH Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	MOHON BANTUAN DANA	01/BKMT/V KOTO/2025	24 Januari 2025	18,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
599.	HBH2025032610111464NU50003431	MASJID RIDHA KAB. TANAH DATAR PARIANGAN SAWAH TANGAH HBH2025 Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Sawah Tangah Kecamatan Pariangan KAB. TANAH DATAR	Permohonan Bantuan Dana	01/PMR/NS/II/2025	10 Maret 2025	225,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
600.	HBH2025032610111467NU50003433	MUSHALLA AIA KASAI KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JL. AIA KASAI, BATUANG BARIRIK, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 JL. AIA KASAI, BATUANG BARIRIK,	HIBAH MUSHALLA AIA KASAI	/PPMAK-JRB/2024	05 Desember 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		NAGARI TANJUNG BARINGIN SELATAN, KECAMATAN LUBUK SIKAPING, KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN										
601.	HBH2025032610111468NU50003434	MASJID BAITURRAHIM KOTA PADANG KOTO TANGAH JL. GOLF NO.18 RT.13, BATIPUH PANJANG HBH2025 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	01/III/MBR/2025	25 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
602.	HBH2025032610111472NU50003435	MASJID BAITUL AMAL KOTA PADANG PADANG TIMUR JL.DR. SUTOMO KELURAHAN KUBU MARAPALAM KECAMATAN ADANG TIMUR HBH2025 Jl Dr Sutomo Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	/MBA/PEMB/III-2025	18 Maret 2025	97,255,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
603.	HBH2025032610111473NU50003436	MASJID NURUL YAQIN KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING BATUNG BARIRIK, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 JORONG BATUNG BARIRIK, NAGARI TANJUANG BARINGIN SELATAN, KECAMATAN LUBUK SIKAPING, KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	HIBAH MASJID NURUL YAKIN BATUANG BARIRIK	05/PPMN-JVI/2023	16 Januari 2023	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
604.	HBH2025032610111475NU50003437	MASJID AL-IHSAN KAB. PADANG PARIAMAN BATANG ANAI KORONG KAMPUNG TANGAH NAGARI BUAYAN LUBUK ALUNG HBH2025 Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	03/April-BYN/IV/2025	11 Maret 2025	2,404,895,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
605.	HBH2025032610111470NU50003438	MUSHALLA AL- AMIN KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG LAWEH MUDIAK NAGARI LADANG PANJANG BARATH HBH2025 Padang Laweh Mudiak Jorong Parit Lubang Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	001/PMAA/./2024	06 Desember 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
606.	HBH2025032610111471NU50003440	MUSHALLA AL--IKHLAS KAB. PASAMAN RAO SELATAN BONDAR GODANG HBH2025 Bondar Godang Jorong Baringin Kelurahan Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	01/PM-ALBG/II/2025	10 Maret 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
607.	HBH2025032610111469NU50003441	MASJID BABUSSALAM KOTA SAWAHLUNTO BARANGIN KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO HBH2025	PERMOHONAN BANTUAN	/MBS-LP/XI/SWL-25	22 Maret 2025	2,612,100,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		LUBANG PANJANG SAWAHLUNTO Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin KOTA SAWAHLUNTO										
608.	HBH2025032610111476NU50003442	MUSHALLA NUR IMAN KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JR. VII MUARA MANGGUNG, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 JR. VII MUARA MANGGUNG, NAGARI TANJUNG BARINGIN SELATAN, KECAMATAN LUBUK SIKAPING, KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	HIBAH MUSHALLA NURUL IMAN JORONG MUARA MANGGUNG	02/MNIJMG/2024	15 November 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
609.	HBH2025032610111478NU50003444	MASJID IKHLAS KOTA PADANG PADANG UTARA JL. GN. TALANG NO.6, GN. PANGILUN, KEC. PADANG UTARA, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25173, INDONESIA HBH2025 JL.TALANG KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN	9/MI-GP/1/2025	10 Januari 2025	50,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
610.	HBH2025032610111479NU50003446	TPQ-411213040276 TPQ HUDA BATIPUAH BARUAH BATIPUH TANAH DATAR ALAMAT LENGKAP : JORONG BATU LIPAI HBH2025 JORONG BATU LIPAI Kelurahan Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh KAB. TANAH DATAR	TPQ MASJID HUDA BATU LAPAI	01/TPA-TPSA/BL/2025	24 Februari 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
611.	HBH2025032610111483NU50003447	MASJID RAYA MUARA MANGGUNG KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING JR. VII MUARA MANGGUNG, NAG. TANJUNG BARINGIN SELATAN HBH2025 JORONG MUARA MANGGUNG KENAGARIAN TANJUANG BARINGIN SELATAN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	HIBAH MASJID RAYA MUARA MANGGUNG	/PMR.MM/IX/2024	12 November 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
612.	HBH2025032610111425NU50003448	MASJID NURUL WAHIDAH KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS JORONG TANJUNG ALAM NAGARI KUMANISH HBH2025 JR TANJUNG ALAM Kelurahan Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID NURUL WAHIDAH	01/MNW/KMS 2025	22 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
613.	HBH2025032610111487NU50003451	431213010017 MAJELIS TAKLIM KHAIRUN NISA' TUIK TUIK IV KOTO MUDIEK BATANG KAPAS PESISIR SELATAN HBH2025 Kenagarian Tui Iv Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana	011/BKMT-KHAIRUL NISAK/XI/2024	14 November 2024	22,500,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
614.	HBH2025032610111481NU50003453	MUSHALLA NURUL IKHLAS KAB. PASAMAN DUO KOTO KAMPUNG UBANGAN SERASAH JORONG AIR	Permohonan Bantuan Dana	01/PMNI/2025	05 Januari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 April 2025	10,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		MANCUR NAGARI CUBADAK TIMUR HBH2025 Kampung Ubangan Serasah Jorong Air Mancur Kelurahan Cubadak Kecamatan Duo Koto KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
615.	HBH2025032610111484NU50003454	MUSHALLA MUSHALLA NUR IKHLAS KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PD. TANJUNG JR. PSR. LD. PANJANG NAGARI LADANG PANJANG HBH2025 Pd. Tanjung Jr. Psr. Ld Panjang Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Mushalla	..	26 April 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
616.	HBH2025032610111482NU50003455	MUSHALLA AZZIKRA KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG PALAK NAGARI LADANG PANJANG HBH2025 SMAN 1 Tigo Nagari Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	000//PPM/III/2024	10 Januari 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
617.	HBH2025032610111480NU50003457	MASJID MASJID PADANG LAWEH KAB. PASAMAN TIGO NAGARI PADANG LAWEH MUDIAK, JORONG PARIT LUBANG HBH2025 Jorong Parit Lubang Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Pencairan Bantuan Dana Hibah	001/PMPL/./2024	13 Juni 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	15,000,000
618.	HBH2025032610111489NU50003458	MASJID NURUL IMAN KAB. SOLOK SELATAN SANGIR JORONG RIMBO TANGAH NAGARI LUBUK GADANG KEC. SANGIR KAB. SOLOK SELATAN HBH2025 RIMBO TANGAH Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir KAB. SOLOK SELATAN	Permohonan Bantuan	01/MNI/III-2024	01 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
619.	HBH2025032710111498NU50003466	MUSHALLA NURUL HIKMAH KOTA PADANG KOTO TANGAH SASOK UBI RT.01/04, KEL.PADANG SARAI HBH2025 SASOK UBI Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	P/001/NURUL HIKMAH/2025/MNH	12 Desember 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
620.	HBH2025032710111499NU50003468	MASJID III KOTO NARAS KOTA PARIAMAN PARIAMAN UTARA JL. SITI MANGGOPOH DUSUN KAMPUNG SETIA DESA BALAI NARAS KECAMATAN PARIAMAN UTARA HBH2025 Desa Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Kelurahan Balai Naras Kecamatan Pariaman Utara KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/PPM.MR.III.NRS/I/2025	12 Januari 2025	160,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
621.	HBH2025032710111334NU50003469	AHU-0016033.AH.01.04.TAHUN 2023-YAYASAN DAARUL MUTTAQIN GENIUS HBH2025 jorong surau pinang nagari ampong gadang kecamatan ampek angkek kabupaten agam Kelurahan Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	Bantuan dana Hibah	07/PONPES_DMG/01/2025	22 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
622.	HBH2025032710111501NU50003470	MASJID RAYA SEI SIRAH KOTA PARIAMAN PARIAMAN TIMUR JL. H.	Permohonan Bantuan Dana	01/Panitia Pemb/2025	04 Maret 2025	162,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		SAMANHUDI HBH2025 Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Kelurahan Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur KOTA PARIAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
623.	HBH2025032710111502NU50003471	MUSHALLA BAITUL. A'LA KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JOR. PADANG PARIK PANJANG HBH2025 JORONG PADANG PARIK PANJANG Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PSBA-PPP/TB/IX/2024	12 September 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
624.	HBH2025032710111503NU50003472	MASJID RAUDHATUL ILMI KAB. AGAM IV ANGKAT CANDUNG JORONG LAMBAH TANGAH NAGARI LAMBAH HBH2025 Jln Biaro Kelurahan Lambah Kecamatan Ampek Angkek KAB. AGAM	permohonan bantuan dana	03/LT/PMRI/2025	01 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
625.	HBH2025032710111296NU50003473	MUSHALLA NURUL FALAH KAB. AGAM AMPEK NAGARI SUBANAK JOR. KAMPUNG MELAYU NAGARI SITALANG HBH2025 Jorong Kmapung Melayu, Nagari Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari. Kabupaten Agam Kelurahan Sitalang Kecamatan Ampek Nagari KAB. AGAM	permohonan bantuan dana	0	13 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
626.	HBH2025032710111500NU50003474	MASJID TAQWA KOTA PADANG PADANG UTARA JL. BERINGIN RAYA NO.4, LOLONG BELANTI, KEC. PADANG UTARA, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT, INDONESIA HBH2025 JALAN RASAK NO.11 LOLONG BELANTI,PADANG UTARA,KOTA PADANG Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	02/PMT/IV/2024	26 April 2024	90,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
627.	HBH2025032710111507NU50003477	MASJID AR-RAHMAN KAB. PADANG PARIAMAN IV KOTO AUR MALINTANG NAGARI III KOTO AMAL PD. BARINGIN BATU BASA HBH2025 Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan bantuan Dana	003/MAR/KB-BB/III/2025	14 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
628.	HBH2025032710111506NU50003478	MASJID AL-MAARIF KAB. TANAH DATAR TANJUNG EMAS JORONG PINTU RAYO NAGARI TANJUNG BARULAK HBH2025 Tanjung Barulak Kelurahan Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas KAB. TANAH DATAR	SAFARI RAMADHAN 2025	003/TB-MAM/III/2025	13 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
629.	HBH2025032710111510NU50003480	MASJID HURRIYYAH KAB. TANAH DATAR LIMA KAUM JORONG MALANA, NAGARI BARINGIN HBH2025 Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Baringin Kecamatan Lima Kaum KAB. TANAH DATAR	Permohonan bantuan Dana	004/PMHURRYAH/III-2025	13 Maret 2025	50,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
630.	HBH2025032710111509NU50003481	01.333.401.6-202.002-DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA HBH2025 Lantai Dua Masjid Asy-syifa RSI Ibnu Sina Belakang Balok Bukitnggi Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh KOTA BUKITTINGGI	HIBAH KE DEWAN DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA BUKITTINGGI	04-B/DDIIBKT/I/2024	15 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
631.	HBH2025032710111512NU50003482	MASJID NURUL IMAN KAB. PESIR SELATAN LENGAYANG LUBUK BEGALUNG NAGARI LAKITAN SELATAN HBH2025 Lubuk Begalung Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang KAB. PESIR SELATAN	Permohonan bantuan Dana	02/M.NI-LKTS/II/2024	17 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
632.	HBH2025032710111514NU50003484	MASJID NURUL HIDAYAH KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TIMUR KOTO PANJANG RT IV KEC. PADANG PANJANG TIMUR HBH2025 KOTO PANJANG KOTA PADANG PANJANG Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	Permohonan Bantuan Dana Hibah	009/MNH-KOPA/BA.03.1/03/2025	22 Maret 2025	4,560,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
633.	HBH2025032710111516NU50003486	MUSHALLA SURAU LUBUK PAUH KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG NAGARI LUBUK PANDAN KP GUCI HBH2025 Korong Kampung Guci Kelurahan Lubuk Pandan Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/SLP/KP-GC/NG-LP/2025	07 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
634.	HBH2025032710111517NU50003488	MASJID HUBBUL ISHLAH KAB. TANAH DATAR LIMA KAUM JORONG PILIANG, NAGARI LIMO KAUM HBH2025 Jorong Piliang Kelurahan Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum KAB. TANAH DATAR	SAFARI RAMADHAN 2025	03/PM-HI/BSK/III/2025	10 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
635.	HBH2025032710111518NU50003489	MASJID RAYA SUNGAI ASAM KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG NAGARI SUNGAI ASAM SEMPANG TIGA HBH2025 Korong Sungai Asam Nagari Sungai Asam Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Sungai Asam Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	Permohonan bantuan Dana	02/MR/N.SA	30 Desember 2024	51,515,640	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
636.	HBH2025032710111485NU50003490	MUSHALLA DARUL UMAM KAB. PASAMAN BARAT LUHAK NAN DUO	Permohonan Bantuan Dana Untuk	01/MSL/DU-PDL/I/2023	17 Oktober 2023	10,000,000	Tidak Layak	00			30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		PADANG LAWASHB 2025 Jorong Padang Laweh Kelurahan Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	Pembangunan Mushalla									
637.	HBH2025032710111519NU50003491	TPQ-411213129144 TPQ AL-AZKAA KAPA LUHAK NAN DUO PASAMAN BARAT ALAMAT LENGKAP : PADANG LAWEH DUSUN IV HBH2025 Jorong Padang Laweh Kelurahan Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo KAB. PASAMAN BARAT	Permohonan Bantuan Dana	001/WY-/III/2023	20 Juli 2023	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
638.	HBH2025032710111521NU50003492	MASJID IKHLAS KOTA PADANG PAUH BATU BUSUAK KELURAHAN LAMBUNG BUKITH HBH2025 Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukik Kecamatan Pauh KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN 2025	002/MI-BB/KLB/III/2025	05 Maret 2025	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
639.	HBH2025032710111513NU50003493	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN RAO JORONG IX PANCAHAN HBH2025 NAGARI TARUANG-TARUANG SELATAN KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN Kelurahan Taruang Taruang Kecamatan Rao KAB. PASAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MNII/JRIVX/III/2025	24 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
640.	HBH2025032710111522NU50003494	MUSHALLA NURUSSYAHIDA KOTA PADANG PADANG TIMUR AUR DURI INDAH VII C- KEL. PARAK GADANG TIMUR KEC. PADANG TIMUR KOTA PADANG HBH2025 JALAN AUR DURI INDAH 7 C Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur KOTA PADANG	SAFARI RAMADHAN 2025	01/03/NS/2025	25 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
641.	HBH2025032710111523NU50003495	MASJID HIDAYATUSSALAM KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TIMUR KOTO PANJANG RT XIII KEC. PADANG PANJANG TIMUR HBH2025 KOTO PANJANG RT XIII KEC.PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	PERMOHON BANTUAN HIBAH	006/mhs/kp/iv/2025	23 Maret 2025	38,155,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
642.	HBH2025032710111524NU50003496	MASJID AL-JIHAD KAB. SOLOK SELATAN PAUH DUO PEKONINA NAGARI ALAM PAUH DUO HBH2025 Jorong Pekonina Nagari Persiapan Pekonina Alam Pauh Duo Kelurahan Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo KAB. SOLOK SELATAN	SAFARI RAMADHAN 2025	03/PKN/III-2025	20 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
643.	HBH2025032710111526NU50003497	MASJID MASJID ASASI KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TIMUR JL. SYEKH IBRAHIM MUSA KELURAHAN SIGANDO HBH2025 JI H Piobang Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	Permohonan Bantuan Dana	01/P-MAS/III/2025	23 Maret 2025	125,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
644.	HBH2025032710111528NU50003500	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN LUBUK SIKAPING SEI. LANDAI, NAG. SUNDATA SELATAN HBH2025 Nagari Sundata selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Kelurahan Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	11/PM-NH/SL/V-2024	07 Mei 2024	100,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
645.	HBH2025032710111529NU50003501	MUSHALLA SURAU BANCAH ULA BANTIANG KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA BUKIK MALINTANG NAGARI TIKU UTARA HBH2025 JORONG BUKIK MALINTANG Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1st/P-MBUB/III-2025	17 Maret 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
646.	HBH2025032710111530NU50003502	MUSHALLA SURAU KEMUNING NURUL IHSAN KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA BUKIK MALINTANG NAGARI TIKU UTARA HBH2025 JORONG BUKIK MALINTANG Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1st/P-KKG/PT/II-2025	19 Februari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
647.	HBH2025032710111535NU50003507	MUSHALLA SURAU GALUANG KAB. TANAH DATAR LINTAU BUO JORONG BUKIT BARISAN NAGARI TIGO JANGKO HBH2025 Jorong Bukit Barisan Kelurahan Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo KAB. TANAH DATAR	HIBAH BANTUAN SOSIAL	01/SG/TJ/III-2022	24 Maret 2025	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
648.	HBH2025032810111538NU50003510	MUSHALLA SURAU PUTIAH KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JORONG DALAM KOTO NAGARI TAEH BARUAH HBH2025 JORONG DALAM KOTO Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/PSP/DK-TB/I/2025	15 Januari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
649.	HBH2025032810111539NU50003511	MASJID AR-RAHIM KAB. LIMA PULUH KOTA PAYAKUMBUH JALAN RAYA PAYAKUMBUH MUNGKA JOR KUBU GADANG NAGARI TAEH BARUAH HBH2025 JORONG KUBU GADANG Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana	01/PMAR-KG/TB/I/2025	14 Januari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
650.	HBH2025032810111542NU50003514	MASJID AL-QUBRA KAB. PESISIR SELATAN RANAH PESISIR LESUNG AIR PELANGAI HBH2025 jl. lesung air koto nan IV Kelurahan Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir KAB. PESISIR SELATAN	HIBAH KE MASJID AL-QUBRA PELANGAI	02/PP-AK/2025	03 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
651.	HBH2025032810111543NU50003515	MUSHALLA RIYADHUL 'ULUM KAB. PADANG PARIAMAN LUBUK ALUNG SIKABU BUKIT LUBUK ALUNG HBH2025 Nagari Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Kelurahan Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KAB. PADANG PARIAMAN	permohonan bantuan dana hibah	istimewa	03 Januari 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
652.	HBH2025033010111544NU50003525	TPQ-61.13.19.11.470 TPA NURUL IMAN AUA KUNIANG PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT ALAMAT LENGKAP : JORONG BUKIK NILAM HBH2025 Jorong Bukik Nilam Nagari Lembah Binuang Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kelurahan Aua Kuniang Kecamatan Pasaman KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	03/PMNI/JBN/X	25 Desember 2024	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
653.	HBH2025033010111552NU50003526	MUSHALLA KAUTSAR ILMI KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG MUARO GAMBOK, NAGARI MUARO HBH2025 Jln Kabun Km1 Jorong Muaro Gambok, Nagari Muaro Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Kelurahan Muaro Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	permohonan bantuan dana	007/Y-KAIL/VII/2024	15 Juli 2024	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
654.	HBH2025033010111553NU50003527	MDT-311213030047 MDT AL-ANWAR JOR. KURNIA KAMANG KAMANG BARU SIJUNJUNG ALAMAT LENGKAP : JR. KURNIA KAMANG NAGARI KAMANG KEC.KAMANG BARU KAB.SIJUNJUNG HBH2025 Jalan Lintas Sumatera Jr. Slmancung Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan KAB. SIJUNJUNG	permohonan bantuan dana	12/P/DT/AI/12/2024	01 Desember 2024	20,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
655.	HBH2025033010111555NU50003529	69968906-SD IT AR-RAHMAN HBH2025 Jorong Lareh Nan Panjang Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah (Pembangunan PAGAR)	05/SPH/PPL/SD-IT/YR/LNP/I/2025	24 Januari 2025	10,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
656.	HBH2025041610111563NU50003532	MUSHALLA RAHMAT BAITULLAH KAB. PADANG PARIAMAN BATANG ANAI KAMPUNG TANJUNG NAGARI KASANG HBH2025 Dusun Tanjung Jorong Korong Sungai Pinang Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Kelurahan Kasang Kecamatan Batang Anai KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/PMRB.III/I/2025	06 Januari 2025	47,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
657.	HBH2025041610111564NU50003533	MASJID AL-IKHLAS RAMALA MAKMUR KAB. TANAH DATAR BATIPUH JORONG LADANG LAWEH NAGARI BATIPUAH BARUAH HBH2025 Jorong Padang Laweh Nagari Batipu Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh KAB. TANAH DATAR	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M-AIRM/LL/III-2025	05 Maret 2025	168,174,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
658.	HBH2025041610111565NU50003534	MASJID NURUL HIKMAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIKAKAP HVA SIKAKAP HBH2025 Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Sikakap Kecamatan Sikakap KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan bantuan dana	01/MSJ-NH/HVA/I/2025	05 Maret 2025	107,890,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
659.	HBH2025041610111561NU50003535	MUSHALLA AL-IKHLAS KOTA PADANG PADANG BARAT JALAN PURUS 1 NO. 22 HBH2025 JL. PURUS 1 DALAM NO. 14A Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	PERMOHON BANTUAN HIBAH	03/B/III/MAI/2025	06 Maret 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
660.	HBH2025041610111562NU50003537	MASJID TAUHID KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG BARAT JL KHATIB SULAIMAN NO 77 RT II PASAR BARU HBH2025 JL. KHATIB SULAIMAN NO.77 RT. 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat KOTA PADANG PANJANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	008/MT/PP/III/2025	05 Maret 2025	43,642,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
661.	HBH2025041610111566NU50003538	MASJID MASJID AL-HASAN KAB. PESIRIS SELATAN KOTO XI TARUSAN SAWAH LAWEH NAGARI BATU HAMPA KOTO XI TARUSAN , KAB. PESIRIS SELATAN SUMATERA BARAT HBH2025 Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto Xi Tarusan Kab. Pesisir Selatan Kelurahan Batu Hampa Kecamatan Koto Xi Tarusan KAB. PESIRIS SELATAN	Permohonan bantuan dana	01/PMah-BH/II-2025	24 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
662.	HBH2025041610111559NU50003539	MASJID AL-MADANI KOTA PADANG PADANG UTARA JL. BELIBIS NO.8, AIR TAWAR BAR., KEC. PADANG UTARA, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25132, INDONESIA HBH2025 JL. BELIBIS NO. 08 AIR TAWAR BARAT KECAMATAN PADANG UTARA Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	17/PH/Madaniy-SB/III/2025	03 Maret 2025	579,183,570	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
663.	HBH2025041610111560NU50003540	MASJID JAMIK KAB. DHARMASRAYA KOTO BARU SEBERANG PIRUKO HBH2025 JORONG SEBERANG PIRUKO BARAT Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru KAB. DHARMASRAYA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/MJ/KB-2025	03 Maret 2025	167,950,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
664.	HBH2025041610111574NU50003541	MASJID NURUL IHSAN KAB. LIMA PULUH KOTA LUAK JR. KAPALO KOTO NAG. ANDALEH HBH2025 Jorong Kapalo Koto Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Andaleh Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN	/PM-NI/III.2025	19 Maret 2025	30,500,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
665.	HBH2025041610111572NU50003542	MASJID BABUSSALAM KAB. DHARMASRAYA KOTO BARU KOTO BARU HBH2025 Simpang Iv Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Kelurahan Koto Baru Kecamatan Koto Baru KAB. DHARMASRAYA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	03/Pemb/BBS/III-1/2025	08 Maret 2025	95,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
666.	HBH2025041610111567NU50003543	MASJID AL-IHSAN KOTA PAYAKUMBUH LAMPOSI TIGO NAGORI KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI HBH2025 Kelurahan Koto Panjang Dalam	Permohonan bantuan dana	05.02/MA.KP/II-2025	24 Februari 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori KOTA PAYAKUMBUH										
667.	HBH2025041610111576NU50003544	MASJID AL-MUHAJIRIN KOTA PADANG KOTO TANGAH KOMP.WISMA INDAH 3, KEL.PARUPUK TABING HBH2025 Rw 04 Komplek Wisma Indah III Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	Permohonan Bantuan Dana	02/SP/AMH/IV/2025	09 April 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
668.	HBH2025041610111568NU50003545	HAJI ABDUL KARIM SYU'AIB JL. INYIAK MUDO GUGUAK RANDAH KEL. KOTO TUO KEC. IV KOTO KAB. AGAM HBH2025 Jalan Inyiak Mudo Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarajo Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam Kelurahan Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	17/YAKS/VIII/2024	21 Agustus 2024	965,426,685	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
669.	HBH2025041610111580NU50003546	MASJID AL-AMIN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI SIPORA UTARA TUAPEJAT KM.0KECAMATAN SIPORA UTARA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI HBH2025 Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Kelurahan Tuapejat Kecamatan Sipora Utara KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	Permohonan bantuan dana	01/PP-MA/V-2022	01 Juni 2022	250,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
670.	HBH2025041610111569NU50003547	MASJID AL-IKHLAS KOTA PADANG KOTO TANGAH JL.PARUPUK TABING SIMP GIA RT.04/08 HBH2025 Jalan Parupuk III Rt 01 Rw 08 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/PB/Masjid Al-Ikhlasi/II/2025	17 Februari 2025	3,269,529,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
671.	HBH2025041610111584NU50003548	MASJID NURUL HIDAYAH KOTA SOLOK LUBUK SIKARAH BANDA PANDUNG KEL. TANAH GARAM HBH2025 Bandar Pandung Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah KOTA SOLOK	Permohonan Bantuan Dana	010/MNH-BP/VII/2024	10 Juli 2024	67,500,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
672.	HBH2025041610111582NU50003549	MASJID DARUL KHAIRAT KAB. SIJUNJUNG KOTO VII JR. KOTO TUO NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII HBH2025 Jorong Koto Tuo Tanjung Nagari Tanjung Koto Vii Kabupaten Sijunjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG	Permohonan Bantuan Dana	MDK/NTJ-2024	11 Oktober 2024	432,700,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
673.	HBH2025041610111583NU50003550	MASJID AL-MUTTAQIN KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG BARAT JL M NAZIR DT PAMUNCAK RT XII KEL. SILAIANG BAWAH HBH2025	0104/2025	400/M.ALM/SB/IV-2025	01 April 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat KOTA PADANG PANJANG										
674.	HBH2025041610111575NU50003551	MASJID AINUL YAQIN KAB. AGAM SUNGAI PUA JORONG PADANG KUDO NAGARI BATAGAK HBH2025 Jorong Padang Kudo Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Kelurahan Batagak Kecamatan Sungai Pua KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PMAY-PDK/III-2025	26 Maret 2025	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
675.	HBH2025041610111573NU50003552	MASJID JIHAD KAB. PESISIR SELATAN BAYANG KOTO BARU KENAGARIAN KOTO BERAPAK HBH2025 Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Kelurahan Koto Berapak Kecamatan Bayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	05/MSJ.JHD/04/2025	09 April 2025	65,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	25,000,000
676.	HBH2025041610111581NU50003553	MASJID AR--RAHMAN KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH DEPAN SMKN 2 KOTA PARIAMAN. JL. SAMRATULANGI DESA KAMPUNG BARU KOTA PARIAMAN HBH2025 Jl Sam Ratulangi Desa Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	Permohonan Bantuan Dana	03/AR-KB/SFR-RMDN/III/2025	13 Maret 2025	75,001,189	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
677.	HBH2025041610111578NU50003554	MASJID IHSAN KAB. SIJUNJUNG LUBUAK TAROK JORONG JAMBU LIPO,NAGARI LUBUK TAROK HBH2025 Lubuk Tarok Kecamatan lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Kelurahan Lubuak Tarok Kecamatan Lubuak Tarok KAB. SIJUNJUNG	Permohonan bantuan dana	1.03/prop-msj.ihsan-iii/2025	18 Maret 2025	479,559,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
678.	HBH2025041610111577NU50003555	MASJID HIDAYAH KOTA PADANG PANJANG PADANG PANJANG TIMUR GUGUK MALINTANG RT I KEC. PADANG PANJANG TIMUR HBH2025 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG	Permohonan Bantuan Dana	011/PMH-GUMALA/II/2025	05 Februari 2025	85,200,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
679.	HBH2025041610111571NU50003556	MASJID BAITURRAHMAH KAB. AGAM LUBUK BASUNG JLN. TUANKU NAN RENCEH SIMPANG AMPEK MATO AIR JORONG IV SURABAYO NAGARI LUBUK BASUNG HBH2025 Simpang IV Mato Aia Lubuk Basung Kabupaten Agam Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	permohonan bantuan	01/PR-MBR/VII-2024	18 Juli 2024	1,594,876,750	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
680.	HBH2025041610111570NU50003557	MASJID NURUL ISLAM KAB. SOLOK SELATAN SUNGAI PAGU JR. SIGINTIR NAGARI PASIR TALANG HBH2025 Jorong Sigintir Nagarian Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Kelurahan Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu KAB. SOLOK SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN	/MNIS/SG/III-2025	04 Maret 2025	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
681.	HBH2025041710111579NU50003558	MASJID NURUL HIDAYAH KAB. TANAH DATAR SALIMPAUNG JALAN RAYA BATUSANGKAR ? BUKITINGGI KM.17 HBH2025 Jorong Tabek Patah Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Kelurahan Tabek Patah Kecamatan Salimpauang KAB. TANAH DATAR	Permohonan Bantuan Dana	02/PGR/mesjid/NH/X-2024	02 Oktober 2024	66,080,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
682.	HBH2025041710111585NU50003560	MASJID DARUL MUNAWARAH KAB. AGAM LUBUK BASUNG DURIAN BUNGKUK JORONG II GARAGAHAN NAGARI GARAGAHAN HBH2025 Durian Bungkuk Jorong II Garagahan Nagari Garagahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Kelurahan Geragahan Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	05/M.DRM/N.G/VIII-2024	08 Agustus 2024	1,035,158,841	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
683.	HBH2025041710111586NU50003561	MASJID ALAM KAB. AGAM MATUR JORONG KETAPING NAGARI LAWANG HBH2025 Jorong Ketaping Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam Kelurahan Lawang Kecamatan Matur KAB. AGAM	Permohonan Bantuan Dana	005/M.ALAM/DS/LWG-2023	07 Agustus 2023	2,339,939,171	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	50,000,000
684.	HBH2025041710111591NU50003563	MUSHALLA SYEIH M. SHALEH KAB. PADANG PARIAMAN V KOTO KAMPUNG DALAM KORONG KAMPUNG TANJUNG HBH2025 KORONG KAMPUNG TANJUNG V KOTO KAMPUNG DALAM Kelurahan Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam KAB. PADANG PARIAMAN	HIBAH MUSHOLLAH M. SHALEH TAMPAIK	001/MAH/SN/2025	01 Januari 2025	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	10,000,000
685.	HBH2025041710111590NU50003564	MASJID JAMI' LUBUK BATAPUAK KAB. SIJUNJUNG SUMPUR KUDUS NAGARI UNGGAN HBH2025 LUBUAK BATAPUAK NAGARI UNGGAN Kelurahan Unggan Kecamatan Sumpur Kudus KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID JAMI' LUBUAK BATAPUAK	15/PEM/MJLB-2024	10 Januari 2024	30,000,000	Layak	30,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	30,000,000
686.	HBH2025041710111593NU50003565	MASJID NURUL HUDA KAB. PASAMAN DUO KOTO ANDILAN- JORONG SETIA-NAGARI SIMPANG TONANG SELATAN KECAMATAN DUA KOTO HBH2025 JORONG SETIA, NAGARI SIMPANG TONANG Kelurahan Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto KAB. PASAMAN	PEMBANGUNAN MASJID	002/PM-NHA/III/2025	07 Februari 2025	330,000,000	Layak	37,500,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	37,500,000
687.	HBH2025041710111588NU50003568	MASJID TAQWA KAB. SIJUNJUNG KUPITAN JORONG BATU MANJULUR BARAT NAGARI BATU MANJULUR HBH2025 JORONG BATU MANJULUR BARAT,	HIBAH MASJID TAQWA	01/MT/Bt.M - 2025	23 Februari 2025	40,000,000	Layak	40,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	40,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		NAGARI BATU MANJULUR Kelurahan Batu Manjulur Kecamatan Kupitan KAB. SIJUNJUNG										
688.	HBH2025041710111589NU50003569	69803626-PAUD AR RAHMAH HBH2025 TELUK KABUNG UTARA Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH PAUD AR RAHMAH	02/PAUD AR-RAHMAH/III/2025	20 Maret 2025	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
689.	HBH2025041710111592NU50003570	TPQ-432213710001 BUSTANUL QUR'AN KURANJI KURANJI KOTA PADANG ALAMAT LENGKAP : JL. DELIMA I NO.214 PERUMAHAN BELIMBINGHBH2025 DELIMA I NO 214 PERUMAHAN BELIMBING Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Mohon Bantuan Dana untuk Pembangunan Tahfidz Bustanul Qur'an	025/YASB/II/2025	17 Februari 2025	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
690.	HBH2025041710111596NU50003571	MUSHALLA BAITURRAHMA KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS TAPI AYIE KENAGARAIA N SUNGAI NYALOHBH2025 nagari sungai nyalo IV Koto Mudiek kec. Batang Kapas KAb. Pesisir Selatan Kelurahan Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Proposal Permohonan Bantuan Dana	05/M/IVKM-BK/2024	16 Desember 2024	20,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
691.	HBH2025041710111595NU50003572	MUSHALLA NURUL IKHSAN KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG TANJUNG DURIAN LAKITAN TENGAH HBH2025 kampung tanjung durian nagari lakitan tengah kec. lengayang Kelurahan Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah	02/PMNI-KTJ/VI-2023	16 Juni 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
692.	HBH2025041710111594NU50003573	MUSHALLA BABUSSALAM KAB. PESISIR SELATAN BATANG KAPAS BUKIT TAMBUN TULANG HBH2025 kampung hilir bukit tambun tulang nagari IV koto hile kec. batang kapas kab. pesisir selatan Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas KAB. PESISIR SELATAN	Permohonan Bantuan Dana Hibah	04/PM/MBS/KPH/X/2025	18 Oktober 2023	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000
693.	HBH20250422101110637NU50003574	10310679-TK AL KARAMAH HBH2025 JORONG SIKABU-KABU NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Kelurahan Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	permohonan bantuan dana hibah	420/10/TK-ALKM-SKB/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Tidak Layak	0	0		30 April 2025	0
694.	HBH2025042210111180NU50003575	MUSHALLA RIYADHATUL AMAL KOTA PARIAMAN PARIAMAN TENGAH KOMP. PERUMAHAN KAMPUNG BARU HBH2025 Jln. H. Agus salim, Kompleks perumahan dusun selatan desa kampung baru, kecamatan pariaman tengah, kota pariaman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pariaman Tengah KOTA PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	4/mra/kp/p/II/2025	00 0000	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
695.	HBH2025042810111597NU50003852	431203710012 MAJLIS TAKLIM MUSHALLA RAUDHATUL ULUM JL. KOTO GADANG BUNGUS TIMUR BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG HBH2025 KELURAHAN BUNGUS TIMUR KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG Kel. Bungus Timur Kec.Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung KOTA PADANG	HIBAH MAJELIS TAKLIM MUSHALLA RAUDHATUL ULUM	03/MT.MRU.BT/1-2024	05 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 April 2025	5,000,000
696.	HBH202401307954NU50000009	MUSLIMIN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. LANDAI NAGARI HARAU Jorong Landai Kel. Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Harau Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID MUSLIMIN JORONG LANDAI	001/PMMM-HR/2022	13 April 2022	54,847,500	Layak	50,000,000	0		30 Mei 2024	50,000,000
697.	HBH202401307955NU50000010	MASJID DARUL FALAH LIMA PULUH KOTA HARAU JORONG KOTO TANGAH NAGARI LUBUAK BATINGKOK Jorong Koto Tangah Nagari Lubuak Batingkok Kel. Lubuak Batingkok Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Lubuak Batingkok Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DARUL FALAH	02/MDF/JR-KT/1-2023	19 Januari 2023	70,000,000	Layak	50,000,000	0		30 Mei 2024	50,000,000
698.	HBH202402017962NU50000025	TSAMARATUL IKHWAN KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JR. TANJUNG PATI NAG. KOTO TUO JORONG TANJUNG PATI NAGARI KOTO TUO Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	MASJID TSAMARATHUL IKHWAN	026/PPM/III/2023	10 April 2023	52,640,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
699.	HBH202402015472NU50000026	Mushalla Al Falah TANJUNG PATI KENAGARIAN KOTO TUO KECAMATAN HARAU Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA AL FALAH TANJUNG PATI	02/III/MUSHALLA AL FALAH/TJP/2023	01 Maret 2023	22,475,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
700.	HBH202402014972NU50000027	M. THAHER HERRY HARVENY JORONG TIGA ALUR Kelurahan Batu Balang Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA H.M TAHER HERRY HARVENI	07/PMHMT/TA/2022	03 November 2022	34,970,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
701.	HBH202402025706NU50000032	NURUL HIDAYAH JORONG BATU BALABUAH I Kelurahan Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA NURUL HIDAYAH	01/PM-NH/SN/I/2023	11 Januari 2023	113,880,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	25,000,000
702.	HBH2024030210029NU5000013	TK HARAPAN NAGARI Jorong Pematang Aur Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan, Lima Puluh Kota Kelurahan Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Bantuan Dana TK Harapan Nagari	420/10/TK-HN-SN/BB/II/2024	22 Februari 0004	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
703.	HBH2024030210030NU5000013	TK ANANDA TIGO SAKATO MAHAT Jorong Bungo Tanjung Nagari Maek , Kec Bukik Barisan, Lima Puluh Kota Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	Banrtuan Dana TK Ananda Tigo Sakato Mahat	01/TK-TB.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
704.	HBH2024030210033NU5000014	TK RESTU IBU JORONG KOTO TINGGI III NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN, LIMA PULUH KOTA Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN DANA TK RESTU IBU	01/TK-RI.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
705.	HBH2024030210037NU5000014	TK ANISA BULAKAN, JORONG TANJUANG GADANG Kelurahan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN DANA TK ANISA	420/012/TK ANISA/TG/II-2024	20 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
706.	HBH2024030410046NU5000015	TK BUNGA SETANGKAI Jorong Batang tabik Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal permohonan bantuan dana hibah	420/03/TK BS/II/2024	03 Januari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
707.	HBH2024030510065NU5000016	TK DHARMAWANITA PARIT DALAM Jorong Parit Dalam Kenagarian Taeh Baruah Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	420/04/TK.DW.PD/TBR/II-2024	28 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
708.	HBH2024030510068NU5000017	TK NURUL ILAHI JORONG MADANG KADOK NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Kelurahan Sungai Kamuyang Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	TK NURUL ILAHI	420/08/TK-NI-MDK/II/2024	05 Januari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
709.	HBH2024030510069NU5000017	TK AMANAH BUNDA JORONG PADANG RANTANG NAGARI KOTO TUO Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	TK AMANAH BUNDA	420/09/TK-AB/II/2024	01 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
710.	HBH2024030510072NU5000017	TK BUNDO KANDUANG JORONG KOTO TANGAH NAGARI LUBUAK BATINGKOK Kelurahan Lubuak Batingkok Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	TK BUNDO KANDUANG	420/08/TK-BK/II/2024	20 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
711.	HBH2024030510076NU5000017	TK DARUL SAKINAH Jorong Gurun Nagari Gurun Kecamatan Harau Kelurahan Gurun Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	TK DARUL SAKINAH	420/05/TK-DS/GRN/II-2024	20 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
712.	HBH2024030610086NU5000018	TK ISLAM AMANAH Jorong Padang Kuniang Nagari Situjuah Gadang Kelurahan Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal permohonan Bantuan Dana Hibah	420/04/Permohonan/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
713.	HBH2024030610087NU5000018	TK HARAPAN MASA JORONG KOTO II Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	TK HARAPAN MASA	01/TK-HM.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
714.	HBH2024030610090NU5000019	TK HARAPAN IBU JORONG RONA H Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	TK HARAPAN IBU	01/TK-HI.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
715.	HBH2024030610093NU5000019	TK SYEKH M JAMIL Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuah Limo nagari Kelurahan Tunga Kecamatan Situjuah Limo Nagari KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal permohonan Bantuan Dana Hibah	420/06/TK-SMJ/TKR/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
716.	HBH2024030610092NU5000019	TK KARTIKA 124 Jorong Inbobaleh Barat NAGARI mUNGO Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Mungo Kecamatan Luak KAB. LIMA PULUH KOTA	PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN PAUD	420/015/TK-K/II/2024	24 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
717.	HBH2024030610097NU5000019	TK RESTU BUNDO JORONG BELUBUS Kelurahan Sungai Talang Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	TK RESTU BUNDO	420/07/TK.RB.B.GG/II-2024	23 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
718.	HBH2024030710126NU5000022	TK MTI DALAM KOTO Jorong Dalam Koto, Kenagarian Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota Kelurahan Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	420/05/TK MTI-DLK/I/2024	23 Januari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
719.	HBH2024030710154NU5000023	TK MELATI Jorong KOTO TANGAH NAGARI KOTO ALAM Kelurahan Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	TK MELATI	420/015/TK.ML/KTA/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
720.	HBH2024030810165NU5000024	TK TUNAS HARAPAN GUNTUNG JORONG GUNTUNG Kelurahan Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	03/TK.THG.BB/II/2024	23 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
721.	HBH2024030810168NU5000024	TK AISIYIAH BANJA LOWEH JORONG BANJA LOWEH GODANG Kelurahan Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	YUSNITAWARNI, S.Pd	03/TK.ASY.BJL.BB/II/2024	23 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
722.	HBH2024030810169NU5000025	TK SYUHADA JOR. KAPALO KOTO NAGARI DURIAN GADANG KEC. AKABILURU KAB. LIMA PULUH KOTA SUMBAR Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	TK SYUHADA	420/15/KEP.TK SY/DG/III/2024	07 Maret 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
723.	HBH2024031110233NU5000028	TK PAUD AL IKHLAS Jl. H Darwis Dt Tumanggung Jorong Tanjung ateh Nagari Taram Kecamatan harau kabupaten Lima Puluh Kota Kelurahan Taram Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	06/TK-YPI/AL-TRM/II/2024	21 Maret 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
724.	HBH2024031110235NU5000028	TK BUNGA TANJUNG JORONG TIGO BALAI NAGARI LUBUAK BATINGKOK Kelurahan Lubuak Batingkok Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	420/ /TK-BT/II-2024	26 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
725.	HBH2024031410348NU5000041	BKMT JL RAYA PAGANG NANGGALO PADANG Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	-/bkmt-Kec.Nanggalo/III/2024	08 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
726.	HBH2024031510444NU5000054	BAITUL MAKMUR KAB. PESISIR SELATAN AIRPURA KAMPUNG AIR BATU NAGARI TANAH BAKALI KAMPUNG AIR BATU NAGARI TANAH BAKALI KEC. AIR PURA KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	002/M-B.MAKMUR/III/2024	04 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
727.	HBH2024031510451NU5000055	BABUSSALAM 0 LINGGO SARI BAGANTI HARAPAN JAYA MUARA KANDIS HARAPAN JAYA MUARA KANDIS KEC. LINGGO SARI BAGANTI KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN	01/PMBBSLM/MKP/2024	12 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
728.	HBH2024031510453NU5000056	BAITURRAHIM KAB. PESISIR SELATAN SUTERA KOTO TAROK AMPING PARAK AMPING PARAK KEC. SUTERA KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Amping Parak Kecamatan Sutera KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	Istimewa	06 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
729.	HBH202403157695NU50000563	YAYASAN DAARUL QURAN BUNAYYA JALAN IKUR KOTO, KELURAHAN KOTO PANJANG, KECAMATAN KOTO TANGAH, KOTA PADANG Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah KOTA PADANG	HIBAH YAYASAN DAARUL QURAN BUNAYYA	004/YDQB-PTB-RTB/2023	13 Februari 2023	50,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
730.	HBH2024031510461NU5000058	TK BUNGA BANGSA JORONG KOTO MARAPAK NAGARI HARAU KECAMATAN HARAU Kelurahan Harau Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal permohonan bantuan dana hibah	420/08/TK.BB/H.A/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
731.	HBH2024031610486NU5000063	TK PERTIWI PAKAN RABAA Jorong Pakan Rabaa Kelurahan Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah	421/03.08/TK PTW-PKR/LSH-BTP/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
732.	HBH2024031810532NU5000068	TK DHARMAWANITA LABUAH GUNUANG Labuah Gunuang Kelurahan Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal Permohonan bantuan dana Hibah	421/03-04/TK DW/LSH-LBG/II-2024	10 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
733.	HBH2024031810534NU5000069	TK HWK TEGAL REJO JORONG PARAK LUBANG Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	420/03/TK HWK-TR/TG LSH/II-2024	25 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
734.	HBH202402024925NU50000038	KELOMPOK YASIN MUSHALLA AT TAUFIQ JORONG KOTO MESJID Kelurahan Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	KELOMPOK YASIN MUSHALLAAT TAUFIQ	01/KYA/Prop/2/2023	09 Februari 2023	19,110,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
735.	HBH2024031810550NU5000070	PAUD AMANAH JORONG TANJUNG GADANG RUMAH Kelurahan Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Bantuan Dana Hibah	421/03.05/P.AMANAH/LSH-TGR/II/2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
736.	HBH2024031810555NU5000070	TK AL IKHLAS RAGEH JORONG ROGEH Kelurahan Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah	420/06/TK AI IKHLAS/BKS/II-2024	24 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
737.	HBH2024031810561NU5000071	MUTHAHIRIN 0 PAUH SURAU BELENG JL. KOTO TUO KELURAHAN KAPALO KOTO KEC. PAUH KOTA PADANG JL. KOTO TUO KEL. KAPALO KOTO KEC. PAUH KOTA PADANG Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN	Mth/07/2024	13 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
738.	HBH202402024937NU50000039	AL-MUJAHIDIN 0 KAPUR IX JR. KOTO SIALANG ATAS NAGARI SIALANG JORONG KOTO SIALANG ATAS Kelurahan Sialang Kecamatan Kapur IX KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA AL MUJAHIDIN	01/AL-MUJAHIDIN/SLG/023/2022	23 April 2022	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	25,000,000
739.	HBH2024030210028NU5000013	TK PERJUANGAN NENAN JORONG NENAN, NAGARI MAEK, KEC BUKIK BARISAN, KAB LIMA PULUH KOTA Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN DANA TK PERJUANGAN NENAN	01/TK-PJ.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
740.	HBH2024030210034NU5000014	TK KASIH IBU JORONG SOPAN NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	BANTUAN DANA TK KASIH IBU	01/TK-KI.BB/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
741.	HBH2024031810447NU5000072	NURUL JANNAH 0 HARAU KANDANG LAMO JR. SARILAMAK NAGARI SARILAMAK SARILAMAK/KANDANG LAMO Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN PENCAIRAN DANA	01/MNJ/PERMOHONAN/2024	18 Februari 2024	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
742.	HBH2024030410044NU5000015	TK HARAPAN KAMI JORONG KETINGGIAN Kelurahan Sarilamak Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan bantuan Dana TK Harapan kami	14/TK-HK/KTG/II/2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
743.	HBH2024031810591NU5000075	NUR IKHLAS TARAM JORONG PARAK BATU NAGARI TARAM Kelurahan Taram Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	05/TKPAUD-NI/TRM/II-2024	21 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
744.	HBH2024030510060NU5000016	TK MAWAR BARUAH GUNUANG Jorong Kubu Baru Kelurahan Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	420/08/TK-MWR-BG/BB/II/2024	20 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
745.	HBH202404291010674NU50001	HAQQUL YAKIN KAB. LIMA PULUH KOTA LAREH SAGO HALABAN JR. BULAKAN NAGARI T.J. GADANG JORONG BULAKAN Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	001/TG/HY/BLK/2024	02 Februari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
746.	HBH202404291010673NU50001	TPQ AL-FAJAR KAMPONG LUBUK DAGUNG, JR. SIMPANG TIGO UTARA NAGARI SIMPANG KEC. SIMPANG ALAHAN MATI KAB. PASAMAN Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/TPQ FAJR/II/2024	29 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
747.	HBH2024031910242NU5000080	WIRID YASIN NURUL YAKIN 1 Jorong Gunung Seribu Kelurahan Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo KAB. TANAH DATAR	Mohon bantuan hiba	01/WY-NY1/III/TJ-2023	10 Agustus 2023	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
748.	HBH2024031910633NU5000080	KELOMPOK WIRID YASIN MELAYU SAIYO Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-MS/2024	13 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
749.	HBH202404291010672NU50001	TPQ AL-IKLHAS KAMPUANG TABU JORONG BANCAH LAWEH NAGARI SIMPANG UTARA KEC. SIMPANG ALAHAN MATI KAB. PASAMAN Kelurahan Simpang	Permohonan Bantuan Dana	002/TPQ IKLS/II/2024	25 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN										
750.	HBH202404291010670NU50001	TPQ AL-FATHIMIYAH KAMPUANG PINANG JORONG MUDI KAMPUNG PINANG JORONG MUDI SIMPANG NAGARI SIMPANG UTARA KEC. SIMPANG ALAHAN MATI KAB. PASAMAN Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	003/TPQ ALFATHIMIYAH/II/2024	25 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
751.	HBH2024032010635NU5000080	TK TUNAS HARAPAN KOTO TANGAH JORONG DATAR Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	420/05/TK-TH-KTT/BB/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
752.	HBH2024032010643NU5000081	TK AISIYIAH KOTO TANGAH JORONG KOTO TANGAH Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	420/05/TK-ASY-KTH-BB/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
753.	HBH2024032010649NU5000082	TK PERTIWI SUNGAI NANIANG JORONG KUBU BARU Kelurahan Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	420/08/TK-P-SN/BB/II/2024	22 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
754.	HBH2024032110774NU5000095	GEREJA BETHEL INDONESIA JL. KAMPUNG NIAS III NO 1 RT 01 RW 04 KEL. BELAKANG PONDOK KEC. PADANG SELATAN Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN	001/GBI-SG/P,D/II/2024	16 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
755.	HBH2024032110801NU5000098	AL-IRSYAD 0 HARAU JR. KOTO TUO NAGARI KOTO TUO KEC. HARAU JORONG KOTO TUO NAGARI KOTO TUO Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	01/PM/KTT/III/2024	19 Maret 2024	20,240,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
756.	HBH2024032210818NU5000100	KELOMPOK WIRID YASIN TANJUNG JAMBAK orong Simpang Hilir Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-TJ/II/2024	21 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
757.	HBH2024032210823NU5000100	KELOMPOK WIRID YASIN BALAI SAIYO	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-BS/II/2024	22 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
758.	HBH202404291010671NU50001	SHILATURRAHMI KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JORONG SAWAH PADANG NAGARI SARIAK LAWEH JORONG SAWAH PADANG Kelurahan Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/Msjd-SHILATURRAHMI/SP-2024	03 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
759.	HBH2024032210834NU5000101	KELOMPOK WIRD YASIN NURUL FALAH Jorong Garagah Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab.Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RW-NF/II/2024	21 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
760.	HBH202404291010669NU50001	TPQ ANSHARULLAH KAMPUANG PADANG JORONG SIMPANG HILIR NAGARI SIMPANG KEC. SIMPANG ALAHAN MATI KAB. PASAMAN Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	002/TPQ ANSH/II/2024	25 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
761.	HBH2024032210839NU5000102	KELOMPOK WIRID YASIN IKHSAN KP.JAMBAK Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RW-ALKHS/II/2024	20 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
762.	HBH202404291010667NU50001	BAITUSSALAM KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JR. SIMPANG TIGO NAG. SARIAK LAWEH JORONG SIMPANG TIGO Kelurahan Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PBS-SL/II/2024	10 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
763.	HBH2024032210842NU5000102	KELOMPOK WIRID YASIN NURUL IMAN TANJUNG MEDAN Jorong Sawah Laweh Nagari Simpang Kec. Simpang Alah Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-NI/II/2024	21 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
764.	HBH202404291010665NU50001	MUHSININ KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JR. BARUAH ANDALEH NAG. SARIAK LAWEH JORONG BARUAH ANDALEH Kelurahan Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	07/PMI-SL/1/2024	15 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
765.	HBH202404291010663NU50001	BAITURRAHMAN KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JR. KOTO MALINTANG NAG. SARIAK LAWEH JORONG KOTO MALINTANG NAGARI SARIAK LAWEH Kelurahan Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/PMB-SL/II/2024	24 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
766.	HBH202404291010660NU50001	RAWIYA WIRID YASIN NURUL IMAN KAMPUNG JAMBAK JR.BUNGA	Permohonan Bantuan	01/Kel.Yasin-Nurul Iman/IV/2024	10 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		TANJUNG NAGARI MALAMPAH KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN Kelurahan Malampah Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
767.	HBH2024032210846NU5000103	NURUL ISLAM 0 KURANJI JL.KOTO TINGGA DALAM koto tingga dalam kec. kurANJI kota padang Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	022/sRT-Permohonan /III/2024	13 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
768.	HBH202404291010659NU50001	WIRIDYASINALFURQAN JORONG PARIT LUBANG NAGARI LADANG PANJANG BARAT KEC. TIGO NAGARI KAB. PASAMAN Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN	Permohonan Pencairan Dana Hibah	01/KWY-PL/AL-F/XI/2023	21 November 2023	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
769.	HBH2024032210849NU5000103	TAQWA KOTA PADANG KURANJI JL. GUO LUBUK TEMPURUNG KURANJI JL. GUO LOUBUK TEMPURUNG KEC.KURANJI KOTA PADANG Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	Permohonan bantuan pembangunan qubah Masjid	01/M-TAQWA/I/2024	15 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
770.	HBH202404291010657NU50001	KELOMPOK WIRID YASIN AL IKLAS KAMPUANG CANIAGO JORONG MUDIK SIMPANG NAGARI SIMPANG UTARA KEC. SIMPANG ALAHAN MATI KAB. PASAMANI Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RW-SY/II/2024	22 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
771.	HBH2024032210858NU5000104	MAJLIS TAAALIM AL QADAR JL. TEKNOLOGI RAYA NO 17 KEL. SURAU GADANG SITEBA PADANG Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MTA-KISg/kc.Ng/II	28 Februari 2024	50,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
772.	HBH202404291010656NU50001	KELOMPOK YASINAN BUNGA TANJUNG IV KELURAHAN KUBU GADANG Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat KOTA PAYAKUMBUH	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYQ/III/2024	25 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
773.	HBH2024032210859NU5000104	MAJELIS TAKLIM INDONESIA (MTI) MASJID RODIYAH JALAN AIR PAKU RT 03 RW 06 KEL SUNGAIO SAPIH KEC KURANJI KOTA PADANG Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	01/MR/2023	15 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
774.	HBH202404291010655NU50001	YASINAN MUSHALLA BAITURRAHMAH JORONG SUAYAN TINGGI Kelurahan Suayan Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KY-MB-2/2024	02 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
775.	HBH2024032310866NU5000106	KELOMPOK WIRID YASIN TIGO KAMPUANG Jorong Tigo Kampuang Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasanab Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-TK/II/2024	19 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
776.	HBH202404291010654NU50001	MUJAHIDIN KAB. LIMA PULUH KOTA BUKIK BARISAN JR. SOPAN TANAH NAGARI MAEK JORONG SOPAN TANAH NAGARI MAEK Kelurahan Maek Kecamatan Bukik Barisan KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	-	20 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
777.	HBH2024032310867NU5000106	KELOMPOK WIRID YASIN KAMPUANG PADANG Jorong Simpang Hilir Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-KP/II/2024	19 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
778.	HBH202404291010646NU50001	KELOMPOK WIRID YASI NAGARI SIMPANG Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-NS/II/2024	21 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
779.	HBH2024032310868NU5000106	KELOMPOK WIRID YASIN ALMUNAWARAH Jorong Simpang Tigo Utara Nagari Simpang Utara Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-AM/II/2024	28 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
780.	HBH202404281010637NU50001	SYUHADAK KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA SUBANG-SUBANG NAGARI TIKU V JORONG JORONG SUBANG-SUBANG Kelurahan Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	-	01 April 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
781.	HBH202404281010636NU50001	SYUHADA' 0 MATUR JORONG SIDANG TANGAH NAGARI MATUA MUDIAK GUGUAK PASIBUAH SIDANG TANGAH Kelurahan Matua Mudiak Kecamatan Matur KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSJ-NY.SDT/IV/2024	12 April 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
782.	HBH202404281010635NU50001	GEMA 0 MATUR JORONG PADANG GELANGGANG NAGARI MATUA MUDIAK JORONG PADANG GELANGGANG Kelurahan Matua Mudiak Kecamatan Matur KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	02/MUSHALA-GEMA/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
783.	HBH2024032310869NU5000106	KELOMPOK WIRID YASIN SAIYO SIMPANG HILIR Jorong Simpang Hilir Nagari Simpang Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman Kelurahan Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati KAB. PASAMAN	Permohonan Bantuan Dana	001/RWY-SY/II/2024	28 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
784.	HBH202404281010633NU50001	AL-HIDAYAH KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA JORONG MASANG NAGARI TIKU V JORONG JALAN MASANG Kelurahan Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	008/BKM.M.AH/VIII/2024	14 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
785.	HBH202404281010631NU50001	AL-IHSAN KAB. AGAM LUBUK BASUNG SANGKIR JORONG III SANGKIR NAGARI LUBUK BASUNG SANGKIR JORONG III SANGKIR Kelurahan Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	05/M.Al-IhsanSkr/IV/2024	23 April 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
786.	HBH2024032510889NU5000108	RODIAH KOTA PADANG KURANJI JL. AIR PAKU SUNGAI SAPIH SIMPANG TIGA AIR PAKU KEL. SUNGAI SAPIH KEC. KURANJI KOTA PADANG Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MR/2024	06 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
787.	HBH202404281010628NU50001	BKMT KEC.TANJUNH MUTIARA TANJUNG MUTIARA Kelurahan Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/BKMT-TJM/IV-2024	03 April 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
788.	HBH202404281010627NU50001	PERMATA KHAIRUNNISA TIKU SELATAN Kelurahan Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1ST/PERMATA.KN/IV-2024	04 April 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
789.	HBH202403251010191NU50001	AL-KHAIRAT 0 PANGKALAN KOTO BARU JR. BANJARANAH NAGARI PANGKALAN JORONG BANJARANAH Kelurahan Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru KAB. LIMA PULUH KOTA	MUSHALLA AL KHAIRAT	01/MA.JR.BJR/V/2024	29 Februari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
790.	HBH202404281010626NU50001	PERMATA AL KHAIRAH NAGARI TIKU V JORONG Kelurahan Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1ST/PERMATA/TU/2024	17 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
791.	HBH202403251010203NU50001	NURUL AMAN KAB. PESISIR SELATAN LINGGO SARI BAGANTI BUKIT PUTUS LUAR BUKIT PUTUS LUAR NAGARI PUNGASAN UTARA KEC. LINGGO SARI BAGANTI KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	ISTIMEWA	23 Mei 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
792.	HBH202404281010624NU50001	NURUL HAKIM KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA SUNGAI SIRAH DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA SUNGAI SIRAH JORONHG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSJD-NH/III-2024	29 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
793.	HBH202404281010622NU50001	IHSAN KAB. AGAM TANJUNG MUTIARA BUKIK BATU APUANG JORONG DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA BUKIK BATU APUANG JORONG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSJD-NI/III-2024	29 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
794.	HBH202403251010207NU50001	KELOMPOK WIRID YASIN NURUL HUDA SUNGAI LANDAI Jorong II Sungai Pandahan Nagari Sundata Selatan Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Kelurahan Sundata	Permohonan Bantuan	01/WY-RB/II-2024	04 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Kecamatan Lubuk Sikaping KAB. PASAMAN										
795.	HBH202404281010621NU50001	NURUL HIKMAH 0 TANJUNG MUTIARA LAPAU AMBACANG DURIAN KAPEH TIKU UTARA LAPAU AMBACANH JORONH DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSHL-NH/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
796.	HBH202403251010216NU50001	MAJELIS TA LIM AN NISA KOMPLEK KPRI JORONG BALAI TINGGI NAGARI GURUN Kelurahan Gurun Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	005/MTA/BLT/III/2024	20 Maret 2024	7,500,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
797.	HBH202404281010620NU50001	SURAU BULAAN 0 TANJUNG MUTIARA BUKIT BATU APUANG DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA BUKIK BATU APUANG JORONG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSHL-BL/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
798.	HBH202404281010619NU50001	NURUL FAJAR 0 TANJUNG MUTIARA SUNGAI SIRAH DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA SUNGAI SIRAH JORONG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSHL-NJ/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
799.	HBH202403251010217NU50001	MARDHATILLAH 0 NANGGALO JL.GAJAH MADA DALAM RT 03/RW II GAJAH MADA DALAM RT03/RW 11 KEC. NANGGALO KOTA PADANG Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo KOTA PADANG	proposal pembuatan dan pemasangan tored	001/mushalla.mardhatilah/03/2024	01 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
800.	HBH202404281010618NU50001	NURUL GHASIQIN 0 TANJUNG MUTIARA KAMPUNG TANGAH BUKIK BATU APUNG DURIAN KAPEH BUKIK BATU APUANG JORONG DUTIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSHL-NH/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
801.	HBH202403251010224NU50001	KELOMPOK YASINAN BAROQAH JORONG BERINGIN INDAH Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYQ/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
802.	HBH202404281010617NU50001	NURUL JIHAD 0 TANJUNG MUTIARA PADANG PANJI DURIAN KAPEH NAGARI TIKU UTARA MUDIAK AIA JORONG DURIAN KAPEH Kelurahan Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MSHL-NJ/III-2024	29 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
803.	HBH202403251010225NU50001	YASINAN HIDAYAH JORONG SIMPANG GANTI Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYH/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
804.	HBH202404281010613NU50001	TAQWA KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG PADANG PANJANG I NAGARI KAMBANG UTARA PADANG PANJANG 1 Kelurahan Kambang Utara Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01.MT/02.2024	28 Februari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
805.	HBH202404281010611NU50001	PESANTREN AL HAFIDZH IBNUHAJAR JORONG GAJAH MATI Kelurahan Lawang Kecamatan Matur KAB. AGAM	PERMOHONAN BANTUAN DANA	202/PAHI/III-2024	16 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
806.	HBH202403251010226NU50001	YASINAN HIDAYAH HASANAH JORONG BERINGIN INDAH Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYH/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
807.	HBH202404051010574NU50001	GEREJA BETHEL INDONESIA SOLAGRACIA JL. KAMPUNG SEBELAH IX NO.7 RT 02 RW 08 KEL KAMPUNG PONDOK KEC. PADANG BARAT Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	PERMOHONAN	007SU/GBI SG/IV/24	01 April 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
808.	HBH202404051010571NU50001	MUSHALLA AL MUHAJIRIN 0 KURANJI RIMBO TAROK RT 001 RW 011 KEL. GUNUNG SARIK KEC. KURANJI KOTA PADANG RIMBO TAROK RT 001 RW 011 KEL. GUNUNG SARIK KEC. KURANJI Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	ISTIMEWA	20 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
809.	HBH202403251010227NU50001	YASINAN KOTOTINGGA JAYA JORONG KOTO RAMAI Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYKJ/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
810.	HBH202404041010568NU50001	NURUL HIKMAH KAB. PESISIR SELATAN LENGAYANG KOTO RAYA NAGARI LAKITAN SELATAN ILALANG LAWEH KAMPUNG KOTO RAYA Kelurahan Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	15/PHN/7/2023	27 Juli 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
811.	HBH202404041010566NU50001	JABAL UHUD 0 LENGAYANG SARI BULAN KOTO PULAI NAGARI KAMBANG TIMUR SARIBULAN KOTO PULAI NAGARI KAMBANG TIMUR Kelurahan Kambang Timur Kecamatan Lengayang KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	17/MUSH.JB.UH/SRB.KTP/II-2020	19 Februari 2020	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
812.	HBH202403251010228NU50001	YASINAN GANG IKHLAS BERAMAL JORONG KOTO RAMAI NAGARI BATUHAMPAR Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYP/III/2024	10 Februari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
813.	HBH202404041010565NU50001	RAYA SICINCIN KAB. PADANG PARIAMAN 2 X 11 ENAM LINGKUANG NAGARI SICINCIN PAUH JALAN PAUH MUDIK KORONG PAUH Kelurahan Sicincin Kecamatan x Enam Lingkuang KAB. PADANG PARIAMAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/peng-mr/2024	26 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
814.	HBH202404031010559NU50001	YAYASAN BERKAH AMAL SALIH perum mitra utama 2 blok D2/20 Kel banuaran nan XX kec. lubeg Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	048/B/BAS/I-2024	03 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
815.	HBH202404031010553NU50001	HIDAYAH KAB. PASAMAN BARAT SASAK RANAH PESISIR JR. PONDOK KARAMBIA AMPEK JORONG PONDOK Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/M.NH/I-2024	19 Januari 2023	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
816.	HBH202403251010229NU50001	YASINAN TOBEK KOCIAK JORONG KOTO RAMAI NAGARI BATUHAMPAR Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	450/128/Kes/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
817.	HBH202404031010551NU50001	RUMAH TAHFIZH ISRA SHIDDIQ JORONG BANDAR BARU Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir KAB. PASAMAN BARAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA	06/RT.ISQ/XI/2022	10 November 2022	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
818.	HBH202404021010548NU50001	RAYA PASAR BARU KOTA PADANG PAUH JL. DR. M. HATTA PASAR BARU KELURAHAN CUPAK TANGAH PASAR BARU KEL. CUPAK TANGAH KEC. PAUH Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh KOTA PADANG	PERMOHONAN BANTUAN DANA	11/PBD/MRPB/II-2024	01 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
819.	HBH202403251010230NU50001	YASINAN PITOPANG BADUNSANAK JORONG SIMPANG GANTI, NAGARI BATUHAMPAR Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYP/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
820.	HBH202404021010546NU50001	RUMAH TAHFIDZ AR-RAHMAN MASJID JAMIATUL HUDA (SOSIAL AMANAH MASYARAKAT KETAPING) JL DR M HATTA KETAPING Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji KOTA PADANG	HIBAH RUMAH TAHFIDZ QUR'AN MASJID JAMIATUL HUDA	001/YSAM-MJH-KTPG/1/2024	31 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
821.	HBH202403261010231NU50001	MAJELIS TAKLIM AL-HUSNA CANIAGO JORONG SIMPANG GANTI Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYP/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
822.	HBH202404021010545NU50001	NURUL JANNAH KOTA PADANG LUBUK BEGALUNG GATES NAN XX JL PALEMBANG RT 001/ RW 002 KELURAHAN GATES NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung KOTA PADANG	HIBAH MASJID NURUL JANNAH GAUNG	01/MNJ.G/II/2024	28 Januari 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
823.	HBH202404011010532NU50001	FORUM KELOMPOK YASIN HIJRAH PADANG TIAKAR KEC. PAYAKUMBUH TIMUR Kelurahan Padang Tiakar Mudik Kecamatan Payakumbuh Timur KOTA PAYAKUMBUH	FORUM KELOMPOK YASIN HIJRAH	-	03 Januari 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
824.	HBH202403261010232NU50001	TPQ AR-RAHMAH JORONG BATU TANYUH NAGARI KOTO TANGAH Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/TPQA-BT/III/2023	06 Maret 2023	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	10,000,000
825.	HBH202403301010505NU50001	TK RAFLESIA BALAI TALANG JORONG BALAI TALANG NAGARI GUGUAK VIII KOTO Kelurahan Guguak	Permohonan Dana Hibah	420/07/TK.RF.BLT/II-2024	28 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi,		30 Mei 2024	15,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		VIII Koto Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA							Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
826.	HBH202403261010233NU50001	TPQ MESJID AKBAR JORONG LAKUANG NAGARI KOTO TINGGI Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/TPQ-A/LK-KTT/III-2024	04 Maret 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	10,000,000
827.	HBH202403281010414NU50001	MDTA AR-RAHMAN JORONG KOTO MALINTANG-SARIAK LAWEH Kelurahan Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	003/MDTA/KTM-SL/I-2024	07 Januari 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	10,000,000
828.	HBH202403281010359NU50001	HASILUL AMAL 0 LINGGO SARI BAGANTI MUARA AIR HAJI MUARA AIR HAJI KEC. LINGGO SARI BAGANTI KAB. PESISIR SELATAN Kelurahan Pasar Lama Muara Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA	Istimewa	22 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
829.	HBH202403261010245NU50001	AR-RAHMAH KAB. LIMA PULUH KOTA AKABILURU JORONG BATU TANYUH NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MA/III/2023	06 Maret 2023	25,000,000	Layak	25,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	25,000,000
830.	HBH202403271010343NU50001	MUSHALLA QADARULLAH JORONG KAMPUNG MUARO 0 GUNUANG OMEH NAGARI KOTO TINGGI KEC. GUNUANG OMEH KAB. LIMA PULUH KOTA JORONG KAMPUANG MUARO NAGARI KOTO TINGGI Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	/P-Q/KP-MR/2024	15 Maret 2024	25,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
831.	HBH202403261010247NU50001	BAITURAHIM KAB. SIJUNJUNG SIJUNJUNG JORONG SILUKAH NAGARI DURIAN GADANG JORONG SILUKAH NAGARI DURIAN GADANG KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Durian Gadang Kecamatan Sijunjung KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID BAITURRAHIM	/M-BTR/SLK/DR.GD-2023	04 Maret 2023	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
832.	HBH202403271010334NU50001	MASJID AL IKHLAS KAB. LIMA PULUH KOTA HARAU JORONG PULUTAN NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU KAB. LIMA PULUH KOTA JORONG PULUTAN KENAGARIAN KOTO TUO KECAMATAN HARAU Kelurahan Koto Tuo Kecamatan Harau KAB. LIMA PULUH KOTA	Permohonan Dana Hibah	01/P-MAI/J.PLT/III/2024	14 Maret 2024	82,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
833.	HBH202403271010317NU50001	RAWIYA AN NUR BATU KARUT Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari	Permohonan Pencairan Dana Hibah	001/RWY-AN/2023	14 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
		Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman Kelurahan Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari KAB. PASAMAN							Kelembagaan Bina Spiritual			
834.	HBH202403261010249NU50001	AL- IKHSAN 0 GUGUAK GUGUAK NUNANG KEC GUGUAK JORONG GUGUK NUNANG Kelurahan Sungai Talang Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MAL/GGN/II-2024	27 Februari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
835.	HBH202403271010283NU50001	YASINAN SYUHADA JORONG MENARA AGUNG Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/KYQ/III/2024	10 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
836.	HBH202403261010269NU50001	MDTA AKBAR JORONG LAKUANG NAGARI KOTO TINGGI Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MDTA-A/LK-KTT/III-2024	01 Maret 2024	10,000,000	Layak	10,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	10,000,000
837.	HBH202403261010240NU50001	TK BUNDO KANDUANG AMPANG GADANG Jorong Ampang Gadang Kelurahan VII Koto Talago Kecamatan Guguak KAB. LIMA PULUH KOTA	1 unit leptop dan 1 unit infokus	420/07/TK.BK.AG/II-2024	23 Februari 2024	15,000,000	Layak	15,000,000	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		30 Mei 2024	15,000,000
838.	HBH202403261010251NU50001	MAJELIS TAKLIM ISTIQOMAH JORONG RANAH TIBARAU PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MAJELIS TAKLIM ISTIQOMAH	01/KY-PP/PIk-2024	21 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000
839.	HBH202403261010259NU50001	SIMPANG BR 0 AKABILURU JR. PILADANG NAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA JORONG PILADANG Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01/MA/III/2024	22 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
840.	HBH202403261010258NU50001	NURUL HUDA KAB. SIJUNJUNG KAMANG BARU JORONG AIR AMO NAGARI AIE AMO JORONG KOTO TUO NAGARI AIE AMO KECAMATANA KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Aia Amo Kecamatan Kamang Baru KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MASJID NURUL HUDA	01/MNH/AA-2024	18 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
841.	HBH202403261010252NU50001	AL-HIDAYAH TOBEK KOCIAK 0 AKABILURU BATU HAMPAR JORONG KOTO RAMAI Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	01MAH/III/2024	15 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
842.	HBH202403261010257NU50001	MAJELIS TAKLIM AL-IKHLAS JORONG PANTAI CERMIN NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MAJELIS TAKLIM AL-IKHLAS	/KMT-AI/PIk-2024	21 Maret 2024	5,000,000	Layak	5,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	5,000,000

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp) dd
843.	HBH202403261010253NU50001	AL-HIDAYAH 0 IV NAGARI JORONG TANJUNG UDANI NAGARI PALANGKI JORONG TANJUNG UDANI NAGARI PALANGKI KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG Kelurahan Palangki Kecamatan IV Nagari KAB. SIJUNJUNG	HIBAH MUSHALLA AL- HIDAYAH	/M,A/T.U/PIK-2024	25 Januari 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
844.	HBH202403261010256NU50001	MUSHALLA SURAU GUCI 0 AKABILURU BATUHAMPAR AKABILURU LIMA PULUH KOTA JORONG SIMPANG GANTI Kelurahan Batuhampar Kecamatan Akabiluru KAB. LIMA PULUH KOTA	PERMOHONAN BANTUAN DANA	1/PPM-AH/2024	07 Maret 2024	20,000,000	Layak	20,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	20,000,000
845.	HBH2024031510437NU5000053	AL-MANAR KAB. PESISIR SELATAN AIRPURA KAMPUNG AIR MATI NAGRI MUARA INDERAPURA KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA KEC. AIRPURA Kelurahan Muara Inderapura Kecamatan Airpura KAB. PESISIR SELATAN	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	Istimewa	07 Maret 2024	50,000,000	Layak	50,000,000	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		30 Mei 2024	50,000,000
Total						82.321.232.615		22.823.134.000				22.823.134.000

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2025 Perubahan

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (Rp)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (Rp.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025021210110389NU50002266	KORPRI1301-KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) Jl. Batang Antokan No.4, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat KOTA PADANG	Permohonan Dana Hibah untuk kegiatan KORPRI Tahun 2025	S/04/DP.KORPRI.SUMBAR- 2025	30 Januari 2025	1,199,708,900	Layak	1,199,708,900	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		22 April 2025	1,199,708,900
Total						1.199.708.900		1.199.708.900				1.199.708.900

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



Y. Q. ZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2025 Perubahan

No.	KODE USULAN	CALON PENERIMA HIBAH DAN ALAMAT	KEGIATAN USULAN HIBAH	NOMOR SURAT USULAN HIBAH	TANGGAL SURAT USULAN HIBAH	JUMLAH USULAN HIBAH (RP)	REKOMENDASI SKPD (LAYAK / TIDAK LAYAK)	JUMLAH REKOMENDASI SKPD (RP.)	SUB KEGIATAN PENAMPUNG USULAN HIBAH	KETERANGAN REKOMENDASI SKPD	TANGGAL SURAT REKOMENDASI SKPD	PERTIMBANGAN TAPD (Rp)
1.	HBH2025050510111604NU50003858	LANTAMAL-II-KOMANDO ARMADA I PANGKALAN UTAMA TNI AL II Jl. Bukit Peti-peti, Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan KOTA PADANG	Permohonan Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Revitalisasi Sarana dan Prasarana Lantamal II	B/288/III/2025	20 Maret 2025	50,000,000,000	Layak	50,000,000,000	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		14 Mei 2025	50,000,000,000
Total						50.000.000.000		50.000.000.000				50.000.000.000

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KETUA TAPD



YQZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196904061997011002



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT